JOHN ROOSA

dalih pembunuhan massal



GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL

GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

JOHN ROOSA



Jakarta, 2008

Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto

Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul
Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia
©2006 The University of Wisconsin Press, Madison, USA

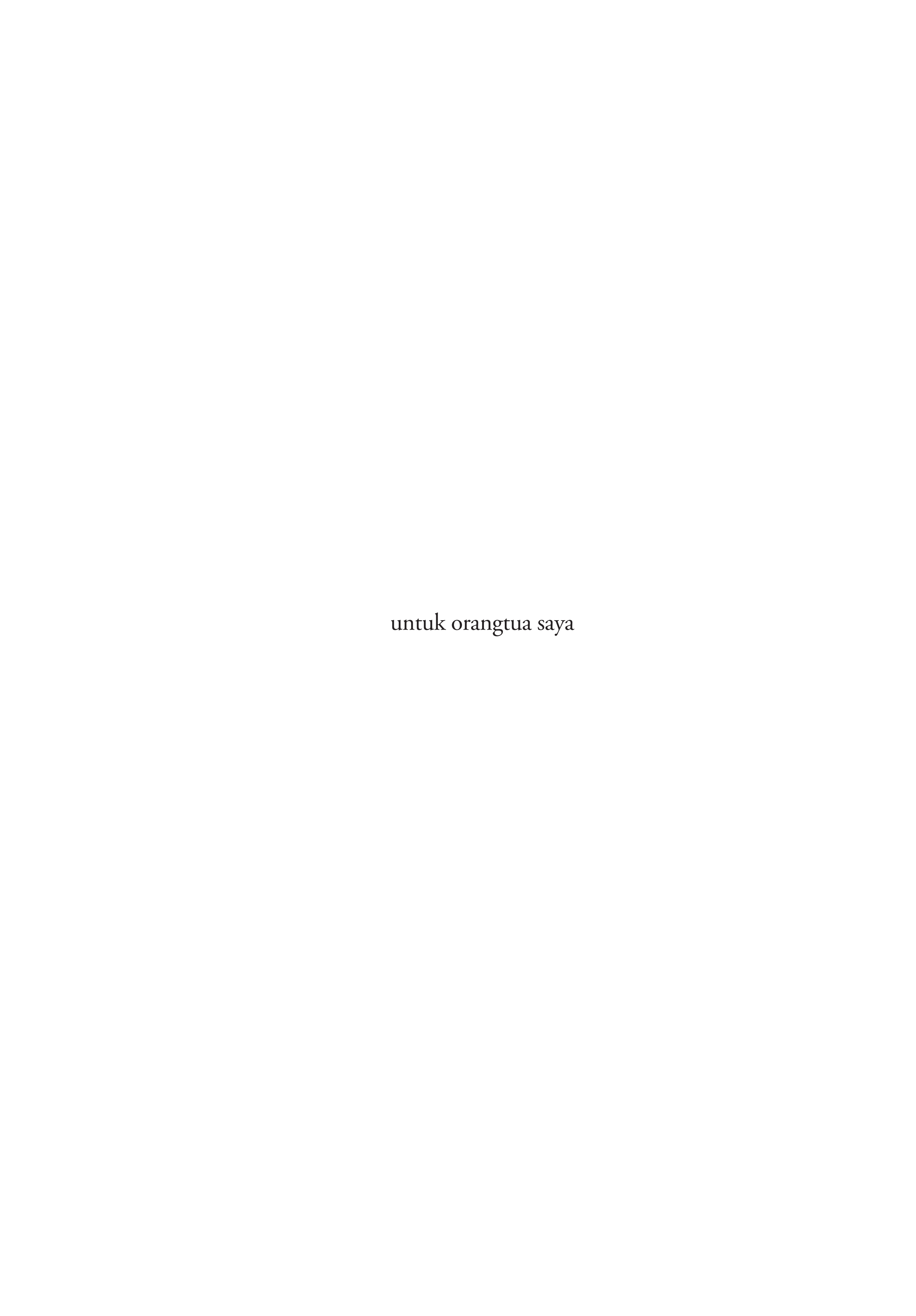
Pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia seizin penerbit asli oleh
Institut Sejarah Sosial Indonesia bekerjasama dengan Hasta Mitra pada Januari 2008.

Penerjemah : Hersri Setiawan
Penyunting: Ayu Ratih dan Hilmar Farid
Penyelaras bahasa: M. Fauzi dan Th. J. Erlijna
Desain sampul dan tata letak: Alit Ambara
Foto sampul: Corbis

Institut Sejarah Sosial Indonesia
Jalan Pinang Ranti No. 3 Jakarta 13560
Email: issi@cbn.net.id

Hasta Mitra
Jalan Duren Tiga Selatan No. 36 Jakarta Selatan
Email: yusak@cbn.net.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
John Roosa,
Dalih Pembunuhan Massal
Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Cetakan 1
Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008
xxiv+392 hlm; 16 cm x 23 cm
ISBN: 978-979-17579-0-4



untuk orangtua saya

DAFTAR ISI

DAFTAR ILUSTRASI

PETA

FOTO DAN KARTUN

TABEL DAN FIGUR

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL

SEKAPUR SIRIH

Saya mulai menulis tentang Gerakan 30 September saat menjadi penerima beasiswa pascadoktoral Rockefeller Foundation di Institute of International Studies di University of California-Berkeley, sebagai bagian dari *Communities in Contention Program* pada 2001-2002. Terima kasih kepada direktur lembaga, Michael Watts, yang telah memberikan saya suasana yang demikian hidup untuk belajar. Joseph Nevins adalah pembaca rumusan-rumusan awal pandangan saya. Kritiknya yang tajam pada saat makan siang di kafe-kafe di Berkeley menyadarkan saya bahwa menulis tentang Gerakan 30 September dalam bentuk karangan jurnal singkat tidak memadai untuk mengurai keruwetan-keruwetannya. Ulasan-ulasannya terhadap rancangan buku yang muncul belakangan sangat membantu saya dalam berpikir tentang penyajian argumen saya. Untuk berbagai-bagai bentuk bantuan di Bay Area, saya berterimakasih kepada Iain Boal, Nancy Peluso, Silvia Tiwon, Jeff Hadler, Hala Nassar, Mizue Aizeki, dan Mary Letterii.

Sidang pendengar di Center for Southeast Asian Studies di University of Wisconsin, Madison, pada akhir 2001 telah mendengarkan uraian versi awal yang masih mentah dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sana, dan untuk ulasan-ulasan mereka yang mendalam. Terima kasih juga untuk Alfred McCoy, yang bertahun-tahun lalu pernah mengajar saya tentang bagaimana mempelajari masalah-masalah kemiliteran dan kudeta, karena sudah mengundang saya memberi ceramah dan mendorong saya menulis buku ini.

Sesudah naskah awal saya diamkan selama dua tahun agar dapat menyelesaikan pekerjaan saya yang berkaitan dengan pengalaman para korban kekerasan massal 1965-66 di Indonesia, pada awal 2004 saat di University of British Columbia saya kembali ke naskah tersebut. Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di jurusan sejarah, Steven Lee yang memberikan ulasan terhadap rancangan keseluruhan buku, dan Erik Kwakkel untuk bantuannya dalam hal kata-kata Belanda. Terima kasih pula kepada Brad Simpson dari University of Maryland, yang membagikan pengetahuannya tentang dokumen-dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat mengenai Indonesia; dan David Webster, lulusan program doktoral dari University of British Columbia, yang membagikan pengetahuannya tentang dokumen-dokumen resmi pemerintah Kanada.

Saya sangat berutang budi kepada dua pengulas tanpa nama yang dengan murah hati telah memberikan pujian mereka bahkan sesudah mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengoreksi sangat banyak kesalahan dalam naskah saya dan mengajukan bantahan terhadap uraian-uraian saya. Saya harap kesabaran mereka ketika menuliskan ulasan-ulasan yang sedemikian kritis dan rinci itu telah saya imbangi dengan perbaikan-perbaikan yang akan mereka temukan dalam buku ini.

Sejak awal 2000 saya melakukan penelitian tentang peristiwa 1965-66 dengan sekelompok peneliti yang tergabung dalam Jaringan Kerja Budaya di Jakarta. Buku ini tumbuh dari penelitian kami bersama dan pendirian lembaga kami, Institut Sejarah Sosial Indonesia. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan berikut ini kiranya tidak layak, oleh karena buku ini sebagian merupakan milik mereka, yaitu: Hilmar Farid, Agung Putri, Razif, Muhammad Fauzi, Rinto Tri Hasworo, Andre Liem, Grace Leksana, Th.J. Erlijna, Yayan Wiludiharto, Alit Ambara, B.I. Purwantari, dan Pitono Adhi. Dua penggembala para budayawan muda di Garuda, Dolorosa Sinaga dan Arjuna Hutagalung, telah memberikan ruang kerja untuk penelitian kami dan ruang terbuka yang teduh di tengah-tengah megalopolis yang hiruk-pikuk sebagai tempat kami bersantai. Johan Abe dan Maryatun terus memberi bantuan tanpa kenal lelah.

Pasangan hidup saya selama tiga belas tahun terakhir, Ayu Ratih, telah memandu saya dalam menulis sejarah Indonesia, sekaligus mene-

gaskan bahwa penulisan sejarah hanyalah satu bagian dari kehidupan aktif yang berjalinan erat dengan kehidupan banyak orang lain. Saya beruntung sudah berada sangat dekat dengan suri teladan sikap kritis dan hangat dalam berhubungan dengan dunia ini.

KATA PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

Saya mengantar terjemahan buku saya dengan sedikit kebimbangan. Mengacu kepada surat keputusan Jaksa Agung setahun lalu, buku-buku teks sejarah yang tidak mencantumkan akhiran "/PKI" setelah singkatan G-30-S harus dibakar. Buku ini tidak menggunakan akhiran tersebut. Tak akan ada gunanya menulis buku ini seandainya saya menambahkan "/PKI." Akhiran tersebut mencerminkan jawaban terhadap pertanyaan tentang siapa yang mendalangi gerakan itu. Ia adalah simbol pernyataan: "PKI mendalangi G-30-S." Apabila jawaban itu didukung oleh bukti-bukti tak tersangkal dan secara luas diterima sebagai fakta historis maka kita tidak perlu mengajukan pertanyaan tentang dalang lagi. Kita bisa tutup buku dengan G-30-S. Tapi banyak sejarawan yang belum menerima jawaban tersebut, atau jawaban lain, sebagai sesuatu yang final, karena terdapat begitu banyak aspek yang aneh, tak terjelaskan tentang G-30-S. Banyak orang Indonesia bingung dengan G-30-S dan berharap menemukan lebih banyak informasi tentangnya. Pemerintah dapat mencoba menulis sejarah dengan keputusan resmi. Tetapi memastikan bahwa setiap penyebutan G-30-S harus diikuti dengan "/PKI" tidak akan mencegah orang untuk bertanya-tanya tentang arti kedua istilah yang harus mereka kaitkan itu: Apa itu G-30-S? Apa itu PKI? Dan bentuk hubungan seperti apa antara kedua istilah yang ditandai dengan garis miring tersebut?

Ketika Suharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 saya tidak mem-

bayangkan bahwa satu dekade kemudian pemerintah akan terus melarang buku-buku yang tidak sesuai dengan propaganda rezim yang lalu. Rezim Suharto mengklaim bahwa PKI bertanggung jawab atas G-30-S; partai itu memimpin atau mengorganisasikan G-30-S. Klaim serupa itu dapat diterima sebagai sebuah hipotesa tetapi kita seharusnya berharap diberi sejumlah bukti sebelum kita menerimanya sebagai kesimpulan. Kita juga harus berharap ada rumusan yang lebih persis. PKI adalah sebuah partai dengan anggota kurang lebih tiga juta orang. Kalau pemerintah berniat bersikukuh bahwa "PKI" mengorganisasikan G-30-S, maka pemerintah harus mampu menjelaskan siapa di dalam PKI yang mengorganisasikan gerakan tersebut. Apakah tiga juta anggota partai secara keseluruhan bertanggung jawab? Atau kah sebagian? Atau hanya pimpinan partai? Apakah pihak pimpinan itu Central Comite atau Politbiro? Sepanjang masa kepemimpinan Suharto pemerintah tidak pernah dengan telak mengidentifikasi siapa di dalam PKI yang bertanggung jawab. Malahan, dengan secara terus-menerus menggunakan istilah "PKI" masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh tiga juta anggota partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapa pun yang berhubungan dengan partai, seperti para anggota organisasi-organisasi sealiran (seperti Lekra), bertanggung jawab.

Dokumen-dokumen internal rezim Suharto lebih terus terang. Kebetulan saya menemukan buku yang ditulis Lemhanas pada 1968 untuk pejabat-pejabat pemerintah yang persis mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas. Buku 80 halaman ini ditulis dalam bentuk tanya-jawab. Berikut satu bagian tentang tanggung jawab "PKI":

> Pertanyaan: Apakah benar bahwa G-30-S/PKI yang menggerakkan adalah PKI dan apakah setiap anggota PKI tentu terlibat dalam G-30-S/PKI?
>
> Jawab: Benar
>
> a. bahwa G-30-S/PKI digerakkan oleh PKI telah dapat dibuktikan baik secara fakta maupun secara hukum di depan sidang-sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh-tokoh G-30-S/PKI.

b. Seluruh anggota PKI dapat dianggap terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung (setiap orang berkewajiban melaporkan pada penguasa bila ia mengetahui bahwa suatu kejahatan akan dilakukan dan juga sesuai dengan prinsip organisasi PKI bahwa keputusan pimpinan partai, mengikat seluruh anggota).[1]

Saya tidak puas dengan kedua poin jawaban itu. Poin pertama, persidangan-persidangan Mahmilub tidak membuktikan bahwa PKI mendalangi G-30-S. Kesaksian-kesaksian terdakwa dan saksi-saksi merupakan timbunan ketidakajegan. Para penuntut tidak mengajukan bukti-bukti tandas kesalahan "PKI" dan para hakim tidak membutuhkannya; mereka memulai prosiding peradilan dengan kepercayaan (yang telah dipropagandakan Angkatan Darat) bahwa "PKI" bersalah. Seperti diamati Harold Crouch saat mengulas beberapa berkas rekaman persidangan Mahmilub pada awal 1970-an, orang dapat dengan mudah menyimpulkan dari berkas-berkas tersebut bahwa sekelompok perwira Angkatan Darat yang tidak puas memimpin G-30-S dan mengajak beberapa pimpinan PKI untuk membantu mereka.[2]

Poin kedua jawaban Lemhanas sama mudah disangkal. Tuduhannya adalah bahwa seluruh tiga juta anggota partai mengetahui tentang G-30-S sebelumnya dan bersalah karena pengabaian ("tidak melaporkan pada penguasa"). Tuduhan ini tidak mungkin benar: saluran-saluran informasi di dalam partai tidak sedemikian ketat sehingga tiga juta orang dapat mengetahui sesuatu yang orang lain, termasuk agen-agen intelijen kunci di dalam Angkatan Darat, tidak tahu. Selain bersalah karena pengabaian, mereka bersalah karena keterkaitan; sebagai anggota partai, mereka bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil para pimpinan ("keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota"). Itulah prinsip kesalahan kolektif – sebuah prinsip yang sudah ditolak oleh semua negara di dunia berdasarkan *rule of law*.

Sebelum 1965 pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kaum nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan pada 1945-49 tidak membunuh orang-orang Belanda hanya karena mereka orang Belanda. Setelah pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an pemerin-

tah Sukarno melarang PSI dan Masjumi karena pemimpin-pemimpin kedua partai mendukung pemberontakan-pemberontakan tersebut. Tetapi pemerintah Sukarno tidak menyatakan bahwa semua anggota kedua partai adalah pengkhianat; pemerintah tidak menahan dan/atau membunuh orang hanya karena mereka anggota PSI atau Masjumi. Sukarno mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam – orang-orang yang memang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah – kecuali pimpinan-pimpinan puncaknya. Bayangkan seandainya prinsip kesalahan kolektif diterapkan pada anggota-anggota Golkar dewasa ini: haruskah setiap anggota Golkar pada masa Orde Baru diminta bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan Suharto?

Satu aspek yang tidak bermanfaat dalam debat tentang G-30-S di Indonesia adalah kecenderungan untuk menggolongkan posisi apa pun apakah sebagai pro-PKI atau anti-PKI. Siapapun yang tidak menyetujui penahanan dan pembunuhan massal atau menunjukkan simpati terhadap tahanan politik dianggap sebagai pendukung PKI. Pipit Rochiat keberatan dengan kecenderungan ini dalam esai yang ditulisnya pada 1984 "Saya PKI atau Bukan PKI?."[3] Menciptakan dikotomi serupa itu sama dengan mengabaikan kemungkinan posisi seperti yang diperlihatkan Rochiat, yaitu tidak membela aksi-aksi PKI sebelum 1965, tidak juga membenarkan kekerasan massal yang diarahkan kepada PKI setelah G-30-S. Kekerasan tersebut mencerminkan bencana kemanusiaan. Saya dapat memahami seandainya seseorang mengambil sikap antagonistik terhadap PKI sebelum 1965: PKI adalah partai yang berniat mendirikan negara satu partai, yang dipimpin oleh orang-orang yang berbicara dan menulis secara dogmatis dan berdasarkan rumus-rumus baku, yang menggalang pengikut-pengikutnya untuk mengintimidasi organisasi-organisasi pesaingnya. Tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas: kebohongan-kebohongan propaganda negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, penghilangan paksa dan pembunuhan kilat. Sekarang, setelah 40 tahun berlalu, kita seharusnya sudah mampu berhenti berpikir semata-mata dalam kerangka dikotomis tentang peristiwa-peristiwa tersebut, seakan-akan tiap kritik terhadap kisah resmi rezim Suharto hanya dapat didorong oleh kecintaan terhadap PKI.

Sudah saatnya pula untuk berhenti berpikir mengikuti stereotip-stereotip basi. Sepanjang kekuasaan Suharto PKI digambarkan sebagai momok jahat sehingga tidak mungkin memahami bagaimana partai itu pernah menjadi demikian populer, dengan jutaan anggota dan simpatisan. Bagaimana mungkin sebegitu banyak orang Indonesia dihujat sebagai iblis? Buku ini ditulis berdasarkan anggapan bahwa anggota-anggota PKI sebenarnya manusia, bukan setan, dan memiliki karakter moral yang tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang-orang lain di Indonesia.

Jika kita bersedia berpikir jernih tentang pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas G-30-S maka kita harus menelisik apa yang sesungguhnya terjadi pada awal Oktober 1965. Benarkah gerakan itu merupakan pemberontakan setiap orang di dalam PKI? Benarkah gerakan itu merupakan percobaan kudeta? Rezim Suharto bersikukuh bahwa G-30-S adalah keduanya: pemberontakan dan percobaan kudeta. Bab satu buku ini mencoba merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beberapa hari pertama Oktober 1965 tanpa ada kesimpulan sebelumnya. Saya menulis bab ini supaya paparannya cocok dengan salah satu dari empat penjelasan yang saya ulas di bab 2. Informasi dasar yang disajikan pada bab 1 mengungkap bahwa G-30-S aneh; beberapa aspek memberi kesan gerakan ini merupakan percobaan kudeta, aspek-aspek lain tidak menunjukkan adanya kudeta. Narasi apapun yang memuaskan tentang kejadian-kejadian pada awal Oktober 1965 pertama-tama harus mengakui keganjilan-keganjilan ini, kemudian mencoba menjelaskannya.

Satu masalah yang saya perhatikan di dalam kebanyakan buku tentang G-30-S bersifat metodologis. Biasanya, seorang penulis mulai dengan sebuah kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab atas G-30-S (PKI, Sukarno, Suharto, dst.), lalu menimbang penjelasan-penjelasan alternatif yang mungkin sebelum menyimpulkan bahwa hipotesanya benar. Sejarawan tidak bekerja dengan cara seperti yang digunakan ilmuwan pengetahuan alam – tingkah laku manusia dan peristiwa-peristiwa sosial tidak diatur oleh hukum-hukum alam – tetapi mereka kadang-kadang mengikuti beberapa prinsip fundamental yang sama. Satu prinsip adalah menghindari untuk memulai suatu penelitian dengan kesimpulan-kesimpulan di tangan. Kita tak akan pernah menemukan sesuatu yang baru dengan cara seperti ini.

Masalah besar lain yang muncul dalam kepustakaan yang sudah ada adalah kurangnya penilaian kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan. Dalam hal G-30-S, sumber-sumbernya memang secara khusus bermasalah. Transkrip interogasi (Berita Acara Pemeriksaan atau Proses Verbal) dan kesaksian di pengadilan militer – dua jenis sumber yang sering digunakan dalam buku-buku tentang G-30-S – tidak dapat dikatakan andal atau pun ajeg. Seorang sejarawan selalu harus berpikir tentang konteks tempat sumber-sumber diproduksi dan mengajukan pertanyaan yang sangat penting: bagaimana seseorang yang mengklaim tahu sesuatu sesungguhnya tahu tentang hal itu?

Salah satu sumber yang paling andal tentang G-30-S adalah *Visum et Repertum* yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jazad tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya. Justru sumber inilah yang tidak diumumkan oleh pemerintah Suharto. Salinan laporan visum tersembunyi hingga 1980-an, ketika dokumen itu ditemukan seorang ilmuwan dari Cornell University.[4] Dari laporan ini kita cukup tahu bahwa apa yang dilaporkan di media yang dikontrol Angkatan Darat pada akhir 1965 tentang bagaimana para perwira dibunuh ternyata palsu. Para perwira tersebut terbunuh oleh tembakan dan luka-luka tusukan bayonet; mereka tidak diiris-iris ribuan kali dengan silet, mata mereka tidak dicungkil, dan mereka tidak pula dimutilasi. Jika kita berpegang pada laporan para dokter, seperti yang saya pikir seharusnya demikian, maka kita harus berasumsi bahwa kisah-kisah tentang penyiksaan para perwira merupakan bagian dari propaganda perang urat syaraf Angkatan Darat terhadap PKI. Kita juga harus mempertimbangkan kisah-kisah apa tentang G-30-S dari rezim Suharto yang palsu dan dokumen-dokumen lain mana yang telah disembunyikan dari penglihatan kita.

Ketiadaan penilaian kritis terhadap sumber-sumber sudah menggiring berbagai macam artikel dan buku yang menyajikan argumen-argumen berdasarkan kisah-kisah palsu oleh propagandis, dokumen-dokumen palsu, dan spekulasi besar-besaran. Misalnya, tidak kurang dari tiga buku yang baru saja diterbitkan mengklaim bahwa Presiden Sukarno entah adalah sang dalang atau salah satu dari sekian dalang G-30-S.[5] Klaim ini tidak berdasar dan absurd. Pada saat menulis buku ini saya berpikir bahwa klaim tersebut bahkan tidak layak ditanggapi.

Tak ada bukti untuknya. Penerbitan ketiga buku ini mendorong saya untuk menulis sangkalan rinci terhadap klaim yang dibuat sebagai esai ulasan untuk sebuah jurnal akademik.[6]

Saya harus menekankan bahwa buku ini hanya tentang G-30-S. Ini bukan buku tentang kekerasan massal yang muncul setelah gerakan itu terjadi walaupun di bagian pengantar saya sampaikan beberapa argumen dasar tentang kekerasan tersebut dan kaitannya dengan G-30-S. Saya beranggapan bahwa lebih banyak penelitian harus dilakukan tentang kekerasan massal pasca G-30-S sebelum sebuah analisis ilmiah yang baik bisa ditulis. Menimbang skalanya, kekerasan pasca G-30-S merupakan topik yang lebih penting daripada G-30-S itu sendiri. Buku ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut tentang kekerasan massal pasca G-30-S dengan menyajikan konteks baru untuk memahami tragedi tersebut. Jika G-30-S lebih jelas mungkin akan lebih mudah untuk memusatkan perhatian pada topik-topik lain yang berkaitan. Lebih banyak pula studi-studi yang perlu digarap tentang kudeta Suharto, misalnya, bagaimana ia mengambilalih media massa, keuangan negara, dan birokrasi sipil.

Saya berharap pembaca akan menghargai proses panjang yang menyertai pembuatan buku ini. Saya menduga beberapa pembaca tak terlalu paham bagaimana suatu buku diterbitkan oleh penerbit universitas. Saya menyerahkan manuskrip bakal buku ini ke University of Wisconsin Press pada 2004. Seorang editor di badan penerbitan ini membacanya dan menilai apakah manuskrip tersebut layak diterbitkan. Si editor mengirim manuskrip ke dua ahli sejarah Indonesia yang kemudian menulis ulasan mereka, menyampaikan penilaian apakah manuskrip ini layak diterbitkan, dan apabila layak, perubahan-perubahan apa yang harus dibuat. Tahap ini disebut ulasan oleh rekan anonim. Dengan demikian mereka dapat bersikap lebih terus terang dalam menyampaikan kritik mereka. Saya menerima ulasan tanpa nama ini kurang lebih enam bulan setelah saya menyerahkan manuskrip. Saya kemudian merevisi manuskrip untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi para pengulas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Saya menyerahkan manuskrip dengan revisi pada 2005. Badan penerbit menyewa seorang *copy editor* untuk memeriksa manuskrip, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam ejaan, tata bahasa, atau tanda baca, dan

mengusulkan perbaikan dalam hal gaya penulisan. Saya menghabiskan beberapa minggu pada akhir 2005 untuk berkorespondensi dengan *copy editor* tentang bermacam-macam masalah. Produk akhir dari proses ini baru diterbitkan pada September 2006.

Ketelitian serupa juga diberikan dalam proses penerjemahan. Setelah penerjemah utama menyelesaikan pekerjaannya, dua penerjemah ahli lainnya memeriksa manuskrip terjemahan kata demi kata dan mengusulkan perubahan. Versi akhir dari proses ini kemudian dikirimkan ke seorang *copy editor* yang berpengalaman. Baru setelah *copy editor* memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, manuskrip dikirim ke pembaca naskah yang melakukan pengecekan tahap akhir. Proses panjang ini membuat banyak teman-teman kami frustrasi karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan buku ini. Tetapi kami pandang luar biasa penting untuk menghasilkan terjemahan yang secara tepat menyampaikan maksud dalam teks aslinya dan sesedikit mungkin mengandung kesalahan-kesalahan tipografis.

Dalam jangka waktu satu setengah tahun setelah edisi bahasa Inggris buku ini diterbitkan saya telah belajar lebih banyak tentang G-30-S. Namun, saya menolak godaan untuk menambahkan pengetahuan baru apa pun ke edisi ini. Saya berharap beberapa tahun lagi, begitu saya mengumpulkan lebih banyak informasi dan mendengar dari lebih banyak pembaca, saya akan siap menerbitkan suatu artikel yang menjabarkan argumen-argumen di dalam buku ini.

CATATAN

[1] Lembaga Ketahanan Nasional, *Bahan-Bahan Pokok G-30-S/PKI dan Penghancurannya*, bagian kedua (Maret 1969), 17-18. Edisi yang saya miliki adalah salinan yang dibuat pada 1982. Seperti dinyatakan pada halaman judul, edisi ini "disalin sesuai dengan aslinya oleh Sekretaris Pokja Balat Lemhannas."

[2] Crouch, "Another Look At the Indonesian Coup," *Indonesia* no. 15 (April 1973)

[3] Diterbitkan dalam majalah mahasiswa Indonesia di Berlin Barat, *Gotong Royong* (Maret 1984).

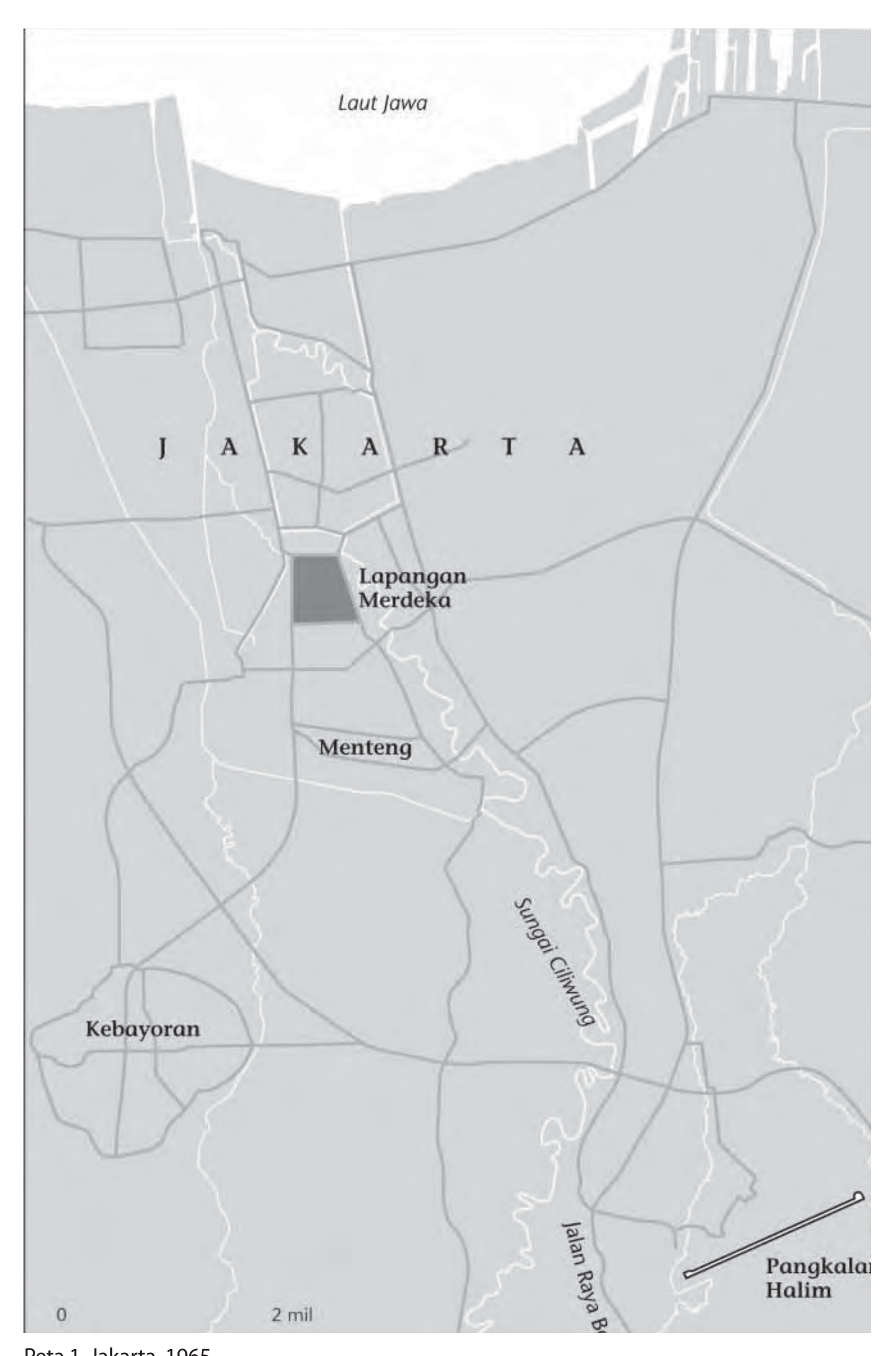
[4] Benedict Anderson, "How did the Generals Die?," *Indonesia* no. 43 (April 1987). Catatan Prof. Anderson tentang tanggapan rezim Suharto terhadap analisisnya tentang G-30-S

dan pencekalan dirinya dari Indonesia layak dibaca kalangan yang lebih luas: "Scholarship on Indonesia and Raison d'État: Personal Experience," *Indonesia* no. 62 (October 1996). Artikel lain yang juga berharga adalah: "Indonesian Nationalism Today and in the Future," *Indonesia* no. 67 (April 1999).

[5] Victor M. Fic, *Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 2004* (New Delhi: Abhinav, 2004); Antonie C.A. Dake, *The Sukarno File, 1965-67: Chronology of a Defeat* (Leiden: Brill, 2006); Helen-Louise Hunter, *Sukarno and the Indonesian Coup: The Untold Story* (Wesport: Praeger, 2007).

[6] "Sukarno and the September 30th Movement," *Critical Asian Studies* 40: 1 (March 2008).

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL



Peta 1. Jakarta, 1965

PENDAHULUAN

Kebenaran tentang perebutan kekuasaan tidak boleh dibikin jelas; pada mulanya ia terjadi tanpa alasan tapi kemudian menjadi masuk akal. Kita harus memastikan bahwa kebenaran itu dianggap sah dan abadi; adapun asal-muasalnya sendiri harus disembunyikan, jika kita tidak ingin kebenaran itu cepat berakhir.

***Blaise Pascal,* Pensées (1670)**

Bagi sejarawan yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan salah satu babak kejadian yang terpenting. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani dan lima orang staf umumnya diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh tiga jenderal lainnya dan melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan, yang salah tangkap dari rumah jenderal ketujuh yang lolos dari penculikan, menemui nasib dilempar ke dasar sumur yang sama. Pagi hari itu juga orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI), dan melalui udara menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Sukarno.

Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi Presiden dari komplotan jenderal kanan yang akan melancarkan kudeta. Mereka menyebut nama pemimpin mereka, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung jawab mengawal Presiden, dan menamai gerakan mereka Gerakan 30 September (selanjutnya disebut sebagai G-30-S). Dalam sebuah unjuk kekuatan, ratusan prajurit pendukung G-30-S menduduki Lapangan Merdeka (sekarang Lapangan Monas) di pusat kota. Lalu pada sore dan petang hari 1 Oktober, seperti menanggapi isyarat dari Jakarta, beberapa pasukan di Jawa Tengah menculik lima perwira pimpinan mereka.

Kesulitan memahami G-30-S antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya Yani, Mayor Jenderal Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G-30-S bahkan belum sempat mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera para fotografer.

Kendati bernapas pendek, G-30-S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno, sekaligus bermulanya masa kekuasaan Suharto. Sampai saat itu Sukarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional lain, Mohammad Hatta, pada 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa baru itu. Dengan karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian pascakemerdekaan. Sampai 1965 kedudukannya sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G-30-S maupun Mayor Jenderal Suharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Sukarno. Tidak

ada pihak mana pun yang berani memperlihatkan pembangkangannya terhadap Sukarno.

Suharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Sukarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilalihan kekuasaan negara oleh Suharto secara bertahap, yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Jika bagi Presiden Sukarno aksi G-30-S itu sendiri disebutnya sebagai "riak kecil di tengah samudra besar Revolusi [nasional Indonesia]," sebuah peristiwa kecil yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Suharto peristiwa itu merupakan tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Sukarno.[1] Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30-S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Suharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30-S.[2] Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk di abad keduapuluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966.[3] Dalam suasana darurat nasional tahap demi tahap Suharto merebut kekuasaan Sukarno dan menempatkan dirinya sebagai presiden *de facto* (dengan wewenang memecat dan mengangkat para menteri) sampai Maret 1966. Gerakan 30 September, sebagai titik berangkat rangkaian kejadian berkait kelindan yang bermuara pada pembunuhan massal dan tiga puluh dua tahun kediktatoran, merupakan salah satu di antara kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia, setara dengan pergantian kekuasaan negara yang terjadi sebelum dan sesudahnya: proklamasi kemerdekaan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, dan lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998.

Bagi kalangan sejarawan, G-30-S tetap merupakan misteri. Versi resmi rezim Suharto – bahwa G-30-S adalah percobaan kudeta PKI – tidak cukup meyakinkan. Sukar dipercaya bahwa partai politik yang beranggotakan orang sipil semata-mata dapat memimpin sebuah operasi militer. Bagaimana mungkin orang sipil dapat memerintah personil

militer untuk melaksanakan keinginan mereka? Bagaimana mungkin sebuah partai yang terorganisasi dengan baik, dengan reputasi sebagai partai yang berdisiplin tinggi, merencanakan tindak amatiran semacam itu? Mengapa partai komunis yang dipimpin prinsip-prinsip revolusi Leninis mau berkomplot dalam *putsch* oleh sepasukan tentara? Mengapa partai politik yang sedang tumbuh kuat di pentas politik terbuka memilih aksi konspirasi? Agaknya tak ada alasan ke arah sana. Di pihak lain, sukar dipercaya bahwa G-30-S – seperti dinyatakannya dalam siaran radio yang pertama – "semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat," karena memang ada beberapa tokoh PKI yang jelas ikut memimpin G-30-S bersama beberapa orang perwira militer. Sejak hari-hari pertama Oktober 1965, masalah siapa dalang di belakang peristiwa ini telah menjadi perdebatan yang tak kunjung reda. Apakah para perwira militer itu bertindak sendiri, sebagaimana yang mereka nyatakan, dan kemudian mengundang atau bahkan menipu beberapa tokoh PKI agar membantu mereka? Ataukah, justru PKI yang menggunakan sementara perwira militer ini sebagai alat pelaksana rencana mereka, sebagaimana yang dikatakan Suharto? Atau, adakah semacam *modus vivendi* antara para perwira militer tersebut dan PKI?

Perdebatan juga timbul di sekitar hubungan Suharto dengan G-30-S. Bukti-bukti tidak langsung memberi kesan bahwa para perencana G-30-S setidaknya mengharapkan dukungan Suharto; mereka tidak mencantumkan Suharto dalam daftar jenderal yang akan diculik, dan juga tidak menempatkan pasukan di sekeliling markasnya. Dua perwira di antara pimpinan G-30-S adalah sahabat-sahabat pribadi Suharto. Salah seorang, yaitu Kolonel Abdul Latief, mengaku memberi tahu Suharto tentang G-30-S sebelumnya dan mendapat restu darinya secara diam-diam. Benarkah Suharto sudah diberitahu sebelumnya? Informasi apa yang diberikan G-30-S kepadanya? Apa tanggapan Suharto terhadap informasi itu? Apakah ia menjanjikan dukungan atau melangkah lebih jauh dan membantu merencanakan operasi G-30-S? Apakah ia dengan licik menelikung G-30-S agar dapat naik ke tampuk kekuasaan?

Sampai sekarang dokumen utama yang ditinggalkan oleh G-30-S hanyalah empat pernyataan yang disiarkan RRI pusat pada pagi dan siang hari 1 Oktober 1965. Pernyataan-pernyataan itu menampilkan wajah G-30-S di depan publik dan tentu saja tidak mengungkap peng-

organisasian di balik layar dan tujuan yang mendasarinya. Sesudah tertangkap, para pimpinan kunci G-30-S tidak mengungkap banyak hal. Kesaksian mereka di depan pengadilan yang dikenal sebagai Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) lebih mencerminkan keterdesakan sangat untuk menolak segala dakwaan, ketimbang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dan mengapa G-30-S dilancarkan. Para terdakwa, dapat dimengerti, memilih tutup mulut, berbohong, tidak sepenuhnya berkata benar, dan menghindar demi melin-dungi diri sendiri dan kawan-kawan mereka, atau melempar kesalahan kepada orang lain. Baik penuntut umum maupun hakim tidak ambil pusing untuk mengorek kesaksian-kesaksian mereka yang saling bertentang-tentangan; pengadilan memang tidak dimaksudkan untuk menyelidiki kebenaran atas peristiwa tersebut. Semua hanyalah pengadilan sandiwara belaka. Tidak satu orang pun yang dibawa ke Mahmilub dibebaskan dari tuntutan. Dari lima orang pimpinan utama G-30-S, kecuali satu orang, semuanya dinyatakan terbukti berkhianat, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi oleh regu tembak, sehingga dengan demikian menutup setiap kemungkinan mereka muncul kembali dengan keterangan baru yang lebih rinci dan akurat tentang gerakan mereka.[4]

Satu-satunya pemimpin kunci G-30-S yang lolos dari regu tembak, yaitu Kolonel Abdul Latief, menolak menjelaskan G-30-S secara rinci. Ketika akhirnya diajukan ke depan pengadilan pada 1978, sesudah bertahun-tahun dikurung dalam sel isolasi, ia juga tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan bagaimana mereka mengorganisasi G-30-S. Pidato pembelaannya menjadi terkenal dan tersebar luas karena satu pernyataannya yang mengejutkan bahwa ia telah memberi tahu Suharto tentang gerakan itu sebelumnya. Arti penting pernyataan itu lalu menutupi kenyataan bahwa Latief tidak menceritakan barang sedikit pun tentang G-30-S itu sendiri. Sebagian besar pidato pembelaannya tercurah pada cekcok yang relatif remeh-temeh tentang keterangan para saksi, atau pada penje-lasan riwayat hidupnya untuk membuktikan diri sebagai prajurit yang patriotik. Sesudah 1978, Latief tidak pernah menyimpang dari pembelaannya dan juga tidak pernah mengurai lebih lanjut pernyataan-pernyataannya. Bahkan juga sesudah dibebaskan dari penjara pada 1998, ia tidak memberikan keterangan baru satu patah kata pun.[5]

Gerakan 30 September dengan begitu telah menghamparkan

sebuah misteri tak terpecahkan bagi para sejarawan. Bukti-bukti yang terbatas adanya kebanyakan tidak dapat diandalkan. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye anti-PKI dalam bulan-bulan setelah G-30-S, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang.[6] Terbitan-terbitan yang didukung rezim Suharto bersandar pada laporan interogasi para tapol, yang setidak-tidaknya beberapa di antara mereka telah disiksa atau diancam akan disiksa. Banyak di antara korban teror militer yang selamat tetap takut untuk berbicara terus terang dan jujur. Kedua belah pihak, baik yang kalah (para peserta G-30-S) maupun yang menang (para perwira Suharto), tidak memberikan keterangan yang layak dipercaya. Hampir semua kesaksian pribadi dan dokumen tertulis dari akhir 1965 dan selanjutnya tampaknya sengaja dibuat untuk menyesatkan, mengaburkan, atau menipu.

Oleh karena G-30-S dan pembasmiannya merupakan tindakan-tindakan yang dirancang secara rahasia oleh para perwira militer, agen intelijen, dan agen ganda, sumber-sumber informasi yang lazim dipakai sejarawan – surat kabar, majalah, dokumen pemerintah, dan pamflet – tidak banyak membantu. Dalam buku teksnya tentang sejarah Indonesia, Merle Ricklefs menulis bahwa "ruwetnya panggung politik" pada 1965 dan "banyaknya bukti-bukti yang mencurigakan" menyebabkan penyimpulan tegas mengenai G-30-S hampir tidak mungkin.[7] Rekan-rekannya sesama sejarawan asal Australia, Robert Cribb dan Colin Brown, berpendapat bahwa "alur kejadian yang tepat" itu "diselubungi ketidakpastian." Menjelang G-30-S terjadi, "desas-desus, kabar burung, dan penyesatan berita yang disengaja menyesaki udara."[8] Kebanyakan sejarawan yang menulis mengenai Indonesia dan berusaha memecahkan misteri ini mengaku tidak begitu yakin dengan penjelasan yang mereka tawarkan.

Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Hal-hal yang dipertaruhkan dalam "kontroversi tentang dalang" sungguh besar. Rezim Suharto membenarkan tindakan represi berdarahnya terhadap PKI dengan menekankan bahwa partai itulah yang memulai dan mengorganisasi G-30-S. Walaupun aksi-aksi pada 1 Oktober tersebut tak lebih dari pemberontakan berskala kecil dan

terbatas oleh pasukan Angkatan Darat dan demonstrasi oleh kalangan sipil, rezim Suharto menggambarkannya sebagai awal dari serangan PKI yang masif dan keji terhadap semua kekuatan nonkomunis. Gerakan 30 September dilihatnya sebagai tembakan salvo pembuka dari PKI untuk sebuah revolusi sosial. Dalam membangun ideologi pembenaran bagi kediktatorannya, Suharto menampilkan diri sebagai juru selamat bangsa dengan menumpas G-30-S. Rezim Suharto terus-menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara: buku teks, monumen, nama jalan, film, museum, upacara peringatan, dan hari raya nasional. Rezim Suharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G-30-S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan. Pernyataan bahwa PKI mengorganisasi G-30-S, bagi rezim Suharto, bukan sekadar fakta biasa; tetapi *sang* fakta sejarah mahabesar, yang menjadi sumber pokok keabsahan rezimnya.

Di bawah Suharto, antikomunisme menjadi agama negara, lengkap dengan segala situs, upacara, dan tanggal-tanggalnya yang sakral. Para perwira Suharto mengubah situs pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965, yaitu Lubang Buaya, menjadi tanah keramat. Sebuah monumen didirikan dengan tujuh patung perunggu para perwira yang tewas, semua berdiri setinggi manusia dengan sikap gagah dan menantang. Pada dinding belakang deretan patung para perwira ditempatkan patung garuda raksasa dengan sayap mengembang, burung khayali yang telah diangkat Indonesia sebagai lambang kebangsaannya.

Di dinding seputar monumen dengan tinggi sebatas tatapan mata rezim Suharto menetakkan relief dari perunggu, mirip dengan lempengan-lempengan panjang melintang dari abad ke-9 di Candi Borobudur. Jika pengunjung berjalan menyusuri dinding relief dari kiri ke kanan, mereka akan melihat versi sejarah Indonesia pascakolonial yang antikomunis. Dari pemberontakan Madiun 1948 sampai Gerakan 30 September 1965, PKI selalu ditampilkan sebagai pemicu kekacauan. Relief itu menampilkan sebuah kisah klasik tentang sang pahlawan (Suharto) yang mengalahkan penjahat keji (PKI) dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Tepat di tengah dinding relief digambarkan adegan perempuan-perempuan berkalung rangkaian bunga dan ber-



Gambar 1. Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. *Foto: John Roosa*

telanjang menari-nari mengitari seorang laki-laki yang tengah melempar mayat perwira ke dalam sumur. Rekayasa perang urat syaraf yang sarat dengan citra seks dan kekerasan demikian kuat dituangkan dalam logam kemudian beroleh status sebagai fakta yang tak terbantahkan. Di depan dinding relief tertera slogan: "Waspada ...... dan mawas diri agar peristiwa sematjam ini tidak terulang lagi."

Monumen yang dibuka pada 1969 ini dinamai Monumen Pancasila Sakti.[9] Semasa pemerintahan Suharto, Pancasila, lima prinsip nasionalisme Indonesia yang diucapkan Sukarno untuk pertama kali pada 1945, diangkat menjadi ideologi resmi negara. Pancasila dibayangkan sebagai perjanjian suci bangsa dan Lubang Buaya adalah situs pelanggaran paling mengerikan terhadap perjanjian itu. Dengan demikian, monumen ini menyucikan situs pelanggaran tersebut dan menahbiskan para perwira yang dibunuh sebagai syuhada-syuhada suci. Sebagai ruang sakral, Monumen Pancasila Sakti menjadi lokasi penyelenggaraan ritual-ritual rezim Suharto yang paling penting. Setiap lima tahun semua anggota parlemen berkumpul di sini, sebelum memulai sidang pertama, untuk bersumpah setia kepada Pancasila. Setiap tahun pada 1 Oktober, Suharto dan pejabat terasnya menyelenggarakan upacara di hadapan monumen tersebut untuk menyatakan janji kesetiaan mereka yang abadi kepada Pancasila.[10] Semalam sebelumnya semua stasiun televisi diwajibkan menyiarkan film buatan pemerintah, *Pengkhianatan Gerakan 30 September/ PKI* (1984). Film sepanjang empat jam yang melelahkan ini bercerita



Gambar 2. Detil relief pada Monumen Pancasila Sakti. Perempuan-perempuan anggota PKI menari telanjang, sementara laki-laki komunis membunuh para perwira Angkatan Darat dan membuang mayat-mayat mereka ke Lubang Buaya. *Foto: John Roosa*

mengenai penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat di Jakarta, dan menjadi tontonan wajib setiap tahun bagi anak-anak sekolah. Film ini dimulai dengan sorotan berkepanjangan terhadap monumen itu, diiringi pukulan ratapan genderang yang murung. Lubang Buaya ditanamkan dalam kesadaran publik sebagai tempat PKI melakukan kejahatan besar.

Di samping Monumen Pancasila Sakti rezim Suharto membangun Museum Pengkhianatan PKI pada 1990. Hampir semua dari 42 diorama di dalam museum itu, yang kaca-kacanya dipasang rendah agar anak-anak sekolah yang berkunjung dapat melihatnya, menggambarkan babak-babak kekejaman PKI dari 1945 sampai 1965. Apa yang dipelajari para pengunjung museum adalah pelajaran moral sederhana: bahwa sejak kemerdekaan dan masa-masa selanjutnya, PKI bersifat antinasional, antiagama, agresif, haus darah, dan sadis.[11] Museum itu tidak menawarkan penjelasan tentang komunisme sebagai ideologi yang menentang kepemilikan pribadi dan kapitalisme; tidak ada sejarah mengenai sumbangan PKI dalam perjuangan nasional melawan kolonialisme Belanda, atau kegiatan partai dalam mengorganisasi buruh dan tani secara damai.[12] Adegan-adegan kekerasan dirancang untuk meyakinkan pengunjung tentang kemustahilan memberi toleransi terhadap PKI di tengah kehidupan berbangsa.

Bagi rezim Suharto, kejadian 1 Oktober 1965 menyingkap kebenaran tentang sifat PKI yang khianat dan antinasional. Ia mendiskreditkan prinsip yang digalakkan Sukarno, yaitu Nasakom – akronim yang menyatakan azas tritunggal nasionalisme, agama, dan komunisme – yang memberi keabsahan bagi PKI sebagai komponen dasariah dalam perpolitikan Indonesia. Rupa-rupanya G-30-S menandai adanya "pemutusan imanen" dengan (meminjam istilah filsuf Prancis Alain Badiou) "pengetahuan yang telah dilembagakan," dan "meyakinkan" orang-orang yang akan menjadi setia kepada kebenaran gerakan tersebut. Seperti dinyatakan Badiou, "Bersetia kepada suatu peristiwa adalah bergerak dalam situasi yang disodorkan peristiwa tersebut dengan berpikir ... [tentang] situasi tersebut sesuai dengan 'peristiwa' itu."[13] Rezim Suharto menampilkan diri sebagai wahana, yang dapat digunakan bangsa Indonesia agar tetap setia kepada kebenaran peristiwa 1 Oktober 1965. Kebenaran yang dinyatakan peristiwa itu ialah bahwa PKI jahat dan pengkhianat yang tak dapat



Gambar 3. Museum Pengkhianatan PKI, Lubang Buaya, Jakarta. *Foto: John Roosa*

disadarkan lagi. Rezim Suharto akan tampak sebagai semacam "proses kebenaran" jika kebenaran dirumuskan sesuai dengan cara Badiou merumuskannya, yaitu "suatu proses nyata tentang kesetiaan kepada suatu peristiwa." Maka semua pejabat negara harus mengucapkan sumpah setia kepada Pancasila dan bersumpah bahwa mereka (serta keluarga masing-masing) bersih dari kaitan apa pun dengan PKI dan G-30-S. Namun, jika kita menggunakan kerangka berpikir Badiou dalam berpikir tentang G-30-S, kita akan menemukan bahwa G-30-S bukanlah "suatu peristiwa" menurut pengertian Badiou karena peristiwa itu sedikit banyak merupakan hasil rekayasa *ex post facto* (dari sesuatu yang sudah terjadi). Dengan operasi-operasi perang urat syaraf rezim Suharto berdusta tentang cara bagaimana enam orang jenderal tersebut dibunuh (menciptakan kisah-kisah tentang penyiksaan dan mutilasi) dan tentang identitas para pelaku yang bertanggung jawab (menuduh setiap anggota PKI bersalah). Gerakan 30 September tidak sama dengan revolusi Indonesia 1945-1949, yang merupakan "peristiwa-kebenaran" (*truth-event*) bagi Sukarno. Revolusi itu bersifat terbuka dan umum. Jutaan orang mengambil bagian di dalamnya (sebagai gerilyawan, kurir, juru rawat, dermawan, dll.). Untuk menghancurkan prinsip rasial yang menjadi tumpuan pemerintah kolonial Belanda, revolusi tampil membela prinsip-prinsip universal pembebasan umat manusia.[14] Sebaliknya, G-30-S adalah kejadian yang berlangsung cepat, berskala kecil, bersifat tertutup, dan masyarakat

umum hampir tidak mempunyai pengetahuan langsung mengenainya. Hanya rezim Suharto saja yang mengaku mampu melihat kebenaran peristiwa tersebut. Dengan demikian rezim itu setia kepada sesuatu yang bukan peristiwa, kepada suatu fantasi yang dibuatnya sendiri. "Kesetiaan kepada citra khayali [*simulacrum*]" tulis Badiou, "meniru sebuah proses kebenaran yang aktual," namun memutarbalikkan aspirasi universal tentang "peristiwa kebenaran" yang sejati. Ia hanya mengakui sekumpulan orang tertentu (misalnya orang-orang nonkomunis) sebagai peserta dalam kebenaran suatu peristiwa dan menciptakan "perang dan pembantaian" sebagai upaya membasmi siapa pun yang berada di luar kumpulan yang telah diakui tersebut.[15]

Sampai penghujung rezim Suharto pada 1998 pemerintah dan pejabat militer Indonesia menggunakan hantu PKI untuk menanggapi setiap masalah kerusuhan atau gejala pembangkangan. Kata-kata kunci dalam wacana rezim itu adalah "bahaya laten komunisme."[16] Agen-agen tersembunyi dari Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) senantiasa mengendap, siap merongrong pembangunan ekonomi dan tertib politik. Pembasmian PKI yang tak kunjung usai, sungguh-sungguh merupakan *raison d'être* (alasan keberadaan) bagi rezim Suharto. Landasan hukum asali yang dipakai rezim ini untuk menguasai Indonesia selama lebih dari 30 tahun adalah perintah Presiden Sukarno pada 3 Oktober 1965, yang memberi wewenang kepada Suharto untuk "memulihkan ketertiban." Perintah itu dikeluarkan dalam situasi darurat. Tapi bagi Suharto situasi darurat itu tidak pernah berakhir. Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang dibentuk pada masa itu tetap dipertahankan sampai akhir kekuasaan rezim (dengan penggantian nama menjadi Bakorstanas pada 1988). Badan ini memungkinkan personil militer bertindak di luar dan di atas hukum dengan dalih keadaan darurat.[17] Pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto sejalan dengan ucapan teoretisi politik Carl Schmitt, "Sang penguasa adalah dia yang mengambil keputusan akan adanya kekecualian."[18] Bagi Suharto, G-30-S adalah sebuah kekecualian; sebuah patahan dalam tertib hukum yang normal, yang memerlukan kekuasaan ekstra legal untuk memberantasnya. Gerakan 30 September bukan sekadar "riak kecil di tengah samudra luas Revolusi Indonesia," seperti yang dinyatakan Sukarno, penguasa di atas kertas.[19] Namun teori Schmitt perlu kualifikasi tersendiri untuk

menangani kasus-kasus ketika penguasa memutuskan bahwa "kekecualian" harus menjadi norma.[20] Suharto memutuskan bahwa kekecualian dari 1 Oktober 1965 bersifat permanen. Rezimnya mempertahankan "bahaya laten komunisme" dan menyandera Indonesia dalam keadaan darurat terus-menerus. Seperti dikatakan Ariel Heryanto, komunisme tidak pernah mati di Indonesia-nya Suharto.[21] Rezim Suharto tidak dapat membiarkan komunisme mati, karena ia menetapkan dirinya dalam hubungan dialektis dengan komunisme, atau lebih tepat, dengan citra khayali (*simulacrum*) 'komunisme'.

GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN AMERIKA SERIKAT

Gerakan 30 September merupakan peristiwa signifikan dan bukan hanya bagi Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia pada 1965, Marshall Green, berpendapat bahwa G-30-S merupakan salah satu saat paling berbahaya bagi AS semasa perang dingin. Ia menafsirkan gerakan itu sebagai "usaha kudeta komunis," yang jika berhasil, dapat mengubah Indonesia menjadi negara komunis yang bersekutu dengan Uni Soviet dan/atau Tiongkok. Dalam wawancara di televisi pada 1997 ia menyatakan, "Saya kira [G-30-S] ini merupakan peristiwa yang sangat penting di dunia, dan saya tak yakin pers dan masyarakat umum pernah menganggapnya demikian. Dan saya tidak beranggapan bahwa saya berkata begitu semata-mata karena saya ada di sana waktu itu: Saya kira benar – bahwa inilah bangsa yang sekarang merupakan bangsa terbesar keempat di dunia ini ... akan menjadi komunis, dan memang nyaris demikian."[22]

Serangan Suharto terhadap kaum komunis dan perebutan kekuasaan presiden yang dilancarkannya berakhir pada pembalikan sepenuhnya peruntungan AS di Indonesia. Hampir dalam semalam pemerintah Indonesia berubah dari kekuatan yang di tengah-tengah perang dingin dengan garang menyuarakan netralitas dan antiimperialisme menjadi rekanan pendiam yang patuh kepada tatanan dunia AS. Sebelum G-30-S terjadi, kedutaan AS telah memulangkan hampir semua personil mereka dan menutup konsulat-konsulatnya di luar Jakarta, karena gelombang-gelombang demonstrasi militan yang dipimpin PKI. Presiden Sukarno

kelihatannya menutup mata dan merestui aksi-aksi itu dengan tidak memberikan perlindungan keamanan yang cukup bagi konsulat-konsulat AS. Sementara serangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah AS sudah begitu mengkhawatirkan, kaum buruh mengambil alih perkebunan-perkebunan dan sumber-sumber minyak milik perusahaan-perusahaan AS, dan pemerintah Indonesia mengancam akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Sejumlah pejabat pemerintah AS sempat mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik sama sekali. Tampaknya Washington harus melupakan Indonesia dan menganggapnya sebagai bagian dari dunia komunis. Sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang disiapkan awal September 1965 mengatakan bahwa, "Indonesia di bawah Sukarno dalam hal-hal penting tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara Komunis, dan lebih secara terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan negeri-negeri Komunis." Laporan itu memperkirakan bahwa pemerintah Indonesia, dalam waktu dua atau tiga tahun, akan sepenuhnya didominasi PKI.[23]

Lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan menjadi kehilangan besar, yang jauh lebih mahal daripada lepasnya Indocina. Dalam politik luar negeri AS setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia dianggap sebagai domino terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya karena bobot demografis sebagai negeri berpenduduk terbesar kelima di dunia dan keluasan geografis sebagai kepulauan yang terbentang 3.000 mil lebih dari timur ke barat, tapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Indonesia adalah sumber minyak, timah, dan karet yang penting. Dengan investasi lebih banyak, Indonesia akan menjadi produsen bahan mentah yang lebih besar lagi, termasuk emas, perak, dan nikel. Seperti dikatakan sejarawan Gabriel Kolko, bahwa AS pada awal 1950-an "telah menyerahkan Indonesia di bawah pengaruh ekonomi Jepang"; minyak, mineral, logam, dan tanaman pangan dari Indonesia akan menghidupi industrialisasi Jepang. "Keprihatinan utama" AS adalah "keamanan Jepang, yang aksesnya ke negeri kepulauan dengan sumber alam kaya raya itu harus dijaga agar tetap aman berada di kubu AS."[24] Penilaian Kolko disusun berdasarkan penyataan kebijakan Dewan Keamanan Nasional tahun 1952 yang berjudul, "United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia" (Tujuan dan Arah Tindakan Amerika Serikat untuk Asia Tenggara). Para pembuat kebijakan dalam

pemerintahan Truman melihat kawasan ini dari segi sumber daya alam: "Asia Tenggara, khususnya Malaya dan Indonesia, merupakan sumber utama dunia bagi karet alam dan timah, dan produsen minyak bumi, serta komoditi lain yang penting secara strategis." Jatuhnya kawasan ini ke tangan komunis (atau, sejatinya kekuatan lokal mana pun yang ingin membatasi ekspor sumber daya alam tersebut) akan menghambat industrialisasi Jepang, dan hal ini akan "sangat mempersulit upaya mengalangi Jepang untuk pada akhirnya menyesuaikan diri dengan komunisme."[25] Pemerintah Eisenhower mengeluarkan pernyataan politik serupa tentang Asia Tenggara dua tahun kemudian, yang mengulangi bahasa memorandum terdahulu hampir kata demi kata.[26]

Washington menganggap kemungkinan jatuhnya pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan komunis sebagai hari kiamat. Sikapnya mempertahankan garis melawan komunisme di Indocina antara lain didorong keinginan melindungi Indonesia. Dalam logika teori domino, negeri-negeri Indocina yang relatif tidak begitu strategis harus diamankan dari komunisme agar negeri-negeri yang lebih penting di Asia Tenggara dapat dipagari dari pengaruhnya. Dalam pidatonya pada 1965, Richard Nixon membenarkan pemboman atas Vietnam Utara sebagai alat untuk melindungi "potensi mineral yang luar biasa" di Indonesia.[27] Dua tahun kemudian ia menyebut Indonesia sebagai "anugerah terbesar di wilayah Asia Tenggara," dan merupakan "timbunan sumber daya alam terkaya di kawasan itu."[28] Pasukan darat yang mulai memasuki Vietnam sejak Maret 1965 akan menjadi tidak berguna jika kaum komunis menang di negeri yang lebih besar dan lebih strategis. Penguasaan Indonesia oleh PKI akan membuat intervensi di Vietnam sia-sia belaka. Pasukan Amerika Serikat sibuk bertempur di pintu gerbang, sementara musuh sudah berada di dalam, akan segera menduduki istana, dan menjarah-rayah gudang-gudang simpanan.

Dalam minggu-minggu sebelum G-30-S beraksi, para pembuat kebijakan di Washington saling mengingatkan diri, agar perang di Vietnam tidak sampai mengalihkan perhatian mereka dari situasi di Indonesia yang sama daruratnya. Pertemuan antara sekelompok kecil pejabat Departemen Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri George Ball di akhir Agustus 1965 menegaskan bahwa Indonesia paling tidak sama penting dengan seluruh Indocina. Kelompok ini juga menegaskan

bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh sayap kiri di Indonesia sudah dekat. Menurut salah seorang pejabat yang hadir, William Bundy, kelompok tersebut percaya bahwa pengambilalihan kekuasaan seperti itu akan menimbulkan "efek menjepit sangat kuat bagi kedudukan negeri-negeri nonkomunis di Asia Tenggara."[29]

Dalam renungan reflektifnya, Robert McNamara, Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Kennedy dan Johnson, mengatakan bahwa AS seharusnya mengurangi keterlibatannya di Indocina setelah pembasmian kaum komunis di Indonesia oleh Suharto. Begitu domino besar di Asia Tenggara sudah aman di tangan tentara Indonesia, para pembuat kebijakan AS harusnya menyadari bahwa Vietnam sebenarnya tidak sepenting seperti yang mereka pikirkan semula. "Kekalahan permanen" PKI di Indonesia, menurut pengakuannya sekarang, "telah mengurangi pertaruhan riil AS di Vietnam secara substansial."[30] Walaupun dalam sebuah memorandum 1967 McNamara telah menyebut penghancuran PKI sebagai alasan untuk menghentikan langkah AS meningkatkan perang, ia tidak mendorong dilakukannya peninjauan kembali kebijakan AS secara menyeluruh.[31] Perang pada gilirannya memperoleh logikanya sendiri, yang terpisah dari teori domino. Kendati memiliki pemahaman mengenai implikasi dari kejadian-kejadian di Indonesia, McNamara tetap terpaku dalam kerangka pikir yang menghendaki, pada satu pihak, kemenangan AS dalam perang Vietnam, atau pada pihak lain, suatu cara pengunduran diri dari Vietnam tanpa kehilangan muka bagi pemerintah AS. Para pembuat kebijakan gagal memahami bahwa setelah 1965 "hanya sedikit domino-domino yang tertinggal, dan kecil kemungkinannya mereka akan ikut roboh."[32]

Walaupun tersita oleh urusan Indocina pada 1965, Washington sangat gembira ketika tentara Suharto mengalahkan G-30-S dan merangsak menghantam kaum komunis. Ketidakberpihakan Sukarno dalam perang dingin dan kekuatan PKI yang semakin besar telah dibikin tamat dengan sekali pukul. Tentara Suharto melakukan apa yang tidak mampu dilakukan negara boneka AS di Vietnam Selatan meskipun telah dibantu dengan jutaan dolar dan ribuan pasukan AS, yaitu menghabisi gerakan komunis di negerinya. Dalam sepuluh hari setelah G-30-S meletus, wartawan *New York Times* Max Frankel sudah mencatat bahwa suasana Washington menjadi cerah. Artikel Max Frankel berjudul "U.S.

Is Heartened by Red Setback in Indonesia Coup" (AS Gembira karena Kekalahan Kaum Merah dalam Kudeta di Indonesia). Ia mengamati bahwa sekarang ada "harapan, padahal baru dua pekan lalu hanya ada keputusasaan mengenai negeri berpenduduk terbesar kelima di bumi itu, yang dengan 103 juta penduduknya di 4.000 pulau memiliki sumber daya melimpah tapi belum dimanfaatkan dan menduduki salah satu posisi paling strategis di Asia Tenggara."[33]

Ketika berita-berita pembantaian mulai berdatangan sepanjang bulan-bulan berikutnya, harapan Washington justru membesar. Pada Juni 1966, seorang penulis editorial utama *New York Times*, James Reston, menyebut "transformasi biadab" di Indonesia sebagai "secercah cahaya di Asia."[34] Laporan utama majalah *Time* menyebut naiknya Suharto sebagai "kabar terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia."[35] Wakil Menteri Muda Luar Negeri Alexis Johnson percaya bahwa "pembalikan gelombang pasang komunis di Indonesia yang besar itu" merupakan "peristiwa yang bersama perang Vietnam mungkin merupakan titik balik sejarah terpenting di Asia dalam dasawarsa ini."[36] Seperti dinyatakan Noam Chomsky dan Edward Herman, pembantaian di Indonesia merupakan "pembantaian bermaksud baik" dan "teror yang konstruktif" karena melayani kepentingan politik luar negeri AS. Sementara Washington mengemukakan setiap pelanggaran hak asasi manusia di blok Soviet sebagai bukti kejahatan musuhnya dalam perang dingin, ia mengabaikan, memberi pembenaran, atau bahkan bersekongkol dalam kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang bersekutu dengan AS.[37]

MEMIKIRKAN KEMBALI GERAKAN

Gerakan 30 September dengan begitu menjadi pemicu serangkaian kejadian: penumpasan PKI, pengambilalihan kekuasaan negara oleh tentara, dan pergeseran tajam posisi strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara. Saya menyadari arti penting peristiwa-peristiwa ini saat melakukan penelitian lapangan di Indonesia pada awal 2000. Namun saya tidak bermaksud menulis tentang G-30-S karena saya menganggapnya sebuah misteri yang tak dapat ditembus, dan tidak ada hal baru yang dapat ditulis mengenainya. Versi rezim Suharto jelas patut dipertanyakan,

jika bukan sama sekali salah, tapi kelangkaan bahan mempersulit orang mengajukan versi tandingan. Tanpa informasi baru mengenai G-30-S, orang hanya dapat mengunyah ulang fakta-fakta yang sudah diketahui umum tidak memuaskan dan menambah spekulasi yang sudah demikian banyak. Penelitian sejarah lisan yang saya lakukan terpusat pada akibat sesudah G-30-S terjadi. Perhatian saya terutama pada pengalaman mereka yang selamat dari pembunuhan massal dan penahanan.[38] Gerakan 30 September itu sendiri tampaknya dapat disamakan dengan peristiwa pembunuhan John F. Kennedy dalam sejarah AS – sebuah topik yang cocok bagi mereka yang gemar teori konspirasi atau "*deep politics*" (politik terselubung).[39]

Saya mulai yakin bahwa ada hal baru yang dapat diketengahkan mengenai G-30-S saat menemukan dokumen yang ditulis almarhum Brigadir Jenderal M.A. Supardjo. Menurut pengumuman radio yang disiarkan G-30-S pada pagi 1 Oktober 1965, ia adalah salah satu dari empat wakil komandan di bawah Letkol Untung. Saya tertarik kepada Supardjo karena ia merupakan salah satu dari sekian banyak keganjilan dalam G-30-S: mungkin untuk pertama kali dalam sejarah pemberontakan dan kup seorang jenderal menjadi bawahan seorang kolonel. Mengapa Letkol Untung menjadi komandan dan Brigjen Supardjo menjadi wakil komandan? Kebetulan saya bertemu dengan salah satu putra Supardjo di rumah seorang eks tapol. Saya berbicara dengannya dalam kesempatan itu dan beberapa pertemuan lain kemudian mengenai bagaimana ibu dan delapan saudaranya dapat bertahan dalam pemiskinan dan stigmatisasi yang mereka alami setelah 1965. Tergerak oleh keingintahuan, saya lalu mendatangi penyimpanan arsip militer di Dinas Dokumentasi Museum Satria Mandala, Jakarta, untuk membaca pernyataan Supardjo di Mahmilub pada 1967 dan bukti-bukti yang diajukan mahkamah kepadanya. Di situlah, hampir pada ujung bundel terakhir dokumen pengadilan, pada bagian yang ditandai "Barang-Barang Bukti," saya menemukan analisis yang ditulisnya mengenai kegagalan G-30-S. Awalnya saya mengira bahwa dokumen itu palsu atau tidak dapat digunakan. Saya belum pernah melihat dokumen itu disebut dalam tulisan-tulisan ilmiah mengenai G-30-S. Jika memang dokumen itu otentik, seharusnya ada orang yang pernah menulis sesuatu mengenainya. Tapi, setelah mempelajari naskah itu, saya berkesimpulan bahwa

dokumen itu tidak dapat lain dari apa yang menampak: sebuah analisis pascaperistiwa yang ditulis Supardjo dengan jujur. Belakangan saya mengetahui Jenderal A.H. Nasution (yang berhasil lolos dari penggerebekan G-30-S pagi itu) memuat kutipan dari dokumen itu dalam otobiografinya yang berjilid-jilid.[40] Nasution tidak memberi komentar apa-apa. Selama bertahun-tahun para sarjana mengabaikan dokumen tersebut begitu saja.[41] Dokumen selengkapnya tampil pertama kali dalam bentuk cetakan pada 2004 (setelah saya menyelesaikan draft pertama buku ini). Victor Fic (almarhum) memasukkan terjemahan dokumen ini dalam bukunya yang terbit di India.[42] Pengabaian yang begitu lama terhadap dokumen tersebut sungguh disayangkan. Dokumen ini merupakan sumber utama yang memberi informasi paling banyak mengenai G-30-S karena ditulis oleh orang yang paling dekat dengan para pelaku inti selama gerakan berlangsung. Supardjo menulis dokumen itu sekitar 1966 saat ia masih dalam persembunyian. Ia baru ditangkap pada 12 Januari 1967. Dokumen itu dimaksudkan untuk dibaca orang-orang yang mempunyai hubungan dengan G-30-S agar mereka dapat belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai sebuah dokumen internal, dokumen itu lebih andal daripada kesaksian-kesaksian para pelaku yang diberikan di depan interogator dan mahkamah militer.

Minat saya kepada G-30-S semakin diperkuat ketika, lagi-lagi secara tidak sengaja, bertemu dengan mantan perwira militer yang namanya disebut melalui siaran radio sebagai wakil komandan G-30-S: Heru Atmodjo. Ia seorang letnan kolonel Angkatan Udara. Hampir sepanjang hari pada 1 Oktober 1965 Atmodjo bersama Supardjo dan dipenjara bersama dengannya pula pada 1967-68. Ia mengonfirmasi keaslian dokumen Supardjo itu. Ia bahkan pernah diberi salinannya oleh Supardjo untuk dibaca di dalam penjara.[43] (Menurut Atmodjo, dokumen-dokumen biasanya diselundupkan keluar-masuk penjara oleh para penjaga yang simpati). Atmodjo juga mengonfirmasi banyak penegasan yang dikemukakan Supardjo dalam dokumen itu. Saya berulang kali berbicara dengan Atmodjo selama tiga tahun dan mengadakan empat wawancara yang direkam dengannya.

Setelah membaca dokumen Supardjo dan berbicara dengan Heru Atmodjo, saya berkesimpulan perlu ada analisis baru mengenai G-30-S. Lalu, saya mulai melakukan pengumpulan informasi yang lebih terarah

dan sistematis. Mengingat sifat persoalannya, saya harus berpikir seperti detektif – yang kadang-kadang memang harus dilakukan sejarawan. Saya berhasil menemui seorang kader tinggi PKI yang berpengetahuan luas mengenai Biro Chusus, organisasi rahasia yang berperan penting dalam G-30-S. Ia belum pernah berbicara kepada wartawan atau sejarawan siapa pun mengenai pengalamannya. Ia berbicara kepada saya dengan syarat, saya tidak mengungkap nama atau informasi apa saja yang dapat membuatnya dikenali. Ia sudah tua dan meniti hidup dengan tenang dan tidak mau terlibat dalam kontroversi. Dalam naskah ini saya memberinya nama samaran, Hasan.[44]

Bersama beberapa rekan di Indonesia saya mewawancarai empat orang yang berpartisipasi dalam G-30-S, empat kader tinggi PKI, dan beberapa orang lain yang cukup mengetahui masalah G-30-S. Salah seorang mantan pimpinan PKI yang saya wawancarai menyerahkan salinan dari analisis mengenai G-30-S yang ditulis temannya, almarhum Siauw Giok Tjhan.[45] Sebelum Oktober 1965 Siauw adalah pemimpin utama Baperki, organisasi Tionghoa Indonesia yang besar dan pendukung Presiden Sukarno.[46] Siauw, yang dipenjara selama 12 tahun, menulis analisisnya berdasarkan diskusi dan wawancaranya dengan sesama tahanan. Analisisnya, oleh karena itu, mencerminkan pendapat kolektif dari para tahanan politik mengenai G-30-S.

Dengan jatuhnya Suharto pada Mei 1998, banyak penulis yang memanfaatkan kebebasan pers untuk menerbitkan tulisan-tulisan yang kritis terhadap versi resmi tentang peristiwa 1965. Mantan wakil perdana menteri pertama di zaman Sukarno, yakni Subandrio, yang dipenjara selama Suharto berkuasa, menerbitkan analisisnya mengenai G-30-S pada 2001.[47] Mantan Menteri Panglima Angkatan Udara, Omar Dani, memberikan wawancara di media massa dan membantu sebuah tim penulis untuk menyusun biografinya.[48] Sebuah tim penulis yang secara tidak resmi mewakili korps Angkatan Udara menerbitkan keterangan rinci mengenai kejadian-kejadian di pangkalan Halim.[49] Bermunculannya berbagai penerbitan baru ini juga membantu meyakinkan saya bahwa analisis baru yang lebih menyeluruh mengenai G-30-S memang diperlukan.

Sementara para korban Suharto menerbitkan cerita mereka, pemerintah AS menyiarkan seberkas dokumen yang sudah dideklasifikasikan

mengenai kejadian-kejadian di Indonesia dalam 1965-1966. Berkas itu sebagian besar berupa memorandum dari pejabat pemerintahan L.B. Johnson, dan pertukaran surat-surat kawat antara Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Departemen Luar Negeri di Washington, DC. Untuk alasan yang tidak dijelaskan, Departemen Luar Negeri langsung menarik kembali berkas dokumen yang telah diumumkannya itu. Penarikan itu sia-sia belaka karena beberapa eksemplar sudah terlanjur dikirim ke berbagai perpustakaan. Langkah itu (bagi Departemen Luar Negeri) juga kontraproduktif karena aroma kontroversi justru merangsang hasrat ingin tahu masyarakat umum. Seluruh berkas naskah itu sekarang tersedia di berandawarta (*website*) sebuah lembaga penelitian di Washington, DC.[50]

Saya juga menemukan dua dokumen penting di sebuah tempat penyimpanan arsip di Amsterdam. Dua orang mantan anggota Politbiro PKI, Muhammad Munir dan Iskandar Subekti, menulis analisis masing-masing tentang G-30-S, yang belum pernah dimanfaatkan para sejarawan sebelumnya.

Dengan menggunakan potongan-potongan informasi yang telah saya kumpulkan dari berbagai sumber ini, saya mencoba menetapkan siapa yang mengorganisasi G-30-S, apa yang ingin mereka capai melalui tindakan mereka, dan mengapa mereka gagal sedemikian parahnya. Analisis yang ditampilkan dalam buku ini dengan sendirinya menjadi rumit karena kisah G-30-S banyak bersimpul dan berliku-liku. Masing-masing orang bergabung dalam G-30-S dengan motivasi dan pengharapan berbeda-beda dan dengan tingkat pengetahuan mengenai rencana aksi yang berbeda-beda pula. Seperti halnya kebanyakan operasi rahasia yang melibatkan beragam orang dan lembaga, kita akan melihat adanya kesalahan asumsi, salah komunikasi, dan penipuan diri-sendiri.

Buku ini dapat dianggap sebagai apa yang oleh Robert Darnton disebut "analisis insiden" karena memusatkan perhatiannya pada satu insiden dramatis, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang khas dari langgam ini: "Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi? Apa yang membedakan fakta dari fiksi? Bagaimana menemukan kebenaran di antara interpretasi yang saling bertentangan?"[51] Darnton mencatat bahwa orang yang menulis tentang kekejaman dan pembantaian cenderung mengkaji dengan teliti dokumen tertulis dan narasi

lisan untuk memahami "apa yang sesungguhnya terjadi": identitas para pelaku, jumlah korban, kronologi kejadian yang tepat, dan seterusnya. Menghadapi bukti yang bias dan memihak, seorang sejarawan akan tergoda menggunakan strategi Akira Kurosawa dalam film tahun 1950 yang terkenal, *Rashomon* (berdasarkan cerita pendek Ryunosuke Akutagawa). Empat orang masing-masing memberikan empat cerita yang berbeda-beda tentang satu kejahatan yang sama. Cerita lalu berakhir tanpa kepastian tentang yang manakah cerita yang benar. Salah satu di antara empat tokoh yang berusaha menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi, pada akhirnya mengatakan kepada temannya yang sama-sama bingung. "Sudahlah, jangan khawatirkan itu lagi. Seakan-akan manusia itu rasional saja."[52] Kesimpulan demikian tidak menjadi soal bagi sebuah cerita fiktif. Namun sulit untuk mengatakan kepada masyarakat "yang ingin mengetahui kebenaran tentang trauma di masa lalu," bahwa mereka harus menyerahkan diri kepada ide bahwa kebenaran itu relatif, masa lalu itu tidak dapat dimengerti, dan manusia itu irasional.[53] Walaupun saya menghindari pengakhiran kisah dengan gaya *Rashomon*, saya juga tidak mengambil gaya pengakhiran kisah seperti Sherlock Holmes atau Hercule Poirot. Tak seorang pun dengan penuh keyakinan dapat menudingkan telunjuk tuduhan kepada si pelaku kejahatan sehingga seluruh misteri G-30-S pun tidak dapat terungkap dengan baik. Banyak yang masih tetap tidak diketahui atau tidak pasti. Orang harus menerima bahwa mungkin masih banyak tokoh-tokoh yang tidak dikenal, namun memainkan peranan sangat penting di balik layar. Meminjam komentar epistemologis Donald Rumsfeld yang telah dikecam habis secara tak berimbang, tentu terdapat banyak "hal-hal tidak diketahui yang tidak diketahui," yaitu hal-hal yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu.[54] Bagian akhir buku ini hanya berniat membawa kita sedikit lebih maju dalam menyusuri labirin misteri ini, memberi pertanda beberapa jalan buntu, dan menunjukkan jalan-jalan yang paling menjanjikan bagi penelitian lebih lanjut.[55]

PENYAJIAN ARGUMEN

Buku ini dimulai dengan bab yang menggambarkan aksi-aksi dan per-

nyataan-pernyataan G-30-S pada 1 Oktober 1965 dan kekalahannya di tangan Mayjen Suharto. Bab ini akan memperkenalkan pembaca kepada semua keganjilan G-30-S, yang menjadi alasan mengapa banyak sejarawan melihatnya sebagai teka-teki. Aksi-aksi G-30-S tidak didasari alasan yang jelas, bergerak dengan berbagai tujuan yang saling berlawanan, dan akhirnya hampir tidak mencapai apa pun. Pengumuman-pengumuman yang disiarkan di radio tidak konsisten dan hampir tidak ada kaitannya dengan tindakan di lapangan. Jika dilihat secara menyeluruh, G-30-S tampak sebagai sosok aneh yang tidak masuk akal. Tidak ada pola yang jelas, bahkan jika kita susun berurutan rangkaian kejadian-kejadian yang sudah disepakati umum – yang dapat kita anggap sebagai fakta sekalipun. G-30-S tidak dapat digolongkan sebagai pemberontakan pasukan militer, percobaan kudeta, atau pemberontakan sosial. Bab yang pertama sengaja tidak saya tulis dalam bentuk narasi, karena memang peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak memiliki kesinambungan alur dan karakter yang diperlukan untuk menyusun sebuah narasi. Bab ini bermaksud menyoroti berbagai keganjilan yang kacau dari G-30-S, yang merupakan pengalang bagi narasi yang lugas dan lancar.

Bab kedua akan mengikhtisarkan berbagai cara keganjilan-keganjilan itu telah ditafsirkan dan disusun menjadi sebuah narasi kejadian yang padu. Rezim Suharto dengan kasar mendesakkan sebuah narasi gampangan, yang menetapkan PKI sebagai dalang keji yang mengontrol setiap aspek G-30-S. Sejumlah sarjana asing yang lebih berperhatian pada prosedur pengungkapan bukti dan logika dibanding dengan para propagandis negara menunjukkan kelemahan-kelemahan versi rezim Suharto, dan mengajukan jalan cerita yang berbeda. Para ilmuwan itu menyatakan bahwa peran para perwira militer yang terlibat dalam G-30-S lebih besar dari peran PKI, atau bahwa Suharto sendiri terlibat dalam operasi ini.

Bab-bab tiga sampai enam mencermati sumber primer yang baru: dokumen Supardjo, wawancara lisan saya dengan Hasan dan lainnya, dokumen-dokumen internal PKI, beberapa memoar yang baru diterbitkan, dan dokumen-dokumen rahasia pemerintah AS yang sudah diumumkan. Saya menganalisis para pelaku secara bergiliran: para perwira militer dalam G-30-S, Sjam dan Biro Chususnya, D.N. Aidit dan pimpinan PKI jajarannya, Suharto dan para perwira rekan-rekannya,

dan pemerintah AS. Bab-bab ini, sebagai tinjauan atas bukti-bukti yang ada, berjalan dengan mengikuti logika penyelidikan detektif. Barulah pada bab terakhir saya membangun suatu narasi yang berjalan secara kronologis dan bermaksud untuk memecahkan banyak keganjilan dalam peristiwa yang saya uraikan dalam bab pertama.

GERAKAN 30 SEPTEMBER SEBAGAI DALIH

Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia seperti yang dibentuk rezim Suharto, G-30-S merupakan kekejaman yang begitu jahat, sehingga kekerasan massal terhadap siapa pun yang terkait dengannya dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat. Diduga ada hubungan sebab-akibat langsung: represi terhadap PKI merupakan jawaban sepatutnya terhadap ancaman yang diajukan G-30-S. Memang dalam wacana politik di Indonesia menjadi lazim menggabungkan G-30-S dengan kekerasan massal yang mengikutinya, seakan-akan keduanya merupakan suatu peristiwa tunggal; satu istilah, "Gerakan 30 September," digunakan untuk merujuk ke dua peristiwa. Kendati demikian sejak awal serangan Suharto terhadap PKI, sesuatu yang tidak benar sudah terasa dengan pelekatan erat kedua peristiwa tersebut. Sepanjang akhir 1965 sampai awal 1966 Presiden Sukarno terus-menerus memprotes bahwa Angkatan Darat "mau membunuh tikus seluruh rumahnya dibakar."[56] Kampanye anti-PKI sama sekali menjadi tidak sepadan dengan alasan senyatanya. Pada dasarnya G-30-S merupakan suatu peristiwa yang relatif berskala kecil di Jakarta dan Jawa Tengah, yang sudah berakhir paling lambat 3 Oktober 1965. Secara keseluruhan G-30-S telah membunuh dua belas orang.[57] Suharto membesar-besarkannya sedemikian rupa sehingga peristiwa itu tampak seperti sebuah konspirasi nasional berkelanjutan untuk melakukan pembunuhan massal. Berjuta-juta orang yang berhubungan dengan PKI, bahkan para petani buta huruf di dusun-dusun terpencil, ditampilkan sebagai gerombolan pembunuh yang secara kolektif bertanggung jawab atas G-30-S. Setiap orang yang ditahan militer dituduh sebagai "langsung atau tidak langsung terlibat dalam Gerakan 30 September," jika kita mengutip dari surat keterangan yang diberikan kepada tahanan politik pada saat ia dibebaskan. (Perhatikan

istilah karet *tidak langsung*.) Dua orang pakar tentang Indonesia dari Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVey, pada awal 1966 mengamati bahwa tentara Suharto telah memulai kampanye antikomunis cukup lama sesudah G-30-S hancur dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangkit kembali. Di antara saat G-30-S tamat riwayatnya dengan saat penangkapan massal oleh tentara dimulai, "*tiga minggu berlalu tanpa adanya kekerasan atau tanda-tanda terjadinya perang saudara, bahkan menurut Angkatan Darat sendiri.*" Dua penulis itu berpendapat bahwa G-30-S dan kampanye antikomunis yang mengikutinya "merupakan fenomena politik yang *sama sekali terpisah*" (cetak miring penegas dalam teks asli).[58]

Kekerasan yang terjadi sepanjang akhir 1965 sampai awal 1966 harus dilihat lebih sebagai saat awal pembangunan sebuah rezim baru, ketimbang sebuah reaksi wajar terhadap G-30-S. Suharto dan para perwira tinggi Angkatan Darat lainnya menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk menegakkan kediktatoran militer di negeri ini. Mereka perlu menciptakan keadaan darurat nasional dan suasana yang sama sekali kacau jika hendak menumbangkan seluruh generasi kaum nasionalis dan menyapu bersih cita-cita kerakyatan Presiden Sukarno. Mereka mengetahui bahwa mereka harus melawan pendapat umum.[59] Suharto saat itu relatif bukan siapa-siapa, seorang pejabat biasa, yang bersiasat untuk menggeser sang pemimpin karismatik bangsa. Ia dan para pemimpin militer lainnya mengetahui bahwa mereka akan menghadapi perlawanan hebat jika militer melancarkan kudeta terhadap Sukarno secara langsung tak berselubung. Alih-alih menyerang istana terlebih dulu, Suharto justru menyerang masyarakat dengan kekerasan secepat kilat, lalu dengan menginjak-injak penduduk yang dicengkam ketakutan dan kebingungan melenggang masuk ke istana.

Suharto sendiri, tak mengherankan, menyangkal bertanggung jawab atas kekerasan massal 1965-66 – pelaku jarang mau mengakui kejahatan mereka di hadapan publik.[60] Dalam catatan resmi dinyatakan bahwa "penumpasan PKI" telah dilakukan melalui tindakan administratif dan tanpa pertumpahan darah; orang yang dicurigai ditangkap, diperiksa untuk memastikan bersalah atau tidak, lalu dibagi dalam tiga golongan (A, B, dan C) sesuai tingkat keterlibatan masing-masing di dalam G-30-S, lalu dipenjarakan. Catatan resmi tidak pernah menyebut



Gambar 4. Detil relief pada Monumen Pancasila Sakti: Suharto mengakhiri kekacauan, menciptakan ketertiban, dan mengembalikan perempuan ke rumah tangga dan kepatuhan. *Foto: John Roosa*

tentang pembunuhan massal.[61] Dalam memoarnya Suharto menulis bahwa strateginya adalah "pengejaran, pembersihan dan penghancuran."[62] Ia tidak memberi tahu pembaca bahwa ada orang yang tewas dalam proses itu. Film mengenai G-30-S yang disponsori pemerintah juga tidak menggambarkan adanya penangkapan dan pembunuhan massal. Panel terakhir pada relief Monumen Pancasila Sakti memperlihatkan Letkol Untung di depan Mahmilub, seolah-olah proses hukum dengan kepala dingin merupakan satu-satunya bentuk reaksi militer terhadap G-30-S. Tidak ada tugu peringatan dibangun di Monumen Pancasila Sakti bagi ratusan ribu korban. Saat menyinggung tentang kekerasan yang terjadi, dalam kesempatan yang amat langka, Suharto menjelaskannya sebagai sesuatu yang bersumber pada konflik dalam masyarakat. Dalam pidato pada 1971, ia menyampaikan analisis tentang sebab-musabab pembunuhan itu dalam satu kalimat singkat, "Ribuan korban djatuh didaerah2 karena rakjat bertindak sendiri2, djuga karena prasangka2 buruk antar golongan yang selama bertahun2 ditanamkan oleh praktek2 politik jang sangat sempit."[63] Dengan demikian Angkatan Darat seolah-olah tidak memainkan peran apa pun dalam mengatur pembunuhan; rakyat melakukannya sendiri untuk alasan yang tidak ada kaitan dengan

operasi penghancuran G-30-S oleh militer.

Penjelasan Suharto yang singkat tentang sebab-musabab pembunuhan itu bukanlah sesuatu yang unik. Banyak orang Indonesia, bahkan yang biasanya kritis terhadap propaganda negara, mempercayai bahwa pembunuhan itu merupakan tindak kekerasan yang terjadi spontan dari bawah, sebagai pengadilan liar barisan keamanan masyarakat, yang membarengi usaha penumpasan pemberontakan PKI oleh militer yang sangat terkendali dan terorganisasi dengan baik. Karena ketidaktahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah lain, orang yang menyaksikan pembunuhan besar-besaran yang diatur militer di daerah tempat tinggalnya bisa jadi menganggap pembunuhan tersebut sebagai pengecualian. Tidak adanya pembicaraan yang terbuka dan penyelidikan yang teliti terhadap pembantaian yang terjadi telah menimbulkan ketidakpastian yang besar tentang pola umum kejahatan ini. Kaum terpelajar Indonesia, dalam mencari jawab tentang masalah ini, cenderung terjerumus pada prasangka berkerak akan kerentanan massa. Kalangan kelas menengah Indonesia sering mengatakan kepada saya bahwa pembunuhan itu merupakan buah antagonisme yang sudah ada sebelumnya antara PKI dan partai-partai politik lain. Anggota PKI, karena militansi dan kekejaman mereka, rupanya menjadi sangat dibenci sejak sebelum 1965, sehingga lawan-lawan mereka langsung mengambil kesempatan untuk membantai mereka. Pembunuhan itu seakan-akan terjadi begitu saja, tanpa ada orang atau lembaga apa pun yang bertanggung jawab. Seperti dikatakan Robert Cribb, pembunuhan yang terjadi "dipandang seolah-olah tergolong dalam kategori tak lazim kematian massal akibat 'kecelakaan'."[64]

Koran-koran Indonesia tidak memberitakan adanya pembunuhan-pembunuhan. Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar dalam pekan pertama Oktober 1965 dan menerapkan sensor terhadap beberapa di antaranya yang mendapat ijin terbit kembali. Angkatan Darat menerbitkan beberapa korannya sendiri. Orang akan sia-sia mencari berita dalam koran-koran yang terbit antara akhir 1965 sampai akhir 1966 yang sekadar menyebut saja bahwa ada pembunuhan besar-besaran. Koran-koran hanya memuat berita tentang cara-cara tanpa kekerasan dalam penumpasan PKI: pemecatan orang-orang yang dituduh pendukung PKI dari berbagai badan pemerintahan (seperti kantor berita "Antara"), pem-

bubaran organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, dan demonstrasi mahasiswa menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI. Sudah pasti para redaktur koran-koran tersebut mengetahui tentang terjadinya pembunuhan besar-besaran – kisah-kisah mengerikan sudah beredar luas dari mulut ke mulut. Tapi mereka sengaja tidak memberitakannya barang sepatah kata pun. Sebagai gantinya mereka penuhi koran-koran mereka dengan cerita-cerita fiktif dari para ahli perang urat syaraf di kalangan tentara, yakni kisah-kisah yang melukiskan PKI sebagai pelaku tunggal kekerasan di tengah masyarakat. Bahkan koran-koran independen pun, seperti misalnya *Kompas*, yang belakangan menjadi koran acuan terkemuka selama tahun-tahun kekuasaan Suharto, ikut ambil bagian dalam kampanye militer untuk menggalakkan histeria anti-PKI.

Angkatan Darat mengendalikan dengan ketat keberadaan wartawan asing, melarang banyak dari mereka masuk Indonesia sejak Oktober 1965, dan membatasi gerak mereka yang berhasil tinggal atau menyelinap masuk agar tetap berada di Jakarta. Sebagian besar pemberitaan para wartawan yang berdiam di Jakarta terpusat pada manuver-manuver politik tingkat tinggi Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang lain. Para juru bicara militer dengan sopan meyakinkan para wartawan bahwa pembunuhan apa pun yang terjadi adalah akibat kemarahan rakyat yang tak terkendali, bukan pembantaian yang diatur tentara. Dari cerita-cerita yang merembes ke Jakarta, para wartawan menduga-duga bahwa angka korban mati yang diumumkan Sukarno pada Januari 1966, yaitu 87.000, sangat jauh di bawah angka sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat memberitakan pembunuhan besar-besaran itu selengkap-lengkapnya sampai sesudah Angkatan Darat melonggarkan batasan-batasan bergerak pada Maret 1966. Skala pembunuhan mulai menjadi lebih jelas ketika wartawan dapat pergi ke daerah-daerah di luar Jakarta. Wartawan pertama yang melakukan penyelidikan, Stanley Karnow dari *Washington Post*, setelah melalui perjalanan selama dua pekan di seluruh Jawa dan Bali, memperkirakan setengah juta orang telah mati dibunuh. Seth King dari *New York Times*, pada Mei 1966, mengajukan angka perkiraan moderat, yaitu sebanyak 300.000 korban tewas. Seymour Topping, rekan Seth King dari koran yang sama, melakukan penyelidikan beberapa bulan kemudian dan menyimpulkan bahwa jumlah korban mati seluruhnya bahkan dapat

lebih dari setengah juta orang.[65]

Ketiga koresponden asing itu memberitakan bahwa personil militer dan milisi sipil antikomunis terlibat dalam pembunuhan dan sering kali mereka melakukannya dengan cara-cara yang sistematik dan rahasia. King mencatat bahwa orang-orang asing di Jakarta tidak menyaksikan kekerasan apa pun. Mereka hanya mengetahui bahwa tentara pada malam hari melakukan penggerebekan rumah-rumah, menggiring mereka yang dicurigai sebagai simpatisan PKI ke atas truk, dan membawa mereka ke luar kota sebelum fajar. King mendengar cerita dari seseorang yang kebetulan menumpang sebuah truk tentara bahwa kira-kira lima ribu orang dari Jakarta yang diambil dari rumah mereka masing-masing dibawa ke sebuah penjara di pinggir kota, dan di sana mereka mati perlahan-lahan karena kelaparan. (King tidak menyebut adanya ribuan orang lagi yang kelaparan di penjara-penjara di dalam kota Jakarta). Karnow menggambarkan pembunuhan besar-besaran di kota Salatiga di Jawa Tengah: "Di setiap bangunan, seorang kapten tentara membacakan nama-nama dari sebuah daftar, memberi tahu mereka tentang kesalahan masing-masing – atas nama hukum walaupun sidang pengadilan tidak pernah diadakan. Akhirnya truk-truk itu masing-masing diisi dengan enam puluh tawanan, dan dengan dikawal satu peleton tentara, menempuh jarak sekitar enam mil, melalui hamparan sawah dan kebun karet yang gelap menuju suatu kawasan tandus di dekat Desa Djelok. Para petani di daerah tersebut sudah diperintahkan lurah untuk menggali sebuah lubang besar satu hari sebelumnya. Para tawanan, dibariskan berdiri di bibir lubang, lalu ditembaki dalam beberapa menit. Beberapa dari mereka barangkali dikubur hidup-hidup." Dari kisah-kisah semacam ini, Karnow sampai pada kesimpulan bahwa tentara mengorganisasi pembantaian berkelanjutan secara sistematik di Jawa Tengah.[66]

Topping juga menyimpulkan bahwa militer melakukan pembunuhan secara kilat terhadap rakyat di Jawa Tengah tetapi ia mengatakan pola kekerasannya berbeda dengan yang terjadi di Jawa Timur dan Bali. Di dua daerah terakhir militer biasanya menghasut penduduk sipil untuk melakukan pembunuhan, ketimbang memerintahkan personil mereka sendiri melakukan tugas kotor itu. Tentara menebar suasana ketakutan dengan mengatakan kepada masyarakat di kota dan desa bahwa PKI sedang bersiap-siap melakukan pembunuhan besar-besaran: menggali

kuburan massal, menyusun daftar hitam orang yang akan dibunuh, menyiapkan alat khusus pencungkil mata. Topping menyatakan bahwa pada umumnya para pengamat Indonesia yang berpengalaman menganggap cerita-cerita yang disebarkan tentara sebagai cerita yang dibuat-buat: "Tidak ada bukti kuat bahwa orang-orang Komunis mempunyai perbekalan senjata yang begitu besar atau merencanakan pemberontakan massa di seluruh tanah air untuk merebut kekuasaan dalam waktu dekat."[67] Topping menambahkan bahwa pengingkaran tentara terhadap tanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi disangkal bukan hanya oleh hasil penyelidikan singkatnya sendiri tapi juga oleh pernyataan pribadi salah satu dari para panglima utama Suharto sendiri. Mayor Jenderal Sumitro, Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur, dalam wawancaranya dengan Topping berkata, bahwa Suharto, pada November 1965, mengeluarkan perintah secara rinci tentang pembasmian PKI. Dalam Desember 1965, Sumitro beserta stafnya mengunjungi seluruh komando distrik militer di Jawa Timur untuk memastikan bahwa perintah itu telah dipahami. Topping mengutip Sumitro yang mengakui bahwa "sebagian besar komandan setempat telah menunaikan tugas sebaik-baiknya untuk membunuh kader-kader [PKI] sebanyak-banyaknya."[68]

Sampai pertengahan 1966 dua surat kabar utama Amerika Serikat sudah menyiarkan ke publik bahwa Angkatan Darat Indonesia di bawah Mayor Jenderal Suharto adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pembunuhan massal sekitar setengah juta orang, dan bahwa banyak pembunuhan itu dilakukan secara kejam terhadap para tawanan terpilih. Namun demikian berita ini tidak mengalangi pemerintah Amerika Serikat memberikan sambutan hangatnya kepada Suharto selaku penguasa baru di Indonesia. Tidak satu pun pejabat pemerintahan Johnson menyatakan keberatan terhadap pelanggaran berat hak-hak asasi manusia yang dilakukan tentara Indonesia. Robert Kennedy menyesali kebisuan itu ketika mengucapkan pidatonya di New York City pada Januari 1966: "Kita telah bersuara lantang terhadap pembantaian tak manusiawi yang dilakukan oleh kaum Nazi dan kaum Komunis. Tapi apakah kita akan bersuara lantang pula terhadap pembantaian keji di Indonesia, yang lebih dari 100.000 orang yang dituduh Komunis bukanlah pelaku tetapi korban?"[69] Jawaban terhadap pertanyaan itu, tentu saja, tidak. Bagaimana pun juga pemerintah AS telah membantu

Suharto naik takhta. Kegembiraan akan penggulingan Sukarno dan penghancuran PKI mengalahkan pertimbangan kemanusiaan apa pun.

Prioritas-prioritas ini tampak jelas dalam laporan utama tentang Suharto dalam majalah *Time* pada Juli 1966. Dengan tepat *Time* memberitakan, "militer bertanggung jawab atas kebanyakan pembunuhan yang terjadi" dan mengakui bahwa pembunuhan itu "telah menghilangkan lebih banyak nyawa ketimbang kehilangan [yang diderita] AS dalam seluruh peperangan di sepanjang abad ini." Tanpa menghindari penggambaran detil-detil yang mengerikan, laporan utama itu menyebutkan bahwa beberapa orang yang dicurigai sebagai komunis telah dipancung dan mayat mereka dibuang di kali-kali. Namun selanjutnya artikel itu memuji rezim baru Suharto yang didominasi militer karena "sangat konstitusional." Suharto dikutip saat mengatakan, "Indonesia negara yang berdasar hukum, bukan pada kekuasaan belaka."[70] Oleh karena dari sudut kepentingan politik luar negeri AS banjir darah itu konstruktif, majalah *Time* dapat menampilkan pelaku kejahatan dalam sorotan yang sama sekali positif walaupun hasilnya kemudian adalah penjajaran yang sangat aneh antara kepala-kepala yang dipenggal dan prosedur konstitusional.

Kecaman terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi diredam bukan hanya karena para pelakunya antikomunis. Banyak pemberitaan media mengecilkan tanggung jawab militer atas pembunuhan sambil membesar-besarkan peranan masyarakat sipil. Stereotip yang dibuat para orientalis mengenai orang Indonesia yang primitif, terbelakang, dan bengis mengemuka sehingga menenggelamkan pemberitaan faktual tentang pembunuhan-pembunuhan berdarah dingin yang diorganisir militer. Orang asing digiring untuk mempercayai bahwa pembunuhan massal itu merupakan ledakan tiba-tiba, tanpa nalar, dan penuh dendam kesumat masyarakat rentan yang meradang oleh sepak terjang agresif PKI selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa penyelidikan mendalam, wartawan-wartawan merasa yakin bahwa prasangka mereka terhadap apa yang disebut watak ketimuran membenarkan adanya kesimpulan definitif. Judul utama salah satu tajuk rencana C.L. Sulzberger dalam *New York Times* terbaca "When a Nation Runs Amok" [Ketika Suatu Bangsa Mengamuk]. Bagi Sulzberger pembunuhan-pembunuhan itu tidak mengejutkan karena terjadi di "Asia yang berperangai keras, dengan

kehidupan murah.” Banjir darah itu hanyalah memantapkan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia mempunyai “ciri pembawaan Melayu yang ganjil, tabiat haus darah membabi buta yang telah menyumbang satu kata dari sedikit kata Melayu dalam bahasa-bahasa lain: *amok.*”[71]

Demikian pula laporan Don Moser untuk majalah *Life* tak beranjak terlalu jauh dari ungkapan-ungkapan klise dangkal tentang bangsa Indonesia yang pramodern dan eksotik: “Tidak ada di mana pun selain di pulau-pulau yang misterius dan elok ini ... peristiwa-peristiwa dapat meledak begitu tak terduga, begitu kejam, tak hanya diwarnai dengan fanatisme, tapi juga haus darah dan hal-hal semacam sihir dan santet.” Kekerasan itu bahkan tidak melibatkan militer; melainkan timbul sepenuhnya dari kalangan rakyat. Pembantaian “gila-gilaan” di Bali merupakan “pesta pora kebengisan.” Di mana-mana terjadi “histeria massal.”[72] Karangan-karangan Robert Shaplen di majalah *New Yorker,* yang lebih panjang lebar, mengulang alur kisah yang sama tentang keberangan spontan terhadap PKI. Bangsa Indonesia adalah bangsa primitif belaka yang tidak dapat disalahkan dalam hal pelanggaran hak-hak asasi manusia karena mereka belum cukup beradab untuk dipandang sebagai manusia yang dewasa. Represi terhadap PKI “berubah menjadi luapan balas dendam liar dan tak pandang bulu berdasarkan permusuhan pribadi dan histeria massal di tengah masyarakat yang secara emosional dan psikologis memang siap mengamuk.”[73] Adalah tidak adil jika apa yang disebutnya sebagai “segenap dunia ‘berakal’” untuk mengharapkan bangsa Indonesia merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah karena “bangsa ini dapat menjelaskan pertumpahan darah tersebut, sekurang-kurangnya demi kepuasan hati mereka sendiri, menurut pengertian kuno tentang katarsis dan pembasmian kejahatan.”[74] Sembari menghidupkan kembali mitos-mitos tua kolonial tentang “orang-orang pribumi” yang terbelenggu pada tradisi dan bersifat mistik, Shaplen secara tidak kritis menceritakan ulang versi tentara Indonesia tentang peristiwa-peristiwa 1965-1966.

Beberapa pakar tentang Indonesia tetap percaya kepada cerita tentang pembantaian itu sebagai balas dendam spontan terhadap PKI.[75] Antropolog Clifford Geertz, berdasarkan kunjungannya ke sebuah kota kecil di Jawa Timur pada 1970-an dan 1980-an, mengatakan bahwa orang di kota itu mengenang pembunuhan tersebut sebagai “penggalan

retak sejarah yang kadang-kadang diingat sebagai akibat dari politik."[76] Dalam esainya yang terkenal mengenai adu ayam di Bali, Geertz sambil lalu menyebut bahwa kekerasan dalam adu ayam itu memperlihatkan pembantaian yang terjadi di sebuah pulau dengan kerukunan sosialnya yang terkenal di seluruh dunia itu "tidak bertentangan dengan hukum alam"; adu ayam itu menurutnya merupakan penyaluran kecenderungan kekerasan yang ada dalam masyarakat.[77] Theodore Friend, seorang sejarawan Asia Tenggara, dengan yakin mengatakan bahwa pembunuhan itu mencerminkan "ledakan kekerasan massal yang hebat"; dimulai "secara spontan" tanpa arahan militer dan merupakan kekerasan "muka lawan muka" dan dengan "kedekatan yang aneh."[78]

Sungguh mencengangkan bahwa kekerasan anti-PKI, suatu kejadian dengan skala demikian luas, ternyata salah dimengerti sedemikian parah. Tentu saja keterlibatan baik personil militer maupun penduduk dalam pembunuhan itu telah mengaburkan masalah tanggung jawab. Bagaimana pun, dari sedikit yang sudah diketahui, jelaslah bahwa militer yang memikul bagian tanggung jawab terbesar, dan bahwa pembunuhan itu lebih merupakan kekerasan birokratik yang terencana ketimbang kekerasan massa yang bersifat spontan. Dengan mengarang cerita-cerita bohong mengenai G-30-S dan mengendalikan media massa sedemikian ketat, klik perwira di sekitar Suharto menciptakan suasana di kalangan penduduk sipil bahwa PKI sedang bersiap-siap untuk perang. Tanpa provokasi yang disengaja oleh ahli-ahli propaganda militer, penduduk tidak akan percaya bahwa PKI merupakan ancaman yang mematikan karena partai ini bersikap pasif setelah G-30-S ditaklukkan.[79] Militer bekerja keras menyulut kemarahan rakyat melawan PKI sejak awal Oktober 1965. Ahli-ahli propaganda Suharto menemukan akronim untuk G-30-S, yang dikaitkannya dengan polisi rahasia Nazi Jerman. Akronim itu, Gestapu, tidak sesuai dengan kepanjangan yang berbunyi *Ge*rakan *T*ig*a* *Pu*luh *S*eptember.[80] Surat kabar dan siaran radio dipenuhi dengan berita palsu tentang apa yang dinamakan Gestapu: bahwa PKI menimbun senjata dari Tiongkok, menggali kuburan massal, menyusun daftar orang-orang yang akan dibunuh, mengumpulkan alat khusus untuk mencungkil mata, dan seterusnya.[81] Militer menggambarkan jutaan orang seperti setan dan bukan manusia dengan menyusun mata rantai asosiasi: G-30-S *sama dengan* PKI *sama dengan* barang siapa saja

yang diasosiasikan dengan PKI *sama dengan* kejahatan mutlak.

Propaganda ini sendiri, bagaimana pun, tidak cukup untuk memprovokasi penduduk sipil agar ikut melakukan kekerasan. Propaganda merupakan faktor yang penting tapi tidak cukup. Perbedaan waktu terjadinya kekerasan di daerah-daerah yang berlainan menunjukkan bahwa kedatangan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD) berperan sebagai pemicu. Pengamatan Anderson dan McVey di Jawa Tengah telah saya kemukakan di atas. Kekerasan baru dimulai saat pasukan RPKAD tiba di ibu kota provinsi tersebut, Semarang, pada 17 Oktober, dan kemudian menyebar ke kota-kota kecil dan desa-desa pada hari-hari berikutnya.[82] Beruntunglah Jawa Barat lolos dari serbuan karena RPKAD harus bergegas masuk Jawa Tengah, yang memang merupakan basis PKI. Relatif sedikit pembunuhan yang terjadi di Jawa Barat walaupun pada masa sebelumnya terjadi konflik tajam antara PKI dan organisasi anti-PKI.[83]

Kasus Bali memang patut ditilik, terutama karena mereka yang berpegang pada tesis “kekerasan spontan” selalu menunjuk Bali sebagai bukti. Mereka menyatakan masyarakat Bali melakukan pesta pembunuhan gila-gilaan sampai saat pasukan RPKAD tiba awal Desember 1965 untuk menghentikan mereka.[84] Pendapat ini salah dalam mengemukakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Sebelum pasukan RPKAD datang pada 7 Desember, tidak ada pembunuhan berarti di Bali.[85] Selama bulan-bulan Oktober dan November situasi memang tegang. Gerombolan antikomunis menyerang dan membakar rumah-rumah anggota PKI. Beberapa anggota partai ditangkap; sebagian lain menyerahkan diri kepada polisi untuk mendapat perlindungan. Tapi tidak terjadi pembantaian besar-besaran sebelum 7 Desember. Semua pemimpin PKI masih hidup saat RPKAD tiba.[86] Adalah RPKAD yang mengatur dan melaksanakan eksekusi para pemimpin PKI Bali pada 16 Desember 1965 di Desa Kapal.[87] Ada banyak saksi kejadian itu karena RPKAD mengundang politisi-politisi antikomunis di Bali selatan untuk menonton.[88] Pembantaian sekitar 30 orang ini, termasuk I Gde Puger, seorang pengusaha berada yang dikenal sebagai penyandang dana untuk PKI walaupun ia bukan anggota partai, mengungkapkan bahwa militer mendorong penduduk sipil untuk membunuh orang-orang yang terkait dengan PKI. Mengingat RPKAD yang memulai pembunuhan itu, maka

kita tidak bisa tidak memperkirakan bahwa pasukan parakomando ini telah menerima perintah langsung dari Suharto untuk melakukannya. Koordinasi antara Suharto dan RPKAD sangat erat: ia datang di Bali satu hari setelah pasukan parakomando mendarat di sana.[89]

Orang-orang sipil yang terlibat dalam pembunuhan, apakah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau tempat-tempat lainnya, umumnya anggota milisi yang sudah dilatih oleh militer (baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober), dan diberi senjata, kendaraan, serta jaminan kebal hukum. Mereka bukan sekadar orang-orang sipil biasa yang bertindak mandiri dari militer. Walaupun dinamika interaksi setepatnya antara militer dan milisi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, secara keseluruhan militer memainkan peran dominan. Robert Cribb mencatat bahwa kelompok-kelompok milisi ini umumnya tidak bertahan lama setelah 1966; banyak yang "kelihatannya segera menghilang setelah tugas berdarah mereka selesai," berbeda dengan, misalnya, "laskar-laskar otonom yang lahir setelah 1945 dalam perang kemerdekaan melawan Belanda" dan menjadi masalah bagi upaya monopoli militer terhadap angkatan bersenjata pada 1950-an.[90] Sejak 1965 militer secara rutin membentuk kelompok-kelompok kelaskaran agar pada saat melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata mereka selalu dapat mengingkari keterlibatan mereka.[91] Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa situasi kekerasan dalam 1965-1966 itu sendiri sangat berbeda.

Hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sejak awal pembunuhan-pembunuhan itu memang sengaja hendak dilupakan. Dalam bukunya *Silencing the Past*, Michel-Ralph Trouillot menulis bahwa orang "berperan serta dalam sejarah baik sebagai pelaku maupun pencerita."[92] Para pelaku sejarah sekaligus menjadi pencerita tentang jejak langkah mereka sendiri. Cerita yang hendak disampaikan si pelaku bisa jadi sangat berjalinan dengan jejak langkahnya sendiri. Dalam kasus teror 1965-66, para perwira militer menghendaki cerita tentang teror yang mereka lakukan, seperti halnya tentang para korban mereka, lenyap. Mereka tidak bercerita tentang kampanye teror yang mereka lakukan saat itu. Seperti ditulis Trouillot: "Sejarawan profesional sendiri tidak menyusun kerangka naratif untuk menempatkan cerita-cerita mereka. Sering kali ada orang lain yang sudah masuk pentas lebih dulu dan mengatur lingkaran

kebisuan."[93] Suharto yang merencanakan pembunuhan namun ia memastikan bahwa ia tidak dapat dibuktikan sebagai dalangnya. Saat pembunuhan-pembunuhan terjadi ia tidak menyinggungnya sama sekali, tapi memuji-muji proses abstrak tentang penghancuran PKI "sampai ke akar-akarnya."[94] Caranya menutupi dan sekaligus memuji pembunuhan itu mirip dengan cara yang dipakai para pelaku genosida di Rwanda: "Serang korban secara verbal, bantah – bahkan di hadapan bukti yang paling jelas sekalipun – bahwa telah atau sedang terjadi kekerasan fisik dan hindari masalah tanggung jawab sehingga, sekalipun ada korban, identitas para pembunuh tetap kabur dan tidak dapat dipastikan, hampir lebur dalam ketiadaan. Saat berbicara kepada para pendukungmu jangan pernah menuntut 'penghargaan' atas apa yang sesungguhnya kamu perbuat tetapi isyaratkan keuntungan besar yang diperoleh dari perbuatan-perbuatan tak bernama yang telah dilakukan, berbagi persekongkolan dalam rahasia tak terkatakan dengan pendengarmu."[95]

Kesimpulan yang saya tarik dari literatur yang tersedia dan dari wawancara dengan para korban, pelaku, dan saksi ialah bahwa pada umumnya pembunuhan itu merupakan eksekusi terhadap tawanan. Berlawanan dengan keyakinan umum, kekerasan gila-gilaan oleh penduduk desa bukanlah merupakan pola. Biasanya pasukan Suharto memilih melakukan penghilangan misterius ketimbang eksekusi di depan publik untuk memberi contoh kepada masyarakat. Tentara dan milisi cenderung melancarkan pembantaian besar-besaran secara rahasia: mereka mengambil para tahanan dari penjara pada malam hari, membawa mereka dengan truk ke tempat-tempat terpencil, mengeksekusi mereka, lalu mengubur jasad-jasad mereka dalam kuburan massal tanpa tanda, atau melemparnya ke sungai.[96]

Jika dibandingkan dengan pembunuhan massal itu, G-30-S tampak seperti peristiwa kecil saja. Buku ini saya beri judul *Dalih Pembunuhan Massal* untuk menekankan bahwa arti penting sesungguhnya G-30-S terletak pada hubungan gerakan ini dengan peristiwa yang mengikutinya. Gerakan 30 September menjadi peristiwa penting hanya karena Suharto dan para perwira di sekitarnya pada awal Oktober 1965 memutuskan untuk membuat peristiwa itu menjadi penting: mereka mengeramatkan G-30-S, maksudnya, mereka berikan arti penting yang lebih besar dari yang sebenarnya termuat dalam gerakan ini. Mereka mengguna-

kan G-30-S sebagai dalih untuk membenarkan langkah-langkah yang memang sudah mereka rencanakan lebih dulu terhadap PKI dan Presiden Sukarno. Mungkin personil militer dan orang-orang sipil yang bertanggung jawab terhadap teror itu terus-menerus berbicara tentang G-30-S untuk mengalangi pembicaraan mengenai kejahatan mereka sendiri. Mungkin mereka melebih-lebihkan sifat jahat G-30-S dan PKI untuk menenangkan batin mereka sendiri. Ketika mereka mengakui terjadinya pembunuhan massal, mereka mengatakan G-30-S-lah *penyebab* terjadinya pembunuhan, seakan-akan kematian ratusan ribu orang dan penahanan terhadap satu juta lebih lainnya merupakan tanggapan tidak terhindarkan, yang setimpal dan alamiah. Inilah narasi penyalahan korban yang selama ini terpatri sebagai ajaran umum.[97]

Sebagai dalih, G-30-S sepadan dengan pembakaran Reichstag, gedung parlemen Jerman, yang oleh Hitler digunakan sebagai alasan untuk menghancurkan Partai Komunis Jerman pada awal 1933. Polisi Berlin memastikan temuan bahwa api di dalam ruang utama gedung tersebut disulut oleh seorang radikal Belanda, yang baru masuk kota sepuluh hari sebelum peristiwa itu terjadi.[98] Tapi Hitler, bahkan sebelum mendengar hasil temuan polisi, sudah memutuskan bahwa pembakaran gedung parlemen itu merupakan awalan pemberontakan nasional Partai Komunis. Dalam jam-jam pertama setelah api menyala pada pagi 27 Februari, polisi mulai menangkapi orang-orang komunis. Tokoh-tokoh Nazi menyatakan bahwa mereka melihat para pembakar gedung bersama tokoh-tokoh komunis sebelum memasuki gedung dan bahwa partai merencanakan membakar lebih banyak gedung lagi, meracuni dapur umum, menculik istri dan anak-anak pejabat pemerintah, dan menyabot jaringan listrik serta kereta api. Kepada kabinetnya Hitler mengatakan, satu hari setelah kebakaran: "Secara psikologis sekarang sudah tiba waktu yang tepat untuk konfrontasi. Tak ada guna menunggu lebih lama lagi."[99] Puluhan ribu anggota Partai Komunis ditangkap selama pekan-pekan berikutnya dan ditahan di kamp-kamp konsentrasi Nazi yang pertama, seperti misalnya kamp konsentrasi Dachau. Kebakaran Reichstag merupakan dalih yang sangat tepat untuk membenarkan penggempuran yang sudah direncanakan oleh kaum antikomunis Nazi. Suasana krisis yang direkayasa membuka pintu bagi mereka untuk mengesahkan undang-undang yang mencabut banyak pasal-pasal konstitusi dan dengan

begitu mencabut hak-hak sipil semua orang Jerman.

Ada banyak kemiripan antara G-30-S dan kebakaran Reichstag: keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menyerang Partai Komunis, propaganda yang membesar-besarkan bahaya yang datang dari partai, penahanan massal di kamp-kamp konsentrasi, keadaan darurat bikinan yang dimanfaatkan sebagai saat untuk merebut kekuasaan diktatorial. Namun begitu analogi ini tidak tepat benar. Dalam kasus G-30-S, ketua PKI bagaimana pun juga terlibat (D.N. Aidit berada di pangkalan AURI Halim) dan beberapa personil PKI ikut berperan serta. PKI tidak dapat dibebaskan sama sekali dari hubungannya dengan G-30-S seperti halnya Partai Komunis Jerman dibebaskan dari peristiwa kebakaran Reichstag. Namun, apa pun hubungan antara PKI dan G-30-S tidak dengan sendirinya memadai untuk membenarkan kekerasan terhadap siapa pun yang berkaitan dengan partai.

Suharto menjalankan pengambilalihan kekuasaan negara di balik selubung prosedur hukum. Ia menyembunyikan kudeta merangkaknya sebagai tindakan murni konstitusional dengan restu Sukarno untuk menggagalkan kup PKI. Suharto tetap mempertahankan Sukarno sebagai presiden di atas kertas sampai Maret 1967, satu setengah tahun setelah ia kehilangan kekuasaan efektifnya. Sukarno mengeluarkan protes lisan, tetapi kata-katanya tak berdaya karena sejak pekan pertama Oktober 1965 militer telah menguasai media massa. Ia bahkan kalah dalam memberi nama peristiwa itu sendiri. Sebagai usaha menghentikan media massa yang menggunakan sebutan konotatif *Gestapu* untuk G-30-S, maka pada sidang kabinet 9 Oktober 1965 Sukarno mengajukan sebutan Gestok sebagai akronim dari *Ge*rakan *Sat*u *Ok*tober.[100] Media yang telah dikuasai militer tak acuh kepadanya dan tetap bersikukuh dengan sebutan *Gestapu*. Walaupun Sukarno menyadari bahwa militer berangsur-angsur menggerogoti kekuasaannya, ia menahan diri dan tidak melancarkan tentangan secara serius. Alasan mengapa ia mau memainkan peran yang dirancang Suharto untuknya masih sulit dimengerti. Jika kita menyimak pidato-pidatonya tampak bahwa Sukarno terutama mengkhawatirkan Indonesia akan dipecah belah oleh apa yang disebutnya kekuatan-kekuatan "imperial, kolonial, dan neokolonial," gabungan musuh bersama yang ia singkat menjadi *nekolim*.[101] Sukarno khawatir bahwa jika ia berusaha menggalang pendukungnya melawan Suharto, akan

terbuka jalan bagi perang saudara tak terkendali yang malah akan menguntungkan nekolim. Dalam kekacauan serupa itu Indonesia akan terbagi menjadi negeri kecil-kecil, lalu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan negara-negara lain akan datang untuk menancapkan kawasan pengaruh masing-masing. Karena obsesinya terhadap kesatuan negerinya, Sukarno tampaknya percaya bahwa pertumpahan darah, betapapun mengerikan, masih lebih baik daripada Indonesia sebagai negara bangsa musnah dan kembali ke kekuasaan asing. Ia memilih memenuhi kemauan Suharto, membiarkan wewenangnya digerogoti, dan akhirnya keluar dari istana tanpa perlawanan.[102]

Bahkan di masa pasca-Suharto, kebanyakan orang Indonesia tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya Suharto naik ke tampuk kekuasaan. Sekarang ia dikutuk karena korupsi dan keserakahannya yang mencengangkan, tapi bukan karena penggambarannya tentang G-30-S yang tidak benar dan pembunuhan massal yang dilakukannya. Jejak berdarah yang mengawali kekuasaannya hampir tidak pernah diamati dengan kritis dan cermat. Kebanyakan kampiun gerakan reformasi anti-Suharto (misalnya Megawati Sukarnoputri atau Amien Rais) membangun karir politik mereka semasa Suharto dan tetap berpegang pada mitos-mitos resmi mengenai 1965. Monumen Kesaktian Pancasila masih tetap berdiri tegak. Peringatan resmi setiap tahun masih tetap diadakan meskipun tanpa kemegahan yang sama seperti dahulu.[103] Parlemen pasca-Suharto tetap mempertahankan hukum yang melarang pembicaraan publik mengenai Marxisme-Leninisme dan keterlibatan eks-tapol (dan anak cucu mereka) dalam partai politik.[104] Pembuatan film tentang Soe Hok Gie, seorang pemuda yang aktif dalam demo-demo anti-PKI dan anti-Sukarno (yang belakangan menyesali perbuatannya), dalam 2004-05 harus meminta izin polisi untuk menggunakan bendera palu arit PKI sebagai perlengkapan dan harus menyetujui untuk menyerahkan bendera-bendera itu kepada polisi untuk segera dibakar sesudah pembuatan film selesai.[105] Rezim Suharto membangun sebuah dunia fantasi tersendiri, yang unsur-unsurnya, terutama yang berkaitan dengan peristiwa 1965, terbukti masih bertahan gigih untuk tampak sebagai kebenaran abadi bagi bangsa Indonesia. Peninjauan kembali terhadap awal kelahiran sang rezim, yakni 'perebutan kekuasaan tak masuk akal' oleh Suharto (meminjam istilah Pascal), sudah lama tertunda.

CATATAN

[1] Dalam pidato-pidatonya sesudah terjadi G-30-S, Sukarno berulang kali menyebut kejadian itu sebagai sebuah "*rimpel in de geweldige oceaan*" (riak di samudra luas). Ia membandingkan proses revolusioner di Indonesia dengan lautan bergelora, yang terus-menerus menimbulkan puncak dan lembah di permukaan air laut. Lihat, misalnya, pidatonya pada saat melantik Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat pada 16 Oktober 1965, dalam Setiyono dan Triyana, ed., *Revolusi Belum Selesai,* I: 22-23, 38.

[2] Tentang jumlah tahanan politik, lihat esai pengantar Robert Cribb dalam buku yang disuntingnya, *Indonesian Killings,* 42, dan Fealy, *Release of Indonesia's Political Prisoners,* lampiran.

[3] Semua taksiran tentang jumlah orang yang dibunuh hanya perkiraan. Penelitian yang cermat dan menyeluruh belum pernah dilakukan. Komisi pencari fakta yang ditunjuk Presiden Sukarno melaporkan pada Januari 1966 bahwa terdapat 78.500 orang mati dibunuh. Angka ini sengaja diperkecil oleh sebuah komisi yang dikuasai perwira-perwira militer dan yang mendasarkan laporannya pada informasi dari kalangan perwira militer juga. Salah satu dari dua orang sipil di dalam komisi, Oei Tjoe Tat, mengatakan bahwa secara pribadi ia menyampaikan kepada Sukarno, jumlah sebenarnya mendekati angka 500.000 atau 600.000 (Toer dan Prasetyo, eds., *Memoar Oei Tjoe Tat,* 192). Pembahasan tentang angka perkiraan ini, lihat Cribb, "How Many Deaths?"

[4] Pimpinan inti, seperti yang akan saya uraikan dalam Bab I, ialah dua tokoh sipil, Sjam dan Pono, serta tiga perwira militer: Letnan Kolonel Untung, Mayor Soejono, dan Kolonel Abdul Latief.

[5] Pidato pembelaan Kolonel Latief diterbitkan sendiri di Eropa bersamaan dengan saat ia diadili. Teks ini diterbitkan ulang di Indonesia sesudah Suharto jatuh (Latief, *Pledoi Kol. A. Latief*). Banyak orang, termasuk saya, meminta kepada Latief agar menjelaskan G-30-S dengan lebih rinci. Jawaban standar Latief selalu meminta penanya agar membaca pidato pembelaan yang telah diterbitkannya itu. Penolakannya untuk menulis tentang G-30-S bukan disebabkan oleh kehilangan memori. Pada akhir 1980-an, ketika masih dalam penjara, ia pernah menulis secara rinci naskah 118 halaman, lengkap dengan delapan diagram, tentang pertempuran tunggal yang terjadi enam belas tahun sebelum G-30-S ("Serangan Umum 1 Maret 1949"). Ia meninggal karena sakit pada umur 78 tahun pada 6 April 2005 di Jakarta.

[6] Tentang kisah-kisah ini, lihat Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia,* 291-327.

[7] Ricklefs, *History of Modern Indonesia,* 268.

[8] Cribb dan Brown, *Modern Indonesia,* 97.

[9] Pemerintah telah menerbitkan sejarah monumen itu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Hakekat Pembangunan Monumen Pancasila Sakti*.

[10] McGregor, "Commemoration of 1 October, 'Hari Kesaktian Pancasila,'" 43.

[11] Sebuah pamflet yang dijual di museum (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Buku Panduan*

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya) dengan sangat baik mencantumkan daftar diorama. Dari 42 diorama, 15 menggambarkan insiden dari 1945 sampai 1948, ketika PKI terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda.

[12] Museum Sejarah Monumen Nasional yang terletak di lantai dasar Monumen Nasional, di tengah Lapangan Merdeka, juga tidak menyebut PKI dalam perlawanan terhadap penjajah. Rencana pertama museum itu, yang ditulis oleh sebuah panitia di bawah pengawasan Sukarno pada 1964, mengusulkan sebuah diorama yang menggambarkan pemberontakan PKI 1926 di Banten. Setelah mengambil alih kekuasaan, Suharto mencampakkan rencana itu dan menyusun sebuah panitia baru pada 1969 di bawah pengawasan sejarawan Nugroho Notosusanto. Lihat McGregor, "Representing the Indonesian Past," 105-106.

[13] Badiou, *Ethics*, 41.

[14] Empat novel Pramoedya Ananta Toer, yang ditulisnya ketika menjadi tapol rezim Suharto, yaitu tetralogi Buru (*Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*), dapat dibaca sebagai penemuan kembali asal-usul gerakan nasionalis. Judul-judul dua novelnya yang pertama itu saja mencerminkan universalisme di balik sebuah gerakan untuk suatu partikularitas baru. Dalam karya-karya Pramoedya, bangsa Indonesia tidak tampil sebagai pendesakan chauvinisme etnik atau kultural, tapi lebih merupakan suatu persekutuan antara orang-orang yang menentang chauvinisme serupa itu. Novel pertama tetralogi ini didedikasikan untuk Han, nama panggilan seorang ilmuwan Belanda, Gertrudes Johan Resink.

[15] Badiou, *Ethics*, 73-74. Untuk ulasan lebih luas tentang pendapat Badiou mengenai peristiwa dan kebenaran, lihat Hallward, *Badiou*, 107-80.

[16] Bagian pelestarian sejarah militer, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, menerbitkan empat jilid buku mengenai sejarah PKI: *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*. Lihat juga Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*; dan Suyitno, *Pemasyarakatan Bahaya Laten Komunis*.

[17] Suharto membentuk Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada 10 Oktober 1965 dan mendapat persetujuan dari Sukarno pada 1 November 1965. Selanjutnya kehadiran Kopkamtib selalu samar-samar karena bukan merupakan badan pemerintah dengan birokrasi tersendiri. Suharto merancangnya lebih sebagai fungsi khusus di tubuh militer. Hampir semua personilnya adalah perwira yang sekaligus memegang jabatan dalam struktur militer yang reguler. Southwood dan Flanagan mengatakan bahwa keberadaan Kopkamtib mencerminkan adanya keadaan darurat permanen, tapi mereka keliru menganggapnya sebagai badan yang berdiri sendiri. Southwood dan Flanagan, *Indonesia*, bab 4. Aturan yang terkait dengan lembaga itu dikumpulkan dalam Kopkamtib, *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Perintah yang Berhubungan dengan Kopkamtib 1965-1969*. Adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian membubarkan pewaris Kopkamtib, Bakorstanas, pada 2000.

[18] Schmitt, *Political Theology*, 5.

[19] Stewart Sutley membuat analisis yang bernas mengenai keadaan darurat pada 1965-66 dalam kerangka teori Schmitt: "The Indonesian 'New Order' as New Sovereign Space."

Satu-satunya kekurangan yang saya catat adalah bahwa ia gagal memahami upaya Suharto menormalisasi keadaan darurat.

[20] Giorgio Agamben memberikan analisis yang tajam mengenai dua paradoks ini: hukum yang menyatakan hukum tidak berlaku, dan kekecualian yang berubah menjadi aturan (dengan begitu meniadakan pembedaan antara kekecualian dan aturan). Karena Schmitt ingin menjaga keadaan kekecualian sebagai siasat sementara yang akan menjadi produktif bagi *rule of law*, maka ia tidak dapat menerima wawasan dari salah satu tesis Walter Benjamin yang terkenal mengenai sejarah bahwa "tradisi kaum tertindas mengajarkan kepada kita bahwa 'keadaan kekecualian' tempat kita hidup sesungguhnya merupakan aturan." Agamben, *State of Exception*, 52-88. Tentang domestikasi Schmitt terhadap keadaan kekecualian, lihat McCormick, "Dilemmas of Dictatorship."

[21] Heryanto, "Where Communism Never Dies."

[22] National Security Archives, wawancara untuk seri televisi CNN, "The Cold War," wawancara dengan Marshall Green, 15 Januari 1997, yang tersedia di situs http://www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/interviews/episode-15/green6.html

[23] Dokumen ini disiapkan bersama oleh CIA, NSA (National Security Agency), DIA (Defense Intelligence Agency), dan seksi intelijen Departemen Luar Negeri. Judulnya menggambarkan isinya: "Prospects for and Strategic Implications of a Communist Takeover in Indonesia" (Prospek dan Implikasi Strategis dari Pengambilalihan Kekuasaan oleh Kaum Komunis di Indonesia). (*Foreign Relations of the United States, 1964-1968* [selanjutnya *FRUS*], 26: 290, www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/#FRUS).

[24] Kolko, *Confronting the Third World*, 174. Lihat juga T. McCormick, *America's Half-Century*, 100, 111, 114-118.

[25] Dikutip dalam Shoup dan Minter, *Imperial Brain Trust*, 234-236.

[26] *Ibid*., 236. Pernyataan kebijakan pada 1952 itu adalah memorandum National Security Council (NSC) 124/1. Pernyataan pada 1954 adalah memorandum NSC 5405.

[27] Dikutip dalam Scott, "Exporting Military-Economic Development," 241.

[28] Richard M. Nixon, "Asia After Vietnam," 111.

[29] William Bundy, prakata untuk Marshall Green, *Indonesia*, xi. Bundy saat itu Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik dari 1964 sampai 1969.

[30] McNamara, *In Retrospect*, 214.

[31] *Ibid*., 270.

[32] *Ibid*., 215. McGeorge Bundy, penasihat keamanan nasional untuk Kennedy dan Johnson, juga menegaskan bahwa Vietnam tidak lagi merupakan kepentingan yang vital, "paling tidak sejak adanya revolusi antikomunis di Indonesia" (dikutip dalam John Mueller, "Reassessment of American Policy," 52). Keputusan pemerintah Johnson pada awal sampai medio-1965 untuk meningkatkan perang secara dramatik (dengan pemboman atas Vietnam Utara dan memasukkan pasukan darat AS ke Vietnam Selatan) tidak dengan berpedoman pada teori domino. Seperti ditunjukkan George Kahin, pemerintah AS terutama prihatin pada 1965 dengan konsekuensi-konsekuensi simbolis akan kemungkinan jatuhnya Vietnam Selatan ke

tangan kaum komunis. Para pejabat AS ingin menghindari rasa terhina dan memperingatkan bangsa-bangsa lain bahwa perlawanan terhadap tentara AS akan menanggung harga mahal, bahkan seandainya pun perlawanan itu pada akhirnya menang (G. Kahin, *Intervention*, 283, 312-314, 356-358, 363, 375, 390-393). Untuk teori domino, lihat juga Porter, *Perils of Dominance*, 243-258.

[33] *New York Times*, 11 Oktober 1965, hal. 1.

[34] *New York Times*, 19 Juni 1966, hal. 12E.

[35] *Time* (edisi Kanada), 15 Juli 1966, hal. 44.

[36] Dikutip dalam Noam Chomsky, *Year 501*, 126.

[37] Chomsky dan Herman, *The Political Economy of Human Rights,* I: 205-217.

[38] Saya penyunting bersama sebuah kumpulan esai mengenai pengalaman para korban: Roosa, Ratih, dan Farid, eds., *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*.

[39] Peter Dale Scott, yang mempelajari G-30-S dan juga pembunuhan terhadap Kennedy, mengajukan istilah *deep politics* untuk mengacu pada aspek-aspek negara yang dirahasiakan, "semua praktek dan perencanaan politik yang, sengaja atau tidak, biasanya ditutupi ketimbang diakui." Yang dimaksud, misalnya, penggunaan sindikat-sindikat kejahatan yang terorganisir oleh negara (*Deep Politics and the Death of JFK*, 7, 10). Buku puisi Scott *Coming to Jakarta* merupakan renungan mendalam tentang keterlibatan orang-orang Amerika Utara yang beradab, terpelajar di dalam kekejaman di negeri-negeri seperti Indonesia, Vietnam, dan Cile.

[40] Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, 6: 265-267. Dokumen Supardjo juga disebut sambil lalu dalam dua buku yang baru terbit, Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965*, 132-33, 255, dan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, 8. Sulistyo mengutip dokumen itu hanya untuk membuktikan hal kecil bahwa G-30-S tidak memberikan persediaan makan bagi pasukannya.

[41] Rekaman sidang Mahmilub terhadap Supardjo pada 1967 tersedia di Museum TNI Satria Mandala, Jakarta, dan Kroch Library di Cornell University. Bagian-bagian tertentu dari rekaman sidang Supardjo digunakan oleh Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, 115, 127, 128, 132. Sebelumnya ada juga penemuan sumber primer penting yang terpendam di dalam rekaman Mahmilub. Awal 1980-an, saat membaca rekaman sidang Letkol Heru Atmodjo, Benedict Anderson menemukan laporan otopsi jasad tujuh perwira yang dibunuh G-30-S di Jakarta. Suharto menyembunyikan laporan itu, tapi militer melampirkannya dalam beberapa rekaman sidang Mahmilub sebagai bukti, tanpa menyadari akibatnya di masa mendatang (Anderson, "How Did the Generals Die?")

[42] Fic, *Anatomy of the Jakarta Coup*. Victor Fic (1922-2005) seorang ilmuwan politik, yang mulai menulis tentang Indonesia pada 1960-an. Selain dokumen Supardjo, buku Fic tidak memuat sesuatu yang baru, baik dalam hal sumber maupun cara analisis. Ia mengandalkan laporan interogasi militer dan dokumen Mahmilub, dan mengulang argumen-argumen yang dikemukakan dalam publikasi-publikasi rezim Suharto. Pendapat Fic bahwa baik pemerintah Tiongkok maupun Presiden Sukarno terlibat dalam G-30-S didasarkan atas

spekulasi belaka.

[43] Sugiarto, putra Supardjo, dalam pembicaraan dengan saya mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut ditulis oleh ayahnya.

[44] Hasan meminta saya mengumumkan nama dan menerbitkan memoarnya setelah ia wafat. Begitu identitas dan kisah hidupnya diungkap, akan jelas bahwa ia memang berposisi untuk memiliki informasi tangan pertama mengenai kejadian-kejadian yang diceritakannya.

[45] Siauw, "Berbagai Catatan dari Berbagai Macam Cerita." Tulisan Siauw lainnya yang tidak diterbitkan, "The Smiling General Harus Dituntut ke Mahkamah," berisi beberapa informasi yang sama.

[46] Baperki adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Mengenai kegiatannya lihat Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*. Tentara melarang organisasi ini pada akhir 1965 dan menangkap sebagian besar anggotanya. Mengenai Siauw lihat biografi informatif yang disusun putranya, Siauw Tiong Djin, *Siauw Giok Tjhan*.

[47] Soebandrio, *Kesaksianku tentang G-30-S*. Gramedia, penerbit terbesar di Indonesia, semula bermaksud menerbitkan buku itu. Tapi tanpa mengemukakan alasannya, mereka membatalkan penerbitannya dan menghancurkan 10.000 eksemplar yang sudah dicetak. Lihat *Gamma*, 8-14 November 2000, 16-17; *Tempo*, 4 Februari 2001, 68-69. Naskah itu sekarang sudah menjadi milik umum. Banyak orang dan kelompok di Indonesia yang kemudian menerbitkannya sendiri.

[48] Surodjo dan Soeparno, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku*. Mingguan *Tempo* memuat laporan khusus mengenai Dani, 4 Februari 2001, 60-65.

[49] Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965*.

[50] Berkas itu ialah *Indonesia, Malaysia-Singapore, Philippines, vol. 26 of* Department of State, *FRUS 1964-68*. Lihat catatan kaki 23 untuk mengakses bahan ini melalui internet.

[51] Darnton, "It Happened One Night," 60. Saya berterima kasih kepada Courtney Booker yang memberitahu saya mengenai esai tinjauan ini.

[52] Ritchie, *Rashomon,* 87.

[53] Darnton, "It Happened One Night," 60.

[54] Pada kesempatan arahan pers pada 12 Februari 2002, Menteri Pertahanan AS Rumsfeld menyatakan, "Ada hal-hal yang sudah diketahui. Ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita tahu. Kita juga tahu ada hal-hal tidak diketahui yang kita ketahui. Maksud saya, kita mengetahui ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Tapi juga ada hal-hal yang tidak kita ketahui kita tidak tahu, hal-hal yang kita tidak ketahui." Pernyataan ini bermaksud menanggapi laporan intelijen palsu tentang senjata pemusnah massal di Irak. Sebagai sebuah permakluman mengenai laporan tersebut, pernyataan Rumsfeld ini merupakan pengaburan masalah. Tetapi, pernyataan itu sendiri bukanlah omong kosong seperti dituduhkan para pengkritiknya. Masalahnya terletak pada keterbatasannya. Ia tidak menyebutkan kategori keempat yang pokok dalam psikoanalisis: yang diketahui tidak diketahui, atau hal-hal yang kita ketahui tapi kita tidak mengakui bahwa mengetahui. (Zizek, "What Rumsfeld Doesn't Know That He Knows about Abu Ghraib").

[55] Kisah detektif dari *genre* lebih tua biasanya sibuk dengan penjahat individual dan bukan pelaku kolektif. Kesulitan umum dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan massal adalah sifat kekerasan birokratik yang impersonal: pejabat di atas mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan bawahan, sementara bawahan mengaku bertindak mengikuti perintah dari atasan. Mungkin saja ambiguitas dan impersonalitas yang inheren dalam kekerasan birokratik inilah yang telah menghambat munculnya *genre* sastra yang akan menokohkan para penyelidik hak asasi manusia di masa kini.

[56] Sukarno menggunakan analogi ini dalam pidato 27 Oktober 1965 (Setiyono dan Triyana, eds., *Revolusi Belum Selesai,* I: 61-62).

[57] Korban terdiri dari enam jenderal Angkatan Darat, seorang letnan, anak perempuan Jenderal Nasution yang berumur lima tahun, seorang pengawal di rumah Leimena (tetangga Nasution), kemenakan Brigjen Pandjaitan yang berumur dua puluh empat tahun, dan dua perwira Angkatan Darat di Jawa Tengah. Kemenakan Pandjaitan yang lain luka parah akibat tembakan. Daftar ini didasarkan pada catatan Angkatan Darat. Pada kesempatan upacara di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1966 Angkatan Darat membagikan laporan singkat berbahasa Indonesia tentang G-30-S. Laporan ini diterjemahkan Kedutaan Besar Kanada (Canadian Embassy, Jakarta, to Under-Secretary of State for External Affairs, Ottawa, "Anniversary of Last Year's Abortive Coup", 11 Oktober 1966). Saya mengucapkan terima kasih kepada David Webster yang telah mengirim salinan dokumen ini kepada saya.

[58] Anderson dan McVey, *Preliminary Analysis,* 63.

[59] Tangan kanan Suharto, Letkol Ali Moertopo, saat berceramah di hadapan sekelompok pejabat pemerintah, menyatakan bahwa sebelum 1965 pengaruh PKI sangat meluas: "Orang Indonesia dipengaruhi komunisme sebagai sistem berpikir begitu lamanya sehingga bisa dikatakan sebagai cara berpikir orang Indonesia" (Bourchier dan Hadiz, eds., *Indonesian Politics and Society*, 110). Pernyataan ini berlebihan. Sukarno sebenarnya jauh lebih berpengaruh daripada PKI. Para pejabat rezim Suharto, seperti Ali Moertopo, tidak pernah sampai mengutuk Sukarno, tapi watak antikomunis mereka mengharuskan mereka bermusuhan terhadap salah satu prinsip Sukarno yang paling dikobar-kobarkan, yaitu Nasakom, persatuan kaum nasionalis, agama, dan komunis. Pada 1926 Sukarno sudah menyerukan agar orang-orang dari tiga aliran ini untuk mengenali kepentingan bersama mereka dan bersatu demi perjuangan nasionalis. Ia mengakui peran PKI dalam politik nasional. Sukarno, *Nationalism, Islam and Marxism*.

[60] Untuk renungan yang mendalam tentang psikologi penyangkalan, lihat Cohen, *States of Denial*.

[61] Satu contoh utama tentang kebungkaman yang demikian tertata ini dapat ditemukan dalam Notosusanto dan Saleh, *The Coup Attempt of the 'September 30 Movement' in Indonesia*.

[62] Suharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, 114.

[63] "Surat Perintah 11 Maret untuk mengatasi situasi konflik ketika itu," *Kompas*, 11 Maret 1971, hal. 1, 12.

[64] Cribb, ed., *Indonesian Killings 1965-1966*, 16.

[65] Karnow, "First Report on Horror in Indonesia," *Washington Post*, 17 April 1966, 1, 20; Seth King, "The Great Purge in Indonesia," *New York Times Magazine*, 8 Mei 1966; Seymour Topping, "Slaughter of Reds Gives Indonesia a Grim Legacy," *New York Times*, 24 Agustus 1966, 1, 16.

[66] Karnow, "First Report on Horror," 20.

[67] Topping, "Slaughter of Reds," 16.

[68] *Ibid*.

[69] Dikutip dalam Newfield, *Robert Kennedy,* 71.

[70] *Time* (edisi Kanada), 15 Juli 1966, 30-31.

[71] C.L. Sulzberger, "Foreign Affairs: When an Nation Runs Amok," *New York Times*, 13 April 1966, 40.

[72] Don Moser, "Where the Rivers Ran Crimson from Butchery," *Life*, 1 Juli 1966, 26-28.

[73] Shaplen, *Time Out of Hand,* 128. Buku ini berdasar pada karangan-karangan Shaplen tentang Asia Tenggara di *New Yorker.*

[74] *Ibid*., 26.

[75] *Ibid.,* 128.

[76] Geertz, *After the Fact,* 10.

[77] Geertz, *Interpretation of Cultures*, 452 n. 43.

[78] Friend, *Indonesian Destinies*, 99, 113, 115.

[79] Sebuah laporan yang diterbitkan tentara mencatat bahwa Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) mulai menggulung ribuan orang yang dicurigai sebagai anggota PKI di Jawa Tengah pada 18 Oktober 1965: "Dalam melaksanakan gerakan pembersihan, RPKAD tidak menjumpai perlawanan sedikit pun dari sisa-sisa kaum pemberontak." Dengan kata lain, "para pemberontak" itu tidak di dalam proses memberontak pada saat mereka ditangkap (Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat,* 506.

[80] Gestapu jelas merupakan akronim yang dibikin-bikin. Bahasa Indonesia biasanya membangun akronim dengan menggabungkan suku kata-suku kata, terkadang huruf-huruf, dari sejumlah kata dalam susunan yang menampakkan suku kata-suku katanya. Dalam Gestapu, huruf "s" itu tidak menurut aturan susunan katanya.

[81] Uraian paling rinci mengenai propaganda militer dalam bulan-bulan setelah G-30-S adalah Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia*, 291-317.

[82] Sebuah karangan yang berdasarkan riset sejarah lisan memberi penegasan dengan rinci terhadap pendapat Anderson dan McVey. Lihat Hasworo, "Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G-30-S."

[83] Wawancara dengan mantan anggota PKI di Jawa Barat: Djayadi, 1 April 2001, Tasikmalaya; Rusyana, 11 Juli 2001, Jakarta. Keduanya nama samaran.

[84] Hughes, *End of Sukarno*, bab 15, berjudul "Frenzy on Bali." Lihat juga Elson, *Suharto*,

125.

[85] Analisis paling jitu mengenai pembunuhan di Bali dilakukan oleh Robinson, *The Dark Side of Paradise*, 273-303.

[86] Ini berdasarkan wawancara saya dengan janda dari seorang mantan pimpinan PKI di Denpasar, Ibu Tiara (nama samaran), 15 Agustus 2000, dan Ibu Puger, 11 Januari 2001.

[87] Tanggal ini disebutkan oleh Wayan, nama samaran seseorang yang ditahan bersama I Gde Puger, salah seorang di antara orang-orang yang dibunuh di Kapal. Wayan mengingat tanggal ketika Puger dibawa keluar oleh tentara pada malam hari untuk dieksekusi. Wawancara dengan Wayan, 12 Juli 2004, Ubud.

[88] Wawancara dengan I Wayan Dana, 6 Januari 2001, Denpasar; Pugeg, 3 September 2000, Denpasar; Kompyang Suwira, 2 September 2000, Denpasar; I Ketut Reti, 7 Januari 2001; Poniti, 24 Agustus 2000, Kapal.

[89] Robinson, *The Dark Side of Paradise*, 295.

[90] Cribb, "Genocide in Indonesia, 1965-1966," 235.

[91] Kasus yang paling terkenal adalah referendum di Timor Leste pada 1999. Militer memobilisasi milisi untuk mengintimidasi pemilih agar mendukung integrasi dengan Indonesia. Setelah hasil referendum diumumkan, militer dan milisi menghancurkan Timor Leste sebagai tindak balas dendam, membunuh ratusan orang, dan memindahkan sekitar 250.000 orang secara paksa ke Timor Barat, dan membakar sekitar 70 persen dari bangunan yang ada. (Martinkus, *A Dirty Little War*; Bartu, "The Militia, the Military, and the People of Bobonaro").

[92] Trouillot, *Silencing the Past*, 2.

[93] *Ibid*., 26.

[94] Dalam pernyataannya kepada masyarakat Jawa Tengah, November 1965, Suharto menyerukan penghancuran Gerakan 30 September "sampai pada ke akar-akarnya." (Dinuth, *Dokumen Terpilih Sekitar G-30-S/PKI*, 137).

[95] Prunier, *The Rwandan Crisis*, 241. Dalam argumennya bahwa kaum chauvinis Hutu yang melakukan pembunuhan mengharapkan dunia internasional tidak campur tangan, Prunier mengajukan pertanyaan retoris, "Siapa yang ingat tentang setengah juta orang Tionghoa yang dibunuh atas perintah Presiden Suharto di Indonesia pada 1965?" (229). Pertanyaannya mengenai ingatan ini menarik karena mengungkap betapa buruk ingatan orang tentang pembunuhan massal di Indonesia. Keliru gagas yang umum terjadi menyatakan hanya orang Tionghoa saja yang dibunuh dalam peristiwa itu. Kendati ada orang Tionghoa yang dibunuh, mereka tidak menjadi sasaran sebagai kelompok. Beberapa orang Tionghoa dengan sukarela bekerja sama dengan tentara. Sebagian besar korban adalah orang Jawa dan Bali. Orang Tionghoa yang dibunuh biasanya terkait dengan organisasi kiri seperti Baperki. Andaikata kaum militan Hutu Power berhasil mempertahankan kekuasaan mereka seperti halnya Suharto, boleh jadi pembunuhan di Rwanda pun akan salah diingat sebagai suatu ledakan misterius dan spontan dari hasrat pembalasan dendam rakyat. Sehubungan dengan ulasan Prunier, hendaknya diperhatikan bahwa Suharto belum menjadi presiden pada 1965.

[96] Esai pengantar dalam buku yang ikut saya sunting memberikan analisis yang lebih luas, meskipun masih bersifat pendahuluan mengenai pembunuhan tersebut: Roosa, Ratih, dan Farid, eds., *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*, 8-18. Masih banyak penelitian sejarah lisan yang perlu dilakukan mengenai pembunuhan di berbagai tempat sebelum gambar yang lebih jelas dapat muncul.

[97] Kebebalan ingatan sosial mengenai pembunuhan ini dapat dilihat dalam karya Taufiq Ismail, salah seorang penyair Indonesia yang terkenal. Dalam buku kumpulan yang kacau-balau berisi gambar, dokumen, dan esai pendek (beberapa di antaranya mengenai masalah narkotika yang tidak relevan), Ismail menyatakan Marxisme-Leninisme adalah ideologi berpembawaan jahat yang pasti berujung pada genosida. Pembunuhan massal antikomunis 1965-66 dengan begitu merupakan tindak pencegahan: pembunuhan itu dilakukan untuk mencegah pembunuhan massal lebih besar yang akan dilakukan kaum komunis. (Ismail, *Katastrofi Mendunia*). Ilmuwan sosial Iwan Gardono Sujatmiko juga mengatakan bahwa pembunuhan massal itu merupakan upaya pencegahan: "Kehancuran PKI Tahun 1965-1966," 11. Tentu saja semua pembunuhan massal yang pernah ada dapat dibenarkan dengan cara demikian. Para pelaku selalu mengaku bertindak untuk membela diri. Pembenaran Ismail dan Sujatmiko secara eksplisit terhadap pembantaian politik ini tidak lazim dalam wacana publik Indonesia – kejadian ini biasanya diabaikan begitu saja – tapi secara akurat mencerminkan apa yang akan dinyatakan oleh mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu jika didesak untuk menjelaskan tindakan mereka.

[98] R. Evans, *Coming of the Third Reich,* 328-333.

[99] Dikutip dalam R. Evans, *Coming of the Third Reich,* 332.

[100] Setiawan, *Kamus Gestok,* 99-100.

[101] Lihat pidato-pidato yang dikumpulkan dalam Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai*.

[102] Strategi Sukarno untuk menghadapi Suharto dari akhir 1965 sampai Maret 1968 memerlukan perhatian lebih banyak dari apa yang diperoleh selama ini. Crouch, yang analisisnya paling rinci sejauh ini, berpendapat bahwa Sukarno yakin dapat mengalahkan Suharto (Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, 158-220. Juga dalam Legge*, Sukarno*, 430-58). Namun tetap menjadi pertanyaan, mengapa Sukarno tidak memecat Suharto atau menyerukan perlawanan terhadap pembantaian yang dilakukan tentara. Cara utama Sukarno melakukan perlawanan adalah dengan berpidato – cara yang diketahuinya sia-sia karena tentara, yang mengontrol media, memberangus atau mendistorsi pernyataan-pernyataannya. Apa pun alasan Sukarno menggunakan strategi kompromi ini, kiranya sulit menghindari kesimpulan bahwa ia bertindak sebagai pengecut menghadapi pembunuhan massal itu.

[103] Pada 2000 pemerintah menghapus Hari Kesaktian Pancasila untuk menghindari konotasi bahwa Pancasila itu sakti sehingga kedudukannya sama dengan agama. Sebutan baru yang digunakan, Peringatan Mengenang Tragedi Nasional Akibat Pengkhianatan Terhadap Pancasila, menegaskan ulang propaganda rezim Suharto; Gerakan 30 September, bukan pembantaian massal yang terjadi menyusul, merupakan tragedi nasional ("Betrayal of Pancasila Tragedy Commemorated," *Jakarta Post,* 2 Oktober 2000). Ketika Megawati

Sukarnoputri menjadi presiden, ia memimpin upacara di Lubang Buaya pada 2001 dan 2003, tetapi pada 2002 dan 2004 ia mengirim menteri koordinator politik dan keamanan untuk memimpin upacara itu ("Megawati dan Hamzah Tak Hadir di Lubang Buaya," *Kompas,* 1 Oktober 2004). Lihat juga Adam, "Dilema Megawati di Lubang Buaya," *Kompas,* 8 Oktober 2003; McGregor, "Commemoration of 1 October," 61-64.

104 Budiawan, "When Memory Challenges History"; van Klinken, "The Battle for History after Suharto." Laksamana.Net, "Amien Rais Inaugurates New Anti-Communist Front," 27 Februari 2001. Lihat juga artikel-artikel surat kabar yang menggebu-gebu pada April 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan agar ketetapan MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut: "New Wave of Protests Target Plan on Communism," *Jakarta Post*, 8 April 2000, hal. 1. Sulastomo, "Tap XXV/MPRS/1966," *Kompas*, 12 April 2000, hal. 4. Franz Magnis-Suseno, "Mencabut Tap No XXV/MPRS/1966?," *Kompas*, 14 April 2000. "Dari Secangkir Kopi ke Hawa Nafsu," *Kompas*, 14 April 2000, hal. 7; "Clamour about Marxism," *Jakarta Post*, 18 April 2000, hal. 4.

105 Antara 1965-66, sebagai mahasiswa di Jakarta, Soe Hok Gie adalah pendukung bersemangat gerakan operasi militer melawan PKI dan Presiden Sukarno. Lihat kumpulan tulisan-tulisannya dari masa itu, *Catatan Seorang Demonstran.* Tapi beda dari banyak temannya sesama pemuda antikomunis, yaitu yang disebut Angkatan 1966, hatinya memberontak seketika ia mengetahui tentang pembunuhan massal dan menyadari bahwa pemerintahan Sukarno digantikan oleh kediktatoran militer. Tulisan-tulisan Soe Hok Gie pada 1967-69, yang kemudian dikumpulkan dan terbit di bawah judul *Zaman Peralihan,* mencetuskan pendapat berbeda yang keras. Banyak dari kalangan "Angkatan 1966" yang mencela tirani Sukarno, kemudian dengan nyaman menikmati posisi-posisi dengan gaji besar dalam tirani Suharto.

1

KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

Jika ada bagian sejarah yang dicat kelabu di atas kelabu, inilah bagian itu. Orang-orang dan kejadian-kejadian tampak seperti kebalikan si Schlemihl, seperti bayang-bayang yang kehilangan tubuh.[1]

Karl Marx, **The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte** (1852)

PAGI HARI 1 OKTOBER

Gerakan 30 September menyatakan keberadaan dirinya untuk pertama kali melalui siaran RRI pusat pada pagi hari 1 Oktober 1965. Pasukan-pasukan yang setia kepada G-30-S menduduki stasiun pusat RRI dan memaksa sang penyiar membacakan sebuah dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio sekitar pukul 7.15 menangkap pengumuman selama sepuluh menit yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Para penggerak G-30-S menulis pernyataan mereka tidak dalam gaya bicara orang pertama, tetapi orang ketiga, seakan-akan seorang wartawan yang menyusun pernyataan tersebut. Siaran itu dua kali menyebutkan "menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September," sehingga memberi kesan bahwa berita radio itu mengutip dari dokumen lain. Suara mengelabui dari orang ketiga ini memberi suasana berita yang menentramkan. Seakan-akan para penyiar radio masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu

masuk dan menyela siaran yang sedang berlangsung. Dengan demikian pernyataan pertama G-30-S tidak tampak disampaikan oleh gerakan itu sendiri, tapi justru oleh bagian berita stasiun RRI. Ini merupakan awal dari serangkaian panjang ketidaksesuaian antara apa yang tampak dan apa yang nyata.[2]

Satu-satunya anggota G-30-S yang namanya diumumkan dalam pernyataan pertama itu ialah Letnan Kolonel Untung. Ia menyatakan diri sebagai komandan batalyon pasukan kawal presiden yang bermaksud mencegah "kup kontra-revolusioner" oleh sebuah kelompok yang dikenal sebagai Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal tak bernama ini "bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Sukarno" dan berencana "mengadakan pameran kekuatan (*machtsvertoon*) pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober." Bertindak menentang para perwira atasan mereka, pasukan-pasukan di dalam G-30-S tampaknya didorong oleh kesetiaan mereka yang lebih tinggi, yaitu kepada Presiden Sukarno, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Berita itu menyatakan bahwa G-30-S telah menahan "sejumlah jenderal" dan akan segera mengambil langkah lebih lanjut. Direncanakan akan ada "tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal." Siapa saja yang akan melaksanakan aksi-aksi itu tidak disebutkan. Suatu badan bernama "Dewan Revolusi Indonesia" akan dibentuk di Jakarta dan akan bertindak sebagai semacam kekuasaan eksekutif. Semua "partai-partai, ormas-ormas, surat kabar-surat kabar dan majalah-majalah" harus "menyatakan kesetiaannya" kepada Dewan Revolusi Indonesia jika mereka ingin mendapat ijin untuk terus bekerja. Dewan-dewan revolusi di tingkat lebih rendah akan dibentuk di setiap jenjang administrasi pemerintahan, mulai dari provinsi sampai ke desa. Pengumuman ini menjanjikan bahwa rincian tentang Dewan Revolusi akan disiarkan melalui surat keputusan berikutnya.

Selain mengambil alih stasiun radio dan memaksa penyiar untuk membacakan pernyataan mereka, pasukan-pasukan G-30-S juga menduduki Lapangan Merdeka, yang terletak di depan stasiun RRI.[3] Di sepanjang empat sisi lapangan rumput yang luas ini berdiri pusat-pusat kekuasaan terpenting negara: istana presiden, markas ABRI, kementerian pertahanan, markas Kostrad, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di



Peta 2. Lapangan Merdeka

tengah lapangan berdiri monumen perjuangan kemerdekaan, Monumen Nasional, setinggi 137 meter. Apabila bentangan kepulauan Indonesia memiliki *locus* kekuasaan politik, Lapangan Merdeka inilah tempatnya. Sebagian besar dari sekitar seribu prajurit yang berada di lapangan ini berasal dari dua batalyon Angkatan Darat: Batalyon 454 dari Jawa Tengah dan Batalyon 530 dari Jawa Timur. Pasukan-pasukan ini ditempatkan di sisi utara lapangan di depan istana, di sisi barat di depan RRI, dan di sisi selatan dekat gedung telekomunikasi yang juga mereka duduki dan mereka tutup. Jaringan telefon di Jakarta mereka putus.

Dengan mengambil posisi di lapangan pusat ini, satu bagian dari pasukan G-30-S membuat dirinya tertampak. Yang lebih tersembunyi

adalah kesatuan lain yang beroperasi dari Lubang Buaya, kawasan kebun karet tak berpenghuni sekitar tujuh mil di selatan Lapangan Merdeka. Pada saat siaran radio yang pertama mengudara pasukan-pasukan ini sudah melaksanakan tugas mereka di balik selubung kegelapan. Mereka berkumpul di Lubang Buaya sepanjang 30 September malam dan mendapat perintah untuk menculik tujuh jenderal yang diduga anggota Dewan Jenderal. Pasukan dibagi menjadi tujuh kelompok, dan setiap kelompok diperintahkan untuk menangkap seorang jenderal dari rumahnya dan membawanya ke Lubang Buaya. Berbagai kelompok ini naik truk sekitar pukul 3.15 pagi buta dan menderum menuju pusat kota yang berjarak waktu tiga puluh sampai empat puluh lima menit. Sebagian besar kelompok menuju daerah Menteng, tempat kediaman banyak pejabat tinggi pemerintah. Sasaran mereka ialah Jenderal A.H. Nasution, Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Achmad Yani, Panglima Angkatan Darat, lima Staf Umum Angkatan Darat: Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Harjono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo, dan Brigadir Jenderal Donald Ishak Pandjaitan.

Tabel 1. Staf Umum Angkatan Darat sampai 1 Oktober 1965

Panglima Angkatan Darat
Letjen Yani

Deputi	**Asisten**
1. Mayjen Mursid	*1. Mayjen Parman*
2. Mayjen Suprapto	2. Mayjen Ginting
3. Mayjen Harjono	3. Mayjen Pranoto
	4. Brigjen Pandjaitan
	5. Mayjen Sokowati
	6. Brigjen Sudjono
	7. Brigjen Alamsjah
Oditur Jenderal	
1. Brigjen Soetojo	

Sumber: Notosusanto and Saleh, *The Coup Attempt,* appendix B.
Catatan: Nama-nama jenderal dalam kursif ialah mereka yang diculik dan dibunuh oleh G-30-S.

Pasukan-pasukan bergerak melalui jalan-jalan sunyi dan singgah di rumah-rumah yang sudah terlelap. Enam kelompok berhasil menangkap sasaran mereka dan segera kembali ke Lubang Buaya. Kelompok ketujuh,

yang ditugasi menangkap sasaran paling penting, Jenderal Nasution, kembali dengan ajudannya saja. Di tengah kekalutan penggerebekan, pasukan menembak anak perempuan Nasution yang berumur lima tahun dan seorang prajurit kawal yang berada di depan rumah sebelahnya, yaitu rumah Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) Johannes Leimena. Nasution berhasil melompati tembok belakang kediamannya dan bersembunyi di rumah tetangga, yaitu Duta Besar Irak. Walaupun terjadi kegemparan di Menteng akibat bunyi tembak-menembak, tujuh kelompok penculik berhasil dengan cepat kembali ke Lubang Buaya tanpa dikenali atau dikejar. Sampai selambat-lambatnya sekitar pukul 5.30 pagi G-30-S telah menahan enam orang jenderal dan satu orang letnan di suatu sudut terpencil dan kurang dikenal di kota Jakarta.[4]

Sementara itu pimpinan G-30-S berkumpul di pangkalan AURI di Halim tepat di sebelah utara Lubang Buaya. Seorang kurir datang memberi tahu mereka bahwa perwira-perwira yang diculik telah tiba. Dengan selesainya operasi penculikan pimpinan G-30-S mengutus tiga perwira mereka – Brigjen M.A. Supardjo, Kapten Sukirno dari Batalyon 454, dan Mayor Bambang Supeno dari Batalyon 530 – ke istana untuk menghadap Presiden Sukarno. Supardjo, komandan pasukan tempur di Kalimantan, di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, telah tiba di Jakarta tiga hari sebelumnya (28 September 1965). Sukirno dan Supeno memimpin batalyon-batalyon yang ditempatkan di Lapangan Merdeka. Sekitar pukul 6 pagi trio perwira itu, dengan berkendaraan jip melaju ke arah utara, menuju istana presiden. Bersama mereka ada dua personil lain, seorang perwira AURI, Letnan Kolonel Heru Atmodjo, dan seorang prajurit yang bertugas sebagai pengemudi jip.

Ketika Supardjo dan rekan-rekannya tiba di istana, para pengawal di pintu masuk memberi tahu bahwa Presiden Sukarno tidak ada di istana. Tidak jelas apa kiranya yang akan dilakukan ketiga perwira itu andaikata presiden ada.[5] Pada sidang pengadilannya tahun 1967 Supardjo menyatakan ia bermaksud memberi tahu Sukarno tentang G-30-S dan meminta kepadanya agar mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal.[6] Barangkali rencana G-30-S adalah membawa jenderal-jenderal yang diculik ke istana dan meminta presiden agar mengesahkan penahanan terhadap mereka, serta memerintahkan pengadilan terhadap mereka atas tindakan makar. Atau G-30-S mungkin hendak membawa

Sukarno ke Halim untuk bertemu dengan jenderal-jenderal itu di sana. Dalam pemberitaan pertama mereka, yang disiarkan pada sekitar pukul 7.15 pagi, G-30-S menyatakan bahwa Presiden Sukarno "selamat dalam lindungan Gerakan 30 September." Agaknya G-30-S berniat memberikan perlindungan terhadap presiden entah di istana atau di Halim.

Sementara Supardjo bersama dua komandan batalyon sedang menunggunya, Sukarno dibawa kembali ke istana dari rumah isteri ketiganya, Dewi, tempat ia bermalam.[7] Pejabat komandan pasukan kawal istana, Kolonel H. Maulwi Saelan, melalui radio menghubungi pasukan kawal Sukarno dan meminta agar mereka menjauhi istana karena banyak pasukan tak dikenal yang ditempatkan di depan istana. Saelan mengirim pesan radio dari rumah isteri keempat Sukarno, Harjati, di kawasan Grogol. Sejak pagi ia telah pergi ke rumah Harjati untuk mencari Sukarno. Atas saran Saelan presiden dan para pengawalnya langsung menuju rumah Harjati. Mereka tiba di sana sekitar pukul 7.00 pagi.[8]

Ketidakmampuan G-30-S menempatkan Sukarno "di bawah perlindungannya" terasa aneh, mengingat bahwa tugas dari orang yang dianggap sebagai komandan G-30-S, Letkol Untung, ialah mengetahui tempat presiden berada. Untung memimpin satu batalyon pengawal istana. Pada 30 September malam ia menjadi bagian dari kelompok keamanan Sukarno ketika ia berbicara di depan Konfernas Ahli Teknik di stadion Senayan Jakarta sampai sekitar pukul 23.00. Bahkan ketika Untung sudah pindah ke Pangkalan Udara Halim sesudah konfernas usai, seharusnya ia dengan mudah selalu dapat melacak keberadaan Sukarno dengan menghubungi perwira-perwira lain dalam pasukan kawal istana. Tugas menjaga istana di waktu malam bergilir di antara empat satuan kawal; masing-masing dari empat angkatan – Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian – mempunyai satu detasemen yang diperbantukan untuk istana. Pada malam itu giliran jatuh pada satuan dari Angkatan Darat, yaitu Untung dan anak buahnya. Mereka seharusnya sudah mengetahui pada sekitar tengah malam bahwa presiden tidak bermalam di istana. Untung, seperti juga Saelan, dari pengalaman tentu sudah mengetahui bahwa presiden sering tidur di rumah para isterinya. Dengan pengetahuan bersama dari sekitar enam puluh orang prajurit pengawal presiden yang ada di dalam G-30-S, bagaimana mungkin Untung tidak dapat melacak keberadaan

Sukarno? Ini merupakan keganjilan yang jarang mendapat perhatian: seorang perwira tinggi dalam pasukan kawal presiden, memimpin aksi untuk menyelamatkan presiden, tidak mengetahui lokasi sang presiden, padahal pengetahuan tentangnya merupakan unsur yang sangat penting dalam seluruh rencana.[9] Dengan demikian G-30-S bekerja dengan tujuan yang saling berselisih: sekitar pukul 4.00 pagi G-30-S menempatkan pasukan di depan istana yang kosong, membuat Sukarno menjauhi istana, sehingga mengakhiri harapan bahwa misi Supardjo akan berhasil.

Supardjo dan dua orang komandan batalyon hilir mudik di pintu masuk istana. Mereka tidak memiliki sarana untuk mengontak pimpinan inti G-30-S di Halim dan memberi tahu mereka tentang tidak adanya Sukarno di istana. Mereka hanya menunggu. Sementara itu perwira AURI yang bersama mereka dalam satu jip dari Halim, Letkol Heru Atmodjo, memutuskan pergi mencari Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Omar Dani. Letak Markas Besar AURI tidak jauh dari istana. Atmodjo menuju ke sana mengendarai jip dan tampaknya sudah tiba di sana sebelum pukul 7.15 karena ia ingat ia mendengar pengumuman pertama G-30-S melalui radio yang ada di Mabes AURI. Sesama rekan-rekan perwira di mabes menyampaikan kepadanya bahwa Omar Dani berada di pangkalan udara Halim. Kemudian Atmodjo kembali dengan jip menuju Halim, dan menemukan Dani di kantor utama. Atmodjo tiba antara pukul 8.00 dan 8.30, dan ia melaporkan apa yang baru saja disaksikannya: Supardjo pergi ke istana tetapi gagal bertemu presiden.[10]

Tidak lama sebelum Atmodjo bertemu dengannya, Dani menerima telefon dari salah seorang anggota staf Sukarno, Letnan Kolonel Suparto, yang mengatakan Sukarno akan segera meninggalkan rumah Harjati menuju pangkalan AURI Halim.[11] Pesawat terbang kepresidenan selalu disiapkan di pangkalan udara sewaktu-waktu presiden perlu segera meninggalkan ibu kota. Pada saat-saat serba tak menentu itu Sukarno merasa yang terbaik adalah berada dekat dengan pesawat. Seperti ditegaskan Sukarno dalam pernyataan-pernyataan publiknya di belakang hari, ia pergi ke Halim atas prakarsa sendiri, sebagai prosedur operasi baku dalam keadaan krisis, tanpa berhubungan sama sekali dengan G-30-S sebelumnya. Ketika ia dan para ajudannya memutuskan Halim merupakan tempat yang paling aman, mereka tidak mengetahui bahwa pimpinan

G-30-S berkubu di sana.[12]

Ketika Omar Dani mendengar Sukarno akan tiba di Halim, Laksamana Madya itu memerintahkan Atmodjo menggunakan helikopter AURI untuk segera menjemput Supardjo dari istana. Dani bermaksud memastikan bahwa wakil pasukan pemberontak ini mempunyai kesempatan berbicara dengan presiden. Atmodjo kembali ke Halim dengan membawa Supardjo pada sekitar pukul 9.00 pagi dan mengantarkannya ke kantor utama pangkalan udara. Di sana Supardjo bercakap-cakap dengan Dani, sementara Atmodjo menunggu di luar kantor. Sesudah dua tokoh itu keluar dari kantor, Atmodjo membawa Supardjo dengan mobil ke kediaman Sersan Anis Sujatno, masih di daerah pangkalan udara, yang digunakan sebagai tempat persembunyian G-30-S. Supardjo mengetahui jalan ke arah rumah itu. Atmodjo menyatakan belum pernah mengetahui letak rumah itu sebelumnya. Dengan mengendarai jip mereka menyusuri jalan berliku-liku area pangkalan udara sampai akhirnya menemukan rumah tempat para pimpinan inti G-30-S berkumpul. Tidak lama kemudian Atmodjo mengantar Supardjo, dengan kendaraan jip itu pula, kembali ke kantor komandan pangkalan udara. Di sinilah akhirnya Supardjo dapat bertemu Sukarno, yang sementara itu telah tiba. Sukarno tampaknya tiba di Halim antara sekitar pukul 9.00 dan 9.30 pagi.[13]

Pada saat Supardjo bertemu muka dengan Sukarno di kantor komandan Halim, sekitar pukul 10.00 pagi, keenam jenderal Angkatan Darat yang diculik mungkin sudah dibunuh. Supardjo barangkali sudah mengetahui perihal ini dari pembicaraan yang baru saja dilakukannya dengan para pimpinan inti G-30-S. Sukarno semestinya sudah curiga bahwa setidak-tidaknya ada beberapa di antara enam jenderal itu yang dibunuh. Berita yang beredar dari mulut ke mulut mengatakan, dua jenderal, Yani dan Pandjaitan, kemungkinan sudah tewas. Tetangga mereka mendengar bunyi tembak-menembak dan kemudian mendapati darah di lantai rumah mereka. Kemungkinan besar Yani dan Pandjaitan tewas seketika di rumah mereka akibat luka-luka tembak. Jenderal lainnya, Harjono, mungkin juga sudah tewas di rumahnya oleh luka tusukan dalam di perut akibat hunjaman bayonet para penculik. Tiga jenderal lainnya (Parman, Suprapto, dan Soetojo) dan letnan yang salah ambil dari rumah Nasution (Pierre Tendean) masih hidup ketika diculik, tetapi dibunuh di Lubang Buaya. Sekelompok pasukan G-30-S menembak masing-

masing perwira berkali-kali. Untuk menyembunyikan para korban dan menghilangkan jejak mereka, pasukan melemparkan ketujuh jenazah itu ke dalam sumur sedalam tiga puluh enam kaki dan kemudian menguruk sumur itu dengan bebatuan, tanah, dan dedaunan.[14] Siapa tepatnya yang membunuh para perwira itu masih belum diketahui. Penuturan rezim Suharto – bahwa ketujuh perwira itu disiksa dan disayat-sayat oleh massa pendukung PKI yang kegirangan, sementara perempuan-perempuan dari Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menari-nari telanjang – merupakan rekayasa absurd bikinan para ahli perang urat syaraf.

Secara keseluruhan, para peserta G-30-S melakukan empat operasi di Jakarta pada pagi hari itu. Mereka merebut stasiun RRI dan menyiarkan pernyataan pertama mereka; menduduki Lapangan Merdeka, termasuk gedung telekomunikasi; secara terselubung menculik dan membunuh enam orang jenderal dan satu orang letnan; dan mengirim tiga perwira mereka ke istana presiden, seorang di antara mereka Brigadir Jenderal Supardjo, berhasil menemui presiden di pangkalan AURI Halim.

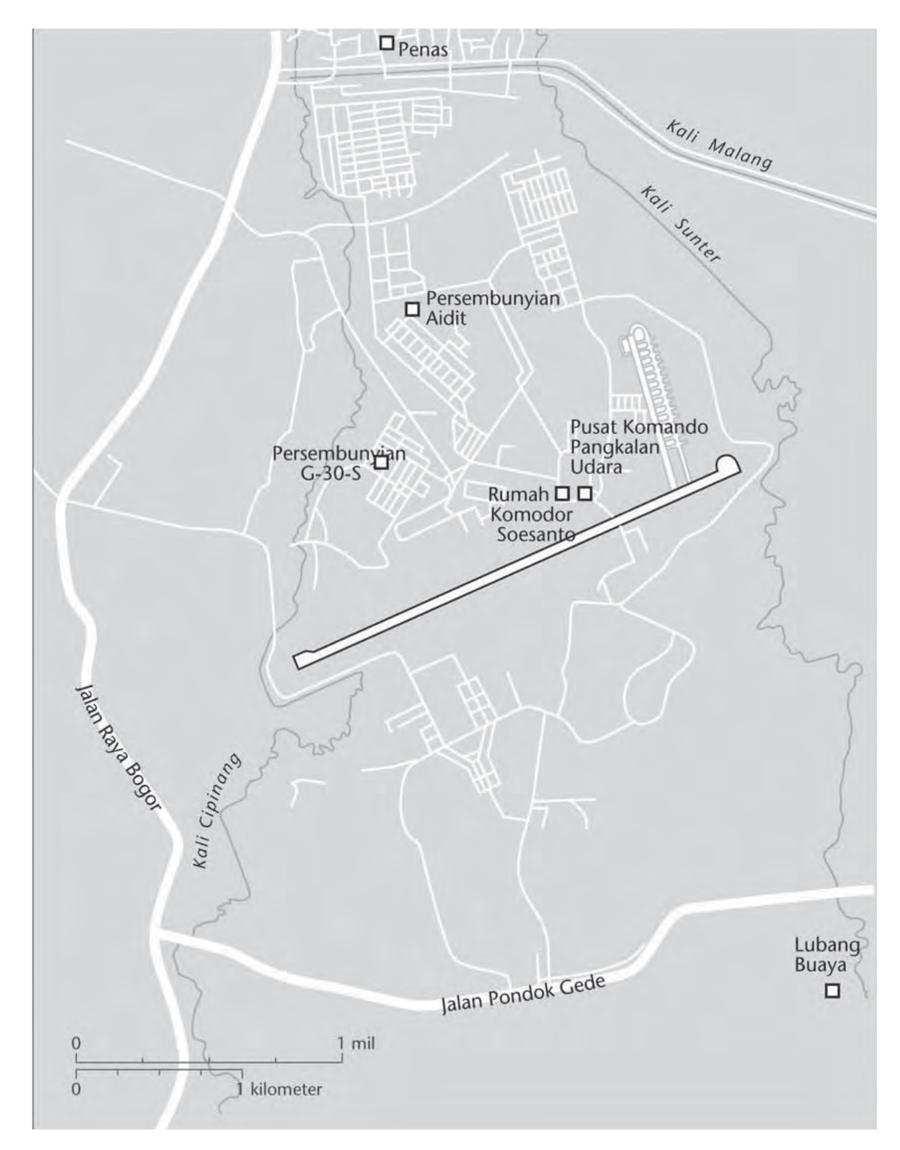
KOMPOSISI PASUKAN

Pimpinan G-30-S terdiri dari lima orang. Tiga orang perwira militer: Letkol Untung dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Abdul Latief dari garnisun Angkatan Darat Jakarta (Kodam Jaya), dan Mayor Soejono dari penjaga pangkalan udara Halim. Dua orang sipil yaitu Sjam dan Pono, dari organisasi klandestin, Biro Chusus, yang dipimpin oleh ketua Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit. Lima orang ini telah berkali-kali bertemu selama beberapa pekan sebelumnya dan mendiskusikan rencana operasi mereka.[15]

Umur mereka berkisar dari akhir tiga puluhan sampai tengah empat puluhan. Untung bertubuh pendek kekar dan berleher gemuk, memperlihatkan stereotip seorang prajurit. Ia sempat terkenal sejenak, ketika pada 1962 ia memimpin pasukan gerilya menyerang pasukan Belanda di Papua Barat. Dari operasi itu ia mendapat anugerah bintang, kenaikan pangkat dari mayor menjadi letkol, dan nama baik karena keberaniannya. Rekan komplotannya yang sedikit lebih muda tapi berpangkat lebih tinggi, Latief, mempunyai karir kemiliteran yang terhormat sejak menjadi

pemuda pejuang melawan tentara Belanda di Jawa Tengah. Sesudah lulus kursus-kursus latihan keperwiraan dan membuktikan dirinya di pertempuran, Latief memperoleh kedudukan yang strategis: komandan seluruh brigade pasukan infanteri (dengan sekitar dua ribu anak buah) di ibu kota. Ia tampil dengan sikap percaya diri dan wibawa seorang kolonel yang sadar mengenai perlunya penghormatan dari anak buahnya. Di pangkalan udara Halim pada 1 Oktober 1965 Untung dan Latief diterima di rumah Mayor Soejono, komandan pasukan AURI di pangkalan udara Halim. Berperawakan kurus berotot dan peka hati, Soejono mengeluarkan perintah-perintah tegas kepada anak buahnya selagi ia mengatur tempat persembunyian, makan, dan jip-jip untuk kendaraan pimpinan G-30-S. Sjam dan Pono, sebagai orang sipil, menjadi sosok-sosok aneh di pangkalan udara itu. Sjam, yang ketika muda dikenal bernama Kamaruzaman, adalah keturunan pedagang Arab yang bermukim di daerah pantura Jawa. Pono juga berasal dari kawasan pantura Jawa, tapi berkakek moyang orang Jawa, seperti ditunjukkan oleh nama lengkapnya, Supono Marsudidjojo. Atmodjo teringat, saat pertama kali bertemu kedua lelaki itu di Halim pada hari naas tersebut, seketika itu juga ia menduga bahwa mereka bukan tentara: sosok mereka melentok tak tegap, mereka mengangkat kaki di kursi, dan merokok tak berkeputusan. Mereka kurang latihan jasmani dan disiplin militer.[16] Namun dua lelaki ini memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam berhubungan dengan personil militer secara rahasia dan menyembunyikan jati diri mereka.

Pada pagi 1 Oktober, sejak sekitar pukul 2.00 lewat tengah malam, lima orang pimpinan gerakan ini duduk bersama di sebuah gedung yang tak jauh dari sudut barat laut Halim. Gedung ini adalah kantor divisi pengamat udara AURI, Penas (Pemetaan Nasional). Demi alasan-alasan yang tidak pernah dijelaskan, sekitar pukul 9.00 pagi, kelima tokoh tersebut pindah dari tempat persembunyian di gedung Penas ke rumah kecil Sersan Sujatno, yang terletak di kompleks kediaman di Halim. Inilah rumah yang dituju Supardjo sekembalinya dari misi yang gagal, yaitu menemui Presiden Sukarno di istana. Lima tokoh tersebut tinggal di rumah ini sepanjang siang dan malam 1 Oktober 1965. Walaupun Untung pada siaran RRI pagi itu dikenal sebagai pimpinan G-30-S, ia menghabiskan sepanjang hari itu tanpa menampakkan diri di depan umum, bahkan juga tidak di hadapan pasukannya sendiri. Pada kenyata-



Peta 3. Pangkalan Angkatan Udara di Halim dan Lubang Buaya.
Sumber: Berdasarkan peta dalam Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965*, 314-315.

annya memang para pimpinan G-30-S tidak mempunyai sarana untuk berkomunikasi dengan pasukan mereka di Lubang Buaya dan Lapangan Merdeka selain melalui kurir pribadi. Mereka tidak mempunyai peralatan *walkie-talkie* atau pesawat radio dua arah. Gerakan 30 September sendiri

telah memutus jaringan telefon pada saat pasukannya menduduki gedung telekomunikasi. (Namun seandainya jaringan telefon berfungsi pun, rumah sersan yang sederhana di pangkalan udara itu barangkali tidak memiliki saluran telefon). Supardjo yang ulang-alik dengan jip antara tempat persembunyian dan kantor komandan Halim membuktikan ketiadaan peralatan komunikasi di antara para pimpinan G-30-S.

Pimpinan G-30-S sepanjang hari itu berhubungan dengan ketua PKI D.N. Aidit, yang juga hadir di pangkalan AURI di Halim. Aidit tinggal di rumah yang berbeda dalam kompleks perumahan lain di pangkalan. Yang mendampinginya adalah pembantu pribadinya bernama Kusno; salah seorang pimpinan PKI, Iskandar Subekti; dan seorang anggota Biro Chusus, Bono (yang juga dikenal dengan nama Walujo).[17] Lima pimpinan inti G-30-S ada di satu tempat persembunyian (di rumah Sujatno), sedangkan Aidit dan sekelompok pembantunya di tempat persembunyian yang lain, yang berjarak kira-kira setengah mil (di rumah Sersan Suwandi). Untuk komunikasi antar mereka kedua kelompok memiliki seorang kurir pribadi yang mengendarai jip untuk mondar-mandir di antara kedua tempat persembunyian sambil membawa dokumen. Terkadang satu atau dua orang pimpinan inti menuju ke tempat persembunyian Aidit dan berbicara langsung dengannya. Atmodjo mengenang bahwa Sjam dan Soejono beberapa kali berkonsultasi dengan Aidit.[18]

Lima pimpinan inti G-30-S sepanjang hari 1 Oktober tinggal di rumah Sersan Sujatno yang tidak mencolok. Sebagai kelompok mereka tidak menampakkan diri di depan Presiden Sukarno, tokoh yang konon hendak mereka lindungi. Supardjo yang menemui presiden atas nama mereka semua. Tidak diketahui dengan jelas mengapa Aidit dan para pembantunya tinggal di rumah yang lain, dan bukan bergabung dengan lima orang dalam kelompok Untung. Mungkin untuk memastikan bahwa seandainya mereka diserang, mereka tidak akan disergap bersama-sama. Atau mungkin juga untuk memastikan bahwa sedikit orang saja yang mengetahui Aidit terlibat dalam kelompok inti perencana gerakan. Atau mungkin juga untuk menjaga, agar kelompok yang satu tidak me-medulikan proses pengambilan keputusan kelompok yang lain. Para organisator G-30-S tentu mempunyai alasan tertentu untuk memisah-kan kediaman dua kelompok dengan jarak setengah mil, walaupun sulit untuk memahami alasan itu sekarang. Komunikasi antar dua kelompok

itu seharusnya lebih mudah dan lebih cepat jika mereka semua tinggal di tempat persembunyian yang sama. Bahkan keputusan mereka mengasingkan diri di tengah kawasan perumahan di Halim itu pun masih tetap tidak dapat dimengerti. Barangkali akan lebih masuk akal jika mereka menduduki sebuah pusat komando militer, di tempat mereka dapat memanfaatkan hubungan radio untuk mengoordinasikan satuan-satuan pasukan mereka yang berbeda-beda.

Walaupun pimpinan G-30-S berpangkalan di Halim, tidak ada bukti bahwa mereka bekerja dengan orang lain dari AURI selain Mayor Soejono. Semua fasilitas yang mereka gunakan di dalam dan sekitar pangkalan Halim – Penas, Lubang Buaya, dua rumah, senjata AURI, dan truk-truk – agaknya disediakan oleh Soejono sendiri. Komandan Halim, Kolonel Wisnoe Djajengminardo, dan Panglima AURI Laksamana Madya Omar Dani, tampaknya tidak diajak berunding sebelumnya.

Menurut Omar Dani dan Heru Atmodjo mereka jadi terbawa-bawa dalam G-30-S bukan sebagai peserta, melainkan sebagai pengamat dari luar. Penuturan kedua orang ini tentang jalannya kejadian demi kejadian saling bersesuaian. Pada 30 September sore Soejono menceritakan kepada Atmodjo, seorang perwira intelijen AURI khusus urusan pengintaian udara, tentang aksi melawan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang anti-Sukarno. Ini merupakan berita bagi Atmodjo, yang selanjutnya melaporkan informasi tersebut kepada Dani pada sekitar pukul 16.00 hari itu. Dani memerintahkannya mencari tahu lebih banyak lagi tentang rencana aksi tersebut dan melaporkan kembali hasil pengamatannya malam itu juga. Sekitar pukul 22.00 Atmodjo kembali ke Markas Besar AURI dan bertemu dengan sekelompok perwira senior Angkatan Udara untuk melaporkan hal-hal apa lagi yang telah didengarnya dari Soejono.[19] Satu detil penting adalah bahwa Supardjo merupakan peserta aksi. Dani memerintahkan Atmodjo agar mencari Supardjo, yang menjadi bawahannya langsung dalam Komando Mandala Siaga yang lazim dikenal sebagai Kolaga, dalam rangka konfrontasi melawan Malaysia.[20] Supardjo sudah menemui Dani pada 29 September untuk membicarakan soal-soal dalam Kolaga. Boleh jadi ia menceritakan kepada Dani bahwa aksi menentang Dewan Jenderal sedang direncanakan.

Sesuai dengan perintah Dani, Atmodjo mencari Soejono untuk memutuskan bagaimana dia dapat menemukan Supardjo. Soejono

memberi tahu Atmodjo agar pergi ke Kantor Pengamat Udara sekitar pukul 5.00 pagi berikutnya. Sesudah Atmodjo tiba di kantor yang dimaksud dan menjelaskan bahwa kedatangannya atas perintah Dani, Supardjo mengajaknya pergi bersamanya ke istana. Tanpa rencana atau koordinasi apa pun, Atmodjo kemudian menemani Supardjo sepanjang hari itu.[21] Seandainya pun keterlibatan Atmodjo dalam G-30-S lebih jauh ketimbang yang diakuinya sekarang, sepak terjangnya pada 1 Oktober tampaknya terbatas pada membantu gerak-gerik Supardjo di sekitar kota Jakarta dan pangkalan udara Halim.

Sementara baik Atmodjo maupun Dani tidak dapat dipandang sebagai bagian dari pimpinan G-30-S, mereka (dan sebagian besar perwira senior AURI) bersikap simpatik terhadap G-30-S pada 1 Oktober itu. Atmodjo mengenang bahwa ia bersorak gembira ketika mendengar pengumuman radio yang pertama pada pagi hari itu.[22] Ia bersama para perwira rekan-rekannya berpikir bahwa G-30-S merupakan gerakan pembersihan terhadap para perwira sayap kanan Angkatan Darat, yang telah dan sedang menyabot kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno. Dani merancang pernyataan publik, "Perintah Harian," pada pukul 9.30 pagi yang menyambut G-30-S sebagai usaha untuk "mengamankan dan menjelamatkan Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi terhadap subversi CIA." Agaknya Dani berpikir bahwa G-30-S itu tidak lebih dari sebuah aksi internal Angkatan Darat, yang sepenuhnya masih setia kepada Sukarno.[23]

Pasukan-pasukan yang digunakan dalam operasi pagi hari itu sebagian besar diambil dari satuan-satuan yang dipimpin tiga perwira militer dalam pimpinan inti G-30-S: Untung, Latief, dan Soejono. Dalam personil G-30-S termasuk satu kompi pasukan kawal presiden di bawah pimpinan Untung, dua peleton dari garnisun Angkatan Darat Jakarta di bawah pimpinan Latief, dan satu batalyon pasukan Angkatan Udara di bawah pimpinan Soejono. Selain itu ada sepuluh kompi – masing-masing lima kompi – dari Batalyon 454 dan Batalyon 530. Pasukan-pasukan dari dua batalyon ini sudah tiba di Jakarta beberapa hari sebelumnya untuk berpartisipasi dalam parade Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober. Mereka inilah yang merupakan kelompok utama dari pasukan-pasukan yang menduduki Lapangan Merdeka. Di antara pasukan-pasukan G-30-S juga ada kesatuan-kesatuan kecil dari pasukan para komando di selatan

Jakarta dan dari Polisi Militer.[24]

Di samping berbagai pasukan militer tersebut, sekitar dua ribu anggota PKI atau ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI juga ikut serta dalam operasi pagi itu.[25] Orang-orang sipil ini sebagian besar adalah anggota Pemuda Rakjat yang telah menerima latihan singkat kemiliteran di pangkalan udara Halim selama beberapa pekan dalam bulan-bulan sebelumnya. Adalah Mayor Soejono yang mengatur penyelenggaraan latihan-latihan ini. Para pemuda sipil ini disebar dalam pasukan-pasukan yang menculik para jenderal dan menduduki gedung-gedung vital di sekitar Lapangan Merdeka. Beberapa dipersenjatai, tapi sebagian besar tidak.

Tidak ada angka yang andal tentang jumlah keseluruhan personil militer dan sipil yang ikut serta dalam G-30-S. Tabel 2 menggambarkan sintesis data dari berbagai-bagai sumber. Walaupun angka-angka itu mungkin tidak akurat, setidak-tidaknya dapat memberi gambaran kasar tentang kekuatan G-30-S.

Jumlah tentara yang terlibat dalam G-30-S sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh jumlah pasukan yang ada di dalam kota. Dari sudut kekuatan militer, G-30-S jelas tidak cukup menggentarkan untuk dapat mengalangi pasukan lawan menyerangnya. Komando Daerah Militer Kota Jakarta, yang disebut Kodam Jaya, memiliki sekitar enam puluh ribu prajurit, tiga puluh kali jumlah seluruh personil yang ikut serta dalam G-30-S.[26] Kolonel Latief memimpin satu brigade Kodam Jaya, yang terdiri dari sekitar dua ribu prajurit, namun hanya dua peleton di antaranya yang ikut serta dalam G-30-S. Besarnya potensi perlawanan terhadap G-30-S menjadi lebih besar lagi jika kita perhitungkan puluhan ribu tentara tambahan yang ditempatkan di dekat Jakarta. Pasukan khusus dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berada di selatan kota, dan Kodam yang meliputi Jawa Barat ditempatkan di Bandung, sekitar tujuh jam perjalanan mobil jaraknya dari Jakarta. Dibandingkan dengan semua pasukan yang ada di dalam dan sekitar kota, kekuatan pasukan G-30-S sungguh kecil belaka.

Tabel 2. Personil Militer dan Sipil yang Mengambil Bagian Dalam G-30-S

Personil yang Mengambil Bagian	Jumlah orang
PERSONIL MILITER	
Dua peleton dari Brigade 1, Kodam Jaya, Jakarta	60
Satu kompi dari Batalyon 1, Cakrabirawa	60
Lima kompi dari Batalyon 454, Diponegoro	500
Lima kompi dari Batalyon 530, Brawijaya	500
Satu batalyon dari AURI, Pasukan Pembela Pangkalan Halim (PPP)	1.000
Satuan-satuan dan perseorangan dari kesatuan militer lain (Polisi Militer, para komando)	50
Jumlah personil militer	2.130
ORANG-ORANG SIPIL	
Orang-orang sipil dari PKI dan ormas berafiliasi PKI	2.000
Jumlah seluruh personil	4.130

Sumber: "Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung, 9, 40; Notosusanto dan Saleh, *Tragedi Nasional,* 231; Saelan, *Dari Revolusi '45*, 91.

Perhatikan bahwa pasukan-pasukan G-30-S tidak menyebar laiknya pasukan yang berniat melakukan kudeta. Mereka tidak memosisikan diri untuk bertahan menghadapi pasukan lawan. Jika tujuan mereka adalah kudeta, mereka seharusnya mengepung atau menduduki markas besar Kodam Jaya dan Kostrad, dan menempatkan detasemen-detasemen dekat pemusatan-pemusatan barak-barak militer utama. Mereka juga seharusnya sudah membangun pos-pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju Jakarta untuk mengalangi pasukan-pasukan dari luar memasuki kota. Semuanya itu tidak mereka lakukan.

Gerakan 30 September tidak mempunyai perlengkapan yang hampir selalu dipakai oleh para perancang kudeta di sepanjang paron kedua abad ke-20: tank. Seluruh kekuatan G-30-S terdiri dari tentara infanteri bersenjata. Dan, gerakan ini tidak berusaha melumpuhkan tank-tank yang dikendalikan pasukan-pasukan yang berpotensi memusuhi G-30-S. Ketika panglima Kodam Jaya mendengar berita penggerebekan di rumah-rumah para jenderal, ia memerintahkan beberapa pasukan tank untuk berpatroli di jalan-jalan di ibu kota.[27] Dengan begitu dalam jam-jam awal G-30-S dimulai, ibu kota berhasil dikuasai pasukan-pasukan berlapis baja yang tidak menjadi bagian G-30-S.

Mengingat jumlah pasukan yang terlibat kecil, penyebaran pasukan yang tidak berpengaruh, dan tidak ada tank, G-30-S tampaknya tidak dirancang untuk merebut kekuasaan negara. Mengikuti aksi-aksi G-30-S pagi hari itu, gerakan ini tampak dirancang sebagai semacam pemberon-

takan para perwira muda terhadap sekelompok perwira senior.

PENGUMUMAN SIANG HARI

Sesudah mengambil alih stasiun radio dan menyiarkan pengumumannya yang pertama, G-30-S tidak mengeluarkan pernyataan apa pun selama lima jam berikutnya. Gerakan 30 September bungkam sama sekali justru pada saat perlu mengerahkan pendapat umum untuk mendukungnya. Pengumuman kedua, yang disiarkan sekitar tengah hari, memenuhi janji pengumuman pertama dengan merinci perihal Dewan Revolusi Indonesia lebih lanjut. “Segenap kekuasaan negara,” demikian pengumuman itu menyatakan, telah jatuh “ke tangan Dewan Revolusi Indonesia.” Kekuasaan yang diaku dewan nasional ini bersifat mutlak: ia “menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia,” sementara menunggu pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. (Waktu pemilu tidak dinyatakan pasti.) Dewan-dewan revolusi yang lebih rendah selanjutnya akan dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Masing-masing dewan akan berfungsi sebagai “kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan.” Dekrit No. 1 menyatakan bahwa menteri-menteri kabinet Presiden Sukarno “berstatus demisioner,” dan bahwa Dewan Revolusi Indonesia akan menetapkan semua menteri-menteri yang akan datang.

Walaupun dalam pengumuman radio yang pertama G-30-S membenarkan penumpasan terhadap Dewan Jenderal sebagai cara untuk melindungi Presiden Sukarno, dalam pengumumannya yang kedua G-30-S justru merebut kekuasaan presiden dan bahkan tidak sekali pun menyebut Sukarno. Dengan mengumumkan pimpinan G-30-S sebagai pimpinan suatu dewan yang memegang seluruh kekuasaan negara, pengumuman kedua memperlihatkan bahwa peristiwa yang pada pagi hari menampak sebagai *putsch* intern Angkatan Darat menjadi lebih menyerupai sebuah kudeta.

Pengumuman kedua itu juga menyebut nama-nama para wakil panglima yang ada di bawah Letnan Kolonel Untung: “Brigjen Supardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas.” Daftar ini memperlihatkan usaha untuk memasuk-

kan semua unsur dari keempat angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian) sambil menyembunyikan identitas para pimpinan G-30-S sebenarnya yang bekerja bersama Untung, yaitu Kolonel Latief, Mayor Soejono, Sjam, dan Pono.

Pemilihan wakil-wakil pimpinan G-30-S ini terasa sukar dijelaskan. Dari empat tokoh itu hanya Supardjo dan Heru Atmodjo yang sedikit banyak terkait dengan G-30-S. Dan aneh bahwa Supardjo, seorang brigadir jenderal, berada di bawah Untung, seorang letnan kolonel. Keanehan lain adalah Atmodjo hanya diidentifikasikan dengan namanya yang pertama, Heru, nama yang sangat lazim bagi orang Jawa. Banyak orang Indonesia hanya menggunakan satu nama saja (misalnya Untung dan Suharto). Tapi Heru biasanya tidak digunakan sebagai nama tunggal. Atmodjo dikenal dengan nama seutuhnya. Penggunaan nama Heru saja dalam pengumuman tersebut memberi kesan bahwa para organisator G-30-S tidak kenal dengannya. Dua deputi komandan G-30-S yang lain, Sunardi dan Anwas, belum pernah satu kali pun menghadiri rapat-rapat perencanaan, tidak berada di pangkalan udara Halim pada 1 Oktober, tidak diberi tahu tentang G-30-S sebelumnya, dan tidak mengambil langkah apa pun atas nama G-30-S.[28]

Tidak jelas siapa, jika pun memang ada, yang menandatangani Dekrit No. 1, mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Baik dokumen asli maupun fotonya tidak pernah terlihat. Di depan persidangannya Untung menyatakan bahwa ia, Supardjo, dan Atmodjo yang menandatangani dokumen itu.[29] Sebagai saksi dalam persidangan itu, Atmodjo mengakui telah menandatanganinya.[30] Namun sekarang Atmodjo mengatakan tidak pernah menandatanganinya dan bahkan tidak pernah melihat teks itu sebelum disiarkan. Ia menyatakan, pengakuannya di depan persidangan Untung merupakan kapitulasi terhadap tuntutan penuntut umum. Ia berharap mahkamah menghargai kerja samanya, dan dengan demikian akan memberi keringanan hukuman jika kelak ia sendiri dihadapkan ke pengadilan.[31] Di depan Mahmilub Supardjo memungkiri pengumuman radio tentang Dewan Revolusi Indonesia. Ia menyatakan bahwa ia tidak menyetujui gagasan tentang dewan tersebut dan menolak menandatangani dokumen itu.[32] Tanpa adanya dokumen dekrit yang asli tidak mungkin diketahui siapa sebenarnya yang telah

menandatanganinya. Mengingat bahwa Sunardi dan Anwas jelas bukan tokoh-tokoh penanda tangan, tidak ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa dua tokoh lain yang disebut sebagai wakil-wakil komandan (Supardjo dan Atmodjo) pernah menandatanganinya.

Pengumuman ketiga G-30-S, yang disiarkan antara pukul 13.00 dan 14.00, disebut sebagai "Keputusan No. 1."[33] (Sekarang sukar untuk dipahami apa yang dipikirkan [para] penulis pengumuman-pengumuman ini tentang perbedaan antara dekrit dan keputusan). Pengumuman ketiga ini menyebut empat puluh lima nama anggota Dewan Revolusi Indonesia, termasuk Untung dan empat orang wakilnya. (Angka 45 itu tampaknya dipilih untuk melambangkan 1945, tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia.) Para anggota mewakili aneka macam pandangan politik yang relatif luas: politisi Muslim, kader menengah PKI, wartawan, perempuan, dan pimpinan pemuda. Kelompok yang paling banyak terwakili, dengan delapan belas kursi, ialah kelompok militer. Beberapa perwira militer dalam daftar dikenal sebagai antikomunis, misalnya Brigadir Jenderal Amir Mahmud. Di dalamnya juga termasuk nama-nama dua orang yang sedikit banyak tak dikenal, namun belakangan ternyata termasuk dalam pimpinan G-30-S: Kolonel Latief dan Mayor Soejono. Pimpinan G-30-S di Jawa Tengah, Kolonel Suherman, juga muncul dalam daftar. Gerakan 30 September tidak memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar yang melandasi pemilihan untuk keanggotaan Dewan. Kecuali bagi beberapa orang yang terlibat langsung dalam G-30-S, agaknya tak seorang pun di antara mereka yang ditunjuk sebagai anggota dewan pernah dihubungi sebelumnya dan diminta untuk ikut bergabung.

Segera sesudah mengumumkan daftar nama-nama anggota Dewan Revolusi Indonesia, stasiun pusat RRI menyiarkan pengumuman G-30-S yang keempat, yaitu "Keputusan No. 2." Keputusan ini memaklumkan, karena panglima G-30-S adalah seorang letnan kolonel, tidak ada perwira militer yang berpangkat lebih tinggi daripadanya. Semua pangkat di atas pangkat Untung dinyatakan tidak lagi berlaku. Dengan sekali gebrak sistem kepangkatan militer diubah, sehingga pangkat Untung menjadi pangkat yang tertinggi. Para perwira yang berpangkat lebih tinggi memenuhi syarat untuk memperoleh pangkat letnan kolonel jika mereka mengajukan secara tertulis pernyataan kesetiaan kepada Dewan Revolusi Indonesia. Sementara itu semua prajurit bawahan yang mendukung

G-30-S pangkatnya akan dinaikkan satu peringkat.

Dua "keputusan" ini diumumkan atas nama Letnan Kolonel Untung dan ditandatangani pula olehnya. Militer menerbitkan foto dokumen-dokumen asli Keputusan 1 dan Keputusan 2 ini.[34] Foto-foto itu memperlihatkan bahwa hanya Untung yang menandatangani dokumen-dokumen termaksud. Barangkali pembedaan antara "dekrit" dan "keputusan" terletak pada nama siapa yang mengeluarkannya: dekrit dikeluarkan atas nama komandan dan para wakil komandan, sedangkan keputusan dikeluarkan hanya atas nama komandan saja.

Empat pengumuman yang dikeluarkan oleh G-30-S tersebut merupakan seluruh penampilan G-30-S di depan masyarakat Indonesia.[35] Jika disimpulkan bersama, keempat pengumuman itu sangat sedikit mengungkapkan sifat G-30-S. Yang paling jelas, pengumuman itu tidak memberikan pembenaran terhadap tindakan mendemisionerkan kabinet dan penetapan bentuk pemerintahan yang sama sekali baru. Pengumuman-pengumuman itu juga tidak mengungkapkan pertentangan ideologis apa pun dengan pemerintahan Sukarno. Semua prinsip yang dengan tegas dijunjung G-30-S ialah prinsip-prinsip yang dianjurkan atau ditemukan oleh Sukarno, yaitu UUD 1945, politik luar negeri yang menentang kolonialisme dan neokolonialisme, Pancasila, Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Panca Azimat Revolusi.[36] Gerakan 30 September menyerukan pembentukan dewan-dewan revolusi di tingkat provinsi dan kabupaten, dan bahkan menetapkan jumlah anggota yang akan duduk di dewan-dewan itu. Tapi G-30-S tidak menjelaskan bagaimana anggota dewan akan dipilih dan apa wewenang dewan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada, selain hanya mengatakan bahwa dewan mempunyai "segenap kekuasaan." Gerakan 30 September menyatakan kesetiaannya kepada konstitusi Indonesia, lalu menciptakan lembaga yang tidak dirumuskan dengan jelas dan sama sekali baru, yang akan melampaui lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh konstitusi.

Wajah G-30-S di hadapan masyarakat tidak konsisten (pengumuman-pengumumannya menyatakan bahwa pasukannya ingin melindungi Sukarno tapi juga ingin mendongkelnya), ganjil (letnan kolonel dinyatakan sebagai pangkat tertinggi), dan kabur (cita-cita istimewa G-30-S tidak dijelaskan). Hal yang lebih membingungkan

lagi ialah penampilan publik G-30-S sangat sedikit kecocokannya dengan kenyataan: Sukarno tidak berada di bawah “lindungan” G-30-S; dua dari empat wakil komandannya tidak tahu-menahu tentang G-30-S; empat pimpinan yang sesungguhnya (Sjam, Pono, Latief, Soejono) tidak disebut sebagai pimpinan; dan jenderal-jenderal yang “ditangkap” sebenarnya sudah dibunuh dan mayat-mayat mereka disembunyikan. Keempat pengumuman yang disiarkan melalui radio belum tentu disusun oleh orang-orang yang namanya tercantum di dalamnya. Oleh karena Aidit juga berada di Halim, ia pun boleh jadi ikut serta menyusunnya. Untung dan dua wakil komandan G-30-S yang berada di Halim (Supardjo dan Heru Atmodjo) barangkali bukan yang menulis Dekrit No. 1. Bahkan Untung mungkin tidak menulis Keputusan 1 dan Keputusan 2 walaupun ia menandatanganinya.

PERBINCANGAN SUKARNO DAN SUPARDJO

Bagi Presiden Sukarno wajah G-30-S pada 1 Oktober ialah wajah Brigadir Jenderal Supardjo. Presiden tidak berjumpa dengan lima pimpinan inti G-30-S saat ia berada di Halim. Dari siaran radio pagi hari itu, satu-satunya orang lain yang dengan pasti diketahuinya terlibat ialah Letnan Kolonel Untung. Demikian juga, Sukarno tidak bertemu Aidit dan barangkali tidak pernah diberi tahu bahwa Aidit ada di kawasan pangkalan udara. Mengingat satu-satunya orang dari G-30-S yang dijumpai Presiden Sukarno ialah Supardjo, Presiden kemungkinan pagi itu telah menyimpulkan bahwa G-30-S memang benar seperti yang dinyatakan dalam siaran radio pertama: suatu gerakan murni intern Angkatan Darat yang dirancang untuk membersihkan perwira sayap kanan, serta untuk mempertahankan dirinya selaku presiden. Dan patut diingat bahwa semula G-30-S bermaksud membawa serta dua komandan batalyon, Kapten Sukirno dan Mayor Bambang Supeno, menemui Presiden Sukarno. Tapi hanya Supardjo yang dibawa kembali dengan helikopter ke Halim. Ternyata, Supardjo menjadi duta G-30-S.

Sukarno dan Supardjo bertemu untuk pertama kali sekitar pukul 10.00 pagi di kantor komandan pangkalan udara Halim, Kolonel Wisnoe Djajengminardo. Pada waktu itu Sukarno sudah mengetahui bahwa

Yani diculik. Karena juga telah dilaporkan kepadanya bahwa tembak-menembak terjadi di rumah Yani dan darah terlihat berceceran di sana, Sukarno barangkali menduga Yani telah terbunuh. Jadi Presiden mengetahui Supardjo mewakili sebuah gerakan yang, mungkin sekali, baru saja membunuh panglima angkatan bersenjatanya.

Sukarno pasti bingung seorang brigadir jenderal datang bertemu dengannya atas nama seorang letnan kolonel. Pada persidangannya Untung menyebut, bahwa Sukarno bertanya kepada Supardjo, “Mengapa jang memimpin Untung?” Walaupun Untung tidak mengetahui langsung perundingan itu – apa pun yang diketahuinya berdasarkan apa yang diceritakan Supardjo kepadanya – barangkali Sukarno memang menanyakan pertanyaan semacam itu. Jawaban Supardjo, sekali lagi menurut Untung, tidak memberi kejelasan: “Dialah jang kita anggap pantas.”[37]

Cerita orang pertama satu-satunya tentang pembicaraan mereka pagi itu diberikan Supardjo (dalam persidangannya pada 1967) dan Laksamana Madya Omar Dani, yang hadir selama pembicaraan mereka yang pertama. Cerita Supardjo dan Omar Dani sangat singkat dan jelas tidak memberikan seluk-beluk pembicaraan yang tentunya pelik dan sangat panjang lebar. Sukarno sendiri tidak pernah menyampaikan ceritanya.

Pada sidang Mahmilubnya Supardjo memberi kesaksian bahwa Sukarno tidak terlalu cemas menanggapi berita tentang penculikan para jenderal. Presiden tidak menuduh G-30-S sebagai jahat, khianat, atau kontra revolusioner. Supardjo menceritakan, Sukarno tetap tenang dan mengucapkan dalam bahasa Belanda “*Ja zo iets in een revolutie kan gebeuren* (hal semacam ini akan terjadi di dalam suatu revolusi).”[38] Kendati demikian Sukarno cemas kalau-kalau peristiwa itu menimbulkan perang saudara yang tidak terkendalikan antara kekuatan sayap kanan dan sayap kiri di kalangan militer. Ia meminta Supardjo agar menghentikan G-30-S, sementara ia akan berusaha menemukan pemecahan politis. Supardjo mengatakan, “Kemudian saja diminta duduk lebih dekat, beliau bitjara bahwa kalau begini pertempuran nanti bisa meluas. Lantas jang untung nanti adalah Nekolim, lantas beliau tanja sama saja: mempunjai kesanggupan tidak untuk memberhentikan gerakan dari G-30-S? Waktu itu saja katakan: ‘Ja – sanggup.’ Lantas beliau menepuk-nepuk bahu saja dan mengatakan ‘Awas ja kalau tidak beres *engke maneh dipeuntjit*,’

ja sambil gujon itu. Kalau tidak bisa menjelesaikan, memberhentikan gerakan G-30-S, kamu nanti saja sembelih."[39]

Menurut Omar Dani, Sukarno menolak permintaan Supardjo untuk tampil mendukung G-30-S, lalu beliau meminta agar Supardjo menghentikan G-30-S. Dalam kata-kata penulis biografi Dani, dinyatakan sebagai berikut:

> Ia [Supardjo] melapor langsung kepada Presiden bahwa bersama kawan-kawan ia telah mengambil tindakan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Para perwira muda di lingkungan Angkatan Darat dan para bawahan mengeluh atas sikap, kelakuan, ketidakpedulian para Jendral terhadap bawahannya. Atas pertanyaan Bung Karno apakah Pardjo punya bukti, Soepardjo mengiyakan dan sanggup mengambilnya di MBAD bila ia diperintahkan. Bung Karno memberi perintah untuk mengambilnya, tetapi sampai menghilangnya pada 2 Oktober 1965, Soepardjo tidak pernah dapat menyerahkan bukti-bukti itu kepada Bung Karno. Presiden memerintahkan Brigjen Soepardjo untuk menghentikan gerakannya, guna menghindari terjadinya pertumpahan darah. Presiden juga menolak permintaan Brigjen Soepardjo untuk mendukung G-30-S. Begitu ditolak permintaannya oleh Presiden Sukarno, Brigjen Soepardjo langsung berpamitan dan pergi keluar dari Markas Koops. Tampak di wajahnya sedikit kusut, capai, kurang tidur dan kecewa.[40]

Cerita Omar Dani ini menegaskan pernyataan Supardjo bahwa Sukarno meminta agar G-30-S dihentikan. Sukarno tidak mendukung juga tidak menentang G-30-S. Di satu pihak, ia tidak mengeluarkan pernyataan dukungan terhadapnya (seperti yang telah diperbuat Dani) atau diam-diam mendorong agar meneruskannya. Di lain pihak, ia tidak melihat G-30-S sebagai bahaya yang akan mencelakakan dirinya atau kedudukannya sebagai presiden. Bahwa ia tinggal di Halim, justru tempat yang diketahuinya dipakai sebagai pusat pimpinan G-30-S, menunjukkan bahwa ia melihat Supardjo dan Untung sebagai perwira-perwira yang setia kepadanya. Sukarno kelihatan tidak menjadi panik oleh kejadian

pagi itu. Antara pukul 11.30 dan tengah hari, sesudah berbicara dengan Supardjo di pusat komando pangkalan udara, Sukarno pindah ke sebuah rumah yang sedikit lebih luas milik Komodor Susanto dan beristirahat siang beberapa jenak di sana.

Sukarno tidak sekadar berada di Halim, ia juga memanggil para penasihat utamanya ke sana. Dari tiga wakil perdana menterinya, satu-satunya yang saat itu berada di Jakarta, Leimena, tiba di Halim pada saat menjelang siang hari. Begitu juga Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Kepolisian, Komandan Pasukan Kawal Istana, dan Jaksa Agung. Mereka bersama Sukarno sepanjang sore dan petang hari itu.[41] Menteri-menteri ini menyaksikan sebagian dari pembicaraan yang berlanjut antara Sukarno dan Supardjo. Belakangan mereka menyampaikan informasi sekadarnya kepada wartawan dan juga kesaksian singkat ketika mereka tampil sebagai saksi di sidang pengadilan. Tapi, sejauh yang saya ketahui, mereka tidak menulis catatan rinci tentang pembicaraan antara kedua tokoh tersebut.

Supardjo menemui Sukarno untuk kedua kali sesudah ia kembali dari perundingan dengan para pimpinan inti G-30-S. Seluruhnya Supardjo berbicara dengan Sukarno dalam empat atau lima kali kesempatan yang terpisah-pisah sepanjang hari itu. Hanya pembicaraan pertama yang berlangsung di kantor komandan Halim. Pembicaraan-pembicaraan yang belakangan berlangsung di rumah Komodor Soesanto. Rumah ini dipilih untuk Presiden karena merupakan rumah tunjukan yang terbaik di pangkalan itu.[42] Supardjo mondar-mandir antara rumah Sersan Sujatno, tempat persembunyian Untung, Sjam dan lainnya, dan rumah Soesanto, tempat Sukarno dan menteri-menterinya berada.[43]

Topik utama perbincangan antara Sukarno dan Supardjo pada lepas tengah hari, sekitar pukul 12.00 sampai 13.30, ialah memilih pengganti sementara untuk Yani sebagai panglima Angkatan Darat. Sukarno jelas tidak memusuhi G-30-S karena untuk pengangkatan yang sepenting itu ia meminta nasihat mereka. Dalam analisisnya Supardjo menyatakan bahwa pimpinan G-30-S merekomendasikan tiga nama jenderal Angkatan Darat.[44] Gerakan 30 September memberikan dukungannya untuk Mayor Jenderal U. Rukman, panglima antardaerah untuk Indonesia timur; Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra, asisten pada staf umum Yani yang biasanya hanya disebut dengan nama pertamanya;

dan Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur.[45]

Keputusan tentang penggantian Yani sepenuhnya ada pada Sukarno. Gerakan 30 September tidak mendiktekan syarat-syarat kepada Presiden. Perwira yang akhirnya menjadi pilihan Sukarno ialah Pranoto, anggota staf Yani yang tidak diculik. Pada pukul 13.30 Sukarno menandatangani perintah pengangkatan Pranoto sebagai pejabat pimpinan sementara Angkatan Darat dan mengirim utusan-utusan untuk memanggilnya ke Halim. Sementara itu G-30-S, demi alasan yang tak diketahui, tidak menyiarkan perintah Sukarno melalui radio.

Dalam percakapan mereka, Supardjo secara tersirat mengakui kewenangan Sukarno sebagai presiden. Ia tidak mengancam Sukarno baik dengan gangguan secara fisik maupun berusaha menculiknya, memaksanya untuk mendukung G-30-S, atau menekan agar Sukarno mengambil keputusan-keputusan tertentu. Dipandang dari sudut mana pun Supardjo memainkan peranan sebagai perwira bawahan. Maka menjadi ganjil jika kira-kira pada saat yang bersamaan dengan perundingan-perundingan di Halim ini (tengah hari sampai pukul 14.00), pemancar radio menyiarkan pengumuman yang secara tidak langsung memberhentikan Sukarno sebagai presiden. Di Halim orang yang berbicara dengan Sukarno atas nama G-30-S tetap memperlakukannya sebagai seorang presiden. Tetapi melalui gelombang-gelombang radio, G-30-S mencanangkan secara sepihak telah mendemisionerkan kabinet Sukarno.

Sukarno entah mendengar sendiri atau diberi tahu tentang isi pengumuman G-30-S itu. Ia tidak senang. Dalam sidang kabinet awal November 1965 ia mengacu pada tuntutan G-30-S ketika menjawab para mahasiswa demonstran yang diorganisir oleh Angkatan Darat, yang menuntut agar Sukarno mendemisionerkan kabinetnya: "*ben je bedonderd, dat ik mijn Kabinet ga laten demissioneren*. Ya, itu ucapan saya sesudah diadakannya oleh sesuatu pihak 'Dewan Revolusi.' Pada waktu itu di sini saya berkata dengan tegas: *ben je bedonderd*."[46] Sukarno sudah memutuskan untuk tidak mendukung G-30-S pada saat dewan itu diumumkan melalui radio. Tapi mendengar kabinetnya sudah didemisionerkan pastilah lebih memperkeras penentangannya terhadap G-30-S.

AKSI-AKSI DI JAWA TENGAH

Satu-satunya aksi-aksi penting militer yang mendukung G-30-S terjadi di provinsi Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta.[47] Pemberontakan meluas di dua wilayah itu.[48] Para perwira muda memberontak terhadap perwira tertinggi di provinsi termaksud, Brigadir Jenderal Suryasumpeno, dan tiga komandan distrik militer. Di ibu kota Jawa Tengah, Semarang, seorang kolonel dari staf Suryasumpeno menduduki stasiun radio, RRI Semarang, dengan sekelompok pasukan pemberontak dan menyatakan diri sebagai panglima baru pada sekitar pukul 13.00. Ia adalah Kolonel Suherman, kepala intelijen daerah militer tingkat provinsi.

Di Yogyakarta Mayor Muljono memimpin pasukan pemberontak menggerebek rumah komandan mereka, Kolonel Katamso. Mereka menculiknya dan juga kepala stafnya, Letnan Kolonel Sugijono, yang kebetulan ada di rumah itu ketika para pemberontak datang. Mereka membawa dua perwira itu ke sebuah kota kecil di utara Yogyakarta, Kentungan, dan menahan mereka di tangsi batalyon militer di sana. Kemudian mereka membunuh kedua perwira tersebut.

Para perwira militer yang berada di belakang gerakan di Yogyakarta, berbeda dari kawan-kawan mereka di Semarang, bekerja dalam koordinasi dengan penduduk sipil setempat. Massa keluar di jalan-jalan mendukung G-30-S. Mayor Muljono, sebagai perwira yang bertanggung jawab atas urusan pertahanan sipil, telah menjalin hubungan erat dengan organisasi-organisasi sipil, seperti PKI. Ketika para prajurit menculik Kolonel Katamso, massa pemuda dari berbagai organisasi yang berafiliasi dengan PKI mengepung kantor Sultan Yogyakarta, Kepatihan, tempat kedudukan penguasa sipil. Mereka juga mengambil alih pemancar RRI Yogyakarta dan mulai menyiarkan pernyataan-pernyataan dukungan terhadap G-30-S pada sekitar pukul 20.00.

Peristiwa-peristiwa serupa terjadi di Solo, kota terbesar kedua di Jawa Tengah. Seorang perwira muda memimpin G-30-S. Organisasi-organisasi sipil sayap kiri mengeluarkan pernyataan mendukung G-30-S, walaupun tidak disertai aksi-aksi jalanan seperti halnya di Yogyakarta. Pemimpin pemberontak di Solo, Mayor Iskandar, menyatakan dirinya sebagai ketua Dewan Revolusi Solo dan memerintahkan prajurit-prajurit yang setia kepadanya untuk menahan perwira komandannya, Letnan

Kolonel Ezy Suharto, kepala staf Korem (Komando Resort Militer) Solo, Kapten Parman, dan seorang perwira lain, Letnan Kolonel Ashari. Mayor Iskandar menyerukan kepada wakil-wakil partai politik untuk berkumpul dan dengan bantuannya mengadakan rapat pembentukan Dewan Revolusi kota Solo. Wali kota Solo, Utomo Ramelan, seorang anggota PKI, mengeluarkan pernyataan mendukung G-30-S.

Di kota lain di Jawa Tengah, Salatiga, para perwira pemberontak bertindak tanpa dukungan sipil sama sekali. Letnan Kolonel Idris, kepala staf Korem Salatiga, mengerahkan pasukan menentang perwira komandannya, Kolonel Sukardi, dan seorang perwira militer penting lain di kota ini, Letnan Kolonel Sugiman. Tidak ada tokoh dan organisasi sipil yang mengeluarkan pernyataan dukungan atau keikutsertaan dalam demonstrasi-demonstrasi. Wali kota Salatiga, Bakri Wahab, adalah anggota PKI, namun ia tidak menyatakan dukungannya kepada G-30-S secara terbuka.

Dengan demikian di Jawa Tengah, pada 1 Oktober malam, para perwira menengah merebut komando provinsi di Semarang dan menculik para komandan distrik di tiga kota utama. Hanya di Yogyakarta penduduk sipil turun ke jalan-jalan memberi dukungan kepada G-30-S, dan hanya di Solo kaum politisi sipil mengeluarkan pernyataan-pernyataan dukungan. Hanya di Yogyakarta perwira-perwira yang diculik dibunuh. Aksi-aksi yang dilakukan atas nama G-30-S di Jawa Tengah mengambil pola yang tidak berbeda.

Rupanya G-30-S telah menjalin hubungan dengan para perwira militer di provinsi-provinsi lain. Dalam analisis postmortemnya Supardjo menyatakan bahwa G-30-S telah mengirim kurir-kurirnya ke berbagai provinsi. Sementara para perwira di provinsi-provinsi lain mungkin telah mengetahui tentang adanya G-30-S, dan berpikir untuk melakukan tindakan tertentu, namun mereka tetap pasif.[49] Hanya di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang merupakan wilayah-wilayah di luar Jakarta G-30-S mewujud.

SERANGAN SUHARTO TERHADAP G-30-S

Kembali di Jakarta, seorang jenderal senior Angkatan Darat yang tidak

menjadi sasaran penculikan ialah Mayor Jenderal Suharto, Komandan Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat atau lebih dikenal sebagai Kostrad. Pasukan yang menduduki Lapangan Merdeka (Batalyon 454 dan 530) tidak diperintahkan untuk memblokade markas Kostrad atau setidaknya menetralisirnya. Pasukan menduduki sisi utara, barat, dan selatan lapangan tersebut dan membiarkan sisi timur, tempat markas Kostrad berdiri, kosong. Para perwira Suharto keluar masuk gedung dengan leluasa sepanjang hari itu saat mereka menyusun rencana serangan terhadap G-30-S. Salah satu keganjilan besar dari kejadian-kejadian 1 Oktober itu ialah bahwa musuh-musuh G-30-S bekerja di sebuah gedung yang berada langsung di depan sebagian besar pasukan G-30-S.

Barangkali G-30-S memutuskan tidak menetralisir markas Kostrad karena Kostrad bukanlah merupakan instalasi militer utama di Jakarta. Berbeda dengan Kodam Jaya, Kostrad tidak mempunyai pasukan tetap yang diasramakan di dalam atau sekitar kota. Prajurit-prajurit cadangan Kostrad selalu dipinjam dari komando-komando daerah (kodam-kodam). Kostrad mengerahkan batalyon-batalyon untuk penugasan sementara dalam operasi-operasi tempur tertentu.[50] Meskipun demikian, Kostrad mempunyai arti strategis yang besar, mengingat bahwa yang memimpinnya adalah Suharto, tokoh yang terkadang bertugas sebagai panglima Angkatan Darat setiap saat Yani bepergian ke luar negeri. Jika pasukan pemberontak ingin menguasai Jakarta, mereka harus memastikan bahwa Suharto, orang dalam peringkat pertama yang langsung akan menggantikan Yani, tidak dapat mengerahkan pasukan untuk melakukan serangan balasan. Suharto diangkat menjadi panglima Kostrad pada Mei 1963 dan karena itu berpengalaman paling tidak dua tahun dalam berhubungan dengan para perwira puncak militer di Jakarta.

Menurut penuturannya sendiri, Suharto mendengar tentang adanya tembak-menembak dan penculikan dari tetangga ketika ia masih di kediamannya di Menteng. Ia tiba di Kostrad antara pukul 6.30 dan 7.00 pagi. Karena Suharto menduga Yani sudah terbunuh, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai panglima Angkatan Darat *ad interim*. Perwira kunci yang menguasai pasukan paling besar di Jakarta, Umar Wirahadikusumah, pada sekitar pukul 8.00 melapor kepada Suharto dan menempatkan dirinya di bawah komando Suharto.[51] Jenderal-jenderal dari Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) yang selamat mengadakan rapat

darurat sekitar saat yang sama dan memutuskan mengangkat Suharto sebagai panglima sementara. Menurut salah seorang anggota staf, Mayor Jenderal Pranoto, yang belakangan ditunjuk Sukarno sebagai panglima, "rapat memutuskan untuk menunjuk Mayjen Suharto Pangkostrad agar bersedia mengisi pimpinan A.D. yang terdapat vacuum. Melalui kurir khusus, maka keputusan rapat kita sampaikan kepada Mayjen Suharto di MAKOSTRAD."[52] Sepanjang hari itu banyak perwira yang berkumpul di Kostrad sesudah diketahui bahwa di sinilah pusat kekuatan militer yang anti-G-30-S. Nasution tiba di sana pada petang hari.[53]

Tindakan pertama Suharto dalam menghadapi G-30-S ialah menuntut dua batalyon di Lapangan Merdeka menyerahkan diri. Para komandan batalyon-batalyon itu, Kapten Sukirno dan Mayor Supeno, ada di dalam halaman istana (menemani Supardjo dari Halim pada pagi hari). Para perwira Kostrad menghubungi wakil-wakil komandan batalyon yang masih ada di lapangan bersama pasukannya. Wakil-wakil komandan itu berbuat sesuai dengan perintah yang mereka terima: mereka melapor kepada Suharto di dalam gedung Kostrad. Begitu bertemu dengan mereka, Suharto memberi tahukan bahwa ia menganggap G-30-S sebagai usaha kup dan mengancam akan menyerang mereka jika pasukan mereka tidak menyerah kepadanya pada pukul 6.00 petang hari itu.

Keganjilan lain lagi dari G-30-S adalah bahwa dua batalyon tersebut – Yon 454 dari Jawa Tengah dan Yon 530 dari Jawa Timur – dipanggil ke Jakarta oleh Suharto sendiri. Dalam penjelasannya yang pertama di depan umum tentang peristiwa hari itu, yaitu pidatonya pada 15 Oktober, Suharto mengakui bahwa dua batalyon itu termasuk anggota Kostrad.[54] Mereka dibawa ke Jakarta bersama batalyon yang ketiga, Yon 328 dari Jawa Barat, untuk mengambil bagian dalam parade Hari Angkatan Bersenjata yang dijadwalkan pada 5 Oktober. Pada pagi hari 30 September 1965 Suharto memeriksa tiga batalyon itu, di lapangan tempat mereka berkemah. Pada 1980-an salinan perintah-perintah Kostrad yang asli kepada tiga batalyon tersebut tersingkap – semuanya ditandatangani oleh Suharto.[55]

Sementara mereka berpangkalan di Lapangan Merdeka, tidak seorang pun dari dua komandan batalyon itu berhubungan dengan pimpinan G-30-S di Halim. Mereka benar-benar memikirkan sendiri bagaimana menjawab ancaman Suharto, tanpa berkonsultasi dengan

Untung, Sjam, dan lainnya. Satu batalyon, yaitu Yon 530, meninggalkan posisinya dan menyerah ke Kostrad menjelang tengah hari. Kapten Sukirno dari Yon 454 berhasil mencegah pasukannya untuk membelot tetapi merasa tidak dapat tetap berada di Lapangan Merdeka tanpa adanya batalyon yang lain. Ia memerintahkan semua anggota pasukannya naik truk dan kembali menuju Halim menjelang senja.[56]

Suharto berhasil mengosongkan Lapangan Merdeka dari tentara tanpa satu letusan senjata pun: satu batalyon menyerah, yang lain melarikan diri. Pasukan Suharto tidak menemui perlawanan ketika merebut stasiun RRI sekitar pukul 18.00.[57] Di gedung telekomunikasi pasukan Suharto menjumpai beberapa sukarelawan sipil G-30-S. Karena sukarelawan-sukarelawan itu sangat bingung apa yang harus mereka lakukan, dan juga tidak yakin apakah pasukan itu kawan atau lawan, mereka menunjukkan perlawanan kecil belaka. Mereka dengan cepat dikalahkan dan diangkut.[58] Hingga petang hari G-30-S sudah tidak mempunyai pasukan yang tersisa di dalam kota. Sisa-sisa kekuatannya telah kembali ke Lubang Buaya. Suharto menguasai Jakarta. Antara pukul 19.00 dan 20.30 ia memerintahkan RRI untuk menyiarkan pesan yang telah ia rekam sebelumnya sore itu. Gema suara Suharto di udara menjadi pertanda berakhirnya G-30-S secara simbolik.

Untuk merebut stasiun RRI, Lapangan Merdeka, dan gedung telekomunikasi, Suharto menggunakan pasukan RPKAD yang dibawa dari markas mereka di Cijantung, sebuah kota kecil di selatan Jakarta. Ia juga menggunakan satu-satunya batalyon Kostrad yang tidak ikut menggabung dalam G-30-S, Batalyon 328 dari Jawa Barat, dan bagian-bagian dari Batalyon 530 yang telah menyeberang hanya beberapa jam sebelumnya. Aneh bahwa Suharto tidak mengambil kesempatan menggunakan pasukan dari garnisun Jakarta (Kodam Jaya) yang berada di bawah komando Umar Wirahadikusumah. Suharto hanya menggunakan pasukan-pasukan yang berada langsung di bawah komandonya, bahkan lebih menyukai pasukan yang pernah ikut serta dalam G-30-S.

Sesudah Lapangan Merdeka bersih, Suharto memalingkan perhatiannya ke Halim, yang ia ketahui sebagai basis G-30-S. Berbagai kurir dan perwira berdatangan di Kostrad dari Halim sejak hari masih sore dan melaporkan bahwa Supardjo (yang kedudukannya sebagai wakil komandan gerakan telah diumumkan melalui radio) sedang berunding

dengan Sukarno di sana. Untuk mengisolasi G-30-S di pangkalan AURI Halim, Suharto tidak mengizinkan seorang pun perwira Angkatan Darat pergi ke sana, bahkan mereka yang dipanggil oleh presiden sekali pun.

Seperti sudah saya kemukakan, Sukarno telah mengangkat Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat pada pukul 13.30 dan memerintahkannya untuk datang ke Halim. Sukarno tidak menyadari bahwa Pranoto dan staf Yani yang masih hidup telah sepakat mengangkat Suharto sebagai panglima. Suharto tidak mengijinkan Pranoto meninggalkan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dan bertemu dengan Sukarno. Dalam catatan retrospeksi singkatnya Pranoto teringat, "Saya sudah terlanjur masuk dalam hubungan komando taktis di bawah Mayjen Suharto, maka saya tidak dapat secara langsung menghadap Presiden/Pangti dengan tanpa seizin Mayjen Suharto sebagai pengganti Pimpinan AD saat itu. Atas dasar panggilan dari utusan-utusan Presiden/Pangti tersebut di atas, saya pun berusaha mendapatkan izin dari Mayjen Suharto. Akan tetapi, Mayjen Suharto selalu melarang saya untuk menghadap Presiden/Pangti dengan alasan bahwa dia (Mayjen Suharto) tidak berani mereskir kemungkinan tambahnya korban Jenderal lagi apabila dalam keadaan yang sekalut itu saya pergi menghadap Presiden."[59]

Karena Sukarno adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, penolakan Suharto untuk mengikuti perintahnya tentang pengangkatan Pranoto dapat disamakan dengan pembangkangan. Sukarno sudah menegaskan bahwa aman bagi Pranoto untuk datang ke Halim. Dengan demikian Suharto tidak mempunyai alasan, menurut protokol kemiliteran, untuk meragukan penilaian Sukarno. Suharto menentang atasannya dan melaksanakan strateginya sendiri. Sementara Sukarno sedang berunding dengan para pimpinan G-30-S di Halim dan membujuk mereka agar menghentikan aksi-aksinya, Suharto sibuk merancang serangan militer terhadap mereka.

Suharto mulai memberikan perintah-perintahnya kepada presiden. Melalui kurir ia mengatakan kepada Sukarno agar sekitar pukul 20.00 presiden meninggalkan Halim supaya tidak menjadi korban dalam pertempuran yang akan terjadi. Suharto menyatakan pasukannya akan menyerang pangkalan udara dan membersihkan seluruh kekuatan G-30-S. Rupanya melihat bahwa akan sia-sia memerintahkan Suharto agar menghentikan serangannya, Sukarno bertukar pikiran dengan para

penasihatnya bagaimana jalan yang terbaik untuk melarikan diri dari Halim. Ia akhirnya memutuskan pergi dengan mobil ke Istana Bogor, di selatan Jakarta, tempat ia biasa melewatkan akhir pekan. Ia tiba di Istana Bogor sekitar pukul 22.00.

Dengan tersingkirnya Sukarno, rintangan yang masih tersisa bagi Suharto tinggal Angkatan Udara. Ia menerima berita bahwa para perwira AURI di Halim akan memberikan perlawanan jika pangkalan udara diserang dan sedang memikirkan untuk membom atau memberondong markas Kostrad. Suharto dan stafnya meninggalkan markas mereka dan menempati markas baru di dekat stadion Senayan.[60] Ternyata serangan udara itu tidak pernah terjadi. Bagaimana pun juga, adanya ancaman itu mengakibatkan persiapan-persiapan Suharto tertunda beberapa jam.

Pasukan RPKAD disiapkan di sepanjang batas selatan pangkalan udara Halim sejak dini hari 2 Oktober. Mereka bertempur sebentar dengan pasukan dari batalyon Jawa Tengah yang kebetulan juga berkelompok di sepanjang jalan yang sama. Sesudah meninggalkan Lapangan Merdeka pada sore hari sebelumnya, Batalyon 454 bergerak mundur ke Halim, tapi mendapati pintu-pintu pangkalan udara tertutup. Dilarang memasuki Halim, mereka melewatkan malam dengan berkeliaran di sepanjang jalan antara pangkalan udara dan Lubang Buaya. Inilah jalan yang ditempuh RPKAD ketika masuk sekitar dini hari 2 Oktober. Seorang perwira AURI, Komodor Dewanto, berhasil menyela dan mencegah pertempuran besar-besaran antara RPKAD dan pasukan Batalyon 454. Gencatan senjata segera diadakan yang mendesak agar Batalyon 454 ditarik dari kawasan dan RPKAD memasuki pangkalan udara. Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhie, menemui para perwira senior Angkatan Udara di Markas Besar AURI. Ia meyakinkan dirinya bahwa Sukarno benar-benar sudah pergi dan Halim tidak lagi menjadi ancaman bagi Angkatan Darat. Angkatan Udara tidak akan melancarkan serangan udara, seperti yang telah dikhawatirkan Kostrad sepanjang malam sebelumnya.[61]

Suatu saat pada pagi 2 Oktober pimpinan inti G-30-S meninggalkan persembunyian mereka di Halim dan pindah ke selatan di Lubang Buaya. Di sini mereka membahas situasi yang ada dengan para perwira Batalyon 454 dan anggota-anggota PKI yang ikut serta dalam G-30-S. Akhirnya semua kekuatan G-30-S membubarkan diri dan pergi ke arah yang berbeda-beda. Kedatangan RPKAD agaknya mendorong pelarian

mereka. Sjam, Latief, dan Supardjo mencari jalan masuk pusat kota. Untung dan prajurit-prajurit kawal istana menyelinap dengan kereta api menuju Jawa Tengah. Aidit dan Omar Dani sudah diterbangkan keluar Jakarta pada malam hari (Aidit ke Yogyakarta, Omar Dani ke Jawa Timur). Tamatlah kisah G-30-S di Jakarta. Pada hari berikutnya G-30-S di Jawa Tengah pun tamat kisahnya.

CATATAN

[1] Schlemihl adalah makhluk khayali yang tubuhnya tak memantulkan bayangan karena ia sudah menjual bayangannya kepada setan. Makhluk ini merupakan karakter utama dalam dongeng *The Wonderful History of Peter Schlemihl (*1813)*,* buah karya pengarang Jerman Adelbert von Chamisso (1781-1838).

[2] Untuk pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan G-30-S, lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September* (Jakarta: 1994), lampiran 1-5, hal. 5-13.

[3] Sekarang nama yang lazim dipakai adalah Lapangan Monas. Waktu itu lapangan tersebut bernama Lapangan Merdeka. Mengikuti kebiasaan lama, saya akan menggunakan Lapangan Merdeka.

[4] Catatan rinci tentang razia penculikan terdapat dalam Anderson dan McVey, *Preliminary Analysis,* 12-18.

[5] Anderson dan McVey menduga peranan Supardjo adalah untuk "mengawasi istana dan stasiun RRI" (*Preliminary Analysis,* 11). Ini tidak tepat. Pada saat Supardjo tiba, Yon 454 dan Yon 530 sudah menguasai kawasan di luar istana dan stasiun radio. Tidak terlihat bahwa Supardjo diharapkan berperanan lebih dari sekadar berbicara dengan Sukarno di dalam istana. Ia tidak memimpin pasukan yang menduduki stasiun RRI.

[6] Transkrip Mahmilub, sidang pengadilan Supardjo, *pleidooi dari tertuduh*, 13, 28. Dalam hal ini, juga pada hampir semua hal-hal lain, saya menggunakan transkrip dari Mahmilub hanya untuk mengajukan kemungkinan, bukan untuk menegakkan fakta-fakta. Seperti sudah saya kemukakan dalam Pendahuluan, kesaksian para terdakwa dan saksi di depan sidang Mahmilub tidak dapat diandalkan, dan di dalam buku ini saya akan menunjukkan banyak kesalahan di dalam kesaksian-kesaksian mereka. Namun demikian beberapa bagian dari kesaksian-kesaksian itu dapat dianggap akurat bila didukung oleh bukti-bukti dalam bentuk lain. Dalam setiap transkrip persidangan, bagian terpenting ialah pledoi tertuduh yang ditulis sendiri untuk mengajukan interpretasinya secara umum tentang G-30-S dan mengungkapkan sesuatu tentang kepribadiannya.

[7] Pada 1965 Sukarno mempunyai empat istri: Fatmawati, Hartini, Dewi, dan Harjati. Tidak satu pun dari mereka tinggal di istana kepresidenan di Jakarta.

[8] Saelan, *Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66,* 309-310. Saat itu Kolonel Saelan adalah

wakil komandan pasukan kawal istana. Tapi malam itu ia juga pejabat komandan karena komandan pasukan, Brigjen Sabur, berada di luar kota. Dalam pasukan kawal istana, yang disebut Cakrabirawa, ada satu satuan kecil pengawal pribadi presiden yang dikenal sebagai Detasemen Kawal Pribadi Presiden (DKP). Satuan kecil DKP ini merupakan lingkar pertama yang berada paling dekat dengan sekeliling tubuh presiden. Komandan DKP, Letnan Kolonel Mangil Martowidjojo, telah menulis dengan rinci dalam memoarnya tentang gerak-gerik Sukarno pada pagi hari 1 Oktober 1965 (lihat Martowidjojo, *Kesaksian Tentang Bung Karno,* 378-398).

[9] Kolonel Saelan menyatakan bahwa salah seorang bawahan Untung, Kapten Suwarno, menghampirinya pada sekitar pukul 5.45 pagi dan bertanya di mana presiden berada (Saelan, *Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66,* 309). Ini mungkin memberi petunjuk bahwa sampai detik terakhir kelompok Untung masih mencari-cari presiden. Suwarno inilah yang menjumpai Supardjo di istana dan menyampaikan bahwa presiden tidak ada di tempat.

[10] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002.

[11] Lihat wawancara dengan Omar Dani dalam Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965,* 240.

[12] Lihat pernyataan Sukarno pada 3 Oktober 1965, dalam Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai,* 1:18.

[13] Waktu yang ditunjukkan di sini waktu perkiraan. Menurut ingatan Letkol Mangil Martowidjojo, Sukarno tiba di pangkalan udara Halim sekitar pukul 9.00 pagi (Martowidjojo, *Kesaksian Tentang Bung Karno,* 389). Agaknya Supardjo tiba lebih awal dari Sukarno. Ketika Supardjo tiba, ia berbicara sebentar dengan Omar Dani di kantor utama, kemudian pergi menemui para pimpinan inti G-30-S. Supardjo sudah meninggalkan kantor komandan Halim saat Sukarno dan rombongannya tiba.

[14] Kapan waktu pembunuhan setepatnya tidak diketahui. Badan intelijen AS, Central Intelligence Agency (CIA), dalam laporannya tentang G-30-S yang diterbitkan, menyebut jenderal-jenderal itu dibunuh sekitar pukul 7.00 pagi (CIA, *Indonesia – 1965*, 21). Menurut ingatan seorang prajurit kawal istana, yang berada di Lubang Buaya saat itu, Sersan Mayor Bungkus, pembunuhan terjadi sekitar pukul 9.30 (wawancara dengan Bungkus). Untuk komentar Bungkus tentang pembunuhan yang telah terbit, lihat Anderson, "World of Sergeant-Mayor Bungkus," 27-28).

[15] Tanggal-tanggal pertemuan, topik-topik diskusi, nama-nama semua yang hadir, dan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam pertemuan tidak dapat diketahui dengan kepastian sedikit pun. Kisah-kisah dari rezim Suharto disusun atas dasar kesaksian Sjam. Tapi kita tidak mempunyai alasan mempercayai kata-kata Sjam tentang masalah ini. Notosusanto dan Saleh menyatakan bahwa komplotan ini bertemu sepuluh kali dari 17 Agustus sampai 29 September (lihat *Tragedi Nasional*, 11-13). Laporan CIA menyatakan, mereka bertemu delapan kali dari 6 September sampai 29 September (*Indonesia – 1965*, 110-157).

[16] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002.

[17] Tentang kehadiran Kusno, lihat Siauw Giok Tjhan, "Berbagai Catatan,“ 5-7. Iskandar Subekti di depan pengadilan mengakui ia berada di Halim bersama Aidit (Subekti, "Jalan

Pembebasan Rakyat Indonesia", 45-46). Ini merupakan pernyataan Mahmilub yang andal. Tidak ada alasan kuat bagi Subekti untuk mengakui bahwa ia berada di Halim bersama Aidit. Sebagian besar pembelaan Subekti berisi kutukan terhadap rezim Suharto. Sementara Subekti tidak berterus terang mengenai apa yang terjadi di pangkalan Halim pagi itu, pernyataannya bahwa ia berada di Halim agaknya memang benar. Heru Atmodjo juga mengemukakan, ia mendengar dari tapol-tapol lain bahwa Iskandar Subekti memang ada di Halim (Sembiring dan Sutedjo, *Gerakan 30 September*, 128-129).

[18] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002, Jakarta.

[19] Menurut Omar Dani para perwira yang hadir dalam rapat itu, selain Dani sendiri, ialah Komodor Dewanto, Komodor Andoko, Komodor Wattimena, dan Laksamana Madya Makki Perdanakusuma. Rapat diadakan di kantor Dani di Wisma Angkasa (Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965,* 225).

[20] Sukarno memprakarsai kampanye melawan Malaysia pada September 1963 yang disebutnya sebagai Konfrontasi. Tentara Indonesia menempatkan pasukannya di Sumatra dan Kalimantan untuk kemungkinan melakukan penyerbuan dan terkadang mengirim kelompok pasukan-pasukan kecil ke kawasan Malaysia. Nama semula dari komando militer yang dibentuk untuk melancarkan Konfrontasi itu Koga. Sukarno mereorganisasi komando ini pada Oktober 1964 dengan nama baru Kolaga: Komando Mandala Siaga. Omar Dani adalah Panglima Kolaga. Wakil Panglima, sejak 1 Januari 1965, ialah Suharto. Panglima pasukan-pasukan Kolaga di Kalimantan ialah Supardjo.

[21] Omar Dani mengatakan bahwa ia menginap di Halim malam itu karena ia berharap pada hari berikut akan mendengar lebih banyak tentang apa yang akan terjadi. Ia tidur di gedung pusat pangkalan udara, bukan pulang ke rumah atau pergi ke kantornya sendiri di tengah kota Jakarta. Agaknya tidak benar bahwa, seperti yang disangkakan oleh Anderson dan McVey, Dani "diambil oleh personel AURI dan dibawa ke Halim [pada jam 3.00 pagi] untuk, dengan kehadirannya yang 'otoritatif,' mengukuhkan penguasaan para konspirator atas pangkalan udara." (*Preliminary Analysis,* 19).

[22] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 11 Juni 2000.

[23] Omar Dani menjelaskan, ia menulis "Perintah Harian" antara pukul 7.15 dan 8.00 pagi sesudah mendengar pengumuman pertama G-30-S melalui radio di pangkalan udara Halim. Ia menyisihkan pernyataan itu begitu ia mendengar pada pukul 8.00 bahwa Sukarno sedang menuju Halim. Dani menganggap apa yang sudah ditulisnya sebagai draf yang mungkin harus ia ubah sesudah ia mengetahui pendirian Presiden mengenai G-30-S. Dani sudah mengirim draf itu kepada Komodor Dewanto di Markas Besar AURI untuk meminta pendapatnya. Rupanya, karena keliru komunikasi, draf itu lalu diumumkan sebagai sebuah dokumen final dari MBAU pada pukul 9.30 pagi sebelum Dani dapat merevisinya (Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim,* 238-239)

[24] Keterlibatan secara individual dari satuan pasukan para dan polisi militer berdasar pada wawancara lisan dengan beberapa mantan personil militer yang ikut serta dalam G-30-S, Subowo dan Mudjijono (kedua-duanya nama samaran).

[25] Jumlah sukarelawan yang berafiliasi dengan PKI tidak diketahui dengan pasti. Selama

persidangan Mahmilub Untung menyatakan ada kira-kira dua ribu orang sipil ikut serta dalam aksi G-30-S pada 1 Oktober 1965 (*"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub di Djakarta, Perkara Untung,* 40).

[26] Anderson dan McVey menyitat berita surat kabar yang mengutip Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Panglima Kodam Jaya, yang menyatakan jumlah seluruh pasukannya enam puluh ribu personil (*Preliminary Analysis,* 66 n13). Saya kira angka ini terlalu tinggi, tapi saya tidak menemukan angka lain tentang kekuatan pasukan Kodam tersebut.

[27] Wirahadikusumah, *Dari Peristiwa ke Peristiwa,* 182-186.

[28] Catatan rezim Suharto sendiri tidak berisi informasi tentang peran serta Sunardi dan Anwas dalam G-30-S. Lihat Notosusanto dan Saleh, *Coup Attempt*, Sekretariat Negara, *September 30th Movement.* Kedua tokoh itu kemudian diadili oleh pengadilan militer, dijatuhi hukuman walaupun kekurangan bukti yang melemahkan terdakwa, dan dipenjarakan sampai akhir 1970-an.

[29] *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung,* 77.

[30] *Ibid.*, 75.

[31] Sembiring dan Sutedjo, *Gerakan 30 September 1965,* 125-129.

[32] Transkrip Mahmilub, pengadilan Supardjo, *pleidooi dari tertuduh*, 6, 11.

[33] Laporan CIA menyatakan bahwa Dekrit No. 1 pertama-tama disiarkan pada tengah hari, dan Keputusan 1 dan Keputusan 2 pada pukul 13.00 (lihat *Indonesia – 1965*, 25-26). Jurnal *Indonesia* dalam penerbitan terjemahan dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa ketiga pengumuman tersebut disiarkan melalui radio pada pukul 14.00 ("Selected Documents," 137-139)

[34] *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung*, foto-foto antara halaman 8 dan 9.

[35] RRI menyiarkan "Perintah Harian" Omar Dani suatu saat lepas tengah hari, walaupun telah disiarkan (menurut Dani secara tidak sengaja) pada pukul 9.30 pagi. Dani mendasarkan pernyataannya lebih pada informasi dari pengumuman gerakan yang pertama (G-30-S sebagai pelindung Sukarno), ketimbang pada pengumuman yang disiarkan pada sore hari (G-30-S sebagai perampas kekuasaan Sukarno). Para editor jurnal *Indonesia* menyatakan bahwa pernyataan Dani disiarkan pukul 15.30. ("Selected Documents," 143). Dani sendiri menyatakan bahwa pernyataan itu disiarkan pukul 13.00 siang (Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim,* 239).

[36] Sukarno menggunakan istilah Panca Azimat Revolusi, dengan maksud menunjuk pada Nasakom, Pancasila, Manipol-Usdek, Trisakti, dan Berdikari. Nasakom ialah prinsip untuk menggabungkan kecenderungan politik nasionalis, agama, dan komunis ke dalam suatu negara bangsa yang berfungsi tunggal. Pancasila terdiri dari lima prinsip umum yang merupakan dasar untuk persatuan di antara bangsa Indonesia. Secara garis besar lima prinsip itu ialah: kepercayaan kepada Tuhan yang tunggal, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Manipol ialah Manifesto Politik Sukarno tahun 1959, yang ditetapkan pemerintah sebagai azas pembimbing. Usdek ialah akronim untuk lima istilah: UUD 1945,

Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Trisakti merujuk kepada tiga prinsip: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, ialah prinsip Sukarno untuk ekonomi nasional yang berswasembada.

[37] *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung,* 60.

[38] Transkrip Mahmilub, pengadilan Supardjo, sidang ketiga, 24 Februari 1967, 21.

[39] Transkrip Mahmilub, pengadilan Supardjo, sidang ketiga, 24 Februari 1967, 16-17. Versi resmi militer menyatakan, Sukarno menepuk punggung Supardjo dan mengatakan, "Kerja yang baik" (CIA, *Indonesia – 1965*, 31). Ini tampaknya merupakan pencatutan kesaksian Supardjo. Sukarno tidak memberi ucapan selamat untuk penculikan terhadap para jenderal; ia menepuk Supardjo di punggung sambil mengancam akan menghukumnya jika ia tidak menghentikan G-30-S. Sukarno belum mengenal Supardjo dengan baik, tapi ia telah bertemu dengannya pada sejumlah kesempatan, dan mengembangkan rasa hormat mendalam terhadap Supardjo. Di Halim Sukarno rupanya nyaman bergaul dengannya. Keakraban dibangun dengan senda gurau, tepukan di punggung, dan bercakap-cakap dalam bahasa Sunda. Baik Sukarno maupun Supardjo bukan orang Sunda, tapi keduanya pernah tinggal cukup lama di Jawa Barat, sehingga mereka fasih berbahasa Sunda.

[40] Surodjo and Soeparno, *Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran and Tanganku,* 70.

[41] Para pembantu Sukarno di pangkalan udara Halim ialah Laksamana Madya R. Eddy Martadinata, Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, Brigadir Jenderal Sabur, dan Brigadir Jenderal Soetardio.

[42] Surodjo and Soeparno, *Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran, and Tanganku*, 71.

[43] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002. Laporan CIA menyatakan bahwa Supardjo pagi hari itu mondar-mandir antara Pusat Komando Operasi dan rumah Sersan Soejatno sebanyak empat kali (9.30, 10.15, 11.15, dan 11.45). Laporan itu tidak menyebutkan sumber informasi tersebut. Lihat CIA, *Indonesia – 1965*, diagram antara halaman 22 dan 23. Diagram tidak tampak akurat karena laporan-laporan lain menunjukkan bahwa Supardjo tidak bertemu Sukarno di Pusat Komando Pangkalan Udara sampai kira-kira pukul 10.00 pagi, dan bahwa Sukarno telah pindah ke rumah Komodor Soesanto pada pukul 11.00 siang. Diagram CIA tidak memperlihatkan bahwa Supardjo juga mondar-mandir antara rumah Soesanto dan rumah Sujatno.

[44] Menurut laporan CIA yang diterbitkan, "Supardjo minta agar ia diberi kesempatan berkonsultasi tentang masalah itu dengan 'kawan-kawan'-nya. Presiden menjawab, 'Ya, baiklah, tapi segera kembali' …Sesudah bertukar pikiran mereka [pimpinan G-30-S] memutuskan untuk merekomendasikan kepada Sukarno agar menunjuk Mayor Jenderal Pranoto" (CIA, *Indonesia – 1965*, 32). Menurut cerita Supardjo (lihat Bab 3 dan Apendiks 1 buku ini), G-30-S merekomendasikan tiga nama: Rukman, Pranoto, dan Basuki Rachmat.

[45] Mengenai reputasi Rukman dan Basuki Rachmat, lihat Sundhaussen, *Road to Power*, 171-172.

[46] Setiyono and Triyana, *Revolusi Belum Selesai,* 1:73. Kalimat dalam bahasa Belanda berarti:

"Apa kalian sudah gila, berpikir bahwa saya akan membubarkan kabinet saya sendiri?"

[47] Yogyakarta tidak berada di bawah pemerintahan sipil Jawa Tengah. Daerah ini merupakan Daerah Istimewa. Namun, Daerah Istimewa Yogyakarta diintegrasikan ke dalam struktur komando Angkatan Darat yang meliputi wilayah Jawa Tengah (Kodam Diponegoro).

[48] Untuk kejadian-kejadian di Jawa Tengah, saya pada pokoknya menggunakan penggambaran dalam Anderson dan McVey, *Preliminary Analysis*, 46-53. Mereka mendasarkan penuturannya pada cerita-cerita yang terdapat dalam koran-koran lokal sejak Oktober sampai Desember 1965.

[49] Satu contoh ialah kepasifan para perwira militer pro-PKI di Sumatra Barat (A. Kahin, *Rebellion to Integration,* 240-241).

[50] Kostrad yang dibentuk pada 1960 merupakan usaha pertama Angkatan Darat untuk membentuk pasukan cadangan pusat. Walaupun pasukannya masih dipinjam dari komando-komando daerah, Kostrad dirancang untuk memberi panglima Angkatan Darat (yang dipegang Yani sejak Juni 1962) batalyon-batalyon yang berada di bawah komandonya sendiri (Lowry, *Armed Forces of Indonesia,* 89.)

[51] Wirahadikusumah, *Dari Peristiwa ke Peristiwa*, 186.

[52] Reksosamodra, *Memoar*, 246.

[53] Nasution mengingat ia datang pukul 19.30 (Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, 6:241). Tapi menurut ingatan Suharto, Nasution tiba sekitar pukul 17.30 sore (Suharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,* 126).

[54] "Selected Documents," 167.

[55] *Tapol Bulletin,* no. 90 (Desember 1988), 20-21, mengutip *Indonesia Reports*, Politics Supplement, no. 25, Agustus 1988. Informasi ini aslinya muncul dalam sebuah dokumen anonim berbahasa Indonesia, berjudul "Peranan Presiden Suharto dalam Gerakan 30 September." Dokumen ini dilampiri sebuah reproduksi radiogram yang dikirim Suharto kepada tiga batalyon itu pada 21 September 1965, memerintahkan mereka ke Jakarta untuk parade Hari Angkatan Bersenjata.

[56] Ketika mereka tiba di Halim pasukan ini ditolak masuk pangkalan oleh perwira-perwira AURI. Dalam keadaan bingung, mereka berkeliaran di sepanjang jalan, di selatan pangkalan udara (Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965*, 129).

[57] Waktu pukul 18.00 dilaporkan oleh Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat,* 496.

[58] Wawancara dengan Juwono (nama samaran), anggota organisasi pemuda PKI, Pemuda Rakyat. Ia mendapat perintah dari atasannya untuk menduduki gedung telekomunikasi.

[59] Reksosamodra, *Memoar*, 247-248.

[60] Hughes, *End of Sukarno*, 82.

[61] Laporan paling rinci tentang peristiwa-peristiwa 2 Oktober pagi di dan sekitar Halim, terdapat dalam Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim,* 149-180.

2

PENJELASAN TENTANG G-30-S

Tindakan dapat kita mengerti jika ada koherensi antara tindakan agen dengan makna situasi yang dihadapinya bagi dirinya. Tindakan si agen akan kita rasakan membingungkan sebelum koherensi itu kita temukan … Koherensi ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa tindakan itu masuk akal; makna sebuah situasi bagi pelaku bisa jadi penuh kekacauan dan pertentangan; tetapi penggambaran yang cukup tentang pertentangan itu menjadikannya dapat dimengerti.

Charles Taylor, **Philosophy and the Human Science** (1971)

Ada tanda tanya yang menggelantung hampir pada setiap aspek Gerakan 30 September. Mengapa sebuah gerakan yang menyatakan diri kepada umum pada 1 Oktober menamai dirinya dengan tanggal hari sebelumnya? Mengapa sebuah gerakan yang menyatakan diri sebagai murni tindakan intern Angkatan Darat juga memutuskan mendemisionerkan kabinet Presiden Sukarno dan membentuk pemerintahan baru atas dasar "dewan revolusi"? Mengapa sebuah gerakan yang menyatakan diri sebagai usaha untuk mencegah kup terhadap Presiden Sukarno tidak tegas-tegas menyatakan bahwa ia akan tetap menjadi presiden di dalam pemerintahan yang baru ini? Mengapa sebuah gerakan yang ingin mengganti pemerintah tidak menggelar pasukan untuk menguasai ibu kota sesuai dengan prosedur klasik dalam kudeta? Mengapa gerakan ini tidak menculik Mayor Jenderal Suharto atau bersiap untuk menghadapi pasukan-pasukan yang ada di bawah komandonya? Gerakan 30

September tampak sebagai kemelut yang kusut tanpa kepaduan.

Bertahun-tahun banyak orang berusaha mencerna apa kiranya logika pokok dari G-30-S. Orang harus berpikir bahwa para pelakunya bukanlah orang-orang yang menderita schizofrenia, tolol, atau berkecenderungan bunuh diri. Mereka pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu di dalam benak mereka dan tentu juga telah merancang tindakan dan pernyataan mereka sebagai sarana yang cukup efektif untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Bisa saja mereka salah membaca situasi politik dan salah menghitung kemampuan mereka sendiri, tapi tentu mereka tidak akan melangkah maju dengan G-30-S tanpa ada rencana yang masuk akal bagi mereka.

Ada empat pendekatan pokok untuk mengurai keganjilan-keganjilan G-30-S dan menetapkan semacam koherensi terhadapnya. Menurut penjelasan pihak militer Indonesia, sejak hari-hari pertama Oktober sampai sekarang, G-30-S merupakan siasat PKI *sebagai sebuah institusi* untuk merebut kekuasaan negara. Gerakan ini bukan sekadar sebuah pemberontakan atau kup, tapi awalan revolusi sosial secara menyeluruh untuk melawan semua kekuatan nonkomunis. Dua ilmuwan dari Cornell University, Anderson dan McVey, dalam analisis mereka pada Januari 1966, mengemukakan pembacaan alternatif terhadap G-30-S. Mereka menggarisbawahi pernyataan G-30-S sendiri, yaitu sebagai *putsch* intern Angkatan Darat yang dilakukan oleh perwira-perwira bawahan. Pendekatan ketiga, yang dikemukakan ilmuwan politik Harold Crouch, bermaksud membuktikan bahwa pada hakikatnya G-30-S merupakan kegiatan para perwira yang tidak puas tapi PKI juga memainkan peran pendukung yang kuat. Pendekatan keempat dipelopori seorang sosiolog Belanda, W.F. Wertheim, mengemukakan hipotesis bahwa Suharto dan para jenderal Angkatan Darat antikomunis mengorganisasikan G-30-S melalui agen ganda (khususnya Sjam) agar dapat menciptakan dalih untuk menyerang PKI dan menggulingkan Sukarno. Izinkanlah saya menguraikan keempat pendekatan tersebut secara rinci satu demi satu.[1]

G-30-S SEBAGAI USAHA KUDETA PKI

Dalam memoarnya Suharto menyatakan sudah menduga PKI menda-

langi G-30-S ketika mendengar pengumuman radio yang pertama pada pagi hari 1 Oktober, "Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol. Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin."[2] Asisten Suharto untuk urusan intelijen di Kostrad, Yoga Sugama, dalam memoarnya (yang ditulis dalam gaya orang ketiga oleh para penulis yang ia sewa) menyatakan yakin G-30-S itu dipimpin oleh PKI bahkan sebelum Suharto berpikiran demikian, "Yoga adalah orang pertama di Kostrad yang memastikan bahwa penculikan para Jenderal Angkatan Darat di penghujung bulan September 1965 [*sic*], dilakukan oleh anasir-anasir PKI. Beberapa perwira tampak ragu-ragu dengan kesimpulannya itu karena pada pagi hari 1 Oktober belum diperoleh bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut." Konon Sugama mengatakan kepada mereka yang meragukannya itu, "Ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya." Sugama menyombongkan diri sebagai orang pertama yang meyakinkan Suharto bahwa PKI bersalah sehingga mengubah firasat Suharto menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan.[3] Penuturan Sugama itu memberi kesan bahwa jenderal-jenderal Kostrad sudah menengarai sang dalang sebelum mendapatkan satu pun bukti yang pasti. Kesimpulan sudah datang sebelum pembuktian.

Suharto tidak serta-merta menuduh PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap G-30-S. Adalah para perwira bawahannya yang memobilisasi sejumlah pimpinan politik anti-PKI untuk melancarkan tuduhan. Hanya satu hari sesudah G-30-S meletus, seorang jenderal antikomunis, Brigadir Jenderal Sucipto, membentuk organisasi yang dibuat tampak seperti organisasi sipil dengan nama Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP Gestapu). Sesudah mengadakan rapat tertutup para pimpinan kelompok ini menyelenggarakan konperensi pers pada 4 Oktober. Yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang semacam Subchan Z.E. dari Nahdlatul Ulama, yang sejak lama bekerja sama dengan para perwira Angkatan Darat yang anti-PKI.[4] Dengan adanya kerja sama sebelumnya, mereka mampu dengan cepat mengorganisasikan diri.

Pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober, Angkatan Darat bukannya menyelenggarakan parade militer sebagaimana yang sudah dijadwalkan, dengan barisan demi barisan pasukan berderap memamer-

kan persenjataan mutakhir, melainkan mengadakan prosesi pemakaman besar-besaran untuk tujuh perwira yang terbunuh. Pada hari itu juga Angkatan Darat menyiarkan buku setebal 130 halaman yang disusun cepat, berisi catatan tentang rangkaian kejadian-kejadian pada 1 Oktober dan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa itu.[5] Rupanya 5 Oktober menjadi hari ketika pimpinan Angkatan Darat memutuskan untuk memulai serangan terhadap PKI. Menurut warta CIA yang dikirim dari Jakarta, pada hari itu jenderal-jenderal tertinggi Angkatan Darat bersidang dan bersepakat untuk "melaksanakan rencana meng-ganyang PKI."[6] Di bawah arahan Suharto dengan cepat Angkatan Darat mengerahkan massa sipil dan menyebarkan propaganda anti-PKI melalui pers (yang seluruhnya sudah di bawah kendali Angkatan Darat sejak akhir pekan pertama Oktober). Sebuah kisah sensasional melukiskan bagaimana anggota PKI menyiksa, menyayat-nyayat, dan memotong kemaluan para jenderal tawanan mereka. Ketika koran-koran dan stasiun radio mulai melansir cerita-cerita mengerikan tentang PKI, massa yang digalang tentara bergerak dengan amuk yang mematikan. Pada 8 Oktober mereka membakar habis gedung CC-PKI di Jakarta dan menyerang kantor-kantor tiap organisasi yang dianggap terkait dengan PKI. Rumah para pimpinan PKI di Jakarta dibakar atau disita.[7]

Bahkan pada kemuncak penindasan kejam pada akhir 1965 dan awal 1966, masyarakat belum memperoleh bukti bahwa PKI mendalangi G-30-S. Masyarakat tidak mempunyai alasan mendesak untuk tidak mempercayai pernyataan Untung bahwa "Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat" atau pernyataan Politbiro CC-PKI pada 6 Oktober yang menegaskan bahwa "PKI tidak tahu menahu tentang G-30-S dan peristiwa itu adalah intern AD."[8] Memang benar, Untung agaknya tak mungkin menjadi pimpinan suatu intervensi ambisius dalam politik nasional serupa G-30-S. Ia mempunyai reputasi sebagai seorang prajurit yang berani dan sederhana, bukan pengatur siasat yang lihai dan cukup percaya diri untuk mengorganisa-sikan aksi semacam itu. Tabiat Untung yang demikian memberi kesan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat di dalam G-30-S, lebih dari prajurit-prajurit patriotik yang tidak suka kepada perwira-perwira atasan mereka. Tapi purbasangka demikian tidak cukup untuk menarik kesimpulan bahwa PKI merupakan pembantu terselubung di belakang

Untung.

PKI jelas mendukung G-30-S, sebagaimana ternyata dalam editorial *Harian Rakjat* pada 2 Oktober, yang memuji G-30-S sebagai patriotik dan revolusioner. Tapi editorial itu tidak memberikan bukti bahwa PKI-lah yang memimpin G-30-S, terutama karena editorial itu menyatakan bahwa G-30-S merupakan "persoalan intern Angkatan Darat." Demikian juga keikutsertaan ratusan anggota sayap pemuda PKI (Pemuda Rakjat) di dalam aksi itu tidak membuktikan kepemimpinan partai di dalam G-30-S. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa peranannya lebih dari apa yang belakangan dinyatakan oleh sementara pimpinan partai, seperti Njono: tenaga bantuan untuk *putsch* intern Angkatan Darat. Usul dari beberapa pimpinan PKI di daerah-daerah luar Jakarta untuk membentuk dewan-dewan revolusi setempat, sesuai dengan dekrit pertama Letnan Kolonel Untung, sekali lagi hanya menunjukkan bahwa partai sungguh-sungguh mendukung aksi tersebut, tetapi ia bukanlah yang memimpin. Kehadiran Aidit di pangkalan AURI Halim tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perannya lebih dari sekadar penonton atau penasihat yang menyetujui G-30-S.[9]

Pusat Penerangan Angkatan Darat menerbitkan seri tiga jilid buku dari Oktober sampai Desember 1965, dengan maksud membuktikan bahwa PKI "mendalangi" G-30-S. Bukti-bukti yang diajukan dalam penerbitan ini tidak substansial, bergantung pada situasi tertentu (*circumstantial*), atau tidak andal. Bukti utama ialah pengakuan Untung (yang tertangkap di Jawa Tengah pada 13 Oktober) dan Latief (ditangkap pada 11 Oktober di Jakarta), bahwa mereka adalah antek-antek PKI.[10] Angkatan Darat mengutip laporan interogasi dari kedua perwira itu. Kiranya tidak mungkin bahwa masing-masing perwira tersebut dengan bersungguh-sungguh dan sukarela mengaku bekerja untuk kepentingan PKI. Saya mempunyai salinan laporan interogasi Latief (bertanggal 25 Oktober 1965), dan memang benar ia mengaku mengikuti perintah-perintah PKI. Namun, ia menyatakan, pada pembelaannya pada 1978, bahwa saat itu ia mengalami infeksi luka akibat tusukan bayonet di kakinya dan dalam keadaan setengah sadar.[11] Dalam mahkamah pengadilan atau mahkamah sejarah yang layak di mana pun, kesaksian yang diperoleh di bawah tekanan dan dengan siksaan tidak dapat diterima. Dalam sidang-sidang pengadilan mereka kemudian, baik Untung maupun Latief, menyangkal

laporan-laporan interogasi mereka, dan bersikeras bahwa mereka, sebagai perwira militer, telah memimpin G-30-S. PKI, mereka menegaskan, diajak ikut serta hanya sebagai tenaga bantuan.[12]

Mengingat bahwa penjelasan Suharto dipaksakan dengan kekuatan senjata dan bukan kekuatan penalaran, tidak banyak tentangnya yang patut dipertimbangkan. Angkatan Darat tidak pernah membuktikan tuduhannya. Orang harus curiga ketika tuduhan sebagian didasarkan atas propaganda palsu dan sebagian lagi atas dasar kesaksian yang diperoleh melalui siksaan. Pengakuan dua tokoh pimpinan PKI, Njono dan Aidit, yang diterbitkan oleh pers Angkatan Darat pada akhir 1965 merupakan pemalsuan yang terang benderang.[13] Demikian juga kisah yang disiarkan besar-besaran tentang perempuan-perempuan peserta G-30-S yang menyiksa dan memotong kemaluan tujuh perwira tangkapan mereka di Lubang Buaya, ternyata merupakan rekayasa, barangkali ciptaan para ahli perang urat syaraf.[14] Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama tiga puluh tahun lebih, tentara Suharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G-30-S.

Saat membidik PKI sebagai "dalang" G-30-S, militer Suharto tidak dapat menjelaskan satu fakta dasar: G-30-S dilakukan oleh personil militer, yaitu Letnan Kolonel Untung dan pasukannya dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Latief dan pasukannya dari garnisun Jakarta, Mayor Soejono dan pasukannya dari pangkalan AURI Halim, Kapten Sukirno dan pasukannya dari Batalyon 454 Jawa Tengah, dan Mayor Soepeno dan pasukannya dari Batalyon 530 Jawa Timur. Demikian juga halnya di Jawa Tengah, kekuatan G-30-S terutama terdiri dari perwira-perwira Angkatan Darat dan bukan para aktivis partai. Sekali lagi tidak ada bukti kuat tentang kehadiran PKI secara dominan. Apa pun persisnya keterlibatan anggota-anggota partai tertentu, ketika itu mereka tampak berada di pinggiran aksi yang dilakukan oleh personil militer. Versi rezim Suharto hanya dapat benar jika orang berasumsi bahwa perwira-perwira Angkatan Darat yang terlibat itu menempatkan diri mereka di bawah PKI dan mereka bersedia menjalankan perintah partai seperti robot.[15] Benedict Anderson dan Ruth McVey benar dengan penjelasannya dalam "analisis awal" Januari 1966 bahwa PKI bukanlah dalang. Sampai saat itu tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk tuduhan yang muncul baik di dalam berita-berita pers maupun pernyataan-pernyataan Angkatan

Darat. Maka yang lebih masuk akal ialah menjelaskan G-30-S sebagai suatu *putsch* intern Angkatan Darat.

Isu tentang keterlibatan PKI menjadi lebih ruwet segera setelah Anderson dan McVey menyelesaikan laporan mereka. Pada sidang pengadilan Njono dan Untung dalam Februari dan Maret 1966, nama-nama dua anggota PKI – Sjam dan Pono – disebut-sebut sebagai anggota kelompok inti komplotan. Untung mengatakan bahwa Sjam dan Pono adalah wakil-wakil Aidit, yang membantu G-30-S namun tidak memimpinnya.[16] Peranan mereka, menurut Untung, tidak berarti. Mereka tampil semata-mata untuk meyakinkan bahwa "PKI akan memberikan bantuan dari tenaga massa."[17] Ia dan perwira-perwira militer lain menginginkan adanya tenaga bantuan untuk mendukung aksi-aksi mereka, sehingga mereka berpaling kepada PKI yang dapat mengerahkan ribuan pemuda, yang baru saja menerima latihan kemiliteran singkat di pangkalan udara Halim. Namun Untung kemudian mengubah versinya sendiri mengenai rangkaian peristiwa itu, dengan menyatakan bahwa bantuan Sjam termasuk menuliskan konsep dekrit pertama G-30-S tentang pembentukan dewan-dewan revolusi.[18] Pimpinan inti yang lain, Mayor Soejono dari AURI, sebagai saksi dalam persidangan Njono, membuat Sjam dan Pono terlihat terlibat lebih jauh lagi di dalam G-30-S. Ia mengatakan bahwa Sjam adalah pimpinan perencana G-30-S, "Saudara Sjam jang merupakan seorang tokoh dari PKI jang kami lihat dan kami ketahui merupakan orang jang memegang penentuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan itu."[19] Karena Soejono menyatakan bahwa Sjam juga dikenal dengan nama Sugito, banyak pengamat menduga Sjam, tokoh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, pastilah nama samaran dari Tjugito, anggota Central Comite PKI yang dimunculkan dan salah seorang dari empat puluh lima orang yang duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia.[20] Identitas Pono juga sama tidak jelas. Penyingkapan tentang Sjam dan Pono melahirkan kerutan baru dalam kisah ini. Apakah Untung dan Soejono menceritakan kebenaran? Siapakah dua orang ini? Apa posisi mereka di dalam PKI? Apa pula peranan mereka dalam G-30-S?

Semula alur kisah Angkatan Darat menampilkan Sjam dan Pono tidak lebih sebagai fungsionaris yang tak dikenal di dalam organisasi PKI. Diduga mereka bawahan langsung Aidit, yang melaksanakan

perintah-perintahnya. Tapi Angkatan Darat tidak menjelaskan bagaimana dua orang ini dapat mengorganisasi sekelompok perwira militer dan memimpin G-30-S. Wartawan Amerika John Hughes, yang menulis pada awal 1967, sambil lalu menyebut dua orang itu sebagai wakil-wakil PKI dalam G-30-S.[21] Namun, alur kisah resmi ini berubah secara substansial sesudah mantan anggota Politbiro Soejono Pradigdo mengkhianati kawan-kawan lamanya ketika ia ditangkap pada Desember 1966. Angkatan Darat mulai menggunakan laporan interogasinya (teks ini tidak dibuka untuk umum) sebagai dasar pernyataan bahwa PKI membentuk organisasi rahasia yang bernama Biro Chusus (BC) untuk menyusup ke tubuh militer dan menggarap simpatisan partai di kalangan perwira. Sjam disebut sebagai kepala Biro Chusus ini dan Pono sebagai asistennya. Walaupun nama-nama Sjam dan Pono sudah muncul di persidangan Mahmilub pada 1966, istilah "Biro Chusus" belum disebut-sebut.[22] Angkatan Darat menggunakan informasi dari Pradigdo ini untuk menambah sebuah simpul baru dalam alur kisahnya: PKI mengorganisasi G-30-S melalui Biro Chusus Sjam dan Pono. Satu kekurangan dalam alur kisah sebelumnya – tidak adanya wahana antara partai dan para perwira militer – dibenahi dengan tambahan Biro Chusus tersebut. Dengan memperhatikan informasi baru ini, seorang sejarawan yang mengabdikan dirinya kepada Angkatan Darat, Nugroho Notosusanto, dan juga penuntut umum Mahmilub Ismail Saleh, memasok rezim Suharto dengan kisah baru melalui buku mereka *The Coup Attempt of the "September 30th Movement"* (terbit pertama kali pada April 1967).[23]

Penangkapan Sjam pada Maret 1967, rupanya berkat pengkhianatan Pradigdo yang memberitahukan tempat-tempat persembunyian partai, memungkinkan Angkatan Darat menerbitkan informasi lebih banyak lagi mengenai Biro Chusus. Sebagai saksi dalam sidang 1967 dan sebagai tertuduh dalam persidangannya sendiri pada 1968, Sjam secara mengejutkan mudah buka mulut. Menurut kesaksiannya, Aidit memerintahkannya untuk melaksanakan G-30-S. Sjam menjelaskan bahwa beberapa anggota Politbiro dan Central Comite mengetahui adanya Biro Chusus, tetapi tidak tahu-menahu tentang kinerjanya. Biro Chusus tetap ada di luar struktur formal partai dan berfungsi khusus di bawah komando Aidit. Organisasi bawah tanah partai inilah, menurut Sjam, yang meyakinkan berbagai perwira militer agar ikut dalam G-30-S.

Semua buku yang disponsori pemerintah, seperti misalnya buku putih 1994, mendasarkan uraian mereka pada kesaksian Sjam itu.[24]

Versi pemerintah, dalam dua hal pokok, merupakan perluasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari kesaksian Sjam. Apabila Sjam menyatakan hanya Aidit yang memerintahkan Biro Chusus untuk mengorganisasi G-30-S, Angkatan Darat menyatakan badan pimpinan partai yang lebih besar, yaitu Central Comite, yang mengambil keputusan.[25] Sementara Sjam melukiskan G-30-S sebagai pembersihan terhadap jenderal-jenderal sayap kanan yang bekerja untuk kekuatan neokolonialis, Angkatan Darat menggambarkannya sebagai suatu percobaan kudeta. Karena Angkatan Darat sudah melarang PKI, membunuh banyak pendukungnya, dan menahan ratusan ribu orang sebagai tahanan politik, maka institusi ini harus menyatakan bahwa seluruh organisasi partai dari puncak sampai bawah terlibat. Angkatan Darat harus menunjuk Central Comite PKI sebagai otak G-30-S. Untuk memberi pembenaran pada kehebatan penindasan, Angkatan Darat harus menampilkan aksi G-30-S sebagai kup yang mengancam seluruh struktur pemerintah.

Laporan CIA 1968 mengikuti garis rezim Suharto dan menyatakan bahwa melalui Biro Chusus itulah PKI merancang dan melaksanakan G-30-S. Seperti dalam buku Notosusanto dan Saleh sumber utama yang dipakai ialah transkrip interogasi para pemimpin G-30-S. Laporan itu tidak mencatat bahwa beberapa pimpinan G-30-S menolak keabsahan transkrip-transkrip itu dalam persidangan mereka dan menyatakan bahwa mereka diancam dengan kekerasan jika menolak membubuhkan tanda tangan.[26] CIA mengakui bahwa jawaban-jawaban mereka mungkin merupakan hasil paksaan, namun terus-menerus menggunakannya sebagai dasar narasinya. Laporan ini disertai sebuah lampiran yang membenarkan penggunaan sumber-sumber itu. Penulis laporan, belakangan diketahui sebagai Helen-Louise Hunter, seorang agen CIA yang mengkhususkan dirinya pada masalah komunisme di Asia, berargumen bahwa laporan-laporan interogasi tersebut dapat dipercaya karena adanya "kesamaan yang mencolok dalam cerita-cerita yang dituturkan oleh Untung, Latief, Soejono, dan Supardjo." Kesamaan yang demikian, sejauh memang ada, dapat diterangkan justru karena paksaan interogator agar mereka menerima alur cerita Angkatan Darat sendiri.[27] Metodologi CIA merupakan cacat yang tidak dapat diperbaiki: orang tidak dapat

bersandar pada pernyataan para tahanan suatu kekuatan militer yang secara rutin melakukan penyiksaan, terutama ketika kekuatan tersebut sejak 2 Oktober bertekad menempatkan PKI sebagai dalang (atau "mencari bukti-buktinya," seperti ditulis Yoga Sugama). Orang dapat juga menulis sejarah ilmu sihir Eropa dengan menggunakan pengakuan-pengakuan di hadapan Inkuisisi sebagai kebenaran.

Pelahap penjelasan rezim Suharto tentang G-30-S di Amerika Serikat melampaui ruang-ruang di markas besar CIA di Langley, Virginia. Bagi para penulis antikomunis garis keras, tingkat pembuktian yang diperlukan tidak terlalu tinggi saat mereka berasumsi bahwa G-30-S merupakan manifestasi cara kekerasan, yang sudah dapat diramalkan, dari kaum komunis untuk merebut kekuasaan negara. Mereka berpegang pada parodi yang digunakan Anderson dan McVey tentang citra PKI sebagai gergasi, seakan-akan partai ini telah "digerakkan oleh ambisi kelewat pongah dan kebutuhan bawaan untuk menyatakan dirinya melalui kekerasan."[28] Ilmuwan politik yang produktif Justus M. van der Kroef menulis serangkaian artikel pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dan melemparkan kesalahan G-30-S sepenuhnya kepada PKI. Menurut dugaannya, PKI sudah mengerahkan kekuatan pada 1965, memulai tindakan ofensif, dan merencanakan kudeta. Dalam pandangan Kroef, G-30-S merupakan konsekuensi wajar dan sudah dapat diramalkan dari gerak gigih partai meraih kekuasaan.[29] Dalam denyut serupa ilmuwan politik yang mempunyai hubungan dekat dengan militer Indonesia, Guy Pauker, menulis laporan untuk Rand Corporation yang menunjukkan kelaiksalahan PKI sebagai suatu kebenaran tak terpungkiri.[30] Menulis untuk khalayak yang lebih luas, wartawan Arnold Brackman mengajukan dua penjelasan tentang peristiwa 1965 yang memamah biak alur baku penjelasan dari rezim Suharto.[31] Pengkajian terhadap buku Notosusanto dan Saleh serta penerbitan-penerbitan dari van der Kroef, Pauker, dan Brackman akan menghadirkan bukti-bukti tercemar serupa yang dikemas dengan cara berbeda-beda. Pada akhirnya, satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G-30-S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian.

Satu cacat kasat mata dalam narasi rezim Suharto pasca-1967 tentang Biro Chusus adalah narasi itu sangat bergantung kepada kesaksian seseorang yang mengakui bahwa menipu adalah pekerjaannya. Sjam

seorang tokoh yang tak dikenal. Ia tidak pernah muncul sebagai pemimpin PKI. Ia mengaku bahwa ia sedemikian dipercaya oleh Aidit sehingga ditugasi untuk melakukan operasi yang rumit dan tinggi taruhannya, yaitu membersihkan para panglima puncak Angkatan Darat. Tingkah laku dan gaya bicara Sjam yang dipertontonkannya di ruang sidang tidak memberi kesan bahwa ia seorang pemimpin partai yang berpengaruh. Jika ia berhasil menanjak ke posisi yang demikian tinggi dan penting di dalam partai, mengapa ia begitu santai membocorkan rahasia-rahasia partai di persidangan Mahmilub? Mengapa tutur katanya tidak lebih mendekati tutur kata pimpinan partai yang lain, seperti Sudisman, satu-satunya anggota Dewan Harian Politbiro yang selamat?[32] Keterangan Sudisman pada persidangannya dalam Juli 1967 penuh dengan kebulatan tekad yang gagah dan kepercayaan tak tergoyahkan kepada kekuatan partai dan proletariat. Sjam, yang bertekuk lutut di depan mahkamah militer, tampak seperti permaklum-an buruk bagi seseorang yang semestinya menjadi padanan kepala KGB jika partai berhasil mengambil alih kekuasaan negara. Dapat dipahami jika ceritanya tentang jaringan klandestin pekerja partai yang menyusupi tubuh militer disambut dengan kecurigaan besar oleh kalangan pengamat. Sekali lagi, Benedict Anderson dan Ruth McVey benar, ketika menulis pada 1978, melontarkan keraguan akan kebenaran kesaksian Sjam dan menduga bahwa sangat mungkin Sjam seorang agen ganda yang lebih banyak bekerja untuk militer ketimbang untuk Aidit dan PKI.[33] Dalam artikelnya yang belakangan lagi-lagi Anderson menegaskan bahwa identitas Sjam tidak dapat ditetapkan dengan pasti: "Apakah ia mata-mata Angkatan Darat di dalam jajaran orang-orang komunis? Atau dia mata-mata komunis di dalam militer? Atau mata-mata untuk pihak ketiga? Atau mata-mata ketiga-tiganya secara bersamaan?"[34]

Tidak dapat dibantah bahwa beberapa orang pemimpin dan anggota PKI dengan satu atau lain cara terlibat dalam G-30-S. Sudisman mengaku demikian dalam persidangannya (saya akan kembali ke hal ini dalam Bab 5). Pertanyaan yang belum terjawab ialah bagaimana tepatnya keterlibatan mereka. Siapa-siapa dan badan-badan partai mana saja yang ikut serta? Bagaimana pemahaman mereka tentang G-30-S? Apa alasan mereka? Apa hubungan mereka dengan para perwira militer di dalam G-30-S? Dengan menyalahkan PKI secara menyeluruh, sampai pada

anggota-anggota organisasi-organisasi front di tingkat desa yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan G-30-S, rezim Suharto mempecundangi PKI dengan melakukan perburuan membabi buta belaka. Jika Angkatan Darat memang bersungguh-sungguh dalam pengumpulan bukti tentang keterlibatan PKI, ia tidak akan bergegas-gegas mengeksekusi empat dari lima pimpinan puncak partai. D.N. Aidit, justru tokoh yang oleh Angkatan Darat dinyatakan sebagai dalang, ditembak mati di sebuah tempat rahasia di Jawa Tengah pada 22 November 1965, segera sesudah ia tertangkap.[35]

G-30-S SEBAGAI PEMBERONTAKAN PERWIRA MUDA

Dalam bulan-bulan terakhir 1965, ketika G-30-S masih tetap merupakan misteri bagi setiap orang kecuali bagi mereka yang mempercayai propaganda militer, Anderson dan McVey menghimpun analisis tentang peristiwa tersebut, dengan membacai berbagai macam surat kabar Indonesia. Seperti sudah saya kemukakan di atas, mereka tidak menemukan bukti bahwa PKI bermain sebagai dalang. Partai belum memobilisasi massanya untuk mendukung G-30-S. Kendati partai menyatakan dukungannya kepada G-30-S melalui surat kabarnya, *Harian Rakjat*, partai tidak mencurahkan seluruh kekuatannya di belakang G-30-S untuk memastikan keberhasilan gerakan tersebut: "Tak seorang pun keluar di jalan-jalan di Jakarta, dan tidak terlihat adanya koordinasi kegiatan, baik di kota maupun di seluruh tanah air," tulis Anderson dan McVey.[36] Editorial *Harian Rakjat* 2 Oktober, yang mencerminkan kebijakan resmi partai, secara implisit memerintahkan anggotanya untuk tidak ikut-ikut karena editorial ini menyatakan bahwa G-30-S merupakan urusan intern Angkatan Darat. Jika orang percaya bahwa PKI mengorganisasi G-30-S, kemudian tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah G-30-S memberosot ke kekalahan, ia harus percaya bahwa PKI memiliki kecenderungan bunuh diri yang mencengangkan. Apa pun kekurangan PKI, sukar dipercaya, seperti ditulis Anderson dan McVey, bahwa pimpinan partai telah "memasang jerat di leher sendiri dan menunggu dinaikkan di tiang lampu terdekat."[37] Mereka mencatat bahwa PKI tidak tampak mempunyai alasan untuk melancarkan kudeta karena partai "telah berjalan sangat

baik melalui jalan damai" di bawah pimpinan Presiden Sukarno.[38] Dalam hal ini W.F. Wertheim sependapat dengan Anderson dan McVey, "Sejak 1951 strategi PKI didasarkan pada perjuangan legal dan parlementer, dan di bawah pemerintahan Sukarno strategi ini kelihatannya agak menguntungkan partai, yang menyebabkan segala pikiran tentang perubahan strategi ke arah kekerasan secara mendadak sangat tidak mungkin."[39]

Karena G-30-S merupakan operasi militer yang melibatkan sangat sedikit orang sipil, Anderson dan McVey yakin gerakan ini pasti timbul dari dalam tubuh militer sendiri. Mereka memperhatikan bahwa sebagian besar pimpinan G-30-S adalah mantan perwira atau perwira aktif Angkatan Darat dari Kodam Diponegoro, yang meliputi Jawa Tengah. Latief adalah perwira Diponegoro yang dipindah ke Jakarta pada 1962. Untung adalah Komandan Batalyon 454 di Jawa Tengah sebelum penempatannya di pasukan kawal kepresidenan pada awal 1965. Ia sangat dekat dengan Kolonel Suherman, pimpinan utama G-30-S di Jawa Tengah, selagi mereka sama-sama bertugas di Batalyon 454. Suherman adalah Komandan Batalyon 454 sebelum Untung. Batalyon ini, tentu saja, adalah batalyon yang ikut ambil bagian dalam G-30-S pada 1 Oktober dengan menduduki Lapangan Merdeka. Menarik diperhatikan bahwa satu-satunya daerah di luar Jakarta di mana G-30-S aktif adalah di Jawa Tengah.

Anderson dan McVey memandang G-30-S sebagai semacam pemberontakan dalam Angkatan Darat yang dilancarkan para perwira muda Jawa Tengah yang merasa jijik terhadap gaya hidup dekaden dan orientasi politik pro-Barat para jenderal di SUAD di Jakarta. Para perwira muda ini menganggap staf umum di bawah Yani bersalah karena "tunduk terhadap korupsi masyarakat elite Jakarta, mengabaikan bekas anak buah mereka (Jenderal Yani dan beberapa lainnya adalah mantan perwira Diponegoro), dan terus-menerus menentang dan merintangi kebijakan-kebijakan luar dan dalam negeri Presiden Sukarno."[40] Anderson dan McVey berpendapat bahwa G-30-S merupakan usaha untuk mengubah arah Angkatan Darat menjadi lebih merakyat. Mereka menunjuk kepada pernyataan pertama G-30-S, yang menyatakan bahwa "Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menelantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya menghina kaum wanita dan menghambur-

hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal."

Menurut Anderson dan McVey jaringan perwira Jawa Tengah itu ingin membersihkan Angkatan Darat dari jenderal-jenderal yang korup dan berpolitik konservatif, serta memberi Sukarno kebebasan lebih besar untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Untuk membangun kekuatan mereka, perwira-perwira Jawa Tengah ini mengajak orang-orang tertentu dari AURI dan PKI di dalam operasi mereka, sementara merekalah yang memegang kendali kepemimpinannya. Para perwira menginginkan agar PKI tidak hanya menyediakan personil tambahan untuk operasi mereka, tapi juga dukungan politik begitu aksi mereka berakhir. Dengan demikian PKI bukannya menjadi dalang, melainkan korban penipuan dari perwira-perwira itu. Partai telah "diperdaya" sehingga melibatkan dirinya di dalam sebuah aksi yang tidak ia mengerti sepenuhnya.[41] Karena pimpinan partai berpikir mereka hanya memainkan sebagian kecil peran dalam drama pihak lain, mereka tidak memandang aksi itu dengan sungguh-sungguh dan tidak membayangkan bahwa mereka akan dipersalahkan jika G-30-S gagal.

Tesis Anderson dan McVey lemah dalam sejumlah hal. Apakah latar belakang Jawa Tengah para perwira itu cukup untuk menjelaskan bagaimana ikatan mereka sebagai kelompok? Sementara beberapa orang konspirator sebelumnya memang dari Kodam Diponegoro (Latief, Suherman, Untung), beberapa orang lainnya tidak. Soejono dan Supardjo adalah tokoh-tokoh yang berasal usul Jawa Tengah, tetapi mereka tampaknya tidak mempunyai hubungan lama dan akrab dengan perwira-perwira yang lain. Soejono dari Angkatan Udara dan Supardjo dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat, Angkatan Darat. Salah satu dari batalyon-batalyon yang terlibat berasal dari Kodam Brawijaya, Jawa Timur. Umumnya *putsch* dan kup dilancarkan oleh para perwira yang dipersatukan oleh ikatan persaudaraan yang cukup kuat dan sebelumnya telah teruji: mereka bekas kadet-kadet akademi militer dari tahun lulusan yang sama atau perwira-perwira dari kesatuan yang sama atau peserta dalam operasi militer tertentu.[42] Tapi G-30-S terdiri dari sekelompok perwira yang sangat berlain-lainan latar belakangnya.

Seandainya Anderson dan McVey benar dalam berpendapat bahwa para perwira militer itulah yang memimpin G-30-S, lalu mengapa strategi

militer gerakan ini dirancang dengan sangat compang-camping? Perwira-perwira ini seharusnya mampu merancang aksi militer yang masuk akal, yang tidak akan begitu rentan terhadap serangan balasan. Suatu aksi yang dirancang murni menurut pertimbangan militer barangkali akan berakhir dengan hasil yang berlainan.

Rintangan utama yang menjadi sandungan bagi tesis Anderson dan McVey ada di sekitar pengumuman-pengumuman radio pada siang hari 1 Oktober. Mengapa para perwira yang ingin membersihkan Angkatan Darat dari jenderal-jenderal yang korup dan anti-Sukarno juga memutuskan untuk mengumumkan pemerintah baru dari "Dewan Revolusi"? Mengapa mereka tidak puas dengan membersihkan jenderal-jenderal dan kemudian memberi kesempatan Sukarno dengan kewenangan penuh mengambil tindakan lebih lanjut? Mengapa mereka bersusah-payah mencampuri hak istimewa presiden dalam memilih kabinetnya? Karena tidak mempunyai jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan ini, Anderson dan McVey berspekulasi bahwa pernyataan-pernyataan siang hari itu adalah akibat dari "kekacauan dan kebodohan." Pernyataan-pernyataan itu merupakan "reaksi panik" terhadap munculnya serangan balasan Suharto dan penolakan presiden untuk mengeluarkan pernyataan terbuka yang memberi dukungan penuh kepada aksi mereka. "Tujuan utama" pernyataan-pernyataan itu "agaknya sebagai usaha mengimbangi ketidaksediaan Presiden bekerja sama yang semakin besar, dengan meraih dukungan dari kelompok-kelompok 'luar' dalam masyarakat." Dengan mengumumkan nama-nama empat puluh lima anggota Dewan Revolusi Indonesia, sebuah "spektrum luar biasa dari tokoh-tokoh yang tak terduga," G-30-S berharap dapat memperluas basis pendukungnya.[43] Jika demikian halnya, timbul pertanyaan: Mengapa G-30-S berusaha memperluas basis dukungannya dengan mengganggu wewenang presiden dan menyatakan bahwa seluruh kekuasaan negara telah jatuh ke tangan gerakan ini? Bukankah tindakan itu tak perlu-perlunya mengundang permusuhan seluruh pendukung Sukarno yang cukup banyak? Ada kesan bahwa G-30-S seharusnya dapat menemukan jalan yang lebih baik untuk menggalang dukungan ketimbang dengan menyatakan adanya perubahan pemerintahan sipil secara drastis seperti itu.

Anderson, dalam artikelnya yang terbit belakangan, telah mengubah penafsirannya terhadap pengumuman-pengumuman radio siang hari

itu. Ia sekarang melihat semua itu sebagai petunjuk bahwa G-30-S adalah sebuah jebakan. Pengumuman-pengumuman tersebut dimaksudkan terdengar konyol dan kontraproduktif. Anderson menulis bahwa rangkaian panjang "kebodohan" dan "kesalahan besar" G-30-S telah menimbulkan kecurigaan "bahwa rangkaian ini disusun dengan sengaja untuk memastikan kegagalan G-30-S." Pengumuman-pengumuman itu "hanya membingungkan masyarakat, melumpuhkan massa, dan menyediakan dalih mudah untuk menghancurkan Gerakan 30 September itu sendiri." Ia menjelaskan kesemrawutan kejadian-kejadian sebagai hasil kerja terampil para perwira Angkatan Darat tak dikenal yang berharap menciptakan suatu dalih untuk menyerang PKI. Dengan mengajukan pendapat bahwa G-30-S memang dirancang untuk gagal, Anderson menyetujui argumentasi Wertheim, yang akan saya uraikan lebih rinci kemudian dalam bab ini.[44] Anderson tetap berpegang pada gagasan bahwa PKI bukanlah si dalang. Dalam sebuah wawancara pada 1996 ia menyatakan, "Saya tidak bisa mutlak mengatakan bahwa PKI tidak mempunyai hubungan dengan G-30-S. Tapi saya masih tetap berpendapat, bahwa ia bukanlah perancang utama G-30-S."[45]

G-30-S SEBAGAI PERSEKUTUAN ANTARA PERWIRA ANGKATAN DARAT DAN PKI

Seperti Anderson dan McVey, Harold Crouch menganggap bahwa kekukuhan Angkatan Darat menyatakan bahwa PKI adalah dalang tidak didukung pembuktian. Dalam bukunya *The Army and Politics in Indonesia* (1978) ia menyatakan bahwa tidak ada "bukti kuat yang menunjukkan bahwa para perwira yang tersangkut dalam Gerakan Tiga Puluh September adalah pendukung setia PKI." Terdapat "sedikit [informasi] yang menunjukkan bahwa mereka siap mengikuti instruksi partai dengan membabi buta."[46] Dalam merumuskan alternatif terhadap versi resmi pemerintah, Crouch tidak mempercayai bahwa versi sebaliknya yang harus disampaikan, bahwa para perwira militer itu adalah dalang-dalang yang melibatkan anggota-anggota PKI sebagai korban penipuan. Menurut Crouch, bukti-bukti yang muncul dalam persidangan Mahmilub yang digelar sesudah Anderson dan McVey menulis laporan mereka menun-

jukkan bahwa anggota-anggota PKI yang terlibat dalam G-30-S tidak dapat digambarkan sebagai sosok-sosok terperdaya. Kesaksian-kesaksian di ruang pengadilan menunjukkan bahwa keterlibatan PKI, terutama anggota-anggotanya, Sjam dan Pono, terlalu mendalam untuk dapat disusut sebagai gegabah dan kebetulan. Crouch tidak dapat menerima naskah Cornell yang membebaskan PKI sepenuhnya dari kesalahan. Meski demikian, kesimpulan menyeluruh Crouch sesuai dengan premis dasar naskah Cornell. Ia berpendapat bahwa "inisiatif awal timbul dari tubuh Angkatan Darat."[47] PKI sangat terlibat tetapi tetap sebagai pemain kedua.

Crouch memandang para perwira yang terlibat dalam G-30-S sebagai sekutu-sekutu PKI, bukan sebagai budak-budaknya, "Jelas mereka mau bekerja sama dengan wakil-wakil partai untuk dapat mencapai tujuan mereka. Agaknya semua peserta utama G-30-S mungkin sudah jauh sebelumnya dinilai oleh Biro Chusus dan dipandang memuaskan oleh Sjam dan kawan-kawannya … Walaupun wakil-wakil Biro Chusus merupakan anggota-anggota penting dalam komplotan, sedikit bukti yang menunjukkan bahwa peran mereka dominan."[48] Crouch menggambarkan G-30-S sebagai hasil kolaborasi yang kokoh antara para perwira militer "progresif" dengan Biro Chusus PKI.

Versi Crouch dapat dicocokkan dengan versi yang diajukan Sudisman, anggota yang selamat dari Dewan Harian Politbiro CC-PKI, badan yang merupakan inti kepemimpinan partai. (Tiga anggota Dewan Harian yang lain – Aidit, Lukman, dan Njoto – dieksekusi diam-diam oleh militer sekitar akhir 1965. Anggota Dewan yang kelima, Oloan Hutapea, dieksekusi pada 1968 di Jawa Timur). Dalam pidatonya yang terakhir di depan mahkamah militer pada 1967, Sudisman mengajukan pembedaan antara pimpinan tertentu dalam partai yang terlibat dalam G-30-S sebagai perseorangan, dengan partai sebagai sebuah lembaga yang "tidak tahu-menahu tentang G-30-S." Partai sebagai lembaga, Sudisman menyatakan, memandang G-30-S sebagai peristiwa "intern AD". Ia menjelaskan bahwa Central Comite tidak pernah membahas tentang G-30-S dan para anggota biasa partai tidak pernah diinstruksikan untuk mendukungnya. Dengan demikian partai tidak bertanggung jawab sebagai sebuah lembaga. Sudisman mengakui bahwa beberapa "tokoh-tokoh PKI, termasuk saya sendiri" telah ikut berperan serta dalam hal-hal

yang tidak dirincinya.[49] Menurut keterangan Sudisman, sekelompok perwira militer progresif bertindak atas inisiatif pribadi, dan beberapa anggota partai tertentu bertindak atas inisiatif sendiri dan tanpa memberi tahu atau berkoordinasi dengan organisasi-organisasi partai secara formal, memberikan bantuan kepada para perwira tersebut. Pimpinan PKI secara perseorangan, paling tidak Aidit dan Sudisman, melibatkan diri di dalam operasi militer rahasia ini dan membawa serta kelompok-kelompok terpilih dari kalangan pendukung PKI. Bagi segelintir pemimpin PKI G-30-S bukanlah merupakan operasi resmi partai. Ia adalah *putsch* militer yang akan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi partai. Pimpinan partai ingin mendukung G-30-S tetapi tidak ingin melibatkan seluruh partai di dalamnya. Sudisman menegaskan bahwa inisiatif dan kepemimpinan G-30-S tetap pada para perwira militer.

Sejauh ini penjelasan Crouch merupakan penjelasan yang paling bijaksana dan beralasan yang dapat diperoleh. Masalahnya terletak pada keterbatasannya. Sementara Crouch memecahkan soal dalang dengan rapih, ia membiarkan soal-soal lain tak terpecahkan. Ia tidak dapat menjelaskan mengapa G-30-S dirancang dengan buruk dan mengapa gerakan ini menyiarkan pengumuman-pengumuman radio di sore hari. Seperti Anderson dan McVey, uraiannya tidak cukup menjelaskan bagaimana awalnya kelompok perwira militer yang berbeda-beda itu bergabung. Jika mereka yang melahirkan rencana dan mempunyai kemandirian dalam berhadapan dengan PKI, apa yang menjadi dasar kesamaan mereka?

G-30-S SEBAGAI KONSPIRASI PKI

Versi rezim Suharto mulai tampak sangat mencurigakan pada akhir 1990-an ketika informasi tentang latar belakang Suharto muncul. W.F. Wertheim, seorang Belanda pakar keindonesiaan terkemuka, mengungkapkan dalam sebuah artikel pendek pada 1970, bahwa Suharto adalah teman dua orang pimpinan G-30-S: Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief.[50] Suharto pergi dari Jakarta ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah (Kebumen) pada akhir April 1964 untuk menghadiri pernikahan Untung. Hubungan antara kedua orang ini tentu cukup rapat

karena seorang jenderal Angkatan Darat kiranya tidak akan melakukan perjalanan jauh hanya untuk urusan remeh-temeh belaka.[51] Suharto juga mengenal Kolonel Latief sebagai teman dekat. Dua orang ini sudah saling mengenal sejak hari-hari perang gerilya melawan Belanda dalam akhir 1940-an. Suharto dua kali bercerita kepada wartawan asing bahwa Latief datang menengoknya pada malam menjelang G-30-S dimulai. Penjelasan Suharto adalah bahwa Latief entah berniat membunuhnya atau memeriksa keberadaannya. Ia tidak mengaku telah berbicara dengan Latief malam itu.[52] Bahwa Latief dikurung di penjara di dalam sel isolasi selama bertahun-tahun sebelum diizinkan tampil di depan umum mengesankan bahwa Suharto ada dalam dilema: ia tidak ingin Latief dieksekusi seperti yang lain-lain tapi juga tidak ingin ia berbicara di depan umum.

Wertheim melihat aspek-aspek mencurigakan lain lagi di dalam G-30-S. Suharto tidak termasuk jenderal-jenderal yang diculik, meski ia panglima pasukan yang penting di Jakarta dan merupakan ancaman potensial bagi setiap percobaan pemberontakan atau kup. Pasukan G-30-S tidak memblokade markas Kostrad, walaupun markas itu tidak jauh dari posisi mereka di depan istana. Suharto bergerak bebas dari kantornya di Kostrad sementara pasukan-pasukan pemberontak berkerumun di Lapangan Merdeka langsung di depannya. Suharto, menurut Wertheim, bergerak dengan "efisiensi yang ajaib di tengah-tengah keadaan yang luar biasa membingungkan."[53] Sebagian besar perwira militer di Jakarta tidak tahu harus bertindak bagaimana. Tapi Suharto rupanya tahu persis apa yang diperlukan untuk mematahkan G-30-S.

Misteri identitas Sjam juga menggelitik kecurigaan Wertheim. Rezim Suharto menampilkan Sjam di depan umum pada 1967 dan menyatakan bahwa Sjam ialah orang kepercayaan Aidit, yang dipercaya memelihara hubungan-hubungan di kalangan militer. Wertheim mengemukakan, barangkali sebaliknyalah yang benar bahwa Sjam adalah orang militer yang ditugasi menyusup ke PKI. Tak seorang pun "yang memainkan peranan di dalam PKI atau mempunyai hubungan dekat dengan partai, pernah mendengar tentang tokoh Sjam ini."[54] Kesaksian Sjam tidak dapat dipercaya. Bisa jadi ia seorang agen ganda yang bekerja atas nama unsur tertentu di kalangan militer. Jika benar demikian, kemungkinan ia memainkan "peranan provokator" untuk membawa PKI terlibat dalam

sebuah aksi yang direncanakan untuk gagal.[55] Dalam karangan berikutnya pada 1979 Wertheim sekali lagi menuduh Sjam sebagai antek tentara di dalam PKI. Ada "satu orang tertentu sebagai manipulator konspirasi yang lihai: manusia misterius Sjam yang bekerja sebagai agen Angkatan Bersenjata."[56] Sjam bekerja atas nama unsur-unsur antikomunis dalam Angkatan Darat dan diganjar dengan perlakuan istimewa di penjara, "Ia diperlakukan dengan hormat oleh para interogator dan tak seorang pun pernah melihatnya dianiaya atau disiksa selama atau sesudah interogasi. Ia diberi balas jasa untuk sikapnya yang 'kooperatif' selama persidangan dengan perlakuan yang sangat istimewa baik ketika di penjara Nirbaya dekat Jakarta, maupun belakangan ketika di Rumah Tahanan Militer (RTM). Ia dipindahkan ke RTM atas permintaan sendiri karena rupanya ia merasa lebih aman di sana. Semua ini terjadi kendati putusan hukuman mati telah dijatuhkan atasnya."[57]

Kiranya Wertheim benar dalam satu hal: Suharto mengenal dekat baik Latief maupun Untung. Dalam sidangnya pada 1968 Latief membenarkan apa yang sudah diakui Suharto: keduanya bertemu pada malam hari 30 September 1965. Tapi ia membantah pernyataan Suharto bahwa keduanya tidak saling berbicara. Latief bersaksi bahwa ia memberi tahu Suharto tentang adanya beberapa perwira Angkatan Darat yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal, "sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Mayjen. Suharto, sewaktu beliau berada di RSPAD [Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat] sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini, berarti saya mendapat bantuan moril, karena tidak ada reaksi dari beliau."[58] Latief bercerita lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Suharto satu hari sebelumnya (29 September) di kediaman Suharto di Jakarta,

> Dua hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Suharto di Jalan Haji Agus Salim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Di samping acara kekeluargaan saya juga bermaksud: 'Menanyakan dengan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau.' Beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya: 'Bahwa

> sehari sebelum datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta bernama Subagiyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal, yang akan mengadakan coup d'etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno.'" Tanggapan dari beliau, akan diadakan penyelidikan. Oleh karena di tempat/ruangan tersebut banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan pada soal-soal lain, antara lain soal rumah.[59]

Di depan mahkamah Latief menceritakan bagaimana ia menjadi teman bagi keluarga Suharto. Ia bertugas bersama Suharto sejak akhir 1940-an,

> Saya sebagai anak buah sekalipun sudah terlepas dari ikatan komando dengan Bapak Jenderal Suharto, di mana pun beliau berada selalu saya temui. Dengan sendirinya timbul keakraban secara kekeluargaan di luar dinas … Memang saya pribadi adalah bekas anak buah beliau yang langsung di bawah pimpinan beliau, sewaktu menjabat sebagai Dan Kie 100 yang langsung organisatoris dan taktis pada Brigade X, pada waktu zaman gerilya … Mengenai kekeluargaan di luar dinas pun, saya mempunyai keakraban semenjak di Jawa Tengah, sekalipun beliau sudah terlepas dari komando saya, tetap sering saya datangi. Kebiasaan perwira-perwira bawahan yang sejajar dengan saya (Komandan-komandan Batalyon), jarang datang ke tempat beliau, terkecuali saya, kata teman-teman saya itu, mereka merasa segan, karena Jenderal Suharto dianggap terlalu seram. Penilaian saya tidak. Sebagai bukti lagi sewaktu beliau mengkhitankan puteranya bernama Sigit, keluarga saya pun datang. Saya sendiri tidak dapat datang, karena ibu saya sedang sakit keras di Surabaya. Sebaliknya pada waktu saya mengkhitankan anak saya, beliau dengan Ibu Tien juga datang ke rumah saya. Jadi kesimpulan saya dengan Jenderal Suharto sekeluarga tidak mempunyai persoalan apapun, malahan mempunyai hubungan akrab.[60]

Latief demikian dekat dengan Suharto sehingga pada kunjungan 29 September tersebut ia mengusulkan bertukar rumah dengan Suharto. Sebagai perwira komando distrik Jakarta, Latief mendapat sebuah rumah besar bekas kediaman duta besar Inggris. Latief mengatakan bahwa ia berencana memberikan rumah itu kepada Suharto dan kemudian ia dan keluarganya pindah ke rumah Suharto yang lebih sederhana. Latief ingin agar teman lama dan perwira atasannya itu memiliki rumah yang lebih bagus.[61]

Untung, menurut Latief, juga bekas bawahan yang mempunyai hubungan baik dengan Suharto, "Letkol Untung pun juga pernah menjadi anak buah langsung sewaktu di daerah Korem Sala, yang kemudian Letkol Untung terpilih sebagai salah seorang pimpinan Gerilyawan yang diterjunkan di Halmana [di Irian Barat] sewaktu Trikora. Pernah saya dengar dari pembicaraan Letkol Untung sendiri, sewaktu selesai tugas Trikora ia dipindahkan ke Resimen Cakrabirawa, ia katakan dengan peristiwa itu Jenderal Suharto pernah marah-marah atas kepindahannya ke Men Cakra itu. Karena ia akan ditarik sebagai pasukan Kostrad di bawah pimpinan beliau."[62]

Kecurigaan terhadap Suharto bertimbun: ia mempunyai hubungan baik dengan Untung dan Latief, dua batalyon yang digunakan G-30-S dibawa ke Jakarta atas perintahnya, dan ialah yang mengambil keuntungan paling banyak dari aksi itu. Bagi Wertheim kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa Suharto adalah salah seorang di antara dalang-dalang G-30-S. Dalang-dalang sebenarnya adalah "tokoh-tokoh militer yang menggunakan agen ganda seperti Sjam untuk tujuan mereka sendiri." Tujuan mereka ialah menciptakan dalih yang dapat mereka gunakan untuk menyerang PKI dan merongrong kekuasaan Sukarno. "Seluruh peristiwa itu lebih kelihatan seperti sebuah rancangan komplot yang terencana dengan baik, secara khusus ditujukan untuk dengan telak mencemarkan PKI maupun Presiden Sukarno sendiri, dan dengan demikian memberi kesempatan dan alasan untuk membersihkan pengaruh mereka dalam kehidupan politik di Indonesia."[63] Gerakan 30 September kelihatan begitu semrawut dan sia-sia karena merupakan operasi gadungan yang memang dibuat untuk dipatahkan dengan mudah.[64]

Wertheim tidak berspekulasi tentang peranan setepatnya yang dimainkan Suharto, Untung, dan Latief dalam G-30-S. Alur kisah

Wertheim secara tidak langsung menyatakan bahwa Suharto bagaimana pun juga bersekongkol dengan teman-temannya dalam mengorganisasikan G-30-S. Barangkali Suharto memprakarsai G-30-S, menempatkan dua teman lamanya dan Sjam dalam kepemimpinan, lalu mengkhianati mereka. Atau, barangkali Suharto menyatakan kepada teman-temannya bahwa G-30-S memang akan gagal namun menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan selamat dan diberi kedudukan yang enak dalam pemerintahan baru.[65]

Walaupun penyelesaian Wertheim atas teka-teki G-30-S ini cukup anggun, menjelaskan beberapa kejanggalan dengan penuturan yang ajeg, ia harus menghadapi sejumlah keberatan yang mencolok. Pertama, penjelasannya tampak mustahil. Dalam skenario Wertheim Suharto menjadi seorang tokoh jenius yang adimanusia. Segala sesuatu berjalan menurut rencananya. G-30-S tidak sekadar melibatkan PKI dan runtuh dengan cepat, ia juga membuka jalan bagi Suharto untuk menjadi panglima Angkatan Darat. Perwira atasan Suharto (Yani) dan sebagian besar kawan-kawan dan lawan-lawannya dibersihkannya dalam sekali tebas. Sukar dipercaya bahwa Suharto dapat menjadi sedemikian pintar dalam menyusun aksi klandestin yang secara sangat sempurna bermanfaat baginya. Suharto tidak mempunyai reputasi sebagai pengatur siasat yang luar biasa pandai.

Kedua, jika Suharto bekerja dengan jenderal-jenderal lain di dalam apa yang Wertheim sebut sebagai "konspirasi para jenderal" untuk mengorganisasi G-30-S, agaknya tidak mungkin mereka akan merancang sebuah rencana yang menghendaki pembunuhan terhadap tujuh jenderal lainnya. Jika tujuannya ialah dalih untuk mengganyang PKI dan membawa Angkatan Darat ke panggung kekuasaan negara, mengapa dalam prosesnya mereka bersedia dengan serius mengacaukan Angkatan Darat? Mengapa mereka mau mengorbankan perwira-perwira antikomunis sesama mereka? Wertheim menyadari satu soal yang jelas, bahwa tidak mungkin staf umum Yani yang mengorganisasi G-30-S karena begitu banyak di kalangan mereka yang menjadi korban. Jenderal-jenderal lain mana yang mungkin bersekongkol untuk mengorganisasi G-30-S? Satu-satunya alasan untuk membunuh jenderal-jenderal ini ialah untuk melapangkan jalan bagi Suharto naik tahta. Maka kemungkinan dalangnya ialah Suharto sendiri, oleh karena tidak mungkin ia akan

menerima bantuan dari jenderal siapa pun untuk sebuah rencana yang mempertaruhkan nyawa tujuh jenderal. Wertheim mengakui bahwa Suharto satu-satunya jenderal yang mempunyai motivasi untuk mengorganisasi G-30-S, tetapi bersisurut dari argumen bahwa memang Suharto yang telah mengorganisasinya. Alih-alih, Wertheim mengajukan klaim yang lebih sederhana bahwa Suharto "seandainya pun secara pribadi ia tidak terlibat konspirasi," telah mengetahui sebelumnya tentang gerakan itu. Bagi Wertheim, kesalahan Suharto, setidak-tidaknya, terletak pada kenyataan bahwa ia tidak memberi tahu perwira-perwira atasannya tentang adanya rencana komplot tersebut.[66] Ini merupakan pernyataan yang jauh lebih lunak ketimbang pernyataan bahwa sejumlah perwira militer pro-Suharto telah menggunakan Sjam sebagai agen ganda untuk menciptakan kup palsu.

Ketiga, tujuan mengaitkan PKI di dalam usaha kup dapat saja tercapai dengan cara yang jauh lebih tegas dan terang-terangan. Jika jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat atau Suharto sendiri, telah merancang G-30-S dengan tujuan seperti itu di dalam pikiran mereka, tentu mereka akan menggunakan kelompok Untung agar mengumumkan melalui radio bahwa mereka bekerja untuk PKI dan bertekad hendak menggulingkan Sukarno. G-30-S menyembunyikan rapat-rapat hubungannya dengan PKI dan tidak pernah menyatakan dengan jelas bahwa gerakan ini ingin melancarkan kup terhadap Sukarno. Pengumuman pertama G-30-S menyatakan bahwa Untung berniat melindungi Sukarno. Tidak satu pun dari pengumuman-pengumumannya menyebutkan PKI.

Keempat, pimpinan G-30-S tidak berpikir bahwa mereka bertindak atas nama Suharto. Jika seandainya demikian, mereka pasti akan meminta Sukarno mengangkat Suharto sebagai pengganti Yani. Melalui Supardjo pimpinan G-30-S merekomendasikan nama-nama tiga jenderal sebagai calon pejabat sementara pimpinan Angkatan Darat: Pranoto, Basuki Rachmat, dan U. Rukman.[67] Mereka tidak mengusulkan nama Suharto. Sambil memikirkan segala kemungkinan Sukarno menolak Suharto karena ia "terlalu *koppig*," dan Supardjo tampaknya tidak memohon atas nama Suharto.[68] Sukar dipahami G-30-S membunuh tujuh jenderal demi kepentingan Suharto dan kemudian tidak mencoba mempengaruhi Sukarno agar mengangkatnya sebagai panglima interim.

Uraian yang diajukan Wertheim – G-30-S sebagai "komplotan yang terorganisasi dengan baik" untuk menjebak PKI – tetap pada taraf spekulasi, sebagaimana diakui oleh Wertheim sendiri.[69] Tindakan-tindakan Suharto justru dengan gampang dapat dijelaskan dengan memperhatikan cerita Latief. Pada persidangannya Latief menyatakan bahwa ia dan Untung bertindak bebas dari Suharto dan mereka hanya menerima dukungan tak terucapkan ("tidak ada reaksi dari beliau") darinya. Latief menjelaskan bahwa ia dan Untung sudah memandang Suharto sebagai pendukung teguh Presiden Sukarno dan percaya bahwa ia akan mendukung aksi-aksi mereka dalam melawan Dewan Jenderal: "Memang saya berpendapat, bahwa satu-satunya orang, beliaulah, yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta, siapa sebenarnya Bapak Jenderal Suharto ini."[70] Menurut Latief, ia keliru saja menilai Suharto.

Persahabatan Latief dan Untung dengan Suharto dan kepercayaan mereka tentang kesetiaannya kepada Presiden Sukarno dapat menjelaskan mengapa G-30-S tidak menjadikan Suharto sebagai sasaran penculikan dan pembunuhan. Karena gerakan ini memperhitungkan dukungan Suharto, kemungkinan Latief dan Untung berpikir bahwa rencana mereka kebal dari kesalahan dan bahwa mereka hanya memerlukan sejumlah kecil pasukan untuk menduduki Jakarta dengan sukses. Bahwa dua batalyon utama yang terlibat dalam G-30-S ada di bawah komando Kostrad tidak membuktikan keterlibatan Suharto. Bisa saja para konspirator mengadakan perjanjian dengan para komandan batalyon tanpa sepengetahuan Suharto atau perwira lain siapa pun di markas besar Kostrad. Pemberitahuan Latief kepada Suharto dapat menjelaskan mengapa ia berhasil melakukan aksi dengan "efisiensi yang ajaib di tengah-tengah keadaan yang luar biasa membingungkan." Rasa kasih sayang kekeluargaan yang tersisa, dan barangkali rasa syukur atas pemberitahuan yang diterimanya, dapat menjelaskan mengapa Suharto tidak membiarkan Latief dieksekusi. Walaupun bukti-bukti yang ada tidak mendukung pendapat bahwa Suharto adalah dalang, mereka setidak-tidaknya memberi kesan bahwa ia telah mengetahui keberadaan G-30-S sebelumnya, memberikan dukungan dengan diam-diam, dan akhirnya mengkhianati bekas sahabat-sahabatnya yang naïf itu.

Masing-masing dari empat strategi naratif di atas gagal memberi

penjelasan yang memuaskan tentang semua keganjilan G-30-S. Kadar keterandalan masing-masing bergantung pada sorotannya atas rangkaian fakta-fakta yang terbatas sementara mengabaikan, menutupi, atau keliru menjelaskan fakta-fakta lain. Sepanjang dasawarsa-dasawarsa yang telah berlalu sejak peristiwa tersebut tak seorang pun tiba pada uraian menyeluruh yang memuaskan. Gerakan 30 September telah menjadi semacam sebuah kubus Rubik yang tak terpecahkan, dengan enam warna yang tidak dapat bersesuaian dengan keenam sisinya. Tak satu orang pun dapat menyelaraskan fakta-fakta itu dengan uraian yang masuk akal.

Satu kendala dalam memecahkan teka-teki ini ialah pemaksaan cara penyelesaian palsu yang teramat kuat segera sesudah peristiwa terjadi. Saat tentara Suharto mendesakkan uraiannya sendiri – PKI sebagai dalang – ia juga menciptakan fakta-fakta (misalnya kisah penyiksaan di Lubang Buaya dan pengakuan para pemimpin PKI). Dengan banjir propagandanya rezim Suharto telah memasang ranjau di sepanjang jalan kaum sejarawan dengan petunjuk palsu, jalan belokan yang buntu, dan penggalan-penggalan bukti yang direkayasa. Kepalsuan cara penyelesaian Suharto terlihat nyata dalam penggunaan istilah *PKI* yang tidak tepat. Menurut versi pemerintah, *PKI* mendalangi G-30-S. Tetapi jelas bahwa sebagai lembaga yang terdiri dari jutaan manusia, PKI tidak mungkin dapat mengorganisasi pemberontakan militer yang bersifat rahasia.

Jika PKI secara keseluruhan tidak bertanggung jawab, bagaimanakah tepatnya hubungan antara pimpinan PKI dengan G-30-S? Misalnya, apa yang dilakukan Aidit di pangkalan udara Halim? Anderson dan McVey menampilkannya sebagai "korban penipuan" para perwira pemberontak. Tapi mereka menulis analisis itu sebelum timbul keterangan tentang peranan penting yang dimainkan oleh Sjam dan Biro Chusus dan sebelum Sudisman mengakui bahwa beberapa pimpinan partai tertentu telah "terlibat dalam G-30-S" tetapi "PKI sebagai partai tidak terlibat." Crouch merujukkan informasi baru ini dengan analisis naskah Cornell dengan menyatakan bahwa pimpinan dan anggota tertentu PKI telah membantu secara aktif, tetapi tidak mengarahkan, *putsch* para perwira menengah Angkatan Darat. Sejauh ini uraian yang dikemukakan Crouch merupakan yang paling kaya informasi, namun seperti halnya naskah Cornell, ia pun tidak mampu menjelaskan, mengapa pemberontakan militer yang pro-Sukarno harus menyasar pada pendemisioneran kabinet

Sukarno.

Uraian Wertheim berhasil memecahkan keganjilan ini dengan menggambarkannya sebagai suatu provokasi yang disengaja. Pendemisioneran kabinet dimaksud untuk memberi jaminan bahwa masyarakat tidak akan mendukung G-30-S. Menurut Wertheim, beberapa pemimpin tertentu PKI menjadi terlibat dalam G-30-S, karena mereka – seperti naskah Cornell juga berargumen – menjadi korban penipuan. Tapi mereka tidak ditipu oleh para perwira pemberontak melainkan oleh komplotan perwira-perwira anti-PKI dan agen ganda mereka, Sjam. Para perwira yang ingin menghancurkan PKI dan menggulingkan Sukarno merancang G-30-S sehingga akan dapat mengaitkan PKI dalam tindak kejahatan dan kemudian runtuh. Sjam memikat Aidit dan elemen-elemen lain dalam PKI ke dalam perangkap. Sementara garis besar uraian Wertheim itu memecahkan keganjilan dalam pendemisioneran kabinet, ia melahirkan keganjilan-keganjilan baru. Jika G-30-S merupakan sebuah perangkap, ia haruslah dirancang oleh Suharto atau para perwira yang bekerja untuknya. Namun para perwira dalam G-30-S tidak mengusulkan kepada Sukarno agar ia menunjuk Suharto sebagai pengganti Yani. Akhirnya, cara pemecahan Wertheim tidak berhasil menjelaskan banyak bagian dalam teka-teki ini.

CATATAN

[1] Saya akan mengabaikan tiga penjelasan lainnya, yaitu dari Dake, Holtzappel, dan Fic. Dake berpendapat, atas dasar bukti-bukti yang tidak andal, bahwa Presiden Sukarno adalah otak di balik G-30-S (Dake, *In the Spirit of the Red Banteng*). Satu-satunya bukti yang dipunyai Dake ialah transkrip interogasi ajudan Presiden Sukarno, Kapten Bambang Widjanarko, oleh personil Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Dake juga menulis kata pengantar untuk teks transkrip interogasi asli yang berbahasa Indonesia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris (Karni, *Devious Dalang*). Untuk kritik lunak terhadap tesis Dake yang berlebihan, lihat Crouch, *Army and Politics in Indonesia*, 119-121. Untuk kritik yang lebih tajam, lihat tinjauan Ernst Utrecht terhadap buku-buku Dake dan Karni, dalam "An Attempt to Corrupt Indonesian History." Holtzappel berpendapat, berdasar salah tafsir yang sembrono terhadap kesaksian-kesaksian di depan Mahmilub, bahwa para perwira AURI, khususnya Mayor Soejono, adalah pimpinan-pimpinan G-30-S yang sebenarnya (Holtzappel, "30 September Movement"). Artikelnya terlalu dipenuhi informasi yang buruk sehingga tak layak ditentang. Fic berpendapat bahwa Mao Zedong memberi saran Aidit agar PKI membunuh jenderal-jenderal sayap kanan dan bahwa selanjutnya Aidit mendapat

persetujuan Sukarno untuk rencananya itu. Fic menjalin kisah ini dari angan-angannya sendiri (Fic, *Anatomy of the Jakarta Coup*, 94-105). Hanya bukti-bukti yang kokoh dapat mengungguli banyaknya alasan untuk memercayai bahwa Sukarno dan Tiongkok tidak mempunyai urusan dengan perencanaan G-30-S.

[2] Suharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,* 100. Alimin tidak lagi menjadi "boss PKI" sejak angkatan Aidit menggantikannya pada 1951.

[3] Sugama, *Memori Jenderal Yoga*, 148, 152-153.

[4] Brigadir Jenderal Sucipto adalah asisten Staf Koti urusan politik. Koti, Komando Operasi Tertinggi, dibentuk pada 1963 oleh Sukarno agar ia dapat mengendalikan militer dengan lebih baik dan mengurangi pengaruh Nasution. Sukarno memasukkan banyak tokoh-tokoh sekutunya di dalamnya, bahkan juga dari kalangan sipil. Tapi para perwira antikomunis, seperti Sucipto, masih mendapat tempat. Tentang peranan Subchan, lihat A.M. Mandan, "Subchan Z.E," 54.

[5] Pusat Penerangan Angkatan Darat, *Fakta-fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September," Penerbitan Chusus no. 1,* 5 Oktober 1965, 15-18. Angkatan Darat membuat buku ini sebagai penerbitan berseri bulanan dan menerbitkan sekurang-kurangnya dua buku lagi, bertanggal 5 November 1965, dan 5 Desember 1965.

[6] CIA Report No. 22 from U.S. Embassy in Jakarta to White House [Laporan CIA No. 22 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Gedung Putih], 8 Oktober 1965, dikutip dalam Robinson, *Dark Side of Paradise,* 283.

[7] Banyak bangunan PKI menjadi milik pemerintah. Di bawah Suharto gedung CC-PKI menjadi kantor Kementerian Pariwisata.

[8] Sudisman, *Uraian Tanggungdjawab*, 17. Lihat juga, Hughes, *End of Sukarno,* 141.

[9] Laporan intelijen militer Australia pada Desember 1965 menyatakan bahwa, "Bukti keterlibatan PKI sebenarnya – yaitu perencanaan sebelumnya oleh Central Comite – sebagian besar bersifat tidak langsung." Dikutip dalam Easter, "'Keep the Indonesian Pot Boiling,'" 59-60.

[10] Pusat Penerangan Angkatan Darat, *Fakta-fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September," Penerbitan Chusus no. 2,* 5 November 1965, 4.

[11] "Berita Atjara Pemeriksaan," laporan interogasi Latief, 25 Oktober 1965, sidang pengadilan Latief, dokumen-dokumen Mahmilub. Interogator ialah Kapten Hasan Rany dari polisi militer. Tentang keadaan kesehatan Latief selama interogasi, lihat Latief, *Pledoi Kol. A. Latief*, 54-59. Banyak bekas tahanan politik yang ditahan di penjara Salemba ingat bahwa sel Latief menyebarkan bau menyengat dari daging yang membusuk. Luka pada kakinya mengakibatkan ia menjadi pincang seumur hidup.

[12] Untung menyatakan, ia tidak mempunyai hubungan dengan PKI, dan bahwa ia bersama Latief yang memulai G-30-S (*"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung*, 35-37).

[13] Anderson dan McVey menerbitkan ulang dan mengomentari pengakuan Njono dalam *Preliminary Analysis*, 157-162. Hughes menerbitkan ulang pengakuan Aidit dan menya-

takan bahwa pengakuan itu mungkin pemalsuan (lihat *End of Sukarno,* 177-182). Ketika itu Aidit sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) atau MPR(S) dan menteri dalam kabinet Sukarno. Aidit tidak mungkin menyusun penjelasan tentang G-30-S di depan personil perwira menengah di pedalaman Jawa Tengah tidak lama sesudah ia tertangkap. Ia tentu akan menunggu sampai ia dibawa di depan umum dan Presiden Sukarno. Jika demikian itulah yang dikehendaki, ia dapat memberikan penjelasan kapan saja sebelum tertangkap pada 22 November 1965. Teks itu sendiri terbaca seperti sebuah catatan rangkaian kejadian umum. Penekanannya pada waktu dan tanggal. Tidak tampak petunjuk bahwa Aidit sendiri yang menulis teks itu. Satu pertanda bahwa pengakuan itu palsu terletak pada pernyataan bahwa PKI berencana menghapus Pancasila sesudah kup. Ide bahwa PKI anti-Pancasila merupakan salah satu dari fitnah-fitnah baku dari Angkatan Darat. (Pada kenyataannya, PKI sudah mendukung ide menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam sidang badan pembuat undang-undang dasar, Konstituante, dari November 1957 sampai Juli 1959). Maka menggelikan jika orang menduga Aidit akan menentang Pancasila, khususnya pada saat krisis seperti itu, sementara ia tidak pernah sebelumnya menentangnya. Juga, pengakuan bahwa Aidit bertemu Sukarno di Halim. Sukarno dikelilingi orang-orang lain selagi di Halim. Tak seorang pun pernah menyatakan bahwa kedua tokoh itu pernah bertemu di sana.

[14] Anderson, “How Did the Generals Die?”

[15] Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia pada 1965, Marshall Green, mengikuti garis rezim Suharto dalam melukiskan perwira-perwira militer seperti Untung sebagai “pion-pion PKI” (Green, *Indonesia*, 53).

[16] *“Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung*, 35, 38, 54.

[17] *Ibid*., 55.

[18] *Ibid*., 51.

[19] Kesaksian Mayor Soejono pada 16 Februari 1966 dalam *“Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono,* 208. Berdiri sendiri, pernyataan Soejono bahwa Sjam sebagai pimpinan tidak dapat diterima begitu saja. Kesaksian Soejono penuh kejanggalan dan ketidakserasian. Tampaknya ia terbelit oleh usaha sia-sia untuk mengalihkan beban kesalahan dari dirinya. Kesaksiannya menjadi penting karena salah satu dari yang pertama kali, kalau bukan memang yang pertama kali, menyebut-nyebut nama Sjam di depan umum.

[20] Pada awal 1967 Hughes menulis, “‘Sjam’ yang misterius, sekarang dipercaya, sebenarnya ialah Tjugito” (*End of Sukarno,* 35).

[21] *Ibid*., 35-36, 78.

[22] Justus van der Kroef pernah menyatakan bahwa laporan Cornell “mengabaikan kinerja Biro Chusus.” Ia tidak menyebutkan bahwa laporan itu ditulis pada Januari 1966, lebih dari setahun sebelum istilah “Biro Chusus” menjadi dikenal (Van der Kroef, “Origins of the 1965 Coup in Indonesia,” 284).

[23] Buku yang hanya terbit dalam bahasa Inggris ini dimaksud untuk meyakinkan para pakar, wartawan, dan diplomat asing bahwa laporan Anderson dan McVey keliru (Notosusanto

and Saleh, *Coup Attempt of the "September 30 Movement"*). Dua puluh tahun kemudian buku ini baru diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia: *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia.*

[24] Buku Putih yang saya maksud di sini ialah dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, *September 30th Movement.*

[25] *Ibid*., 63-70.

[26] Njono, Supardjo, dan Latief, misalnya menolak keabsahan berita interogasi mereka ketika memberikan kesaksian pada persidangan masing-masing. Untung tidak dengan tegas menolak berita interogasinya, tetapi ia memberi kesaksian yang bertentangan dengan berita interogasi itu.

[27] CIA, *Indonesia – 1965*, 312. Seorang mantan agen CIA yang mengkhususkan diri dalam masalah Asia Tenggara, Ralph McGehee, menyatakan bahwa laporan yang telah terbit ini dimaksudkan untuk menyesatkan. CIA "menggubah cerita palsu tentang apa yang telah terjadi" untuk konsumsi publik. Sementara itu untuk kebutuhan intern CIA "menyusun penelitian rahasia tentang apa yang sebenarnya telah terjadi." Bagian dalam buku McGehee tentang dua laporan ini sebagian dikenai sensor ketika CIA mengkaji naskahnya. Beberapa detil yang diketahui McGehee masih tetap ditutupi (lihat *Deadly Deceits*, 58).

[28] Anderson and McVey, *Preliminary Analysis*, 92.

[29] Van der Kroef, "Gestapu in Indonesia"; "Indonesia"; "Sukarno's Fall"; "Indonesian Communism since the 1965 Coup"; *Indonesia after Sukarno*, chap. 1; "Interpretations of the 1965 Coup in Indonesia"; "Origins of the 1965 Coup in Indonesia."

[30] Pauker, *Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia.*

[31] Brackman, *Communist Collapse in Indonesia* dan *Indonesia: The Gestapu Affair.*

[32] Politbiro CC-PKI terdiri atas dua belas orang. Di antara mereka, empat atau lima orang dipilih untuk bertugas sebagai anggota Komite Kerja, atau yang dikenal sebagai Dewan Harian. Menurut Sudisman, Dewan Harian pada 1965 mempunyai empat anggota: Aidit, Lukman, Njoto, dan Sudisman sendiri. Sudisman mengoreksi keterangan Sjam bahwa Dewan Harian terdiri dari lima orang (lihat transkrip persidangan Mahmilub untuk Sudisman, 7 Juli 1967). Subekti, dalam catatan rahasianya pada 1986, yang ditulis untuk kelompok kecil kaum loyalis partai yang masih hidup, mengenang bahwa Dewan Harian terdiri atas lima orang, yaitu selain empat tersebut di atas juga Oloan Hutapea (Subekti, "G-30-S Bukan Buatan PKI," 3). Dalam hal ini saya mempercayai Subekti karena catatannya, walaupun ditulis lebih kemudian dari keterangan Sudisman, ditujukan bagi kalangan dalam partai. Agaknya Sudisman sengaja ingin mengingkari bahwa Hutapea, yang pada 1967 masih menjadi buron, adalah pemimpin dengan kedudukan begitu tinggi.

[33] Anderson dan McVey, "What Happened in Indonesia?" 40-42.

[34] Anderson, "Petrus Dadi Ratu," 14. Versi Indonesia karangan ini terbit dalam *Tempo*, 10-16 April, 2000.

[35] Aidit dieksekusi di suatu tempat dekat Boyolali, Jawa Tengah. Wartawan John Hughes pada 1967 menulis, "Matinya Aidit tidak dicatat dalam dokumen resmi apa pun yang

tersedia bagi umum" (*End of Sukarno,* 175). Pada 1980 seorang perwira Angkatan Darat, Yasir Hadibroto, mengaku bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu. Pada akhir 1965 Hadibroto adalah kolonel yang memimpin pasukan Kostrad yang dikirim ke Jawa Tengah untuk "menghancurkan" PKI. Ia menyatakan bahwa ia dan anak buahnya membunuh Aidit tanpa menerima perintah langsung dari Suharto (lihat "Menangkap Maling dengan Menggunakan Maling," *Kompas,* 5 Oktober 1980; versi Inggris terbit dalam *Tapol Bulletin,* no. 41-42 [September-Oktober 1980]: 11-14). Mengingat ketokohan Aidit, tidak mungkin kiranya seorang kolonel berani bertindak tanpa perintah langsung dari Suharto.

[36] Anderson and McVey, *Preliminary Analysis*, 95.

[37] *Ibid*., 95.

[38] *Ibid*., 89.

[39] Wertheim, "Whose Plot?" 202.

[40] Anderson and McVey, *Preliminary Analysis*, 1.

[41] *Ibid*., 1, 18.

[42] Dalam menganalisis percobaan kup di Filipina pasca-Marcos, Alfred McCoy berpendapat bahwa para perwira pemberontak (RAM Boys yang bernama buruk) telah saling terikat sejak mereka di akademi militer (*Closer Than Brothers*, 259-298).

[43] Anderson and McVey, *Preliminary Analysis*, 38.

[44] Anderson, "Petrus Dadi Ratu."

[45] Anderson, "Tentang Pembunuhan Massal '65'."

[46] Crouch, *Army and Politics,* 116.

[47] Crouch, "Another Look at the Indonesian 'Coup'," 4.

[48] Crouch, *Army and Politics,* 116-117.

[49] Sudisman, *Analysis of Responsibility*, 4, 6-7.

[50] Wertheim, "Suharto and the Untung Coup."

[51] Wertheim tidak mengutip sumber kisah tentang Suharto yang menghadiri pernikahan Untung. Salah seorang bawahan Suharto di Kostrad, Kemal Idris, sambil lalu menyebut dalam memoarnya bahwa ia menghadiri pernikahan Untung atas nama Suharto. "Saya kenal Untung dari saat saya menerima perintah untuk mewakili Suharto pada upacara pernikahannya karena ia bekas salah seorang bawahan Suharto" (Anwar et.al., *Kemal Idris*, 180). Apakah Suharto pribadi hadir ataukah mengirim Kemal Idris untuk mewakilinya, tampak bahwa ia mengenal dekat Untung.

[52] Brackman, *Communist Collapse in Indonesia*, 100; *Der Spiegel,* 27 Juni 1970, hal. 98.

[53] Wertheim, "Suharto and the Untung Coup," 53.

[54] *Ibid*., 54.

[55] *Ibid*., 53.

[56] Wertheim, "Whose Plot?" 205.

57 *Ibid.*, 207.

58 Latief, *Pledoi Kol. A.Latief*, 129.

59 *Ibid.*, 277.

60 *Ibid.*, 279, 282.

61 *Ibid.*, 282.

62 *Ibid.*, 280.

63 Wertheim, "Whose Plot?" 204-205.

64 Peter Dale Scott berpendapat dengan nada yang serupa, "Gestapu, tanggapan Suharto, dan pertumpahan darah merupakan bagian dari skenario tunggal terpadu untuk perebutan kekuasaan oleh militer." Suharto adalah "konspirator utama dalam skenario ini." (Scott, "United States and the Overthrow of Sukarno," 244-245).

65 Wakil Perdana Menteri Sukarno, Soebandrio, menceritakan bahwa ketika ia dan Untung bersama-sama di penjara, Untung bercerita kepadanya bahwa Suharto suatu saat akan menyelamatkannya. Untung yakin bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya "hanya sandiwara" dan tidak akan pernah dilaksanakan (Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S,* 23). Informasi ini tidak dapat diandalkan. Heru Atmodjo, yang dipenjarakan bersama Untung dan Soebandrio di Cimahi, meragukan keterangan ini karena Untung tidak pernah berbicara semacam itu kepadanya (wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002). Beberapa eks tapol lain teringat bahwa dalam tahun-tahun terakhir di penjara Soebandrio sedikit banyak telah kehilangan kesehatan jiwanya. Berdiri sendiri, bukunya yang ringkas itu (ditulis tahun 2000, sesudah dibebaskan dari penjara) tidak cukup dapat dipercaya. Walaupun dalam judulnya tercantum kata *kesaksian*, buku ini memuat lebih banyak spekulasi dan informasi dari tangan kedua ketimbang laporan saksi mata dan argumentasi yang cermat.

66 Wertheim, "Indonesia's Hidden History," 299.

67 Menurut versi rezim Suharto, Supardjo merekomendasikan Pranoto dan Rukman (Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September*,145). Menurut Supardjo sendiri, ia mengajukan Pranoto, Rukman, dan Basuki Rachmat. Lihat lampiran 1.

68 Sambil duduk di rumah Komodor Susanto di pangkalan udara Halim, Sukarno membahas masalah pengangkatan itu dengan Supardjo, di depan sekurang-kurangnya tujuh menteri dan perwira-perwira militer. Tidak seorang pun dari mereka kemudian menyatakan bahwa Supardjo mengajukan nama Suharto.

69 Wertheim, "Indonesia's Hidden History," 305.

70 Latief, *Pledoi Kol.A.Latief*, 279.

3

DOKUMEN SUPARDJO

Gelegar musik pembuka yang mencanangkan pertandingan melenyap dari pendengaran dengan geraman malas segera saat berlaga harus dimulai, para pemain berhenti memperhitungkan dirinya dengan serius, dan lakon pun ambruk sama sekali, seperti gelembung-gelembung tercoblos … Revolusi itu sendiri melumpuhkan para pengusungnya dan memberkahi musuh-musuhnya saja dengan kekuatan bergelora.

***Karl Marx,* The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852)**

Pengakuan akibat siksaan, kesaksian berselubung, kisah media yang direkayasa para tentara ahli perang urat syaraf – di tengah-tengah limpahan informasi tentang G-30-S, teramat sedikit yang dapat ditimbang sebagai bukti teruji. Para peneliti tidak dapat mengajukan sesuatu lebih dari dugaan cerdas tentang identitas pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dan motivasi mereka. Apakah Sjam dan Aidit bertanggung jawab, seperti diakui Sjam sendiri di persidangannya? Atau Untung dan para perwira militer lainnya bertanggung jawab, seperti yang mereka akui di persidangan mereka? Atau apakah mereka bekerja bersama sebagai satu tim tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab? Atau apakah Suharto dengan satu atau lain cara berdiri di belakang mereka sebagai dalang dari seluruh drama yang memilukan itu? Dengan tidak adanya bukti yang tidak dapat disangsikan, pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa dijawab dengan kepastian sedikit pun.

Mengingat bahwa bukti-bukti tentang G-30-S sudah dikacaukan

dan dipertanyakan, tidak mengherankan ketika ditemukan bahwa suatu bukti yang sangat penting telah diabaikan. Salah seorang konspirator G-30-S yang ada di pangkalan udara Halim pada 1 Oktober, yaitu Brigadir Jenderal Supardjo, menulis sebuah analisis *postmortem* tentang kegagalan mereka. Tulisan ini diberinya judul "Beberapa Pendapat jang Mempengaruhi Gagalnja 'G-30-S' Dipandang dari Sudut Militer" (lihat lampiran 1). Hingga sekarang para peneliti tidak mengakui dokumen ini sebagaimana adanya: sumber utama terpenting tentang G-30-S. Ini satu-satunya dokumen yang tersedia sampai sekarang yang ditulis oleh pelaku G-30-S sebelum ia tertangkap. Dengan demikian, informasi yang terkandung di dalamnya mempunyai bobot keterandalan dan kejujuran yang khas. Supardjo menulis demi kepentingan kawan-kawannya, bukan bagi para interogator dan penuntut umum yang memusuhinya. Jika kita hendak menganalisis G-30-S lagi, seyogianya kita mulai dengan dokumen ini, melihat kesimpulan apa yang dapat ditarik dari sana, dan kemudian memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dengan mempertimbangkan dokumen ini.

Sudah barang tentu dokumen Supardjo tidak dapat menjawab semua persoalan tentang G-30-S. Penulis adalah seorang pribadi dengan sudut pandang sendiri yang khusus. Supardjo juga bukan salah seorang pimpinan inti G-30-S. Hanya lima orang yang memimpin G-30-S dan, kemungkinan, mengerti semua atau sebagian besar seluk-beluk dan kiat-kiatnya: Sjam, Pono, Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief, dan Mayor Soejono. Pada hari G-30-S dimulai Supardjo bersama lima tokoh itu berada di pangkalan udara AURI di Halim, dan ia berperan selaku wakil mereka untuk berhubungan dengan Presiden Sukarno. Tetapi ia sama sekali tidak menghadiri rapat-rapat perencanaan mereka pada pekan-pekan sebelumnya. Ia tiba di Jakarta hanya tiga hari sebelum aksi dimulai. Sementara Supardjo bisa memenuhi janji judul dokumennya – "faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan" G-30-S – ia tidak mengerti semua alasan kegagalan itu. Ketika ia melihat aksi digelar, ia kebingungan menghadapi penalaran yang mendasari keputusan-keputusan tertentu. Di sinilah ketidaktahuannya tentang diskusi-diskusi dan rapat-rapat perencanaan sepanjang pekan-pekan sebelumnya menjadi penyebab dari keterbatasan analisisnya. Selain itu, ia tidak banyak mengetahui tentang status G-30-S di Jawa Tengah, provinsi tempat gerakan ini paling kuat.

Supardjo berusaha sangat rasional di dalam menuliskan analisisnya: pada bagian pertama naskah ia laporkan peristiwa-peristiwa yang disaksikannya, kemudian pada bagian kedua ia tuliskan pemahamannya tentang peristiwa-peristiwa itu. Tentu saja, bisa jadi ia salah menangkap peristiwa-peristiwa tertentu atau salah menafsirkan apa yang ia tangkap.

Dalam bagian ini saya sajikan informasi tentang latar belakang Supardjo dan kemudian menguraikan pernyataan-pernyataan penting dalam dokumen mengenai kepemimpinan G-30-S, rencana aksi G-30-S, pelaksanaan rencana itu, dan strategi G-30-S sehubungan dengan Presiden Sukarno dan Mayor Jenderal Suharto.

LATAR BELAKANG SUPARDJO DAN ANALISISNYA

Ketika saya pertama-tama mulai meneliti peristiwa-peristiwa pertengahan 1960-an, saya terkesima oleh keganjilan keterlibatan Supardjo dalam G-30-S. Namanya disebut dalam pengumuman radio yang kedua (Dekrit no. 1) pada 1 Oktober 1965 sebagai orang nomor dua dalam hierarki G-30-S; ia sebagai wakil komandan, yang berada langsung sesudah nama komandannya, Letnan Kolonel Untung. Mengapa seorang perwira yang berpangkat lebih tinggi mau menempatkan dirinya di bawah perwira yang berpangkat lebih rendah? Pengumuman keempat (Keputusan no. 2), dibacakan melalui radio di ujung siang, membatalkan semua pangkat di atas letnan kolonel. Mengapa seorang perwira militer karier dengan tanda jasa, yang telah bekerja keras untuk meraih posisi tinggi selama dua puluh tahun, ikut ambil bagian dalam suatu aksi yang akan berkesudahan dengan penurunan pangkatnya? Akan berarti apa pembatalan pangkat yang lebih tinggi itu ketika, di sekitar saat pengumuman itu dikumandangkan, Supardjo sedang duduk di depan presiden berseragam lengkap dengan lencana brigadir jenderalnya?

Kehadiran Supardjo di Jakarta pada saat aksi itu sendiri sudah menimbulkan tanda tanya karena ia semestinya ditempatkan jauh di Kalimantan Barat, sebagai komandan pasukan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Jabatan resmi Supardjo adalah sebagai Panglima Komando Tempur IV Komando Mandala Siaga.[1] Perwira-perwira lain yang terlibat dalam G-30-S, seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel

Latief, dan Mayor Soejono, memimpin pasukan-pasukan mereka di Jakarta. Tapi Supardjo agaknya tidak dapat menyediakan pasukan apa pun untuk aksi itu. Lalu, apa tujuan pelibatan dirinya jika ia tampil sebagai pemain perseorangan belaka dan tidak mempunyai pasukan untuk disumbangkan? Ia tidak mungkin terlibat secara berarti dalam perencanaan aksi 1 Oktober karena selama bulan-bulan sebelumnya ia berada di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Lalu, jika ia tidak terlibat dalam perencanaan, mengapa ia mau ikut di dalamnya? Ia bukanlah teman lama yang akrab dan terpercaya bagi para perwira yang lain. Ia berasal dari komando militer Jawa Barat (Siliwangi), sedangkan Untung dan Latief dari komando Jawa Tengah (Diponegoro), dan Soejono seorang perwira AURI yang berpangkalan di Jakarta. Bagaimana bisa Supardjo tergelung dalam kelompok ini pada awalnya?

Kedudukan Supardjo yang istimewa sebagai orang luar dan orang dalam itu menyebabkan dokumen ini menjadi sangat berharga. Ia dapat mengamati peristiwa-peristiwa dari sudut seorang pengamat yang berjarak. Ia memulai tulisannya dengan menyatakan bahwa ia terlibat dalam G-30-S hanya selama tiga hari – artinya pada 30 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober – dan ini merupakan waktu yang sangat pendek jika "dibandingkan dengan seluruh persiapan." Di sisi lain, Supardjo adalah orang dalam. Ia ada bersama para pimpinan inti di tempat persembunyian mereka di pangkalan udara Halim, berbicara dengan mereka dari menit ke menit tentang bagaimana aksi harus berlangsung. Mereka memercayainya untuk bicara dengan Presiden Sukarno atas nama mereka. Pada saat aksi dimulai tidak ada orang lain yang dekat dengan penggerak inti seperti Supardjo.

Paling sedikit dokumen ini dapat membantu menjelaskan beberapa keliru gagas tentang peran Supardjo. Karena dialah perwira berpangkat tertinggi dalam G-30-S, banyak pengulas yang salah menduga bahwa dia seorang pemimpin kunci gerakan ini, jika bukan pimpinan yang *paling* kunci. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia waktu itu dalam memoarnya menggambarkan Supardjo sebagai "komandan taktis kup yang sebenarnya."[2] Otobiografi Suharto menyatakan bahwa dalam percakapan pribadi Sukarno pernah mengatakan bahwa seluruh gerakan ada di bawah pimpinan Supardjo.[3] Yang lain lagi mendesakkan bahwa ia komandan pasukan yang menduduki Lapangan Merdeka.[4] Pada 1966

pengacara Untung, dalam usaha sia-sia untuk melindungi kliennya, menyatakan di depan mahkamah bahwa Supardjo adalah dalang dari seluruh komplotan dan bahwa Untung hanya mengikuti perintah perwira atasan belaka.[5] Dokumen Supardjo sendiri mengungkapkan bahwa ia bukan pimpinan gerakan dan juga tidak memimpin pasukan apa pun dalam G-30-S.[6]

Penjelasan Supardjo pribadi tentang bagaimana ia tiba di Jakarta mungkin saja benar. Di depan mahkamah ia mengatakan bahwa ia meninggalkan Kalimantan karena anak bungsunya sakit keras dan diperkirakan akan meninggal. Istrinya mengirim radiogram, memintanya segera kembali ke Jakarta.[7] Begitu tiba di ibu kota, ia memanfaatkan kunjungannya untuk mendengarkan berita terakhir tentang rencana perlawanan terhadap Dewan Jenderal. Ia mengakui bertemu dengan teman lamanya, Sjam, yang menceritakan kepadanya tentang aksi yang akan datang. Supardjo mengatakan, rencananya ia akan kembali ke posnya di Kalimantan sebelum 1 Oktober andaikata atasannya, Omar Dani, tidak memintanya agar tinggal sampai 3 Oktober untuk suatu rapat dengan presiden. Mereka berdua, Dani dan Supardjo, ingin berbicara dengan Sukarno tentang apa yang akan dilakukan untuk mencegah kup Dewan Jenderal. Supardjo mengikuti adanya dua usaha terpisah untuk melawan jenderal-jenderal sayap kanan: rencana Dani di satu pihak dan rencana G-30-S di pihak lain. Gerakan 30 September bergerak lebih dulu dan mendahului rencana Dani.[8] Barangkali Supardjo tidak berterus terang dalam memberikan kesaksiannya di depan mahkamah; bisa jadi ia memang sengaja datang ke Jakarta agar dapat bekerja sama dengan Sjam. Barangkali ia sudah sepakat dengan G-30-S sejak awal. Apa pun kemungkinannya, peranan Supardjo dalam G-30-S terbatas; aksi itu bisa berjalan tanpa partisipasinya.

Supardjo lebih berfungsi sebagai penasihat atau asisten ketimbang sebagai panglima. Pada pagi hari 1 Oktober ia dibawa ke istana oleh dua komandan batalyon, yang sebenarnya dengan mudah bisa bertugas sebagai penghubung gerakan dengan presiden. Dalam segala kemungkinan rencana awal G-30-S untuk bertemu presiden bertumpu pada dua perwira ini saja, yaitu Kapten Sukirno dan Mayor Supeno. Keikutsertaan Supardjo tidak dapat diperhitungkan karena ia berada jauh di Kalimantan dan tidak ada perintah baginya untuk kembali ke Jakarta.



Gambar 5. Supardjo dan Ibu Supardjo, ca. 1962.
Kredit foto: koleksi keluarga Supardjo

Komandan-komandan batalyon itulah yang diperintahkan masuk Jakarta dengan membawa pasukan mereka untuk parade Hari ABRI 5 Oktober. Tiba di Jakarta tiga hari saja sebelum aksi, Supardjo bisa jadi mendadak ditambahkan dalam rencana.

Analisis *postmortem* Supardjo memberi kesan bahwa ia tidak bertanggung jawab dalam pengorganisasian G-30-S. Ia menulis sebagai seorang perwira militer yang dibingungkan oleh semua penyimpangan gerakan dari praktik baku kemiliteran. Seandainya ia yang bertanggung jawab, orang dapat berharap bahwa aksi G-30-S akan menjadi operasi yang lebih profesional. Supardjo menjadi brigadir jenderal pada umur empat puluh empat justru karena keberhasilannya yang gemilang dalam pertempuran. Sampai 1965 ia sudah mengabdi dalam ketentaraan selama dua puluh tahun, dari saat perang kemerdekaan, ketika ia menjadi terkenal

dalam pertempuran di Jawa Barat melawan pasukan Belanda. Melawan perkubuan Belanda yang seakan tak tertembus itu, ia menggunakan variasi industrial modern dari taktik kuda Troya. Ia mencegat kereta api, diam-diam menaikkan tiga ratus prajurit ke gerbong-gerbongnya, dan selanjutnya mengejutkan pasukan Belanda yang jauh lebih besar ketika kereta api itu lewat dekat kubu pertahanan mereka.[9] Belakangan, sebagai komandan distrik militer di Jawa Barat pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, ia memainkan peranan sangat penting dalam perang pengikisan pemberontakan gerakan Darul Islam. Ia juga belajar teori peperangan, setelah menghabiskan satu tahun di sekolah staf tentara Pakistan di Quetta, tempat ia menulis naskah tentang perang gerilya.[10] Berbicara tentang masalah-masalah kemiliteran, jenderal bertubuh ramping berkumis tipis inilah ahlinya.

Supardjo menulis analisis tentang Gerakan 30 September ketika ia dalam pengejaran. Hidupnya di ambang kehancuran: G-30-S telah ambruk; pangkatnya dilucuti dan ia dipecat dari ketentaraan; ia dipisahkan dari istri dan sembilan anak-anaknya (yang terus-menerus berada di bawah pengawasan); kawan-kawannya sesama konspirator, seperti Untung, telah disidang dan dijatuhi hukuman mati. Angkatan Darat memburu Supardjo ke seluruh penjuru negeri. Namun terlepas dari hal-hal yang tentu sangat mengecewakannya, ia telah menuliskan tentang G-30-S tanpa rasa dengki atau dendam.

Karena dokumen ini tidak bertanggal, kita hanya dapat menduga-duga kapan waktu penyusunannya. Supardjo menulis analisis ini setidak-tidaknya satu bulan sesudah peristiwa; dia menyebutkan bahwa sepucuk surat yang ditulisnya untuk Sukarno pada awal Oktober 1965 baru dikirim satu bulan kemudian. Kita dapat menduga bahwa ia menulis analisisnya untuk kepentingan Sudisman, yang, sebagai anggota senior inti Politbiro PKI yang masih hidup, mengambil tanggung jawab pada 1966 dengan menulis kritik terhadap kebijakan PKI sebelumnya. Supardjo mencatat pada alinea pertama bahwa analisisnya dimaksudkan untuk membantu "kawan pimpinan" dalam mengembangkan "analisa secara menyeluruh" tentang G-30-S. Kritik Politbiro diumumkan pada September 1966, sehingga analisis Supardjo kemungkinan ditulis sebelumnya.[11]

Selama tanya jawab di persidangannya di Mahmilub, Supardjo mengakui telah menyampaikan kritiknya tentang G-30-S secara lisan

kepada pimpinan partai yang lain, yaitu Soejono Pradigdo, dalam September 1966 dan bertemu Sudisman satu bulan sesudah itu melalui perantaraan Pradigdo. Hakim Ketua menanyai Supardjo dua kali pada hari terakhir tanya jawab apakah ia pernah menulis "analisa tentang kegagalan G-30-S" dan apakah Sudisman meminta kepadanya agar menulis "semacam otokritik." Supardjo menjawab singkat tidak.[12] Tidak ada alasan untuk memercayai baik kronologi Supardjo bertemu Sudisman maupun pengingkaran Supardjo bahwa ia telah menulis dokumen semacam itu. Sepanjang tanya jawab dalam persidangan jawaban-jawaban Supardjo, wajar saja, selalu singkat dan terkadang mengelak. Jawaban-jawaban Supardjo terutama menjadi berbelit-belit saat ia ditanya tentang hubungannya dengan PKI.

Penyangkalan Supardjo terhadap dokumen itu dapat dipahami karena pada alinea-alinea tertentu bersifat sangat memberatkan. Soal yang belum terjawab adalah mengapa para hakim dan penuntut umum Mahmilub memutuskan untuk tidak mengajukan dokumen itu sebagai bukti dan dengan demikian membuat keberadaannya diketahui umum, terutama karena dokumen itu memperlihatkan bahwa Supardjo menaruh simpati kepada PKI dan Sjam memegang peranan memimpin dalam G-30-S. Para hakim tidak meneruskan bertanya kepada Supardjo tentang dokumen itu dan tidak mengungkapkan kepada publik bahwa majelis hakim mempunyainya.[13] Barangkali mereka berpendapat hal itu akan membikin ruwet alur kisah mereka sehingga akan membuka serangkaian pertanyaan yang sama sekali baru. Barangkali mereka mewaspadai dampak yang akan timbul dari dokumen tersebut bagi para aktivis PKI yang masih berjuang melawan tentara Suharto. Supardjo menulis analisisnya untuk membantu mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena sidang-sidang Mahmilub dimaksudkan sebagai pertunjukan dan bukan untuk mencari kebenaran peristiwa, maka kita tidak perlu terlalu heran jika penuntut umum tidak menggunakan dokumen itu untuk mengajukan perkara mereka. Putusan sudah ditetapkan sebelumnya; mereka hanya perlu bergerak mengikuti arus. Lebih dari itu, mahkamah militer tidak mengikuti aturan-aturan pembuktian yang ketat; para hakim mungkin sudah membaca dokumen ini secara pribadi dan tidak harus memasukkannya ke dalam berkas pengadilan agar ia menjadi bagian dari pertimbangan mereka – jika memang ada pertimbangan yang dibuat.

Para penuntut umum dan hakim memutuskan bukti-bukti apa yang akan muncul di persidangan berdasarkan pertimbangan tentang kegunaannya bagi pendapat umum. Rezim Suharto tidak pernah menghendaki masyarakat Indonesia mengkaji peristiwa-peristiwa awal Oktober 1965 dengan kepala dingin dan rasional. Tentara Suharto mengobarkan kampanye pengejaran secara histeris terhadap PKI dan kemudian menciptakan undang-undang antikomunis yang ganjil, yang berlaku begitu jauh sehingga mendiskriminasi anak cucu orang-orang yang dicap PKI oleh pemerintah. Baru pada 1994 rezim ini mengeluarkan buku putih tentang G-30-S, untuk meyakinkan masyarakat Indonesia melalui argumentasi yang rasional bahwa PKI telah memimpin G-30-S, dan, meskipun begitu, yang diterbitkan adalah campur aduk yang absurd dari pernyataan-pernyataan yang belum dibuktikan kebenarannya dan tidak ada rujukannya.[14]

Sedikit sekali keraguan terhadap otentisitas dokumen Supardjo, walaupun ia sendiri menyangkalnya. Naskah ini terlalu rumit untuk dipalsukan. Usaha militer untuk memalsu – pengakuan Aidit dan Njono – sungguh-sungguh kasar. Selain itu, agen-agen intelijen militer tidak akan berusaha begitu keras menyusun dokumen yang demikian ruwet lalu tidak menggunakannya sama sekali. Baik Letnan Kolonel Heru Atmodjo, yang dipenjarakan bersama Supardjo, maupun putra Supardjo, Sugiarto, telah memastikan bahwa Supardjo memang menulis dokumen itu.

KEPEMIMPINAN G-30-S

Walaupun Supardjo mengamati G-30-S dari dekat, ia mengaku bahwa ia sendiri pun bingung siapa sebenarnya yang memimpin G-30-S. Gerakan ini, yang mengabaikan prinsip-prinsip baku organisasi kemiliteran, tidak memiliki komandan tunggal secara keseluruhan yang memberikan perintah dalam rantai komando yang jelas. Kerja sama antara kelompok PKI (Sjam dan Pono) dengan kelompok militer (Untung, Latief, dan Soejono) tersusun sangat longgar, sehingga dua kelompok tersebut terus-menerus berdebat tentang apa yang harus dilakukan, bahkan pada saat-saat kritis ketika keputusan harus segera diambil. Supardjo, sang insan militer, menjadi frustrasi karena tidak dapat menetapkan

siapa sebenarnya yang memegang kewenangan terakhir. Melukiskan hari terakhir, 2 Oktober 1965, ketika mereka dikepung dan pasukan Suharto semakin mendekat, Supardjo menulis, "Apa yang terjadi pada waktu itu adalah suatu debat, atau diskusi yang langiradis [*langdradig,* tak berujung pangkal], sehingga kita bingung melihatnya, siapa sebetulnya komandan, kawan Sjamkah, kawan Untungkah, kawan Latifkah atau Pak Djojo [Mayor Soejono]?"

Dalam pikiran Supardjo calon-calon untuk kedudukan pimpinan semestinya Untung atau Sjam, "Seharusnya operasi berada di satu tangan. Karena yang menonjol pada waktu itu adalah gerakan militer, maka sebaiknya komando pertempuran diserahkan saja pada kawan Untung, dan kawan Sjam bertindak sebagai komisaris politik. Atau sebaliknya, kawan Sjam memegang komando tunggal sepenuhnya." Supardjo benar-benar merasa sangat terganggu oleh masalah kepemimpinan ini. Ia kembali mempersoalkan hal ini dalam bagian belakang analisisnya, "Pertama, perlu ditentukan siapa komandan yang langsung memimpin aksi (kampanye), kawan Sjamkah atau kawan Untung. Kemudian pembantu-pembantunya atau stafnya dibagi." Jelas Sjam memainkan peranan sangat penting di dalam kelompok inti jika Supardjo memandangnya setara dengan Untung selaku pimpinan nominal G-30-S. Walaupun nama Untung di depan umum ditempatkan sebagai komandan (dalam pernyataan pertama yang dibacakan di radio), tampaklah bahwa Sjam yang namanya tidak disiarkan itu setidak-tidaknya mempunyai bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan pada saat aksi dimulai.

Bukannya rantai komando, G-30-S justru menciptakan apa yang Supardjo namakan *baris*. Perkataan yang dipakainya ialah *sjaf*, mengingatkan pada baris-baris seperti orang shalat di masjid. Supardjo melihat ada tiga baris: "a) Kelompok Ketua, b) Kelompok Sjam cs., c) Kelompok Untung cs." Dengan "Kelompok Sjam cs.," rupanya Supardjo bermaksud menyebut kelompok Biro Chusus: Sjam, Pono, dan Bono. Dengan "Kelompok Untung cs.," agaknya yang ia maksud ialah para perwira militer Untung, Latief, dan Soejono. Kelompok pertama, "Kelompok Ketua," tidak dikenali melalui nama-nama orang, seperti dua kelompok lainnya. Walaupun Supardjo secara tidak langsung menyatakan, bahwa tiga kelompok ini bukan merupakan satu garis komando yang ketat (turun dari a ke b ke c), istilah "Kelompok Ketua" benar-benar memberi

kesan bahwa kelompok ini bagaimana pun ada di atas dua kelompok lainnya. Siapakah yang ada di atas Sjam dan Untung? Pada akhir dokumen jawaban pertanyaan itu menjadi jelas. Belakangan Supardjo menyatakan bahwa Kelompok Ketua ialah pimpinan PKI: G-30-S merupakan "operasi yang langsung dipimpin oleh partai." Supardjo menempatkan orang-orang Biro Chusus pada urutan kedua karena mereka berfungsi sebagai pasak penyambung antara pimpinan PKI dan personil militer. Walaupun barangkali Sjam berbagi komando dengan Untung pada hari aksi dimulai, sebenarnya ia tetap berdiri di atas Untung karena ia bagian dari "partai" yang merupakan pimpinan G-30-S sebenarnya.

Kita hendaknya tidak beranggapan bahwa Supardjo mempunyai pengetahuan langsung dan rinci tentang keterlibatan partai dalam gerakan ini. Karena kontaknya dengan PKI hanya melalui Sjam, maka pendapat Supardjo bahwa "partai" memimpin G-30-S pastilah didasarkan atas penyimpulan saja. Mengamati Sjam memainkan peranan memimpin dalam G-30-S dan meyakini bahwa Sjam bertindak atas perintah petinggi-petinggi PKI, Supardjo menyimpulkan bahwa "partai" adalah pimpinan sebenarnya. Setidak-tidaknya ia me-ngetahui bahwa Aidit ada di Halim dan bahwa Sjam berunding dengan Aidit ketika aksi dilakukan. (Supardjo bertemu Dani pada 1 Oktober malam hari untuk minta pesawat terbang AURI untuk melarikan Aidit ke Jawa Tengah). Namun, Supardjo tidak mungkin mengetahui siapa lagi, jika pun memang ada, orang partai yang terlibat. Tidak sepatah kata pun dalam dokumen itu yang menyatakan bahwa Supardjo mengetahui peranan masing-masing yang dimainkan oleh Aidit, Politbiro, dan Comite Central. Sebagai seorang tentara, ia tidak akan mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang proses pengambilan keputusan di dalam partai. Ketika Supardjo bicara tentang "partai," hendaknya kita tidak memahaminya seakan-akan ia tahu dengan pasti bahwa pimpinan partai secara keseluruhan telah merancang G-30-S, alih-alih mendukung atau mengetahui tentangnya. Bagi Supardjo, "partai" ialah kependekan dari Aidit dan tokoh-tokoh lain tak dikenal di atas Sjam. Dakwaan Supardjo bahwa "partai" memimpin G-30-S tidak membuktikan bahwa PKI bertanggung jawab *sebagai satu lembaga*. Ia mungkin hanya bisa tahu dengan pasti bahwa Sjam memimpin G-30-S dan dengan satu atau lain cara juga bekerja sama dengan Aidit.

Menurut penglihatan Supardjo, Sjam adalah penghubung antara

Kelompok Ketua dan para perwira militer yang menyediakan dirinya untuk melayani partai. Dengan demikian Sjam mempunyai wewenang lebih besar di dalam G-30-S dibanding para perwira tersebut. Mengingat pernyataan Supardjo, kesaksian Sjam tentang hal ini mungkin sekali benar, "Dalam G-30-S ini saja pegang pimpinan politiknja dan sdr Untung pegang pimpinan militernja, tetapi pimpinan militer ini dibawah pimpinan politik. Djadi segala kejadian jang terjadi dalam G-30-S adalah saja jang bertanggung djawab."[15]

Dalam persidangannya Supardjo mengakui bahwa ia menjadi terlibat di dalam G-30-S karena hubungannya dengan Sjam. Ia bertemu Sjam pertama kali, dikatakannya, pada 1965 dan kadang-kadang menggunakannya sebagai sumber intelijen militer. Bagi Supardjo, Sjam adalah orang yang memiliki banyak koneksi dan informasi melimpah tentang soal-soal politik dan militer. Ia mengenal Sjam baik sebagai "wakil" PKI dan sebagai "intel tentara" yang mempunyai kartu identitas tentara.[16] Ketika Supardjo terbang ke Jakarta dari front Malaysia pada 28 September 1965, ia langsung menuju ke rumah Sjam hanya beberapa jam sesudah mendarat. Ia mengunjungi Sjam lagi malam berikut dan berdiskusi dengannya tentang aksi yang akan datang. Pada 30 September malam, Supardjo pergi lagi ke rumah Sjam dan berangkat bersama dengannya ke pangkalan AURI di Halim untuk memulai aksi. Supardjo tidak banyak dikenal, kalau bukan sama sekali tidak dikenal, oleh para perwira lain dalam G-30-S seperti misalnya Untung dan Latief.

Dalam analisis *postmortem*-nya Supardjo menjelaskan bahwa ia bersedia bergabung dengan G-30-S karena ia berpikir partai mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika itu PKI mempunyai nama baik karena disiplin yang tinggi dan terorganisasi secara ketat. Bagaimana pun juga, PKI merupakan organisasi raksasa dengan jutaan anggota di seluruh negeri, dari para menteri dalam kabinet Sukarno sampai ke petani buta huruf di desa-desa terpencil yang tidak mudah dicapai, dan mampu menjalankan kegiatan-kegiatan yang keragamannya mengesankan. PKI menyelenggarakan sekolah-sekolahnya sendiri, menerbitkan surat kabar-surat kabar, mementaskan pertunjukan kesenian. Banyak ilmuwan sukar mengerti mengapa PKI mengorganisasi G-30-S justru karena gerakan itu merupakan operasi yang sedemikian semrawut dan amatiran. Supardjo menduga bahwa partai mempunyai penglihatan yang

lebih jauh ketimbang dirinya dan telah merancang sebuah rencana brilian yang tak mungkin salah. Ia mengakui sungguh merupakan kekeliruan yang sangat besar di pihaknya karena telah "menilai kemampuan kawan pimpinan operasi terlalu tinggi." Ketika ia bergabung dengan G-30-S, ia mempunyai kepercayaan penuh terhadap "pimpinan" kendati ia ragu terhadap kemungkinan gerakan tersebut akan berhasil, "Meskipun fakta-fakta nyata tidak logis. Tetapi percaya bahwa pimpinan pasti mempunyai perhitungan yang ulung, yang akan dikeluarkan pada waktunya. Sesuatu keajaiban pasti akan diperlihatkan nanti, sebab pimpinan operasi selalu bersemboyan: 'Sudah kita mulai saja, dan selanjutnya nanti jalan sendiri.'"

Penjelasan Supardjo tentang kesediaannya mengikuti G-30-S mungkin dapat memberi petunjuk tentang alasan mengapa para perwira militer lain, seperti Untung, Latief dan Soejono, juga bersedia ikut. Supardjo mengatakan bahwa para perwira militer itu sangat meragukan keberhasilan rencana yang diajukan Sjam dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memutuskan untuk menarik diri.[17] Perwira-perwira seperti Supardjo bertahan, kendati ragu, hanya karena mereka percaya kepada kebijaksanaan kepemimpinan sebuah partai yang telah sangat berhasil dalam mengorganisasi jutaan rakyat.

Kebimbangan para pimpinan inti pada hari dimulainya aksi tampaknya merupakan akibat dari ambiguitas dalam peranan mereka masing-masing. Supardjo menampilkan G-30-S sebagai sesuatu yang sejak awal telah terjangkiti ketidakajegan di dalam tubuhnya. Di satu pihak, Sjam adalah pimpinan keseluruhan yang mendorong para perwira militer bergabung dengan jaminan akan berhasil; oleh karenanya para perwira itu tunduk kepada kepemimpinannya. Di pihak lain Sjam, karena telah memulai operasi, bergantung kepada para perwira militer untuk pelaksanaan operasi itu. Ia harus pasrah kepada mereka sementara operasi berjalan karena ia seorang sipil yang tidak dapat memimpin pasukan. Supardjo, walaupun sadar bahwa Sjam adalah pimpinan, bingung melihat pengambilan keputusan dalam kelompok inti dan terpaksa bertanya, "Siapa sebetulnya komandan?"

Nama-nama para wakil komandan yang diumumkan melalui radio tidak ada hubungannya dengan rantai komando yang sebenarnya. Empat orang yang tersebut dalam daftar nama itu semuanya tidak mempunyai

kewenangan dalam G-30-S. Supardjo, yang tersebut di urutan pertama, tidak memimpin satu pasukan pun dalam aksi ini. (Ia mengakui dalam analisisnya bahwa pada hari terakhir ia minta agar diberi kewenangan mengomando sisa-sisa pasukan G-30-S tapi ia tak pernah menerima jawaban tegas dari Sjam dan Untung). Dalam kesaksiannya di ruang sidang Supardjo menyangkal bahwa ia pernah diajak berunding tentang daftar nama-nama wakil komandan; namanya "ditulis menurut kemauan mereka sadja."[18] (Supardjo tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan "mereka" itu. Kita hanya dapat menduga-duga mungkin yang dimaksud ialah Sjam dan Pono). Ketika saya mewawancarai perwira lain yang tercantum dalam daftar sebagai wakil komandan, Letnan Kolonel Heru Atmodjo, ia menyangkal bahwa ia tahu tentang daftar para wakil komandan itu, apalagi ikut menandatanganinya. Ia menyatakan Sjam dan Pono mencantumkan namanya dalam daftar dan belakangan, ketika ia sudah di penjara, Pono minta maaf kepadanya karena telah mencantumkan namanya tanpa minta izin.[19] Sjam memerlukan nama empat perwira, satu orang dari setiap angkatan di militer, untuk memperlihatkan bahwa G-30-S mendapat dukungan luas di dalam angkatan bersenjata. Simbolisme serupa ini lebih penting ketimbang sumbangan konkret mereka bagi G-30-S. Barangkali Sjam menduga bahwa mereka akan bahagia karena akan dikenal sebagai wakil komandan seandainya G-30-S berhasil. Supardjo mencatat bahwa "pimpinan" (ini sekali lagi tentu saja Sjam) mengatakan, "Ya, Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tetapi kalau sudah menang, banyak yang mau ikut."

Salah satu aspek paling menarik dalam analisis Supardjo ialah pembedaan yang dibuatnya antara rencana semula dan rencana perbaikan. Kesalahan "partai," menurut Supardjo, adalah merebut rencana yang sudah dibuat para perwira "demokrasi revolusioner" untuk menghadapi kepemimpinan militer sayap kanan. Ia menyebut adanya rencana semula yang terdiri atas dua tahap, dengan tahap pertama "hanya terbatas gerakan didalam tubuh AD" dan "bersifat intern AD." Tujuan tahap pertama ini untuk menyingkirkan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang pro-Amerika dan tidak melibatkan PKI sama sekali. Para perwira militer pendukung Sukarno itu sendiri yang harus melaksanakan tahap pertama rencana ini. Di dalam proses yang tidak dijelaskan oleh Supardjo, rencana tersebut ditinggalkan. Lalu terjadi "dipindahnya rencana operasi yang

semula bersifat intern AD, menjadi operasi yang langsung dipimpin oleh partai, sehingga menyebabkan terseretnya partai dan diobrak-abriknya partai."

Mengikuti penjelasan tersebut, tampaklah bahwa Sjam dan atasannya langsung, Aidit, menyadari adanya perwira-perwira "demokrasi revolusioner" itu dan menunggu mereka untuk bergerak. Supardjo tidak menjelaskan bagaimana, menurut ketentuan-ketentuan rencana semula, para perwira ini harus "merebut pimpinan AD." Barangkali mereka bermaksud mengikuti rute administratif: mereka akan menekan Sukarno untuk mengganti Yani dan Nasution dengan perwira-perwira yang sungguh-sungguh setia terhadap kebijakan-kebijakannya, dan penggantian ini akan mengalihkan atau menyingkirkan perwira-perwira yang pro-Amerika. Atau barangkali para perwira "demokrasi revolusioner" itu diharap akan mengikuti model *putsch* klasik dan menggunakan pasukan mereka untuk "merebut kepemimpinan AD" secara paksa dengan cara-cara serupa dengan yang ditempuh G-30-S. Supardjo tidak menjelaskan siapa saja perwira-perwira yang terlibat dalam rencana semula ini.

Bahwa Supardjo keberatan dengan PKI mengambil alih apa yang direncanakan sebagai operasi intern militer ditegaskan kepada saya oleh Rewang, mantan anggota Politbiro CC-PKI, yang pernah berbincang dengan Supardjo suatu saat di tahun 1967 ketika mereka berdua ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta. Supardjo mengatakan kepada Rewang barangkali akan lebih baik seandainya PKI tidak "campur tangan" dan membiarkan para perwira militer itu sendiri melawan Dewan Jenderal.[20]

Menurut Supardjo, dalam tahap pertama rencana aslinya, front kekuatan pro-Sukarno yang seluas-luasnya akan menumbangkan jenderal-jenderal yang sudah berkomplot dengan Amerika Serikat dan Inggris. Sekali tahap pertama ditunaikan dan Angkatan Darat sudah ada di tangan perwira-perwira Sukarnois dan berhaluan kiri, PKI akan mampu memobilisasi massanya tanpa perlu takut represi militer. Demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi PKI akan "dibayangi oleh militer-militer yang progresif." Jika tahap pertama revolusi merupakan gerakan para perwira militer yang sepenuhnya nasionalis, tahap kedua akan merupakan "gerakan PKI seluruhnya." Supardjo tidak menyebut kapan dan bagaimana tepatnya rencana asli ini ditinggalkan.

Dalam kesaksiannya di sidang pengadilan Supardjo menyatakan bahwa ia dan para perwira militer lain berpikir tentang bagaimana caranya melawan jenderal-jenderal yang anti-Sukarno. Ia menegaskan bahwa ia dan Dani merencanakan bertemu presiden pada 3 Oktober untuk membicarakan masalah Dewan Jenderal dengannya.[21] Sukarno sendiri khawatir terhadap kup Angkatan Darat pada pertengahan 1965. Ia yakin bahwa CIA sedang bersiasat untuk menentangnya, terutama sejak kedatangan Marshall Green sebagai Duta Besar Amerika Serikat pada bulan Juli.[22] Green adalah Duta Besar untuk Korea Selatan pada 1961 ketika Jenderal Park Chung Hee melancarkan kup terhadap pemerintahan sipil Chang Myon dan menggantikannya dengan pemerintahan junta militer.[23] Kita dapat menduga bahwa kaum loyalis Sukarno di kalangan militer sudah banyak berdiskusi tentang kemungkinan adanya kup dan melontarkan banyak gagasan tentang bagaimana melawan jenderal-jenderal Angkatan Darat sayap kanan. Bagi Supardjo G-30-S berasal dari inisiatif partai (dari sudut Supardjo berarti Sjam). Partai mencampuri rencana kalangan perwira pro-Sukarno yang hendak menghadapi Dewan Jenderal itu sendiri.

Kesimpulan Supardjo dapat diandalkan: G-30-S gagal justru karena gerakan ini dipimpin seorang sipil, Sjam, yang tahu sedikit sekali tentang prosedur-prosedur kemiliteran yang tepat. Dengan menempatkan diri sebagai orang yang berwenang atas sebuah aksi militer, Sjam menimbulkan kekacauan tentang garis komando di dalam kelompok inti. Ia tidak merumuskan dengan tepat sifat peranannya dan batas kewenangannya. Para perwira mengabaikan perhitungan militer mereka yang ketat dan menyerahkan kepercayaan mereka kepada Sjam karena ia menyatakan bekerja atas nama partai politik yang kuat, terorganisasi baik, dan berpengetahuan luas. Dengan campur tangan Sjam sifat militer G-30-S lalu menjadi lemah.

RENCANA

Penggambaran Supardjo tentang pimpinan G-30-S yang tak bernama itu bukanlah penggambaran yang bersifat menyanjung. Ia tokoh yang keras kepala, angkuh, abai terhadap pembimbang, dan bersikeras melak-

sanakan rencananya. Supardjo menulis, “Waktu diajukan pendapat, apakah kekuatan yang ada dapat mengimbangi, maka jawaban dengan nada menekan, bahwa bila mau revolusi sedikit yang turut, tetapi kalau revolusi berhasil coba lihat nanti banyak yang turut.” Di saat lain dalam proses persiapan mereka yang bimbang ditakut-takuti hingga terdiam. Ketika seseorang (mungkin Supardjo sendiri) bertanya apa yang akan dilakukan pimpinan jika tentara dari Jawa Barat, yang dekat dengan Jakarta, melancarkan serangan balik, tanggapan yang diberikan tidak menjawab pertanyaan, tapi hanya memerintahkan supaya orang tidak kehilangan komitmennya, “Sudah, jangan pikir-pikir mundur!” Seakan-akan sekadar berpikir tentang rencana cadangan untuk menghadapi keadaan darurat saja sudah dipandang sebagai ajakan untuk menyerah. Supardjo menyebut bahwa keraguan akan loyalitas pasukan terhadap aksi ini “ditutup dengan semboyan ‘apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi.’” Pimpinan begitu berseregang melancarkan aksi tersebut sehingga tidak membolehkan orang bertanya, alih-alih mengkritik. Gertakan ini sampai begitu jauh sehingga para pelaku gerakan di daerah-daerah yang melapor kepada “pimpinan” di Jakarta merasa terpaksa harus menyatakan bahwa mereka telah siap untuk melaksanakan aksi. Supardjo menulis, “Waktu info-info masuk dari daerah-daerah, sebetulnya daerah belum dalam keadaan siap sedia. … Di Bandung [belum] siap sepenuhnya tapi untuk tidak repot-repot menghadapi pertanyaan-pertanyaan dijawab saja ’Sudah beres.’” Mengingat pendapat Supardjo bahwa “partai” yang memimpin G-30-S, pimpinan congkak yang tak bernama ini tentulah Sjam.[24]

Mengikuti penuturan Supardjo, Biro Chusus mengelabui diri sendiri dengan menganggap ambisinya sebagai pencapaian. Biro Chusus percaya bahwa janji dukungan dari seorang perwira otomatis berarti bahwa semua perwira dan prajurit bawahannya akan bergabung dalam aksi ini. Dengan adanya tekanan agar menyenangkan hati pimpinan yang suka menggertak, beberapa anggota Biro Chusus menjanjikan lebih dari yang mampu mereka laksanakan. Pimpinan tidak pernah mempelajari dengan teliti pasukan mana yang sebenarnya akan bisa bergabung. Supardjo menulis, “Biasanya kalau ada 10 orang saja dalam satu peleton yang sudah dapat kita hubungi, dilaporkan bahwa seluruh peletonnya sudah kita (kawan). Kalau ada seorang dan yon yang kita hubungi, maka

ada kemungkinan bahwa seluruh batalyon itu sudah kawan." Ulasan Supardjo dapat dipercaya karena gerakan ini agaknya mengharapkan partisipasi brigade Latief (yang terdiri dari tiga batalyon) atau sekurang-kurangnya sebagian darinya dan tentunya menjadi kecewa ketika ternyata tidak lebih dari beberapa peleton saja yang muncul.

Ketika anggota-anggota Biro Chusus dari berbagai penjuru negeri mengirim laporan yang menggembirakan, Sjam tampaknya menjadi yakin bahwa G-30-S tidak mungkin gagal. Ia mendapat kesan bahwa tentara di segenap penjuru negeri siap untuk sebuah pemberontakan. Supardjo menyimpulkan bahwa G-30-S cenderung dirancang lebih sebagai sumbu sebuah bom ketimbang bom itu sendiri. Aksi di Jakarta diharapkan akan menyulut serangkaian aksi-aksi serupa di luar Jakarta. Gerakan 30 September tidak memikirkan keharusan mengoordinasi berbagai aksi itu dengan cermat dan menyusun cetak biru secara rinci tentang bagaimana gerakan itu harus diperluas. Supardjo menulis, "Strategi yang dianut dalam gerakan keseluruhan adalah semacam strategi: 'Bakar petasan.' Cukup sumbunya yang dibakar di Jakarta dan selanjutnya mengharap dengan sendirinya bahwa merconnya akan meledak di daerah-daerah."

Pimpinan G-30-S tidak memeriksa sebelumnya apakah petasan-petasan sudah siap meledak; mereka sekadar memercayai "suara-suara yang belum diperiksa kebenarannya," bahwa petasan-petasan tersebut sudah siap. Pimpinan tidak membangun saluran-saluran komunikasi yang jelas antara Jakarta dan daerah-daerah sehingga mereka dapat memastikan bahwa daerah-daerah memang paham tentang rencana mereka. Sjam tidak menggunakan telepon atau radio untuk menyampaikan instruksi ke daerah-daerah; ia mengirim penghubung yang membawa instruksi itu. Tidak semua penghubung tiba di tempat tujuan tepat waktu, "Masih banyak penghubung-penghubung belum sampai di daerah-daerah yang dituju dan peristiwa sudah meletus (kurir yang ke Palembang baru sampai di Tanjung Karang)." Keputusan untuk memulai aksi pada 1 Oktober agaknya baru ditetapkan satu hari sebelumnya. Untuk kurir-kurir yang bergantung pada bis, kereta api, dan feri antarpulau untuk menempuh jarak yang jauh waktu satu hari tentu saja tidak cukup.

Pembahasan Supardjo tentang "teori sumbu" terasa mendua. Kadang kala tampak seakan ia berbicara tentang mercon sebagai pemberontakan kaum sipil. Dalam salah satu bagian ia menggunakan istilah *pemberontakan*

rakyat, "Saya berpendapat, bahwa strategi kawan pimpinan adalah strategi menyundut sumbu petasan di ibu kota, dan diharapkan mercon yang akan meledak dengan sendirinya, yang berupa pemberontakan Rakyat dan perlawanan di daerah-daerah setelah mendengar isyarat tersebut." Mengingat kutipan ini tertera pada alinea tentang kekuatan pasukan, mungkin sekali Supardjo sedang memikirkan masalah "pemberontakan rakyat dan perlawanan" oleh pasukan tentara, bukan orang-orang sipil. Suatu "pemberontakan rakyat" akan berarti suatu pemberontakan oleh pasukan berpandangan progresif yang akan membangkitkan massa di belakang mereka. Kalimat berikutnya menjelaskan tentang konsekuensi dari strategi menyulut sumbu ini: Pimpinan gerakan "tidak bekerja dengan perhitungan kekuatan yang sudah kongkrit." Maka kelihatannya yang dirujuk Supardjo ke petasan ialah pasukan militer bukan sipil.

Jika kita harus memercayai kesaksian Sjam di ruang pengadilan, ia memperhitungkan G-30-S akan mempunyai enam batalyon: satu dari brigade Latief, satu dari pasukan kawal istana Untung, satu dari pasukan AURI Soejono, satu dari Jawa Tengah, satu dari Jawa Timur, dan satu terdiri atas orang-orang sipil dari PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI.[25] Patut diragukan, apakah enam batalyon akan memadai, apalagi ternyata hanya lima batalyon yang terdiri atas pasukan konkret dan tak satu pun melibatkan pasukan dengan kendaraan berlapis baja (dalam kesaksiannya Sjam tidak menyebut tentang tidak adanya tank). Pada saat aksi berlangsung G-30-S tidak dapat mengerahkan seluruh batalyon. Gerakan ini hanya mempunyai sebagian dari kompi-kompi Untung dan sebagian kecil dari pasukan Latief. Kecuali satu kompi yang dikirim ke Gambir, batalyon sukarelawan sipil sepanjang hari hanya bersiap siaga saja. Pasukan Soejono tetap di pangkalan udara Halim dan memberikan sedikit bantuan yang berarti kepada G-30-S selain memasok senjata dan amunisi.

Walaupun para penggerak G-30-S memperhitungkan mereka akan memperoleh pasukan lebih banyak dari yang kemudian muncul di Lubang Buaya pada malam hari 30 September, mereka tidak terlalu peduli terhadap kekuatan pasukan. Mereka tidak berpikir mereka memerlukan kekuatan yang mencengangkan untuk menguasai ibu kota. Dalam dokumennya Supardjo mengakui ia dapat menerbangkan tiga batalyon dari Kalimantan. Prajurit-prajurit ini, yang berjumlah kira-kira 2.500 orang,

akan dapat menambah kekuatan pasukan G-30-S sekitar seratus persen. Gerakan 30 September berlangsung tanpa pasukan Supardjo. Barangkali para pimpinan berpikir bahwa gerak pasukan sedemikian besar-besaran dari Kalimantan ke Jakarta hanya akan menarik perhatian yang tidak semestinya. Namun, tampaknya Supardjo berpendapat bahwa pasukannya dapat diterbangkan sesudah aksi berjalan. Jika G-30-S mampu tetap berlawan dan tidak tumbang begitu cepat, gerakan ini akan beroleh kesempatan untuk menambah pasukannya secara substansial.

Supardjo juga mengemukakan bahwa para penggerak G-30-S tidak mempunyai rencana cadangan seandainya mengalami kekalahan. Mereka tidak mempertimbangkan aksi ini dengan cukup cermat untuk menangkap titik-titik lemahnya dan bagaimana ia bisa gagal. Tidak ada rencana B. Supardjo merasa ia harus mengajar anggota-anggota pimpinan partai yang masih hidup dengan pelajaran dasar kemiliteran, "Menurut lajimnya dalam operasi-operasi militer, maka kita sudah memikirkan kemunduran waktu kita maju dan menang, dan sudah memikirkan gerakan maju menyerang, waktu kita dipukul mundur. Hal demikian, maksud kami persoalan mundur dalam peperangan bukanlah persoalan hina, tetapi adalah prosedur biasa pada setiap peperangan atau kampanye." Sjam, yang agaknya menjadi sasaran kritik Supardjo, begitu lalai sehingga tidak membikin "gambaran pertempuran (*picture of the battle*)" untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan tak terduga. Secara tidak langsung Supardjo menyatakan Sjam berpikir bahwa sekadar menimbang langkah mundur saja sudah merupakan pertanda kelemahan yang memalukan. Dengan bergegas menyerbu ke medan pertempuran Sjam mengikuti semangat Napoleon "*on s'engage et puis on voit*" (seseorang menerjunkan diri lalu melihat apa yang terjadi), tapi tidak memiliki kecerdikan legendaris sang jenderal dan, tentu saja, legiun prajuritnya yang terlatih dan terorganisasi dengan baik.

Bukan saja tidak ada rencana B, tapi rencana A pun tidak sepenuhnya dipersiapkan. Dalam sebuah alinea sangat penting Supardjo menulis, "Rencana operasinya ternyata tidak jelas. Terlalu dangkal. Titik berat hanya pada pengambilan 7 jendral. Bagaimana kemudian bila berhasil, tidak jelas, atau bagaimana kalau gagal juga tidak jelas." Supardjo menambahkan, "Karena tidak ada uraian yang jelas bagaimana aksi itu akan dilaksanakan maka terdapat kurang kesepakatan tentang gerakan itu

sendiri di kalangan kawan-kawan perwira di dalam Angkatan Darat."

Banyak kritik Supardjo terhadap G-30-S didasarkan pada paradigma tentang operasi militer yang semestinya: harus ada garis komando yang jelas, hirarki personil demi pembagian kerja yang efektif, agenda yang rinci tentang bagaimana aksi akan berjalan dari awal sampai akhir, dan perencanaan serba kemungkinan yang teliti termasuk skenario alternatif dan rencana mundur. Supardjo mengaitkan kegagalan G-30-S untuk menyusun rencana yang berhasil guna dengan kecongkakan pimpinan, maksudnya terutama Sjam. Congkak, bersikeras untuk terus maju, menutup telinga terhadap kritik, Sjam meyakinkan dirinya sendiri bahwa aksi itu tak mungkin gagal.

PELAKSANAAN RENCANA

Ketiadaan perencanaan yang seksama dan ketakacuhan pimpinan pada prosedur kemiliteran berakibat terhadap kinerja yang luar biasa serampangan. Jika seseorang membuat film berdasarkan analisis Supardjo, karyanya tidak akan terlihat seperti film pesanan rezim Suharto, *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film itu melukiskan para organisator G-30-S sebagai sekumpulan konspirator-konspirator licik yang kejam, yang merencanakan setiap gerak-geriknya sampai seluk-beluk terakhir. Analisis Supardjo mengungkapkan bahwa para konspirator itu sama sekali gelagapan, bimbang, dan berantakan. Bukannya tampil sebagai penjahat-penjahat yang panjang akal dalam tradisi film spionase, mereka lebih seperti pemain-pemain amatir canggung yang, dengan langgam tragis, memainkan komedi kesalahan. Bagi Supardjo G-30-S pada pokoknya menghancurkan dirinya sendiri dan harus menjadi bahan studi kasus tentang bagaimana suatu operasi militer seharusnya tidak dilaksanakan.

Tujuan operasi militer yang sangat terbatas itu tidak sepenuhnya tercapai. "Titik berat seluruh strategi," sebagaimana dilukiskan Supardjo, ialah menculik tujuh jenderal. Ini gagal karena persiapan yang terburu-buru. Di Lubang Buaya pada pagi buta 1 Oktober, Supardjo dikejutkan oleh kekacau-balauan. Bahkan sampai tahap yang demikian lanjut pun "hal yang penting belum terselesaikan." Sandi belum diputuskan, amunisi

belum datang, dan pasukan Angkatan Udara datang terlambat. Para prajurit dan pemuda sipil secara serampangan dibagi ke dalam satuan-satuan penculikan, "Penentuan dari peleton-peleton yang diharuskan untuk tiap-tiap sasaran, tidak dilakukan dengan teliti. Misalnya, terjadi bahwa sasaran utama [kemungkinan Nasution] mula-mula diserahkan pelaksanaannya kepada peleton dari pemuda-pemuda yang baru saja memegang bedil, kemudian diganti dengan peleton lain dari tentara, tetapi ini pun bukan pasukan yang secara mental telah dipersiapkan untuk tugas-tugas khusus." Regu yang dikirim untuk menculik Nasution dipimpin oleh seorang prajurit, padahal enam regu lainnya semuanya dipimpin seorang kopral, sersan, atau letnan. Pimpinan gerakan mengetahui bahwa menculik Nasution dan Yani akan menjadi tugas tersulit karena kedua jenderal ini mempunyai pengawal bersenjata yang ditempatkan di depan kediaman mereka. Itulah sebabnya regu penculikan Nasution dan Yani secara substansial lebih besar ketimbang regu-regu lain; sekitar seratus orang dikirim dalam empat truk untuk menangkap Nasution, dibandingkan dengan hanya sembilan belas orang untuk Suprapto. Prajurit-prajurit yang paling berpengalaman dan berbakat tidak ditugasi untuk memimpin regu-regu dengan prioritas utama. Nasution lolos, dan Yani ditembak di rumahnya.

Supardjo tidak menjelaskan apa sasaran G-30-S, tapi orang menduga untuk menangkap hidup-hidup para jenderal tersebut. Regu-regu penculikan menggunakan kekerasan hanya ketika menghadapi perlawanan, dan sekalipun begitu mereka agaknya tidak bermaksud untuk membunuh jenderal-jenderal itu. Seorang prajurit yang ikut dalam penculikan, Sersan Mayor Bungkus dari pasukan kawal istana, menceritakan kepada saya, ia menduga rencana semula ialah untuk menghadapkan para jenderal kepada Sukarno. Rencana itu harus ditinggalkan karena tiga jenderal mengalami luka berat atau tewas. Gerakan 30 September tidak mungkin menyeret tiga tubuh berdarah-darah ke hadapan presiden. Begitu rencana semula gagal, tiga jenderal lainnya yang masih hidup dianggap tanpa guna. Pada saat itu salah seorang dalam gerakan memutuskan bahwa pilihan yang terbaik ialah membunuh semuanya, termasuk juga letnan yang menjadi sasaran salah ambil, dan kemudian menyembunyikan mayat-mayat mereka. Namun begitu mungkin juga G-30-S tidak bermaksud menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Sukarno. Bungkus juga

mengatakan, pada saat pemberian arahan pasukan diberi tahu bahwa jenderal-jenderal itu akan melancarkan kup sehingga mereka tidak boleh dibiarkan lolos dari penangkapan.[26]

Kesalahan besar yang lain, menurut Supardjo, adalah G-30-S tidak mengambil keuntungan dari sebagian besar pasukannya. Kompi-kompi dalam batalyon-batalyon dari Jawa Tengah dan Timur tidak ditugasi untuk mencapai tujuan strategis apa pun dan akhirnya menjadi satuan-satuan penghias yang sia-sia. Sebagian besar ditugasi menjaga istana presiden yang kosong. Mereka menganggur saja di tengah lapangan depan istana sampai sore hari. Para penggerak G-30-S barangkali mengetahui bahwa Sukarno tidak ada di istana setidaknya pada pukul 9.30 pagi, ketika Supardjo kembali ke Halim dengan helikopter dari istana. Tapi dua batalyon itu tidak diberi tugas yang berbeda. Memang tampaknya sejak awal pimpinan tidak mempunyai tujuan khusus bagi mereka. Seperti yang digambarkan Supardjo tentang rencana itu, "Satu batalyon diperkirakan dari Jateng dapat digunakan, dan satu batalyon dari Jatim bisa digunakan sebagai figuran." Rupa-rupanya tugas mereka sekadar untuk memengaruhi masyarakat dengan dampak psikologis karena melihat adanya pasukan-pasukan yang menduduki pusat kekuasaan negara.

Sebagai seorang ahli siasat yang berpengalaman, Supardjo tidak menyalahkan G-30-S karena mempunyai pasukan terlalu kecil. Ia tahu kekuatan pasukan bukan faktor mahapenting dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Penempatan pasukan yang tepat, kecepatan bergerak, dan unsur pendadakan dapat mengimbangi kurangnya jumlah pasukan. Ia menulis bahwa "satu batalyon yang panik akan dapat dikuasai oleh hanya kekuatan satu regu saja." Ia percaya bahwa G-30-S tidak memerlukan jumlah pasukan yang besar, tapi cukup penggunaan pasukan secara bijaksana.

Sebagaimana G-30-S tidak mengambil keuntungan penuh dari pasukan yang ada di bawah komandonya, aksi ini juga tidak mengambil keuntungan dari stasiun radio. Supardjo mengenal nilai komunikasi radio dalam pelaksanaan kekuasaan. Penguasaan atas pemancar-pemancar radio nasional "dapat disamakan dengan puluhan divisi tentara." Tapi G-30-S menggunakan radio hanya "untuk membacakan beberapa pengumuman saja." Supardjo berpendapat bahwa sesuatu aksi yang diorganisasi dengan seksama harus menyiapkan arus propaganda terus-menerus

dan harus menjelaskan tujuannya dengan rinci dan teliti. Masyarakat hampir tidak dapat memahami, apalagi mendukung, G-30-S berdasarkan pengumuman-pengumuman singkat yang membingungkan. Supardjo mengemukakan kekurangan ini namun tidak memberi penjelasan mengenainya.

Bahwa G-30-S menyia-nyiakan kekuatan yang sudah dimilikinya itu satu masalah. Masalah lain ialah bahwa kekuatan G-30-S sejak awal rentan. Gerakan ini tidak menguasai pasukan yang mengerti dan mendukung tujuannya. Cukup mengejutkan, dari semua pasukan yang terlibat, Supardjo melihat hanya satu kompi saja yang secara ideologis setia kepada G-30-S, "Waktu dihitung-hitung kembali kekuatan yang bisa diandalkan hanya satu kompi dari Cakrabirawa." Adapun pasukan-pasukan lain, seperti misalnya dari garnisun Jakarta (di bawah Latief) dan dari AURI (di bawah Soejono), sekadar mengikuti arahan dari perwira-perwira komandan mereka dan memiliki sedikit saja atau tidak sama sekali kesetiaan pribadi kepada gerakan ini. Para perwira dari Batalyon 530, yang menghabiskan hari berpangku tangan di depan istana, setuju menyeberang saat lepas tengah hari dengan membawa seluruh batalyonnya masuk markas Kostrad, di sisi timur Lapangan Merdeka.

Desersi Batalyon 530 itu bukan hanya sebagai akibat kurangnya kesetiaan ideologis kepada pihak para perwira dan prajurit, tetapi juga sebagai akibat tidak adanya ransum makan untuk mereka. Bukan lagi rahasia bahwa pasukan ini berpaling ke markas Kostrad saat mereka kelaparan. Sejak ditempatkan untuk menjaga istana pada pagi buta, pasukan tidak diberi sarapan atau makan siang. Supardjo, dengan pengalaman kemiliteran yang tentu pernah mengajarkan betapa penting perbekalan makan, menegaskan kesalahan ini, "Semua kemacetan G-30-S pasukan disebabkan di antaranya *the lack of food* [ketiadaan makanan]. Mereka tidak makan pagi, siang dan malam." Supardjo mengatakan bahwa kelompok inti perencana di Halim mengetahui pasukannya tidak mendapat makan hanya sesudah Supardjo mengusulkan untuk menyerang Kostrad, "Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerbu ke dalam kota. Pada waktu itu Batalyon Jateng [454] berada di Halim. Batalyon dari Jatim [530] sudah ditarik ke Kostrad dengan alasan makanan."

Dengan pasukan yang digelar dengan sangat buruk, tidak siap secara

ideologis, dan demoralisasi akibat lapar, G-30-S terbukti menjadi sebuah bencana dalam kerangka pandang militer. Gerakan ini tidak mampu bertahan cukup lama sehingga masyarakat dapat berbaris di belakangnya. Gerakan 30 September mengumumkan keberadaannya melalui RRI Pusat sekitar pukul 7.15 pagi, dan kira-kira dua belas jam kemudian pasukan yang setia kepada Suharto merebut kembali stasiun radio serta menyatakan melalui udara bahwa G-30-S telah dipatahkan.

PARTISIPASI KAUM SIPIL

Gerakan 30 September tidak dirancang sebagai aksi militer murni. Para konspirator telah merekrut anggota-anggota organisasi afiliasi PKI untuk menjadi pasukan bantuan dan menyediakan bantuan logistik, terutama makanan dan air. Supardjo mencatat, pasukan menjadi kelaparan karena orang-orang sipil yang seharusnya memasok mereka tidak muncul. Jakarta, menurut Supardjo, dibagi menjadi tiga sektor (utara, tengah, dan selatan) dan ada seorang komandan yang ditugasi di setiap sektor. Para komandan sektor itu "bertugas di antaranya mengurus soal-soal administrasi terhadap pasukan yang beroperasi dan berada di masing-masing sektornya." Tapi pada saat aksi dimulai para komandan sektor ini tidak dapat ditemukan di mana pun, "Waktu sektor-sektor itu dihubungi, semua-semua tidak ada di tempat." Semua komandan sektor telah menghilang. Ternyata "semua sektor seperti yang ditetapkan, hanya tinggal di atas kertas saja." Supardjo mengecam para penyelenggara aksi karena tidak memeriksa sektor-sektor sebelumnya dan memastikan bahwa para pimpinan sektor tahu benar apa yang harus mereka lakukan.

Analisis Supardjo tentang sektor-sektor ini ternyata tidak tepat. Hal ini sekali lagi memperlihatkan dirinya tidak begitu mengenal PKI dan aspek-aspek tertentu dalam G-30-S. Njono, ketua PKI Comite Djakarta Raja (CDR) dan anggota Politbiro, di depan sidang Mahmilub terhadap dirinya menyatakan bahwa ia membagi ibu kota dalam sektor-sektor.[27] Tapi menurutnya ada enam sektor, bukan tiga, seperti dikemukakan Supardjo, dan bahwa personil yang dikelompokkan dalam sektor-sektor ini adalah sukarelawan sipil yang tidak bertanggung jawab terhadap pemasokan makanan untuk pasukan reguler.[28] Njono telah mengerahkan

dua ribu orang, umumnya dari organisasi pemuda PKI, Pemuda Rakjat, untuk bertugas sebagai tenaga cadangan untuk operasi-operasi militer. Pemuda-pemuda ini telah menerima latihan kemiliteran di Lubang Buaya dalam bulan-bulan sebelumnya. Sukarelawan yang menduduki gedung telekomunikasi berasal dari satu sektor, yaitu sektor Gambir. Bahwa ada kebingungan di kalangan peserta G-30-S dapat dilihat dari ingatan mereka yang berlawanan perihal sektor ini. Sementara Supardjo mengira bahwa sektor-sektor itu semestinya memasok makanan bagi pasukan, Njono berpikir sebaliknya, bahwa pasukan-pasukan di Lubang Buaya itulah yang semestinya menyediakan makanan untuk pasukan. Njono mengenang bahwa para sukarelawan di bawah pimpinannya sepanjang hari tidak berbuat apa-apa sambil menunggu nasi, seragam, dan senjata dari pasukan yang ada di Lubang Buaya. Sepanjang hari pada 1 Oktober itu perintah para perwira untuk sektor-sektor hanyalah bersiaga. Njono menyadari bahwa G-30-S sudah “macet” ketika sampai lepas tengah hari persediaan yang dijanjikan belum kunjung datang. Menurut kesaksiannya, tenaga bantuan sipil ini tetap tidak bergerak, mereka “pada umumnya belum berbuat apa-apa.”[29] Sudah diketahui bahwa sukarelawan yang muncul membantu G-30-S adalah mereka yang menduduki gedung telekomunikasi di dekat Lapangan Merdeka pada sore hari. Cerita Njono tentang “sektor Gambir” dan kekacauan dalam hal persediaan merupakan penjelasan yang dapat dipercaya tentang kepasifan sektor-sektor pada umumnya.

Seorang sipil yang termasuk dalam sektor Gambir ialah Juwono, nama samaran seorang anggota sayap pemuda PKI, Pemuda Rakjat, yang ketika itu berusia dua puluh tahun, di daerah Menteng Jakarta. Ia mematuhi perintah organisasi untuk mengikuti latihan militer di Lubang Buaya. Selama pekan-pekan sebelum G-30-S, Pemuda Rakjat sering mengadakan rapat untuk membahas situasi politik, terutama tentang bahaya kup oleh Dewan Jenderal. Pada 29 September Juwono menerima perintah dari seorang pimpinan latihan militer agar melapor ke satu tempat dekat Pejompongan, tidak jauh dari stadion utama ibu kota. Setibanya di sana, ia melihat ratusan pemuda dari seluruh penjuru ibu kota sudah berkumpul. Ia ingat *Gambir* menjadi nama untuk kelompok pemuda ini. Pada 1 Oktober sore ia bersama sekitar tiga puluh pemuda lainnya diberi senjata dan diperintahkan untuk menjaga gedung teleko-

munikasi. Mereka berada di sekeliling gedung, tidak melakukan sesuatu apa pun, sampai tiba-tiba datang pasukan. Juwono dan kawan-kawannya tidak pernah dipersiapkan untuk benar-benar berbaku tembak. Sesudah menyerahkan senjata mereka, semuanya diangkut dengan truk menuju markas polisi militer. Di sini mereka ditahan, diinterogasi, dan disiksa. Juwono menghabiskan tiga belas tahun berikutnya sebagai tapol.[30]

Selain mengerahkan pemuda untuk bertindak sebagai sukarelawan, tampaknya G-30-S juga meminta Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) untuk menyelenggarakan dapur umum di seluruh ibu kota. Dapur-dapur ini bertugas menyiapkan makan-minum, baik untuk tentara maupun sukarelawan. Gerakan 30 September, dalam sikapnya yang patriarkal konservatif, membebankan tugas masak-memasak kepada kaum perempuan.[31] Seorang ilmuwan Belanda, Saskia Wieringa, mewawancarai mantan anggota-anggota Gerwani pada awal 1980-an yang menyatakan pernah diminta oleh Comite PKI Jakarta Raya datang di Lubang Buaya untuk tugas-tugas sehubungan dengan kampanye anti-Malaysia.[32] Barangkali dapur umum tidak dapat terwujud karena terlalu sedikit perempuan yang datang. Menurut Wieringa hanya ada sekitar tujuh puluh perempuan di Lubang Buaya pada 1 Oktober. Mereka terdiri atas anggota Gerwani, Pemuda Rakjat, organisasi buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dan organisasi tani BTI (Barisan Tani Indonesia). Di antara mereka juga termasuk istri para prajurit pengawal istana. Mereka diberi tugas lain di samping masak-memasak. Beberapa orang ada yang menjahit emblem-emblem bersetrip tiga warna untuk seragam tentara G-30-S.[33]

Akan mengherankan jika tidak sering terjadi salah komunikasi antara G-30-S dan sukarelawan sipil yang direkrut untuk membantunya. Mereka tidak dapat menjelaskan rencana gerakan ini secara rinci kepada para anggota sipil partai tanpa meningkatkan risiko rencana terkuak. Keketatan rahasia militer yang memungkinkan tindak penculikan mencapai unsur kejutan pada saat yang bersamaan mengandaskan peran serta massa rakyat. Karena anggota-anggota partai tidak diberitahu dengan tegas apa yang terjadi, mereka pun menjadi bingung dengan tugas-tugas mereka yang sebenarnya. Seorang mantan pimpinan PKI tingkat atas membenarkan bahwa banyak orang di Jakarta yang ditugasi di sektor-sektor menjadi sangat bingung dan, dengan sendirinya, me-

mutuskan untuk tidak berbuat apa pun.[34] Dengan menyatukan gerakan massa dan konspirasi militer, pimpinan G-30-S mencoba sesuatu yang mustahil. Anggota-anggota partai (termasuk pimpinan tingkat puncak) tidak mungkin diberi tahu tentang seluk-beluk konspirasi tanpa membahayakan kerahasiaan yang menjadi tumpuan keberhasilan operasi. Keganjilan sifat G-30-S yang begitu memusingkan semua pengamat sebagian bersumber dari tidak direncanakannya gerakan ini sebagai sebuah operasi militer tersendiri. Banyak rakyat sipil diikutsertakan dalam aksi dengan cara-cara yang membingungkan semua peserta.

Barangkali Sjam menyisipkan peranan sipil di dalam rancangan G-30-S kendati ada keberatan dari para perwira militer. Salah seorang anggota Politbiro CC-PKI, Peris Pardede, pada sidang pertama Mahmilub memberi kesaksian bahwa Sudisman (seorang anggota Politbiro) dalam September memberi tahunya bahwa para perwira G-30-S tidak mempunyai cukup pasukan untuk melancarkan aksi. Sudisman menjelaskan, partai akan memasok satu kontingen pemuda untuk menambah kekuatan mereka, "walaupun mereka sebenarnja tidak suka, perwira-perwira itu lebih suka berbuat sendiri sadja."[35]

Mengingat pada paradigma yang ditetapkan G-30-S di Jakarta, rupanya peranan rakyat sipil dalam G-30-S selain dimaksudkan untuk membantu pasukan, juga untuk berdiri di belakang para perwira yang menyatakan diri sebagai pendukung gerakan. Sebagai jawaban atas seruan Untung, para perwira di seluruh negeri akan memrakarsai pembentukan dewan-dewan revolusi. Kemudian rakyat sipil akan bertemu dengan para perwira itu dan memutuskan bagaimana dewan-dewan tersebut akan memerintah. Di Jakarta G-30-S memilih empat puluh lima orang selaku anggota Dewan Revolusi Nasional Indonesia. Para perwira di daerah-daerah, dalam membentuk dewan-dewan revolusi daerah, diharuskan memberi tempat bagi kaum nasionalis, muslim, dan komunis dalam kerangka rumusan nasakom Sukarno.

Seandainya G-30-S mampu bertahan lebih lama, demonstrasi-demonstrasi massa kiranya akan terjadi di sejumlah kota untuk mendukung G-30-S dan dewan-dewan revolusinya itu. Njono menyatakan, ia bukan hanya menyusun enam sektor untuk sukarelawan di Jakarta tapi juga sebuah jaringan yang disebutnya sebagai pos-pos (kemungkinan rumah-rumah anggota partai dan kantor-kantor partai). Personalia untuk pos-

pos ini ialah anggota PKI di tingkat Comite Seksi. Mereka diperintahkan agar bersiap-siap di pos-pos masing-masing pada saat aksi dilancarkan dan terus mendengarkan radio mereka.[36] Rupa-rupanya Njono akan mengerahkan massa PKI untuk demonstrasi seandainya G-30-S tidak hancur terlalu dini.

Supardjo sendiri mendapat kesan, G-30-S mengharapkan adanya demonstrasi-demonstrasi massa seketika sesudah operasi militer tertunai. Pada satu butir dalam analisisnya Supardjo mencatat bahwa Sjam dan Biro Chusus mengira massa PKI sudah siap melakukan aksi militan semacam itu, "Kekeliruan strategi G-30-S itu disebabkan juga banyak kawan-kawan dari ABRI maupun dari daerah-daerah yang melaporkan, bahwa massa sudah tidak dapat ditahan lagi. Bila pimpinan tidak mengambil sikap, maka rakyat akan jalan sendiri (ber-revolusi)." Dengan menggunakan istilah *revolusi*, Supardjo tidak hendak mengartikannya sebagai revolusi komunis. Dalam wacana kaum Sukarnois kata *revolusi* merupakan istilah yang lazim dipakai saat itu. Oleh penggunaannya yang terus-menerus arti istilah ini telah menjadi polivalen, jargonistik, dan kabur. Bahkan Suharto, dalam menindas G-30-S, mengklaim bahwa ia sedang membela "revolusi" melawan percobaan "kontra-revolusi."

Sjam kelihatannya memang mengharapkan semacam aksi massa untuk mendukung G-30-S. Dalam kesaksiannya di persidangan ia menggambarkan kehancuran G-30-S, "Dan sesudah dipertimbangkan setjara masak bagaimana djalannja gerakan ini kalau dilandjutkan djuga kekuatan sudah makin ketjil [sepanjang 1 Oktober malam dan 2 Oktober dini hari], sedangkan tidak ada tanda-tanda gerakan massa djuga mendukung dan mengikuti G-30-S maka achirnja saja ambil keputusan untuk melakukan pemunduran."[37]

Seperti diketahui, PKI tidak mengerahkan massa anggotanya ke jalan-jalan untuk mendukung G-30-S. Tetapi, pandangannya di hadapan publik – bahwa G-30-S merupakan aksi intern Angkatan Darat – tidak mengabaikan kemungkinan pengorganisasian demonstrasi-demonstrasi untuk mendukungnya. Demonstrasi-demonstrasi memang terjadi di Yogyakarta. Gerakan di Jakarta agaknya memperhitungkan "gerakan massa" sebagai semacam tahap kedua. Ditilik dari pasifnya partai di Jakarta (dan di mana-mana kecuali di Yogya) barangkali G-30-S direncanakan akan berhasil dengan mengandalkan operasi militernya saja. Demonstrasi-

demonstrasi, yang seharusnya diorganisasi belakangan, akan memberi legitimasi publik bagi para pemberontak dan membantu meyakinkan lawan bahwa serangan balik tidak akan beroleh dukungan rakyat. Saat G-30-S mulai ambruk, Sjam tidak melepaskan harapan bahwa "gerakan massa" dapat menghidupkannya kembali, tapi mungkin sekali ia sejak awal tidak merencanakan aksi-aksi massa sebagai kunci kemenangan.

G-30-S DAN SUKARNO

Gerakan 30 September selama ini biasa dilukiskan sebagai usaha kudeta. Para penulis yang bersekutu dengan rezim Suharto bersikukuh menggunakan istilah ini; Notosusanto dan Saleh memberi judul buku mereka *The Coup Attempt of the "September30th Movement" in Indonesia,* dan Sekretariat Negara memberi anak judul versi bahasa Inggris dari laporannya tahun 1994 *The Attempted Coup by the Indonesian Communist Party* (Percobaan Kup oleh Partai Komunis Indonesia). Bahkan para sejarawan yang tidak menyetujui analisis rezim pun menggunakan istilah ini. Harold Crouch memberi judul bab tentang G-30-S dalam bukunya "The Coup Attempt" (Usaha Kup). Dalam memikirkan kejadian-kejadian tahun 1965, mereka yang tidak berhati-hati mungkin akan percaya bahwa istilah *kup* dapat diterapkan tanpa masalah pada Gerakan 30 September. Penelitian CIA tentang G-30-S menyatakan istilah *coup* "secara teknis benar" jika maknanya dimengerti sebagai "gebrakan politik yang kuat dan mendadak" tapi istilah *coup d'état* tidak benar, "Karena sekarang tampak jelas bahwa kup Indonesia itu bukanlah merupakan gerakan untuk menumbangkan Sukarno dan/atau pemerintah Indonesia yang sudah ada. Pada hakikatnya ini merupakan pembersihan dalam pimpinan Angkatan Darat, yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu di dalam kabinet."[38] Apabila aksi-aksi G-30-S ditinjau ulang, kita tidak menemukan upaya apa pun untuk mendongkel Presiden, selain dari pengumuman radio yang mendemisionerkan kabinetnya (Dekrit no. 1). Gerakan 30 September tidak mengambil tindakan langsung terhadap Presiden. Supardjo menemui Sukarno pagi hari itu atas nama para pimpinan G-30-S, mendesakkan kepadanya sebuah fakta yang tak dapat diubah (*fait accompli*), dan selanjutnya memberi keleluasaan

kepadanya untuk mengambil langkah apa saja yang dikehendakinya. Supardjo tidak mendikte syarat-syarat kepada Sukarno.

Cerita Supardjo tentang interaksi antara G-30-S dan Sukarno pada 1 Oktober sangat berharga karena dialah satu-satunya orang yang berhubungan dengan kedua belah pihak. Ia merupakan saluran komunikasi antara pimpinan inti G-30-S dan Presiden. Ceritanya di dalam dokumen ini sama dengan kesaksiannya di depan sidang, tetapi dalam dokumen ini terdapat sejumlah unsur-unsur baru.

Pengungkapan yang penting adalah tentang reaksi penggerak G-30-S ketika Supardjo melaporkan percakapannya dengan Sukarno. Menurut Supardjo mereka memperdebatkan apa yang harus dilakukan tapi tidak berhasil mencapai satu keputusan yang jelas. Mereka benar-benar telah dilumpuhkan oleh kebimbangan mereka sendiri. Karena sebelumnya tidak ditetapkan seorang komandan untuk keseluruhan operasi, maka tak seorang pun dari mereka berada dalam posisi untuk menetapkan kata akhir. Karena penolakan Sukarno untuk mendukung aksi mereka menimbulkan kebingungan, maka menjadi masuk akal untuk menduga bahwa mereka sebelumnya berharap akan menerima restunya. Mereka berencana menangkap hidup-hidup tujuh jenderal, menghadapkan mereka kepada Sukarno, dan menuntut agar jenderal-jenderal dipecat atau dipenjara. Bagaimana pun juga Sukarno dan para penasihatnya, selama enam bulan terakhir, sangat dicemaskan oleh isu tentang Dewan Jenderal. Keyakinan Sjam bahwa rencananya tak lekang oleh kesalahan, sebagian pasti bersumber pada kepastian bahwa Sukarno akan menyambut baik aksi terhadap komando tertinggi Angkatan Darat. Tapi Sukarno tidak dapat mendukung aksi mereka begitu ia mendengar adanya pertumpahan darah. Tanpa dukungan Sukarno pimpinan G-30-S tidak lagi tahu bagaimana harus meneruskan aksi mereka.

Hal yang mengherankan dalam dokumen Supardjo adalah bahwa Sjam berpendapat G-30-S harus terus dilanjutkan bahkan seandainya itu berarti membangkang terhadap perintah Sukarno dan menimbulkan perlawanan darinya, “Kawan Sjam tetap revolusi harus djalankan sendiri tanpa Bung Karno.” Maksud utama alinea Supardjo ini untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap garis yang diusulkan Sjam. Ia berpendapat G-30-S seharusnya mengambil keputusan tegas untuk tetap mempertahankan Sukarno sebagai sekutu. Jika G-30-S mengikuti garis

Sjam, pasti gerakan ini akan berhadapan dengan sikap permusuhan dari hampir seluruh jajaran militer dan dengan mudah terisolasi. Tetapi jika G-30-S dapat meyakinkan Sukarno bahwa gerakan ini perlu diteruskan demi mengakhiri Suharto dan Nasution sekaligus, para perwira sayap kanan akan terisolasi, "Bila kita rangkul Bung Karno, maka kontradiksi pokok akan beralih di satu pihak golongan kiri + golongan demokrasi revolusioner dan di lain pihak hanya golongan kanan saja." Masalahnya adalah kelompok inti gerakan tidak pernah membuat keputusan apakah akan terus berjalan tanpa Sukarno atau akan mencari persetujuan Sukarno untuk meneruskan aksi, "Dari kita tidak ada ketentuan garis mana yang harus ditempuh." Dalam gaya teologi Leibniz tentang Tuhan sebagai tukang arloji akbar (mencipta alam semesta, menggerakkannya, dan kemudian meninggalkannya), para penggerak G-30-S tidak berbuat apa pun sepanjang siang dan malam 1 Oktober dan membiarkan inisiatif beralih ke tangan Suharto dan Nasution.

Menurut buku putih rezim Suharto tentang Gerakan 30 September, para penggerak "memutuskan untuk tidak mematuhi perintah Presiden Sukarno." Para penulisnya yang anonim menyatakan, dalam ungkapan samar-samar yang menjadi keahlian mereka, Sjam menekankan bahwa para penggerak tidak mematuhi perintah itu karena ia tidak ingin "menimbulkan suasana ragu-ragu di kalangan pimpinan gerakan."[39] Sukar mengikuti logika penjelasan mereka itu. Tampaknya mereka berpendapat bahwa Sjam berhasil mempersatukan semua pimpinan G-30-S di bawah satu program (dewan-dewan revolusi) pada saat mereka dalam keadaan bimbang tentang bagaimana harus meneruskan aksi. Keputusan sebenarnya yang diambil, menurut analisis Supardjo, persis berlawanan: para pimpinan tidak *memutuskan* untuk membangkang perintah Sukarno. Mereka tidak memutuskan apa pun. Mereka menemui jalan buntu.

Komentar Supardjo tentang posisi Sjam ("Kawan Sjam tetap revolusi harus djalankan sendiri tanpa Bung Karno.") barangkali dapat menjelaskan pengumuman-pengumuman radio siang hari yang mendemisionerkan kabinet presiden dan mencanangkan bahwa semua kekuasaan telah jatuh ke tangan Dewan Revolusi Indonesia. Supardjo tidak secara khusus menanggapi pengumuman-pengumuman tersebut, tapi kita dapat menduga, dengan membaca di balik yang tersurat, bahwa Supardjo berpikir Sjam yang bertanggung jawab. Sementara Supardjo dan

para perwira militer lain tetap setia kepada Sukarno, Sjam ingin melampauinya dan menciptakan suatu bentuk pemerintahan yang sama sekali baru. Para perencana gerakan menemui jalan buntu dalam diskusi mereka karena adanya perbedaan pendapat ini. Di sidang Mahmilub untuknya Supardjo menyatakan bahwa ia tidak menyetujui ide Dewan Revolusi Indonesia dan menolak menandatangani dokumen yang diedarkan Sjam, rupa-rupanya pada akhir pagi atau awal sore 1 Oktober, "Dewan Revolusi hanya keinginan Sjam dan tidak pernah dirapatkan." Supardjo ingat ia melihat ada perpecahan antara Sjam dan para perwira militer dalam G-30-S karena perwira-perwira lain, seperti halnya Supardjo, tidak mau menandatangani dokumen tersebut.[40] Untung dan Latief bersedia memenuhi permintaan Sukarno untuk mengakhiri G-30-S, tetapi Sjam "sedikit tidak senang mendengar persoalan itu."[41] Perwira-perwira ini menyemangati pasukan-pasukan mereka dengan ide bahwa Sukarno harus dilindungi dari bahaya kup oleh jenderal-jenderal sayap kanan. Supardjo menentang garis Sjam karena ia mengenali apa yang gamblang: kesetiaan di kalangan pasukan dan perwira militer adalah kepada Sukarno, bukan kepada PKI.

Para perwira di dalam G-30-S tentunya telah memberikan persetujuan sebelumnya terhadap ide dasar Dewan Revolusi karena istilah ini disebut di dalam pengumuman radio yang pertama. Meskipun demikian, kalaupun para perwira ini memang menyetujui ide tersebut, mereka barangkali tidak membayangkan bahwa Dewan Revolusi akan menggusur kekuasaan Sukarno. Dalam usahanya meneruskan G-30-S, Sjam mungkin mengubah rencana asli tentang dewan-dewan ini. Karena Sukarno tidak menyokong G-30-S, Sjam segera merancang ulang rencana semula sehingga tidak lagi bertumpu pada presiden. Pengumuman-pengumuman radio di siang hari kiranya mencerminkan gagasan Sjam sendiri untuk meninggalkan rencana semula yang telah disetujui oleh para perwira militer tersebut. Dewan-dewan bukannya merupakan lembaga-lembaga yang mendukung Sukarno, tapi serta-merta disusun ulang sebagai dasar dari bentuk pemerintahan baru.

Mengikuti analisis Supardjo, kita dapat mengajukan hipotesis bahwa pengumuman-pengumuman radio siang hari yang mendemisionerkan kabinet Sukarno adalah jawaban Sjam terhadap penolakan Sukarno untuk mendukung G-30-S. Seandainya G-30-S berjalan

sesuai rencana dan Sukarno mendukungnya, dewan-dewan revolusi akan dibentuk untuk menyempurnakan kabinet yang ada ketimbang untuk menggantikannya. Pengumuman-pengumuman radio yang belakangan agaknya dimaksudkan untuk dibacakan pada pagi hari, tidak lama sesudah pengumuman yang pertama. Pembacaan itu tertunda karena debat yang berlarut-larut dan ketidaktegasan di kalangan para pemimpin G-30-S sesudah Sukarno memerintahkan agar aksi dihentikan. Akhirnya Sjam menganggap sepi kehendak para perwira dan berusaha meneruskan G-30-S dengan menyiarkan pengumuman yang sudah diubah. Pendemisioneran kabinet mungkin merupakan usaha Sjam pada detik-detik terakhir untuk memberikan arah baru bagi G-30-S sementara kawan-kawan sesama konspirator dari kalangan militer dalam keadaan gugup dan bimbang. Untuk kedudukan wakil-wakil komandan G-30-S Sjam menunjuk perwira-perwira yang kebetulan ada di dekatnya pada hari itu (Supardjo dan Atmodjo) atau yang mempunyai reputasi sebagai perwira progresif (Sunardi dan Anwas).

Gerakan 30 September telah lumpuh. Pada satu pihak, Sjam mengharapkan "gerakan massa" prajurit dan rakyat sipil secara gaib akan muncul dan menyelamatkan G-30-S. Pada lain pihak, kawan-kawan militer sesama konspirator telah letih, bingung, dan gugup. Mereka tidak bersedia mendukung diteruskannya gerakan ini, jika hal itu akan berakibat konfrontasi dengan Sukarno. Ketika panglima tertinggi mereka memerintahkan agar G-30-S dihentikan, mereka pun mematuhinya. Oleh sebab itu, diskusi di kalangan pimpinan inti pun menjadi bertele-tele. Pimpinan tidak mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan gerakan, mengorganisasi aksi-aksi konkret untuk meneruskannya, atau berusaha meyakinkan Sukarno agar menyokong perang yang lebih luas melawan Suharto dan Nasution. Mereka sekadar hanyut tak terelakkan menuju malapetaka.

PENGANGKATAN PRANOTO

Dengan sendirinya G-30-S bersandar pada Sukarno untuk berlindung dari amuk serangan pasukan Suharto. Namun para pimpinan mengetahui pada sore 1 Oktober bahwa Sukarno sudah kehilangan tongkat koman-

donya atas Angkatan Darat. Suharto tidak memberi izin Mayor Jenderal Pranoto, tokoh yang diangkat Sukarno sebagai panglima sementara Angkatan Darat, untuk memenuhi panggilan Presiden. Seperti dikatakan sejarawan militer Indonesia Harold Crouch, "Suharto dengan terang-terangan tidak mematuhi perintah Sukarno. Pengangkatan Pranoto tidak dihiraukan dan Suharto mengeluarkan perintah terselubung kepada Presiden agar ia meninggalkan Halim. Hubungan antara presiden dan panglima Angkatan Darat yang berlangsung hampir sepanjang periode Demokrasi Terpimpin telah berakhir pada 1 Oktober 1965."[42]

Ketika Supardjo sedang menuliskan analisis *postmortem* itu, ia masih percaya G-30-S dapat diselamatkan jika Pranoto mendesakkan kekuasaan yang telah diberikan Sukarno kepadanya. Pada 1 Oktober siang G-30-S berharap Pranoto akan melawan Suharto dan mengambil kewenangan atas Angkatan Darat. Sementara dalam perbincangan dengan Sukarno, Supardjo mengusulkan Pranoto dan dua jenderal lain sebagai calon-calon pengurus Angkatan Darat. Pranoto salah seorang dari beberapa anggota staf umum Angkatan Darat yang tidak antikomunis. Supardjo berpendapat Pranoto seharusnya lebih banyak mengambil inisiatif. Jika Pranoto "dapat menggunakan wewenang, maka situasi tidak seburuk ini. Seharusnya dengan surat keputusan itu, ia cepat pidato di radio dan umumkan pengangkatannya. Tindakan kedua supaya kedua fihak menanti perintah-perintah tidak saling bertempur. Pak Pran harus juga menyusun kekuatan brigade-brigade di sekitarnya dan langsung ia pimpin … Kemudian diisi dengan dalih-dalih, sementara lowongan staf SUAD yang kosong." Sial bagi G-30-S dan bagi Pranoto pribadi, yang belakangan dipenjara selama dua belas tahun, ia membiarkan Suharto tetap menguasai Angkatan Darat.[43]

Mengingat kedudukan Pranoto di Angkatan Darat dan suasana yang tidak menentu saat itu, tidak adil kiranya jika Supardjo berharap Pranoto merebut pimpinan Angkatan Darat dari tangan Suharto. Pranoto adalah asisten Yani untuk urusan personalia. Ia bukan pengganti langsung kedudukan Yani, bukan pula perwira paling senior. Dalam karangan singkatnya beberapa tahun kemudian Pranoto menceritakan bahwa ia dan sekelompok perwira di Markas Besar Angkatan Darat mengirim nota kepada Suharto pada 1 Oktober pagi, begitu hilangnya Yani sudah dipastikan, yang meminta Suharto untuk bertindak sebagai

Panglima Angkatan Darat sementara. Bagaimana pun juga, Suharto selalu menjadi *caretaker* Angkatan Darat di masa sebelumnya, ketika Yani ke luar negeri. Pranoto sudah menempatkan dirinya di bawah komando Suharto saat Sukarno mengangkatnya sebagai *caretaker*. Jawaban Pranoto saat itu adalah ia menunggu sampai ia menerima perintah tertulis dari Sukarno. Walaupun Supardjo menyebut tentang "surat keputusan" itu, Pranoto tidak menerima perintah tertulis, melainkan hanya pesan lisan dari seorang penghubung. Dapat dipahami jika Pranoto tidak segera menantang Suharto dan berpihak pada Sukarno karena ia tidak bisa mengerti taruhan-taruhan yang berlibat – ia tidak mungkin dapat meramalkan bahwa pada akhirnya Suharto menggulingkan Sukarno dan merancang pembunuhan ratusan ribu jiwa. Pranoto adalah salah satu harapan terakhir bagi G-30-S, tapi ia hampir tidak dapat disalahkan karena tidak memenuhi peranan yang telah ditugaskan Sukarno kepadanya.

G-30-S DAN SUHARTO

Salah satu kebisuan yang aneh dalam analisis Supardjo, kebisuan yang akan mengecewakan pembaca dewasa ini, ialah mengenai Suharto. Supardjo mengkritik G-30-S dalam banyak hal tapi tidak karena lalai menculik atau setidak-nya dengan cara tertentu melumpuhkan Suharto sebelumnya. Secara tersirat Supardjo menganggap kegagalan G-30-S menghadapi Suharto sebagai kegagalan G-30-S secara umum dalam mempersiapkan detil rencana cadangan untuk menghadapi keadaan tak terduga. Ia tidak menyebut, baik hubungan dekat Untung dan Latief dengan Suharto, maupun cerita yang diungkap Latief sangat belakangan pada persidangannya tahun 1978, bahwa Latief sudah menceritakan tentang G-30-S kepada Suharto sebelumnya. Karena Supardjo tidak mengikuti rapat-rapat perencanaan pada bulan Agustus dan September, dan tidak mempunyai hubungan dengan Untung dan Latief, mungkin Supardjo tidak banyak tahu atau tidak tahu sama sekali tentang hal-hal itu. Dalam dokumennya ia tidak mengungkap pengetahuan tentang apa yang telah diputuskan para pimpinan inti tentang Suharto sebelum G-30-S dimulai. Pembahasan Supardjo tentang Suharto terpusat pada

satu argumen: bahwa G-30-S harus menyerang markas Kostrad pada siang atau petang 1 Oktober. Dengan jujur Supardjo mengakui dalam kesaksiannya di ruang sidang bahwa ia berpikir G-30-S seharusnya membom Kostrad.[44]

Dalam analisis tertulisnya ia menjelaskan mengapa ia mendesak adanya serangan udara terhadap markas Suharto. Ia sangat yakin G-30-S akan dapat menundukkan Suharto dan Nasution, jika serangan dilancarkan sebelum mereka sempat mengonsolidasi kekuatan pada petang hari itu. Supardjo berpendapat Angkatan Darat dalam keadaan panik selama dua belas jam sesudah operasi dimulai (atau tercium), itu berarti sejak kira-kira pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore. Suharto mulai bergerak dengan yakin hanya sesudah Batalyon 530 menyerahkan diri sekitar pukul 4 sore. Nasution tiba di Kostrad petang hari dan RRI direbut kembali sekitar pukul 7 petang. Supardjo mendesak agar G-30-S menyerang Suharto sebelum ia dapat membalikkan kelanjutan gerakan ini. Jika G-30-S menyerang Suharto siang hari itu, "besar kemungkinan lawanlah yang akan angkat tangan, karena pada saat itu Nato [Nasution-Suharto] belum mempunyai *grip* [cengkraman] terhadap TNI yang ada di kota." Gerakan 30 September mempunyai kesempatan bagus untuk menyingkirkan lawan-lawannya, "Pada jam-jam pertama Nato menyusun komando kembali. Posisi yang sedemikian ialah posisi yang sangat lemah. Saat itu seharusnya pimpinan operasi musuh disergap tanpa khawatir resiko apa-apa bagi pasukan kita." Mungkin Supardjo terus menuntut agar dilakukan pemboman atas Kostrad sampai jauh malam. Suharto menangkap kabar tentang diskusi-diskusi di Halim dan meninggalkan markasnya sekitar pukul 23.30 (menurut wartawan John Hughes) karena takut akan serangan udara oleh AURI.[45]

Masih dapat diperdebatkan apakah G-30-S akan tampil sebagai pemenang dalam bentrokan dengan Suharto karena Supardjo sendiri menunjukkan bahwa G-30-S tidak mempunyai struktur komando yang kokoh, pasukan-pasukannya kekurangan makan maupun moral, dan bahan propaganda yang disiarkan melalui radio terlalu singkat dan membingungkan untuk bisa digunakan. Melancarkan serangan dapat berakibat kekalahan, sepadan dengan kehancuran yang akhirnya dialami G-30-S. Mengingat kelemahannya sendiri pada pasukan darat, G-30-S harus bertumpu pada pemboman udara oleh AURI terhadap markas

Suharto untuk merebut waktu untuk mengerahkan dan menyusun kembali pasukan infantri lebih banyak lagi. Serangan udara mungkin dapat memberi G-30-S celah untuk menang. Maksud Supardjo adalah bahwa penggerak G-30-S harus berusaha menyerang karena mereka tidak mempunyai sarana lain untuk mempertahankan diri; mereka harus bertempur dan menciptakan yang terbaik dari situasi yang buruk, tanpa menghiraukan "resiko apa-apa bagi pasukan kita." Jika seseorang sedang menghadapi kekalahan, tidak banyak alasan untuk menolak siasat yang kemungkinan besar efektif karena takut siasat itu tidak akan menjamin kemenangan.

Menurut Supardjo, Panglima AURI Omar Dani mengikuti diskusi-diskusi di pangkalan udara Halim itu dan mendukung penyerangan terhadap Kostrad. Namun para pemimpin G-30-S tidak setuju, "Setelah menerima berita bahwa Jendral Harto [Suharto] menyiapkan *tegen aanval* [serangan balik] dan Laksamana Omar Dani menawarkan integrasi [pasukan Angkatan Udara dan Gerakan 30 September] untuk melawan pada waktu itu, harus disambut baik." Dani agaknya bersungguh-sungguh dengan tawarannya, "Pak Omar Dani telah bertindak begitu jauh sehingga telah memerintahkan untuk memasang roket-roket pada pesawat."[46] Dani sungguh-sungguh setia kepada Sukarno dan mungkin sangat percaya bahwa presiden perlu dilindungi dari jenderal-jenderal sayap kanan. Supardjo menyatakan, rekomendasi Dani kepada pimpinan G-30-S ialah agar mereka "bersama-sama dengan Bung Karno melanjutkan revolusi." Persetujuan Omar Dani terhadap pemboman Kostrad (jika memang benar ia menyetujui) mungkin didorong oleh kehendaknya untuk melindungi presiden, yang saat itu masih berada di Halim. Akhirnya, Angkatan Udara memutuskan menentang penyerangan terhadap Kostrad. Atmodjo ingat para perwira di Halim khawatir tentang kemungkinan jatuh korban di kalangan rakyat sipil. Jika bom salah sasaran, dengan mudah akan jatuh di daerah pemukiman yang berdekatan.[47]

Supardjo bersikeras bahkan sampai saat-saat terakhir agar G-30-S melawan pasukan yang dikirim Suharto untuk menyerang Halim. Supardjo menyebutkan bahwa ia menawarkan diri untuk memimpin sisa-sisa pasukan yang ada di dekat pangkalan udara untuk melawan pasukan Suharto. Bagi Supardjo lebih baik berusaha melawan dan kalah

daripada lari tunggang-langgang. Tapi pimpinan G-30-S, terutama Sjam dan Untung, tidak menerima dan juga tidak menolak usul Supardjo. Seperti halnya dalam setiap rapat-rapat pengambilan keputusan sebelumnya, mereka tidak pernah tiba pada sesuatu keputusan. Mereka tidak berbuat apa pun. Ketika Pasukan Khusus Angkatan Darat mulai memasuki kawasan sekitar Halim, pasukan-pasukan G-30-S yang kebanyakan dari batalyon Jawa Tengah, menghambur ke segala penjuru, dengan putus asa melarikan diri mencari hidup. Seperti dicatat Supardjo, prajurit-prajurit yang tidak mengenal ibu kota dengan baik itu menjadi mangsa empuk pasukan Suharto.

Perlu diperhatikan bahwa Supardjo tidak pernah menyebut Suharto tanpa berpasangan dengan Nasution. Ia melihat mereka berdua sebagai satu tim, sebagai "suatu komando." Ia menyingkat dua nama itu untuk membentuk neologisme cerdik yang merujuk kepada orientasi mereka yang pro-Barat, yaitu "Nato" (*Na*sution-Suhar*to*). Istilah *musuh* yang digunakan dalam dokumen selalu dialamatkan kepada Nato, tidak kepada Suharto seorang diri. Tampaknya Supardjo tidak memandang Suharto sebagai panglima yang kuat dalam dirinya. Supardjo menangkap kesan yang keliru bahwa Nasution, bukan Suharto, yang melarang Pranoto menghadap presiden di Halim. Tiadanya pembahasan tentang Suharto di dalam dokumen ini memperlihatkan bahwa Supardjo, bahkan sesudah kekalahan G-30-S pun, tidak melihat Suharto sebagai musuh utama. Kepada saya Atmodjo mengatakan, Supardjo memandang rendah kemampuan Suharto sebagai perwira dan berpendapat bahwa kedudukannya sebagai panglima Kostrad tidak berarti.[48]

Penilaian Supardjo tentang Suharto sama sekali tidak mengherankan. Selama dua pekan pertama Oktober Kedutaan Besar Amerika Serikat mendapat kesan bahwa sekutu lamanya, Nasution, itulah yang memegang kekuasaan dan Suharto sekadar melaksanakan perintah Nasution. Atas dasar laporan Kedutaan Besar, Menteri Luar Negeri Dean Rusk pada 13 Oktober menulis bahwa Nasution tampaknya orang "yang mengambil keputusan."[49] Duta Besar Green mengubah pendapat itu pada awal November, "Suharto, bukan Nasution, orang yang memberikan perintah-perintah, menyusun strategi sendiri, dan menghadapi Sukarno secara langsung."[50] Dibandingkan dengan Nasution yang sudah menonjol di panggung politik Indonesia sejak awal 1950-an, Suharto merupakan

sosok sampingan. Awalnya, kebanyakan orang tidak dapat memercayai bahwa ia bertindak atas inisiatif sendiri.

Mungkin Supardjo tidak mengetahui bahwa Latief telah memperingatkan Suharto, dan andai kata ia tahu, entah sebelum atau sesudah aksi, mungkin ia tidak menganggap hal itu sebagai faktor yang menentukan. Barangkali G-30-S tidak menculik Suharto atau sebaliknya tidak menjinakkannya karena gerakan ini meremehkan kekuatannya. Kostrad tidak memiliki pasukan sendiri; ia meminjam pasukan-pasukan dari komando daerah-daerah. Sebagian besar pasukan yang ada di Jakarta pada 1 Oktober di bawah komando Kostrad justru pasukan-pasukan yang akan digunakan oleh G-30-S (Batalyon 454 dan 530). Sekalipun Sjam mengira Suharto mungkin berbalik melawan G-30-S, namun Sjam – seperti Supardjo – agaknya menduga Suharto tidak mempunyai keuletan dan kecerdasan untuk mengalahkan G-30-S. Suharto dikenal sebagai keras kepala (penilaian Sukarno terhadapnya) dan tegas (penilaian Latief terhadapnya) tapi bukan sebagai perwira sayap kanan yang bersekutu dengan Nasution.[51] Memang, secara umum diduga bahwa kedua tokoh ini bermusuhan sejak Nasution memindahkan Suharto dari jabatannya sebagai Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah pada 1959 karena korupsi.[52]

Dalam menulis analisisnya pada pertengahan 1966 Supardjo agaknya tidak menyadari bahwa peranan Nasution untuk menyerang G-30-S tidak berarti dibandingkan dengan peranan Suharto dan para perwiranya di Kostrad (yaitu Yoga Sugama dan Ali Murtopo). Citra tentang Nasution sebagai patriark akbar Angkatan Darat terpahat begitu mendalam di benak para komplotan G-30-S sehingga mereka tidak dapat membayangkan bahwa Suharto, yang relatif bukan siapa-siapa, tiba-tiba berhasil tampil sebagai pemimpin sebuah rencana ambisius untuk menggulingkan Sukarno dan mengganyang PKI. Mereka seharusnya dapat meraih manfaat bila mereka berpikir dalam kerangka permainan catur seperti pernah dikemukakan Bertold Brecht, "Suatu permainan di mana posisi tidak selalu tetap sama; di mana fungsi buah-buah catur berubah jika mereka sejurus berada di petak yang sama: lalu mereka menjadi lebih efektif atau lebih lemah."[53]

Supardjo agaknya juga tidak menyadari peranan Suharto dalam menyabotase kebijakan bersemangat perang Sukarno terhadap Malaysia

sebelum Oktober 1965. Komando tertinggi Angkatan Darat tidak menyetujui konfrontasi Sukarno dengan Malaysia ketika perseteruan itu meningkat antara 1964-65. Namun jenderal-jenderal itu tidak cukup percaya diri untuk menentang presiden. Yani dan Mayor Jenderal S. Parman, kepala intelijen Angkatan Darat, diam-diam merongrong konfrontasi, dengan menugasi Suharto agar mengirim agen-agen untuk menghubungi para pejabat tinggi Malaysia dan Inggris dan meyakinkan mereka bahwa Angkatan Darat tidak mengingini perang. Kostrad, di bawah pimpinan Suharto, merupakan jantung daya upaya Angkatan Darat dalam memelihara kontak rahasia dengan pihak lawan. Lebih dari itu, Suharto, sebagai wakil panglima pasukan-pasukan yang digunakan untuk konfrontasi, memberi jaminan bahwa pasukan yang ada di sepanjang perbatasan dengan Malaysia kekurangan personil dan kekurangan perlengkapan. Ketika itu Supardjo adalah panglima pasukan-pasukan konfrontasi yang ditempatkan di Kalimantan. Ia mengetahui bahwa atasannya berusaha menggembosi kebijakan Sukarno, tapi rupanya ia tidak tahu bahwa Suharto itulah pemain utama dalam usaha ini. Saya akan kembali ke persoalan ini dalam Bab 6.

Bagi Supardjo G-30-S hancur sebagian besar karena beban ketidakmampuannya sendiri: G-30-S tidak mempunyai rencana yang sudah dipikirkan masak-masak selain penculikan tujuh jenderal, tidak memanfaatkan radio, tidak mampu membuat keputusan, dan tidak memberi makan pasukannya. Ia melihat kegagalan G-30-S sebagai pelajaran yang memprihatinkan tentang apa yang terjadi apabila orang-orang sipil merancang aksi militer. Sjam menempatkan diri sebagai pimpinan G-30-S, menggertak bawahannya dalam Biro Chusus agar memberikan laporan-laporan yang sesuai dengan agendanya sendiri, dan mengabaikan kritik dari perwira-perwira militer yang bersedia bekerja sama dengannya. Dengan cara yang menyesatkan ia mencampur aduk paradigma aksi militer yang bersifat rahasia dengan mobilisasi rakyat sipil yang bersifat terbuka. Supardjo, dan barangkali juga para perwira lainnya, semula mengikuti kepemimpinan Sjam karena mereka menduga kepercayaan diri Sjam didasarkan atas pengetahuan yang mumpuni. Mereka mengira pimpinan PKI memahami apa yang partai lakukan. Tapi ketika G-30-S tidak berjalan sesuai rencana pada 1 Oktober dan Presiden Sukarno menuntut agar gerakan itu dihentikan, para perwira

militer ini menolak mengikuti Sjam lebih jauh. Diskusi-diskusi antara pimpinan G-30-S menemui jalan buntu karena baik Sjam maupun para perwira tidak mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan yang lain. Agaknya Sjam yang bertanggung jawab atas pengumuman radio yang mendemisionerkan kabinet Sukarno justru ketika Supardjo sedang berunding dengan Sukarno.

Yang gamblang dari dokumen Supardjo ialah bahwa Sjam orang yang paling bertanggung jawab dalam memulai dan merancang G-30-S. Dengan mengemukakan peranan Sjam lebih penting ketimbang peranan personil militer yang terlibat, dokumen Supardjo menunjukkan bahwa pendirian Harold Crouch tidak benar, yaitu bahwa para perwira militer itulah perancang G-30-S. Selagi banyak perwira pro-Sukarno dan pro-PKI saling berbagi informasi pada pertengahan 1965, saling bertukar gagasan, dan memikirkan berbagai strategi menghadapi jenderal-jenderal sayap kanan, G-30-S mewakili penemuan Sjam yang istimewa. Para perwira yang berpartisipasi dalam G-30-S (Untung, Latief, Soejono, dan Supardjo) adalah mereka yang mau mengikuti arahan Sjam.

Supardjo menyimpulkan bahwa G-30-S "dipimpin langsung oleh partai," karena ia tahu Sjam adalah wakil PKI. Tapi ia tidak menjelaskan bagaimana "partai" memimpin operasi ini. Mengingat kebutuhan para perwira pro-PKI seperti Supardjo untuk menjaga kerahasiaan hubungan mereka dengan partai, kiranya tidak mungkin ia mempunyai kontak dengan siapa pun selain dengan Sjam. Barangkali ia tahu sedikit saja tentang hubungan Sjam dengan pimpinan partai. Dengan menyatakan bahwa G-30-S dipimpin oleh PKI, Supardjo tidak menegaskan bahwa Politbiro dan Central Comite telah mendiskusikan aksi ini dan memberikan persetujuannya (seperti yang dituduhkan rezim Suharto). Apa yang mungkin diketahui Supardjo ialah bahwa di antara lima orang pimpinan inti, Sjam adalah orang yang paling bertanggung jawab atas G-30-S. Dari fakta itulah Supardjo menyimpulkan tentang kepemimpinan partai. Dokumen Supardjo tidak memberi kesan sedikit pun bahwa ia mempunyai pengetahuan dari tangan pertama tentang peran atasan Sjam dalam G-30-S.

Dengan menyalahkan orang sipil sebagai penyebab kegagalan G-30-S, Supardjo tidak sedang menjunjung martabat lembaganya sendiri, yaitu militer Indonesia. Ia menulis dokumen itu sebagai pengikut setia

PKI yang berniat mendidik "kawan pimpinan." Terlepas dari penyesalannya karena telah menaruh kepercayaan terlampau mendalam kepada Sjam, bahkan setelah ia menyadari rencana untuk G-30-S itu "tidak logis," Supardjo tidak menyesali kesetiaannya kepada partai. Dalam satu alinea dokumen ia menyalahkan kawan-kawannya sesama perwira, karena tidak dapat melaksanakan "tugas revolusioner" dan mengatasi rasa hormat yang berurat berakar pada para perwira atasan mereka. Supardjo menghargai profesinya dengan sungguh-sungguh; ia fasih dalam hal strategi militer. Tapi ia yakin militer seharusnya mengabdi kepada politik revolusioner daripada politik elitis, pro-Barat yang diajukan Nasution. Analisis *postmortem* Supardjo tentang G-30-S tidak dapat dibaca sebagai usaha seorang perwira untuk membersihkan nama militer dengan melempar kesalahan kepada pihak sipil. Dokumen itu justru merupakan sebuah kritik intern: ia mewakili pemandangan seorang loyalis partai yang dibuat marah dan kecewa oleh langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan-pimpinan partai tertentu.

CATATAN

[1] Kolaga, komando multitugas, mempunyai dua front tempur terhadap Malaysia: yang satu berpangkalan di Medan (dipimpin Kemal Idris) dan yang lain di Kalimantan Barat (dipimpin Supardjo). Menurut banyak sumber, kedua front komando ini masing-masing dinamai Komando Tempur Dua dan Komando Tempur Empat. Namun, agaknya ada semacam kekacauan saat itu apakah komando-komando ini dinamai dengan sebutan yang lebih masuk akal, yaitu Komando Tempur Pertama dan Kedua. Penuntut Umum Mahmilub mengenal Supardjo sebagai Panglima Komando Tempur Kedua. Sumber kekacauan lain ialah peranan Kostrad di dalam Kolaga. Panglima Kolaga, sedari awal pada Mei 1964 (yang ketika itu dinamai Koga), ialah Laksamana Madya Omar Dani. Wakil Panglima sejak 1 Januari 1965 dan seterusnya ialah Suharto, yang pada saat bersamaan juga Panglima Kostrad. Suharto, yang mengepalai penempatan pasukan Kolaga, bersikeras meminta agar semua pasukan yang dipinjam dari komando-komando daerah untuk Kolaga pertama-tama harus diserahterimakan ke Kostrad (Crouch, *Army and Politics in Indonesia*, 70-71). Namun, Supardjo tidak lalu menjadi bawahan Suharto atau perwira Kostrad. Dalam hal keputusan-keputusan operasi militer, bahkan saat Supardjo sedang memimpin pasukan Kostrad, ia tetap langsung di bawah Omar Dani. Tidak tepat menggambarkan Supardjo, seperti yang dilakukan John Hughes, sebagai Panglima Komando Tempur Keempat Kostrad (Hughes, *End of Sukarno,* 31). Mantan Wakil Perdana Menteri Pertama Subandrio semakin mengacaukan keadaan dengan pernyataannya bahwa Supardjo "ditarik Suharto ke Kostrad

menjabat Pangkopur II" (Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S,* 27). Supardjo tidak dibawa ke Kostrad, dan Suharto tidak bertanggung jawab atas penugasan Supardjo ke Kalimantan. Penugasan Supardjo ke Kolaga terjadi akhir 1964, sebelum Suharto diangkat sebagai wakil panglima. Penulis lain menerima pernyataan keliru Soebandrio dan bahkan mengangkatnya ke taraf kekeliruan yang lebih jauh, menggambarkan Supardjo sebagai anak buah Suharto (Harsutejo, *G-30-S*, 167).

[2] Green, *Indonesia*, 53. Green salah menyebut Supardjo sebagai mantan ajudan militer Sukarno.

[3] Suharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,* 110.

[4] Rey, "Dossier of the Indonesian Drama," 30; Anderson and McVey, *Preliminary Analysis*, 11.

[5] *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung*, 229-230.

[6] Sementara orang ada yang menduga-duga bahwa Supardjo barangkali bersekongkol dengan Suharto dalam merancang G-30-S karena Supardjo bertemu Suharto di Kalimantan Barat dalam pekan-pekan menjelang aksi terjadi. Sebagai wakil panglima pasukan untuk konfrontasi, Suharto memeriksa pasukan di Kalimantan Barat sekitar pertengahan Agustus 1965. Sebuah foto bersama dari dua tokoh ini dalam kesempatan termaksud tertera di dalam brosur Nurdin A.S., *Supardjo Direnggut Kalong*, 16. Wertheim menyebut "perjalanan bersama" ini sebagai fakta yang patut diperhatikan, walaupun ia mengakui bahwa "berdiri sendiri, fakta itu tidak memberikan alasan kuat untuk kecurigaan yang lebih konkret." (Wertheim, "Suharto and Untung Coup," 54-55). Supardjo juga bertemu Yani, korban G-30-S, dalam pekan-pekan sebelum aksi sehingga sekadar fakta tentang adanya pertemuan yang lebih awal saja tidak membuktikan apa pun.

[7] Para penuntut umum Mahmilub menyatakan bahwa Supardjo dan G-30-S sebelumnya sudah sepakat bahwa isyarat baginya untuk kembali ke Jakarta berupa pesan tentang anaknya yang sakit. Janda Supardjo, dalam percakapannya dengan saya, membantah pernyataan tentang pesan sandi itu. Ia menegaskan bahwa anaknya memang sakit keras (wawancara dengan Ibu Supardjo).

[8] Transkrip Mahmilub, sidang Supardjo, Februari-Maret 1967, *pleidooi dari tertuduh*, 5.

[9] Supardjo menceritakan kembali kisahnya ini di depan mahkamah (transkrip Mahmilub, sidang Supardjo, *pleidooi dari tertuduh*, 42.

[10] Wawancara dengan Sugiarto (anak laki-laki Supardjo).

[11] Selagi bergerak di bawah tanah di Jakarta, Sudisman adalah penulis utama otokritik yang diterbitkan atas nama Politbiro pada September 1966. Supardjo mungkin menulis analisisnya sesudah membaca dokumen Politbiro itu. Fic berpendapat bahwa Supardjo menulis analisisnya pada pertengahan Oktober 1966, tapi sumber Fic, yaitu penuntut umum pada sidang Mahmilub untuk Supardjo, tidak dapat diandalkan untuk informasi ini karena ia tidak mungkin mengetahui sendiri (Fic, *Anatomy of the Jakarta Coup*, 330n1). Fic menyebut dokumen ini sebagai otokritik Supardjo – sepatah kata yang entah mengapa ditulis dalam huruf-huruf kapital tebal di seluruh bukunya. Istilah otokritik tidak pernah

muncul di dalam dokumen itu sendiri. Fic tidak mengatakan bahwa istilah itu penamaan dia sendiri untuk dokumen Supardjo tersebut.

[12] Transkrip Mahmilub, proses peradilan Supardjo, sidang keempat, 25 Februari 1967, 49, 55. Dalam pledoinya Supardjo lagi-lagi menyangkal dirinya sebagai penulis dokumen termaksud (*pleidooi dari tertuduh*, 23).

[13] Transkrip Mahmilub, proses peradilan Supardjo, sidang kelima, 26 Februari 1967, 2.

[14] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September*.

[15] Transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, kesaksian Sjam, 7 Juli 1967. Bagian yang memuat kesaksian Sjam ini tidak diberi nomor halaman.

[16] Transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang ketiga, 24 Februari 1967, 48-50.

[17] Tidak jelas siapa perwira yang dimaksud Supardjo. Setidaknya memang ada dua perwira yang menarik diri dari rapat perencanaan sesaat sebelum aksi dimulai: Mayor Agus Sigit dan Kapten Wahyudi, keduanya dari garnisun Angkatan Darat Jakarta. Menurut Atmodjo, Sigit menarik diri karena ia berpendapat rencana itu tidak akan berhasil. Atmodjo bertemu Sigit di penjara pada akhir 1960-an. Walaupun Sigit tidak ikut serta dalam G-30-S, di mata militer kehadirannya pada rapat perencanaan cukup untuk alasan pemenjaraan baginya (wawancara dengan Heru Atmodjo, 19 Desember 2004). Manai Sophiaan, berdasarkan informasi tangan kedua dan ketiga, menyatakan bahwa beberapa perwira menarik diri dari komplotan karena meragukan keberhasilannya (Sophiaan, *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, 89).

[18] Transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang keempat, 25 Februari 1967, 18.

[19] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002.

[20] Wawancara dengan Rewang.

[21] Transkrip Mahmilub, sidang pengadilan Supardjo, sidang ketiga, 24 Februari 1967, 2.

[22] Sophiaan, *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, 171-177; Saelan, *Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66*, 305-306; G. Kahin, *Southeast Asia*, 156-57.

[23] Walaupun jamak dipercaya di Indonesia bahwa Green ikut campur tangan dalam kup Jenderal Park, kemungkinan ia tidak terlibat. Setelah memeriksa kembali dokumen-dokumen yang sudah dideklasifikasi, Bruce Cumings percaya bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak mengetahui sebelumnya tentang kup tersebut (Cumings, *Korea's Place in the Sun*, 348).

[24] Subekti, mantan sekretaris Politbiro CC-PKI, menulis dalam analisisnya tentang G-30-S pada 1986 bahwa Pono, yang dipenjara bersamanya di Cipinang, Jakarta, menggambarkan Sjam sebagai orang yang menakut-nakuti dan mengancam mereka yang dalam rapat-rapat perencanaan G-30-S tidak sependapaat dengannya. (Subekti, "G-30-S Bukan Buatan PKI," 11).

[25] Kesaksian Sjam, transkrip Mahmilub, peradilan Sudisman, 8 Juli 1967.

[26] Wawancara dengan Bungkus. Juga lihat komentarnya dalam Anderson, "World of Sergeant-Major Bungkus," 24-25.

[27] *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono,* 55-56.

[28] Kapten Soeradi, perwira bawahan Latief, dalam kesaksiannya di Mahmilub juga mengatakan bahwa jumlah sektor ada enam. Dikatakannya, ia pernah diberi keterangan singkat tentang rencana G-30-S oleh Mayor Soejono pada 23 September. Pada hari berikutnya ia diperkenalkan oleh Soejono dengan para komandan enam sektor itu. Ia yakin mereka semua orang-orang PKI. Pada 25 September ia pergi ke Lubang Buaya untuk merencanakan pekerjaan sektor-sektor dan mendefinisikan subsektor-subsektor. (*"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung*, 82-83). Masalah sektor ini merupakan kasus lain dan saya mengandalkan kesaksian-kesaksian di Mahmilub. Dari bukti yang lebih andal – dokumen Supardjo dan wawancara Juwono, yang akan saya uraikan belakangan – jelas bahwa G-30-S mempunyai sektor-sektor untuk sukarelawan. Karena baik Njono maupun Suradi, pada kesempatan terpisah, menyatakan ada enam sektor, lebih tepat bertumpu pada angka mereka ketimbang pada angka Supardjo.

[29] Kesaksian Njono, *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono,* 87-98.

[30] Wawancara dengan Juwono. Juwono nama samaran.

[31] Seorang loyalis Sukarno, Manai Sophiaan, mengetahui tentang rencana penyelenggaraan dapur umum ini ketika ia berbicara dengan mantan anggota-anggota PKI bertahun-tahun kemudian, lihat Sophiaan, *Kehormatan Bagi Yang berhak*, 92.

[32] Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia*, 292.

[33] *Ibid*., 294. Emblem itu dimaksud untuk membedakan antara pasukan yang ikut aksi dengan yang tidak.

[34] Wawancara dengan Oey Hay Djoen, 24 Januari 2002, Jakarta.

[35] Kesaksian Peris Pardede, *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono,* 134. Karena informasi yang diberikan Pardede kepada tentara sesudah ia tertangkap, Sudisman menganggapnya sebagai pengkhianat PKI (wawancara dengan Tan Swie Ling). Swie Ling menyembunyikan Sudisman di rumahnya di Jakarta pada 1966.

[36] Kesaksian Njono, *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono,* 87-88.

[37] Transkrip Mahmilub, sidang Sudisman, 7 Juli 1967. Menurut analisis Supardjo, Sjam tidak secara sepihak memutuskan untuk mundur. Pimpinan G-30-S tidak pernah membuat keputusan setegas itu. Manai Sophiaan menyatakan Sjam mengira massa PKI akan melancarkan demonstrasi begitu G-30-S dimulai (Sophiaan, *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, 81, 89).

[38] CIA, *Indonesia – 1965*, i.

[39] Sekretariat Negara, *Gerakan 30 September*: *Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, 121.

[40] Transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, *pleidooi dari tertuduh*, 6, 11. Seperti saya kemukakan dalam bab 1, dokumen asli Dekrit no. 1 tidak ada, sehingga tidak mungkin memastikan siapa yang telah menandatanganinya.

[41] Transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang ketiga, 24 Februari 1967, 37.

[42] Crouch, *Army and Politics in Indonesia*, 134. Demokrasi Terpimpin ialah istilah Presiden Sukarno untuk bentuk pemerintahan yang dimulainya pada 1959. Ia membubarkan Konstituante yang sedang menyusun UUD baru; memulihkan konstitusi pertama negara, yang telah ditulis dengan tergesa-gesa pada 1945; menunda pemilihan umum; dan menyusun kembali anggota parlemen.

[43] Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra dipenjarakan pada 16 Februari 1966 dengan tuduhan terlibat dalam G-30-S. Ia dibebaskan sesudah hampir satu bulan ditahan dan kemudian dikenai tahanan rumah. Tahun 1969 ia dipenjara lagi dan baru bebas tahun 1981. (Reksosamodra, *Memoar*, 250-251).

[44] Transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang kedua, 23 Februari 1967, 51.

[45] Dalam memoarnya Suharto menyebut ia meninggalkan markas Kostrad tapi tidak menunjuk kapan waktunya. (Suharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,* 107).

[46] Dani membantah pernyataan Supardjo bahwa ia mendukung pemboman terhadap Kostrad (Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965*, 255). Pada persidangannya Supardjo menyatakan Dani tidak mendukung pemboman (transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang kedua, 23 Februari 1967, 55).

[47] Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002.

[48] *Ibid*.

[49] Kementerian Luar Negeri kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta, 13 Oktober 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964-1968*, 26:320

[50] Kedutaan Besar AS di Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri, 4 November 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964-1968*, 26:354.

[51] Di depan sidang Mahmilub untuknya Omar Dani bersaksi bahwa Sukarno menolak Suharto sebagai *caretaker* sementara, karena ia "terlalu *koppig*" (dalam Crouch, *Army and Politics in Indonesia*, 128).

[52] Tentang pemindahan dini Suharto dari kedudukannya sebagai panglima kodam pada 1959, lihat Crouch, *Army and Politics in Indonesia*, 40, 124-125.

[53] Benjamin, *Reflections*, 206.

4

SJAM DAN BIRO CHUSUS

Keberadaannya mustahil, tak terjelaskan, dan membingungkan sekaligus. Ia masalah yang tak bisa dipecahkan. Tak terbayangkan bagaimana ia menjadi ada, bagaimana ia berhasil mencapai sejauh itu.

Joseph Conrad, **Heart of of Darkness (1902)**

Dokumen Supardjo memungkinkan kita membongkar sebuah misteri: hubungan antara para perwira militer (Untung, Latief, dan Soejono) dan kelompok sipil (Sjam dan Pono) dalam kepemimpinan Gerakan 30 September. Di antara lima tokoh pimpinan inti, Sjam tokoh yang terpenting. Sayangnya, dokumen ini tidak membantu kita menjawab pertanyaan-pertanya-an yang secara logis menyusul: Siapa Sjam? Apakah Sjam pembantu setia Aidit dan hanya mengikuti perintah? Kemudian, apakah Aidit pemimpin G-30-S yang sebenarnya, yang memainkan Sjam dari belakang layar? Atau, apakah Sjam mempunyai kemandirian, sehingga ia sendiri bisa merancang G-30-S dan membiarkan Aidit tidak tahu detil rencana? Apakah Sjam lebih bekerja untuk tentara ketimbang untuk Aidit? Ataukah ia bekerja untuk pihak ketiga? Biro Chusus yang dipimpinnya itu apa, dan bagaimana badan itu berfungsi di dalam partai?

Mengingat langkanya bukti, menjadi mungkin untuk membayangkan beraneka ragam skenario dengan tingkat-tingkat kesalahan yang berbeda-beda bagi para pelaku yang terlibat. Aidit, misalnya, bisa

dikemukakan sebagai dalang dari seluruh operasi, secara pribadi terlibat dalam setiap aspeknya, atau sebagai sosok naif bernasib sial dalam suatu perangkap terperinci yang direkayasa Sjam. Kinerja dalam tubuh partai sama sekali kabur, setidak-tidaknya bagi mereka yang berperhatian terhadap fakta-fakta dan tidak diwajibkan memercayai dongeng-dongeng yang dipaksakan rezim Suharto terhadap masyarakat Indonesia.

Dalam bab ini saya menyajikan informasi baru yang dapat membantu mengurangi jumlah skenario yang masuk akal. Tetap banyak lubang-lubang yang tersisa tapi beberapa unsur kisah dapat dijernihkan. Banyak dari informasi ini saya peroleh dari seorang mantan anggota partai yang mengenal Sjam dan Biro Chusus secara rinci dan mendalam. Saya berbincang dengannya berkali-kali selama beberapa tahun. Sesudah ia yakin saya dapat dipercaya untuk menerima kisah-kisahnya, dan saya pun yakin kisahnya dapat dipercaya, kami merekam wawancara dengannya. Ia juga memberi saya sebuah tulisan otobiografi enam puluh satu halaman terketik. Karena ia minta agar tetap anonim, saya tidak dapat menceritakan posisinya di dalam partai dan menjelaskan bagaimana ia dapat memperoleh pengetahuannya. Saya hanya dapat menegaskan bahwa saya yakin ia dalam posisi yang memungkinkan untuk tahu dari dekat kinerja Biro Chusus. Karena ceritanya sampai sekarang merupakan sumber utama satu-satunya yang ada tentang para anggota biro ini, selain kesaksian-kesaksian mereka di sidang-sidang Mahmilub, maka sepatutnyalah cerita ini dikaji dengan seksama. Karena didasarkan atas ingatan, kisah ini kemungkinan mengandung sejumlah ketidaktepatan. Namun, saya percaya bahwa kisahnya sebagian besar dapat diandalkan. Beberapa bagian daripadanya dapat didukung kebenarannya melalui sumber-sumber lain. Nama samaran yang saya gunakan di sini, Hasan, dipilih secara acak.

LATAR BELAKANG SJAM DAN BIRO CHUSUS

Kapan Biro Chusus (BC) mulai ada? Menurut Hasan secara teknis Sjam benar ketika dalam kesaksiannya di sidang mengaku bahwa biro ini mulai pada 1964.[1] Hasan menegaskan nama itu muncul sekitar 1964 tapi menurutnya organisasinya sendiri telah berfungsi setidak-tidaknya sejak

awal 1950-an, ketika partai direorganisasi di bawah pimpinan Aidit. Satu bagian di dalam partai diserahi tugas untuk menumbuhkan dukungan di kalangan militer. Cabang klandestin partai ini bekerja di dalam Departemen Organisasi PKI, yang bersifat terbuka, yang mengurus masalah-masalah seperti pengangkatan, penempatan, dan pendidikan anggota partai. Sampai 1964 cabang ini dikenal sebagai Bagian Militer pada Departemen Organisasi. Kebanyakan staf Departemen Organisasi tidak tahu-menahu tentang keberadaan bagian yang dipimpin oleh seseorang bernama Karto ini. Dalam kesaksiannya Sjam mengatakan ia sudah ada di Departemen Organisasi sejak 1960. Hal yang tidak diceritakannya adalah bahwa ia bekerja di bawah pimpinan Karto sebagai anggota rahasia departemen tersebut. Ia kemudian menjadi pimpinannya, ketika Karto meninggal pada 1963 atau 1964.

Hasan menggambarkan Karto sebagai anggota senior PKI yang bergabung dengan partai pada 1920-an. Ia berasal dari Solo dan ikut aktif dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda dari 1945 sampai 1949. Hasan, ketika itu anggota laskar (milisi rakyat) di Jawa Tengah, mengenal Karto dalam tahun-tahun perjuangan bersenjata tersebut, dan sesekali bertemu dengannya dalam tahun-tahun belakangan:

> Dia waktu itu [tahun 1940-an] menjadi anggota CC bagian tani. Bagian tani. Jadi dia punya pengaruh di pedesaan, Pak Karto itu, di pedesaan. Dan dia karena orang kawakan, orang yang sudah berpengalaman itu, jadi kader-kader di militer itu banyak oleh Pak Karto sendiri. Jadi Pak Karto dianggap sebagai bapaklah, bapak di Jawa Tengah, Pak Karto itu, iya. Orangnya memang tua, tapi dia ini ya – apa, memang seperti orang ’26, ’27 ya – kalo nggak salah pernah dibuang ke Boven Digul.[2] Begitu banyak sengsara, hidupnya di kantor BTI, tidak punya istri, tapi kemudian kena kanker. Kanker, terus dibawa ke Soviet. Soviet bilang terus nggak sanggup, ini tinggal tunggu enam bulan, kembali lagi ke sini terus enam bulan betul-betul mati, ’63 atau ’64.[3]

Dua mantan pimpinan PKI bercerita kepada saya bahwa nama samaran Karto ialah Hadi Bengkring karena badannya yang sangat kurus

(*bengkring*, perkataan dalam bahasa Jawa, berarti kurus atau kerempeng). Menurut ingatan Hasan, Karto meninggal akibat kanker paru-paru karena ia seorang perokok berat sepanjang hidupnya. Kebiasaan ini tidak pernah ditinggalkannya pada saat ia sudah menderita kanker sekalipun.[4]

Waktu di dalam penjara bersama mantan tokoh-tokoh PKI sesudah 1965, Siauw Giok Tjhan, pimpinan organisasi masyarakat Tionghoa Indonesia yang pro-Sukarno, Badan Permusyawaratan Kebangsaan Indonesia (Baperki), mendengar bahwa Karto ialah kepala Bagian Militer dalam partai. Siauw tidak banyak tahu tentang PKI sebelum 1965 dan tentu saja tidak tahu apa-apa tentang siapa Karto. Di penjara Siauw menjadi semacam ilmuwan sosial yang mengumpulkan informasi tentang G-30-S untuk memahami bagaimana gerakan itu terjadi. Ia menulis dalam analisisnya yang belum pernah diterbitkan bahwa Karto "adalah seorang tua, salah seorang pendiri PKI yang dihormati oleh banyak tokoh PKI."[5]

Seorang mantan anggota parlemen dari fraksi PKI, Oey Hay Djoen, mengenang Karto sebagai tokoh terkenal di dalam partai, "Ia seorang kawan yang sepertinya ada di mana-mana dan ke mana-mana, selalu saja dan kapan saja. Tapi ia tidak bertingkah congkak. Ia seorang kawan yang pendiam; kadang-kadang tersenyum. Tapi ia selalu ada di sekitar partai. Dan ia disegani. Orang tahu ia seorang tokoh penting walaupun tidak mempunyai kedudukan apa pun. Kami tidak menyoalkannya."[6]

Justru karena kedekatannya dengan banyak tokoh militer dalam revolusi Indonesia, Karto lalu bertanggung jawab meneruskan hubungan partai dengan mereka sesudah kemerdekaan nasional tercapai. Pada 1950-an dan awal 1960-an, selagi tetap menjadi pimpinan partai secara terbuka di Jakarta, ia menjaga jaringan hubungan rahasia di kalangan militer di seluruh negeri. Di setiap provinsi sementara anggota partai menjalin kontak dengan para perwira. Hasan berkata, "Umumnya di daerah itu Pak Karto mengambil anak daerah dari daerah itu sendiri, dari BC itu. Tapi wakilnya, wakilnya itu dikirim oleh Pak Karto dari orang Jawa, orang Sunda, ada yang dikirim ke sana, wakil-wakilnya. Tapi kalau kepalanya, kepala BC itu mesti orang situ; Padang ya orang Padang. Medan, orang Medan, kepala-kepalanya. Tapi wakilnya itu kader-kadernya Pak Karto yang dikirim ke sana. Untuk mengawasi supaya jangan sampai dia keliru dalam melaksanakan itu. Banyak, dari Solo, Yogya, Jawa Timur itu, yang

di luar Jawa itu, di Riau, Padang, di Sulawesi Utara juga, Banjarmasin."

Dalam pekerjaan legalnya Karto seorang pemimpin yang teliti dan sangat memperhatikan watak kader partai. Hasan meneruskan, "Pak Karto, waduh, pimpinannya njelimet itu, soal kecil-kecil mesti dia tanyakan, ya kecil-kecil itu. Ya semangat '26-'27 itu kan keras gitu, terhadap kader itu keras sekali dia. Kalau Pak Karto mendalam, 'Di desa kamu itu kader mana itu?' Sekecil-kecilnya, 'Kader itu sudah berbuat apa, kamu sudah berbuat apa di desa itu, menguntungkan atau tidak bagi kaum tani?' Waduh, ini harus 'Belum, belum.' Nanti seminggu dia ingat lagi soal kecil-kecil."

Dari penggambaran Hasan, Karto tampaknya banyak mempunyai kesamaan pandangan dengan Tan Ling Djie, pimpinan partai yang disingkirkan Aidit dan kawan-kawan pada 1951. Model partai yang semula merupakan organisasi kader-kader militan yang terpercaya, benar-benar terpilih, terlatih baik, yang hidup di tengah-tengah kaum tani dan kaum buruh dan membangun kekuatan mereka dari bawah. Kader angkatan tua yakin, partai harus dirancang untuk bertahan terhadap kesakitan penindasan, seperti yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang, dan berupaya menuju perebutan kekuasaan negara dengan gerakan bersenjata. Sementara kalangan melihat strategi Aidit sebagai pemborjuisan partai: anggota-anggota partai menjadi pejabat pemerintahan, tinggal di rumah-rumah besar di ibu kota, menerima dana dari kaum pengusaha, dan mendukung politik populis Sukarno. Banyak dari tokoh angkatan tua PKI tidak bertahan lagi di dalam pimpinan begitu generasi Aidit mengambil alih kepemimpinan partai. Karto rupanya menemukan cara tertentu untuk tetap menjadi tokoh penting partai, mungkin dengan jalan kompromi sambil tetap berpegang pada pendapat-pendapatnya yang berbeda. Lebih dari itu, jaringan kontaknya yang luas dengan militer tentu membikin sulit pimpinan generasi muda untuk mendepaknya keluar.

Bagian Militer, bentuk awal Biro Chusus, secara alamiah timbul dari pengalaman partai dengan perjuangan bersenjata yang tersebar tanpa persiapan antara 1945-1949. Banyak pemuda yang simpati kepada gerakan kiri bergabung dalam laskar-laskar dan berhasil masuk ke tentara reguler. Ketika perjuangan bersenjata berakhir, partai tidak mau kehi-

langan para simpatisan ini dan juga sebaliknya. Untuk mengembangkan Bagian Militer pimpinan partai tidak merujuk ke ranah esoterik teori Partai Komunis. Kerja ini sekadar mempertahankan kontak dengan personil militer yang belum terpisahkan dari afiliasi mereka dengan kaum politisi sipil. Mantan anggota Politbiro Iskandar Subekti menulis, dalam penuturan rahasianya pada 1986 tentang G-30-S, bahwa “BC Central merupakan satu badan yang khusus mengurus kawan-kawan di kalangan ABRI.”[7]

Berlawanan dengan propaganda rezim Suharto, Biro Chusus bukanlah suatu skema licik dan jahat yang hanya ditemui pada PKI. Partai-partai politik lain juga memiliki jaringan serupa di kalangan militer. Partai Sosialis Indonesia (PSI), misalnya, mempunyai jaringannya sendiri di kalangan para perwira.[8] Justru hubungan inilah yang memudahkan kerja sama antara PSI dan kolonel-kolonel pembangkang dalam pemberontakan PRRI/Permesta, 1957-58, di Sumatra dan Sulawesi (lihat Bab 6 tentang pemberontakan-pemberontakan ini). Untuk membangun aura keramat di sekitar tubuh militer, rezim Suharto menggambarkan Biro Chusus sebagai infiltrasi asing oleh musuh jahat yang gigih dan khas terhadap militer. Padahal militer sesudah kemerdekaan penuh dengan bermacam-macam klik berdasarkan kecenderungan politik masing-masing. Seperti dinyatakan Daniel Lev, para perwira “selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok sipil dalam suasana pascarevolusi Indonesia yang sangat dipolitisasi.” Para perwira militer “mempertahankan atau mengembangkan hubungan dengan partai-partai politik, berdasarkan hubungan pribadi mereka sendiri atau melalui hubungan keluarga dan hubungan sosial.”[9]

Sesudah Karto meninggal, Aidit mengangkat Sjam sebagai penggantinya. Di kalangan tahanan politik PKI tersebar desas-desus bahwa sebelum meninggal Karto meminta agar Aidit tidak menunjuk Sjam.[10] Desas-desus itu mungkin saja benar. Hasan mengatakan bahwa watak Sjam – pembual, agresif, dan tidak sabar – bertentangan dengan watak Karto. Menurut Hasan, pengangkatan Sjam di Biro Chusus disebabkan oleh kesukaan Aidit kepadanya. Sjam dikenal sebagai orangnya Aidit. Ia sudah lama bersahabat dengan Aidit, beda dengan Pono dan Bono, yang dipandang sebagai orang-orangnya Karto.

Sjam bersaksi bahwa ia mulai bekerja sebagai kepala Biro Chusus

pada November 1964. Tapi Hasan yakin ia sudah bekerja beberapa waktu sebelum Mei 1964. Untuk alasan-alasan yang tidak diketahui, oleh tangan-tangan tak dikenal, jaringan Karto diganti namanya dengan Biro Chusus pada sekitar saat pergantian pimpinan. Bila Karto seorang anggota partai yang berpengalaman, terkenal, dan disukai orang, yang menggabungkan kerja terbuka dengan jaringan kerja militer tertutup, Sjam seorang tokoh tak dikenal dalam partai yang bergerak di bawah bayang-bayang.

Tidak banyak diketahui dengan pasti tentang masa kanak-kanak dan masa muda Sjam. Dalam kesaksiannya di ruang sidang ia menceritakan garis besar riwayat hidupnya. Ia lahir di Tuban, sebuah kota di pantura Jawa Timur, sekitar 1924. Ia bersekolah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Pertanian Menengah Atas di Surabaya. Ketika Jepang memasuki Jawa pada 1942 dan sekolah pertanian itu harus ditutup, ia meninggalkan bangku sekolah sebelum tamat belajar. Ia pindah ke Yogyakarta pada sekitar saat itu dan masuk Sekolah Menengah Dagang. Pada waktu saya melakukan penelitian sejarah lisan tentang eks tapol, saya bertemu dengan Sukrisno, yang ternyata teman dekat Sjam di Yogyakarta.[11] (Seperti Hasan, Sukrisno tidak mau dikenal dengan nama yang sesungguhnya.) Ia membenarkan Sjam lahir pada 1924 dan bersekolah di sekolah dagang di Yogyakarta. Di sekolah itulah keduanya menjadi berteman. Sukrisno juga membenarkan apa yang sudah diketahui sementara sejarawan bahwa Sjam adalah anggota yang disebut sebagai kelompok Pemuda Pathuk.[12] Menurut ingatan Sukrisno, pada sekitar 1943 pemuda-pemuda kota Yogya yang ingin melawan tentara pendudukan Jepang mulai berkumpul di kampung Pathuk. Pimpinan kelompok ini adalah Djohan Sjahroezah dan Dayino; kedua-duanya tergabung dalam Partai Sosialis. Kadang-kadang pimpinan senior Partai Sosialis tingkat nasional seperti Sutan Sjahrir datang berkunjung. Menurut janda Dayino, Ibu Oemiyah, Sjam memang anggota Pemuda Pathuk.[13] Baik Ibu Oemiyah maupun Sukrisno ingat bahwa Sjam ikut dalam penyerangan terhadap kantor utama pemerintah Jepang di Yogyakarta pada September 1945. Massa rakyat mengepung kantor itu, sementara para pemuda militan, di antara mereka adalah anggota Pemuda Pathuk, menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera Indonesia.

Kegiatan Sjam sesudah meninggalkan Yogyakarta merupakan

misteri. Dalam kesaksiannya di persidangan, Sjam mengaku masuk PKI pada 1949. Menurut Benedict Anderson ada bukti dokumenter yang memperlihatkan bahwa Sjam pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah negara boneka Belanda di Jawa Barat pada 1949 dan menjadi ketua PSI cabang Banten pada 1950-51.[14] Bukti demikian memperlihatkan bahwa ia bukanlah seorang nasionalis yang militan selama tahun-tahun perjuangan tersebut dan bukan pula anggota PKI pada awal 1950-an. Sesudah Peristiwa Madiun 1948 kaum sosialis dan kaum komunis pecah. Walaupun pada waktu di Yogyakarta ia dekat dengan kaum sosialis, Sjam tidak mungkin bersekutu dengan kedua-duanya sekaligus, PSI dan PKI, pada awal 1950-an itu.

Sukrisno menjernihkan kekeruhan di seputar kegiatan Sjam. Ia dan Sjam meninggalkan Yogyakarta bersama-sama pada 1947 dan pindah ke Jakarta. Mereka tinggal di rumah yang sama, bekerja di kantor yang sama, mempelajari Marxisme-Leninisme dari guru yang sama, dan bersama-sama mendirikan serikat untuk buruh pelabuhan. Ia barangkali teman terdekat Sjam dari 1943 sampai 1950. Menurut Sukrisno pimpinan Partai Sosialis dalam kelompok Pathuk mengirim lima pemuda ke Jakarta pada 1947. Ketika itu Belanda sudah menduduki ibu kota tetapi mengijinkan Republik Indonesia, yang berkeduduk-an di Yogyakarta, untuk membuka kantor beberapa kementerian tertentu di Jakarta. Pimpinan Partai Sosialis mengingini agar lima pemuda itu membantu para pejabat Republik di Jakarta menyelundupkan perbekalan dan uang ke Yogyakarta. Lima orang itu dipilih karena mereka dapat diandalkan, berakal panjang, dan cukup berpendidikan; mereka bukan sekadar pemuda-pemuda militan yang hanya baik untuk perang. Kelima-limanya, saat itu berumur awal dua puluhan, ialah Munir, Hartoyo, Widoyo, Sjam, dan Sukrisno sendiri. Setelah tiba di Jakarta, mereka segera menghubungi para pejabat Republik dari berbagai kementerian. Sjam dan Sukrisno mulai bekerja di Kementerian Penerangan, yang kantornya untuk daerah Jawa Barat berkedudukan di Jakarta. Mereka menerima gaji dan jabatan cukup tinggi sebagai pegawai pemerintah meskipun pekerjaan mereka semacam kombinasi antara pekerjaan pesuruh kantor dan agen terselubung. Sukrisno ingat, suatu ketika Sjam diperintahkan membawa uang tunai sangat banyak dari kantor untuk membeli ban-ban mobil, kemudian mengatur pemuatan ban-ban itu di kereta api yang menuju ke pedalaman Jawa. Buruh kereta

api di stasiun Manggarai di Jakarta membantu pengangkutan perbekalan untuk pasukan Republik ini.

Lima pemuda itu tinggal di Jalan Guntur di sebuah rumah yang dikosongkan oleh Residen Bogor, seorang nasionalis, yang pindah ke ibu kota Republik di Yogyakarta. Tidak lama kemudian mereka bertemu beberapa orang pemuda pelajar dan mahasiswa yang baru kembali dari Belanda. Di negeri itu mereka menjadi anggota Partai Komunis Belanda (CPN) dan ikut dalam perjuangan antifasis bawah tanah dalam masa perang dunia. Salah seorang di antara mereka, Hadiono Kusumo Utoyo, bekerja bersama Sjam dan Sukrisno di kantor Kementerian Penerangan di Jakarta. Ia menjadi mentor mereka dalam Marxisme dan Leninisme.[15] Sekali sepekan, dengan jadwal teratur, mereka berjalan ke rumah Utoyo di Jalan Kebon Sirih untuk belajar di bawah bimbingannya. Sukrisno mengenang sebuah buku yang mereka baca ketika itu adalah karya Lenin *State and Revolution* dalam terjemahan Belanda. Dari tokoh-tokoh komunis di Belanda mereka pernah menerima kopor-kopor penuh buku-buku yang dengan bantuan para pelaut diselundupkan ke kota Jakarta. Pendidikan politik ini merupakan pengalaman yang mencerahkan bagi mereka. Pimpinan Partai Sosialis dalam kelompok Pathuk telah memberi Sukrisno dan kawan-kawan lebih dari sekadar sebuah tempat berkumpul dan semangat kerakyatan pada umumnya. Menurut Sukrisno aspirasi awalnya adalah ingin menjadi orang penting dalam pemerintahan pascakemerdekaan dengan pangkat tinggi dan gaji besar. Saat belajar tentang komunisme dari mantan anggota-anggota CPN yang baru kembali, Sukrisno merasa mendapat pengetahuan yang berbobot dan ilmiah. Ia mengubah rencana kariernya. Ia dan Sjam keluar dari pekerjaan mereka di Kementerian Penerangan, masuk PKI, dan mulai mengorganisasi serikat buruh, mula pertama di bengkel reparasi kendaraan bermotor pemerintah pendudukan Belanda, kemudian di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka mendirikan Serikat Buruh Kapal dan Pelayaran (SBKP) pada akhir 1948 dan menjadi pimpinan-pimpinan terkemukanya sampai Februari 1950, ketika serikat buruh ini berfusi dengan serikat sekerja sejenis yang bergerak di daerah Republik, yaitu Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). Sukrisno dan Sjam tidak mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan untuk serikat buruh baru, yang mempertahankan nama SBPP. Mereka malahan ditunjuk

untuk menduduki posisi dalam PKI. Dengan pembubaran serikat buruh mereka, Sukrisno dan Sjam berpisah untuk menempuh jalan masing-masing. Bertahun-tahun kemudian Sukrisno kadang kala bertemu Sjam. Sjam pernah meminta bantuannya untuk mengontak beberapa teman lama di kelompok Pathuk yang telah menjadi perwira militer. Sukrisno menduga peranan Sjam dalam partai ialah untuk mengurus para perwira, tapi ia tidak tahu apa persisnya peranan Sjam dan juga tidak tahu-menahu tentang adanya Biro Chusus.

Sukrisno yakin Sjam tidak bekerja untuk negara boneka Belanda, Negara Pasundan, pada 1949. Ia bekerja di Jakarta sebagai pegawai negeri pemerintah Republik dari 1947 sampai 1948 dan sibuk mengorganisasi serikat buruh dari 1948 sampai 1950. Pertanyaan barangkali timbul karena Sjam bekerja di daerah pendudukan Belanda untuk Kementerian Penerangan daerah Jawa Barat. Sukrisno juga yakin ia bukan anggota PSI pada awal 1950-an. Sjam benar ketika memberikan kesaksiannya bahwa ia masuk PKI pada 1949. Sukrisno juga masuk partai dalam tahun yang sama. Walaupun lima anggota kelompok Pathuk yang dikirim ke Jakarta semuanya masuk PKI pada akhir 1940-an, mereka tetap bersahabat dengan tokoh-tokoh sosialis yang telah membimbing mereka di Yogyakarta.[16] Kelima-limanya tetap bergaul dengan tokoh-tokoh PSI bahkan ketika hubungan antara kedua partai politik itu menjadi sangat antagonistik.

Bagaimana Sjam berkenalan dengan Aidit merupakan kisah yang didasarkan pada kesimpulan atas sekian dugaan. Sukrisno membenarkan tulisan sejarawan Jacques Leclerc bahwa Sjam membantu Aidit muncul kembali pada pertengahan 1950 setelah dua tahun hidup di bawah tanah. Segera sesudah Peristiwa Madiun pecah pada 1948, ketika tentara di bawah Sukarno dan Hatta menyerang PKI, Aidit melarikan diri dari Jawa Tengah dan bersembunyi di Jakarta – kota yang sudah sangat dikenalnya sejak ia menjadi aktivis nasionalis pada pertengahan 1940-an. Begitu Belanda pergi pada 1949 dan keadaan aman untuk muncul kembali, Aidit dan seorang pimpinan lain PKI, Lukman, memilih muncul dulu di pelabuhan Tanjung Priok, seakan-akan mereka baru saja turun dari kapal. Mereka mengaku bahwa sebelumnya mereka berada di Vietnam dan Tiongkok, dan menyaksikan langsung revolusi kaum komunis di sana. Menurut cerita Sukrisno, Sjam diberi tugas mengawal Aidit keluar dari

pelabuhan, “Saya pergi dengan Sjam ke Tanjung Priok hari itu, tapi tidak ikut bersama dengannya ke dermaga bertemu Aidit. Karena saya belum pernah melihat Aidit, saya tidak tahu seperti apa wajah dan sosoknya. Saya ada di luar.” Rupanya Sjam pernah bertemu Aidit sebelumnya karena ia dapat mengenalinya. Menurut Leclerc, Sjam memudahkan Aidit dan Lukman melalui kantor imigrasi saat mereka mengalami sedikit kesulitan karena mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan.[17] Paling tidak, dari saat di Tanjung Priok itulah Aidit tentunya merasa berutang budi kepada Sjam untuk pertolongannya dalam memperagakan sekelumit sandiwara tersebut.

Sjam tampaknya masuk di Bagian Militer di bawah pimpinan Karto sekitar 1950-an. Walaupun ia mengaku sudah masuk di Departemen Organisasi PKI (yang membawahi Bagian Militer) pada 1960, sangat mungkin ia sudah masuk jauh sebelumnya. Dalam persidangannya Supardjo mengatakan, ia sudah mengenal Sjam sebagai agen rahasia PKI sejak 1956.[18] Sukrisno mengatakan, dari teman-teman dan kenalan-kenalannya di kelompok Pathuk yang bergabung dalam ketentaraan saja tentunya Sjam sudah mempunyai jaringan kontak siap pakai di kalangan militer. Sjam mungkin tidak akan ditunjuk menjadi kepala Biro Chusus pada 1963 atau 1964 jika ia tidak mempunyai jejak panjang dalam pekerjaan rahasia atas nama partai. Sjam tentu harus membuktikan dirinya kepada Aidit selama bertahun-tahun, sampai saat Aidit memiliki kepercaya-an penuh terhadap kesetiaannya kepada partai serta kemampuannya dalam membangun hubungan dengan para perwira militer.

KINERJA BIRO CHUSUS DI BAWAH SJAM

Pada saat G-30-S meletus Sjam bukanlah seorang perwira militer dengan pangkat tinggi, bukan juga seorang tokoh politik sipil terkemuka. Tak seorang pun berpikir bahwa sosok yang tampak tidak berarti ini adalah pimpinan sebuah operasi militer yang ambisius untuk merebut “seluruh kekuasaan” sampai ketika Sjam sendiri memberi kesaksian demikian pada 1967. Para pengamat pada umumnya mengira ia tak lebih dari seorang fungsionaris partai tak berwajah dan mudah diganti yang kebetulan dipilih Aidit sebagai perantara. Sejak Sjam tampil di sidang Mahmilub

peranannya di dalam partai telah menjadi sumber banyak spekulasi. Keterangan dari Hasan menjernihkan beberapa misteri di sekitar Sjam dan Biro Chusus.

Menurut Hasan, Biro Chusus di Jakarta merupakan tim lima orang, yang disebut Biro Chusus Pusat. Pono sebagai asisten Sjam, Bono sekretaris, Wandi bendahara, dan Hamim pelatih untuk kader BC.[19] Dari lima orang itu hanya Sjam, Pono, dan Bono yang menjalin hubungan dengan personil militer untuk tujuan pertemuan intelijen. Wandi dan Hamim bekerja sebagai staf pembantu mereka. Di kebanyakan provinsi ada tim tiga orang yang disebut Biro Chusus Daerah. Walaupun Biro Chusus Pusat mengutamakan para perwira yang ada di Jakarta, biro daerah melengkapi pekerjaan Biro Chusus di pusat.

Kelima orang anggota Biro Chusus Pusat tidak dikenal umum sebagai anggota PKI. Mereka secara sadar berusaha memastikan bahwa masyarakat tidak melihat mereka sebagai anggota partai ataupun simpatisannya. Masing-masing muncul sebagai usahawan. Kata Hasan, "Sjam mempunyai perusahaan pabrik genteng. Bono mempunyai perusahaan bengkel, Pono mempunyai perusahaan restoran. Hamim memegang perusahaan bus. Jadi keluar itu mereka sebagai orang-orang yang hidup di tengah masyarakat dengan kamuflase-kamuflase yang berlaku di masyarakat, begitu. Tetangga itu nggak tahu, dia kira dia bukan orang PKI karena tiap hari jam enam berangkat ke kantor. Kalau salah seorang punya perusahaan dia dapat mobil, pakai mobil mereka." Untuk melengkapi penyamarannya Sjam berdasi dan berjas serta mengendarai mobil sport yang mewah. Akan berlebihan untuk mencurigai Sjam adalah anggota suatu partai yang membenci kemewahan hidup dan mengawasi dengan ketat sumber penghasilan anggota-anggotanya. Bahwa anggota-anggota Biro Chusus mempunyai perusahaan dibenarkan oleh mantan tapol, Martin Aleida, yang pernah berbagi sel pada 1976 dengan seseorang bernama Suherman, yang mengelola sebuah toko besar di bilangan Pasar Baru, salah satu pusat perdagangan utama di Jakarta. Kepada Aleida Suherman menjelaskan, ia mengelola toko itu atas nama Biro Chusus. Ia juga mengatakan, di samping tokonya ada perusahaan lain milik Biro Chusus, sebuah bengkel tempat bekerja banyak pensiunan ahli mesin dari AURI.[20]

Tentang anggota Biro Chusus yang sebelumnya pernah menjadi

anggota partai secara terbuka disebarkan desas-desus bahwa mereka telah dipecat dari partai. Mereka dituduh telah berkhianat terhadap partai atau melakukan pelanggaran disiplin partai (soal perempuan, misalnya). Jika kebetulan mereka bertemu kawan-kawan lama, mereka akan mengatakan tidak lagi setuju dengan partai atau bahkan sudah membencinya. Hasan mengingat kembali, "Pono itu berasal dari Pekalongan, jadi datang ke Jakarta, orang Jakarta tidak tahu Pono itu dari mana. Jadi mereka yang ngerti dulu itu si Pono itu misalnya dari PKI dulu, kenapa dia pergi? Ya pergi aja meninggalkan partai. Jadi jelek gitu, dijelek-jelekin itu lho." Seperti halnya Pono, Hamim dikenal sebagai anggota PKI. Ia pernah mengajar di sekolah partai tentang Marxisme-Leninisme di Jakarta (Akademi Aliarcham) pada awal 1960-an. Tapi ia meninggalkan sekolah ini dalam suasana misterius pada 1964. Mantan wakil direktur akademi ini, Sucipto, menceritakan kepada saya bahwa ia mendapat kesan Hamim telah memutus semua hubungan dengan partai. Jika Hamim bertemu anggota PKI, ia akan menyatakan kepada mereka bahwa ia tidak lagi sejalan dengan partai. Sucipto kaget ketika nama Hamim disebut, sesudah peristiwa 1965, sebagai anggota Biro Chusus.[21]

Tim tiga orang di daerah-daerah juga terdiri dari tokoh-tokoh yang tidak dikenal sebagai kader PKI. Misalnya mereka bekerja sebagai manajer hotel, usahawan, dan guru sambil tetap merahasiakan hubungan mereka dengan PKI. Bahkan para pimpinan PKI di daerah mereka pun mungkin tidak me-ngetahui siapa anggota Biro Chusus di provinsinya. Beberapa anggota Comite Daerah Besar (CDB) ada yang tahu identitas mereka, tapi beberapa lainnya tidak tahu.[22]

Para istri anggota partai ini tidak boleh disangkut-pautkan dengan PKI. Sjam memaksa istrinya mengundurkan diri dari kegiatannya sebagai aktivis di Barisan Tani Indonesia (BTI). Rupanya, hal ini menimbulkan konsekuensi yang mencelakakan baginya. Menurut Hasan, "Sjam kawin dengan seorang guru di Jawa Barat – orang Jawa Barat. Begitu dia menjadi istrinya, lepaskan semua, jadi istri itu ndak boleh diketahui oleh masyarakat bahwa dia itu orang komunis atau orang prokomunis. Dia sendiri nggak puas, 'Masak saya jadi seorang aktivis revolusioner kok begini, di rumah saja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nulis saja nggak boleh.' Makanya dia berontak itu. Sampai meninggal dia, sakit, sakit kanker atau apa, sebelum 1965."[23]

Lima anggota Biro Chusus Pusat bertemu satu kali setiap bulan. Demi alasan keamanan mereka tidak mempunyai kantor sendiri. Mereka bertemu di berbagai tempat di sekitar kota. Rapat-rapat itu bukan merupakan kesempatan untuk berdebat atau diskusi-diskusi bebas. Hanya terjadi pertukaran informasi di antara mereka berlima tentang perkembangan masing-masing dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sjam akan meneruskan informasi dari Aidit dan menyampaikan garis partai tentang masalah-masalah politik mutakhir. Ia kemudian akan mengutus yang lain untuk melakukan tugas-tugas tertentu sepanjang satu bulan ke depan.

Hasan membenarkan pendapat Sjam bahwa Biro Chusus bekerja di bawah Aidit sendiri. Beberapa anggota Politbiro dan Central Comite mengetahui keberadaan Biro Chusus, tapi mereka belum tentu tahu siapa-siapa yang ada di dalamnya. Biro Chusus melapor hanya kepada Aidit dan menerima perintah hanya dari Aidit. Seperti dikemukakan Sjam dalam kesaksiannya, "Biro Chusus adalah aparat dari Ketua partai."[24] Iskandar Subekti juga membenarkan bahwa biro ini merupakan "suatu badan pembantu Ketua CC [Aidit] yang dibentuk di luar ketentuan Konstitusi Partai, sebab tidak ada satu fasal pun di dalam Konstitusi Partai yang menyebut adanya badan tersebut. Badan ini bertugas mengurusi, memelihara, merekrut anggota-anggota Partai di dalam tubuh ABRI secara ilegal (sebab secara legal tidak mungkin). Aidit meminta Jimin [Sjam] menangani kekuatan Partai di dalam ABRI ini."[25]

Mereka yang di Biro Chusus Pusat di Jakarta melakukan sejumlah tindakan pencegahan untuk menjaga kerahasiaan operasi mereka. Keprihatinan utama mereka adalah jika para perwira antikomunis di dalam intelijen ABRI sampai mengetahui bahwa mereka bekerja untuk PKI. Agar kelima orang itu tidak tampak bekerja bersama, mereka jarang bertemu sebagai sebuah kelompok selain pada pertemuan bulanan tersebut. Biasanya, untuk bertemu satu sama lain atau menemui kontak tertentu, masing-masing tidak akan menunggu lebih dari sepuluh menit jika salah seorang belum datang. Mereka mengartikan keterlambatan sebagai kemungkinan orang yang ditunggu tertangkap dan terpaksa mendedahkan kerahasiaannya.

Hasan tidak tahu pasti bagaimana Sjam mengatur pertemuannya dengan Aidit, sehingga kedok Sjam sebagai usahawan swasta tidak me-

nimbulkan kecurigaan. Hasan menduga Sjam datang ke rumah Aidit – mereka tinggal berdekatan di kawasan tingkat atas Jakarta – dan pertemuan mereka menampak sebagai anjangsana antartetangga belaka. Karena orang-orang yang datang ke rumah Aidit berasal dari berbagai-bagai latar belakang, kedatangan Sjam tidak akan menarik perhatian. Sebagai seorang tokoh politik berpengaruh, Aidit dengan sendirinya dicari banyak orang. Agaknya akan sulit bagi agen intelijen untuk melacak jejak setiap orang yang mengunjunginya.

Apa yang bisa dilihat orang dari luar hanyalah bahwa Sjam, Pono, dan Bono adalah pengusaha-pengusaha swasta yang merangkap sebagai agen-agen intelijen ABRI, tapi tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan PKI. Jika hubungan mereka dengan PKI itu pun diketahui, kiranya tidak akan jelas apakah mereka itu mata-mata tentara yang bekerja di dalam PKI atau sebaliknya. Kemenduaan arti seperti itu sangat penting karena Sjam, Pono, dan Bono tidak melengkapi diri dengan kedok yang sempurna. Beberapa mantan kader tinggi partai mengenang dalam wawancara mereka dengan saya bahwa mereka samar-samar mengenal dan tahu tiga orang itu sebagai anggota Departemen Organisasi PKI (walaupun informan-informan saya tidak mengetahui keberadaan Biro Chusus). Kendatipun tiga orang itu tidak hadir secara mencolok dan vokal di kantor CC-PKI, kenyataan bahwa terkadang mereka muncul di sana pastilah sudah melemahkan kedok mereka. Bahwa beberapa anggota partai yang bicara kepada saya tahu, termasuk Sukrisno, ketiga orang itu anggota partai mengesankan bahwa anggota-anggota partai yang lain juga tahu.

Agen-agen intelijen ABRI yang memantau kantor CC-PKI dan rumah Aidit kemungkinan sudah mempunyai rekaman tentang Sjam, Pono, dan Bono. Tapi tidak jelas apakah agen-agen tersebut juga tahu bahwa mereka bertiga sering datang ke kantor-kantor militer atau tahu dengan pasti bahwa mereka bekerja untuk PKI. Jelas bahwa jaringan intelijen Angkatan Darat di bawah Mayor Jenderal S. Parman tidak mengetahui identitas mereka bertiga. Pada 1965 komando tertinggi Angkatan Darat khawatir terhadap PKI dan mengetahui partai ada hubungan dengan sejumlah perwira militer. Jika Mayjen Parman, sang kaisar intelijen, tahu bahwa Sjam adalah tokoh kunci partai yang menangani kontak dengan militer, ia tentu akan terus-menerus menga-

wasinya dengan seksama. Barang siapa mengikuti Sjam dalam Agustus dan September 1965 akan menangkap ada sesuatu yang bakal terjadi. Tewasnya Parman di tangan G-30-S itu sendiri menunjukkan ketidaktahuannya mengenai identitas Sjam.[26]

Menjamurnya agen-agen intelijen dan informan-informan di Jakarta menguntungkan upaya mempertahankan kerahasiaan di sekitar Biro Chusus. Begitu banyak mata-mata dan agen ganda sehingga sulit bagi badan mana pun untuk selalu melacak bahkan sebagian kecil dari mereka sekalipun. Parman dari Angkatan Darat mempunyai perkakasnya sendiri. Jenderal Nasution, sebagai menteri pertahanan, mempunyai jaringan intelijennya sendiri. Suharto di Kostrad mempunyai sendiri, demikian pula halnya polisi militer. Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I dan Menteri Luar Negeri Soebandrio mempunyai badan intelijen di bawah pimpinannya, Badan Pusat Intelijen (BPI). Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian, semuanya mempunyai jaringan intelijen sendiri-sendiri. Komando Operasi Tertinggi (Koti) mempunyai badan intelijennya sendiri. Beberapa badan intelijen itu saling bersaing dan saling mengawasi. Desas-desus terus-menerus beredar. Masing-masing badan bekerja setengah dibayangi suasana kekacauan. Bahkan dengan menanam agen-agennya di kantor CC-PKI, Parman agaknya tidak mencium keberadaan personil Biro Chusus.

Sangat mungkin seseorang telah memperingatkan Yani pada 30 September malam tentang adanya aksi yang siap menerkam. Menurut Omar Dani, seorang perwira polisi militer memberitahu Yani bahwa akan ada aksi yang mengancam dan menawarkan sejumlah pengawal tambahan di tempat kediamannya. Konon, Yani menolak karena mungkin ia menganggap informasi itu sekadar desas-desus belaka.[27] Jenderal-jenderal di SUAD telah menerima laporan serupa selama berminggu-minggu, dan ternyata semuanya tidak benar.[28] Tampaknya G-30-S berhasil menculik enam jenderal justru karena rencananya dikaburkan oleh meruaknya "hiruk-pikuk intelijen."[29]

Sjam, Pono, dan Bono – inti Biro Chusus – adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan dengan perwira-perwira militer. Masing-masing memiliki kartu resmi militer dengan identifikasi sebagai seorang agen intelijen militer. Dengan kartu itu mereka bisa bergerak leluasa keluar masuk fasilitas kemiliteran. Menurut

Hasan, "Orang tiga itu kan mempunyai surat keterangan militer, jadi diberi oleh teman yang di intel, yang di Jakarta itu disebut Garnisun itu. Itu diberi surat bahwa dia itu orang intel, intel Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, dan sebagainya. Dikasih surat, jadi kalau masuk di komplek itu, 'Ini saya ini intelnya bung anu, bung anu atau kolonel ini, kolonel ini, atau jenderal ini, jenderal ini.' Masuk dia ke rumahnya atau kantornya."[30]

Ketiga orang itu masing-masing mempunyai kelompok kontaknya sendiri-sendiri, "Mereka punya jenderal, punya kolonel, punya kapten, sampai lapisan-lapisan bawahnya. Itu mereka punya. Itu di Jakarta tapi kalau di daerah kan itu diserahkan pada BC daerah. BC punya ini, punya ini. Sama dengan di atas ya, di daerah juga ada jenderalnya, ada ininya, tapi di bawah pengaruh dia dan dia harus tunduk kepada pusat, jadi di dalam pertemuan bulanan itu dibicarakan sampai di mana pengaruh PKI di kalangan militer, sudah sampai di mana gitu berkembang apa tidak, gitu. Terus kemudian ditugaskan untuk lebih meluaskan kembali pengaruh-pengaruh PKI di empat angkatan kan: Udara, Polisi, Angkatan Darat, Angkatan Laut."

Dalam kesaksiannya di persidangan untuknya pada 1967 Sjam menceritakan, bagaimana Biro Chusus merekrut para perwira. Hasan membenarkan bahwa cerita Sjam tentang proses perekrutan itu, sebagian dikutip di sini, pada umumnya tepat:

> Tiap2 anggauta pimpinan dari Biro Chusus mempunjai kewadjiban untuk melebarkan organisasi dikalangan Angkatan Bersendjata. Kalau sudah bisa meneliti dan mengetahui pedjabat2 jang ada, berusaha untuk mendekati dan mengenal. Sudah dapat mengenal lalu berbitjara mengenai soal2 politik umum. Sesudah mengetahui bagaimana seseorang pedjabat pada Angkatan Bersendjata ini apakah dia anti Komunis ataukah dia seseorang Demokrat, maka terus diadakan pertukaran pikiran mengenai soal2 politik dalam negeri dan mengenai soal-fikiran2 jang madju. Sesudah diketahui bahwa pedjabat ini adalah orang jang mempunjai fikiran jang menurut pandangan dari sudut PKI orang ini adalah orang jang berpikiran madju, maka terus diadakan pembi-

> tjaraan2 soal-soal kepartaian. Kalau kelihatannja orang ini tidak menolak, tidak memberikan reaksi jang negatif, maka dilandjutkan pada soal2 jang lebih mendalam, jaitu mengenai masalah teori Marxisme.[31]

Hasan menyatakan tujuannya bukan untuk menjadikan para perwira itu menjadi anggota partai, melainkan untuk membuat mereka bersedia memasok informasi kepada Biro Chusus dan melakukan tugas-tugas untuknya. Perwira-perwira itu tidak diajar tentang "soal-soal teori Marxis," seperti ditegaskan Sjam. Sampai September 1965 partai belum melaksanakan rencana untuk membuka sekolah-sekolah klandestin tentang Marxisme-Leninisme di kalangan personil militer. Pada umumnya Biro Chusus puas dengan para perwira Sukarnois yang mendukung PKI karena partai ini mendukung Sukarno. Dalam pengamatan Hasan, "Yang terpenting umumnya orang-orang militer itu pro terhadap Sukarno, jadi belum tentu pro kepada PKI, belum. Jadi pro kepada Sukarno karena pada waktu itu PKI sama Sukarno itu kerja sama, jadi apa yang dilakukan oleh Sukarno itu sama dengan program PKI … Nah, di dalam BC itu nggak ada, 'Ini anggota partai.' Itu bukan. Nggak ada. Yang penting dia tunduk nggak sama Sjam."

Para anggota Biro Chusus menggunakan hubungan mereka dengan militer bukan hanya untuk memperoleh informasi tentang kinerja di dalam tubuh militer, tapi juga untuk bertindak atas nama PKI. Hasan mengutip sebuah contoh dari Desember 1964. Aidit memerlukan bantuan ketika Waperdam III, Chairul Saleh, menuduh PKI mempunyai rencana merebut kekuasaan negara tahap demi tahap. Chairul Saleh, yang dekat dengan Partai Murba, yang antikomunis, mengklaim ada sebuah dokumen yang mengungkapkan rencana rahasia tersebut. Karena dugaan itu polisi militer menginterogasi Aidit dan sedang berpikir untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Aidit menyuruh Sjam supaya memerintahkan jaringan Biro Chusus di dalam militer untuk menggagalkan perkara itu. Usaha itu berhasil dengan cemerlang: Aidit dibebaskan dari tuduhan dan terlepas dari perkara tanpa cela. Chairul harus meminta maaf karena telah menyebarkan dokumen palsu.[32]

Menurut Hasan, Aidit juga menggunakan personil dari Biro Chusus sebagai cadangan pengawal. Sebagai menteri dalam kabinet Sukarno,

sesuai dengan tata cara protokol, Aidit mendapat pengawalan satu detasemen militer ketika ia bepergian keluar Jakarta. Namun, mengingat sikap antikomunis di kalangan pimpinan Angkatan Darat, ia tidak mempercayai pengawalan yang diberikan untuk melindungi dirinya. Ia akan memerintahkan Sjam agar jaringan militer Biro Chusus di daerah membayangi para pengawal dan menjamin bahwa ia tidak akan dicelakai.

Betapapun banyaknya Biro Chusus mengambil manfaat dari para simpatisannya di kalangan militer, badan ini juga menawarkan sesuatu sebagai timbal balik. Ada hubungan memberi dan menerima yang ruwet antara Biro Chusus dan kontak-kontak militernya. Biro Chusus memberi informasi yang membantu para perwira memahami situasi politik dan bahkan memajukan karier mereka. Seperti dikatakan Hasan, "Untuk menarik militer mereka berikan informasi supaya bisa jadi lebih mantep dalam pekerjaan militernya." Misalnya ketika memerangi pemberontakan Darul Islam, PRRI, dan Permesta, beberapa perwira bekerja sama dengan organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI. Gerakan Darul Islam (1948-1962) yang aktif di Jawa Barat, menuntut Negara Islam untuk Indonesia. (Gerakan itu dikenal dengan akronim DI, sedangkan sayap militernya, Tentara Islam Indonesia, disingkat sebagai TII. Sekarang gerakan ini biasa disebut sebagai DI/TII.) Baik para gerilyawan gerakan Darul Islam, maupun perwira-perwira pembangkang di balik pemberontakan PRRI dan Permesta sangat antikomunis. PKI mempunyai kepentingan mendesak membantu militer dalam menindas pemberontakan-pemberontakan ini.

Selama operasi militer berlangsung beberapa perwira mempergunakan jaringan-jaringan kader PKI setempat untuk informasi intelijen dan merekrut milisi sipil. Biro Chusus memudahkan hubungan antara personil militer dengan PKI. Tentang hal ini Hasan menguraikan:

> Jadi menarik militer itu kayak begini, misalnya dia tugas untuk menghantam DI/TII ya, tugas. Tugasnya militer untuk menghantam DI/TII di Jawa Barat dan kemudian dia dapat informasi, informasi dari Bung Sjam misalnya DI tuh begini, begini, politiknya begini, gini, gini, jadi si militer dengar tuh. Oh begitu itu. Terus misalnya DI itu bagaimanapun tidak punya massa, karena itu untuk menghantam dia harus meng-

gerakkan massa dulu, menurut Bung Sjam. Nah ini si militer dengar harus gerakkan massa, nah itu nanti kalau dia datang ke sini itu bagaimana cari massa, mencari OPR [Organisasi Perlawanan Rakyat]-OPR itu dari rakyat, dijelaskan sama dia begini, begini, begini. Kan di tentara nggak ada, situasi politik nggak pernah diberikan oleh atasan, oleh komandan, itu kan terpencil. Diberi tahu sama Sjam itu DI itu begini, hubungan dengan Amerika begini, dengan Belanda begini, gini, gini, gini. Itu si militer itu yakin bahwa memang DI itu jahat, harus dihancurkan, dan Sukarno sendiri meminta menghancurkan, jadi sesuai dengan perintah Sukarno itu. Karena itu militernya kan mendapat sokongan dan kalau dia menghantam DI, bisa menghancurkan DI dia naik pangkat – naik pangkat oleh karena si Sjam itu, jadi dia terima kasih sama Sjam karena dia naik pangkat atas bantuan dari dia. Jadi dia sendiri merasa diuntungkan tahu situasi, tahu ini, jadinya lebih luas pengetahuannya, lebih mantep dalam pekerjaan militer. Nah BC yang berikan soal-soal politik, jadi dengan begitu militer itu juga dapat pendidikan politik dari PKI.

Mungkin sekali hubungan antara Sjam dan Supardjo berjalan seperti cerita yang digambarkan Hasan di atas. Sebagai komandan di daerah Garut Jawa Barat, yang menjadi basis penting DI/TII, Supardjo memainkan peranan besar dalam mengakhiri pemberontakan DI/TII yang berkepanjangan pada awal 1960-an. Angkatan Darat di Jawa Barat mulai menempatkan sejumlah besar penduduk sipil saat menggelar taktik "pagar betis" pada 1960. Supardjo, dengan bantuan PKI, menggunakan taktik ini di Garut. Penduduk berjajar dalam jarak berdekatan lalu mereka menyisir suatu kawasan sementara regu-regu tentara bersenjata di depan mereka bergerak maju dan mengikuti barisan "pagar betis" dari belakang. Dengan taktik ini pemberontak bersenjata dihalau dari basis mereka dan didesak ke zona-zona yang menjadi semakin sempit.[33] Supardjo mengorganisasi beberapa operasi "pagar betis" ini dengan menggunakan kader-kader PKI yang dengan militan melawan DI/TII dan yang sering menjadi sasaran serangan pukul dan lari mereka.[34] Berdasarkan keberhasilannya mengakhiri DI/TII, Supardjo dinaikkan pangkatnya menjadi

kolonel dan kemudian diberi kedudukan tinggi sebagai panglima pasukan gabungan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia selama masa konfrontasi. Ia seorang komandan tentara yang menyikapi strategi bertempur dan disiplin organisasi dengan serius. Pengalamannya dalam perang pengikisan pemberontakan (*counterinsurgency*) memberinya pelajaran langsung tentang arti penting dukungan masyarakat sipil.

Ketika itu bukanlah rahasia bahwa beberapa kesatuan tentara, dalam menumpas pemberontakan-pemberontakan kaum kanan pada 1950-an dan awal 1960-an, meminta bantuan PKI.[35] Hal yang umumnya tidak diketahui adalah bahwa PKI mempunyai departemen khusus yang berperanan sebagai penghubung rahasia dengan para perwira dan meminta mereka agar berbuat sesuatu untuk PKI sebagai imbalannya. Kolonel Abdul Latief, saat bertugas di Sumatra untuk menumpas pemberontakan PRRI pada 1958, bekerja sama dengan organisasi massa PKI di sana. Seorang mantan anggota PKI dari Sumatra Utara teringat pernah bertemu dengan Latief pada waktu itu dan mengorganisasi aksi-aksi kelompok pemuda PKI bersama dengannya.[36]

Bila seorang perwira yang pernah bekerja sama dengan PKI dipindah, hubungan ini tidak dengan sendirinya berakhir. Agen Biro Chusus yang sudah berhubungan baik dengan sang perwira akan mengatur agar Biro Chusus di tempat yang baru bertemu dengannya. Mengingat struktur sel dalam Biro Chusus, tim tiga orang di satu cabang daerah tidak mengetahui identitas anggota tim-tim di daerah-daerah lain. Biro Chusus mengembangkan suatu metode untuk tetap berhubungan dengan para perwira yang dipindah-pindah di seluruh tanah air. Hasan menjelaskan, “Kalau si militer dari Jawa bertempur di Manado, nah nanti ada biro daerah BC di sana, nah itu nanti dia dari sini itu sudah dapat itu – dapat kode, kodenya itu begini; ini suatu lembar ya, sini tulis A, di sini A, di sini A merah, di sini A hitam, ini sobek dan dia bawa satu yang hitam misalnya, yang merah itu nanti oleh BC diserahkan kepada BC daerah sana, di Manado itu. Nanti orang ini juga ditugaskan oleh BC daerah mencari orang-orang dari Jawa. Dia akan cari terus ke mana dia, akhirnya tahu gitu. ‘Ini ada surat – ada surat,’ ditaruh sama dia, ‘Oh ya ini.’”

Tidak aneh jika beberapa personil militer, bahkan perwira-perwira tinggi, menyokong PKI. Partai dengan penuh semangat mendukung setiap kampanye militer utama yang dilancarkan Sukarno. Selain

mendukung kampanye melawan pemberontakan DI/TII, PRRI, dan Permesta, partai menyokong perebutan Irian Barat (sekarang dikenal dengan sebutan Papua Barat) dari Belanda pada 1962 dengan kekuatan militer dan konfrontasi melawan Malaysia yang dimulai pada 1963. PKI memperoleh banyak penghormatan di kalangan sementara perwira sebagai kekuatan patriotik dan pro-Sukarno yang berhasil menggalang dukungan masyarakat untuk peperangan yang dilancarkan angkatan bersenjata. PKI tampak sebagai partai yang disiplin dan bertanggung jawab.[37]

Bagi para perwira tinggi yang mempunyai pandangan internasional, menariknya PKI bukan hanya terletak dalam hubungannya dengan politik nasional. Beberapa orang perwira sangat terkesan oleh perang gerilya kaum komunis Tiongkok yang berjaya dan perlawanan tak terpatahkan rakyat Vietnam terhadap tentara Amerika Serikat. Pengalaman mereka dari masa revolusi nasional membuat mereka dengan teguh bersikap anti-imperialis. Presiden Sukarno sendiri terus-menerus mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak membolehkan tanah airnya dikuasai kaum kapitalis Barat. Sukarno mengorganisasi Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 sebagai penolakan tegas terhadap kekuatan-kekuatan kolonialisme lama. Dengan demikian revolusi antiimperialis di Tiongkok dan Vietnam ibarat gayung bersambut bagi para perwira Indonesia yang dengan sungguh-sungguh mengikuti Sukarno. Keberhasilan kaum komunis di negara-negara lain mengangkat derajat Partai Komunis Indonesia, yang dipandang berbagi semangat dan kearifan yang sama.

Supardjo, yang pernah mengunjungi Vietnam dan Tiongkok, merasa kagum terhadap kemampuan militer partai-partai komunis di kedua negeri itu. Menurut Heru Atmodjo yang bersama-sama Supardjo ditahan di penjara Cimahi, Supardjo sangat menghormati Sjam karena ia menduga Sjam pernah dilatih di Tiongkok sebagai komisaris politik untuk pasukan militer. Barangkali Sjam salah dalam menampilkan dirinya. Menurut Hasan, Sjam tidak pernah ke Tiongkok untuk urusan lain selain berobat.[38] Tapi agaknya ia memang pernah ke Vietnam. Iskandar Subekti menulis bahwa "Jimin [Sjam] sendiri telah diutus Partai meninjau Vietnam ketika masih berperang melawan A.S."[39] Betapapun salah mengertinya Supardjo tentang Sjam, pengetahuannya tentang militer Tiongkok dan Vietnam meyakinkannya bahwa partai-partai

komunis, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengintegrasikan kekuatan sipil dalam operasi-operasi militer, memperlihatkan sebuah paradigma yang relevan bagi Indonesia.[40]

Supardjo bisa jadi terkesan oleh Sjam semata-mata karena jenderal ini menduga Sjam sebagai wakil PKI, sebuah lembaga yang mengesankan Supardjo. Beberapa orang yang sebelum 1965 mengenal Sjam tidak terkesan sama sekali. Mereka mengenang Sjam sebagai orang yang bombastis, sombong, dan tidak terlalu cerdas.[41] Benedict Anderson menyaksikan sendiri kesaksian Sjam di sidang-sidang Mahmilub pada 1967 dan tidak bisa percaya bahwa Sjam seorang kader tinggi PKI karena retorikanya datang langsung dari aktivisme nasionalis 1940-an akhir, tanpa disela oleh wacana partai masa mutakhir, "Sjam berbicara dengan gaya yang sama sekali berbeda dengan saksi-saksi lain – cakap besar, sedikit megalomaniak, tapi lebih dari itu dengan versi "beku" dari gaya percakapan yang biasa digunakan pada 1945-1949 … Terdengar seperti memasuki semacam toko audio yang antik."[42]

Ada penjelasan tentang bahasa Sjam yang kuno itu. Kepada saya Hasan menceritakan bahwa Sjam tidak pernah membaca buku dan hampir-hampir tidak membaca bahan bacaan partai. Ia terlalu sibuk bertemu banyak orang dan mengatur penyamaran sehingga tidak ambil pusing terhadap teori. Kedudukan Sjam di dalam partai sedemikian rupa sehingga ia tidak harus berpikir tentang program partai dan membelanya di depan umum; ia tidak duduk di badan pengambil keputusan, menulis literatur partai, dan menduduki kursi di parlemen, atau mengorganisasi konferensi-konferensi. Tugasnya ialah menerima perintah dari Aidit, menjaga rahasia, dan mendekati para perwira kiri. Sjam memerintahkan jenderal-jenderal dan kolonel-kolonel yang berpengaruh untuk berbuat sesuatu demi kepentingan Aidit. Ia tidak merasa ada sesuatu yang mengharuskannya belajar dari kepustakaan dan para ahli teori. Hasan melihat Sjam sebagai seseorang yang merasa dirinya sebagai suri teladan aktivis komunis yang sedang melakukan pekerjaan praktis untuk membangun kekuatan partai komunis terbesar ketiga di dunia.

Hasan percaya Sjam sama sekali bukan tokoh misterius; ia bekerja dengan prinsip yang sederhana saja: membebek Aidit. Sjam seorang yang teguh kese-tiaannya kepada Aidit. Ia melihat Aidit sebagai Stalin atau Mao versi Indonesia, seorang pahlawan agung dengan hari depan gilang-

gemilang di hadapannya. Sjam merasa bangga berperanan sebagai tangan kanan Aidit. Sjam adalah contoh klasik seorang *apparatchik* (aparat partai komunis) yang memahami partai sebagai sebuah organisasi yang berjuang demi kekuasaan negara. Ia mungkin akan memahami Machiavelli lebih baik ketimbang Marx.

Memahami Sjam sebagai fungsionaris partai yang didorong oleh kesetiaan pribadi kepada Aidit dan sama sekali tidak mempunyai idealisme kemanusiaan serta semangat kolektif yang menyemangati anggota-anggota lain, memungkinkan kita menangkap logika di balik jawaban-jawaban Sjam dalam tanya jawab dengan Hakim Ketua Mahmilub. Sjam ditanyai pendidikan apa yang diberikan Biro Chusus kepada para simpatisannya di kalangan militer:

> Sjam: [Pendidikan] soal teori dan ideologi.
> Ketua: Teori dan ideologi, teori apa?
> Sjam: Marxisme Leninisme.
> Ketua: Ideologi apa?
> Sjam: Tjinta kepada partai.

Cinta kepada partai. Itulah gagasan Sjam tentang ideologi partai. Itulah jalan pikiran seseorang yang begitu setia kepada organisasi sehingga ide-ide demokratis yang menjadi pendirian organisasi dianggap sampah retorika belaka.

Tingkah laku Sjam sesudah ia ditangkap pada 1967 mengesankan dirinya sebagai seorang oportunis. Dengan hancurnya partai yang konon dicintainya, bersama dengan segala kesempatan baginya untuk tampil di tampuk kekuasaan, ia berusaha keras menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti ia harus mengkhianati mantan kawan-kawannya sendiri. Dalam kesaksiannya di sidang pertama Mahmilub untuknya ia menyebut dua nama perwira militer yang termasuk bagian jaringan Biro Chusus – perwira-perwira itu belum dikenal sebagai pro-PKI. Salah seorang dari mereka tampaknya ditangkap dan dipenjarakan akibat pengakuan Sjam.[43] Dalam penampilannya kemudian sebagai saksi di persidangan Mahmilub, Sjam menyebut lebih banyak nama lagi. Iskandar Subekti menulis ia tidak pernah mendekati Sjam, temannya sesama penghuni penjara Cipinang, untuk mengetahui lebih banyak

lagi tentang kejadian di sekitar 1965 karena ia memandang Sjam sebagai orang yang sama sekali tidak bisa dipercaya.[44]

Hasan menjelaskan bahwa strategi Sjam ialah terus menyediakan informasi berguna bagi para penangkapnya, “Dia itu sudah ngomong sama saya bahwa ‘Saya ini sebetulnya ingin hidup, ingin hidup lama.’ Oleh karena itu dia di dalam pengadilan maupun di dalam penjara, dia membeberkan soal-soal begitu untuk memperpanjang waktu eksekusi mati. Nah dia itu sebetulnya takutlah, untuk ditembak itu takut.” Sjam menduga jika ia mampu menunda eksekusi terhadapnya cukup lama, mungkin ia akan bisa hidup lebih lama ketimbang rezim Suharto, yang dia tidak pernah percaya akan mampu bertahan sangat lama.

Dalam kesaksiannya pada beberapa persidangan (sekitar sepuluh kali sampai 1972) Sjam setiap kali selalu menambahkan detil baru supaya agen-agen intelijen militer mengira Sjam masih mempunyai informasi lebih banyak lagi untuk diungkap.[45] Sesama tahanan politik memperhatikan taktik Sjam ini. Siauw Giok Tjhan, dalam analisisnya, mengatakan, ketika tapol lain mengkritik Sjam karena menyebutkan begitu banyak nama-nama para perwira, ia membela perbuatannya dengan mengatakan, “Tiap manusia berhak untuk mempertahankan hak hidupnya, sebagai orang yang telah divonis hukuman mati, saya ingin menunda, kalau dapat menggugurkan vonis hukuman mati itu. Bila saya rasa vonis itu akan dilaksanakan, executie akan dilakukan, saya menimbulkan persoalan besar baru, sehingga untuk peperiksaannya hukuman mati bagi saya tidak dijalankan.”[46] Sjam menggunakan strategi klasik Scheherazade, perempuan dalam legenda *Arabian Nights* (*Seribu Satu Malam*) yang dikawinkan dengan seorang raja sakit jiwa yang membunuh istri-istrinya sesudah ditidurinya. Scheherazade berhasil mencegah eksekusi terhadapnya dengan cara menceritakan dongeng-dongeng kepada sang raja setiap malam. Alih-alih dipancung, sang raja membolehkan Scheherazade tetap hidup agar ia bisa terus mendengarkan dongeng-dongengnya. Sesudah seribu satu malam sang raja bersumpah tidak hendak membunuhnya. Strategi ini hampir berlaku sama bagi Sjam. Walaupun ia dieksekusi pada 1986, sesudah hukuman diputuskan pada 1968, ia berhasil membeli penundaan eksekusi baginya jauh lebih lama dari 1001 malam.

Sementara pengamat (misalnya Wertheim) menduga bahwa tabiat Sjam yang suka mementingkan dirinya merupakan bukti bahwa ia

memang bukan anggota PKI. Tapi para pengamat ini tidak memahami bahwa tokoh-tokoh seperti Sjam sama sekali tidak unik di dalam partai. Mantan kader-kader tinggi PKI lainnya mengkhianati partai sesudah mereka tertangkap, antara lain Sujono Pradigdo (kepala Komisi Verifikasi), Peris Pardede (kepala Komisi Kontrol), Sampir Suwarto (kepala keamanan di CC-PKI), Kusnan (sekretaris pribadi Sudisman dan anggota Komisi Verifikasi), dan Burhan Komalasakti (anggota Central Comite).[47] Pengkhianatan-pengkhianatan semacam itu bisa dilihat sebagai reaksi yang dapat dimengerti terhadap siksaan atau ancaman fisik terhadap orang-orang yang mereka cintai. Namun begitu, beberapa pimpinan partai lainnya, bahkan anggota-anggota biasa, tidak menyerah terhadap siksaan. Bagi seorang loyalis partai yang keras kepala seperti Hasan, yang juga mengalami siksaan, pengkhianatan para pimpinan memberi petunjuk bahwa partai sudah menjadi terlalu borjuis pada 1965. Para pimpinan semestinya mencapai kedudukan mereka yang tinggi justru karena mereka telah membuktikan keberanian dan pengabdian mereka kepada partai. Bahwa partai dipimpin oleh orang-orang yang tidak mampu menghadapi penindasan militer dengan syaraf baja menunjukkan kepada Hasan, penganut garis perjuangan bersenjata Mao, bahwa partai mengandung kekurangan-kekurangan yang fundamental.

Cerita Hasan tentang kepribadian Sjam dan kinerjanya bagi PKI memungkinkan kita menafsirkan kesaksian pertama Sjam di depan Mahmilub dengan kacamata baru. Hasan menegaskan banyak pernyataan Sjam di dalam kesaksian itu: Biro Chusus memelihara kontak dengan para perwira, semata-mata bekerja di bawah arahan Aidit, tidak bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga lain di dalam partai, dikepalai oleh Sjam, dan Sjam setia kepada Aidit. Berdiri sendiri, kesaksian Sjam, seperti juga semua kesaksian di depan sidang-sidang Mahmilub, tidak bisa diperlakukan sebagai bukti yang sahih. Bisa dibenarkan jika para ilmuwan tidak bertumpu pada versi Sjam dalam melihat peristiwa-peristiwa itu. Tetapi penegasan Hasan atas versi Sjam menawarkan bahwa Sjam tidak sekadar menceritakan kisah-kisah bualan belaka. Cerita Iskandar Subekti tentang G-30-S juga membenarkan banyak klaim Sjam di dalam kesaksiannya. Tentu saja, tidak semua klaim Sjam harus dianggap benar – Hasan menyangkal beberapa di antaranya. Saya menyertakan sebagian besar kesaksian Sjam sebagai lampiran 2 agar para pembaca dapat mempelajari

sendiri klaim-klaim Sjam setepatnya (dibandingkan dengan yang sudah disaring melalui propaganda rezim Suharto).

CATATAN

[1] Kesaksian Sjam, transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, 7 Juli 1967. Pono (kependekan untuk Supono) memberi kesaksian serupa bahwa Biro Chusus dibentuk pada 1963-1964 (transkrip Mahmilub, persidangan Supono (Pono), sidang ketiga, Januari 1972).

[2] Partai Komunis melancarkan pemberontakan antikolonial pada 1926-27. Pemerintah kolonial Belanda menindas pemberontakan, kemudian menangkap ribuan orang komunis dan nasionalis, dan mengasingkan mereka ke Boven Digul, kamp pengasingan di pulau yang sekarang bernama Papua Barat.

[3] Semua kutipan dan informasi yang diperoleh dari Hasan dalam bab ini diambil dari rekaman wawancara saya dengannya.

[4] Wawancara dengan Sucipto dan Sukrisno. Nama tersebut belakangan nama samaran.

[5] Siauw Giok Tjhan, "Berbagai Catatan," 9.

[6] Wawancara dengan Oey Hay Djoen.

[7] Iskandar Subekti, "Kata Pendahuluan," 2.

[8] Menurut seorang mantan kolonel Angkatan Darat, Muhammad Sidik Kardi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) mulai menyusun jaringan formalnya sendiri di kalangan perwira ABRI sesudah kegagalan partai dalam pemilu 1955. Strategi partai ialah meninggalkan keanggotaan massa dan sebagai gantinya membangun partai kader yang berpendidikan baik untuk ditempatkan di tingkat atas pemerintahan dan militer. Seorang perwira yang dikenal luas sebagai partisan PSI ialah Kolonel Suwarto, wakil direktur pusat pendidikan Angkatan Darat di Bandung, Seskoad, (wawancara dengan Kardi). I Ketut Reti, tokoh terkemuka PSI di Denpasar, membenarkan, PSI mempunyai Biro Chusus versinya sendiri (wawancara dengan I Ketut Reti).

[9] Lev, *Transition to Guided Democracy*, 5.

[10] Siauw Giok Tjhan, "Berbagai Catatan," 9.

[11] Semua referensi pada keterangan Sukrisno dalam alinea-alinea berikut berasal dari wawancara saya dengannya di Jakarta pada 14 Juli 2005 yang tak direkam. Sukrisno nama samaran.

[12] Tentang Sjam sebagai anggota Pemuda Pathuk, lihat Elson, *Suharto*, 13, 317n3. Tentang Pemuda Pathuk sendiri dan salah seorang pimpinannya, Djohan Sjahroezah, lihat Legge, *Intellectuals and Nationalism*, 60-66, 126-29, dan Moehammad, *Memoar Seorang Sosialis*, 348-57.

[13] Wawancara dengan Ibu Oemiyah.

[14] Benedict Anderson kepada penulis, 3 Januari 2002.

[15] Sukrisno mengingat pernah bertemu dengan atau mendengar tentang tokoh-tokoh CPN lain yang lebih terkenal, yang kembali ke Indonesia: Suripno, Setiadjit, dan Abdulmadjid Djojoadiningrat. Tentang tokoh-tokoh ini lebih lanjut, lihat Soerjono "On Musso's Return" [Tentang Kembalinya Musso].

[16] Sekurang-kurangnya empat dari lima orang itu menjadi tokoh terkemuka partai. Pada 1965 Munir adalah anggota Politbiro PKI, Hartoyo pimpinan BTI, Sukrisno mengajar pada salah satu sekolah partai, dan Sjam tentu saja memimpin Biro Chusus.

[17] Almarhum Jacques Leclerc, seorang pakar tentang sejarah kiri Indonesia, berpendapat bahwa pemunculan Aidit dan Lukman dari bawah tanah di Jakarta ditampilkan seakan-akan mereka kembali dari Tiongkok dan Vietnam (Leclerc, "Aidit dan Partai Pada Tahun 1950," 64). Juga Siauw Giok Tjhan, "Berbagai Catatan," 8.

[18] Kesaksian Supardjo, transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang kedua, 25 Februari 1967, 3-4.

[19] Buku putih rezim Suharto pada 1994 benar setidak-tidaknya dalam hal identitas lima orang dalam Biro Chusus Pusat (State Secretariat of the Republic of Indonesia, *September 30th Movement*, 39-40).

[20] Wawancara dengan Aleida.

[21] Wawancara dengan Sucipto.

[22] Wawancara dengan Rusyana. Rusyana nama samaran mantan anggota pimpinan PKI provinsi Jawa Barat.

[23] Sukrisno membenarkan bahwa Sjam mengawini perempuan Sunda pada 1951 dan bahwa ia meninggal karena sakit sebelum 1965 (wawancara dengan Sukrisno).

[24] Transkrip Mahmilub, peradilan Sudisman, kesaksian Sjam, 8 Juli 1967.

[25] Iskandar Subekti, "G-30-S Bukan Buatan PKI," 10.

[26] Mungkin saja Parman tahu tentang Sjam, tapi ia tidak menerima informasi intelijen yang memadai tentang kegiatannya. Mungkin agen-agen Parman tidak kompeten, atau mungkin juga mereka terlibat dalam G-30-S. Mungkin juga Suharto berjanji kepadanya, ia dan agen-agen Kostrad akan terus mengawasi Sjam dan akan selalu memberi informasi kepadanya. Ada berbagai kemungkinan.

[27] Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965*, 237.

[28] Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta juga menerima banyak laporan. Seorang mantan pejabat kedutaan besar ini, Frances Galbraith, mengatakan, "Hampir setiap hari kami mendengar desas-desus dan menerima laporan tentang akan adanya semacam kup, dan ini menjadi semacam banjir sehingga sangat sulit untuk memisahkan kebenaran dari fiksi, dan sebagian besar daripadanya memang fiksi." (Dikutip dalam Brands, "Limits of Manipulation," 801).

[29] Dalam analisis globalnya tentang kudeta Edward Luttwack menyatakan, bahwa persiapan para komplotan kup (mengontak calon-calon potensial, penyelenggaraan rapat-rapat, dan

lain-lain) menghasilkan informasi intelijen bagi lawan-lawan mereka. Tapi pengorganisasian pra-kup juga menghasilkan "sejumlah 'kegaduhan' yang sama atau lebih besar." Lawan menjadi sulit untuk memisahkan data yang akurat dan andal dari yang menyesatkan atau palsu (kegaduhan); mereka tidak selalu bisa "mengenali sifat ancaman, karena kemampuan mereka memroses informasi bukannya tidak ada batasnya" (Luttwak, *Coup d'Etat*, 157).

[30] Penulis-penulis yang melukiskan Sjam sebagai agen intelijen Angkatan Darat yang menyusupi PKI biasanya menunjuk kartu identitas militer ini sebagai bukti. Tapi kartu ini sendiri tidak membuktikan apa pun. Pemilikan kartu semacam ini bisa juga berarti bahwa ia seorang loyalis PKI yang disusupkan ke dalam tubuh militer.

[31] Transkrip Mahmilub, sidang pengadilan Sudisman, kesaksian Sjam, 8 Juli 1967.

[32] Tentang tuduhan Chairul Saleh terhadap Aidit, lihat Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno,* 377.

[33] Van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 124-125.

[34] Saya bertemu seorang mantan simpatisan PKI di Tasikmalaya yang teringat ketika pada suatu malam pemberontak-pemberontak DI/TII turun dari persembunyian mereka di gunung-gunung, memasuki peluaran kota, membakar rumah simpatisan itu, dan membunuh ayahnya. Sebagai anak piatu belasan tahun, ia dengan bersemangat ikut dalam operasi "pagar betis" (wawancara dengan Haryatna; Haryatna, nama samaran).

[35] Feith, *Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 529-531.

[36] Wawancara dengan Bismar. Almarhum Bismar hidup dalam pengasingan sejak 1965, mula-mula di Tiongkok dan kemudian di Jerman. Menurut ingatan Joesoef Isak, teman dekat Bismar, sebelum 1965 Bismar sudah mengenal Latief (wawancara dengan Joesoef Isak).

[37] Pendapat mantan direktur badan intelijen BPI (Badan Pusat Intelijen) Brigadir Jenderal (Polisi) Soetarto, barangkali bisa dianggap mewakili pandangan kebanyakan pejabat pro-Sukarno. Di sidang Mahmilub untuknya pada 1973 ia mengakui mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap PKI. Mungkin ia yakin ia akan dijatuhi hukuman mati (dan memang benar) dan oleh karenanya ia tidak merasa perlu terlalu berhati-hati, "Saya melihat di dalam perjuangan Partai Komunis Indonesia, di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan juga menurut pandangan saya di dalam nilai-nilai ketekunan, nilai-nilai tidak mementingkan diri sendiri, pengorbanan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan partai. Lalu antara lain yang saya terangkan misalnya kendaraan-kendaraan untuk anggota DPR atau sebagian dari anggota PKI, itu tidak diberikan kepada orang yang bersangkutan, tapi dipool lalu Partai menentukan siapa yang boleh pakai." (Transkrip Mahmilub, persidangan R. Soegeng Soetarto, sidang ke-3, 1973, 98-99). Soetarto, yang bekerja di bawah Waperdam I Soebandrio, merupakan *bête noire* (dari Prancis secara harfiah berarti 'bangsat hitam,' dalam konteks ini berarti orang yang sangat dibenci) bagi klik Suharto. Soetarto ditangkap pada 1966.

[38] Manai Sophiaan menyatakan bahwa Sjam mendapat latihan militer di Tiongkok pada 1950-an. Sophiaan mendasarkan pendapatnya pada sumber-sumber anonim PKI (Sophiaan, Kehormatan Bagi Yang Berhak, 73). Dalam hal ini saya memercayai Hasan karena ia sendiri

pernah di Tiongkok dan mengenal Sjam dengan baik.

[39] Iskandar Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI,” 15.

[40] Heru Atmodjo teringat bagaimana Supardjo terkesan oleh cerita yang didengarnya tentang kemampuan fisik tentara gerilya Mao semasa perang dalam tahun-tahun pra-1949 di Tiongkok. Para gerilyawan tersebut dilatih untuk berlari sehari penuh tanpa berhenti. Ini memungkinkan mereka mengecoh pasukan musuh yang tidak memperhitungkan bahwa para gerilyawan mampu berpindah posisi dengan begitu cepat. Dengan mencamkan cerita ini di batinnya Supardjo membujuk teman-temannya sesama tahanan di Cimahi – Atmodjo, Untung, dan beberapa lagi yang lain – untuk lari-lari mengelilingi halaman dalam penjara dan berangsur-angsur membangun daya tahan fisik mereka. Ia belajar dari tuan rumahnya di Tiongkok bahwa jika orang mampu berlari dengan langkah-langkah ajek selama empat puluh menit tanpa henti, ia akan mampu berlari sepanjang hari. Karena itu para tahanan ini lalu berlatih berlari. Supardjo mempunyai tujuan praktis: ia merencanakan bahwa mereka akan melarikan diri dari penjara dan kemudian berlari sepanjang malam tanpa henti. Dengan demikian mereka akan mampu berada di luar kawasan yang akan menjadi sasaran pencarian penguasa terhadap mereka (wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002).

[41] Wawancara dengan Sucipto.

[42] Anderson kepada penulis.

[43] Dalam kesaksiannya pada Juli 1967 Sjam menyebut “Kolonel Sidik” sebagai “perwira progresif,” yang biasa bertemu dengan Biro Chusus. Pada waktu itu Kolonel Muhammad Sidik Kardi adalah penuntut untuk Mahmilub. Ia ditangkap hanya beberapa pekan kemudian, pada Agustus 1967, dan dipenjarakan selama dua belas tahun. Saya kebetulan mewawancarai Kolonel Sidik pada 2000 sebelum saya membaca kesaksian Sjam. Sidik menganggap bahwa ia ditahan karena ia menolak bekerja sama dalam usaha menuntut Presiden Sukarno. Sidik tidak menyebut tuduhan Sjam (wawancara dengan Kardi). Namun, kesaksian Sjam tentu merupakan faktor di balik penahanannya. Sayang Sidik meninggal sebelum saya bisa mewawancarainya lagi.

[44] Iskandar Subekti, “Kata Pendahuluan,” 3.

[45] Di sidang Mahmilub untuk Pono, Sjam mengatakan bahwa ia sudah diminta sebagai saksi dalam kira-kira sepuluh persidangan (Kesaksian Sjam, transkrip Mahmilub, persidangan Supono (Pono), Januari 1972).

[46] Siauw Giok Tjhan, “Berbagai Catatan,” 9.

[47] Saya mengetahui tentang pengkhianatan Pradigdo dan Pardede sudah terlebih dahulu. Informasi yang diungkapkan Pradigdo mengakibatkan banyak pimpinan dan anggota partai ditangkap. Tentang Suwarto, Kusnan, dan Komalasakti lihat Siauw Giok Tjhan, “Berbagai Catatan,” 9, 15-16. Orang-orang ini menjadi interogator dan penyiksa untuk kepentingan tentara. Martin Aleida mengatakan bahwa Komalasakti menjadi pembantu tentara di Jakarta untuk mengejar bekas kawan-kawannya sendiri (wawancara dengan Aleida). Cerita yang tidak menyenangkan tentang Komalasakti juga terdapat dalam karangan otobiografi Munadi, mantan tapol juga, “Yang Tak Terlupakan,” 5-6.

5

AIDIT, PKI, DAN G-30-S

Bagi PKI, disiplin dimaksud untuk menyelenggarakan pekerjaan dengan tepat dan baik. Dan suatu pekerjaan baru dapat diselenggarakan dengan tepat dan baik kalau disertai dengan kesetiakawanan atau solidaritas … Berdasarkan moral Komunis itu diterapkan pelaksanaan "Centralisme demokrasi," yaitu centralisme yang didasarkan kepada demokrasi dan demokrasi yang dipusatkan, dimana dipadukan pertanggungan-jawab kolektif dengan pertanggungan-jawab perseorangan.

Sudisman, **Uraian Tanggungdjawab (1967)**

Bukti yang ada sejauh ini memperlihatkan bahwa Aidit sedikitnya menyetujui kerja sama Sjam dengan para perwira militer untuk melancarkan serangan mendahului terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat (SUAD). Menurut dokumen Supardjo, Sjam adalah organisator utama Gerakan 30 September. Menurut Hasan, ia bawahan setia Aidit. Jika dua keterangan itu benar, kita harus menduga bahwa Aidit lebih dari sekadar sosok lugu yang mudah tertipu dalam G-30-S. Sampai di sini pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah Aidit yang memprakarsai G-30-S dan memberi perintah kepada Sjam untuk melaksanakannya (sebagaimana diklaim versi rezim Suharto) atau ia mengizinkan Sjam bekerja dengan para perwira militer dengan anggapan para perwira itulah yang memimpin G-30-S? Apa yang diketahui Aidit tentang hubungan antara anggota-anggota Biro Chusus dan para

perwira militer? Apa yang diceritakan Sjam kepadanya? Informasi apa yang didengar Aidit dari sumber-sumber lain mengenai kecenderungan para perwira yang ikut dalam G-30-S? Apakah Aidit sang dalang yang memerintahkan dan menyelia setiap gerak-gerik Sjam? Ataukah Aidit seorang pendukung G-30-S dan mendapat kesan bahwa para perwira militerlah yang mendalangi aksi?

Sukar menilai peranan Aidit karena tidak ada bukti langsung dan meyakinkan tentang hal ini. Mengingat sifat pengorganisasiannya yang rahasia, hanya dua orang yang dalam posisi mengetahui sepenuhnya peranan Aidit: Sjam dan Aidit sendiri. Angkatan Darat sudah menembak mati Aidit pada November 1965 sebelum ia sempat menyampaikan penjelasan tentang tindakannya. Dalam sidang Mahmilub pada 1967 Sjam menyatakan bahwa ia bertindak atas perintah Aidit. Pernyataannya ini tidak mungkin dibuktikan kebenarannya. Satu-satunya pendekatan terhadap persoalan mengenai peranan Aidit hanyalah secara tidak langsung, dengan merangkaikan kepingan-kepingan bukti dan mempertimbangkan masuk akal atau tidaknya kemungkinan-kemungkinan yang berbeda-beda itu. Dalam bab ini saya meninjau pernyataan-pernyataan para mantan pimpinan PKI, strategi politik Aidit dalam bulan-bulan sebelum G-30-S terjadi, dan pandangannya tentang kup militer. Saya juga meninjau pernyataan partai tentang G-30-S dalam koran hariannya, *Harian Rakjat*, edisi 2 Oktober 1965.

URAIAN SUDISMAN

Pernyataan paling penting oleh pimpinan PKI tentang G-30-S ialah pernyataan Sudisman, Sekretaris Jenderal partai yang berhasil lolos dari pembantaian besar-besaran. Ia ditangkap pada Desember 1966 dan dibawa ke depan Mahmilub pada Juli 1967. Ia salah seorang dari kelompok lima tokoh muda yang mengambil alih pimpinan partai pada 1951. Kelima tokoh itu – Aidit, Lukman, Njoto, Sakirman, dan Sudisman sendiri – memperoleh sukses besar dalam membangun kembali partai. Dalam pleidoinya Sudisman mengacu pada kesatuan di antara kelima tokoh itu ibarat kesatuan lima bersaudara Pandawa dari epos besar India *Mahabharata*, "Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka berempat

… Saya dengan mereka berempat telah berpanca-kawan, artinya, berlima telah bersama-sama membangun kembali PKI sejak tahun 1951 … Kita berlima selalu bersama."[1] Keberhasilan PKI dari 1951 sampai 1965 sebagian berkat kesatuan para pimpinannya itu. Tidak terjadi keretakan yang memecah-belah partai menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing (seperti yang terjadi dalam gerakan komunis di India) bahkan di tengah-tengah konflik Tiongkok-Soviet.

Pidato pembelaan Sudisman, walaupun dikemukakan di Mahmilub – atau "di cengkeraman tangan musuh," kata para aktivis eks-PKI – merupakan sebuah dokumen yang terus terang dan ditulis dengan baik, yang mempertunjukkan kecerdasan dan ketenangan pribadi. Di depan mahkamah ia tidak mengkeret ketakutan, melempar kesalahan kepada orang lain, pura-pura tidak tahu, atau memohon keselamatan nyawanya. Sebagai pimpinan tertinggi partai yang tersisa, ia merasa bertanggung jawab kepada para pendukung partai untuk menjelaskan apa yang sudah salah. Menyadari akan dijatuhi hukuman mati, ia menyusun pidato pembelaannya sebagai pernyataan politik kepada masyarakat luas di luar ruangan sidang. Memang, karena ia menolak mengakui keabsahan Mahmilub, ia tidak mau pidatonya disebut sebagai pembelaan (*pledoi*). Sudisman menamainya sebuah "uraian tanggungdjawab."[2]

Sudisman mengakui, dengan cara yang tidak terinci, bahwa ia "terlibat" dalam G-30-S dan bahwa pimpinan-pimpinan PKI lainnya, tanpa menyebut nama, juga "terlibat langsung" di dalamnya.[3] Dengan menggunakan kata *terlibat* ia tidak bermaksud menyatakan bahwa para pemimpin PKI mengarahkan G-30-S. Ia menjunjung pernyataan partai pada 6 Oktober 1965 bahwa G-30-S merupakan peristiwa "intern Angkatan Darat," dan bahwa PKI sebagai partai "tidak tahu menahu" tentang gerakan itu.[4] Ia menyatakan bahwa para pemrakarsa dan pengorganisasi utama G-30-S adalah "perwira-perwira maju" yang ingin menggagalkan rencana kup oleh Dewan Jenderal.[5] Kelompok di belakang G-30-S ini sebagian besar "perwira-perwira non-Komunis" (berarti perwira-perwira yang loyal terhadap Sukarno), tapi juga "disamping yang Komunis."[6] Sudisman menyiratkan bahwa pemimpin-pemimpin tertentu PKI sebagai perseorangan memutuskan untuk mendukung para perwira progresif ini. Ia tidak menjelaskan dengan tegas bagaimana ia dan pemimpin-pemimpin partai lain mulai bersekutu dengan para

perwira tersebut dan memberikan dukungan mereka. Sasaran Sudisman adalah pada memberi alasan pembenar bagi strategi Politbiro untuk mendukung G-30-S ketimbang menggambarkan bagaimana strategi itu dilaksanakan.

Sudisman mengklaim ia menjadi yakin bahwa aksi yang dilakukan "perwira-perwira maju" itu merupakan cara terbaik dalam melawan jenderal-jenderal sayap kanan Angkatan Darat yang telah membuktikan dirinya sebagai satu-satunya rintangan terbesar bagi program partai. Mereka menghalangi politik luar negeri antiimperialis Sukarno, kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang dirancang untuk kemaslahatan kaum tani dan kaum buruh (misalnya *land reform*), dan pengaruh PKI yang terus meluas. Strategi mendukung "perwira-perwira maju" itu, menurut Sudisman, tampaknya benar pada saat itu. Namun, sesudah meninjaunya kembali, ia memandang strategi itu keliru arahan. Kegagalan G-30-S dan kerentanan partai terhadap represi militer memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam watak organisasi dan ideologi partai itu sendiri. Sudisman menyatakan bahwa masalahnya bukan sekadar pimpinan partai bertaruh pada kuda yang salah; masalah utamanya adalah mereka sudah bertaruh. Terbuai oleh rangkaian kesuksesan panjang, mereka kehilangan kemampuan untuk "secara ilmiah menghitung imbangan kekuatan secara kongkrit dari kedua belah pihak, dari kekuatan PKI sendiri dan dari kekuatan lawan."[7] Penekanan mereka pada persatuan nasional menggiring mereka menjadi terlalu akomodatif terhadap kelas menengah dan melalaikan pembangunan kekuatan tani dan buruh yang terorganisasi secara mandiri.[8] Dengan mendukung *putsch* rahasia yang terpisah dari "massa," pimpinan partai telah memilih semacam jalan pintas yang berbahaya menuju revolusi – bahaya yang tidak akan pernah mereka alami andaikata partai tidak tersita perhatiannya oleh rencana-rencana licik politisi elite di Jakarta. Di antara puing-puing G-30-S tersingkaplah "kesalahan-kesalahan PKI yang menumpuk untuk masa yang panjang."[9]

Sudisman yakin otak G-30-S ialah perwira-perwira militer seperti Untung dan Supardjo. Untuk menimbang ketepatan keyakinannya perlu dipertanyakan apa yang diketahui Sudisman tentang G-30-S. Informasi apa yang menjadi dasar keyakinannya itu? Menurut *Uraian Tanggung-djawab* pengetahuannya tentang G-30-S berasal dari Aidit saja. Sudisman

mencatat bahwa di dalam sidang-sidang Politbiro Aidit menjelaskan "bahwa ada perwira-perwira maju yang mau mendahului bertindak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal."[10] Menurut pengalaman Sudisman, Aidit "teliti dalam menerima informasi-informasi" dan "teliti dalam menghitung imbangan kekuatan."[11] Berkat kedudukannya sebagai menteri koordinator dalam kabinet Sukarno, Aidit "cukup memiliki saluran" untuk memeriksa informasi yang diterimanya.[12] Sudisman mempercayai pendapat Aidit bahwa G-30-S patut mendapat dukungan, "kawan Aidit menjelaskan [kemungkinan kepada anggota Politbiro] dengan meyakinkan bahwa ada perwira-perwira maju dan G-30-S yang mengadakan operasi militer membentuk Dewan Revolusi."[13] Aidit konsisten dalam memberi tahu Politbiro bahwa gerakan yang direncanakan merupakan urusan intern militer. Aidit menjelaskan "bahwa para perwira maju mau mengadakan operasi militer dan tidak pernah mengemukakan bahwa PKI mau mengadakan operasi militer, dan oleh kawan Aidit juga tidak pernah dikemukakan bahwa PKI mau mencetuskan revolusi pada saat itu."[14] Sudisman menempatkan Aidit sebagai orang utama di dalam partai yang berhubungan dengan para perwira dan menetapkan tindakan apa yang akan diambil oleh personil PKI dalam mendukung gerakan tersebut. Sudisman mengatakan bahwa Aidit "menugaskan pengiriman beberapa tenaga ke daerah pada hari-hari menjelang mencetusnya G-30-S dengan garisnya 'dengarkan pengumuman RRI Pusat dan sokong Dewan Revolusi.'"[15] Bagi Sudisman G-30-S mirip dengan kup Kolonel Qasim di Irak pada 1958 yang menumbangkan monarki dan menggagalkan keikutsertaan Irak dalam persekutuan militer untuk menghadapi Uni Soviet (Pakta Baghdad 1955, yang antara lain termasuk Turki dan Inggris).[16] Ada beberapa kup yang mempunyai agenda politik yang progresif – yaitu melawan feodalisme, imperialisme, dan kapitalisme – sementara itu ada beberapa kup yang mempunyai agenda reaksioner. Gerakan 30 September, walaupun bukan kup, merupakan aksi militer yang dalam pandangan partai progresif.

Sudisman tidak mengklaim mempunyai hubungan langsung dengan para perwira yang terlibat dalam G-30-S. Barangkali ia bahkan tidak berhubungan dengan Sjam dan orang-orang dari Biro Chusus. Ia tidak menyebut tentang mereka. Walaupun Sudisman seharusnya tahu lebih banyak tentang hubungan partai dengan G-30-S daripada yang

sudah dibeberkannya di dalam *Uraian Tanggungdjawab*, tanpa bukti tambahan kita tidak bisa beranggapan bahwa pendapatnya tentang penggerak G-30-S itu didasarkan atas informasi di luar dari yang diberikan Aidit kepadanya. Selama sidang-sidang Mahmilub, dalam menanggapi kesaksian Sjam, Sudisman menyatakan tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang G-30-S, hanya mengikuti perintah-perintah dari Aidit, dan percaya bahwa Sjam pun mengikuti perintah dari Aidit, "Walaupun saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G-30-S, tapi karena semua perbuatan itu adalah perbuatan oknum-oknum anggauta PKI, maka saya ambil oper tanggung-jawabnya."[17]

Saya akan berkomentar di belakang tentang tindakan misterius Sudisman untuk mengambil tanggung jawab terhadap suatu gerakan yang menurut pengakuannya sangat sedikit ia ketahui. Sekarang masalah penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Sudisman memang tidak berada dalam posisi mengetahui bagaimana pengorganisasian G-30-S dilakukan. Tidak ada alasan untuk memandang pendapat Sudisman bahwa para perwira militer bertindak atas kehendak sendiri sebagai pendapat seorang yang berwenang dan berpengetahuan memadai. Penilaian Sudisman tentang G-30-S sebagai aksi yang dipimpin militer tidak dapat diperhitungkan sebagai sangkalan yang meyakinkan terhadap penilaian Supardjo yang melihat gerakan itu di bawah pimpinan Sjam. Karena Supardjo jauh lebih dekat dengan para organisator G-30-S dan menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan mereka, penilaiannya harus diberi bobot lebih.[18]

Pertanyaan tentang pengetahuan Aidit tetap tidak terjawab di dalam uraian Sudisman. Mungkin Aidit juga percaya bahwa para perwira militer itu bertindak atas kehendak sendiri. Ia bersandar pada informasi dari Sjam. Mungkin Sjam tidak menjelaskan kepada Aidit bahwa ia sesungguhnya memainkan peranan yang dominan dalam mengorganisasikan para perwira. Jika tidak demikian, barangkali Aidit mengetahui bahwa perwira-perwira di belakang G-30-S ialah mereka yang terkait dengan Biro Chusus, tapi ia mungkin hendak menyembunyikan fakta tersebut dari kawan-kawannya di Politbiro demi mempertahankan kerahasiaan di sekitar operasi Biro Chusus.

ANALISIS SJAM DAN HASAN

Menjelang sidang Mahmilub untuknya berakhir Sudisman membacakan dengan lantang "uraian tanggungdjawab"-nya di depan para hakim dan pengunjung sidang. Sebagian uraiannya dapat ditangkap sebagai penyangkalan terhadap kesaksian yang diberikan Sjam pada sidang yang sama. Dibawa masuk ke ruang sidang sebagai saksi, Sjam menyampaikan pengakuan bahwa yang dilakukan Aidit lebih dari sekadar mendukung G-30-S. Menurut versi Sjam tentang peristiwa itu, Aidit memprakarsai G-30-S. Konon Aidit memerintahkan Sjam agar memobilisasi tokoh-tokoh militer yang terkait dengan Biro Chusus untuk melancarkan aksi militer melawan jenderal-jenderal kanan Angkatan Darat. Sjam mengemukakan, "Sesudah bulan Agustus [1965] [Biro Chusus] menerima keterangan daripada Kawan D.N. Aidit tentang makin memuntjaknja situasi. Dan gedjala-gedjala jang ada menundjukkan bahwa Dewan Djenderal sudah mulai melakukan persiapan-persiapan terachir untuk pada achirnja melakukan perebutan kekuasan. Setelah ada soal-soal itu maka kami diberikan garis, apakah dalam menghadapi situasi jang sematjam ini, kami menunggu dipukul atau mesti memberikan pukulan terlebih dahulu. Karena kesimpulannja bahwa kami harus memberikan pukulan terlebih dahulu, kami melakukan persiapan-persiapan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara saja, Pono, Untung, Latif, Sujono, Sigit dan Wahjudi. Sebagai pertemuan-pertemuan persiapan untuk melakukan gerakan jang pada achirnja dinamakan G30S. Dalam pertemuan-pertemuan itu jang memimpin adalah saja sendiri."[19] Sjam mengklaim dialah yang memilih perwira-perwira yang ikut dalam rapat-rapat itu dan, dengan bantuan Aidit, merancang gagasan tentang Dewan Revolusi.

Berdiri sendiri, kesaksian Sjam harus disikapi dengan kesangsian. Pendakuannya sebagai atasan para perwira dapat diabaikan laiknya khayalan seorang megalomaniak, seseorang yang ingin dilihat sebagai pemain politik yang penting. Pendakuannya bahwa ia mengikuti perintah-perintah Aidit dapat diabaikan sebagai usaha untuk mengesahkan tindakan-tindakan yang sesungguhnya di luar jangkauan kewenangan Aidit. Barangkali Sjam melibatkan Aidit demi menyenangkan para penuntut umum dari militer yang menginginkan pembenaran atas tuduhan mereka bahwa Aidit

ialah otak G-30-S. Namun demikian pernyataan Sjam tidak bisa begitu saja ditolak, menimbang analisis *post-mortem* Supardjo (yang sudah saya bahas dalam bab 3) dan penegasan dari Hasan untuk bagian-bagian tertentu dari kesaksian Sjam yang berkaitan dengan kinerja Biro Chusus (dibahas dalam bab 4). Barangkali Sjam bukanlah seorang penyemu. Dalam karangan otobiografis yang ditulisnya pada pertengahan 1990-an, Hasan menguatkan sejumlah klaim Sjam tentang peranannya di dalam G-30-S. Hasan percaya Sjam mengikuti perintah-perintah Aidit dan para perwira itu, pada gilirannya, mengikuti pimpinan Sjam:

> Pada suatu waktu, kira-kira bulan Juli 1965, dalam rapat BC Pusat, Ketua BC Bung Sjam memberi informasi bahwa sakitnya Presiden Sukarno makin parah dan mungkin akan mati. Hal ini akan digunakan oleh kaum militer yang anti Sukarno dan yang bekerja erat dengan kaum nekolim Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda untuk mengkup kekuasaan Sukarno menjadi pemerintah militer pro-Barat yang fasis. Gerakan rakyat demokratis yang dipimpin oleh Nasakom dimana PKI menjadi pelopornya, akan ditindas secara kekerasan sampai hancur-lebur. Untuk menghadapi situasi gawat yang mendadak, PKI sebagai pelopor gerakan rakyat harus mengambil sikap. Sikap PKI yalah harus melawan gerakan kup militer Angkatan Darat terhadap Pemerintah Sukarno secara militer. Tugas ini diperintahkan oleh Bung Aidit kepada BC Pusat yang menggarap kaum militer. Dalam proses selanjutnya berhubung situasinya makin genting, maka perintahnya bukan hanya menunggu kup kaum militer bahkan kita harus bertindak lebih dahulu terhadap jendral-jendral yang pro nekolim."[20]

Sukarno jatuh sakit dari 3 Agustus sampai 9 Agustus, maka rapat pertama yang dimaksud Hasan tentunya terjadi pada awal Agustus itu. Kemungkinan meninggalnya Sukarno di awal Agustus agaknya telah memancing tekad awal Aidit untuk menyiapkan aksi militer, seperti dikemukakan Hasan, tapi barangkali tidak sampai membulatkan tekad Aidit hingga akhir September. Desas-desus tentang Sukarno hampir

meninggal seketika lenyap saat ia sehat kembali. Beberapa penasihatnya dari semula berpikir bahwa Sukarno tidak menderita penyakit yang lebih parah dari influenza berat. Sesudah 9 Agustus Sukarno tidak memperlihatkan tanda-tanda akan jatuh sakit serius dan mulai lagi mengisi jadwal melelahkan yang sarat dengan pidato-pidatonya yang bersemangat di depan umum, termasuk pidato pada 30 September malam.

Bagi Aidit, untuk meneruskan rencana melancarkan aksi militer, jika itu memang ia lakukan, ia tentu sudah yakin bahwa jenderal-jenderal antikomunis Angkatan Darat akan melancarkan serangan tanpa menghiraukan kesehatan Sukarno. Menurut Hasan, Aidit mengubah rencana semula; Biro Chusus berubah dari menanti menjadi mendahului kudeta para jenderal. Pendapat ini serupa dengan pendirian Sjam bahwa partai menghadapi pertanyaan apakah menunggu kup terjadi baru bertindak, atau mendahului kup. Pendapat ini juga serupa dengan pendirian Supardjo bahwa "partai" pada satu titik mengubah strateginya dari menunggu laporan tentang rencana para "perwira progresif" menjadi memaksakan rencananya sendiri.

Dipertimbangkan bersama, cerita-cerita Sjam dan Hasan tidak bisa dipandang sebagai bukti tandas bahwa Aidit memprakarsai G-30-S, Sjam mengikuti perintah Aidit, dan perwira-perwira militer yang terkait dengan Biro Chusus mengikuti Sjam. Barangkali perwira-perwira itu bertindak atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan. Ketika berbicara di depan para perwira dan anggota-anggota Biro Chusus (orang-orang yang dikenal Hasan), boleh jadi Sjam sengaja membual tentang perintah Aidit agar orang-orang itu mau mengikuti dia. Perlu diingat bahwa Supardjo mendapat kesan tentang adanya rencana besar partai yang melebihi apa yang telah dijelaskan Sjam kepadanya. Mungkin saja Sjam bersikap seakan-akan kepemimpinan partai terlibat lebih jauh dalam G-30-S. Tapi penegasan Hasan terhadap pokok-pokok cerita Sjam setidak-tidaknya memberikan kesan bahwa gagasan tentang Aidit menjadi salah satu dari pemimpin-pemimpin G-30-S tidaklah berlebihan. Untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang peranan Aidit, kita harus menelaah cerita-cerita tokoh-tokoh yang ada di dalam Politbiro sendiri.

ANALISIS ISKANDAR SUBEKTI

Dua anggota Politbiro diketahui memainkan peranan langsung dalam G-30-S: Njono, yang mengorganisasi sekitar dua ribu pemuda untuk dijadikan sukarelawan, dan Iskandar Subekti, yang menemani Aidit di pangkalan AURI Halim. Kedua tokoh ini menceritakan proses pengambilan keputusan partai dalam kesaksian mereka di sidang pengadilan. Njono, pemimpin PKI yang pertama diadili Mahmilub, berusaha membersihkan pimpinan partai lainnya dari kesalahan apa pun. Ia menampilkan dirinya sebagai oknum dajal yang sudah melanggar keputusan Politbiro untuk tetap tidak terlibat di dalam aksi para perwira Sukarnois melawan Dewan Jenderal.[21] Skenario "meriam liar" yang tak masuk akal ini sebaiknya dikesampingkan saja. Bisa dimengerti, bahkan terpuji, jika Njono mengambil tanggung jawab penuh. Tapi sukar dipercaya bahwa ia bertindak sepenuhnya sendiri tanpa keterkaitan dengan Aidit dan pimpinan partai lainnya, terutama karena belakangan Sudisman mengakui bahwa Politbiro memutuskan untuk mendukung G-30-S.

Cerita Iskandar Subekti lebih layak diperhatikan. Subekti adalah panitera dan arsiparis Politbiro. Ia memang cocok untuk tugas ini bukan hanya karena ia mahir stenografi; ia terpelajar, fasih dalam berbagai bahasa Eropa, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah partai dan program-programnya. Ketika ia diajukan ke pengadilan pada 1972, penjaga rahasia partai ini bisa berbicara dengan lebih terbuka daripada Njono. "Uraian Tanggungdjawab" Sudisman sudah beredar, dan partai sudah dihancurkan.

Dalam pidato pledoinya di pengadilan Subekti menyatakan bahwa pada sebuah rapat pada Agustus 1965 Politbiro memutuskan bahwa partai akan memberi "dukungan politis" kepada aksi yang direncanakan para perwira progresif. Sementara Subekti tidak menjelaskan arti setepatnya perkataan "dukungan politis," ia membedakannya dengan "dukungan fisik," yang tidak mau diberikan Politbiro. Implikasinya adalah para perwira akan bertindak sendiri, sedangkan partai akan membela perjuangan mereka melalui pers dan sidang-sidang pemerintah, "Sikap Partai ialah memberikan dukungan politis, bukan dukungan fisik atau lainnya semacam itu, kepada perwira-perwira muda yang hendak menggagalkan rencana kudeta dari Dewan Jenderal terhadap Pemerintah Sukarno. PKI

bisa memberikan dukungan kepada sesuatu aksi dari kekuatan-kekuatan revolusioner dan demokratis untuk menentang kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner. Sikap itu adalah sikap politik yang wajar dan biasa, berhubung dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI yang mendukung Pemerintah Sukarno pada waktu itu."[22]

Tabel 3. Struktur Organisasi Pimpinan Partai Komunis Indonesia, September 1965

Ketua Comite Central D.N. Aidit
Dewan Harian Politbiro Lima anggota: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea
Politbiro Dua belas anggota penuh: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, Sakirman, Njono, Mohamad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang Empat calon anggota: Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi Panitera: Iskandar Subekti
Comite Central 85 anggota

Sumber: Subekti, "G-30-S Bukan Buatan PKI," 2-3.

Subekti mengklaim bahwa Aidit menjelaskan keputusan Politbiro kepada sekelompok anggota Comite Central pada 27 atau 28 Agustus.[23] Subekti menekankan bahwa rapat ini adalah sebuah brifing oleh Aidit, bukan sidang resmi Politbiro yang diperluas atau sidang Comite Central yang dipersempit (lihat gambar 3 tentang struktur pimpinan PKI). Brifing tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh pimpinan tertentu tentang posisi partai. Aidit menjelaskan kepada yang hadir bahwa sebuah klik perwira progresif sedang merancang suatu aksi menentang Dewan Jenderal dan bahwa partai akan memberikan "dukungan politis." Menurut Subekti tidak ada diskusi, juga tidak ada keputusan satu pun diambil di dalam forum ini.

Subekti menyatakan bahwa Politbiro tidak bersidang selama September. Njono juga menyatakan, walaupun Politbiro tiga kali bersidang dalam Agustus, tidak satu kali pun dalam September. Ini mengesankan bahwa Aidit bertindak sendiri di luar pengawasan Politbiro selama beberapa pekan sebelum G-30-S dimulai. Menurut Subekti, "Pelaksanaan selanjutnya dari putusan Politbiro yang dibriefingkan itu diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro sebagaimana lazimnya Dewan Harian Politbiro melaksanakan sehari-harinya putusan Politbiro. Tidak ada sidang Politbiro lagi untuk mendengarkan laporan-laporan

tentang pelaksanaan putusan itu oleh Dewan Harian Politbiro ataupun oleh Ketua CC guna memberikan kesempatan kepada Politbiro untuk menilai kebijaksanaan Dewan Harian Politbiro atau Ketua CC dalam melaksanakan putusan Politbiro itu."[24] Dengan kata lain, Aidit bertindak sendiri selama September dalam hal perencanaan gerakan tersebut.

Jika Subekti benar bahwa Politbiro tidak bersidang selama September, anggota Politbiro sebagai kelompok bisa jadi tidak mendapat informasi tentang peranan Sjam dalam G-30-S. Sjam mulai mengadakan rapat-rapat dengan para perwira baru pada September (setidak-tidaknya menurut pengakuannya sendiri). Politbiro tidak mungkin bisa mengetahui, apalagi menyetujui, persisnya tindakan-tindakan Aidit dan Sjam.

Jika selama sidang-sidang pada Agustus Politbiro memberikan persetujuannya kepada gagasan "dukungan politis" terhadap tindakan militer para perwira progresif, untuk memutuskan rincian kerja sama partai diserahkan kepada Aidit. Subekti mencatat dalam sebuah alinea yang gamblang bahwa Aidit adalah satu-satunya pimpinan partai yang berhak mengurus hubungan PKI dengan militer:

> Penyerahan soal-soal militer kepada D.N. Aidit adalah, menurut pengalaman saya, soal yang biasa, yang sehari-hari. Karena soal militer, artinya soal-soal yang bertalian dengan kerjasama atau sikap-sikap tertentu yang harus diambil oleh Partai terhadap ABRI merupakan hal-hal yang harus dilakukan dengan hati-hati maka ini diserahkan kepada Ketua CC, D.N. Aidit. Dalam praktek sehari-harinya hal ini terwujud dalam misalnya ceramah-ceramah, penulisan-penulisan, atau penjelasan-penjelasan dari sikap Partai terhadap ABRI yang dituangkan dalam editorial-editorial *Harian Rakjat*. Yang boleh menulis tentang ini hanya Ketua CC, D.N. Aidit, tidak boleh orang lain, redaksi *Harian Rakjat* sekalipun tidak boleh.[25]

Butir pokok pendapat Subekti sama dengan yang diajukan Sudisman: G-30-S bukanlah buatan PKI sebagai sebuah lembaga walaupun beberapa pimpinan partai tertentu terlibat di dalamnya. Baik Politbiro maupun Comite Central tidak memikirkan sebuah rencana aksi untuk memprakarsai, mengorganisasi, dan memimpin G-30-S.

Pidato Subekti di depan sidang pengadilan pada 1972 tampaknya mencerminkan pendapatnya yang jujur tentang G-30-S. Ia mengulangi banyak pendapat yang sama ketika ia menulis sebuah dokumen rahasia pada 1986 untuk sekelompok kecil anggota partai yang setia dan masih hidup, termasuk mantan anggota Politbiro, Jusuf Ajitorop.[26] Halaman pertama naskah tulis tangan ini menyatakan bahwa dokumen ini tidak diedarkan untuk umum dan ditulis semata-mata untuk "dokumentasi partai." Subekti memutuskan menuliskan analisis tentang G-30-S segera setelah ketiga pimpinan Biro Chusus (Sjam, Pono, dan Bono) dieksekusi pada September 1986.[27] Menyadari ketiga orang ini (teman-temannya sesama penghuni penjara Cipinang) telah membawa rahasia mereka masing-masing ke liang kubur dan sedikit saja pimpinan PKI lainnya yang masih hidup, Subekti merasa harus mencatat semua ingatan dan pendapatnya sendiri. Untuk pembaca terbatas dari kalangan loyalis partai Subekti menegaskan pokok pikiran yang sudah ia kemukakan tahun-tahun sebelumnya di hadapan publik:

> G-30-S bukan buatan atau ciptaan PKI … Maka seandainya ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang "didalangi" PKI, semestinya ia dibicarakan dan diputuskan oleh badan pimpinan partai yang tertinggi yaitu Comite Central. …Tetapi hal ini tidak pernah dibicarakan, apalagi diputuskan di dalam dan oleh Comite Central yang anggotanya berjumlah 85 orang itu. …Bahkan ada anggota Politbiro atau calon anggota Politbiro yang tidak mengetahui sama sekali. Manakala ada anggota-anggota CC atau PB [Politbiro] yang tersangkut dalam gerakan ini, maka mayoritas dari mereka hanya merupakan pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, membicarakan atau merencanakan gerakan ini.[28]

Pendapat Subekti tentang kebersalahan PKI sebagai sebuah lembaga cukup sahih. Soal yang dipertanyakan ialah mengapa Aidit dan pimpinan tertentu lainnya menjadi "tersangkut" dalam G-30-S. Walaupun Subekti dan Sudisman secara implisit mengesankan di hadapan publik bahwa dalam hal G-30-S Aidit membuat kebijakannya sendiri, tak satu pun dari mereka terbuka tentang bagaimana persisnya sifat keterlibatan Aidit.

Subekti jauh lebih terus terang tentang hal ini dalam dokumen rahasianya tahun 1986. Ia mempersalahkan Aidit dan para pimpinan partai lainnya jauh lebih mendalam dalam hal merancang G-30-S. Versi Subekti mengenai kejadian-kejadian tersebut patut diperhatikan dengan cermat karena ia, dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya, dalam posisi lebih mengetahui gerak-gerik Aidit selama Agustus dan September. Sebagai panitera Politbiro, ia juga berperanan sebagai semacam sekretaris pribadi Aidit.

Dalam uraian rahasianya Subekti menyatakan bahwa Aidit bertemu Sjam dalam Agustus 1965 untuk membahas kemungkinan melancarkan aksi militer melawan Dewan Jenderal. Aidit masih mempelajari pilihan-pilihannya pada saat itu. Sjam meyakinkan Aidit bahwa ia dapat mengerahkan para simpatisan partai di dalam tubuh militer untuk pelaksanaan aksi itu. Kemudian Aidit melakukan pendekatan terhadap Politbiro. Dengan bayangan aksi militer itu akan dilaksanakan oleh para perwira militer sendiri, terlepas dari partai, Politbiro sepakat pada sebuah sidang di Agustus untuk memberikan "dukungan politis." Aidit lalu membentuk satu tim khusus pilihan dari anggota-anggota Politbiro untuk membahas dengan cara-cara apa partai akan mendukung para perwira itu. Subekti tahu tentang tim ini karena ia sendiri termasuk di dalamnya. Ia mengikuti diskusi-diskusi tim "tidak sebagai peserta penyumbang pikiran atau pendapat, tetapi sebagai tukang catat keputusan-keputusan yang diambil oleh kolektif tersebut di atas."[29] Para anggota tim ialah, menurut ingatan Subekti, Aidit, Sudisman, Oloan Hutapea, Lukman, dan Rewang. Tim ini kerap bertemu dari akhir Agustus sampai akhir September dengan tiga anggota inti Biro Chusus, Sjam, Pono, dan Bono. Dengan demikian Aidit tidak melibatkan Politbiro beserta seluruh Dewan Hariannya dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa anggota badan-badan ini dibiarkan dalam kegelapan. Khususnya Njoto disisihkan dari lingkaran ini. Subekti mencatat, "Dalam semua diskusi ini kawan Mansur (Njoto) oleh DN Aidit dengan sadar tidak diikutsertakan karena pertimbangan ideologis. Bagi Nyoto tidak dipercaya karna berdasarkan pengalaman lebih dianggap Sukarnois daripada Komunis."[30] Oey Hay Djoen (yang dekat dengan Njoto) menyampaikan kepada saya bahwa Aidit hanya bersandar pada orang-orang kepercayaannya saja dalam minggu-minggu sebelum kejadian.[31]

Masuk akal untuk berasumsi bahwa Subekti benar sehubungan dengan klaim tentang adanya tim khusus pilihan Aidit untuk membahas G-30-S. Sebagai operasi terselubung yang menuntut kerahasiaan, G-30-S tidak mungkin bisa diketahui banyak orang. Menjadi jelas juga jika anggota CC-PKI, yang terdiri dari sekitar delapan puluh lima orang, tidak diberi tahu tentang G-30-S secara rinci dan tidak dibolehkan memperbincangkannya. Karena jika ini terjadi sama saja dengan membuat pernyataan publik, mengingat bahwa Angkatan Darat mempunyai mata-mata di dalam partai. Adanya Sakirman di dalam Politbiro akan merupakan kendala bagi Aidit untuk mendiskusikan rencana G-30-S secara rinci dalam forum itu. Salah satu sasaran penting G-30-S ialah adik Sakirman, Jenderal Parman, kepala intelijen Angkatan Darat. Parman sendiri suatu ketika mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya tubuh PKI dan dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Parman juga mengatakan bahwa PKI sudah mengetahui ada penyusupan di dalam partai dan membentuk suatu kelompok inti kecil untuk membahas masalah-masalah yang sensitif.[32]

Subekti mencatat bahwa salah satu tema diskusi dalam tim khusus tersebut adalah usul Aidit tentang dewan revolusi, “D.N. Aidit telah mengkonsepkan daftar orang-orang anggota Dewan Revolusi. Konsep ini telah diterima oleh badan kolektif seperti tersebut di atas tadi.”[33] Ide di balik daftar nama-nama ini ialah gerakan ini harus tampil sebagai aksi militer murni, “Sejak semula, selagi masih dalam tingkat-tingkat pertama dalam pembicaraan antara D.N. Aidit dan Kamaruzaman [Sjam], telah diputuskan bahwa gerakan itu harus merupakan gerakan militer, tidak boleh terlihat sebagai gerakan dari PKI.”[34] Karena itu orang-orang yang dipilih sebagai anggota Dewan Revolusi Indonesia ialah tokoh-tokoh politik yang mewakili lintas aliran ideologi yang luas. Gerakan ini tidak dimaksudkan sebagai suatu aksi yang akan serta-merta membawa PKI masuk ke istana. Gerakan ini hanya bertujuan untuk membersihkan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang antikomunis, sehingga dengan begitu dapat menciptakan suasana politik yang memungkinkan PKI berkembang meluas. Subekti menekankan bahwa tim khusus anggota Dewan Harian Politbiro tidak pernah mendiskusikan gagasan untuk

mendemisionerkan kabinet Sukarno. Ia mempersalahkan Aidit yang, pada detik terakhir, menyisipkan gagasan tersebut dalam pengumuman radio 1 Oktober. Tapi Subekti tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana Aidit melakukan hal tersebut. Dewan Revolusi, sebagaimana yang dirumuskan oleh tim khusus, dimaksudkan untuk menekan pemerintah Sukarno agar bergeser lebih ke kiri, tidak untuk mengganti menteri-menteri kabinet yang ada.

Tim khusus itu, dalam penilaian Subekti, tidak berfungsi sebagai pengendali kebebasan Aidit untuk bergerak. Ia melukisan Aidit sebagai seorang pemimpin yang memprakarsai gagasan tentang aksi militer untuk mendahului rencana Dewan Jenderal. Tim khusus tampak lebih sebagai panel gaung bagi Aidit, ketimbang sebagai badan terpadu yang membuat keputusan-keputusan laiknya sebuah kolektif. Karena Biro Chusus sepenuhnya berada di bawah pimpinannya, Aidit dalam posisi untuk melakukan kontrol secara eksklusif terhadap gerakan yang direncanakan. Subekti menulis bahwa Sjam "didudukkan oleh Aidit sebagai pemimpin utama dalam komando gerakan."[35] Perhatikan bahwa Subekti tidak mengklaim bahwa tim khusus mengangkat Sjam sebagai pemimpin. Subekti mengklaim bahwa Aidit sendirilah yang menunjuk Sjam. Bahkan jika anggota-anggota tim khusus terlibat dalam perencanaan aksi pada minggu-minggu menjelang 1 Oktober, tampaknya mereka tidak menetapkan peranan apa pun bagi diri mereka dalam melaksanakannya. Setidak-tidaknya ada dua orang anggota tim yang tidak aktif pada 1 Oktober: Lukman sedang keliling Jawa Tengah, dan Sudisman bersembunyi di sebuah rumah di Jakarta, memantau siaran-siaran radio (menurut Hasan, yang bersama Sudisman pada hari itu). Dalam pledoinya di depan sidang Subekti mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah ketika menemani Aidit di pangkalan udara AURI di Halim, "Saya diharuskan membantu Aidit dan melakukan pengetikan itu atas perintah Aidit 'in person,' bukan sebagai putusan Politbiro ataupun sebagai tugas yang ditetapkan oleh Sekretariat CC." Aidit memandang Subekti sebagai seorang pengikut setia yang tidak banyak bertanya, "Tenaga-tenaga pembantu Aidit sesungguhnya sudah cukup dengan Bono dan Kusno, Aidit meminta saya lagi dan bukan orang lain, menurut dugaan saya karena ia mempunyai "affection" tertentu atau suka dengan saya yang ia kenal sebagai kawan sejak waktu pra-Proklamasi 17 Agustus 1945 di

Menteng 31, dan yang suka bekerja serta tidak rewel."[36] Bagi Subekti tim khusus para anggota Politbiro bukanlah otak G-30-S. Tim ini lebih merupakan suatu badan musyawarah bagi Aidit dan Sjam saat mereka merencanakan G-30-S bersama para perwira militer tertentu.

Uraian Iskandar Subekti yang bersifat rahasia ini merupakan bukti kuat bagi klaim bahwa peranan Aidit dan Sjam dalam G-30-S lebih besar dibandingkan peranan para perwira militer. Subekti, beda dengan Supardjo, berada dalam posisi mengetahui dinamika internal pimpinan PKI. Supardjo hanya mengatakan bahwa "partai" lebih dominan. Subekti lebih persis dalam menunjukkan siapa di dalam partai yang bertanggung jawab. Menulis untuk pembaca kalangan dalam partai pada 1986, ia tidak berada di bawah tekanan apa pun untuk tidak jujur. Ia ingin berterus terang demi proses perbaikan diri partai sendiri. Namun, pemandangan Subekti terbatas. Dia tidak mungkin hadir dalam rapat-rapat antara Sjam dan para perwira, sehingga dia tidak mungkin mengetahui sifat saling hubungan mereka. Kendati demikian, dari diskusi-diskusi tim khusus saja ia rupanya dapat menduga bahwa Aidit dan Sjam telah memprakarsai aksi dan mulai memperoleh kerja sama dari para perwira militer yang simpati kepada PKI. Subekti, seperti empat pimpinan PKI lainnya dalam tim khusus, tentu menyadari bahwa para perwira militer di dalam G-30-S itu tidak bebas sepenuhnya dari partai. Mereka adalah koneksi-koneksi Sjam.

Boleh jadi Subekti melebih-lebihkan peranan Aidit dan Sjam karena ia menyimpan kegeraman hebat terhadap kedua tokoh itu. Nada berang dalam alinea-alinea tertentu dari analisisnya pada 1986 (hujatannya terhadap hampir semua mantan pimpinan PKI lainnya sebagai pengecut, borjuis kecil, dan tak berprinsip) tampak sebagai akibat dari frustrasi dan kekecewaannya yang mendalam saat menyaksikan kehancuran partai.[37] Orang bisa saja mengatakan Aidit dan Sjam menjadi kambing hitam baginya. Namun, alasan-alasannya untuk menyalahkan Aidit dan Sjam boleh jadi cukup berdasar. Pimpinan partai yang lain, seperti Sudisman, juga menuding dua tokoh itu sebagai yang bertanggung jawab.

Pertimbangkan pernyataan Sudisman, seperti yang sebelumnya sudah dikutip, "Walaupun saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskan-

nya G-30-S, tapi karena semua perbuatan itu adalah perbuatan oknum-oknum anggauta PKI, maka saya ambil oper tanggung-jawabnya." Klaim Sudisman tentang ketidaktahuannya hendaknya diartikan bahwa ia tidak mengetahui beberapa rincian tentang G-30-S. Ia mengakui bahwa ia terlibat. Tapi cara Sudisman mengambil alih tanggung jawab moral atas G-30-S memperlihatkan bahwa ia yakin Aidit telah bertindak sendiri. Tentang hal ini Sudisman menguraiinya lebih lanjut di dalam dokumen "otokritik" Politbiro (disiarkan pada September 1966) dan dalam pledoinya di depan sidang Mahmilub. Ia merasa bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan partai yang terlalu banyak memberi jalan simpang bagi Aidit untuk bertindak sendiri. Menurut Sudisman prinsip "centralisme demokrasi" partai telah menjadi lebih condong ke sentralismenya ketimbang demokrasinya. Pimpinan PKI sudah menyerahkan kekuasaan terlalu banyak kepada Aidit. Pesan yang tersirat di balik argumen Sudisman ialah bahwa Aidit telah menetapkan kebijakan partai mengenai G-30-S dan Politbiro memberi lampu hijau kepadanya untuk jalan terus. Karena Sudisman percaya bahwa "centralisme demokrasi" merupakan bentuk organisasi ideal di mana "dipadukan pertanggungan-jawab kolektif dengan pertanggungan-jawab perseorangan" ia merasa tanggung jawab dirinya akan kebijakan partai sebanding dengan tanggung jawab Aidit. Jika Aidit berbuat salah, itu karena pimpinan lain telah membiarkan dia berbuat salah. Avonturisme Aidit, meminjam kata-kata Sudisman, mencerminkan adanya masalah yang serius di dalam partai karena Aidit tidak bisa ditunjuk sebagai satu-satunya orang yang memikul seluruh beban kesalahan. Sudisman merasa dia sendiri dan pimpinan PKI yang lain telah membiarkan prinsip "centralisme demokrasi" mengalami kemerosotan.

Pada saat persidangan Sudisman pada 1967 pimpinan PKI yang masih hidup di penjara memperdebatkan masalah tanggung jawab ini dengan sengit. Militer mengumpulkan sekitar tujuh puluh lima tapol, baik pimpinan PKI maupun perwira militer, di suatu tempat, yaitu di Rumah Tahanan Militer (RTM) di tengah kota Jakarta, sehingga mereka bisa diajukan sebagai saksi untuk persidangan Sudisman. Begitu berkumpul di satu gedung, mereka mempunyai banyak kesempatan untuk berdiskusi di antara mereka tentang proses pengambilan keputusan di dalam partai dan memahami siapa yang harus dipersalahkan terkait

dengan kekalahan mereka. Salah seorang di antara para tapol itu ialah Tan Swie Ling, yang ditangkap bersama Sudisman pada Desember 1966. Ia memberi tempat perlindungan bagi Sudisman di rumahnya. Tan mengenang bahwa pendapat umum di kalangan pimpinan PKI yang ditahan di RTM adalah Aidit sebagai individu harus disalahkan, "Jadi disitu saya berkesempatan untuk ketemu dengan orang-orang ini, dan sejauh yang saya dengar dari mereka itu semua rasa kecewa, rasa marah, dan karena itu yang muncul cuma caci maki. Caci maki tentu jatuh kepada D.N. Aidit. Caci maki tentang kesalahannya dan lain sebagainya, umpama semua adalah kesalahannya D.N. Aidit. Saya tidak pernah mendengar keterangan yang sedikit masuk akal … Saya ketemu sama seorang kader yang saya hormati, dan juga dia dihormati oleh banyak orang, itu namanya pak Joko Soejono. Ini orang bekas kader buruh, dia juga orang CC. Saya pernah tanya sama dia, sebetulnya kenapa terjadi peristiwa G-30-S? Dia cuma jawabnya, 'karena Centralisme Demokrasi itu berat sebelah, yang jalan cuma centralismenya saja, demokrasinya tidak ada.'

Sudisman mengakui, menurut ingatan Tan, Aidit terlalu banyak memperoleh kekuasaan di dalam partai, tapi Sudisman menyalahkan pimpinan partai lainnya karena mereka tidak cukup kompeten melawan Aidit, "Kalau Sudisman dia memberi keterangannya begini, 'Kalau kawan-kawan merasakan sentralisme terlalu kuat, dan demokrasi tidak berjalan, itu letak persoalannya sebetulnya bukan karena Aidit itu diktator,' ini menurut Sudisman ya, 'tetapi karena kemampuan teori antara Aidit dengan yang lain-lain tidak setara. Jadi kesenjangannya terlalu jauh, sehingga setiap kali ada diskusi, setiap kali terjadi adu argumentasi, selalu Aidit berhasil.'"[38]

Walaupun Sudisman percaya bahwa Aidit berpengaruh besar di dalam PKI karena ia begitu pandai, masih mungkin melihat alasan-alasan lain. Fakta yang sederhana adalah partai tumbuh di bawah pimpinan Aidit. Banyak anggota Politbiro dan Comite Central bersedia tunduk kepada Aidit karena ia tampaknya memiliki rumus untuk kesuksesan. Apa pun persisnya alasan tentang kedominanan Aidit, para pimpinan PKI yang masih hidup menganggapnya sebagai penyebab kehancuran partai. Menjelang akhir September 1965 kepemimpinan partai menjadi mirip dengan hierarki militer, dengan Aidit sebagai panglima tertinggi,

memberikan perintah-perintah bahkan kepada anggota-anggota senior Politbiro. (Seperti dicatat Sudisman, bahkan ia sendiri menerima "perintah-perintah" dari Aidit.) Aidit, sebagai sosok penghubung utama antara Biro Chusus dan pimpinan partai yang legal, berada dalam posisi yang unik dan kuat. Para pimpinan partai yang lain harus mengikuti penilaiannya dalam hal aksi militer. Ketika aksi ini gagal, mereka percaya aksi itu gagal karena Aidit telah bekerja seorang diri, di luar kontrol lembaga-lembaga partai yang lain, dan mengorganisir G-30-S dengan bantuan Biro Chusus, sebuah sayap partai yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinannya.

KEUNTUNGAN MENDAHULUI

Jika benar Aidit adalah penggerak utama G-30-S, lalu apakah alasannya? Baik Iskandar Subekti maupun Sudisman berpendapat bahwa G-30-S dimaksudkan sebagai tindakan secara militer untuk mendahului rencana kudeta Dewan Jenderal. Banyak politisi di Jakarta pada 1965, termasuk Sukarno sendiri, mengkhawatirkan bahwa jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat sedang berkomplot dengan kekuatan Barat untuk menggulingkan Sukarno. Kemungkinan besar Aidit mempercayai adanya Dewan Jenderal dan bahwa dewan ini merupakan ancaman langsung bagi Presiden Sukarno dan juga PKI. Baik Sudisman maupun Subekti membenarkan bahwa mereka yakin dalam Agustus dan September 1965 tentang adanya rencana kup oleh pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Pertanyaan yang menimbulkan teka-teki ialah mengapa Aidit percaya tindakan mendahului secara militer itu merupakan pilihan paling baik untuk menjawab ancaman tersebut? Apakah ia tidak mempercayai Presiden Sukarno untuk menangani jenderal-jenderal itu sendiri? Apakah Aidit tidak percaya kepada kemampuan PKI dalam menghadapi serangan militer? Sudah sejak akhir 1940-an partai hampir selalu mengalami serangan: penindasan pascaperistiwa Madiun 1948, penangkapan massal di Jakarta pada Agustus 1951, pelarangan partai di tiga daerah pada 1960 ("Tiga Selatan": Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan). Namun demikian partai berhasil selamat dan tumbuh di tengah-tengah kemunduran-kemunduran itu. Mengapa Aidit tidak menunggu sampai

jenderal-jenderal itu sendiri bergerak, dan kemudian memimpin massa PKI bangkit berlawan? Jika para perwira sayap kiri pro-Sukarno sedang menyusun rencana menentang jenderal-jenderal sayap kanan, mengapa Aidit tidak membiarkan saja mereka berjalan dengan rencana mereka? Mengapa ia merasa dirinya dan beberapa anggota partai lainnya harus memainkan peranan? Aidit, seperti ditegaskan Sudisman, mempunyai reputasi sebagai ahli siasat yang berkepala dingin, dan tentunya sudah memperhitungkan untung-rugi pilihan yang diambilnya.[39]

Satu pilihan ialah memberi kesempatan Sukarno menangani sendiri masalah dengan jenderal-jenderal sayap kanan tersebut. Sukarno bisa saja memecat Yani sebagai panglima Angkatan Darat dan menggantikannya dengan jenderal yang lebih berhaluan kiri, seperti Pranoto atau Rukman, dan selanjutnya mendesak panglima baru agar menyusun ulang stafnya. Sukarno mungkin bermaksud menemui Yani pada 1 Oktober di istana, dan mengujinya lagi (seperti dalam Mei 1965) tentang desas-desus mengenai Dewan Jenderal, dan memberitahunya bahwa ia akan diganti.[40] Analis politik Rex Mortimer, dalam tulisannya pada pertengahan 1970-an, mengira Aidit akan lebih menyukai pendekatan secara administratif seperti itu karena PKI telah menjadi sangat bergantung pada naungan Sukarno. Bersandar pada Sukarno dalam menghadapi jenderal-jenderal tersebut akan lebih aman dan gampang ketimbang mengorganisasi serangan rahasia, "Bagi Sukarno merupakan masalah yang boleh dibilang sederhana untuk melumpuhkan Angkatan Darat dengan menempatkan para pimpinannya dalam pengawasan ketat, menyampaikan kepada seluruh bangsa tentang dasar tindak-annya dengan gayanya yang tak tertandingi itu, dan mengulur-ulur penyelesai-an masalah sementara ia mereorganisasi tatanan angkatan [sehingga menjadi] lebih sesuai dengan seleranya."[41] Mortimer beranggapan Sukarno mempunyai kekuasaan mutlak atas Angkatan Darat, sehingga perintah dari Sukarno kepada polisi militer untuk menahan jenderal-jenderal yang dicurigai merencanakan kup, atau perintah untuk memecat Yani, akan menyelesaikan masalah. Tidak demikian kenyataannya. Kendali Sukarno atas militer tidak mantap. Para pendukungnya yang fanatik di dalam Angkatan Darat tidak cukup banyak atau tidak ditempatkan secara strategis untuk menjamin setiap perintahnya akan dilaksanakan. Bagaimana jika Yani memutuskan untuk membangkang perintah Sukarno (seperti yang

dilakukan Suharto pada 1 Oktober)? Akankah Sukarno bisa memaksa Yani untuk mundur tanpa risiko pertempuran berdarah antara berbagai satuan-satuan militer (hal yang pada 1 Oktober ingin dihindari Sukarno dengan segala daya)? Mungkin Aidit mempunyai alasan-alasan yang tepat untuk menolak strategi yang bersandar pada Sukarno. Mungkin ia takut bahwa gerakan untuk menahan atau mengangkat panglima Angkatan Darat hanya akan memprovokasi jenderal-jenderal untuk melancarkan kup atau bahwa Sukarno tidak akan mempunyai kekukuhan menghadapi bentrokan dengan pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

Pilihan lain ialah bersandar pada kekuatan pendukung partai, yaitu dua puluh tujuh juta orang yang digemakan Aidit dalam pidato-pidatonya. Jika dikerahkan di jalan-jalan secara besar-besaran, mereka akan menghadirkan tantangan hebat bagi jenderal-jenderal Angkatan Darat. Mantan wartawan Joesoef Isak teringat, ia pernah diberi tahu beberapa anggota Comite Central pada Agustus dan September bahwa suatu aksi massa menentang "kapitalis birokrat" dan "kaum kontra-revolusioner" akan segera terjadi. Isak ketika itu ketua PWAA (Persatuan Wartawan Asia-Afrika), organisasi yang tumbuh dari Konferensi Asia Afrika yang terkenal dan diselenggarakan di Bandung pada 1955. Kantor PWAA di tengah kota Jakarta menerima lima wartawan dari negara-negara Asia dan lima lainnya dari negara-negara Afrika.[42] Isak secara rutin memberikan informasi singkat kepada sepuluh orang wartawan ini, yang disebut sebagai "sekretaris-sekretaris luar negeri" itu, tentang perkembangan politik di Indonesia. Informasi yang disampaikannya berasal dari laporan-laporan rahasia yang diterimanya dari Comite Central PKI. Isak bukan anggota penuh PKI, tapi ia dipercaya sebagai simpatisan yang teguh. Ia menjadi saluran informasi partai untuk para sekretaris luar negeri, yang kebanyakan adalah anggota partai-partai komunis di negeri mereka masing-masing. Seorang anggota Comite Central, Nursuhud, selalu memberi informasi kepada Isak tentang posisi partai dari waktu ke waktu.[43] Dengan demikian ia menjadi tempat berbagi rahasia tentang informasi-informasi yang sensitif.

Menurut ingatan Isak suasana politik pada pertengahan 1965 "memang revolusioner." PKI merasa yakin bahwa ia sedang memenangi persaingannya dengan militer, bahwa situasi bergeser bagi kebaikan partai. Pimpinan partai merasa telah mencapai suatu tahap di mana mereka bisa

melancarkan pukulan pamungkas terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Sudisman pun, dalam analisisnya, mencatat bahwa pimpinan partai melihat "situasi politik pada waktu itu sebagai situasi politik revolusioner," ketika aksi-aksi "massa rakyat banyak" semakin ikut menentukan kebijakan pemerintah.[44] Selama dua bulan menjelang peristiwa, Isak mendengar bahwa suatu aksi penting segera akan terjadi:

> Saya diberi tahu, bahwa sebentar lagi seluruh situasi akan berubah. Saya mengerti itu artinya akan terjadi suatu gerakan hebat. Akan ada pukulan terakhir. Saya tetap mengganggu partai [maksudnya pemberi informasi, Nursuhud], dengan menanyakannya, "Kapan? Kamu bilang sebentar lagi." Baiklah, satu minggu sudah liwat, satu bulan, masih tidak terjadi apa-apa. Saya tetap mencari-cari partai, menanyakan kapan. Para sekretaris luar negeri [PWAA] terus-menerus bertanya pada saya kapan akan terjadi.
>
> Partai mengatakan pada saya, "Kita akan melancarkan aksi-aksi revolusioner sepenuhnya sampai mencapai puncak. Kita akan menghabisi kaum kapitalis birokrat dan kaum kontra-revolusioner." Saya bertanya, "Bagaimana cara kamu akan melakukannya?" "Turun ke jalan-jalan," begitulah cerita yang disampaikan pada saya. "Turun ke jalan-jalan. Kita akan pergi langsung masuk ke kantor-kantor para menteri, para dirjen departemen-departemen pemerintah, dan menangkap mereka. Kita akan mengambil Wakil Perdana Menteri III Sukarno, Chairul Saleh, dan melemparnya ke kali Ciliwung."[45]

Seperti setiap orang lain di Jakarta yang sadar politik, Isak tahu bahwa musuh utama PKI ialah pimpinan Angkatan Darat. Apa pun bentuk "pukulan terakhir" itu, sasarannya ialah pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Informasi dari Nursuhud mengatakan bahwa tindakan partai akan melibatkan demonstrasi-demonstrasi massa. Isak tidak membayangkan akan adanya operasi rahasia militer.

Kalaupun Aidit memang mempertimbangkan pilihan untuk pengerahan demonstrasi besar-besaran ini, pada akhirnya ia memutuskan

untuk tidak menyetujuinya. Ia tentu menyadari bahwa PKI, betapapun telah tumbuh menjadi besar dan berpengaruh, tetap merupakan organisasi tak bersenjata yang tidak bisa berharap untuk menang dalam menghadapi senapan mesin dan tank. Jika jenderal-jenderal sayap kanan melancarkan serangan besar-besaran terhadap PKI, mereka bisa menimbulkan kehancuran hebat bagi partai yang barangkali memerlukan waktu satu generasi untuk kembali pulih. Mengorganisasi massa partai untuk menantang langsung pimpinan tertinggi Angkatan Darat barangkali bisa dianggap ibarat menggiring domba-domba ke medan penjagalan. Ilmuwan politik Daniel Lev mencatat pada awal 1966 bahwa PKI tidak bisa bersaing dengan Angkatan Darat di bidang kekuatan fisik, "Pada tataran politik yang fundamental PKI tidak memiliki kekuatan fisik untuk menghadapi Angkatan Darat, yang pada saat penyelesaian terakhir dalam bentuk apa pun persenjataannya disiapkan untuk mengatasi kekurangannya dalam kelihaian berpolitik."[46]

Barangkali kemungkinan akan berulangnya represi antikomunis itu sendiri pada 1965 tidak membuat Aidit takut. Hal yang menimbulkan kecemasan ialah kemungkinan Sukarno digulingkan. Betapapun sulit bagi Sukarno untuk mengendalikan Angkatan Darat, ia telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk melindungi partai sejak akhir 1950-an. Apabila Sukarno tidak lagi memegang kendali pemerintahan, PKI harus menghadapi Angkatan Darat sendirian. Dengan tidak adanya kekuatan pengendali apa pun dari atas, represi bisa menjadi lebih buruk dari waktu-waktu sebelumnya. Jenderal-jenderal sayap kanan akan sanggup memecat semua pejabat tingkat tinggi yang pro-Sukarno dan pro-PKI di pemerintahan sipil dan militer sehingga seluruh kekuatan negara berbalik menentang partai. Kup oleh Dewan Jenderal pada 1965 menjadi pertanda timbulnya kontrarevolusi sepenuh-penuhnya, yang berarti penjungkirbalikan pengaruh Sukarnois dan komunis di dalam negara.

Rupanya pilihan yang lebih disukai Aidit ialah tindakan yang menggunakan perwira militer progresif untuk menyerang jenderal-jenderal sayap kanan. Keuntungannya adalah rencana ini tidak akan membahayakan jiwa massa partai yang tak bersenjata. PKI sudah membangun kontak dengan kalangan militer yang menentang Dewan Jenderal. Mengapa tidak menggunakan mereka? Sekali komando Angkatan Darat di tangan para perwira yang simpati kepada PKI, massa dapat

dikerahkan untuk berdemonstrasi tanpa khawatir terhadap tindakan pembalasan yang berdarah. Sukarno dengan tenang bisa terus melangkah dengan menyusun ulang panglima-panglima Angkatan Darat. Jika Dewan Jenderal bergerak terlebih dahulu dan merebut kekuasaan atas komando Angkatan Darat, para perwira progresif itu akan terlepas dari partai. Beberapa akan dipindah dari posisi-posisi komando yang penting. Sedangkan yang lain, demi mempertahankan karier mereka, akan memutuskan hubungan mereka dengan Biro Chusus dan mengikuti rantai komando yang baru. Akan menjadi hampir tidak mungkin bagi partai untuk menggunakan mereka lagi dalam suatu aksi yang penting. Tentunya terasa tidak masuk akal bagi Aidit jika partai mempunyai modal demikian penting di kalangan militer dan tidak menggunakannya dengan produktif. Walaupun keputusan Aidit memilih tindakan mendahului di kemudian hari dikritik sebagai avonturisme oleh pimpinan partai lainnya, keputusan itu masuk akal, setidak-tidaknya secara prinsip. Kubu lawan, korps perwira Angkatan Darat, terpecah belah. Masuk akal jika keadaan demikian dimanfaatkan, terutama apabila serangan langsung (oleh kaum sipil terhadap militer) hanya akan memaksa sekutu-sekutu di dalam kubu lawan merapatkan barisan melawan partai.

Aidit harus mempertimbangkan, apakah pilihan yang secara teori tampak menarik itu, memang dengan mudah bisa dilaksanakan dalam praktik. Ia harus memastikan apakah para perwira progresif itu cukup kuat untuk melaksanakan aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan. Untuk ini Aidit harus bertumpu pada Sjam. Aidit tentunya sudah menerima peneguhan dari Sjam bahwa para perwira yang berada dalam posisi-posisi baik itu mempunyai cukup pasukan dalam komando masing-masing untuk melaksanakan aksi. Aidit mungkin sudah mendengar dari berbagai sumber bahwa para perwira muda dan prajurit sangat marah terhadap kesenjangan ekonomi yang dalam antara mereka dan para jenderal. Ia mungkin sudah mendengar tentang banyaknya ketidakpuasan di kalangan Angkatan Darat akan perlawanan para jenderal terhadap kebijakan-kebijakan Sukarno. Pasukan-pasukan itu tampaknya telah siap memberontak. Sebagai pimpinan sipil terkemuka, Aidit barangkali tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengontak sendiri perwira-perwira tersebut dan memeriksa lagi hasil penilaian Sjam. Dalam kesaksiannya di sidang pengadilan Sjam mengatakan bahwa ia "mengada-

kan pemeriksaan organisasi, jaitu dilihat bagaimana kekuatan-kekuatan kita jang ada didalam ABRI, terutama di kalangan Angkatan Darat."[47] Ia menilai kekuatan para perwira yang ia kontak sudah cukup. Walaupun Aidit sama sekali bukan avonturir, ia menempatkan dirinya dalam posisi bertumpu pada seseorang yang avonturir.

Bagi Aidit daya tarik lain dari strategi mendahului ialah kesempatan untuk mencuri derap lebih awal dari sekutu-sekutu partainya di dalam kubu Sukarno. Dari tindakan ini PKI akan muncul sebagai juru selamat Sukarno dan seluruh program-programnya. Seperti dikatakan Hasan dalam paragraf yang sudah saya kutip sebelumnya, pimpinan PKI memandang dirinya sebagai pelopor kekuatan Sukarnois ("gerakan rakyat demokratis" di bawah pimpinan Nasakom). Dengan aksi mendahului melawan jenderal-jenderal sayap kanan, Aidit akan membuktikan bahwa PKI benar-benar merupakan komponen terkemuka dalam persatuan Nasakom. Dalam uraiannya Sudisman menyebut, dalam mendukung G-30-S pimpinan partai berpikir "perwira-perwira maju itulah yang akan dapat 'safe-stellen' [menyelamatkan] politik kiri Presiden Sukarno."[48]

Sukarno yakin bahwa bagaimanapun PKI terlibat dalam G-30-S, tapi ia tidak memandang tindakan partai ini setara dengan pengkhianatan. Ia tidak menghujat partai karena sudah mengkhianati bangsa. Dalam pernyataan terakhirnya di depan parlemen sebagai presiden pada 1967, ia melukiskan pimpinan PKI sebagai *keblinger*.[49] Pemilihan kata oleh seseorang yang selalu hati-hati dalam memilih kata-kata ini menarik. *Keblinger* adalah sepatah kata sifat bahasa Jawa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Artinya pusing, atau dalam keadaan kehilangan pemandangan yang tepat. Sukarno tidak bermaksud menyatakan bahwa Aidit tidak patriotik (tuduhan yang dilempar oleh rezim Suharto), tapi bahwa ia telah kehilangan kepekaan akan keberimbangan. Tanggapan Aidit terhadap desas-desus tentang Dewan Jenderal terlalu jauh dari yang semestinya.

Mungkin saja memaklumi strategi mendahului yang diambil Aidit sebagai akibat dari provokasi jenderal-jenderal sayap kanan. Sekarang kita tahu, berdasarkan dokumen-dokumen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasikan (diulas dalam bab 6), bahwa kelompok Yani tidak mempunyai rencana untuk melancarkan kudeta model lama terhadap Sukarno. Jenderal-jenderal di lingkaran Yani tentu saja ingin mendongkel

Sukarno, menimbang sikapnya yang memberi hati kepada PKI, tapi mereka sedang mencari-cari dalih yang tepat. Dalih yang mereka anggap paling baik ialah usaha kup PKI yang gagal. Para jenderal sayap kanan tersebut barangkali dengan sengaja meniupkan api desas-desus pada 1965 untuk memancing PKI agar melakukan semacam aksi militer. Mereka boleh jadi menyebarkan cerita-cerita yang mendorong kalangan politik di Jakarta untuk berpikir bahwa hari-hari Sukarno sebagai presiden bisa dihitung dengan jari. Jika pimpinan PKI percaya bahwa Sukarno tidak bisa lagi memberikan perlindungan bagi mereka dari ancaman militer, barangkali mereka akan tergoda untuk melakukan semacam aksi langsung terhadap militer.

Apa pun, kemungkinan bahwa Aidit terprovokasi untuk melakukan aksi mendahului itu tidak membebaskannya dari tuduhan *keblinger* yang dilontarkan Sukarno. Dalam menanggapi desas-desus tentang Dewan Jenderal, Aidit bisa memilih strategi yang lebih aman. Ia bertanggung jawab untuk memilih strategi yang, kendati secara prinsip dapat dipertahankan, mengandung cacat fatal. Strategi itu bersandar pada kebijakan Sjam, seorang pembual yang menipu diri sendiri dan *apparatchik* tak bernalar, dan telah membawa partai ke dalam dunia agen ganda yang sarat bayang-bayang. Partai menjadi tidak lebih dari sosok amatir tingkat rendah yang gampang dikelabui. Strategi itu telah menjauhkan partai dari tengah medan bergeraknya yang paling kuat – dalam politik atas tanah dan terbuka yang melibatkan masyarakat – dan membawanya ke tengah-tengah intrik elite politik dan militer Jakarta.

Barangkali Aidit mengira risiko yang berlibat dalam pilihan militer itu kecil saja. Ia dan pimpinan partai lainnya merasa bahwa para panglima sayap kanan Angkatan Darat itu rentan karena begitu banyak perwira yang pro-Sukarno. Oey Hay Djoen melukiskan pendapat umum di kalangan pimpinan partai pada 1965 sebagai berikut, "Angkatan Darat tidak mungkin memukul kami. Mengapa? Karena mereka tidak hanya ditentang oleh Angkatan Laut tapi juga oleh Angkatan Udara. Dan tidak itu saja. Di kalangan Angkatan Darat itu sendiri terjadi perpecahan. Maka itu mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa bersatu memukul PKI."[50] Aksi mendahului oleh pasukan Angkatan Darat melawan jenderal-jenderal sayap kanan akan memberi jaminan bahwa militer akan terpecah belah sama sekali dan tidak mampu menyerang partai. Aksi demikian akan

mempersatukan para perwira Sukarnois dari semua angkatan dan meng-isolasi komando tertinggi Yani. Bila berhasil menetralisasi militer, partai dapat melangkah lebih lanjut dengan kampanye massal melawan kaum "kontra-revolusi" dan "kapitalis birokrat."

KUP ALJAZAIR SEBAGAI TELADAN

Satu amatan terhadap pemikiran strategis Aidit muncul dalam buku karangan Manai Sophiaan, seorang politisi Sukarnois dan mantan duta besar untuk Uni Soviet.[51] Sophiaan berpendapat bahwa Aidit, dalam mendukung aksi militer melawan jenderal-jenderal sayap kanan, diilhami oleh kup militer di Aljazair pada Juni 1965. Sophiaan mendasarkan pendapat itu pada wawancaranya dengan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Karim D.P., yang sempat berbicara dengan Aidit tidak lama sesudah kup Aljazair. Karim D.P. tidak mengumumkan informasi ini karena ia sendiri menjadi tahanan politik selama tahun-tahun rezim Suharto. Bahkan sesudah bebas pun ia dilarang berbicara di depan dan menulis untuk umum. Ia baru mulai menerbitkan tulisan-tulisannya sesudah Suharto jatuh dari kekuasaannya. Dalam sebuah pidatonya di depan umum pada 1999 Karim D.P. mengatakan bahwa Aidit menang-gapi dengan gembira berita tentang kup militer di Aljazair. Arti penting informasi kecil ini memerlukan penjelasan tentang kejadian-kejadian di Aljazair tersebut dan hubungan Indonesia dengannya.

Kup di Aljazair terjadi pada 19 Juni 1965, kurang dari sepekan sebelum Konferensi Asia Afrika II yang dijadwalkan dimulai di ibu kota Algiers.[52] Sang perebut kekuasaan, Kolonel Boumedienne, menjanjikan akan tetap menyelenggarakan konferensi seperti yang telah direncanakan pendahulunya, Ahmed Ben Bella, yang telah digulingkannya. Sukarno diharapkan menjadi tamu istimewa karena dialah tuan rumah konfe-rensi pertama yang ternama di Bandung pada 1955. Kembali ke Jakarta, masalah kup Aljazair menjadi topik hangat dalam percakapan di kalangan para pejabat pemerintah karena Sukarno harus memutuskan menghadiri atau memboikot konferensi. Jika ia hadir akan berarti mengabsahkan Kolonel Boumedienne, tapi jika ia memboikot akan berarti protes. Apakah Boumedienne seorang boneka CIA, seperti halnya kebanyakan

para pelaku kup di Afrika, ataukah ia seorang nasionalis independen yang bisa diterima menurut prinsip-prinsip *nonalignment* (ketidakbersekutuan) Konferensi Asia Afrika? Para pejabat Sukarno tidak tahu dengan pasti siapa sebenarnya Boumedienne, tapi mereka bersedia membebaskan Boumedienne dari kecurigaan, terutama karena dia tetap berkeinginan menjadi tuan rumah konferensi. Sukarno memutuskan untuk hadir.

Baik Aidit (sebagai wakil PKI), maupun Karim D.P. (sebagai wartawan) menjadi anggota delegasi Presiden Sukarno yang meninggalkan Jakarta menuju konferensi pada 23 Juni 1965. Di tengah jalan delegasi mengurungkan kunjungan ke Aljazair karena gedung tempat konferensi di Algiers mendadak dibom. Dengan ditundanya konferensi, sebagian besar delegasi Indonesia terbang ke Paris tempat mereka menghabiskan beberapa hari yang menyenangkan sebelum meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta. Untuk memanfaatkan kunjungan di Paris, Sukarno mengadakan pertemuan dengan seluruh duta besar Indonesia di Eropa. Ketika di Paris itulah Karim D.P. berbicara dengan Aidit tentang pemahamannya mengenai kup Aljazair.

Aidit baru saja kembali ke hotelnya dari rapat di kantor pusat Partai Komunis Perancis. Ia mengatakan kepada Karim D.P. bahwa ia baru saja bertemu dengan enam orang kawan dari Aljazair, kemungkinan anggota-anggota Partai Komunis Aljazair:

> Pertama-tama dikatakannya bahwa ia sudah minta kepada enam kameradnya dari Aljazair supaya mereka segera kembali ke negeri mereka, dan memberikan dukungan kepada Boumedienne. Dalam diskusi yang mereka lakukan, kata Aidit, berdasarkan bahan-bahan yang disampaikan oleh kamerad-kamerad dari Aljazair, karakter *coup d'état* Boumedienne dapat dikategorikan sebagai *coup d'état* yang progresif. Oleh karenanya patut didukung oleh rakyat. Jika 30% dari rakyat mendukungnya, maka *coup d'état* itu bisa diubah sifatnya menjadi revolusi rakyat yang akan menguntungkan perjuangan rakyat Aljazair. Begitu kata Aidit. Ia menjanjikan akan menjelaskan teorinya ini nanti di tanahair, karena waktu itu ia terburu-buru harus segera berangkat ke lapangan terbang untuk meneruskan perjalanannya ke Moskow. Aidit me-

> ngatakan kepada saya bahwa di Indonesia sudah diketahui adanya rencana *coup d'état* yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno. *Coup d'état* yang hendak dilancarkan Dewan Jenderal itu adalah *coup d'état* yang reaksioner, berbeda dengan yang telah terjadi di Aljazair.[53]

Mengikuti cerita Karim D.P., kita bisa menduga bahwa Aidit cenderung mendukung gagasan "kudeta progresif." Ia percaya bahwa, dalam keadaan tertentu, kup militer dapat menciptakan suasana politik yang lebih baik bagi perkembangan Partai Komunis. Jika para perwira militer yang ada di belakang kup berideologi progresif dan terbuka untuk bersekutu dengan gerakan rakyat, mereka bisa diharap akan lebih baik ketimbang suatu pemerintah sipil yang tidak efektif.

Untuk memahami posisi Aidit dengan lebih baik, kita harus kembali pada Joesoef Isak, yang pada waktu itu juga bertemu Aidit di Paris. Isak, seperti sudah saya kemukakan di atas, ialah ketua PWAA. Ia mengikuti perkembangan di Aljazair dengan tekun karena PWAA terlibat dalam mempersiapkan konferensi internasional tingkat tinggi yang lama tertunda-tunda itu. Dalam tahun-tahun belakangan itu ia telah mengunjungi banyak negeri Afrika dan mengenal dengan baik peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh politik di benua ini. Sesudah meninggalkan Jakarta untuk menghadiri konferensi, di perjalanan ia menyadari – seperti anggota delegasi Indonesia lainnya – bahwa konferensi telah ditunda sampai waktu yang tak ditentukan. Ia akhirnya mengisi waktunya di Paris bersama mereka. Isak mengatur pertemuan antara Aidit dengan Jacques Vergès, seorang pengacara dan wartawan Perancis yang sudah ia kenal dalam perjalanan-perjalanannya di Afrika sebelumnya. Pada 1957 Vergès menjadi terkenal karena ia pergi ke Algiers untuk membela kaum nasionalis Aljazair yang dituduh melakukan sebuah pemboman. Ia berhasil mengalihkan perhatian masyarakat dari aksi-aksi perlawanan bangsa Aljazair ke aksi-aksi kriminal pemerintah kolonial Perancis, seperti misalnya siksaan yang dilakukan terhadap para tahanan.[54] Vergès menjadi bersimpati kepada perjuangan kaum nasionalis Aljazair, meninggalkan Partai Komunis Perancis (yang tidak mendukung perjuangan itu), dan menautkan dirinya dengan garis Beijing yang, beda dengan garis lunak

Moskow, memuji gerakan pembebasan nasional yang berjuang melawan kekuatan imperialis Barat. Ia tinggal di Aljazair sesudah kemerdekaan negeri itu pada 1962, bekerja untuk kementerian luar negeri, dan menjadi editor sebuah jurnal yang diterbitkan oleh organisasi yang memimpin perjuangan antikolonialisme, yaitu FLN (Front de Libération Nationale). Pada 1965 Vergès sudah berada di Paris lagi dan bekerja sebagai editor *Révolution*, sebuah jurnal yang ia dirikan, agaknya dengan bantuan finansial dari Tiongkok.[55]

Selama bertemu Aidit, yang dipandang Vergès sebagai negarawan komunis besar, semacam saudara muda Mao Zedong, Vergès mendiskusikan arti penting kup Aljazair. Dalam ingatan Isak pemahaman mereka tentang kup ini dibentuk oleh pandangan mereka tentang perpecahan Tiongkok-Soviet. Baik Aidit maupun Vergès menolak prinsip koeksistensi damai Soviet. Walaupun di depan umum Aidit menjaga sikap netralitas dalam konflik Tiongkok-Soviet, ia dikenal luas lebih cenderung kepada garis Mao.[56] Vergès berada di Paris karena ia tidak lagi sejalan dengan FLN di Aljazair dalam masalah Tiongkok-Soviet.[57] Presiden Aljazair yang ditumbangkan, Ben Bella, dekat dengan Partai Komunis Aljazair yang bersekutu dengan Soviet. Bagi kaum Maois penggulingan Ben Bella tidak begitu saja berarti kemunduran bagi Aljazair. Sementara negara-negara blok Timur mengutuk kup Boumedienne, Aidit memujinya dalam sebuah pernyataan terbuka pada 22 Juni 1965, hanya tiga hari setelah peristiwa kup, ketika ia masih di Jakarta. Ia mengecam Ben Bella karena "kebijakan kanannya bertentangan dengan aspirasi rakyat Aljazair," dan memuji sang perebut kekuasaan, "Kita harus berterima kasih kepada Kolonel Boumedienne."[58] Tiongkok juga menyambut kup itu dan berharap dirinya akan diperlakukan lebih baik oleh Boumedienne ketimbang oleh Ben Bella pada masa sebelumnya.[59]

Betapapun banyaknya kaum komunis sekutu Tiongkok yang lebih suka kepada Boumedienne, ia tetap merupakan tokoh tak dikenal. Bagi Aidit pengalaman sang kolonel sebagai panglima pasukan gerilya antikolonial memberikan kesan bahwa Boumedienne tidak akan menjadi pendukung koeksistensi damai. Aidit berpikir kup itu memberi kesempatan bagi kaum komunis berhaluan Beijing untuk meningkatkan kekuasaan mereka atas negara Aljazair. Cerita Isak tentang pernyataan-pernyataan Aidit kepada Vergès layak dikutip agak panjang:

Saya antar dia masuk [ke dalam kamar hotel Aidit]. Dia masuk. Saya sebenarnya tahu diri, setelah antar saya mau keluar. Aidit bilang, "Ah! Duduk aja di sini." Sebabnya saya hadir. Bung bisa bayangkan kan, Aidit wibawanya luar biasa, ketua partai terbesar di luar Eropa Timur, kan? Jadi memang anu pemandangan terhadap dunia tinggi sekali. Jadi si Jacques Vergès bilang, "Kawan ketua, kawan ketua baru pulang dari Aljazair, apa yang kawan ketua sarankan, anjurkan kepada kawan-kawan Aljazair?"[60] Dia minta, jadinya, dia merendahkan diri, minta kepada Aidit, sebagai ketua PKI yang dia anggap lebih senior dari dia.

Aidit menggambarkan begini. "Perhatikan," matanya merah. Aidit kan biji matanya seakan-akan keluar, dia anu sekali, melotot dia, nggak pernah tidur, seakan-akan merah. "Perhatikan. Ini bukan revolusi. Ini, kalau mau dikatakan revolusi, revolusi dari atas. Ini *coup d'état*, bukan revolusi. Satu. Kedua, antara Boumedienne dan Ben Bella dua-duanya asal kelas yang sama: kelas *bourgeoisie*. Akan tapi antara yang dua ini, Boumedienne ini lebih baik. Karena pada saat berlangsung perjuangan bersenjata Ben Bella berada di penjara Paris. Yang memimpin perjuangan bersenjata di Aljazair ini Boumedienne. Partai kalian pengkhianat. Jadi Partai Komunis Aljazair memang mengikuti garis Khrushchev, *peaceful co-existence*, tidak ikut dalam perang gerilya. Yang mengibarkan tinggi panji-panji Marxisme, adalah si nasionalis ini, *bourgeoisie* ini. Jadi dia lebih baik dari Ben Bella."

"Tetapi, jangan anggap otomatis Aljazair bergerak ke kiri. Karena Boumedienne inilah yang menjalankan Marxisme. Apa yang terjadi di Aljazair hanya jadinya lahirnya satu momentum yang bisa menggerakkan Aljazair lebih ke kiri. Asal ada syaratnya, kawan-kawan menggunakan momentum ini. Saya baru pulang dari Aljazair. Kota indah." Memang indah. "Kawan Jacques segera pulang. Jangan ada tembok

> yang bersih. Jangan ada jalan raya tanpa spanduk [dengan slogan]: 'Dukung *coup d'état* Boumedienne.' Begini, istilahnya: 'Dukung Boumedienne.' Jadikan, "Biar rakyat merasakan ini *coup d'état* mereka. Jadikan *coup d'état* rakyat. Turun ke jalan." Itu intinya yang saya tangkap. … "Jadikan ini milik rakyat." Dia [Aidit] tidak keberatan gerakan dari atas. Tapi segera jadikan gerakan rakyat.[61]

Mengikuti cerita Isak, mungkin saja melihat dukungan Aidit terhadap kup Boumedienne sesuai dengan kesetiaan Aidit kepada teori Leninis. Kup itu sendiri bukanlah perkembangan positif bagi kaum kiri Aljazair atau bagi garis Tiongkok dalam gerakan komunis internasional. Tapi ia mempunyai kemungkinan menjadi positif karena Boumedienne lebih progresif ketimbang Ben Bella. Kup itu memberikan kesempatan bagi kaum komunis Aljazair yang tidak menyokong garis koeksistensi damai Uni Soviet, untuk memobilisasi rakyat lebih besar dan memperoleh jalan lebih lapang menuju kekuasaan negara.

Pandangan Aidit tentang kup Boumedienne berlawanan dengan pandangan Uni Soviet. Ilmuwan Ruth First, anggota Partai Komunis Afrika Selatan yang pro-Soviet, memahami kup tersebut sebagai suatu cara untuk mencegah Aljazair bergeser lebih jauh ke kiri. Menurutnya Presiden Ben Bella telah berencana menggunakan forum Konferensi Asia Afrika untuk mengumumkan rencananya mengubah partai politik yang dipimpinnya (FLN) menjadi "sebuah partai dengan kesetiaan organik yang kokoh terhadap kaum kiri, termasuk Partai Komunis Aljazair; dengan pengawasan disiplin yang lebih keras; dan pendidikan Marxis bagi para pengurus partai dan kader-kadernya."[62] Dalam mencari basis massa yang kukuh bagi kepresidenannya, Ben Bella ingin mengubah FLN sehingga secara fungsional sama seperti Partai Komunis. Ia juga merencanakan untuk memecat Boumedienne dari kedudukannya sebagai panglima Angkatan Darat. Menurut Ruth First kup itu merupakan "*putsch* untuk mendahului gerakan Ben Bella."[63]

Pemahaman Aidit tentang kup, apakah itu benar atau dengan informasi yang memadai atau tidak, didasarkan pada analisis politik yang praktis dan menyeluruh: ia menilai kup tersebut dengan acuan apakah kup itu akan membawa kekuasaan yang lebih besar bagi pihaknya

(gerakan antiimperialis internasional dengan garis Tiongkok). Bagi Aidit kup itu tidak menunjukkan suatu paradigma baru dari segi aksi politik. Barangkali ia setidak-tidaknya sudah mengetahui tentang kup Qasim pada 1958 di Irak. Pendapat Manai Sophiaan bahwa kup Boumedienne mengilhami Aidit untuk memprakarsai Gerakan 30 September agaknya kurang tepat. Aidit sudah mengerti bahwa, dalam keadaan tertentu, kup militer bisa merupakan perkembangan positif. Ia tidak membutuhkan contoh Aljazair untuk mengerti hal ini. Satu sisi yang barangkali telah menjadi ilham baginya ialah dalam hal sistem penamaan. Setelah menggulingkan Ben Bella, Boumedienne menciptakan sebuah "Dewan Revolusi" yang terdiri dari dua puluh tiga orang. Istilah itulah yang barangkali menjadi sumber penyebutan "Dewan Revolusi" dalam G-30-S.

Pemahaman penting yang timbul dari penyelidikan terhadap pandangan Aidit mengenai kup Aljazair ini dikemukakan oleh Joesoef Isak, "Aidit tidak punya keberatan apa pun terhadap gerakan dari atas, asalkan gerakan itu segera diubah menjadi gerakan rakyat." Menjadi masuk akal jika kita menduga Aidit memahami bahwa semacam aksi militer di Indonesia bisa menciptakan situasi yang lebih baik bagi perkembangan PKI pada 1965. Tentu saja tujuan akhirnya bukanlah negara di bawah pimpinan militer, melainkan negara di bawah pimpinan PKI. Aksi militer bisa menjadi jalan sementara yang berguna untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

KONTRADIKSI INTERN POPULISME REVOLUSIONER

Gagasan Aidit tentang bagaimana sebuah kup militer dapat ditransformasikan menjadi gerakan rakyat bisa membantu menjelaskan arti dekrit G-30-S tentang Dewan Revolusi. Gerakan 30 September dimaksudkan sebagai operasi militer yang dipimpin oleh sebuah program politik revolusioner – program yang tentunya di bawah pengawasan Aidit. Inilah bidang keahlian dia. Kemungkinan besar tujuan semula G-30-S bukan untuk mendemisionerkan kabinet Sukarno. Baik Iskandar Subekti maupun Munir membenarkan bahwa Aidit membicarakan gagasan Dewan Revolusi dengan anggota-anggota Politbiro tertentu dalam

Agustus dan September 1965. Munir, mantan anggota Politbiro dan ketua federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI (SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dalam pledoinya di depan sidang 1973 mengatakan bahwa Aidit pernah memberi penjelasan tentang peranan Dewan Revolusi kepadanya, "Sebelumnya perlu dijelaskan apa yang dikemukakan oleh D.N. Aidit pada saya bahwa 'Dewan Revolusi' merupakan organisasi tandingan Dewan Jenderal dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong untuk mempercepat proses pembentukan Kabinet Nasakom."[64] Perhatikan, bahwa Dewan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kabinet yang ada, tetapi sebagai katalisator untuk pengubahan komposisinya. Subekti dan Munir berpendapat, Dewan hanya diciptakan sebagai semacam kelompok penekan terhadap pemerintah pusat. Sudisman mencatat bahwa Dewan Revolusi tidak terdiri dari "tokoh utama Nasakom."[65] Kita bisa berasumsi bahwa seandainya Aidit telah merencanakan bahwa dewan serupa itu akan menggantikan kabinet yang ada dan mengambil semua kekuasaan negara, ia tentu akan memilih tokoh-tokoh yang lebih penting untuk itu. Tampaknya gagasan pendemisioneran kabinet baru timbul pada pagi hari 1 Oktober itu saja, begitu Sukarno menolak memberikan dukungan bagi kelanjutan G-30-S. Teks Dekrit No. 1, yang telah ditulis sebelumnya, boleh jadi diubah pada detik terakhir.

Ada sebuah preseden untuk Dewan Revolusi. Dewan-dewan revolusi yang dibentuk oleh kolonel-kolonel pemberontak pada 1957-1958 di Sumatra dan Sulawesi semula menuntut perubahan dalam hal komposisi pemerintah pusat (maksudnya, pemulihan kekuasaan Hatta) dan dalam hal hubungan antara Jakarta dengan provinsi-provinsi. Dewan-dewan ini awalnya tidak menuntut kemerdekaan provinsi-provinsi yang menjadi basis gerakan mereka. Seruan mereka untuk kemerdekaan timbul belakangan (seperti yang akan saya bahas dalam bab 6).

Dalam merumuskan Dewan Revolusi Aidit tidak merencanakan untuk segera menetapkan PKI sebagai partai yang berkuasa. Ia ingin meneruskan paradigma Nasakom yang sama, sebagaimana sudah ditetapkan oleh Sukarno. Begitu kekuatan militer yang mendukung unsur-unsur antikomunis di dalam pemerintahan sudah dibersihkan, paradigma Nasakom akan berjalan lebih lancar untuk unsur "kom," yang tidak lagi perlu selalu merasa takut akan ditindas. Daftar empat puluh lima

orang anggota yang diajukan G-30-S untuk Dewan Revolusi tingkat pusat selalu kelihatan aneh karena memasukkan tokoh-tokoh yang sangat beragam. Tapi daftar itu dimaksudkan untuk mencerminkan spektrum politik lintas penampang yang luas. Tujuan G-30-S adalah sebuah pemerintahan koalisi di mana PKI akan mempunyai kebebasan bergerak lebih besar, bukan sebuah negara yang dikuasai PKI semata-mata.

Strategi PKI sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan pada 1951 ialah "front persatuan nasional." Dalam rumusan Kongres V pada 1954, kongres kunci dalam sejarah PKI, partai berniat membangun persekutuan antara "kelas buruh, tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional." Persekutuan ini akan melawan kaum imperialis, bagian dari borjuasi yang bekerja sama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Apa pun retorika kaum Marxis-Leninis, program partai, secara tegas bersifat populis: yang diperhitungkan sebagai subjek revolusioner ialah "rakyat Indonesia" secara keseluruhan. Program itu tidak mendorong kepentingan sektarian kaum tani dan buruh saja. Tujuan akhirnya ialah apa yang disebut "demokrasi rakyat," yang di dalamnya tersedia cukup ruangan untuk "kapitalisme nasional."[66]

PKI tidak terlalu berbeda dari partai-partai komunis pascakolonial lainnya yang mendahulukan nasionalisme di atas sosialisme. Seperti partai-partai lain itu juga, PKI menghadapi tarik-menarik antara retorika revolusionernya dan program populisnya. Sebelum 1965 tarik-menarik ini tidak terlalu mencuat karena program front persatuan partai berjalan dengan sangat baik: keanggotaan meningkat pesat, kepimpinan partai tetap bersatu (bahkan sesudah adanya perpecahan Tiongkok-Soviet), dan Presiden Sukarno menggalakkan kebijakan populis yang serupa. Penekanan pada persatuan nasional dalam menghadapi imperialisme membuahkan keuntungan tersendiri ketika imperialisme terus membayang di perbatasan-perbatasan negeri (perhatikan kampanye Irian Barat dan konfrontasi mengganyang Malaysia) dan menjadi ancaman yang berandang (perhatikan dukungan CIA terhadap pemberontakan PRRI/Permesta; lihat bab 6). Strategi PKI tampaknya sangat bersesuaian dengan kondisi politik Indonesia saat itu.

Namun demikian tarik-menarik antara retorika dan program tersebut tidak berhasil dilampaui. Pada 1965 retorika partai kadang-kadang terlalu sektarian, sedemikian jauh sehingga borjuasi kecil di desa

dipandang sebagai musuh. PKI menggalakkan kampanye mengganyang "tujuh setan desa": tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat.[67] Walaupun masih dalam logika populisme (ada tuan tanah baik dan tuan tanah jahat, penguasa jahat dan penguasa baik), penggunaan slogan-slogan itu cenderung membuat banyak orang menjadi cemas kalau-kalau dirinya akan dicap sebagai *setan*. Arus sektarianisme serupa itu tidak perlu-perlunya sudah menimbulkan kebencian pihak-pihak yang berpotensi menjadi sekutu dalam strategi front persatuan.

Pada awal 1960-an Aidit berusaha membawa teori Marxis-Leninis partai menjadi sejalan sepenuhnya dengan praktik populis PKI. Aidit dan beberapa ideolog partai mengembangkan suatu teori yang mereka sebut "teori dua aspek kekuasaan negara": satu aspek "pro-rakyat" dan aspek lain "anti-rakyat." Tugas PKI ialah menyokong unsur-unsur prorakyat untuk melawan unsur-unsur yang antirakyat di dalam pemerintah.[68] Para pemikir partai berpendapat bahwa teori mereka, walaupun disusun tanpa analisis kelas tentang kekuasaan, merupakan pembaharuan yang sah dalam tradisi Marxis-Leninis. Sugiono, guru sekolah teori milik partai (Akademi Aliarcham) menulis sebuah tesis tentang "dua aspek kekuasaan" dan berharap tesis itu akan disahkan suatu lembaga resmi dari negara komunis. Ia menyerahkan tesisnya untuk meraih gelar akademik di sebuah universitas di Korea Utara tapi ia kecewa karena para ideolog Partai Komunis di Pyongyang menolaknya sebagai tidak-Marxis.[69] Walaupun diskusi-diskusi teori tentang "dua aspek kekuasaan negara" tampaknya tidak meluas sampai di luar Comite Central, Aidit sering mengemukakannya baik dalam pidato-pidato maupun tulisan-tulisannya. Pada 1963, misalnya, sebuah pernyataan Politbiro menegaskan, bahwa "aspek [kekuasaan negara] prorakyat sedang terus-menerus berkembang dan mengambil inisiatif dan ofensif, sedang aspek antirakyat, walaupun lumayan kuat, sedang terus didesak dikurung tanpa ampun di sudut."[70]

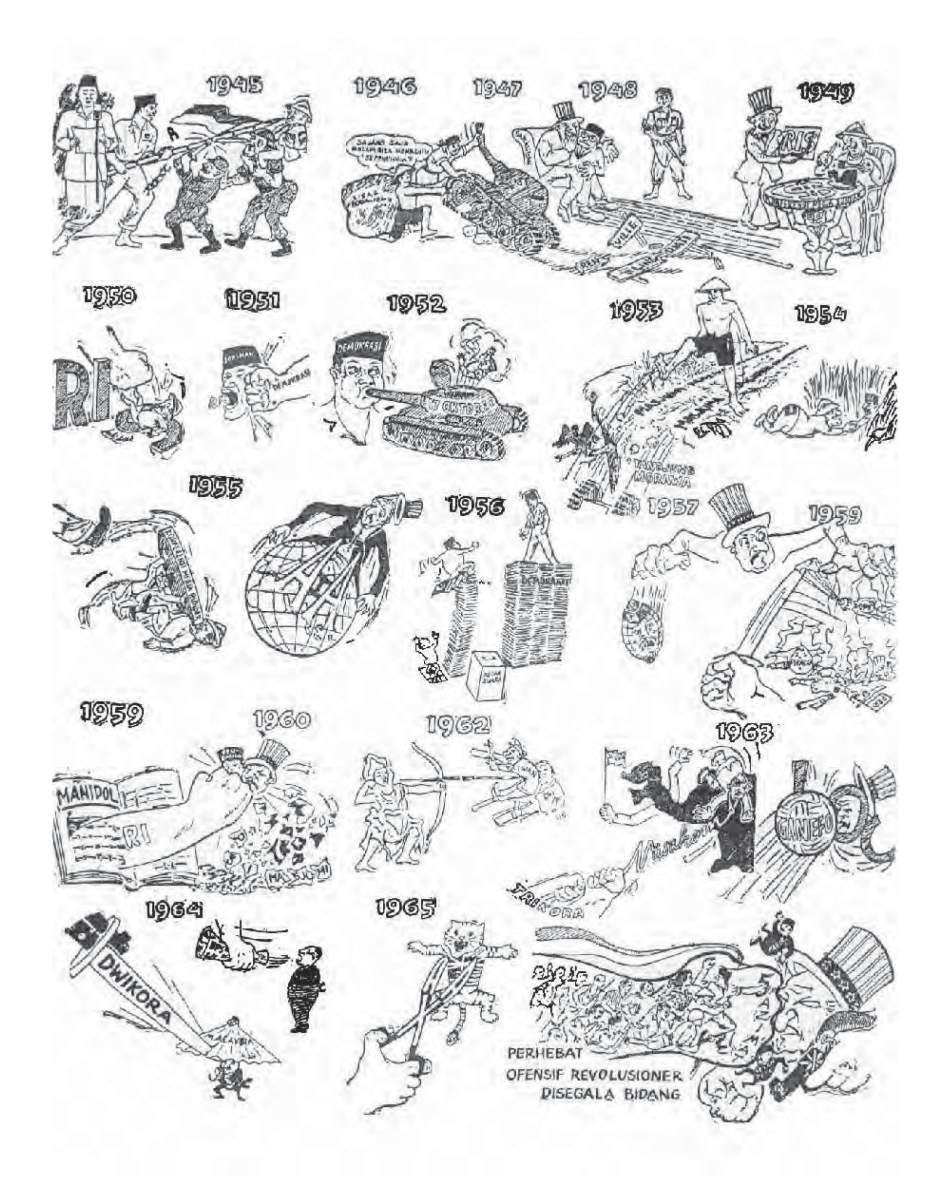
Teori "dua aspek kekuasaan negara" dapat membantu menjelaskan mengapa Aidit bersedia mendorong aksi dengan pasukan tentara. Menurut teori itu, beberapa prajurit dan perwira di dalam tubuh tentara Indonesia ada yang prorakyat dan ada beberapa lainnya yang antirakyat. Tugas sebuah revolusi, menurut pandangan Aidit, adalah

mendukung personil militer yang prorakyat dan menggunakan mereka sebagai katalisator untuk mengubah seluruh negara menjadi prorakyat. Aidit tidak bekerja dengan logika pemberontakan militer atau kudeta – paradigma-paradigma baku yang digunakan para pengamat dalam usaha memahami peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan tersebut merupakan semacam persilangan: ia merupakan kup sebagian yang, pada taraf tertentu kemudian, melahirkan revolusi sebagian. Aidit mendukung tentara prorakyat, supaya mereka bisa menyingkirkan perwira-perwira komandan mereka yang antirakyat, sekaligus memaksakan pembentukan sebuah kabinet koalisi baru. Dua perkembangan ini akan membuka ruang politik baru bagi partai untuk mengembangkan diri dan memperoleh kekuasaan yang lebih besar.

MEMAHAMI EDITORIAL HARIAN RAKJAT

Edisi surat kabar PKI yang terbit pada Sabtu, 2 Oktober 1965, memuat berita utama dengan tajuk terpampang selebar halaman surat kabar, "Letkol Untung, Komandan Bataljon 'Tjakrabirawa' menjelamatkan Presiden dan RI dari kup Dewan Djendral." Anak-judul yang tertera langsung di bawahnya berbunyi, "Gerakan 30 September se-mata2 gerakan dalam AD." Dari tajuk berita utama itu saja sudah kentara bahwa pimpinan PKI mendukung G-30-S sambil menjaga jarak darinya. Sebuah editorial singkat berisi dua puluh baris yang terselip dekat sudut kiri bawah halaman pertama, langsung di bawah berita tidak penting tentang sebuah konferensi pers oleh kementerian luar negeri Republik Rakyat Tiongkok di Beijing, mengulangi pernyataan berita utama, bahwa G-30-S adalah usaha terpuji untuk menyelamatkan presiden dan merupakan urusan intern Angkatan Darat, "Kita Rakjat memahami betul apa jang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakan-nja jang patriotik itu. Tetapi bagaimanapun djuga persoalan tsb. adalah persoalan intern AD. Tetapi kita Rakjat jang sedar akan politik dan tugas2 revolusi mejakini akan benarnja tindakan jang dilakukan oleh Gerakan 30 September untuk menjelamatkan revolusi dan Rakjat."

Bahasa editorial yang janggal – dua "tapi" dalam satu baris dan "bagaimanapun djuga persoalan" yang tidak runtut – memberi kesan

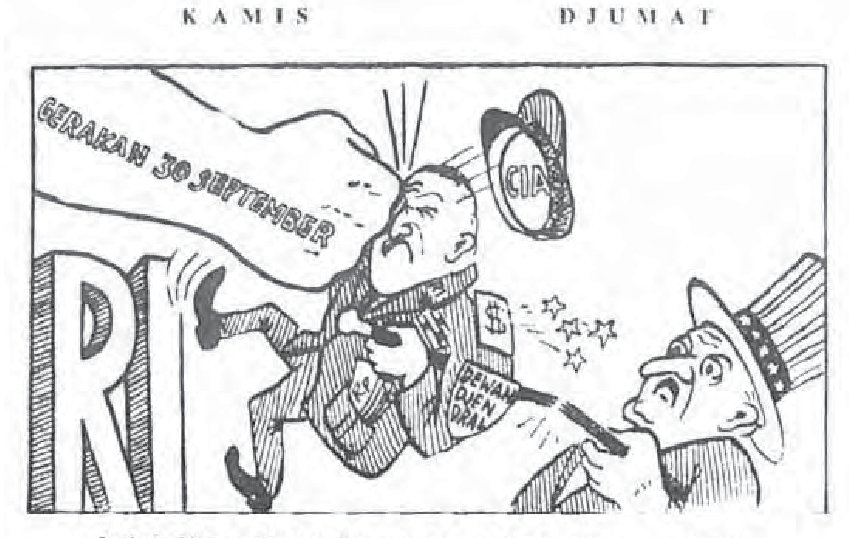


Gambar 6. Kartun ini terbit dalam surat kabar PKI edisi hari kemerdekaan untuk memperingati hari jadi republik yang ke-20. Gerakan sayap kiri meninju, menendang, dan menebas di sepanjang perjalanannya dari tahun ke tahun untuk menghancurkan kaum imperialis dan antek-antek mereka di dalam negeri. Gambar terakhir melukiskan rakyat yang bersatu di belakang prinsip-prinsip Sukarno (Panca Azimat Revolusi), menghantam pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dan menjebol "kapitalis birokrat" Indonesia dan "setan-setan desa." Semboyannya berbunyi "Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang."
Sumber: Harian Rakjat, 17 Agustus, 1965.

penulisnya berusaha menegaskan bahwa dukungan PKI terhadap G-30-S tidak berarti partai terlibat di dalamnya. Di sepanjang bagian bawah halaman depan terbentang karangan khas tiap Sabtu berupa tujuh petak kartun yang menggambarkan perkembangan hari ke hari gerakan kiri selama sepekan sebelumnya. Petak gabungan untuk Kamis dan Jumat (30 September dan 1 Oktober) memperlihatkan kepalan tinju Gerakan 30 September menghantam wajah Dewan Jenderal. Kartun pada petak berikutnya untuk Sabtu melukiskan sebuah adegan yang lebih mengerikan: jenderal-jenderal, dengan dolar-dolar Amerika Serikat dan kuitansi-kuitansi CIA berhamburan dari saku-saku mereka, dilemparkan oleh seorang prajurit berbadan kekar dan tegap ke lautan pasak besi terpancang.

Yang janggal dari halaman depan *Harian Rakjat* ini adalah penyiarannya setelah G-30-S di Jakarta sudah dikalahkan. Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah sudah mengeluarkan perintah harian pada 1 Oktober pukul 18.00 yang melarang terbit semua surat kabar selain dua surat kabar milik tentara. Tentara Suharto sudah menguasai kembali stasiun radio kira-kira pada pukul 19.00 dan menyiarkan kutukan terhadap G-30-S pada sekitar pukul 20.45. Mengapa para redaktur *Harian Rakjat* menentang larangan terbit oleh tentara, hanya untuk menyiarkan pernyataan dukungan terhadap aksi yang gagal? Kantor surat kabar ini terletak di daerah Pintu Besar Selatan, kira-kira setengah mil dari Lapangan Merdeka. Wartawan surat kabar ini tentu mengikuti kejadian sepanjang hari itu, dan mengetahui bahwa G-30-S di Jakarta sudah hancur.

Benedict Anderson dan Ruth McVey menduga Angkatan Darat pasti sudah merebut kantor *Harian Rakjat* pada Jumat malam. Ketika itu militer sudah mencurigai, bahwa PKI mempunyai peranan tertentu di dalam G-30-S (mengingat para sukarelawan yang ditangkap di gedung telekomunikasi adalah pemuda-pemuda dari Pemuda Rakjat). Agar edisi Sabtu dapat terbit, pastilah edisi itu sudah dicetak dan didistribusikan sebelum tentara datang, atau dicetak dan didistribusikan ketika para perwira militer sudah menduduki kantor. Anderson dan McVey cenderung pada kemungkinan pertama karena edisi Sabtu *Harian Rakjat* barangkali sudah dicetak pada Jumat sore. Di kebanyakan kantor pada masa itu para karyawan hanya bekerja setengah hari setiap hari Jumat. Ilmuwan-ilmuwan Cornell ini menduga edisi *Harian Rakjat* 2 Oktober



Gambar 7. Kartun ini muncul di bagian bawah halaman depan surat kabar *Harian Rakjat* Sabtu, 2 Oktober 1965.

terbit sebelum redaksi yakin bahwa G-30-S sudah gagal.[71]

Apa yang terjadi pada malam hari 1 Oktober 1965 di kantor *Harian Rakjat*? Seorang mantan wartawan surat kabar ini, Martin Aleida, teringat pada percakapan antara dirinya dan seorang anggota redaksi yang malam itu ada di kantor.[72] Aleida sendiri saat itu ada di luar kota. Ia dikirim belajar di sekolah partai di Semarang kira-kira dua bulan sebelumnya. Ia berhasil selamat dari pembantaian 1965-1966 dan pemenjaraan selama beberapa tahun. Begitu keluar penjara, ia kebetulan bertemu salah seorang dari kawan-kawannya, Wahyudi, yang menjadi anggota redaksi senior di *Harian Rakjat* pada 1965. Menurut cerita Wahyudi, serombongan tentara datang di kantor sekitar pukul 23.00 dan menuntut agar surat kabar ditutup. Wahyudi dan anggota redaksi lainnya menolak, dan bersikeras mereka bersedia menutup hanya jika para tentara ini bisa menunjukkan perintah tertulis kepada mereka. Tentara-tentara itu tidak menduduki kantor, mengusir staf kantor dengan paksa, atau mencampuri urusan penerbitan. Kantor tetap bekerja seperti biasa.

Menurut Aleida, Wahyudi menuturkan bahwa editorial yang

mendukung G-30-S sudah dikirim ke kantor surat kabar pada sekitar pukul 21.00 oleh kurir seperti biasa. Wahyudi tidak tahu siapa yang menulis editorial, tapi ia menduga Dahono, wartawan *Harian Rakjat* yang biasa menghabiskan hari-harinya di Sekretariat Comite Central (di Jalan Kramat Raya) untuk memperoleh informasi tentang posisi partai dalam berbagai macam masalah. Dahono bukan penulis yang baik. Ia diangkat menjadi staf *Harian Rakjat* oleh Comite Central karena kesetiaan yang bergelora terhadap partai dan watak penggembiranya, bukan karena keterampilan jurnalistiknya. Kalau bahasa editorial itu begitu janggal, mungkin karena itu ditulis oleh Dahono.

Aleida tidak diberi tahu apakah *Harian Rakjat* sudah terbit sebelum atau sesudah tentara datang. Ia ingat biasanya tenggat waktu penyerahan karangan sekitar pukul 23.00, dan surat kabar selesai dicetak sekitar pukul 1.00 atau 2.00 dini hari. Jika *Harian Rakjat* mengikuti pola biasa pada Jumat malam itu, militer kemungkinan sudah datang tepat saat edisi Sabtu sedang diedit dan diset.

Pertanyaan tentang keputusan partai menerbitkan pernyataan dukungan kepada sebuah aksi militer yang gagal itu tetap belum terjawab. Mungkin pada Jumat malam masih belum jelas bahwa G-30-S sebenarnya sudah gagal. Pasukan dan sukarelawan di sekitar Lapangan Merdeka sudah dibersihkan, tapi pimpinan aksi masih berkumpul di Halim. Untung belum tertangkap. Aksi-aksi di Jawa Tengah masih berjalan. Dalam menyusun halaman depan, redaksi tidak menekankan dukungan partai terhadap G-30-S. Editorial sangat pendek, kata-katanya disusun dengan hati-hati, dan ditempatkan hampir di bawah halaman. Berita-berita utamanya melaporkan tentang gerak-gerik Untung dalam gaya yang lugas dan dengan memberi tekanan bahwa G-30-S merupakan urusan intern Angkatan Darat. Sulit dipercaya bahwa para editor atau atasan mereka di Comite Central berpikir mereka mengambil risiko dengan meneruskan penerbitan edisi itu. Mereka mungkin tidak dapat meramalkan bahwa G-30-S akan hancur begitu cepat, bahwa Angkatan Darat akan menyerang PKI dengan begitu mendadak dan kejam, dan bahwa *Harian Rakjat* tidak akan pernah diberi kesempatan memperbaiki posisinya dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang menyusul kemudian. Mereka mungkin tidak mengerti bahwa seluruh sistem politik yang terpusat pada Sukarno, yang bagi mereka sudah menjadi biasa, pada

1 Oktober malam itu telah diubah secara mendasar.



Gambar 8. Teks di bawah tertera "Film minggu ini," yang menyentil kebiasaan orang Indonesia menonton film pada Sabtu. Ini film yang mengerikan: seorang prajurit tersenyum menang sambil menyaksikan dua jenderal yang dibiayai CIA jatuh di atas bambu runcing. Dalam gambar judul film "De Over Val," kata-kata Belanda untuk "serangan mendadak" (*overval*), diubah menjadi "De Generaals Val," yang mempunyai dua pengertian, yaitu "terperangkapnya jenderal-jenderal" dan "jatuhnya jenderal-jenderal." Kata-kata sisipan pada kartun ini dimaksud untuk pengertian yang tersebut terakhir: "djatuhnja djenderal2."

Setidak-tidaknya tiga mantan anggota Politbiro PKI, Sudisman, Iskandar Subekti, dan Munir, menyatakan dalam pledoinya di depan sidang pengadilan bahwa partai secara keseluruhan tidak terlibat dalam G-30-S tapi beberapa pimpinan tertentu yang tak disebut namanya terlibat sebagai pribadi. Penilaian mereka agaknya benar. G-30-S tampaknya merupakan proyek pribadi Aidit. Ia percaya bahwa aksi militer yang dilakukan perwira progresif merupakan strategi paling baik untuk menyingkirkan ancaman Dewan Jenderal. Sebagai operasi militer terselubung, tidak satu orang pun di dalam partai diperbolehkan mengetahui seluk-beluk G-30-S kecuali beberapa orang kepercayaannya yang sebagian besar dari Dewan Harian Politbiro. Aidit melibatkan pimpinan partai secara perseorangan, seperti Njono dan Sukatno, yang mengerahkan para pemuda ke dalam pasukan sukarelawan tanpa memberi tahu mereka tentang keseluruhan operasi. Informasi disampaikan seperlunya. Tidak satu pun dari badan pimpinan resmi PKI – Politbiro, Dewan Harian, dan Central Comite – terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian G-30-S.

Pada prinsipnya, G-30-S bisa dibenarkan dipandang dari sudut kepentingan PKI sendiri. Kontak-kontak partai dalam angkatan bersenjata bisa digunakan dengan baik untuk membersihkan pimpinan tertinggi Angkatan Darat yang antikomunis. G-30-S berbuah kegagalan telak oleh alasan-alasan yang tidak diperhitungkan Aidit sebelumnya. Pertama, ia buta terhadap kesalahan-kesalahan Sjam. Ia menguasakan Sjam untuk memulai aksi militer tanpa mempunyai sarana yang cukup untuk memeriksa kata-kata Sjam. Saya menduga Aidit tidak menyadari bahwa Sjam telah memaksa para perwira militer untuk bergabung dan mengelabui mereka agar berpikir bahwa PKI akan menjamin keberhasilan aksi. Saat menghubungkan Aidit dengan para perwira, Sjam merancukan pemahaman mereka akan satu sama lain.

Kedua, Aidit barangkali sebelumnya tidak mempelajari dengan baik bahwa Angkatan Darat disusupi dari ujung ke ujung oleh agen-agen ganda, dan bahwa jaringan-jaringan pribadi di dalam Angkatan Darat saling-silang dengan kesetiaan politik para perwira. Aksi apa pun oleh "para perwira progresif" sangat rentan terhadap pengkhianatan. Untung dan Latief, dua perwira kunci yang tetap bersedia bekerja sama dengan Sjam, bahkan ketika yang lain-lain mengundurkan diri, mengira bahwa

Suharto adalah sekutu mereka.

Ketiga, mengingat risiko yang terlekat dalam sebuah aksi militer, keterlibatan Aidit memerlukan tameng pengelakan yang jauh lebih besar dan masuk akal; ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri dan partai apabila terjadi kegagalan. Kalau saja ia menjauhkan diri dari Halim dan memutuskan untuk tidak pergi secara diam-diam ke Jawa Tengah, ia barangkali akan tampil lebih meyakinkan ketika menyatakan partai tidak terlibat.

Keempat, Aidit telah mengembangkan sebuah teori populis yang memuat gagasan bahwa kup militer bisa berkembang positif jika kup militer itu mempunyai program revolusioner dan didukung oleh massa rakyat. Ia dan Sjam menyisipkan kandungan politik ke dalam G-30-S – Dewan Revolusi, istilah yang dipinjam dari Aljazair sebagai preseden. Agenda politik ini menaruh beban terlalu berat terhadap apa yang, bagaimanapun, merupakan sebuah operasi militer sangat terbatas, yaitu menculik pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Aidit terperangkap dalam balam-balam populisme untuk bisa mengenali kesalahan strategis dalam memanfaatkan militer bagi tujuan-tujuan politik. Gerakan 30 September tidak diorganisasi sebagai sebuah kup, tidak pula dipimpin oleh seorang perwira militer (seperti kup-kup yang berhasil yang dikenal Aidit, misalnya kup Qasim di Irak pada 1958 dan kup Boumedienne di Aljazair pada 1965). Agenda politik telah mencemari aspek-aspek yang murni bersifat militer dalam G-30-S. Rencananya untuk mencapai keberhasilan bertumpu pada usaha mendapatkan persetujuan dari Sukarno; presiden akan memastikan bahwa para perwira lawan tidak akan melakukan serangan balasan. Gerakan 30 September tidak dirancang untuk berhasil atas dasar kekuatan murni militernya sendiri.

Penjelasan saya tentang peranan PKI dalam G-30-S tidak memberi pembenaran terhadap versi rezim Suharto yang menuduh *PKI* sebagai dalang. Partai sebagai lembaga tidak bertanggung jawab. Hanya dua orang dalam partai, Aidit dan Sjam, yang bertanggung jawab mengorganisasi G-30-S. Seperti dinyatakan Sudisman, badan-badan formal pembuat keputusan dalam partai hanya bertanggung jawab dalam arti bahwa mereka memberi Aidit terlalu banyak jalan simpang untuk bekerja sendiri.

CATATAN

[1] Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 9, 11. Saya mengutip versi yang tersedia dalam beranda warta berikut http://www.geocities.com/cerita_kami/g30s/index.html. Versi ini dalam bentuk file pdf yang bernomor halaman. Dokumen yang sama juga tersedia tanpa nomor halaman di beranda warta yang berbeda: http://www.marxists.org/indonesia/indones/sudisman.htm

[2] Sudisman juga penulis utama dokumen yang beredar pada September 1966 atas nama Politbiro: *Tegakkan PKI jang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia: Otokritik Politbiro CC-PKI.* Dokumen ini baru-baru ini diterbitkan ulang bersama dengan *Uraian Tanggung Djawab*: Sudisman, *Pledoi Sudisman; Kritik-Otokritik.*

[3] Ia menulis, "Saja pribadi terlibat dalam G-30-S jang gagal." Dan, "tokoh-tokoh PKI terlibat langsung dalam G-30-S." Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 9, 18.

[4] *Ibid.*, 17.

[5] *Ibid.*, 17.

[6] *Ibid.*, 18

[7] *Ibid.*, 12.

[8] *Ibid.*, 12.

[9] *Ibid.*, 12.

[10] *Ibid.*, 17.

[11] *Ibid.*, 26, 29.

[12] *Ibid.*, 26.

[13] *Ibid.*, 32.

[14] *Ibid.*, 48.

[15] *Ibid.*, 17.

[16] *Ibid.*, 49. Dengan menumbangkan monarki yang ditopang Inggris, kup Qasim menggugah pemberontakan rakyat. Timbul demonstrasi-demonstrasi besar di jalan-jalan, upaya pengorganisasian serikat buruh, dan banyak penerbitan baru. Partai Komunis Irak (ICP) menyambut kup dan memperoleh kebebasan bergerak secara legal. Tapi para penggerak kup di tubuh militer segera menindas pemberontakan rakyat itu dan tenggelam dalam persaingan-persaingan di antara mereka sendiri (Tripp, *History of Iraq,* 148-192). Untuk uraian yang lebih rinci tentang kup 1958 dan hubungan Partai Komunis Irak dengannya, lihat Batatu, *Old Social Classes,* 789-807.

[17] Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 47. Di saat lain dalam persidangan untuknya, setelah Sjam diajukan sebagai saksi, Sudisman menyatakan, "Walaupun saya sendiri tidak mengetahui, tapi itu dilakukan kawan saksi Sjam atas instruksi kawan Aidit dan saya pun melakukan instruksi dari kawan Aidit, maka dari segi tanggung djawab saya ambil oper semua tanggung djawab ini semua." Transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, sidang

8 Juli 1967.

[18] Pada persidangannya Sudisman menyebut Supardjo sebagai contoh jelas seorang perwira Angkatan Darat progresif yang menentang pimpinan tertinggi angkatannya. Ia mengutip keterangan Supardjo di depan mahkamah (dalam sidang Mahmilub untuk Supardjo) sebagai bukti bahwa G-30-S merupakan urusan intern militer (Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 31-33). Sudisman tidak mungkin bisa mengutip analisis rahasia Supardjo (lihat Lampiran 1) untuk membuktikan pokok pikiran ini. Analisis Supardjo, yang barangkali sudah dibaca Sudisman, menyatakan bahwa G-30-S bukanlah masalah intern militer.

[19] Lihat Lampiran 2.

[20] Hasan, "Otobiografi," 32.

[21] *"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono.*

[22] Subekti, "Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia," 9.

[23] Dalam pledoinya pada 1972 Subekti menyatakan bahwa tanggal rapat itu 28 Agustus ("Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia," 8). Tapi dalam analisisnya pada 1986 tentang G-30-S, ia menyebut tanggal rapat itu 27 Agustus ("G-30-S Bukan Buatan PKI," 3). Munir, dalam pleidoinya pada 1973, menyebut tanggal rapat 27 atau 28 Agustus (Munir, "Membela Kemerdekaan, Demokrasi, dan Keadilan," 13-15).

[24] Subekti, "Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia," 11.

[25] *Ibid.*, 9.

[26] Dokumen ini diperoleh Hersri Setiawan dari Jusuf Ajitorop di Beijing. Sekarang tersedia di dalam koleksi dokumen-dokumen yang dinamai "Indonesian Exiles of the Left [Eksil Indonesia dari Gerakan Kiri]," disimpan Setiawan di badan arsip International Institute of Social History [Institut Sejarah Sosial Internasional] di Amsterdam. Dokumen tak berjudul ini terdiri dari enam bagian dengan judul masing-masing. Saya hanya mengambil dua bagian daripadanya: bagian pertama, yang berjudul "G-30-S Bukan Buatan PKI," dan bagian keempat, yang berjudul "Kata Pendahuluan."

[27] Subekti, "Kata Pendahuluan," 1.

[28] Subekti, "G-30-S Bukan Buatan PKI," 2.

[29] *Ibid.*, 12.

[30] *Ibid.*

[31] Wawancara dengan Oey Hay Djoen, 24 Januari 2002. Sebuah buklet yang diterbitkan sendiri pada 1979, atas nama CC PKI juga menyatakan bahwa Aidit secara umum menutup diri dari pimpinan partai yang lain dalam minggu-minggu sebelum G-30-S, "Kawan D.N. Aidit dan beberapa Kawan di dalam Dewan Harian Politbiro CC PKI bahkan membatasi diri hanya dalam persetujuan dan dukungannya terhadap aksi-aksi..." (Comite Central PKI, *Jawaban PKI Kepada Kopkamtib,* 9). Yang disebut "beberapa kawan" adalah Njono, Subekti, dan Hutapea. Buklet itu tidak terlalu akurat dalam menyebut posisi ketiga tokoh ini di dalam partai: hanya Hutapea yang di Dewan Harian Politbiro walaupun Subekti, sebagai panitera Dewan Harian, bisa dianggap sebagai anggota. Njono anggota Politbiro, tapi bukan

anggota Dewan Harian. Saya tidak tahu siapa di antara pimpinan PKI yang masih hidup yang berbicara atas nama Central Comite yang secara mendasar sudah dihancurkan pada akhir 1970-an. Pengarang atau para pengarang anonim ini menempuh garis pro-Uni Soviet dan mengutuk G-30-S sebagai akibat dari kecenderungan Maois Aidit dan lingkarannya. Subekti secara selintas menyebut dalam dokumen rahasianya pada 1986 bahwa Ruslan Wijayasastra, sesama kawannya di penjara Cipinang, adalah Ketua Central Comite. Subekti pastilah bukan pengarang buklet itu karena dalam dokumennya tahun 1986 ia mengkritik Aidit dari sudut pandang Maois. Buklet ini tanpa bukti juga menuduh Sukarno merancang G-30-S dan minta Aidit untuk membantu melaksanakannya. Sebagian besar argumentasi dalam buklet ini dapat diabaikan sebagai spekulasi yang sengaja dirancang untuk berbetulan dengan kesimpulan dogmatik yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, buklet ini boleh jadi benar tentang beberapa hal tertentu yang dapat diperkuat dengan sumber-sumber lain, misalnya tentang Aidit yang dalam minggu-minggu menjelang peristiwa menggunakan orang-orang kepercayaannya saja.

32 Friend, *Indonesian Destinies*, 102. Informasi Friend berasal dari Kolonel George Benson, asisten Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk program Amerika Serikat yang mendorong para perwira Angkatan Darat agar lebih aktif dalam urusan-urusan sipil.

33 Subekti, "G-30-S Bukan Buatan PKI," 13.

34 *Ibid*., 12.

35 *Ibid*., 15.

36 Subekti, "Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia," 45-46.

37 Analisis Subekti dapat dikritik karena sifatnya yang membenarkan diri-sendiri. Ia mengecam Aidit karena bertindak sendiri dan mencela hampir setiap anggota Politbiro lainnya karena mereka tidak melawan. Tapi ia tidak mengkritik dirinya sendiri yang tidak melawan. Seperti diakuinya dalam pledoinya di depan mahkamah pengadilan, sebelum G-30-S terjadi ia semacam abdi setia Aidit. Subekti menyetujui, walau mungkin tak sepenuhnya sepakat, strategi Aidit untuk mendahului Dewan Jenderal secara militer. Kesalahan nahas yang disadari oleh Subekti dan pimpinan Politbiro lainnya sesudah kekalahan G-30-S merupakan kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat oleh mereka.

38 Wawancara dengan Tan Swie Ling.

39 Mantan anggota Politbiro Peris Pardede mengklaim bahwa Aidit menyampaikan kepada Politbiro pada Agustus, saat menjelaskan tentang beberapa perwira progresif yang akan bertindak melawan Dewan Jenderal, bahwa strategi mendahului mempunyai keuntungan dan kerugian. Ketika ditanyai mana yang lebih baik, menunggu Dewan Jenderal bertindak atau mendahului mereka, Aidit menjawab, "Mengenai untung rugi, dua-duanja ada untung, ada ruginja." (kesaksian Pardede, *G-30-S Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono,* 132). Pengakuan ini tampaknya bisa dipercaya. Kita harus membayangkan bahwa Aidit sedang menimbang-nimbang pilihannya.

40 Yani, *Profil Seorang Prajurit TNI*, 178; Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S,* 12.

41 Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno,* 394.

[42] Kantor itu berada di sebuah gedung, Wisma Warta, tempat perkantoran dan penginapan untuk para wartawan asing lainnya. Gedung ini terletak di sudut yang sekarang ditempati Plaza Indonesia dan Grand Hyatt di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.

[43] Nursuhud diangkat menjadi anggota Central Comite di dalam Kongres Nasional VI pada 1959 (Partai Komunis Indonesia, *40 tahun PKI*, 98). Ia menulis kisah tentang perlawanan PKI terhadap pemberontakan PRRI 1957-58 di daerah asalnya di Sumatra Barat, *Menyingkap Tabir "Dewan Banteng."*

[44] Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 28. Sudisman mengkritik dirinya sendiri dan pimpinan partai yang lain karena menilai secara berlebihan sifat revolusioner situasi politik pertengahan 1965. Dalam otokritik Politbiro ia menulis bahwa demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi ketika itu, seperti misalnya demonstrasi dan aksi menentang pemerintah Amerika Serikat, "masih dalam rangka tuntutan-tuntutan lunak dan reformis." Pimpinan partai, yang dibuai oleh sukses-sukses dan dipukau oleh militansi jaman, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa revolusi sudah di ambang pintu dan mengabaikan laporan-laporan yang berbeda dengan pendapat mereka, "Pimpinan partai tidak senang kalau komite-komite daerah dan badan-badan partai lainnya melaporkan kenyataan bahwa tingkat perkembangan aksi-aksi massa belum seperti yang sudah disimpulkan" (Sudisman, *Pledoi Sudisman; Kritik-Otokritik,* 117-118).

[45] Wawancara dengan Joesoef Isak. Kantor Chairul Saleh berhadapan dengan kali Ciliwung di tengah kota Jakarta.

[46] Lev, "Indonesia 1965," 105.

[47] Transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, kesaksian Sjam, 8 Juli 1967.

[48] Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 28. Istilah *safe-stellen* adalah kombinasi antara kata-kata Inggris dan Belanda.

[49] Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai*, 2:440. Sukarno juga menyalahkan G-30-S dalam hal "kelihaian subversi Nekolim" dan "oknum-oknum yang tidak benar" (Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai*, 2:440). Ia tidak mengurai lebih lanjut analisisnya yang sarat teka-teki dan taksa itu.

[50] Wawancara dengan Oey Hay Djoen.

[51] Sophiaan, "Inspirasi dari Aljazair," bab 2 dalam *Kehormatan Bagi Yang Berhak.*

[52] Tentang kup Aljazair lihat Humbaraci, *Algeria*, 217-246, dan Quandt, *Revolution and Political Leadership*, 237-243. Penuturan penulis-penulis hagiografi [buku yang berisi pemujaan terhadap kebaikan orang (-orang) tertentu] Boumedienne (Francos dan Sereni, *Un Algerien nomme Boumedienne,* 161-179) bukannya tidak penting.

[53] Karim D.P., "Tiga Faktor Penyebab G-30-S."

[54] Vergès adalah salah satu penulis sebuah buku tentang seorang perempuan yang menjadi salah satu terdakwa dalam perkara penyiksaan tersebut. Lihat Arnaud dan Vergès, *Pour Djamila Bouhired.*

[55] Untuk informasi biografis, lihat Fejto, "Maoist in France," dan Marnham, "One Man and His Monsters." Vergès lahir di Thailand pada 1925 dari ayah Perancis dan ibu Vietnam. Ia

besar di koloni Perancis La Réunion, berjuang untuk Perancis dalam Perang Dunia II, dan belajar hukum di Paris selama akhir 1940-an dan awal 1950-an. Ia tetap terkenal, dengan reputasi baik maupun buruk, karena pengabdiannya sejak 1980-an sebagai pengacara untuk tokoh-tokoh Nazi, penjahat perang dan eks-diktator. Di antara orang-orang yang dibelanya adalah Klaus Barbie, Slobodan Milosevic, dan Tariq Aziz. Ia menawarkan dirinya untuk membela Saddam Hussein. Program televisi *60 Minutes* [dari stasiun CBS, AS] menayangkan profil Vergès pada 25 April 2004.

56 Artikel Hindley, "The Indonesian Communist Party," mengemukakan telaah yang berhati-hati mengenai posisi PKI dalam perpecahan Tiongkok-Soviet.

57 Fejto, "Maoist in France," 122.

58 Dikutip dalam Humbaraci, *Algeria*, 242.

59 *Ibid*., 241-242.

60 Saya belum bisa memastikan apakah Aidit berangkat ke Aljazair. Anggota delegasi Indonesia selebihnya tidak berangkat. Karim D.P. hanya mengatakan Aidit bertemu orang-orang komunis Aljazair di Paris.

61 Wawancara dengan Joesoef Isak.

62 First, *Power in Africa*, 449. Orangtua First adalah anggota pendiri Partai Komunis Afrika Selatan. Lahir pada 1925, ia sudah masuk partai sejak masih muda. Ia menikah dengan Joe Slovo, yang belakangan menjadi ketua partai. Pasukan keamanan Afrika Selatan membunuh First dengan bom surat ketika ia hidup di pengasingan di sebuah negara dekat Mozambique pada 1982.

63 *Ibid*., 450.

64 Munir tidak menjelaskan tentang waktu dan konteks pernyataan Aidit. Kemungkinan besar pernyataan itu disampaikan pada suatu saat antara Agustus atau September 1965 (Munir, "Membela Kemerdekaan, Demokrasi, dan Keadilan," 40). Ini contoh lain pernyataan di depan sidang pengadilan yang bisa dipercaya karena ia bersesuaian dengan apa yang diketahui dari sumber-sumber lain.

65 Sudisman, *Uraian Tanggung Djawab*, 18.

66 Tentang strategi front persatuan, lihat Hindley, *Communist Party of Indonesia,* 29-59, dan Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno,* bab 1.

67 Aidit ikut serta dalam proyek riset besar-besaran yang diorganisasi PKI pada 1964 untuk meneliti kondisi ekonomi agraria. Berdasarkan hasil riset yang telah diterbitkan ini, ia menyebut "tujuh setan desa." (Aidit, *Kaum Tani Mengganyang Setan2 Desa*, 27). Sejarawan Hilmar Farid menyatakan, partai membedakan antara anggota kelas tertentu yang buruk dan yang baik atas dasar afiliasi politik yang bersangkutan: tuan tanah baik adalah tuan tanah yang mendukung PKI dan/atau Sukarno, sedangkan tuan tanah jahat ialah tuan tanah yang mendukung partai-partai politik yang menentang PKI (Farid, "Class Question in Indonesian Social Sciences," 177).

68 Teori "dua aspek" ini dikecam di dalam otokritik Politbiro 1966; lihat Sudisman, *Pledoi Sudisman; Kritik-Otokritik,* 102-9.

[69] Wawancara dengan Oey Hay Djoen.

[70] Dikutip dalam Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno,* 380.

[71] Anderson dan McVey, *Preliminary Analysis*, 132-135.

[72] Wawancara dengan Martin Aleida.

6

SUHARTO, ANGKATAN DARAT, DAN AMERIKA SERIKAT

Dari sudut pandangan kami, sudah barang tentu, percobaan kup yang gagal oleh PKI boleh jadi merupakan perkembangan yang paling efektif untuk memulai pembalikan arah kecenderungan politik di Indonesia.

Howard P. Jones, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, 10 Maret 1965

Bagi Aidit penggunaan para perwira progresif secara rahasia untuk menyisihkan pimpinan tertinggi sayap kanan Angkatan Darat tentunya tampak sebagai strategi yang cerdas. Baik partai maupun Presiden Sukarno dapat diselamatkan dari Dewan Jenderal dengan satu gebrakan cepat dan tak langsung. Pada saat-saat permulaan Gerakan 30 September tampak akan berhasil: pasukan dikerahkan tanpa tercium jejaknya dan berhasil menciptakan unsur kejutan – jenazah keenam jenderal cukup menjadi bukti. Namun, kejutan ini berumur pendek. Rupanya Aidit tidak menyadari bahwa pihak-pihak lain di dalam kepemimpinan Angkatan Darat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) telah menunggu dengan sabar peristiwa semacam G-30-S, dan sudah pula menyiapkan rencana untuk menanggapinya. Sementara jenderal-jenderal dan staf kedutaan besar tidak memperhitungkan G-30-S akan meletus pada 1 Oktober, dan akan membunuh separo dari staf Yani, mereka memang memperhitungkan akan ada semacam aksi dramatik yang melibatkan PKI. Mereka sudah menunggu-nunggu sebuah dalih untuk menghantam partai dan merongrong pemerintahan Sukarno.

Tanpa ia sadari Aidit bertindak sesuai dengan keinginan mereka.

Seperti dokumen-dokumen AS yang telah dideklasifikasikan mengungkap, pada 1965 jenderal-jenderal itu sadar bahwa mereka tidak bisa melancarkan kudeta dengan gaya lama terhadap Sukarno – ia terlalu populer. Mereka memerlukan dalih. Dalih paling baik yang mereka temukan ialah sebuah percobaan kup yang gagal dan bisa dipersalahkan kepada PKI. Angkatan Darat, dalam rencana cadangannya, telah menyusun sebuah rencana permainan: mempersalahkan PKI karena percobaan kup, melancarkan perang total terhadap partai, mempertahankan Sukarno sebagai presiden boneka, dan tahap demi tahap mengangkat Angkatan Darat masuk ke pemerintahan. Angkatan Darat secara teratur menyampaikan informasi terbaru tentang rencana mereka kepada Kedutaan Besar AS dan tahu bahwa institusi ini dapat mengharapkan AS untuk bantuan diplomatik, militer, dan ekonomi jika waktu pelaksanaan rencana telah tiba. Gerakan 30 September menerobos sebuah institusi bersenjata, yang mengetahui dengan tepat bagaimana harus bereaksi. Bahkan andaikata PKI tidak terlibat sekalipun, hampir bisa dipastikan kesalahan akan dilemparkan kepadanya.

Saat membaca dokumen-dokumen tentang perencanaan tingkat tinggi Angkatan Darat yang dilakukan sebelum G-30-S meletus, kita akan dikejutkan oleh betapa kejadian-kejadian 1965-67 mengikuti rencana permainan Angkatan Darat. Saya tidak percaya bahwa hubungan erat antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan rencana itu dapat dijelaskan dengan menyatakan bahwa jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat itu sendiri yang merancang G-30-S. Tentu saja, sangat menggoda untuk memahami G-30-S sebagai usaha kup palsu yang sengaja dirancang untuk gagal. Tapi argumen "tangan tersembunyi" semacam itu tidak hanya sukar untuk dipercaya (mengingat kerumitan logistik yang dibutuhkan), tetapi juga mustahil untuk dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Seperti sudah saya kemukakan dalam Bab 2, G-30-S akan dirancang sangat berbeda seandainya ia dimaksudkan sebagai sebuah perangkap. Dalam menelaah operasi-operasi rahasia agen-agen intelijen, kita hendaknya berhati-hati agar tidak mendesak-desakkan teori-teori konspirasi terlalu jauh. Kedutaan Besar AS dan jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak mengendalikan seluruh peristiwa melalui agen-agen ganda. Gerakan 30 September berasal dari Aidit, Biro Chusus, dan sekelompok perwira

progresif, dan dirancang untuk berhasil. Ia gagal bukan karena sebelumnya direncanakan untuk gagal, tapi karena ia diorganisasi dengan cara yang sangat buruk dan karena Angkatan Darat telah mempersiapkan pukulan balik. Bahkan andaikata Suharto tidak tahu sebelumnya tentang rencana G-30-S pun, ia dan rekan-rekan sesama jenderal-jenderal pasti akan bereaksi dengan cara serupa. Mungkin saja Angkatan Darat tidak akan mampu mengalahkan G-30-S dengan sangat cepat dan tanpa kesulitan, namun mereka pasti akan mengorganisasi suatu kampanye anti-PKI dan anti-Sukarno yang seperti itu juga.

Dengan menolak teori ekstrem konspirasi, kita hendaknya tidak melompat ke ekstrem yang lain dan berpendapat bahwa para pejabat AS serta para jenderal Angkatan Darat terkejut pada 1 Oktober dan menata tanggapan mereka tanpa persiapan. Satu pokok perkara yang dibuat kabur dalam banyak kepustakaan tentang G-30-S, terutama dalam tulisan-tulisan para pejabat AS, adalah bahwa pemerintah AS telah mempersiapkan tentara Indonesia untuk berbentrokan dengan PKI dan merebut kekuasaan negara.[1] Dari 1958 sampai 1965 Amerika Serikat melatih, mendanai, memberi nasihat, dan memasok Angkatan Darat sebegitu rupa sehingga dapat mengubahnya menjadi negara di dalam negara. Di bawah Nasution dan Yani Angkatan Darat berangsur-angsur memperluas kekuasaannya, mengonsolidasi korps perwiranya, dan menjadikan institusi ini sebagai pemerintahan dalam penantian. Selama bulan-bulan menjelang Oktober 1965 Amerika Serikat dan Angkatan Darat menginginkan terjadi suatu peristiwa semacam G-30-S. Mereka sibuk menciptakan kondisi untuk itu dan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Amerika Serikat tidak membiarkan persaingan antara Angkatan Darat dan PKI terjadi oleh kebetulan semata-mata.

Dalam satu peristiwa 1 Oktober 1965 ini terkandung sejarah persaingan antara kekuatan komunis dan kekuatan antikomunis sedunia yang berkepanjangan dan ruwet, yang meluas dari perseteruan di tingkat desa sampai ke politik tingkat tinggi kebijakan luar negeri AS. Bagian ini merupakan telaah singkat tentang pertentangan pascakolonial di Indonesia antara perwira-perwira Angkatan Darat dan PKI dan sebagian besar berdasarkan pada dokumen-dokumen pemerintah AS yang sudah dideklasifikasikan. Telaah dimulai dengan memeriksa bagaimana Amerika Serikat membangun persekutuan yang kukuh dengan Angkatan Darat

dalam akhir 1950-an dan diakhiri dengan memeriksa bagaimana Angkatan Darat menanggapi meletusnya G-30-S pada 1965. Akhirnya, bab ini dimaksud untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Darat sampai mengeramatkan sebuah *putsch* yang relatif kecil menjadi sebuah kejahatan terbesar dalam sejarah Indonesia, sesuatu yang menuntut penahanan massal dan pembantaian sebagai tanggapan.

ASAL-MUASAL PERSEKUTUAN AMERIKA SERIKAT DAN ANGKATAN DARAT

Sampai akhir 1950-an tidak terlihat bahwa pemerintah AS dan Angkatan Darat Indonesia akan mempunyai masa depan bersama yang gilang-gemilang. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower (1952-1960) berpikir tentang bagaimana memecah-belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Bagi mereka, Presiden Sukarno merupakan sebuah kutukan. Politik luar negerinya yang bebas aktif (yang tegas dipamerkan pada Konferensi Asia Afrika 1955), hujatan berulangnya terhadap imperialisme Barat, dan kesediaannya merangkul PKI sebagai bagian integral dalam politik Indonesia ditafsirkan di Washington sebagai bukti kesetiaan Sukarno kepada Moskow dan Beijing. Eisenhower dan Dulles bersaudara – Allen sebagai kepala CIA dan John Foster sebagai kepala Departemen Luar Negeri – memandang semua pemimpin nasionalis Dunia Ketiga yang ingin tetap netral di tengah-tengah perang dingin sebagai antek-antek komunis. Dengan penuh keyakinan akan hak mereka untuk memilih-milih pemimpin di negara-negara asing, Eisenhower dan dua bersaudara Dulles berulang kali menggunakan operasi rahasia CIA untuk menumbangkan pemimpin-pemimpin nasionalis: Mossadegh di Iran pada 1953, Arbenz di Guatemala pada 1954, dan Souvanna Phouma di Laos pada 1960. Dulles bersaudara melihat Sukarno pun sebagai tokoh lain yang menjengkelkan, yang harus disingkirkan dari panggung dunia.[2]

Sesudah PKI memenangi pemilihan umum daerah pada pertengahan 1957, Dulles bersaudara berpikir waktunya telah tiba untuk bergerak melawan Sukarno. Sikap lunak Sukarno terhadap komunisme dan dukungannya kepada pemilu yang demokratis terlihat sebagai memberi PKI

jalan lapang menuju istana kepresidenan. Dulles bersaudara menolak nasihat bijak Duta Besar AS di Jakarta, John Allison, yang mengatakan bahwa ancaman komunis tidak cukup gawat untuk membenarkan penggulingan terhadap Sukarno. Dalam imajinasi berkobar-kobar para prajurit perang dingin di Washington, PKI telah memenangi "mayoritas mutlak" dari pemilih di Jawa dalam pemilu daerah 1957.[3] (PKI hanya menang 27%.) Dulles bersaudara menjadi yakin bahwa Jawa telah jatuh ke tangan kaum komunis dan lebih baik memisahkannya dari daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi kaum komunis di Asia, prinsip yang menjadi pedoman pemerintah Eisenhower ialah membagi negara-negara menjadi kawasan-kawasan komunis dan nonkomunis. Pelajaran dari lepasnya Tiongkok pada 1949 ialah lebih baik merelakan yang sudah lepas dan membiarkan sesuatu wilayah jatuh ke tangan komunis, ketimbang memperpanjang perang berlarut-larut di seluruh negeri. Oleh karena itu Amerika Serikat mau membagi Korea dan Vietnam menjadi paro utara dan paro selatan. Pada akhir 1957 pemerintah Eisenhower berpendapat bahwa kebangkitan PKI, khususnya di Jawa, berarti telah datang saatnya untuk memecah-belah kepulauan Indonesia menjadi satuan-satuan yang lebih kecil.

Pemberontakan-pemberontakan oleh kolonel-kolonel Angkatan Darat berbasis di daerah-daerah di Sumatra dan Sulawesi dilihat oleh pemerintah Eisenhower sebagai kendaraan sempurna untuk mengisolasi Jawa. Letnan Kolonel Ahmad Husein, Panglima Sumatra Barat, merebut kekuasaan dari gubernur pemerintah sipil pada 20 Desember 1956. Kolonel Simbolon, panglima seluruh belahan utara Pulau Sumatra (yang bermarkas di Medan), mencanangkan dirinya sebagai gubernur wilayah itu dua hari kemudian. Letnan Kolonel Barlian, Panglima wilayah paro selatan Sumatra (bermarkas di Palembang), menyusul rekan-rekannya dengan mendongkel gubernur di wilayahnya pada Maret 1957. Ketiga kolonel tersebut semuanya menuntut otonomi yang lebih luas bagi provinsi-provinsi mereka dalam berhadapan dengan pemerintah pusat, pembubaran kabinet yang ada, dan mengembalikan kekuasaan Mohammad Hatta, seorang tokoh politik Sumatra yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956.

Demi alasan yang sama panglima militer seluruh bagian timur Indonesia (termasuk Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil)

memberontak terhadap pemerintah sipil dan menyatakan wilayahnya dalam keadaan perang pada Maret 1957. Letnan Kolonel Sumual, yang bermarkas di kota Makassar, mengumumkan apa yang dinamakannya "perjuangan semesta alam," yang terkenal dalam akronimnya "Permesta." Ia juga mengulangi tuntutan tiga kolonel rekan-rekannya di Sumatra. Semua perwira pemberontak ini pada dasarnya mengingini suatu pemerintahan pusat yang direformasi, bukan pecahan negara-negara merdeka yang berserakan.

Kembali di Washington, arti penting pemberontakan-pemberontakan ini sangat dibesar-besarkan. Dalam sidang Dewan Keamanan Nasional (NSC, *National Security Council*) pada Maret 1957 Allen Dulles menyatakan bahwa "proses disintegrasi di Indonesia sedang terus berlanjut sampai pada tahap tinggal pulau Jawa saja yang masih di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Angkatan bersenjata di semua pulau-pulau di luar [Jawa] telah menyatakan kemerdekaan mereka dari pemerintah pusat di Jakarta."[4] Penilaian tidak tepat semacam ini meyakinkan para penentu kebijakan bahwa Amerika Serikat harus berbalik melawan nasionalisme Indonesia.

Mula-mula Sukarno bersikap tanggap terhadap tuntutan para pemberontak. Pembentukan kabinet baru pada April, penyelenggaraan konferensi perujukan kembali segera sesudah itu, pengiriman dana tambahan ke daerah-daerah, dan keberlanjutan prospek pengembangan karier dalam ketentaraan nasional bagi para kolonel itu sendiri adalah semua faktor yang meredakan kekerasan hati para pemberontak. Tapi pemerintah Eisenhower, melalui kontak-kontak rahasianya dengan para kolonel pembangkang, tetap berpendapat bahwa mereka melawan bujuk rayu Sukarno. Sebuah komite ad hoc untuk Indonesia dalam Dewan Keamanan Nasional AS dalam September 1957 menyimpulkan bahwa Amerika Serikat harus "memperkuat kebulatan tekad, kemauan dan kepaduan pasukan antikomunisnya di pulau-pulau luar Jawa," sehingga mereka bisa berperanan sebagai "titik penggalangan kekuatan jika kaum komunis menguasai Jawa."[5] Dukungan material AS menumbuhkan kepercayaan diri pada para pemberontak untuk menolak setiap penyelesaian yang dirundingkan. CIA memberikan uang muka sebesar $50.000 kepada Kolonel Simbolon di Sumatra Utara pada awal Oktober 1957 dan mulai mengirim senjata pada bulan berikut.

Walaupun pemberontakan-pemberontakan ini tidak mulai dengan maksud mendongkel pemerintah Jakarta, mereka kemudian mempunyai maksud demikian pada awal 1958, terutama oleh pengaruh pemerintah AS. Para kolonel itu, karena dibanjiri dolar dan senjata oleh CIA, lalu menjadi lebih ambisius. Pada 15 Februari 1958, Kolonel Husein mengumumkan pemerintah nasional baru, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, atau disingkat sebagai PRRI. Ia menuntut agar negara-negara asing membekukan aktiva Jakarta di luar negeri dan memindahkan kedutaan besar-kedutaan besar mereka dari Jakarta ke Sumatra Barat. Menghadapi pernyataan perang yang terang-terangan itu, pemerintah Sukarno memutuskan bahwa pilihan satu-satunya hanyalah menjawabnya dengan kekuatan militer. Tindakan ofensif tentara Indonesia dilancarkan sepekan sesudah pengumuman Husein.

Angkatan Udara membom sasaran-sasaran penting PRRI dan menerjunkan dari udara batalyon-batalyon dari Jawa di Sumatra. Karena tidak memiliki pesawat terbang, senjata penangkis serangan udara, dan kapal selam, para kolonel pemberontak di Sumatra rentan terhadap pemboman melalui udara dan laut. Kekurangan tambahan lainnya lagi ialah moral, banyak pasukan kolonel-kolonel itu tidak mau berperang melawan tentara Indonesia. Satu demi satu kota-kota penting di Sumatra jatuh dalam Maret dan April sampai ibu kota PRRI, kota pegunungan Bukittinggi, direbut kembali pada 4 Mei. Walaupun sisa-sisa pasukan pemberontak yang tersebar beralih masuk hutan dan melancarkan perang gerilya sporadik selama tiga tahun berikutnya, PRRI di Sumatra dengan mangkus dibereskan pada saat itu.

Kemenangan Jakarta di bagian timur Indonesia memerlukan waktu lebih lama karena CIA memberi bantuan kekuatan udara kepada para pemberontak. Beroperasi dari pangkalan udara Manado, sebuah kota di ujung utara Sulawesi yang dekat dengan pangkalan udara AS di Filipina, CIA melepas satu armada dengan delapan atau sembilan pesawat terbang yang diawaki pilot-pilot berkebangsaan Amerika, Taiwan, dan Filipina. Armada udara kecil ini sangat merintangi tentara Indonesia dengan pemboman atas kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan udara di seluruh kawasan Indonesia timur. CIA serta-merta menghentikan bantuan udaranya pada akhir Mei 1958 ketika seorang pilot Amerika, Allen Pope, ditembak jatuh dan ditangkap hidup-hidup sesudah melakukan

pemboman atas kota Ambon – serangan membabi buta yang membunuh sekitar tujuh ratus penduduk sipil. Sesegera sesudah pesawat-pesawat udara CIA tidak lagi beroperasi, Jakarta dengan cepat berhasil menundukkan para pemberontak di Manado.

Pemerintah Eisenhower mulai menilai kembali strateginya ketika para kolonel pemberontak jatuh dan kalah. Dunia impian penuh petualangan dari aksi rahasia AS mulai berantakan. Melihat bahwa perwira-perwira Indonesia yang menumpas kolonel-kolonel pemberontak adalah perwira-perwira antikomunis (seperti Nasution dan Yani), Washington menyadari bahwa menyabot tentara Indonesia kontraproduktif. Dukungan AS kepada para pemberontak berarti mengadu perwira-perwira antikomunis satu sama lain. PKI tampil dengan popularitas lebih besar karena kebijakannya tentang imperialisme AS menjadi dikukuhkan oleh pengalaman. Dengan persenjataan AS ditemukan di Sumatra dan pilot AS ditembak jatuh di atas Ambon, bangsa Indonesia bisa melihat langsung bahwa Amerika Serikat memang benar-benar berusaha untuk mencerai-beraikan tanah air mereka.

Hasil peninjauan kembali pemerintahan Eisenhower ialah pembalikan kebijakan di Washington. Alih-alih mencoba melucuti Indonesia, Amerika Serikat akan mendukung para perwira Angkatan Darat yang antikomunis di Jakarta dan bersandar kepada mereka untuk menegah gerak PKI. Kebijakan baru ini memperoleh perumusannya secara sistematik di dalam sebuah dokumen Dewan Keamanan Nasional (NSC), "Laporan Khusus Tentang Indonesia" yang ditulis dalam Januari 1959.[6] NSC melihat Angkatan Darat sebagai "perintang utama terhadap perkembangan kekuatan komunis lebih lanjut." Kekuatan sipil nonkomunis di dalam partai-partai politik "dengan dukungan Angkatan Darat bisa berbalik melawan partai komunis di gelanggang politik." Dokumen NSC menganjurkan Eisenhower agar memperkuat hubungan AS dengan tentara Indonesia agar institusi ini mampu "memerangi kiprah kaum komunis." Untuk memastikan bahwa pimpinan Angkatan Darat mau dan mampu memenuhi peranannya sebagai ujung tombak kekuatan antikomunis, Gedung Putih menyumbang perlengkapan dalam jumlah besar-besaran.[7]

Strategi baru AS untuk memerangi PKI ini sungguh canggih, terutama jika dibandingkan dengan kekasaran strateginya yang lama.

NSC menyadari bahwa PKI sudah mendapat kepercayaan nasional yang tak termakzulkan. Partai ini terorganisasi dengan sangat baik, berdisiplin tinggi, dan luar biasa populer. Menurut penilaian NSC, PKI "mungkin sekali akan tumbuh sebagai partai terbesar di Indonesia" jika Sukarno tidak menangguhkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 1959.[8] Angkatan Darat tidak bisa asal menyerang kaum komunis dengan cara berangasan, "Tindakan terang-terangan menindas PKI akan sulit dibenarkan atas dasar politik dalam negeri, dan akan menghadapkan pemerintahan siapa pun yang mengambil tindakan tersebut kepada tuduhan telah takluk kepada tekanan Barat."[9] Angkatan Darat harus mendekati PKI dengan kelihaian musang berbulu ayam. Setiap serangan terhadap PKI harus bisa dibenarkan sesuai dengan rambu-rambu nasionalisme Indonesia yang diperjuangkan oleh partai itu sendiri.

Siasat yang digunakan adalah terus-menerus memprovokasi PKI agar melakukan tindakan gegabah yang akan menampilkan partai tersebut sebagai antinasional. Dokumen NSC tahun 1959 menekankan bahwa dalam memberikan bantuannya kepada Angkatan Darat Amerika Serikat harus memprioritaskan "permintaan bantuan untuk program dan proyek yang akan membuka kesempatan untuk mengisolasi PKI, menggiring partai ke posisi bertentangan secara terang-terangan dengan pemerintah Indonesia, sehingga dengan demikian terciptalah alasan-alasan untuk melakukan tindakan represif yang secara politik bisa dibenarkan dari sudut kepentingan Indonesia sendiri."[10] Strategi tetap AS dari 1959 sampai 1965 ialah membantu para perwira Angkatan Darat mempersiapkan diri untuk melakukan serangan hebat terhadap PKI. Howard Jones, Duta Besar di Jakarta selama tujuh tahun (1958-1965) dan salah seorang arsitek utama kebijakan tersebut, memasok anasir kesinambungan yang penting bagi tiga pemerintahan AS, Eisenhower-Kennedy-Johnson.

MENATA PANGGUNG UNTUK BENTROKAN

Sejalan dengan kebijakan pembangunan Angkatan Darat sebagai benteng perlawanan terhadap PKI, pemerintah AS memberi pelatihan kepada perwira-perwira Angkatan Darat di Amerika Serikat, memberi sumbangan dan menjual persenjataan, serta memberi bantuan keuangan.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Nasution adalah "anak mas" Amerika; kegigihan semangat antikomunisnya meyakinkan para pembesar di Washington bahwa Angkatan Darat benar-benar merupakan harapan paling baik untuk menjinakkan PKI. Berulang kali Nasution memberi jaminan kepada para pejabat AS bahwa Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut kekuasaan. Gabungan kepala-kepala staf AS memberi pembenaran bantuan untuk Angkatan Darat Indonesia pada 1958 sebagai dorongan bagi Nasution agar "melaksanakan 'rencana'-nya untuk mengendalikan kaum komunis."[11] Sesudah Sukarno menyingkirkan Nasution pada Juni 1962, mengangkatnya untuk jabatan administratif sebagai panglima angkatan bersenjata, dan dengan demikian membebaskannya dari jabatan sebagai panglima pasukan, penggantinya, Letnan Jenderal Yani, meneruskan sikap antikomunis yang sama.

Dalam Agustus 1958 Amerika Serikat memulai program bantuan militer dengan memasok perlengkapan untuk militer, khususnya Angkatan Darat, dan melatih para perwira di Amerika Serikat. Dari 1958 sampai 1965 Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan sekitar $10 juta sampai $20 juta untuk bantuan militer Indonesia.[12] Program pendidikan perwira Angkatan Darat Indonesia di sekolah-sekolah seperti di Fort Bragg dan Fort Leavenworth merupakan program yang menyeluruh. Dari 1950 sampai 1965 sekitar 2.800 perwira Angkatan Darat Indonesia dikirim ke Amerika Serikat untuk sekolah – sebagian besar sesudah 1958. Jumlah itu kira-kira merupakan seperlima sampai seperempat dari seluruh jumlah perwira Angkatan Darat.[13] Melalui pendidikan ini Amerika Serikat bisa membangun kontak-kontak yang luas dengan Angkatan Darat Indonesia. Tentu saja tidak semua perwira yang disekolahkan di Amerika Serikat menjadi pengikut-pengikut setia perjuangan antikomunis. Tapi program yang berskala sedemikian besar tentu membawa pengaruh terhadap wawasan politik sementara perwira. Pada awal 1960-an para pejabat AS memang merasa telah memperoleh sukses dengan program itu. Pada 1964 Dean Rusk menulis sebuah memo kepada Presiden Johnson untuk menjelaskan bahwa bantuan AS kepada tentara Indonesia dari sudut kemiliteran kecil saja artinya tapi "*memungkinkan kita untuk menjalin hubungan tertentu dengan elemen-elemen kunci di Indonesia yang menaruh perhatian dan mampu melawan perebutan kekuasaan oleh kaum komunis*" (kursif penegas sesuai aslinya).[14]

Selain melatih perwira, pemerintah AS juga menggalakkan "*civic action.*" Walaupun pada mulanya Amerika Serikat membentuk *civic action* untuk militer dalam perjuangan melawan perang gerilya, Amerika Serikat berniat melaksanakannya di Indonesia sebagai sarana penangkal pengaruh politik PKI. Pemerintah AS merumuskan *civic action* sebagai penggunaan militer "pada proyek-proyek yang berguna bagi segala tingkatan penduduk setempat dalam bidang-bidang seperti pendidikan, pelatihan, pekerjaan umum, pertanian, transportasi, komunikasi, kesehatan, sanitasi dan lain-lain yang memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial, yang juga akan berguna bagi bertambah baiknya posisi angkatan bersenjata di tengah masyarakat."[15] Inilah sebuah program, yang dalam istilah klise, untuk merebut hati dan pikiran. Dengan *civic action* tentara Indonesia harus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya dijalankan kaum sipil. Prajurit menjadi pejabat di dalam pemerintahan sipil, seperti misalnya lurah desa, dan membangun proyek-proyek prasarana, seperti jembatan dan jalan. Pada 1962 NSC mendorong gagasan untuk memperkuat peranan tentara Indonesia dalam "kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial."[16]

Dipimpin oleh konsepsi Nasution tentang "perang teritorial," pada praktiknya sejak awal 1950-an tentara Indonesia telah menempatkan dirinya di tengah kehidupan sipil. Apa yang diusulkan oleh pemerintah Kennedy pada awal 1960-an adalah dukungan AS untuk program Angkatan Darat Indonesia yang sudah berjalan.[17] Program *civic action* Angkatan Darat Indonesia yang baru diresmikan itu sebagian besar di bawah pimpinan Kolonel George Benson, yang jabatan resminya dari Agustus 1962 sampai Juli 1965 adalah pembantu khusus duta besar AS untuk urusan *civic action*. Benson mendapat kepercayaan penuh dari Panglima Angkatan Darat Yani, yang telah dikenal Benson sejak saat ia menjadi atase militer AS di kedutaan besar di Jakarta (1956-1959), sehingga ia dibiarkan leluasa bekerja di kalangan Angkatan Darat Indonesia.[18]

Satu manfaat *civic action* ialah program ini memberikan selubung bagi operasi rahasia terhadap PKI. Komite NSC untuk pengikisan pemberontakan (*counterinsurgency*) pada Desember 1961 menyetujui pengeluaran biaya untuk Indonesia "guna menyokong kegiatan-kegiatan

civic action dan antikomunis," yang akan memuat "pelatihan rahasia bagi personil militer dan sipil terpilih, yang akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan kunci di dalam [di sini sensor mencatat penghapusan 'kurang dari 1 baris teks asli'] program *civic action*."[19] Banyaknya bagian tulisan yang dihilangkan dari dokumen yang telah dideklasifikasi ini memberi kesan bahwa program *civic action* meliputi operasi-operasi terselubung yang peka di Indonesia.

Angkatan Darat Indonesia mengikuti strategi gaya Gramsci dalam versinya sendiri: menerabas ranah-ranah strategis dalam masyarakat sipil sebelum melancarkan usaha merebut kekuasaan negara. Angkatan Darat mempunyai "golongan fungsional"-nya sendiri, yaitu Golongan Karya (Golkar), yang mirip dengan partai politik; serikat buruh, yaitu Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI); surat kabar, yaitu *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*; sekelompok tokoh-tokoh budaya yang bekerja sama erat dengan para perwira antikomunis (misalnya penulis Wiratmo Sukito, pemrakarsa Manifes Kebudayaan yang telah menyulut badai kontroversi pada 1963). Dengan menumbuhkan berbagai sayap dan front yang sangat luas, Angkatan Darat menjadikan dirinya sendiri sebagai bayangan serupa PKI. Undang-undang keadaan darurat perang yang diumumkan pada Maret 1957 sebagai jawaban terhadap pemberontakan PRRI/Permesta memberi kekuasaan istimewa kepada Angkatan Darat untuk campur tangan dalam kehidupan politik sipil. Seperti Daniel Lev mengatakan, "Undang-undang keadaan darurat perang telah menjadi piagam politik Angkatan Darat."[20] Para panglima Angkatan Darat di daerah-daerah melakukan pembatasan terhadap pers, menahan tokoh-tokoh politik, dan memberlakukan undang-undang tak tertulis mereka sendiri. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam Desember 1957 memberi kesempatan bagi Angkatan Darat memasuki dunia perekonomian. Banyak panglima menjadi pengusaha, memperoleh keuntungan berlimpah dari perkebunan, pabrik, usaha impor-ekspor, dan penyelundupan.[21] Mereka menumpuk dana yang cukup besar untuk membiayai usaha mereka menerobos tempat-tempat strategis di tengah masyarakat sipil. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an Angkatan Darat di bawah Nasution mendesakkan bentuk negara korporatis, militer, yang di dalamnya partai politik dihapus dan ranah publik dikosongkan dari pertarungan politik.[22] Pada 1958 politikus veteran

Sjahrir memperingatkan bahwa perwira-perwira Nasution memendam "cita-cita militeristik dan fasis" untuk pemerintah Indonesia.[23]

Banyak pejabat dari kalangan pemerintahan Kennedy percaya bahwa ketertiban politik dan pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga tertentu bisa tercapai dengan baik melalui pemerintahan militer. Para pejabat AS ini beranggapan bahwa militer sering kali merupakan lembaga yang terorganisasi paling baik, dan oleh karena itu paling layak memimpin pemerintahan. Seorang ilmuwan politik, Lucien Pye, dari Massachusetts Institute of Technology menyatakan bahwa tentara di negeri-negeri praindustri bisa menjadi "agen-agen modernisasi" karena mereka cenderung "mengutamakan pandangan rasional dan memperjuangkan perubahan yang bertanggung jawab dan pembangunan nasional." Para perwira Angkatan Darat menghargai "kemajuan teknologi," dapat memajukan "rasa kewarganegaraan," dan mampu "memperkuat fungsi-fungsi yang pada hakikatnya administratif."[24] Walt Rostow mengepalai sebuah tim di Departemen Luar Negeri yang pada Januari 1963 menulis laporan berjudul "The Role of the Military in the Underdeveloped Areas" (Peranan Militer di Kawasan yang Belum Berkembang), yang menyodorkan gagasan mendorong militer di beberapa negara untuk mengambil alih fungsi-fungsi negara dan mengabaikan prinsip supremasi sipil.[25] Pemerintah Kennedy berharap Angkatan Darat Indonesia menjadi negara di dalam negara.

Pimpinan tertinggi Angkatan Darat Indonesia memandang dirinya sendiri dengan cara yang sama. Pada awal 1960-an pimpinan ini telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan negara. Guy Pauker, seorang ahli terkemuka AS untuk urusan militer Indonesia yang berafiliasi baik dengan Rand Corporation maupun University of California-Berkeley, melihat bahwa Nasution mengikuti strategi jangka panjang yang cerdik "untuk menjadikan Angkatan Darat Indonesia sebuah organisasi, yang pada akhirnya dapat memantapkan dan mengembangkan negeri tersebut."[26] Nasution tidak ingin mengambil alih kekuasaan negara sebelum Angkatan Darat tertata ketat sebagai suatu lembaga yang terpusat dan "mampu memerintah Indonesia"; jenderal ini sadar bahwa Angkatan Darat tidak bisa melancarkan kudeta terhadap Presiden Sukarno karena ia terlalu populer. "Setiap serangan politik secara langsung terhadapnya pasti akan gagal."[27] Angkatan Darat tidak bisa mendongkel Sukarno

tanpa memicu perang saudara yang tak terkendalikan. Pauker tidak optimistis akan keberhasilan strategi jangka panjang Nasution – baik Sukarno maupun PKI mempunyai kemungkinan untuk menggagalkannya. Tapi Pauker melihat bahwa Angkatan Darat merupakan satu-satunya harapan sejati untuk menghancurkan kaum komunis. Angkatan Darat merupakan "titik penggalangan kekuatan elemen-elemen antikomunis" dalam masyarakat sipil.[28]

Pauker mulai bersekutu dengan Wakil Direktur Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kolonel Suwarto, yang sedang mempersiapkan para perwira rekan-rekannya untuk peranan mereka sebagai penguasa masa depan.[29] Suwarto, lulusan program pendidikan di Fort Leavenworth pada 1959, terkenal sebagai musuh pribadi Presiden Sukarno. Hanya berkat perlindungan Yani, Suwarto bisa tetap memegang posisi berpengaruh dalam Angkatan Darat dan meneruskan persekongkolannya melawan Sukarno.[30] Tentu saja Angkatan Darat tidak bisa secara terbuka membahas rencana perebutan kekuasaan negara. Suwarto dan rekan-rekannya yang berhaluan sama di Seskoad bekerja dengan cara yang licin. Misalnya, mereka mengatur agar ekonom-ekonom berpendidikan AS di Universitas Indonesia pergi ke Bandung untuk memberikan seminar-seminar kepada para perwira Angkatan Darat. Ekonom-ekonom ini pada umumnya mengenyam pendidikan di Berkeley, atas santunan Ford Foundation. Seorang guru besar dari Berkeley yang mengepalai proyek ini, Bruce Glassburner, tinggal selama tiga tahun di Indonesia (1958-1961) dan belakangan mengenang bahwa para perwira Angkatan Darat di Seskoad ingin belajar tentang ekonomi agar mereka bisa memerintah dengan bijak jika mereka telah mengambil alih kekuasaan negara: "Mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang gawat pada awal dan pertengahan 1960-an, mereka dengan mudah memahami bahwa bila terjadi perubahan politik yang akan membawa militer ke tampuk kekuasaan, penyelesaian dengan cepat masalah-masalah ekonomi terburuk harus menjadi prioritas paling utama."[31] Para ekonom yang mengajar di Seskoad, misalnya Muhammad Sadli, belakangan dikenal sebagai apa yang disebut teknokrat dan mafia Berkeley dari rezim Suharto.[32]

Di antara para perwira yang mengikuti seminar Seskoad ialah Suharto. Saat itu ia baru saja dipecat dari kedudukannya sebagai panglima Angkatan Darat di Jawa Tengah atas tuduhan korupsi, tapi perwira-

perwira atasannya memutuskan bahwa operasi penyelundupannya di pelabuhan Semarang tidak cukup berat untuk melahirkan penuntutan. Mereka tidak mengumumkan alasan pemecatannya. Tuduhan dipetieskan, dan ia dikirim ke Seskoad pada akhir 1959. Di sekolah ini ia ada di bawah pengaruh Suwarto. Seorang sejarawan militer Indonesia, Ulf Sundhaussen, menulis bahwa di Seskoad Suharto "terlibat dalam penyusunan Doktrin Perang Teritorial dan kebijakan Angkatan Darat tentang *Civic Mission* (yaitu penetrasi para perwira Angkatan Darat ke dalam segala bidang kegiatan dan tanggung jawab pemerintah)."[33] Suwarto mengajar para perwira agar berpikir tentang Angkatan Darat sebagai sebuah lembaga yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melibatkan diri di dalam memimpin negeri ini. Walaupun Suharto tidak pergi belajar di Amerika Serikat, ia tentu tahu tentang harapan AS terhadap Angkatan Darat, baik sebagai benteng antikomunis maupun sebagai pemerintah bayangan.

Belakangan Yani dan stafnya merekrut Suharto untuk memainkan peranan rahasia yang penting dalam usaha mereka untuk menggembosi konfrontasi, kampanye anti-Malaysia Sukarno. Pada mulanya jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak menentang kampanye yang dilontarkan pada September 1963 karena kampanye itu membuahkan kenaikan dana. Tapi ketika pertempuran-pertempuran kecil menghebat dalam pertengahan sampai akhir 1964, mereka ingin mencegahnya berkembang menjadi perang besar melawan militer Inggris, yang melindungi Malaysia. Untuk menghindari pertikaian dengan Sukarno, yang dikenal suka mencampuri urusan pengangkatan dalam Angkatan Darat jika ia tidak senang, di muka umum jenderal-jenderal itu tetap mendukung konfrontasi. Namun sementara itu mereka menggunakan berbagai cara terselubung untuk menyabotnya. Mereka berusaha memengaruhi Sukarno agar mereorganisasi komando militer untuk konfrontasi. Sukarno merasa perlu mengadakan perubahan setelah mengalami kegagalan yang memalukan dalam serangan-serangan rahasia terhadap Malaysia pada pertengahan 1964, dan menyetujui usul Angkatan Darat dengan memberi nama baru komando multitugas ini sebagai Komando Mandala Siaga (Kolaga) pada September 1964. Ia juga mengesahkan dimasukkannya Suharto sebagai Wakil Panglima Kolaga pada 1 Januari 1965.[34]

Dari kedudukannya sebagai orang kedua dalam komando, Suharto

terus mendesakkan wewenang yang lebih besar dari Panglima Kolaga, Laksamana Madya AURI Omar Dani.[35] Suharto yang menentukan penempatan personil dan persenjataan Angkatan Darat yang ditugasi untuk kampanye anti-Malaysia. Pada waktu itu pangkalan operasi Suharto ialah Kostrad, pasukan cadangan Angkatan Darat, yang sejak Mei 1963 ada di bawah komandonya. Suharto memperlambat kegiatan pengiriman pasukan, dan membiarkan pasukan-pasukan yang ditempatkan dekat perbatasan Malaysia terus-menerus kekurangan personil dan perlengkapan. Omar Dani, sebagai Panglima AURI, tidak bisa memaksa Angkatan Darat untuk tunduk kepada sasaran-sasaran yang telah ditetapkannya. Pasukan-pasukan yang ditempatkan di Sumatra, di bawah komando Kolonel Kemal Idris, musuh lama Sukarno, yang pengangkatannya merupakan taktik lain untuk menyabot konfrontasi, tidak diberi kapal-kapal pengangkut sehingga menghalangi mereka untuk menyerbu Malaysia.[36]

Suharto dan agen-agen intelijennya di Kostrad juga menyabot konfrontasi dengan menghubungi wakil-wakil Malaysia dan Inggris secara diam-diam dan meyakinkan mereka bahwa Angkatan Darat menentang pertempuran-pertempuran kecil yang berlangsung dan akan berusaha membatasinya. Barangkali Yani dan kepala intelijennya, S. Parman, mempercayakan kepada Suharto tugas yang peka ini sehingga mereka bisa dengan tenang mengingkarinya seandainya komplotan mereka terbongkar. Pada Juli atau Agustus 1964 Suharto memerintahkan perwira intelijennya di Kostrad, Mayor Ali Moertopo, agar memberi tahu musuh tentang maksud sebenarnya Angkatan Darat.[37] Untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan para pejabat Malaysia, Ali Moertopo menggunakan orang-orang sipil Indonesia yang pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta pada 1957-1958, dan telah memilih hidup di pengasingan di Singapura dan Malaysia.[38] Pada Januari 1965 Suharto memanggil teman lamanya, Kolonel Yoga Sugama dari Belgrado, ketika itu ia atase militer di sana, untuk segera kembali ke Indonesia agar bisa membantu "mengerem" konfrontasi.[39] Yoga mengambil alih tugas Moertopo. Disamping itu, Mayor Benny Moerdani, perwira Kostrad sejak Januari 1965, dikirim ke Bangkok untuk menghubungi para pejabat yang pro-Barat di sana. Untuk penyamaran statusnya ia bekerja sebagai manajer penjualan di kantor maskapai penerbangan Indonesia,

Garuda.[40]

Salah satu alasan mengapa Suharto dan perwira-perwira Kostrad menentang konfrontasi ialah karena operasi ini mengalihkan sumber daya Angkatan Darat dari kampanye melawan PKI. Bagian intelijen di Kostrad pada pertengahan 1964 menulis laporan rahasia yang menyatakan bahwa konfrontasi mengacaukan upaya Angkatan Darat untuk mengendalikan PKI.[41] Terlalu banyak pasukan dipusatkan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, bukan ditempatkan di tengah masyarakat sipil Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Sebuah laporan rahasia pemerintah AS yang muncul belakangan menulis bahwa militer lebih suka mengakhiri konfrontasi agar pasukan bisa dikembalikan ke induk pangkalan mereka sendiri "untuk dipersiapkan bagi konfrontasi terhadap PKI dan kaum ekstremis lainnya di masa yang akan datang."[42]

TAHUN BENTROKAN

Dilatih, dipersenjatai, didanai, dan didorong oleh Amerika Serikat untuk menyerang PKI, pimpinan tertinggi Angkatan Darat pada Januari 1965 memutuskan untuk memulai perencanaan kemungkinan melakukan serangan. Serangkaian peristiwa memancing Yani dan lingkaran terdekatnya untuk percaya bahwa kekuasaan Presiden sudah mulai kurang mantap dan, akibatnya, ancaman PKI menjadi makin meningkat. Kesehatan Sukarno memburuk, seperti ditunjukkan oleh gangguan pada ginjalnya yang mengharuskannya dioperasi pada Desember 1964. Ia juga menjadi semakin terisolasi di gelanggang internasional. Dalam menanggapi persetujuan Dewan Keamanan PBB yang memberikan kursi keanggotaan untuk Malaysia, pada 7 Januari 1965 Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Kebijakannya tentang konfrontasi terhadap Malaysia membuat PKI berani menuntut agar ribuan, jika bukan jutaan, rakyat sipil dipersenjatai dan diorganisasi sebagai angkatan kelima, yaitu angkatan baru di dalam ketentaraan. Dengan kemungkinan dipersenjatainya PKI, jenderal-jenderal Angkatan Darat menyadari bahwa konfrontasi bergulir cepat di luar kendali mereka. Menurut analisis CIA tentang G-30-S yang telah diterbitkan, Yani dan empat jenderal lain mulai bertemu pada Januari

1965 "untuk merundingkan situasi politik yang memburuk dan apa yang harus dilakukan Angkatan Darat menghadapi hal itu. Kelompok ini, yang dikenal sebagai '*brain trust*' [kelompok pemikir], melibatkan keempat jenderal tersebut, yaitu: Jenderal Suprapto, Jenderal Harjono, Jenderal Parman, dan Jenderal Sukendro." Jenderal-jenderal ini bertemu "secara teratur, [dan] rahasia."[43] Tiga jenderal tersebut pertama adalah anggota staf umum Yani (SUAD). Jenderal terakhir, Sukendro, pernah memimpin penindasan terhadap PKI pada Juli-September 1960, dan pada saat itu, bersama jenderal-jenderal lain dari Angkatan Darat yang antikomunis garis keras, mendesak Nasution agar melakukan kudeta terhadap Sukarno. Sukarno mengajak Angkatan Darat mencapai sebuah kompromi yang berujung pada berakhirnya penindasan terhadap PKI dan pengiriman Sukendro ke pengasingan selama tiga tahun.[44] Dalam tahun-tahun pengasingan itu Sukendro belajar di University of Pittsburgh dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat AS dan CIA. Yani memanggil kembali Sukendro ke Angkatan Darat pada 1963, kemudian memberinya kepercayaan merancang komplotan tingkat tinggi, memulai kembali apa yang pernah diusahakannya dengan begitu kasar pada 1960: mengganyang PKI dan mendongkel Sukarno.

Informasi tentang kelompok para jenderal pilihan Yani itu bocor. Sukarno mendengar desas-desus tentang Dewan Jenderal dan memanggil Yani ke istana pada 22 Mei 1965 untuk dimintai keterangan. Seperti diakui CIA, kelompok pemikir dalam lingkaran Yani ini hampir bisa dipastikan adalah kelompok yang dimaksud PKI pada saat memperingatkan Sukarno.[45] Yani berpendapat bahwa sementara orang telah keliru tafsir mengenai dewan kenaikan pangkat di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), sebagai Dewan Jenderal.

Duta Besar AS, Howard Jones, mendengar tentang diskusi yang dilakukan kelompok pemikir Yani pada Januari 1965. Jones mengirim kawat kepada atasannya di Washington bahwa seorang informan kedutaan besar, yang baru saja kembali dari sebuah rapat dengan Jenderal Parman, melaporkan, Angkatan Darat sedang "menyusun rencana khusus untuk mengambil alih pemerintahan pada saat Sukarno turun panggung." Walaupun perencanaan yang didasarkan pada beberapa kemungkinan ini dibuat "dengan tujuan masa pasca-Sukarno," beberapa perwira dari

“komando puncak militer mendorong agar kup dilancarkan sebelum Sukarno meninggal jika PKI berhasil membentuk pasukan milisi bersenjata. Informan itu menjelaskan, jika Angkatan Darat memang mengambil alih kekuasaan sebelum Sukarno meninggal, “kup akan diselenggarakan sedemikian rupa untuk menjaga agar kepemimpinan Sukarno tetap utuh.” Kup tersebut akan merupakan kup yang tidak tampak seperti kup. Informan Jones bahkan menyatakan bahwa bahkan para penghujat Presiden di dalam tubuh Angkatan Darat pun “yakin bahwa tidak mungkin terjadi kup apa pun terhadap Sukarno yang akan berhasil. Ia masih tetap dicintai rakyat.” Jones memandang informasi itu bisa dipercaya, karena informannya merupakan sebuah “sumber yang sangat bagus.”[46]

Diplomat berpengalaman Ellsworth Bunker, yang dikirim ke Jakarta pada April 1965 untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap hubungan AS - Indonesia, membenarkan tinjauan tentang Sukarno yang tidak bisa diserang itu. “Tidak perlu disangsikan kesetiaan rakyat Indonesia kepada Sukarno,” tulisnya dalam laporannya kepada Presiden Johnson. Bangsa Indonesia “dalam jumlah yang besar mengharapkan kepemimpinan darinya, mempercayai kepemimpinannya, dan bersedia mengikutinya. Tak ada kekuatan di tanah air yang bisa menyerangnya, tidak pula ada bukti bahwa suatu kelompok penting ingin berbuat demikian.”[47]

Agar sebuah kudeta berhasil di Indonesia, ia harus diberi kedok yang sebaliknya: usaha untuk menyelamatkan Presiden Sukarno. Angkatan Darat harus tampil sebagai penyelamat Sukarno dan bukan sebagai penggali liang kubur baginya. Masalahnya bagi Angkatan Darat adalah bahwa kudeta berkedok seperti itu memerlukan adanya suatu dalih. Seperti di atas sudah saya kemukakan, sampai 1959 Dewan Keamanan Nasional AS telah memahami bahwa penindasan terhadap PKI haruslah “bisa dibenarkan secara politik dari sudut kepentingan Indonesia sendiri”; PKI harus diarahkan “masuk posisi sebagai oposisi terbuka terhadap pemerintah Indonesia.” Dalih untuk kup yang masuk akal haruslah merupakan percobaan kup oleh PKI. Duta Besar Jones berbicara pada sebuah rapat tertutup para pejabat Departemen Luar Negeri di Filipina pada Maret 1965, “Dari sudut pandangan kita, tentu saja, percobaan kup yang gagal oleh PKI kiranya merupakan perkembangan yang paling

efektif untuk memulai pembalikan kecenderungan politik di Indonesia." Jones berharap PKI akan mengajukan kepada Angkatan Darat "tantangan tegas yang bisa merangsang reaksi yang efektif."[48]

Jones tidak sendiri dalam berpikir tentang "usaha kup yang gagal oleh PKI" sebagai dalih yang ideal. Gagasan ini beredar luas di kalangan korps diplomatik di negara-negara yang bersahabat dengan Amerika Serikat. Edward Peck, wakil Menlu di Kementerian Luar Negeri Inggris, menyarankan "karenanya barangkali banyak yang harus dibicarakan untuk mendorong PKI melakukan kup prematur selagi Sukarno masih hidup."[49] Menjawab Peck, Komisaris Tinggi Selandia Baru di London, pada Desember 1964 dengan tegas mengatakan bahwa kup prematur PKI "boleh jadi merupakan cara penyelesaian yang paling berguna bagi Barat – asal kup itu gagal."[50] Gagasan ini bahkan meluas sampai ke Kementerian Luar Negeri Pakistan. Seorang perwira intelijen Belanda pada Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO, North Atlantic Treaty Organization) memberi tahu Duta Besar Pakistan di Eropa Barat tentang gagasan ini pada Desember 1964. Duta Besar itu, sesuai dengan tugasnya, melapor kepada atasannya di Islamabad bahwa suatu "kup komunis prematur" yang "sengaja dirancang untuk gagal" akan memberi "kesempatan yang sah dan memuaskan bagi Angkatan Darat untuk menghancurkan komunis dan membikin Sukarno sebagai tawanan niat baik Angkatan Darat."[51] Gagasan itu rupanya dipandang sangat pintar sehingga menjadi bahan senda gurauan dalam kalangan elite. Inilah mungkin sebabnya mengapa Jones menggunakan kata-kata "tentu saja" ketika memulai pembicaraan tentang soal ini dengan rekan-rekannya di Departemen Luar Negeri, seakan-akan mereka itu sudah mengetahuinya.

Baik pemerintah Amerika Serikat maupun komando tertinggi Angkatan Darat Indonesia melewatkan 1965 untuk menunggu terjadinya semacam aksi dramatis dari PKI yang akan memberikan pembenaran bagi penindasan terhadapnya. Sementara pihak bahkan memberi saran yang membantu, yaitu agar Amerika Serikat bertindak selaku katalisator untuk bentrokan yang sangat dinantikan ini. Pada Maret seorang analis di Departemen Luar Negeri di Washington mempertanyakan, "Apakah ada sesuatu yang akan membikin bentrokan [semacam itu] tidak bisa dielakkan?"[52] Ellsworth Bunker, dalam laporannya bulan April, menganjurkan, agar "AS harus diarahkan untuk menciptakan kondisi yang

akan memberi elemen-elemen kekuatan yang potensial kondisi-kondisi yang paling menguntungkan untuk konfrontasi."[53]

Amerika Serikat "menciptakan kondisi" melalui operasi-operasi rahasia. Sebuah komisi NSC menyetujui proposal pada Maret 1965 untuk aksi-aksi rahasia, misalnya "menyokong kelompok-kelompok antikomunis yang ada," "operasi-operasi *black letter* [surat kaleng]" dan "operasi-operasi media." Rencananya adalah "menggambarkan PKI sebagai penentang Sukarno dan nasionalisme yang sah yang semakin ambisius dan berbahaya," dan dengan demikian menyatukan semua elemen nonkomunis untuk melawan PKI. Proposal ini menyebutkan bahwa "tokoh-tokoh nasionalis terkemuka" di Indonesia telah diberi "sejumlah dana" melalui "saluran-saluran yang aman," sehingga mereka bisa "mengambil langkah perintang terhadap PKI."[54]

Pemerintah AS menjadi sangat mengharapkan terjadinya bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI pada 1965 karena hubungan AS dengan pemerintah Sukarno dengan cepat memburuk. Para demonstran militan menyerang banyak kantor konsulat dan perpustakaan pemerintah AS. Reaksi Sukarno yang ogah-ogahan terhadap serangan-serangan pada Februari dan Maret ini mengesankan bahwa ia mengipasi demonstrasi-demonstrasi itu. Amerika Serikat menempuh apa yang dinamai "*low-posture policy*" (kebijakan merunduk). Kebijakan ini memerlukan penarikan mundur sebagian besar personil kedutaan besar (yang mencapai empat ratus orang pada April dan tiga puluh lima orang pada Agustus), penghentian bantuan kepada pemerintah Sukarno, dan kelanjutan hubungan dengan pimpinan Angkatan Darat dengan harapan mereka akan bertindak melawan PKI dan Sukarno. Pos CIA tetap dipertahankan dengan kontingen lengkap beranggotakan dua belas orang (delapan staf operasional dan empat staf administrasi) agar badan ini bisa meneruskan kegiatan rahasia mereka.[55]

Sambil meringkuk dalam-dalam, para pejabat Kedutaan Besar AS yakin bahwa bentrokan penentuan melawan PKI sudah hampir tiba. Pada April Bunker menulis, "Ketertampakan AS harus dikurangi sehingga mereka yang menentang kaum komunis dan ekstremis bisa leluasa menghadapi konfrontasi, hal yang mereka yakini akan terjadi, tanpa kekhawatiran akan diserang sebagai pembela-pembela kaum neokolonialis dan imperialis."[56] Marshall Green, pengganti Jones sebagai Duta Besar

AS pada Juli 1965, diberi wewenang untuk menempuh garis lebih keras terhadap Sukarno. Penilaian Green sesudah sekitar satu bulan di Jakarta adalah bahwa prioritas AS harus "tetap memelihara hubungan apa saja yang mungkin dengan Angkatan Darat dan elemen-elemen lain dalam struktur kekuasaan, dengan memandang pada periode pasca-Sukarno."[57] Selama masa jabatan Green Kedutaan Besar AS bertiarap sambil berharap bahwa kontak-kontak kedutaan besar di dalam Angkatan Darat akan bertindak melawan PKI dan Sukarno. Seperti dijelaskan seorang staf NSC kepada Presiden Johnson, "Sasaran utama tetap mengarungi badai panjang dengan menutup rapat-rapat lubang palka (mengurangi jumlah staf diplomatik) dalam usaha memainkan pertaruhan jangka panjang pasca-Sukarno."[58] Amerika Serikat memutuskan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sama sekali dengan Indonesia sehingga dengan demikian ia dapat terus melakukan hubungan dengan sekutu-sekutu antikomunisnya dalam Angkatan Darat.

Salah seorang Amerika yang mempunyai hubungan paling dekat dengan Angkatan Darat Indonesia ialah George Benson, penasihat *civic action* untuk Angkatan Darat Indonesia. Ia mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Yani dan banyak perwira dari SUAD. Sebelum Benson kembali ke Amerika Serikat pada Juli 1965, ia mengadakan jamuan makan siang dengan Yani dan Parman. Menurut Benson, Yani memberi jaminan kepadanya bahwa Angkatan Darat secara padu antikomunis. Yani menjelaskan bahwa ia dan staf umumnya telah mengangkat 120 komandan batalyon di seluruh tanah air dan dalam pandangan mereka semuanya bisa dipercaya. Menurut Benson, Yani juga mengatakan, "Kami *mempunyai senjata*, dan kami tidak membolehkan senjata jatuh ke tangan mereka [komunis]. Karenanya jika terjadi bentrokan, kami akan membersihkan mereka semua."[59]

Pemerintah Amerika Serikat, tentu saja, tidak tahu dengan tepat kapan dan bagaimana bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI akan terjadi. Namun Amerika Serikat bisa memastikan bahwa konfrontasi itu akan terjadi, dan juga cukup yakin bahwa Angkatan Darat, bagaimanapun, akan menang. Pada Januari 1965 saja penilaian CIA tentang "permulaan pergulatan alot untuk penggantian Sukarno" meramalkan bahwa "perjuangan pertama untuk menggantikannya akan dimenangkan oleh Angkatan Darat dan elemen-elemen nonkomunis."[60] Kenyataan

sederhana, yang dengan terus terang dikatakan Yani kepada Benson, adalah Angkatan Darat memonopoli persenjataan. Frederick Bunnel dengan tepat melukiskan kebijakan AS pada 1965, "Selalu ada keyakinan yang berhati-hati bahwa Angkatan Darat bisa dan akan menang dalam bentrokan di masa pasca-Sukarno, tapi bentuk dan waktu bentrokan itu tidak bisa diramalkan."[61]

Mengingat Kedutaan Besar AS ingin memancing bentrokan, menjadi beralasan untuk menduga bahwa operasi-operasi rahasia pos CIA melibatkan tindakan-tindakan yang akan mendorong PKI agar berpikir bahwa partai dan Sukarno berada dalam bahaya. Beberapa dari "operasi-operasi *black letter* [surat kaleng]" dan "operasi-operasi media" CIA tentunya dirancang untuk meyakinkan pimpinan PKI bahwa jenderal-jenderal Angkatan Darat dan Amerika Serikat adalah anjing-anjing gila yang sangat mengingini kup.

Para pejabat AS berulang kali memberi tahu jenderal-jenderal pimpinan Angkatan Darat bahwa Amerika Serikat akan mendukung mereka jika mereka bergerak melawan PKI. Howard Jones sudah meyakinkan Nasution sebelumnya pada Maret 1964 dalam pertemuan pribadi mereka selama sembilan puluh menit bahwa pasti akan datang "dukungan AS pada saat krisis." Sebaliknya, Nasution meyakinkan Jones bahwa Angkatan Darat "tetap berpandangan antikomunis" dan sedang mengindoktrinasi para perwira "untuk memastikan kesiagaan tentara menghadapi tantangan apabila saatnya tiba."[62] Pada kesempatan lain Nasution meyakinkan Jones bahwa serangan Angkatan Darat terhadap PKI pada 1948, serangan yang sebagian besar dilakukan oleh pasukan Jawa Barat di bawah Nasution sendiri, "Ringan saja jika dibandingkan dengan tindakan yang akan dilakukan Angkatan Darat sekarang ini."[63]

Pertanyaan yang belum terjawab ialah apakah PKI akan memberi Angkatan Darat dalih untuk sebuah serangan. Sementara Jones melihat bahwa "percobaan kup yang gagal oleh PKI" sebagai kejadian yang ideal, ia pesimis terhadap kemungkinan kup akan terjadi. Dalam pidatonya untuk Departemen Luar Negeri pada Maret 1965 Jones mengatakan bahwa PKI mungkin tidak akan mencoba melakukan aksi apa pun terhadap Sukarno, "PKI berada di posisi terlalu baik melalui taktik kerja samanya dengan Sukarno dewasa ini. Kecuali jika pimpinan PKI lebih gegabah dari yang saya pikir tentang mereka, mereka tidak akan meng-

ajukan kepada Angkatan Darat tantangan tegas yang bisa merangsang reaksi yang efektif."[64] Berlawanan dengan perhitungan Jones, PKI, lebih khusus lagi Aidit dan Sjam, ternyata berjalan masuk perangkap.

MEMANFAATKAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Menjelang G-30-S pecah, para pejabat tinggi AS dan perwira-perwira Indonesia sekutu mereka sudah menyiapkan sebuah skenario yang berisi pokok-pokok alur kejadian sebagai berikut: menuding PKI melakukan percobaan kup, melancarkan represi besar-besaran terhadap PKI di seluruh negeri, tetap menggunakan Sukarno sebagai presiden boneka sambil merongrong kekuasaannya, dan membangun satu pemerintah korporatis baru yang dikuasai Angkatan Darat. Itulah skenario ideal mereka. Peristiwa demi peristiwa muncul dan berkembang begitu rupa sehingga memungkinkan mereka mewujudkan skenario ini jadi kenyataan. Meskipun G-30-S terjadi sebagai sebuah kejutan, mereka segera tahu bagaimana mengambil manfaat daripadanya. Gerakan 30 September bukanlah sebuah percobaan kup langsung oleh PKI, tapi cukup serupa untuk memenuhi tujuan mereka. Gerakan 30 September telah membuka jalan bagi para pejabat AS dan jenderal-jenderal Indonesia sahabat mereka untuk menjalankan rencana lama mereka mendongkel Sukarno dan menyerang PKI.

Dalam hari-hari pertama Oktober Kedutaan Besar AS dan para pembuat kebijakan di Washington khawatir bahwa Angkatan Darat Indonesia tidak akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk menyerang PKI. Bahkan sebelum Amerika Serikat mempunyai bukti kuat tentang tanggung jawab PKI pun, ia telah menyalahkan PKI sambil mendorong Angkatan Darat agar menghancurkan partai itu. Laporan Kedutaan Besar bertanggal 4 Oktober menyatakan, Angkatan Darat belum "sampai pada keputusan apakah akan meneruskan usahanya untuk mencapai kemenangan penuh atas PKI."[65] Sementara para pejabat tinggi AS percaya bahwa Nasution, sekutu lama mereka, akan mendorong terjadinya penyerangan besar-besaran, mereka khawatir elemen-elemen lain di dalam Angkatan Darat akan menghalanginya. Pos CIA di Jakarta menyatakan sehari kemudian bahwa "Angkatan Darat

harus bergerak cepat jika ia hendak memanfaatkan kesempatannya untuk bergerak melawan PKI."[66] Pos CIA (mungkin pimpinannya, B. Hugh Tovar) kembali khawatir pada 7 Oktober bahwa ada bahaya Angkatan Darat tidak akan melancarkan serangan terhadap PKI, tapi cukup puas dengan aksi terbatas "terhadap mereka yang langsung terlibat dalam pembunuhan para jenderal."[67] Tepat sehari berikutnya semua kekhawatiran CIA itu hilang ketika ternyata para jenderal Angkatan Darat sudah berkumpul pada 5 Oktober dan sepakat untuk "melaksanakan rencana pengganyangan PKI."[68] Gerakan 30 September akan ditempatkan pada tujuan yang tepat sebagai pembenaran untuk penindasan terhadap PKI sebagaimana yang telah direncanakan – penindasan yang ternyata persis seperti yang telah dijanjikan Nasution: penindasan terhadap PKI pada 1948 tampak lunak belaka.

Walaupun jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak memerlukan jaminan lebih jauh bahwa Amerika Serikat akan menyokong mereka selama serangan pembasmian PKI berlangsung, Kedutaan Besar AS tetap memberi mereka jaminan itu. Duta Besar Green mengirim telegram ke Washington pada 5 Oktober untuk mengusulkan bahwa ia "menyatakan dengan terus terang kepada tokoh-tokoh kunci dalam Angkatan Darat seperti Nasution dan Suharto tentang keinginan kita untuk membantu mereka sejauh kita bisa." Dalam jawabannya Departemen Luar Negeri menyetujui usul tersebut tapi dengan catatan bahwa jenderal-jenderal Angkatan Darat itu harus sudah benar-benar percaya bahwa mereka bisa bersandar kepada Amerika Serikat, "Selama beberapa tahun belakangan hubungan timbal balik yang berkembang melalui program pendidikan, *civic action* dan MILTAG (*Military Assistance Group,* Kelompok Bantuan Militer), demikian pula penyampaian kepastian secara teratur kepada Nasution, tentunya telah terpatri dengan jelas di dalam pikiran pimpinan Angkatan Darat bahwa AS selalu berdiri di belakang mereka apabila mereka memerlukan bantuan."[69] Satu jaminan yang disampaikan Kedutaan Besar AS kepada ajudan Nasution pada pertengahan Oktober ialah bahwa pasukan Inggris yang berhimpun di Malaysia tidak akan memanfaatkan kekacauan di Jakarta dan menyerang pasukan Indonesia yang terlibat dalam konfrontasi. Angkatan Darat bisa terus melanjutkan tindak pembasmian terhadap PKI tanpa khawatir akan ada serangan dari Malaysia. Menurut Kedutaan Besar AS, ajudan Nasution mengutarakan

terima kasihnya, "Ia [ajudan] berkomentar yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa memang itulah yang diperlukan, yaitu dengan memberi jaminan bahwa kami (Angkatan Darat) tidak akan diserang dari segala penjuru ketika kami sedang bekerja membenahi banyak hal di sini."[70]

Ketika pasukan pembunuh menyebar di seluruh negeri memburu massa anggota PKI, Kedutaan Besar AS bergirang hati. Duta Besar Green mengamati pada awal November bahwa bahkan "tokoh teri" dalam PKI pun "secara sistematis ditangkap dan dipenjarakan atau dibunuh." Di Jawa Tengah Angkatan Darat mengerahkan dan mempersenjatai sukarelawan pemuda Muslim untuk "mengajukan mereka untuk berhadap-hadapan melawan PKI." Dalam memo yang sama itu Green menyatakan bahwa Kedutaan Besar AS telah "menjelaskan" kepada kontak di Angkatan Darat "bahwa Kedutaan Besar dan USG [*US Government*, Pemerintah AS] secara umum menaruh simpati kepada dan mengagumi apa yang telah dilakukan Angkatan Darat."[71] Satu-satunya kekhawatiran Green yang tak kunjung hilang ialah bahwa Angkatan Darat akan berkompromi dengan Sukarno dan membiarkan PKI tetap memiliki sementara sisa-sisa kekuasaannya di masa lalu. Green meyakinkan Washington bahwa betapapun Angkatan Darat "sedang bekerja keras untuk menghancurkan PKI dan saya, sebagai pribadi, menjadi makin hormat terhadap kebulatan tekad serta organisasi mereka dalam melaksanakan tugas yang menentukan ini."[72]

Amerika Serikat menyokong kata-katanya yang mengobarkan semangat itu dengan bantuan material. Angkatan Darat memerlukan peralatan komunikasi untuk menghubungkan berbagai markas di seluruh tanah air agar mereka bisa mengoordinasi dengan lebih baik gerak melawan PKI.[73] Suatu ketika pada akhir 1965 Amerika Serikat menerbangkan perangkat komunikasi radio lapangan (*mobile radio*) yang sangat canggih dari Pangkalan Udara Clark di Filipina dan semuanya dikirim ke markas besar Kostrad di Jakarta. Sebuah antena dibawa masuk ke dan dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan penyelidik Kathy Kadane dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi AS di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. "CIA memastikan bahwa frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui sebelumnya oleh *National Security Agency* [NSA,

Badan Keamanan Nasional]. NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sesudah itu para analis menerjemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington." Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detil bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI, misalnya, mendengar "komando-komando dari satuan-satuan intelijen Suharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu."[74] Seorang anggota seksi urusan politik Kedutaan Besar AS, Robert Martens, membantu Angkatan Darat dengan memberikan daftar nama tokoh-tokoh PKI.[75] Martens mengakui dalam suratnya kepada harian *Washington Post* bahwa ia menyerahkan nama "beberapa ribu" anggota partai, yang disebutnya dengan cara menyesatkan sebagai "pimpinan dan kader senior" – seakan-akan sebuah daftar dengan nama sebanyak itu hanya memasukkan pimpinan inti saja.[76]

Kedutaan Besar AS juga mentransfer sejumlah besar uang untuk front sipil ciptaan Angkatan Darat yang disebut Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Aksi-aksi organisasi ini, seperti dicatat Dubes Green, "Sepenuhnya sejalan dengan dan dikoordinasi oleh Angkatan Darat." Untuk membantu KAP-Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan melaksanakan "tindakan-tindakan represif yang ditujukan terhadap PKI saat ini," dalam awal Desember 1965 Green memerintahkan pemberian dana sebesar 50 juta rupiah kepada wakil KAP-Gestapu, Adam Malik.[77]

Meskipun Suharto tidak tergolong dalam kelompok pemikir Yani, ia sangat paham dengan rencana permainan kelompok ini. Seperti sudah direncanakan, Suharto mempertahankan Sukarno sebagai presiden boneka. Sukarno tidak secara resmi digeser dari kedudukannya sampai Maret 1967. Pada awal November 1965 Dubes Green mengakui bahwa strategi Suharto ialah untuk "mendesakkan tekanan dari Angkatan Darat dengan hati-hati dan menguasai pemerintahan tapi ia tidak akan – jika masih bisa dihindari – mengambil alih [kekuasaan] secara terang-terangan selama Sukarno masih hidup."[78] Berlanjutnya keberadaan Sukarno memberi kredibilitas terhadap segala langkah Suharto, seakan-akan semua terjadi atas persetujuan presiden. Angkatan Darat dapat memusatkan represinya terhadap PKI, sementara organisasi-organisasi pro-Sukarno lainnya tetap tinggal netral, atau ikut serta dalam aksi kekerasan. Pimpinan

PKI sendiri masih berharap Sukarno akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menyelamatkan partai dari penindasan Angkatan Darat.

Pada awal November Green juga mengerti bahwa Suharto tidak mendongkel Sukarno untuk memulihkan demokrasi dan membangun kembali pemerintahan sipil. Sesuai dengan ajaran Nasution dan Suwarto, Suharto sedang meletakkan dasar-dasar untuk tatanan politik yang secara keseluruhan didominasi Angkatan Darat. Green menyampaikan kepada Washington, "Angkatan Darat tidak hanya berpikir dari sudut militer saja atau bermaksud menyerahkan hari depan politik Indonesia kepada elemen-elemen sipil. Angkatan Darat membawa orang-orangnya masuk ke semua aspek pemerintahan dan kerangka organisasi dengan maksud [untuk] melakukan kontrol terhadap kecenderungan-kecenderungan dan kejadian-kejadian politis."[79] Sebelum ia secara tak terduga diceburkan ke dalam kepemimpinan Angkatan Darat pada Oktober 1965, Suharto menyadari keberadaan rencana Angkatan Darat untuk menciptakan kediktatorannya sendiri. Nasution dan jenderal-jenderal lain tentu sudah menggenapi pengetahuannya dengan segala detil yang tidak ia ketahui. Mengambil manfaat dari meletusnya G-30-S, Suharto berangsur-angsur melaksanakan rencana yang sudah ada untuk mengubah Angkatan Darat, yang sudah merupakan pemerintah bayangan itu, menjadi pemerintah yang senyatanya.

Dari sejak awal ia mengambil kekuasaan negara pada Oktober 1965, Suharto ingin menautkan Indonesia dengan Amerika Serikat dan mengakhiri politik luar negeri Sukarno yang bebas aktif. Suharto bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, syarat mutlak untuk kediktatoran yang bisa tahan lama, melalui penggabungan yang sangat erat dengan perekonomian Barat. Ia mengisyaratkan dukungannya yang kuat terhadap investasi modal swasta Barat sejak cukup dini. Menyadari keberangan AS terhadap langkah Sukarno menasionalisasikan industri minyak, Suharto secara pribadi menghalanginya dalam sebuah sidang kabinet pada Desember 1965 yang berencana membahas persoalan itu. Wakil Perdana Menteri III, Chairul Saleh, memimpin sebuah sidang pada 16 Desember untuk memutuskan tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak Caltex dan Stanvac. Segera sesudah Saleh membuka sidang, Suharto serta-merta tiba dengan helikopter, memasuki ruangan,

dan dengan pongah menyerukan bahwa, sebagaimana catatan Kedutaan Besar AS dengan sangat gembira menerangkannya, militer "tidak akan mendiamkan tindakan gegabah terhadap perusahaan-perusahaan minyak." Menghadapi ancaman langsung seperti itu, Saleh menunda pembicaraan tentang nasionalisasi industri minyak sampai waktu tak terbatas.[80]

Demi keberhasilannya merebut kekuasaan, Angkatan Darat perlu memamerkan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Angkatan Darat akan bisa memperoleh legitimasi hanya bila masyarakat merasa bahwa ia telah membawa manfaat material yang nyata.[81] Di sinilah tempat pemerintah Amerika Serikat dan para ekonom Indonesia berpendidikan Amerika Serikat memainkan peranan penting. Wakil-wakil Angkatan Darat mulai mendekati Kedutaan Besar AS pada November 1965, meminta pengiriman beras secara rahasia.[82] Karena Amerika Serikat tidak yakin bahwa pengiriman barang-barang perbekalan dalam jumlah besar bisa dijaga kerahasiaannya dan tetap ada di tangan Angkatan Darat saja, maka Kedutaan Besar AS menolak permintaan itu. Amerika Serikat ingin menunggu sampai Angkatan Darat lebih menguasai kendali atas pemerintahan.[83] Segera sesudah Suharto mendemisionerkan kabinet Sukarno pada pertengahan Maret 1966, dengan memenjarakan lima belas menteri serta mengangkat pengganti mereka – sementara itu tetap membiarkan Sukarno sebagai presiden – Amerika Serikat membuka keran bantuan ekonominya: konsesi penjualan 50.000 ton beras pada April, dan 75.000 ton kapas, serta $60 juta kredit pertukaran mata uang asing secara cepat dari Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat pada Juni.[84] Suharto mengangkat para ekonom berpendidikan Amerika Serikat untuk menduduki kementerian-kementerian yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Mereka menebarkan sambutan hangat untuk investasi asing dan mengarahkan ekonomi negeri di sekitar produksi ekspor untuk pasar dunia Barat.[85]

KUP ANGKATAN DARAT

Pada saat yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula, barangkali G-30-S hanya merupakan salah satu kerusuhan sementara dalam

panggung politik Indonesia. Ia bisa menjadi pemberontakan yang tiba-tiba meletus dan kemudian padam diam-diam tanpa menimbulkan perubahan besar apa pun dalam struktur kekuasaan. Sampai pada 1965 Indonesia pascakemerdekaan telah menyaksikan sejumlah percobaan pembunuhan terhadap presiden, pemberontakan militer, dan perlawanan gerilyawan, termasuk misalnya peristiwa 17 Oktober 1952 ketika pasukan Nasution mengarahkan tank-tank ke istana dan menuntut agar Sukarno membubarkan parlemen; pemberontakan Letnan Kolonel Zulkifli Lubis pada November 1956; pemberontakan Darul Islam dari 1949 sampai 1962; pemberontakan PRRI di Sumatra dari 1956 sampai 1958; dan pemberontakan Permesta di Sulawesi dari 1957 sampai 1961. Pembunuhan enam jenderal dan pemberontakan militer di Jawa Tengah pada 1965 bisa jadi sekadar satu krisis sementara lagi yang harus diatasi Sukarno. Tapi Angkatan Darat tidak mau membiarkan G-30-S tetap sekadar sebagai "riak gelombang di samudera luas" yang lain lagi. Peristiwa itu mengakibatkan berakhirnya kepresidenan Sukarno karena ia terjadi pada suatu masa ketika Angkatan Darat telah siap dan bertekad untuk merebut kekuasaan.

Sukarno telah berbuat sekemampuannya untuk memperkecil arti penting G-30-S. Pidato-pidatonya dari sejak akhir 1965 dan seterusnya berisi kutukan keras terhadap tindak kekerasan anti-PKI yang dia yakini, atas dasar penyelidikan komisi yang dibentuknya, telah mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta orang.[86] Kekerasan itu jauh tidak seimbang dengan pembunuhan terhadap enam jenderal dan pemberontakan di Jawa Tengah. Sukarno terus-menerus menyerukan ketenangan, "Betul-betul, Saudara-saudara, *laten wij onze koppen bij makaar houden. Laten wij onze koppen bij makaar houden* [Kita bersama harus tenang, berpikir dingin]." Ia ingin menyelidiki peristiwa itu, menetapkan siapa yang bertanggung jawab, dan menghukum mereka. Tapi Sukarno tahu bahwa Angkatan Darat, dengan menggunakan kekuasaannya atas media, tidak menghendaki terciptanya suasana tenang. Media massa menciptakan segala macam dusta tak masuk akal untuk mengobarkan kampanye antikomunis. Pada awal November 1965 CIA menyatakan bahwa Angkatan Darat telah "menetapkan mekanisme perang urat syaraf, penguasaan media sebagai syarat mutlak untuk memengaruhi pendapat umum dan mengganggu atau menghalangi informasi kaum

komunis."[87]

Sukarno mengeluhkan tentang beberapa kisah tertentu dalam surat-surat kabar, seperti misalnya salah satu yang mengatakan bahwa seratus orang anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menggunakan silet untuk mengiris-iris penis para jenderal, "Apa dikira kita ini orang bodoh! Nadanya ialah apa? Untuk membangun kebencian! Masuk akal? Tidak! Artinya, apa masuk akal, penis dipotong-potong *met 100 giletten*? … *Zijn wij nou een volk van zoo'n lage kwaliteit* [Apakah bangsa kita berkualitas sedemikian rendah] untuk menulis di dalam surat kabar barang yang bukan-bukan!"[88] Ia dibuat meradang oleh arus propaganda antikomunis yang terus-menerus: bahwa mantan perdana menterinya, Djuanda, meninggal karena diracun oleh agen-agen pemerintah Cina Komunis; kursi listrik untuk membunuh orang ditemukan di rumah orang PKI.[89] Pada November Sukarno mengadakan sidang khusus di Istana Bogor untuk para perwira militer dan wartawan, dengan maksud untuk membicarakan hal-hal mustahil yang tak kunjung henti muncul di pers:

"Ayo, sekarang wartawan-wartawan, bagaimana kita punya persuratkabaran! Sekarang ini lo, sekarang! Bolak-balik ya itu itu saja! Bolak-balik itu saja. Nah, Saudara mengerti apa yang saya maksudkan, itu saja. Yaitu selalu Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, silet, silet, silet, silet, silet, lubang seribu orang, lubang seribu orang, lubang seribu orang, kursi listrik, kursi listrik, kursi listrik, bolak balik itu saja!"[90] Sukarno minta agar wartawan hanya menuliskan tentang kejadian yang sebenarnya dan selalu ingat kepada peranan mereka dalam membangun bangsa. Tapi permintaannya berdengung di telinga-telinga tuli. Walhasil, sang orator besar itu dianggap tak bersuara; pidato-pidatonya hampir tidak pernah masuk media. Angkatan Darat tidak hanya memegang bedil, tapi juga menguasai surat kabar dan radio.

Kudeta merangkak Suharto terhadap Sukarno berjalan mulus karena pimpinan tertinggi Angkatan Darat sudah menyusun rencana. Enam orang jenderal dari pimpinan tertinggi menjadi korban G-30-S (suatu akibat yang sesungguhnya tidak dibayangkan di dalam rencana), tapi mereka yang selamat, seperti Suharto, Nasution, dan Sukendro, bisa meneruskan rencana dan mulai melaksanakannya. Sementara mereka tak pelak lagi menghadapi beberapa peristiwa yang tidak diharapkan



Gambar 9. Kartun ini dimuat dalam sebuah surat kabar yang diakui Angkatan Darat yang mendukung kampanye anti-PKI. Gambaran kekerasannya sama seperti kartun-kartun yang terbit dalam koran-koran PKI. Hanya tulisan-tulisannya sekarang dibalik: PKI adalah tokoh jahat yang mengkhianati cita-cita Sukarno dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan imperialis. Gerakan 30 September dilukiskan sebagai seekor ular yang dilukis dengan tulisan “tikaman dari belakang”, “kontra rev”, dan “fitnah”. Ia bersekutu dengan hantu imperialisme dan neokolonialisme (nekolim) Barat di sisi kanan. Si pejuang bertulisan “Rakyat-ABRI” mengayun pedang “Panca Azimat Revolusi” Sukarno. Semboyan yang ditulis di bawah terbaca “Tidak Pernah Lupa Nekolim”. Memberikan pembenaran pada kekerasan anti-PKI dipandang dari sudut cita-cita PKI sendiri (revolusi, Sukarnoisme, dan antiimperialisme) memperlihatkan, bagaimana enggan jenderal-jenderal Angkatan Darat itu jika harus tampil melawan prinsip-prinsip tersebut, bahkan ketika mereka itu telah menerima bantuan dari Amerika Serikat dan merongrong Sukarno.
Sumber: Kompas, 20 Oktober 1965.

dan pada saat-saat tertentu harus mengubah rencana semula, mereka mempunyai strategi dan seperangkat tujuan yang pasti.[91]

Suharto dan jenderal-jenderal sekawanannya memahami prinsip bahwa cara mengambil alih kekuasaan sangat menentukan keberlanjutan rezim baru. Mereka bukanlah perwira-perwira tolol yang hanya bisa mengikuti pola-pola lazim kup militer: mengerahkan tank-tank di jalan-jalan di ibu kota, mengepung istana, dan menangkap, mungkin membunuh, presiden. Mereka menyadari Angkatan Darat tidak mempunyai cukup legitimasi dan dukungan masyarakat untuk melakukan tindakan langsung melawan Sukarno. Strategi Angkatan Darat sesudah kekalahan pemberontakan-pemberontakan daerah tahun 1957-1958 adalah membangun institusi itu sendiri menjadi negara di dalam negara. Para perwira Angkatan Darat telah menjadi pemilik-pemilik pabrik dan perkebunan, birokrat-birokrat dalam administrasi pemerintahan, pemimpin-pemimpin serikat buruh, pemilik surat kabar, dan pelajar-pelajar ekonomi neoklasik. Angkatan Darat telah menunggu waktu sambil membangun kemampuannya untuk mengelola pemerintahan. Angkatan Darat tidak mau merebut kekuasaan negara hanya untuk segera terlepas karena perpecahan intern atau perlawanan yang luas.

Titik tolak rencana permainan Angkatan Darat berupa sebuah aksi yang bisa diartikan sebagai kup dan dituduhkan kepada PKI. Dengan memakai G-30-S sebagai dalih, Suharto dan perwira-perwira sekawanannya menciptakan suasana histeris, penuh krisis yang menggiring semua unsur nonkomunis untuk mempercayai bahwa mereka dalam ancaman bahaya maut. Sekali dimulai, kampanye perang urat syaraf bergulir dengan sendirinya, sementara personil Angkatan Darat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa orang-orang komunis, bahkan para petani di dusun paling terpencil pun, menimbun senjata-senjata bikinan RRT, menggali kuburan massal, membikin daftar orang-orang yang harus dibunuh, dan berlatih cara-cara mencungkil mata. Dengan mengerahkan orang-orang sipil untuk ikut berperan dalam kekerasan, Angkatan Darat memastikan agar kampanye itu tampak mendapat dukungan rakyat. Angkatan Darat dapat tampil sebagai juru selamat bangsa dan pembasmian terhadap kaum komunis tampak sebagai tugas yang patriotik.

Dengan legitimasi yang diperoleh dari kampanye anti-PKI tersebut, Angkatan Darat dalam kedudukan untuk bergerak melawan Sukarno.

Seperti analisis Gedung Putih pada pertengahan Februari 1966 menyatakan, Nasution dan Suharto sesudah "membinasakan PKI … menggunakan pengaruh politik yang telah diperolehnya untuk melawan Sukarno."[92] Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar (yang sebagian dibiayai Kedutaan Besar AS) memperlihatkan gelagat ketidakpuasan massa rakyat terhadap kepresidenan Sukarno. Sesudah disusutkan menjadi sekadar perlambang – yang tak lebih dari tanda tangan di atas dokumen, potret di dinding, boneka pajangan berseragam di upacara – Sukarno selanjutnya didiskreditkan sebagai pendukung PKI dan Gerakan 30 September.

Angkatan Darat, yang merencanakan stabilitas kekuasaannya berumur panjang, berusaha menyandarkan perebutan kekuasaannya pada prosedur-prosedur konstitusional. Semua tindakan Suharto disahkan melalui instruksi-instruksi yang ditandatangani presiden: pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat pada 2 Oktober, pengesahannya sebagai panglima militer keadaan darurat baru yang disebut Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 1 November, dan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada 4 Desember. Suharto bahkan menggunakan instruksi presiden sebagai pembenaran untuk menahan lima belas menteri anggota kabinet Sukarno dan mengangkat menteri-menterinya sendiri. Sukarno, tentu saja, memprotes bahwa perintah yang diberikannya pada 11 Maret 1966 bukan merupakan pemindahan kekuasaan, tapi kata-kata saja tidak mampu menghentikan langkah Suharto terus ke depan.[93] Suharto sangat cermat dalam mengolah prosedur konstitusional, seperti misalnya sidang MPRS yang memilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 (parlemen yang telah dipadati dengan wakil-wakil pilihannya sendiri), sehingga perebutan kekuasaan negara oleh Angkatan Darat tidak akan menampak seperti apa yang sejatinya: kudeta.

Penggabungan yang lihai elemen-elemen berikut – teror massa melawan musuh yang diibliskan, kesepakatan sipil dalam aksi kekerasan anti-PKI, demonstrasi-demonstrasi pelajar-mahasiswa anti-Sukarno, cara-cara perang urat syaraf melalui media massa, permainan-permainan prosedur legalistik – mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana merebut kekuasaan negara. Dibanding dengan kup-kup lain di dunia, kup Angkatan Darat Indonesia merupakan kup yang luar biasa canggih. Suharto bisa berkuasa sepanjang tiga puluh dua tahun

sebagian karena ia dengan berhati-hati merancang cara yang ia pakai untuk merebut kekuasaan. Gerakan 30 September, yang diangkat sampai taraf pengkhianatan bangsa terberat, perwujudan kejahatan mutlak, merupakan sebuah dalih yang sangat berkena baginya untuk memulai strategi Angkatan Darat yang sudah lama ditimbang-timbang untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, menyingkirkan Presiden Sukarno, dan membangun kediktatoran militer.

CATATAN

[1] Karya-karya berikut, dalam menegaskan keterbatasan kekuasaan AS dalam politik Indonesia, ternyata mengabaikan cara-cara yang menunjukkan bahwa AS memang menebar pengaruhnya: Jones, *Indonesia*; Brands, "Limits of Manipulation"; Green, *Indonesia*; Gardner, *Shared Hopes, Separate Fears*.

[2] Kolko, *Confronting the Third World*; Schmitz, *Thank God They're on Our Side*; Kinzer, *All the Shah's Men*; Immerman, *CIA in Guatemala*; Stevenson, *End of Nowhere.*

[3] Wakil Menlu Walter Robertson, dalam memonya kepada J.F. Dulles, menulis bahwa PKI memperoleh "mayoritas mutlak" dari pemilih di Jawa (dikutip dalam Kahin and Kahin, *Subversion as Foreign Policy,* 95).

[4] Dikutip dalam Kahin and Kahin, *Subversion as Foreign Policy,* 86.

[5] *Ibid.*, 94.

[6] "U.S. Policy on Indonesia," NSC 5901, 16 Januari 1959. Kata-kata yang sama muncul belakangan dalam dokumen perbaikan, "U.S. Policy on Indonesia," NSC 6023, 19 Desember 1960.

[7] Tentang nilai bantuan, lihat Kahin and Kahin, *Subversion as Foreign Policy,* 207.

[8] *Ibid.*, 211.

[9] *Ibid.*, 210.

[10] *Ibid.*, 211.

[11] Dikutip dalam Scott, "United States and the Overthrow of Sukarno," 246.

[12] Jones, *Indonesia*, 362.

[13] B. Evans, "Influence of the United States Army," 37, 40.

[14] Rusk kepada Presiden Johnson, 17 Juli 1964, memo dikutip dalam Peter Dale Scott, "U.S. and the Overthrow of Sukarno," 248n46.

[15] Pesan bersama dari State Department, Agency for International Development, U.S. Information Agency, dan Defense Department, 12 Juli 1962, dikutip dalam Simpson,

"Modernizing Indonesia," 115n28.

[16] "Background to Plan of Action for Indonesia," NSC Action Memorandum 195, 2 Oktober 1962, dikutip dalam Simpson, "Modernizing Indonesia," 129.

[17] Sundhaussen, *Road to Power*, 173, 175-177.

[18] B. Evans, "Influence of the United States Army," 28-29, 34-36.

[19] Department of State, "Memorandum Prepared for the 303 Committee," 23 Februari 1965, dalam *FRUS 1964-1968*, 26:235n2.

[20] Lev, "Political role of the Army in Indonesia," 351. Lev menyatakan bahwa Angkatan Darat "berpegang erat-erat pada undang-undang keadaan perang" dan memastikan undang-undang ini diperpanjang lama sesudah pemberontakan PRRI/Permesta berakhir (353). Berlawanan dengan keinginan Angkatan Darat, Sukarno mencabut undang-undang tersebut pada Mei 1963.

[21] Mackie, "Indonesia's Government Estates and Their Masters," 340-41, 344-45, 352-54.

[22] Lihat uraian Nasution sendiri tentang peranan sosial-politik Angkatan Darat semasa Demokrasi Terpimpin, Bab 1 dari *Kekaryaan ABRI*. Bourchier menamai pemikiran politik Nasution "korporatis." Lihat karangannya, "Conservative Political Ideology in Indonesia." Juga lihat Reeve, "Corporatist State."

[23] Dikutip dalam Mrázek, *Sjahrir*, 455.

[24] Pye, "Armies in the Process of Political Modernization," 76, 77, 80, 83, 89.

[25] State Department Policy Planning Council, "Role of the Military in the Underdeveloped Areas," 25 Januari 1963, dikutip dalam Simpson, "Modernizing Indonesia," 115-116.

[26] Pauker, "Role of the Military in Indonesia," 226.

[27] *Ibid*., 225.

[28] *Ibid*., 227.

[29] Ransom, "Ford Country." Pauker membawa Suwarto berkunjung ke Rand pada 1962. Menurut ingatan Kolonel Abdul Syukur, mantan instruktur Seskoad, Pauker menawarinya kesempatan pergi ke Universitas Pittsburgh, tempat belajar Kolonel Sukendro, seorang antikomunis garis keras yang sudah lama menginginkan kup militer (Wawancara dengan Syukur). Syukur, yang dianggap Sukarnois dan pendukung G-30-S, dipenjarakan rezim Suharto selama 1966-1981.

[30] Sundhaussen, *Road to Power*, 165.

[31] Glassburner, "Political Economy and the Suharto Regime," 33.

[32] Ransom, "Ford Country"; Sadli, "Recollections of My Career."

[33] Sundhaussen, *Road to Power*, 188.

[34] *Ibid*., 187-188.

[35] Omar Dani tidak senang dengan pengangkatan Suharto (Surodjo dan Soeparno, *Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku,* 44-56).

[36] Sundhaussen*,* *Road to Power*, 189. Supardjo menyatakan di depan sidang Mahmilub bahwa ia merasa staf Yani dengan sengaja menyabot konfrontasi (transkrip Mahmilub, persidangan Supardjo, sidang kedua, 23 Februari 1967). Mackie memperhatikan keluhan Supardjo dalam bukunya, *Confrontation*, 214.

[37] Sugama, *Memori Jenderal Yoga*, 139; Pour, *Benny Moerdani*, 265-67. Menurut Sugama, Moertopo juga diberi tugas sebagai agen intelijen di Komando Tempur Dua di Sumatra. Namun menurut Moerdani komando ini disebut Komando Tempur Satu.

[38] Sugama, *Memori Jenderal Yoga,* 144; Pour, *Benny Moerdani*, 265-67.

[39] Sugama, *Memori Jenderal Yoga,* 138.

[40] Pour, *Benny Moerdani*, 256-57, 265-67. Pour sangat berhati-hati tentang peranan Moerdani di Bangkok. Ia menulis bahwa Moerdani mengirim para infiltran Indonesia ke Malaysia sesuai dengan strategi konfrontasi, tapi sementara itu juga menyebutkan bahwa Moerdani dan para perwira Angkatan Darat lainnya tidak setuju terhadap konfrontasi.

[41] Sundhaussen, *Road to Power*, 188.

[42] Duta Besar Ellsworth Bunker kepada Presiden Johnson, laporan tak bertanggal [April 1965], "Indonesian-American Relations," dalam Department of State, *FRUS 1964-1968*, 26: 256.

[43] CIA, *Indonesia – 1965*, 190-191.

[44] Tentang komplotan Sukendro, lihat Sundhaussen, *Road to Power*, bab 4. Pada akhir 1965 Sukendro menjadi penghubung penting antara Kedutaan Besar AS dengan pimpinan Angkatan Darat di bawah Suharto dan Nasution. Lihat dokumen yang dihimpun dalam Department of State, *FRUS 1964–1968,* 26: 345-48, 351-53, 357-60, 363-66, 369-70. Sukendro segera tersingkir dari lingkaran Suharto, barangkali karena ia terlalu mandiri, dan dipenjarakan selama sembilan bulan pada 1967. Tentang karier Sukendro di belakang hari, lihat Jenkins, *Suharto and his Generals,* 70-73.

[45] CIA, *Indonesia – 1965,* 191. Mantan kepala pos CIA di Jakarta, B. Hugh Tovar, membantah laporan majikannya ketika ia menulis catatan retrospektif tentang kejadian 1965. Ia mengklaim bahwa "ide tentang Dewan Jenderal yang telah disassuskan selama tahun-tahun itu hanyalah mitos. (Maksud saya benar-benar mitos.) … Tidak ada dewan jenderal yang terpisah atau mandiri dari [staf umum Yani]." Tovar juga menyangkal bahwa Yani dan jenderal-jenderalnya berkomplot menentang Sukarno (Tovar, "Indonesian Crisis of 1965-1966," 323). Mengingat bukti-bukti yang ada tentang rencana komando tertinggi Angkatan Darat berkomplot melawan Sukarno, sukarlah untuk tidak memandang pendapat Tovar sebagai kebohongan.

[46] Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 21 Januari 1965, L.B. Johnson Library, National Security File, Indonesia, vol. 3, box 246, 91. Cukup aneh bahwa dokumen penting ini tidak termasuk dalam jilid *FRUS* mengenai politik AS terhadap Indonesia pada pertengahan 1960-an. Tidak mungkin mempercayai keterangan Tovar bahwa ia "tidak mempunyai petunjuk apa pun bahwa perwira-perwira Angkatan Darat Indonesia sedang berpikir tentang melancarkan kup" (Tovar, "Indonesian Crisis of 1965-1966," 322).

[47] Bunker, "Indonesian-American Relations," 257.

[48] "American-Indonesian Relations," presentasi oleh Howard P. Jones kepada Chiefs of Mission Conference, Baguio, Filipina, Makalah-makalah Howard P. Jones, box 21, Hoover Institution Archive, 12.

[49] Dikutip dalam Subritzky, *Confronting Sukarno*, 126. Peck menulis memo ini pada 27 November 1964.

[50] M.J.C. Templeton kepada Edward Peck, memo, 19 Desember 1964, dikutip dalam Simpson, "Modernizing Indonesia," 263n132.

[51] Neville Maxwell, peneliti Inggris, mendapati dokumen ini di dalam arsip-arsip Pakistan. Suratnya tentang hal ini diterbitkan dalam *Journal of Contemporary Asia* 9, no. 2 (1979): 251-52.

[52] "The Succession Problem in Indonesia," DOS/INR Research Memo RFE-16, 9 Maret 1964, dikutip dalam Simpson, "Modernizing Indonesia," 126.

[53] Ellsworth Bunker kepada Presiden Johnson, "Indonesian-American Relations," tanpa tanggal, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968,* 26:257.

[54] Department of State, "Memorandum Prepared for the 303 Committee," 234-237. Boleh jadi Sukarno memang benar ketika menuduh Kedutaan Besar AS memberi seorang Indonesia uang 150 juta rupiah untuk melakukan kampanye propaganda melawan dirinya (pidato di depan kabinet, 6 November 1965, dalam Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai,* 1:82).

[55] Bunnel, "American 'Low Posture' Policy," 50.

[56] Bunker, "Indonesian-American Relations," 256-57.

[57] Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 23 Agustus 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968,* 26:286.

[58] James C. Thompson Jr., staf NSC, kepada Presiden Johnson, memorandum 14 September 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968,* 26:299.

[59] Benson, dikutip dalam Friend, *Indonesian Destinies,* 102. Kursif penegas sesuai aslinya.

[60] "Special Memorandum Prepared by the Director of the Office of National Estimates of the Central Intelligence Agency," 26 Januari 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:219.

[61] Bunnel, "American 'Low Posture' Policy," 59. Sekali lagi, keterangan Tovar terlihat tidak benar. Ia menulis bahwa CIA "tidak mempunyai rencana cadangan untuk aksi semacam itu" apabila "PKI me-lancarkan kup" (Tovar, "Indonesian Crisis of 1965-1966," 322). Dari dokumen-dokumen yang sudah dideklasifikasikan menjadi jelas bahwa kedutaan besar – termasuk Tovar dan staf CIA – mempunyai rencana cadangan – AS bergantung pada serangan Angkatan Darat terhadap PKI dan akan mendukung Angkatan Darat begitu serangan dilakukan.

[62] Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 6 Maret 1964, *Declassified Documents Quarterly,* 1975, 117C.

63 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 19 Maret 1964, dikutip dalam Brands, "Limits of Manipulation," 794.

64 "American-Indonesian Relations," presentasi oleh Jones, 12.

65 Indonesia Working Group Situation Report, 4 Oktober 1965, dikutip dalam Brands, "Limits of Manipulation," 802.

66 Kawat Pos CIA di Jakarta ke Gedung Putih, 5 Oktober 1965, dikutip dalam Robinson, *Dark Side of Paradise,* 283n23.

67 *Ibid*.

68 Laporan CIA No. 22 (dari Jakarta) ke Gedung Putih, 8 Oktober 1965, dikutip dalam Robinson, *Dark Side of Paradise,* 283.

69 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 5 Oktober 1965; Department of State kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta, 6 Oktober 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:309.

70 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 14 Oktober 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:321.

71 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 4 November 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968,* 26:354.

72 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 20 Oktober 1965, dikutip dalam Simpson, "Modernizing Indonesia," 321.

73 Tentang permintaan mendesak Jenderal Sukendro untuk peralatan komunikasi pada November 1965 dan penyediaan Amerika Serikat untuk peralatan ini, lihat Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:364-66, 368-71, 440-43.

74 Kadane, letter to the editor, *New York Review of Books,* 10 April 1997, hal. 64.

75 Kadane mengungkapkan daftar Martens dalam sebuah artikel yang disebarkan oleh States News Service pada Mei 1990. Banyak surat kabar yang mengutip artikel itu, termasuk *Washington Post* (21 Mei 1990). Lihat juga komentar susulan Kadane dalam suratnya kepada editor *New York Review of Books.* Harian *New York Times* tidak menyiarkan artikel Kadane, tapi salah seorang wartawannya menulis ulasan tentang temuan Kadane itu (Michael Wines, "C.I.A. Tie Asserted in Indonesia Purge," 12 Juli 1990). Kadane menyimpan transkrip-transkrip wawancaranya dengan mantan para pejabat tinggi AS di National Security Archive di George Washington University.

76 Robert Martens, letter to the editor, *Washington Post*, 2 Juni 1990. Comite Central [PKI] terdiri dari sekitar delapan puluh lima orang, dan dari sekitar dua puluh komite provinsi masing-masing terdiri atas kira-kira sepuluh orang. Jika ditambah dengan pimpinan berbagai organisasi kaitannya, misalnya serikat buruh, jumlah seluruhnya menjadi sekitar lima ratus nama. Martens tentunya juga mendaftar nama-nama anggota partai dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Perhatikan juga bahwa ia mungkin sekali telah menyerahkan lebih dari "beberapa ribu" nama. Kadane memperkirakan jumlah seluruhnya sekitar lima ribu nama. Penegasan ulang Martens bahwa nama-nama yang didaftar bukanlah "anggota kebanyakan," tidak cukup menenteramkan hati, bahkan andaikata ia benar sekalipun. Ia memberikan

daftar nama-nama itu selama enam bulan. Dalam masa itu ia tentu tahu bahwa mereka yang nama-namanya masuk dalam daftar bisa jadi memang sudah dibunuh. Seperti yang ditulis dalam sebuah memo Duta Besar Green, bahkan "tokoh teri" sekalipun dibunuh.

77 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 2 Desember 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:379-80. Sekali lagi Tovar memperlihatkan dirinya tak bisa dipercaya. Dalam artikelnya pada 1994 ia menampik tuduhan bahwa CIA telah memberi uang kepada kelompok mahasiswa dan pelajar dan menjelek-jelekkan para penuduhnya sebagai "orang-orang kiri, sebagian dari mereka bersimpati kepada PKI atau Sukarno, dan selebihnya orang-orang yang sekadar anti-Amerika." Bagi Tovar hanya orang yang tidak patrotik yang bisa mempercayai sassus demikian tentang CIA. Ia menggertak dengan congkak, "Saya tidak keberatan dituduh tentang apa yang saya lakukan. Tapi saya benci dilempari sesuatu yang tidak saya lakukan." (Tovar, "Indonesian Crisis of 1965-1966," 336). Deklasifikasi dokumen-dokumen ini tidak menguntungkan Tovar.

78 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram 4 November 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:355-56.

79 *Ibid*., 26:355.

80 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 16 Desember 1965, dikutip dalam Simpson, "Modernizing Indonesia," 343. Suharto menempatkan Chairul sebagai tahanan rumah pada 16 Maret 1966, dan sebulan kemudian ia dipenjarakan. Chairul meninggal dalam keadaan yang mencurigakan di Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta pada 8 Februari 1967. Penjelasan militer menyatakan, ia tewas karena serangan jantung, yang diterima teman-teman dan keluarganya dengan keraguan. Ia berumur empat puluh sembilan tahun dan dalam keadaan sehat walafiat (Soewito, *Chairul Saleh*, 138-147).

81 Duta Besar Green menyatakan bahwa Angkatan Darat akan "mampu pada gilirannya mempertahankan kekuasaannya" hanya apabila ia dapat "menunjukkan hasil-hasil konkret dalam menangani masalah-masalah ekonomi dan administrasi yang sangat besar" (Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, telegram, 22 Desember 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:390).

82 Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Department of State, 28 November 1965, dikutip dalam Robinson, *Dark Side of Paradise*, 285. Juga lihat Director of the Far Eastern Region, Blouin, kepada Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Friedman), memorandum, 13 Desember 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:383-85.

83 Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:393n2, 401-2, 405, 407-9.

84 Ropa kepada Rostow, 9 Juli 1966, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:444, dan Rusk kepada Johnson, 1 Agustus 1966, 26:452.

85 Tentang peranan para ekonom di masa rezim Suharto ini, lihat Winters, *Power in Motion.*

86 Toer dan Prasetyo, *Memoar Oei Tjoe Tat,*192.

87 Memorandum disiapkan di CIA, Washington, "Covert Assistance to the Indonesian

Armed Forces Leaders," 9 November 1965, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968*, 26:362.

[88] Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai,* I:89.

[89] *Ibid*., 44, 156.

[90] *Ibid*., 163.

[91] Tentang hal ini saya tidak sependapat dengan Robert Elson, yang mengatakan bahwa Suharto, sesudah menjadi pemangku (*caretaker*) panglima Angkatan Darat, "tidak mempunyai strategi yang jelas tentang bagaimana harus bertindak lebih lanjut, tidak juga tahu untuk tujuan apa." Suharto melangkah ke depan "dengan waspada, hati-hati, dan sensitif," selama berbulan-bulan, "meraih kekuasaan saat kekuasaan itu datang kepadanya" tanpa dipimpin oleh "visi megah atau skema utopia apa pun" (*Suharto*, 120-121). Lihat tinjauan saya terhadap buku Elson dalam "Violence in the Suharto Regime's Wonderland."

[92] Catatan brifing untuk Presiden Johnson, 15 Februari 1966, dalam Department of State, *FRUS 1964–1968,* 26:403.

[93] Setiyono dan Triyana, *Revolusi Belum Selesai*, 2:184-85.

7

MENJALIN CERITA BARU

Syahdan, tatkala para datuk petinggi negeri dan datuk-datuk serta ksatria lainnya telah dipenggal kepalanya dan disingkirkan, maka berpikirlah sang hulubalang raja, selagi orang-orang masih sedang merenungi apa yang telah terjadi, dan sementara para datuk istana tak siaga dan tak kuasai jabatan, dan ketika tidak satu orang pun tahu apa yang harus dipikirkan dan siapa yang bisa dipercaya, sebelum mereka sempat berbantah, mencerna soal, dan menata ulang gugus-gugus sekutu mereka: yang terbaik baginya adalah bergerak secepat mungkin dan merebut tampuk kekuasaan sendiri. Tapi kemudian muncul soal pelik baginya, bagaimana ia harus sampaikan kisah tentang suatu peristiwa yang demikian mengerikan sehingga orang akan memafhumi kisah itu.

Thomas More, **The History of Richard III (1513)**

Ahli teori sastra Tzvetan Todorov berpendapat bahwa karya fiksi detektif menggabungkan dua bentuk gaya cerita yang berbeda: "kisah tentang penyelidikan" (bagaimana sang detektif menjadi tahu apa yang telah terjadi) dan "kisah tentang kejahatan" (apa yang sebenarnya telah terjadi).[1] Pola umum sebuah novel detektif, seperti dicatat Slavoj Žižek, ialah mengikuti sang detektif dalam perjalanan penyelidikannya, dan kemudian menyimpulkannya dengan rekonstruksi tentang kejahatan tersebut. Maka buku ini berakhir "bukan ketika kita memperoleh jawaban tentang 'Siapa yang melakukan kejahatan?'

tapi ketika sang detektif akhirnya mampu mengisahkan 'kisah yang sebenarnya' dalam bentuk narasi linier."[2] Setiap bab dari empat bab terdahulu (bab 3 sampai bab 6) terpusat pada keping bukti atau jenis bukti tertentu. Bab-bab ini berkembang mengikuti logika penyelidikan seorang detektif, bukan menuruti kronologi cerita dari si juru kisah; masing-masing mengajukan penyelesaian untuk satu bagian teka-teki sesudah memeriksa sejumlah bukti yang terbatas. Namun demikian, apa yang terdapat di dalam bab ini hendaknya tidak dipandang sebagai "kisah yang sebenarnya." Yang bisa saya nyatakan di sini hanyalah bahwa peristiwa-peristiwa *mungkin* terjadi seperti yang saya ceritakan. Keterbatasan bukti yang ada mengakibatkan ketidakmungkinan bagi sejarawan detektif untuk menjelaskan setiap keanehan, mengisi setiap ruang kosong, dan mengenali dengan tepat peranan setiap orang yang terlibat.

Penyelidikan saya dimulai dengan dokumen Supardjo, bukan karena Supardjo tokoh yang paling penting dalam G-30-S, tapi karena dokumennya merupakan sumber utama paling kaya serta paling bisa dipercaya yang ada. Bab 3 menarik sejumlah kesimpulan sempit dari teks Supardjo. Yang paling penting berkenaan dengan persoalan yang sudah lama tidak terpecahkan tentang identitas kepemimpinan G-30-S: Apakah para perwira militer (Untung, Latief, dan kawan-kawan) ataukah tokoh-tokoh PKI (Sjam, Pono, dan lain-lain) yang memimpin G-30-S? Dokumen Supardjo menunjukkan bahwa, dari lima pimpinan inti yang berkumpul di pangkalan udara Halim, pimpinan utama mereka ialah Sjam. Ini menampik interpretasi Anderson dan Crouch (diuraikan dalam bab 2) yang menyatakan bahwa perwira-perwira militer itu memainkan peran dominan. Dengan berpegang pada kesimpulan itu, bab 4 beralih pada masalah identitas Sjam. Bab ini, sebagian besar bertumpu pada wawancara lisan dengan mantan pemimpin PKI yang mengenal Sjam, juga menarik kesimpulan sempit: Sjam seorang bawahan setia Aidit. Ini menampik hipotesis Wertheim (juga diuraikan dalam bab 2) bahwa Sjam seorang agen intelijen Angkatan Darat yang bekerja untuk menjebak PKI. Lalu bab 5 memusatkan perhatian pada Aidit dan mengajukan bukti yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan sementara mantan pimpinan PKI, baik melalui pidato pledoi mereka di sidang pengadilan, maupun dalam wawancara-wawancara lisan dengan saya, yang memperlihatkan kerja sama Aidit dengan Sjam untuk mengorganisasi G-30-S sebagai

serangan mendahului terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat sayap kanan. Kesimpulan ini bukan merupakan penegasan terhadap interpretasi rezim Suharto karena kesimpulan ini menunjukkan bahwa hanya Aidit dan Sjam yang patut dipersalahkan, bukan pimpinan partai secara keseluruhan.

Identitas orang-orang yang ikut dalam G-30-S dan alasan mereka bergabung merupakan fokus penyelidikan saya dalam bab 3 sampai bab 5. Bab 6 beralih pada pertanyaan tentang tanggapan Angkatan Darat terhadap G-30-S: Mengapa Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto membesar-besarkan arti penting G-30-S dan menjadikannya sebagai peristiwa bersejarah? Bagaimana G-30-S dikeramatkan begitu rupa sehingga peristiwa itu bisa menyingkirkan pembunuhan massal 1965-1966 dari ingatan masyarakat Indonesia? Bab 6 yang sebagian besar disusun berdasarkan dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang telah diklasifikasikan mengajukan argumen bahwa eselon atas korps perwira Angkatan Darat menunggu saat yang tepat untuk menyerang PKI dan menyingkirkan Presiden Sukarno. Mereka mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan negara. Mereka mengubah G-30-S menjadi dalih yang sudah lama mereka tunggu. Barangkali Suharto sudah tahu sebelumnya bahwa Latief dan Untung merencanakan suatu aksi, tapi sukar dipercaya bahwa ia ikut campur dalam merancang G-30-S, apalagi mendalanginya. Ambruknya G-30-S bisa dijelaskan tanpa mengacu ke hipotesis bahwa Suharto pribadi, atau perwira Angkatan Darat lainnya, sengaja mengorganisasinya untuk gagal. Tanggapan Suharto yang cepat dan efisien terhadap G-30-S merupakan buah dari persiapan jenderal-jenderal Angkatan Darat menghadapi peristiwa yang sudah diperkirakan sebagai kemungkinan serupa yang terjadi dan dari pengetahuan Suharto sebelumnya tentang G-30-S.

Kelemahan penyelidikan-penyelidikan tentang G-30-S terdahulu terletak pada titik tolak mereka: dugaan bahwa pasti ada dalang di balik gerakan itu. Menurut hemat saya tidak ada “otak” utama, apakah ia berupa seorang tokoh, ataukah suatu gugus rapat orang-orang yang terorganisasi mengikuti pembagian kerja serta hierarki kewenangan yang jelas. G-30-S menjadi bersifat misterius justru karena tidak adanya pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Seseorang yang paling dekat dengan para penggerak inti pada saat aksi berjalan, Supardjo, dibingung-

kan dalam hal siapa pemimpin gerakan ini yang sesungguhnya. Seperti dikemukakan Supardjo, tokoh pusat dalam G-30-S, sejauh tokoh itu ada, ialah Sjam. Namun Sjam berfungsi sebagai penghubung antara Aidit dan para perwira progresif. Ia menjadi pusat karena kedudukannya yang di tengah-tengah, bukan karena penguasaannya atas semua kekuatan di dalam G-30-S. Aidit bertanggung jawab atas personil-personil PKI yang terlibat dalam G-30-S, sedangkan Untung, Latief, dan Soejono bertanggung jawab atas personil-personil militer. Dua kelompok ini melibatkan diri dalam sebuah aksi yang, karena ketiadaan pilihan lain, mengubah perantara mereka menjadi si pemimpin. Sjam adalah seorang mediator yang perlahan-lahan hilang: ia mempertemukan kedua kelompok itu untuk melancarkan aksi tapi tidak dalam posisi untuk memimpin mereka begitu aksi tersebut dimulai. Ia tidak seperti seorang jenderal militer yang bisa memimpin komplotan kup dari awal sampai akhir, seperti cara Kolonel Qasim melakukannya di Irak pada 1958, atau Kolonel Boumedienne di Aljazair pada 1965. Sekali aksi telah menyimpang dari rencana dan para peserta aksi harus berimprovisasi, mereka pun berpencaran ke arah yang berbeda-beda. Kekacauan dan ketidakjelasan G-30-S akhirnya melumpuhkan gerakan itu sendiri dalam menghadapi serangan balik Suharto yang tak terduga. Tidak adanya pusat itulah yang membikin bingung peserta G-30-S saat itu, dan terus membikin bingung para sejarawan yang berusaha memahami gerakan ini.

Sekaranglah saatnya untuk menghimpun semua temuan yang berserakan dan merekonstruksi peristiwa demi peristiwa 1965. Dalam bab terakhir ini saya kemukakan narasi kronologis secara singkat yang memberikan pemecahan terhadap banyak keanehan yang sudah saya kemukakan dalam dua bab pertama. Sambil kembali ke pangkal bertolak dan menutup rangkaian tulisan ini, saya akan menandai bagian-bagian kelabu ketidakpastian yang menghambat penyelesaian terhadap teka-teki ini bisa dianggap tuntas.

KONFIGURASI KEKUASAAN SEGITIGA

Bayangkanlah suasana di Jakarta pada 23 Mei 1965 berikut ini. Stadion Senayan yang terletak tidak jauh dari istana presiden dan gedung parlemen

dibanjiri manusia. Puluhan ribu orang memadati tribun yang mengelilingi lapangan stadion, sementara ribuan manusia lagi berdiri di lapangan yang terhampar di bawah. Di luar, di lapangan parkir dan jalan-jalan di sekitarnya lebih dari 100.000 orang saling berdesak-desakan. Sungguh-sungguh seperti lautan manusia. Itulah peristiwa peringatan ulang tahun ke-45 berdirinya PKI. Dilihat dari besarnya massa, partai belum pernah dalam keadaan lebih sehat. Untuk memberi kesempatan lebih banyak orang berkumpul di sekitar stadion dan mencegah kemacetan lalulintas, partai menghalangi niat pengendara mobil lewat kawasan itu. Dengan membawa bingkisan kecil makanan dari rumah untuk makan siang, orang-orang berjalan kaki masuk kota dari desa-desa yang jauh. Bendera-bendera merah dan baliho-baliho raksasa dengan potret-potret pahlawan partai, seperti Karl Marx dan V.I. Lenin, berderet di jalan-jalan ibu kota. Sebuah monumen dari kerangka kayu berbentuk angka *45* yang dilapisi kanvas (tentu saja berwarna merah) tegak terpancang di salah satu jalan utama, menjadikan segala yang di sekitarnya tampak kerdil. Mereka yang berbaris memasuki stadion dalam wacana populer mendapat julukan "semut merah": banyaknya tak terbilang, tertib, disiplin, siap mengorbankan diri tapi militan, dan sanggup menyengat jika diganggu. Prajurit semut merah ini, di mata Sukarno, merupakan pemandangan kejayaan yang megah. Ia menyambut acara itu dengan bahagia dan menyampaikan pidato berapi-api dari podium, penuh pujian terhadap patriotisme partai dan semangat perjuangannya melawan kekuatan kolonialisme dan neokolonialisme dunia. Perayaan 23 Mei ini hampir merupakan ulangan peringatan Hari Buruh 1 Mei yang diadakan di stadion yang sama hanya tiga pekan sebelumnya. Menyelenggarakan dua kali rapat raksasa dalam Mei, PKI dengan caranya yang meyakinkan memamerkan apa yang sudah menjadi dugaan banyak orang di Indonesia, bahwa partai ini merupakan partai politik paling besar dan paling terorganisasi dengan baik di Indonesia. Tidak ada partai politik lain yang bisa berharap untuk mengorganisasi rapat-rapat sebesar itu. Wartawan *New York Times* yang hadir di lapangan mengatakan bahwa perayaan-perayaan peringatan itu merupakan "yang paling mewah yang pernah diselenggarakan partai politik di sini."[3] PKI memiliki kombinasi yang langka antara kecukupan dana, keanggotaan yang sangat luas, dan dukungan presiden.

Kekuatan PKI yang mengagumkan merupakan fakta sangat penting

yang memengaruhi seluruh konfigurasi kekuasaan di Indonesia. Sebagian dari kalangan korps perwira Angkatan Darat melihat semut-semut merah tersebut dengan kekhawatiran. Partai tampil sebagai ancaman bagi kekuatan Angkatan Darat di panggung politik dalam negeri dan keuntungan yang mereka peroleh dari perusahaan-perusahaan milik negara, karena di sanalah para manajer Angkatan Darat sering menghadapi aksi-aksi para pekerja yang diorganisasi serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI. Banyak perwira berasal dari keluarga terpandang dan berkecukupan. Kerabat mereka yang tinggal di kota-kota dan desa asal mereka menjadi anggota parpol-parpol yang antikomunis. Dua komandan tertinggi, Nasution dan Yani, yang sangat memusuhi PKI, senantiasa bersiasat untuk menghambat pertumbuhan partai selama bertahun-tahun. Mereka mengindoktrinasi korps perwira tentang antikomunisme dan memastikan bahwa Angkatan Darat berfungsi sebagai patron pelindung politisi sipil yang menentang PKI. Ilmuwan Amerika Daniel Lev menyatakan bahwa pada awal 1960-an masyarakat sipil nonkomunis "masih teramat ketakutan dan benci akan ancaman radikal yang diperlihatkan PKI terhadap kepentingan mereka di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Mereka berharap kepada Angkatan Darat, yang bagi mereka kurang menakutkan ketimbang PKI, untuk perlindungan sepenuhnya."[4] Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa komando tertinggi Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut kekuasaan negara, baik melalui kotak suara maupun dengan peluru. Dua lembaga itu pada 1965 mati langkah: PKI menguasai politik sipil, sedangkan Angkatan Darat mengendalikan lebih dari 300.000 prajurit bersenjata.

Di antara dua kekuatan yang saling berhadapan ini berdirilah Presiden Sukarno. Sejak Sukarno membubarkan parlemen hasil pemilu pada 1959 dan memusatkan kekuasaan di lembaga kepresidenan, ia berperanan ibarat sebuah pengganjal bagi dua kekuatan itu. Banyak perwira militer dan politisi antikomunis mendukung tindakannya memperoleh kekuasaan diktatorial dengan harapan Sukarno akan menjadi perintang bagi PKI. Sukarno pribadi bukanlah seorang pengagum besar PKI; ia mendukung penindasan terhadap partai pada 1948 (dalam peristiwa Madiun). Kaum antikomunis puas terhadap sistem presidensiil yang kuat di bawah Sukarno, yang disebutnya Demokrasi Terpimpin, karena sistem

ini tidak didasarkan pada pemilu. Semua pengamat percaya ketika itu bahwa PKI akan merebut suara terbanyak seandainya pemilu diadakan lagi. Pada pemilu daerah 1957 PKI tampil sebagai partai nomor satu untuk DPRD di Jawa Tengah, dan nomor dua untuk DPRD di Jawa Timur dan Jawa Barat. Bagi unsur-unsur anti-PKI anggota DPR pusat yang ditunjuk Sukarno lebih baik ketimbang yang dipilih secara demokratis yang akan dikendalikan partai.[5] Pada 1963 elemen-elemen antikomunis memprakarsai mosi di DPR yang mengangkat Sukarno sebagai "Presiden Seumur Hidup" untuk memastikan bahwa seorang komunis tidak akan pernah menguasai pemerintah.

Keanehan politik Indonesia di bawah Demokrasi Terpimpin dari 1959 sampai 1965 adalah bahwa Sukarno berperanan sebagai perisai bagi mereka yang antikomunis dan sekaligus bagi mereka yang komunis.[6] PKI bisa berkembang selama periode ini berkat perlindungan Sukarno. Ketika Angkatan Darat membekukan cabang-cabang partai di beberapa daerah pada 1960 dan menggelisahkan pimpinan partai di Jakarta, Sukarno turun tangan. Para perwira Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas tindak penindasan itu, misalnya Kolonel Sukendro, dihukum.[7] Presiden membutuhkan PKI sebagai basis massa untuk memopulerkan agendanya, terutama perjuangannya melawan apa yang dinamakannya "*old established forces*" dan nekolim (kekuatan-kekuatan neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme). Kebijakan luar negeri presiden dan PKI sejalan. Sukarno juga membutuhkan PKI sebagai kekuatan tawar dalam urusannya dengan Angkatan Darat. Partai merupakan jaminan baginya bahwa Angkatan Darat tidak akan bisa dengan gampang mendongkelnya.

Pada saat berlangsung rapat umum-rapat umum "semut merah" di Jakarta, imbangan kekuatan segitiga – PKI, Angkatan Darat, dan Sukarno – mulai pecah berantakan. Ketika PKI semakin menjadi besar, Sukarno semakin condong ke kiri ketimbang ke kanan. Upaya kaum antikomunis untuk merebut hatinya dengan membentuk "Badan Pendukung Sukarnoisme" (BPS) dalam Desember 1964 gagal. Yang dikira akan diuntungkan BPS justru melarang badan tersebut tidak lama sesudah dibentuk. Ia kemudian melarang parpol yang berada di belakang badan itu (Murba) dan mengurangi kekuasaan salah satu dari wakil-wakil perdana menterinya, Chairul Saleh, yang terkait dengan partai tersebut.

Kelompok-kelompok antikomunis menjadi semakin cemas pada 1965, merapatkan barisan di belakang Angkatan Darat, dan percaya bahwa kegunaan Sukarno sebagai penghambat PKI sudah selesai. Sisi kanan segitiga itu mulai membayangkan satu sistem politik di luar Sukarno, suatu sistem tanpa kehadirannya sebagai penengah dan yang demikian berpengaruh di mana-mana.

Sementara itu PKI mulai tidak sabar terhadap batasan-batasan yang dibebankan oleh konfigurasi segitiga ini. Partai menjadi terkurung. Sampai 1965 ia telah tumbuh menjadi partai politik yang paling besar, tapi ia tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui kotak-suara – tidak ada pemilu untuk bersaing. Jalan parlementer menuju kekuasaan telah ditutup sejak 1959 dan tampaknya tidak akan pernah dibuka kembali. PKI juga tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui peluru. Partai tidak mempunyai sayap bersenjata dan tidak berniat mengangkat senjata melawan pemerintah. Semua anggotanya orang-orang sipil. Partai mendapat dukungan massa, tapi tidak beroleh kewenangan yang seimbang dalam pemerintahan Sukarno. Kendati partai bekerja keras dalam berkampanye untuk kebijakan-kebijakan Sukarno, terutama kampanye konfrontasi mengganyang Malaysia pada 1963, pimpinan partai kesulitan memperoleh posisi di dalam kabinet. Sedikit saja tokoh partai yang diangkat menjadi menteri dan dari yang sedikit itu tidak satu orang pun mendapat posisi dengan wewenang yang konkret. Aidit dan Njoto adalah menteri-menteri hanya dengan peranan sebagai koordinator atau penasihat. Untuk menenteramkan elemen antikomunis, Sukarno memberikan semua kementerian penting yang menguasai anggaran besar atau jumlah pegawai yang banyak (misalnya pertahanan, dalam negeri, keuangan, industri, dan perkebunan) kepada tokoh-tokoh non-PKI. Pengaruh PKI di tingkat paling atas pemerintahan hampir tidak sepadan dengan pengaruhnya di kalangan masyarakat.

Karena tidak memiliki kendali langsung atas kekuatan politik negara, PKI menggunakan massa pengikutnya untuk mendorong negara bergeser ke kiri pada 1965. Demonstrasi-demonstrasi anti-Amerika yang dipimpin partai dan organisasi-organisasi terkait memaksa penutupan kantor-kantor konsulat Amerika Serikat di luar Jakarta dan penarikan mundur Korps Perdamaian (*Peace Corps*).[8] Aksi-aksi kaum buruh dan aktivis partai di Sumatra terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan perkebunan-

perkebunan milik Amerika Serikat mendesak pemerintah agar bertindak menasionalisasi kekayaan mereka. PKI memobilisasi sukarelawan untuk kampanye melawan Malaysia dan mengusahakan agar mereka mendapat latihan kemiliteran. Sukarno sedang menimbang-nimbang gagasan PKI untuk membentuk "angkatan kelima" – sukarelawan bersenjata di luar empat angkatan bersenjata yang sudah ada (angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian) – dan memasukkan "komisaris-komisaris politik" di dalam ketentaraan. Sementara aktivis partai, yang dibuat semakin berani oleh seringnya mereka berdemonstrasi, yang menghadapi sedikit tentangan dari kalangan angkatan bersenjata, membayangkan aksi-aksi yang lebih militan dan lebih besar lagi melawan "kapitalis birokrat" – istilah yang memasukkan perwira-perwira Angkatan Darat karena mereka memiliki sangat banyak perusahaan dan menduduki jabatan-jabatan dalam birokrasi.

Momentum kejadian-kejadian itu menguntungkan PKI. Sementara politisi nonkomunis, yang menduga kenaikan partai tidak bisa lagi dielakkan, memperlunak sikap "komunisto fobia" mereka (istilah Sukarno yang bernada celaan) dan berharap bahwa partai akan tetap bersedia bekerja sama dengan partai-partai lain serta mengesampingkan perjuangan kelas. Garis resmi politik partai adalah mendukung "front persatuan" dari semua kekuatan antiimperialis dan patriotik. Tapi sementara pihak takut bahwa partai akan tetap merupakan organisasi yang secara fundamental sektarian dan cenderung berjuang untuk merebut kekuasan negara.

Peranan Sukarno sebagai pengganjal kelihatan melemah. Namun ia tetap merupakan simbol patrotisme dan persatuan nasional yang tak tergoyahkan. Ia tidak bisa dengan mudah didongkel oleh pihak sini atau sana karena kedua-duanya selama enam tahun terakhir sudah saling berlomba untuk diakui sebagai lebih Sukarnois daripada yang lain. Baik kekuatan-kekuatan PKI maupun anti-PKI telah membangun popularitas Sukarno sehingga kedua-duanya tidak bisa dengan cepat berbalik arah. Sukarno menjaga citranya yang bersih di tengah krisis ekonomi dan kekacauan administratif. Kebobrokan-kebobrokan itu umumnya tidak dilempar kepadanya, melainkan kepada unsur-unsur pemerintahan di bawah dia. Gaya komunikasi Sukarno dengan rakyat yang langsung dan terbuka dan jejak langkahnya yang panjang sebagai pemimpin dalam perjuangan antikolonialisme membikin sulit bagi siapa pun untuk meragukan

ketulusannya. Pembawaan kosmopolitan dan keberaniannya menentang bangsa-bangsa maju dan kaya, seperti Amerika Serikat, menyebabkan banyak warga bangsa yang baru merdeka ini merasa bangga menjadi orang Indonesia. Selama tahun-tahun Demokrasi Terpimpin, kultus dibangun di sekeliling Sukarno sedemikian rupa sehingga ia mampu menuntut kesetiaan seluas-luasnya, tanpa syarat.

Pimpinan tertinggi Angkatan Darat, meskipun frustrasi oleh sikap Sukarno yang condong ke PKI pada 1965, menyadari bahwa ia terlalu populer untuk di-gulingkan melalui kudeta secara langsung. Kup seperti itu tidak akan menjamin stabilitas tertib politik apabila banyak orang, termasuk para perwira muda Angkatan Darat, masih tetap Sukarnois yang berkobar-kobar. Para perwira yang berpengalaman, seperti Nasution, bersikeras agar Angkatan Darat menunggu waktu. Jika hanya mendongkel Sukarno itu tugas sederhana saja. Tapi menegakkan kekuasaan Angkatan Darat yang tahan waktu merupakan masalah yang lebih sulit. Pimpinan tertinggi Angkatan Darat tidak ingin memenangkan satu pertempuran mudah hanya untuk menderita kekalahan dalam seluruh perang. Di bawah pimpinan Yani selama 1965 Angkatan Darat menentang tuntutan PKI untuk mempersenjatai sukarelawan ("angkatan kelima") dan memasukkan komisaris-komisaris politik ke dalam angkatan bersenjata. Yani tidak membolehkan Angkatan Darat terpancing dalam tindakan gegabah melawan Sukarno.

Terlepas dari strategi kesabaran Yani, banyak pihak di Indonesia pada pertengahan 1965 percaya bahwa Angkatan Darat akhirnya akan melancarkan kup dan dengan kekerasan akan menghentikan daya upaya PKI untuk berkuasa. Sassus terus beredar, terutama sesudah Subandrio – orang nomor dua di pemerintahan (yang sekaligus juga wakil perdana menteri pertama dan menteri luar negeri) – pada akhir Mei menyiarkan turunan sebuah telegram rahasia yang dikirim Duta Besar Inggris kepada kementerian luar negerinya di London. Telegram ini menyebut tentang "kawan-kawan militer setempat kita" yang sedang menggarap suatu "usaha" tersembunyi yang tidak disebutkan namanya.[9] Dokumen itu bisa jadi dokumen palsu. Namun demikian, dokumen tersebut ketika itu diyakini otentik karena ia membenarkan kecurigaan di kalangan Sukarnois bahwa Amerika Serikat dan Inggris sedang merancang kup bersama pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

PERENCANAAN AIDIT

Pimpinan PKI menaruh perhatian mendalam terhadap kabar burung tentang kudeta. Bahwa kabar burung itu datang dari berbagai penjuru agaknya memperkuat kesahihannya, bahkan andaikata orang hanya mengulang-ulang gagasan taksa yang mereka dengar dari tangan kedua sekalipun. Ketua partai, D.N. Aidit, pada pertengahan 1965 mencari informasi yang lebih tepat dan konkret. Ia memerintahkan Sjam agar Biro Chusus menyelidiki jaringannya dalam kalangan militer dan badan-badan intelijen untuk mencari tahu tentang kebenaran kabar burung tersebut. Biro Chusus, yang semula dipimpin Karto dari awal 1950-an sampai sekitar 1963-64, telah mengembangkan jaringan luas di kalangan para perwira, yang bersedia memberikan informasi intelijen kepada partai. Dari informasi yang terkumpul Sjam menyimpulkan bahwa jenderal-jenderal sayap kanan di bawah Yani memang sedang merancang kup.

Aidit mempunyai cukup alasan untuk memercayai informasi Sjam. Memang mudah membayangkan bahwa jenderal-jenderal Angkatan Darat itu berkomplot untuk melakukan kup. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menanggapinya. Aidit menimbang-nimbang pilihan-nya pada pertengahan 1965. Ia mempunyai dua pilihan dasar: menunggu kup terjadi dan baru memberikan tanggapan atau mengambil semacam tindakan mendahului untuk mencegah kup terjadi. Kedua pilihan masing-masing mempunyai untung dan ruginya. Kerugian pilihan sikap tunggu dan lihat sudah jelas. Jika Yani dan para pang-limanya meng-gulingkan Sukarno, mereka akan segera menodongkan senjata mereka ke arah PKI. Represi bisa menjadi pertumpahan darah hebat karena partai tidak mempunyai senjata untuk mempertahankan diri. Aidit yakin bahwa angkatan-angkatan bersenjata lainnya – kepolisian, udara, dan laut – tidak akan mendukung kup Angkatan Darat dan tindakan represi antikomunis itu. Ia juga yakin bahwa para perwira sayap kiri dalam Angkatan Darat sendiri akan menentang. Namun demikian, kemungkinan pertempuran perebutan kekuasaan pascakup semacam itu tentu mencemaskannya. Bahkan seandainya ia menduga kaum komunis dan Sukarnois pada akhirnya mempunyai kesempatan baik untuk menang pun, ia tentu sadar bahwa kemenangan itu tidak terjamin dan bisa jadi berimbas terlalu besar. Sebelum klik Yani bisa dikalahkan, perjuangan untuk kekuasaan itu akan

menuntut banyak korban. Satu-satunya keuntungan dari pendekatan tunggu dan lihat ini hanyalah ia memberi kesempatan kepada Angkatan Darat untuk mengambil langkah pertama. Ketidakpastian kabar burung akan berakhir begitu jenderal-jenderal antikomunis itu memperlihatkan jati diri mereka. Dengan melancarkan kup jenderal-jenderal ini akan membuktikan ke seluruh tanah air bahwa mereka adalah musuh-musuh kekuatan sayap kiri dan Sukarnois pada umumnya. Perlawanan terhadap kup akan memberi kepastian tentang watak khianat lawannya.

Di pihak lain, keuntungan tindakan mendahului adalah ia akan menyelamatkan bangsa dari keharusan mengalami perang saudara. Bagi Aidit kekuatan kaum progresif di tanah air – PKI bersekutu dengan pengikut Sukarno – merupakan mayoritas warga negara Indonesia. Mereka menghadapi faksi perintang minoritas dalam Angkatan Darat yang kekuatannya hanya terletak pada laras senjata. Jika faksi ini bisa dihentikan sebelum ia sempat melepas tembakan, subyek revolusioner PKI, yaitu "Rakyat," bisa terhindar dari berbagai penderitaan dan kekacauan.

Kerugian sikap mendahului terletak pada tuntutan logistiknya yang sangat merepotkan: bagaimana partai bisa bergerak melawan para pemimpin puncak Angkatan Darat? Partai tidak bisa sekadar memanggil massanya agar turun ke jalan-jalan – suatu taktik yang semakin dikuasai PKI sampai pada pertengahan 1965 – dan mengharapkan bisa mengusir para perwira yang dilindungi senjata dan tank. Pengubahan susunan pemerintahan juga tidak bisa memberikan banyak janji. Presiden Sukarno tidak bisa diharap akan memecati para panglima dan mengangkat yang baru karena ia tidak mempunyai sarana untuk memaksakan perintahnya seandainya para perwira itu menolak mematuhi keputusannya. Selain itu, Sukarno tidak pernah mengurus penataan jabatan di dalam Angkatan Darat dengan memberikan perintah-perintah. Pada 1962 Sukarno menyingkirkan Nasution hanya sesudah melalui perundingan yang hati-hati dengan jenderal-jenderal Angkatan Darat, dan sekalipun begitu, ia mengizinkan Nasution memilih penggantinya. Pada awalnya para jenderal Angkatan Darat mendukung gagasan Sukarno untuk konfrontasi melawan Malaysia karena mereka bisa mendapat dana tambahan dari persiapan perang itu. Begitu kampanye ini tampak akan berubah menjadi perang yang sebenarnya dengan Malaysia dan Inggris pada

medio 1964, jenderal-jenderal itu segera menyabotnya. Mereka tunduk kepada perintah-perintah Sukarno jika mereka bersedia.

Selagi Aidit menimbang-nimbang untung dan rugi kedua pilihan tersebut, ia berbicara dengan Sjam tentang kemungkinan menggerakkan para perwira progresif untuk melawan Dewan Jenderal. Sekitar akhir Agustus Aidit meminta agar Sjam menjajaki pendapat para perwira pro-Sukarno dan pro-PKI apakah mereka bisa menggagalkan Dewan Jenderal dari dalam Angkatan Darat sendiri. Ketika Sjam memulai diskusi-diskusi dengan jaringan Biro Chusus, ia sebagai rekan berbagi informasi intelijen dan mendorong para perwira untuk melakukan aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan. Karena tidak tampak adanya rencana yang pasti, Sjam memutuskan untuk memimpinnya. Ia tidak sabar dan yakin bahwa sesuatu harus segera dilakukan. Ia berusaha memengaruhi beberapa perwira untuk ikut serta dalam sebuah aksi menentang Dewan Jenderal.

Begitu Sjam memainkan peranan sebagai koordinator, perwira-perwira yang bersedia melibatkan diri hanyalah mereka yang setia tanpa kesangsian kepada Sjam dan PKI. Mereka menduga bahwa mereka telah mendapat kepercayaan dari partai untuk melakukan tugas mulia, bersejarah, dan bertindak sebagai bagian dari sebuah rencana yang tertata dengan seksama serta tidak mungkin salah, yang telah dikembangkan pimpinan partai dengan kebijaksanaannya. Kerja sama memberi dan menerima antara Biro Chusus dengan para perwira militer dalam tahun-tahun sebelum 1965 membantu menjelaskan mengapa para perwira itu bersedia melibatkan diri mereka di dalam G-30-S. Mereka sudah semakin percaya kepada Biro Chusus. Mereka tidak mungkin berpikir bahwa dengan mengikuti permintaan-permintaan Sjam berarti melakukan pelanggaran disiplin militer yang serius ketika mereka memercayai pimpinan puncak angkatan mereka sedang bersiasat melawan panglima tertinggi mereka, Presiden Sukarno. Sjam membujuk mereka agar bergabung dengan argumen bahwa aksi mereka tidak mungkin gagal, mengingat sangat luas dukungan rakyat terhadap Sukarno dan PKI. Mereka hanya memerlukan sebuah aksi kecil saja untuk menimbulkan reaksi berantai. Gerakan ini tidak perlu menguasai Jakarta secara militer. Yang diperlukan hanyalah memasang sumbu, seperti yang belakangan dikemukakan Supardjo. Aksi-aksi selanjutnya akan dilaksanakan oleh yang lain-lain:

Sukarno akan mendukung aksi ini, karena ia khawatir terhadap kup; Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah di Jakarta dan Mayor Jenderal Ibrahim Adjie di Bandung akan mengikuti arahan Sukarno, Suharto akan tetap pasif, massa PKI akan berdemonstrasi mendukung aksi, dan para perwira militer di seluruh tanah air akan beramai-ramai bergabung ketika mereka menyaksikan aksi semakin bertambah besar. Gerakan ini akan berhasil segera sesudah ia memicu banyak aksi susulan.

Sepanjang September 1965, Aidit, Sjam, dan sekelompok perwira, khususnya Untung, Latief, dan Soejono menyusun rencana yang seksama, untuk melakukan gerakan mendahului terhadap Dewan Jenderal. Tidak jelas siapa dari mereka yang bertanggung jawab untuk merumuskan aspek-aspek apa dalam perencanaan. Karena Aidit dan para perwira tidak saling bertemu langsung, kita bisa menduga bahwa Sjam, sebagai perantara, berada pada posisi memainkan peranan terkemuka dalam penyusunan rencana. Ide dasarnya ialah menggunakan pasukan para perwira progresif untuk melancarkan serangan telak terhadap jenderal-jenderal yang diduga berkomplot untuk melakukan kup. Ide pokok rencana itu, yaitu yang disebut Supardjo "titik berat," adalah penculikan pada malam hari terhadap Nasution, Yani, dan lima jenderal lainnya dari rumah masing-masing. Ruang kelabu terluas adalah bagaimana komplotan ini bisa menetapkan bahwa tujuh jenderal tersebut semuanya anggota Dewan Jenderal. Agaknya komplotan ini banyak bergantung kepada kabar burung dan tidak mempunyai bukti konkret.

Satu hal yang terkadang diabaikan dalam penulisan sejarah Gerakan 30 September adalah bahwa dalam dunia politik Indonesia penculikan merupakan tradisi yang terhormat. Sukarno pun, bersama Hatta, diculik pada 16 Agustus 1945 oleh para pemuda yang memaksa mereka agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia dan memimpin pemberontakan melawan tentara Jepang. Dua pemimpin nasional itu digiring ke Rengasdengklok, sebuah kota kecil di daerah pinggiran ibu kota, dan disekap di sana di luar kemauan mereka berdua. Mereka menolak menuruti tuntutan para penculik. Para pemuda ini berusaha mengorganisasi pemberontakan di Jakarta. Ketika rencana itu gagal terwujud (agak mirip dengan dewan-dewan revolusi Gerakan 30 September dua puluh tahun kemudian), para pemuda membawa kembali kedua pemimpin bangsa itu ke ibu kota tanpa dipengapakan.[10] Namun, kelak para pemuda

itu dipandang sebagai pahlawan-pahlawan karena patriotisme mereka yang militan. Salah seorang di antara mereka, Chairul Saleh, belakangan menjadi wakil perdana menteri ketiga Sukarno. Seperti ditulis Cribb dan Brown, "Selama perang kemerdekaan [1945-1949], penculikan tokoh-tokoh politik yang konservatif dengan maksud menggugah mereka agar berpendirian lebih radikal sering kali terjadi, dan tokoh-tokoh yang diculik biasanya dibebaskan tanpa cidera, rasa percaya diri mereka goyah, wibawa mereka digerogoti, dan karena itu kemampuan mereka bertindak tegas terkurangi."[11] G-30-S pun merencanakan taktik yang dihormati sepanjang masa untuk memaksakan perubahan politik dan pribadi pada kalangan pimpinan puncak.

Sisi lain rencana aksi – pembentukan dewan-dewan revolusi di seluruh negeri di bawah pimpinan para perwira progresif – dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perubahan apa saja yang dikehendaki gerakan ini. Dewan-dewan ini akan menghalangi usaha para perwira sayap kanan untuk kembali dan akan menekan Sukarno agar membersihkan lebih lanjut pimpinan Angkatan Darat. Dewan-dewan akan memberi kesan adanya dukungan rakyat terhadap aksi mereka. Semula, komplotan G-30-S tidak bermaksud menggunakan dewan-dewan tersebut untuk merebut kekuasaan kabinet Sukarno atau lembaga pemerintah lain apa pun. Satu-satunya tujuan adalah memberikan dukungan rakyat terhadap aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan dan menekan lembaga-lembaga pemerintah yang ada agar mengikuti kebijakan-kebijakan Sukarno. Setiap dewan revolusi harus dipimpin seorang perwira muda yang akan menggalang front persatuan kekuatan patriotik di daerah masing-masing. Garis ini sesuai dengan nasihat Aidit kepada kaum komunis Aljazair pada Juni 1965: kup Kolonel Boumedienne di negeri mereka harus dibikin menjadi sebuah "gerakan rakyat." Prinsip Aidit adalah bahwa suatu aksi militer harus diiringi dengan demonstrasi dukungan rakyat yang lebih luas.

Gagasan tentang dewan revolusi lebih bisa dikaitkan dengan Aidit dan Sjam ketimbang dengan perwira-perwira militer itu. Untung dan para perwira kawan-kawannya menyerahkan soal-soal politik kepada partai, sementara mereka mencurahkan perhatian pada tujuan yang sempit, yaitu merencanakan penculikan saja. Aidit dan Sjam bermaksud menggunakan dewan-dewan revolusi untuk mendorong perubahan

yang lebih luas dalam komposisi kabinet Sukarno sesegera setelah para panglima Angkatan Darat disingkirkan. PKI menginginkan agar kabinet Nasakom diperbaiki, dengan kata lain partai menginginkan lebih banyak kementerian di tangan partai dan lebih banyak menteri antikomunis disingkirkan.

Setelah memutuskan pada akhir Agustus untuk mendukung strategi mendahului dengan melibatkan perwira-perwira militer, Aidit menjadi lebih menutup diri. Ia tidak mengadakan sidang Politbiro selama September meski ia biasanya menyelenggarakan sidang demikian tiga atau empat kali dalam sebulan. Ia tidak memberi tahu semua pimpinan partai tentang rencana tersebut. Jika ia merasa pimpinan-pimpinan tertentu diperlukannya dalam aksi, ia memberi brifing kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Njono, sebagai pimpinan partai daerah Jakarta, dan Sukatno, sebagai kepala bagian pemuda partai (Pemuda Rakjat), ditugasi untuk memobilisasi sukarelawan yang bisa menambah jumlah pasukan aksi. Bahkan para pimpinan yang secara langsung terlibat di dalam aksi itu pun tidak mengetahui dengan baik seluruh rencana gerakan. Pimpinan partai percaya bahwa sekelompok perwira progresif akan melaksanakan aksi mendahului, sementara partai memberikan dukungan politik dan bantuan sukarelawan secukupnya. Itulah yang disampaikan Aidit di depan sekelompok anggota Politbiro dan Comite Central pada akhir Agustus, dan informasi itu pula yang beredar di sekitar kantor pusat partai. Para anggota partai disuruh menunggu datangnya aksi yang akan dilancarkan kalangan militer.

Para perancang gerakan menginginkan agar aksi mereka dilihat sebagai aksi militer murni, sehingga ia akan mudah diterima masyarakat luas. Bahkan organisasi-organisasi antikomunis pun akan sulit menentang perwira patriotik seperti Untung, seorang pahlawan dalam kampanye merebut Irian Barat dan salah satu wakil komandan pasukan kawal kepresidenan di bawah pimpinan Brigjen Sabur. Aksi itu seakan-akan mengatasi politik partai dan murni didorong patriotisme. Segera sesudah aksi, partai akan menampilkan diri dengan menduduki lebih banyak jabatan dalam kabinet dan perlahan-lahan menyingkirkan lawan-lawannya baik dari kalangan militer maupun pemerintahan sipil.

Selagi Aidit, Sjam, Untung, dan yang lain-lain sibuk merancang

apa yang kemudian dinamai Gerakan 30 September itu, pimpinan tertinggi Angkatan Darat menunggu saat yang baik. Nasution, Yani, dan kawan-kawannya sebenarnya tidak merencanakan untuk melakukan kudeta terhadap Sukarno. Mereka menunggu sampai PKI lebih dahulu bergerak dan memberi mereka semacam dalih untuk menindak keras partai itu. PKI mungkin menafsirkan kelambanan mereka selama awal dan pertengahan 1965 sebagai pertanda kelemahan, ketika demonstrasi-demonstrasi yang dipimpin partai memaksakan krisis dalam hubungan dengan penyangga utama para jenderal Angkatan Darat, yaitu pemerintah Amerika Serikat. Juga mungkin sekali, dengan cara terselubung, jenderal-jenderal Angkatan Darat ikut menyebarkan kabar burung tentang Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal itu bermaksud memancing PKI agar mengambil tindakan gegabah. Untuk memanfaatkan kekuatan mereka – kekuatan militer murni – jenderal-jenderal itu membutuhkan suatu dalih. Menyerang langsung Sukarno dan PKI tanpa alasan yang sah tidak akan menghasilkan tatanan politik yang kokoh dikuasai Angkatan Darat.

Masih belum jelas apakah agen-agen intelijen jenderal-jenderal sayap kanan itu mengetahui bahwa Aidit dan Sjam berkomplot merencanakan aksi. Kepala intelijen Angkatan Darat, Mayor Jenderal Parman, memasang mata-matanya di dalam partai. Tapi agaknya ia tidak mengetahui tentang Sjam dan Biro Chusus yang sedang mengorganisasi aksi. Seandainya ia tahu, ia pasti dengan cermat akan memantau Sjam dan bisa menggagalkan penculikan dan pembunuhan terhadap dirinya sendiri pada 1 Oktober 1965. Jenderal-jenderal sayap kanan itu boleh jadi sudah mendapat petunjuk-petunjuk tertentu, tapi petunjuk-petunjuk itu terbenam dalam makin riuhnya hiruk-pikuk berbagai kabar intelijen. Agen-agen intelijen Suharto di Kostrad – Yoga Sugama dan Ali Moertopo, keduanya dari Kodam Diponegoro Jawa Tengah – boleh jadi mempunyai informasi yang lebih pasti tentang personil Biro Chusus dan rencana mereka. Karena Suharto mengenal baik Untung maupun Latief, kita bisa menduga bahwa Sugama dan Moertopo mengenal mereka atau mengetahui tentang mereka. Kelompok Suharto di Kostrad barangkali juga tahu tentang Sjam dan Biro Chusus. Kegiatan Suharto, Yoga, dan Moertopo dalam 1965 merupakan hamparan kelabu paling luas dalam pemahaman kita tentang G-30-S.

RENCANA MENYELIMPANG

Satu alasan mengapa Parman tak tahu-menahu tentang komplotan ini barangkali karena banyak di kalangan komplotan itu sendiri tak tahu banyak. Dalam usahanya untuk merahasiakan komplotan, Aidit, Sjam, dan perwira-perwira militer yang terlibat tidak mengungkapkan informasi secukupnya kepada kawan-kawan sesama komplotan mereka agar mereka bisa berperanan dengan efektif. Banyak kesalahan terjadi karena para peserta tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang tugas-tugas mereka. Karena rencana-rencana para organi-sator aksi dijaga baik-baik kerahasiaannya, maka keputusan mereka tentang banyak masalah logistik, bahkan tanggal aksi dimulai, baru disampaikan kepada para pendukung pada menit terakhir.

Rencana aksi mengalami sejumlah revisi. Beberapa perwira menarik diri karena mereka tidak memercayai kepemimpinan Sjam. Seperti diperhatikan Supardjo ketika ia berbicara dengan Sjam beberapa hari sebelum aksi, rencana itu "tidak logis." Sampai akhir September para perancang aksi belum mengerahkan pasukan yang memadai untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan. Yang paling menyolok, mereka tidak mempunyai tank. Tanpa dukungan kekuatan yang memadai, rencana menjadi bergantung pada persetujuan Sukarno terhadap penculikan. Persetujuannya diharapkan akan menghentikan para perwira yang bisa memobilisasi pasukan untuk melakukan serangan balasan. Perwira-perwira penting yang memimpin pasukan di dalam atau di dekat ibu kota – Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dari Kodam Jaya, Jakarta dan Mayor Jenderal Ibrahim Adjie dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat – terkenal sebagai Sukarnois setia yang akan mematuhi petunjuk presiden. Komplotan meneruskan aksi dengan harapan tidak ada kekuatan militer yang akan dibiarkan menyerang mereka.

Supardjo bergabung dengan G-30-S karena ia percaya kepada Sjam dan karena yakin bahwa jenderal-jenderal sayap kanan memang mau melancarkan kup. Sebelumnya ia tidak pernah berhubungan dengan perwira-perwira lain dalam G-30-S. Bersandar pada kebijakan partai yang terwakili melalui Sjam, Supardjo mengira rencana itu sudah dirancang dengan baik sekalipun apa yang didengarnya terasa ganjil. Walaupun di dalam G-30-S ia merupakan perwira dengan pangkat tertinggi, ia tidak

menjadi komandannya karena selama minggu-minggu sebelumnya ia tidak ikut dalam perencanaan. Untung yang dipilih sebagai komandan tituler karena posisinya sebagai komandan pasukan kawal istana akan memberi aksi ini kredibilitas yang lebih besar. Aksi ini akan tampak sebagai perkembangan logis belaka dari tugas Untung untuk melindungi Sukarno. Juga, Sjam mungkin lebih suka memilih Untung sebagai komandan karena sikapnya yang lebih lunak. Supardjo seorang taktikus militer yang cakap dengan modal pikiran sendiri, sedangkan Untung seorang prajurit yang menanjak pangkatnya karena keberaniannya, bukan karena inteligensinya.

Ketika sesama kawan komplotannya menunjukkan kelemahan rencana itu, Sjam justru menjadi semakin bersikeras. Dengan mengadakan rapat-rapat dan mengundang beberapa perwira (sebagian dari mereka belakangan menarik diri), komplotan ini telah mempertaruhkan diri mereka. Agen-agen intelijen Angkatan Darat lambat laun akan membongkar komplotan mereka. Jika mereka membatalkan aksi, tidak ada jaminan bahwa kelak mereka tidak akan ditahan. Sjam bersikeras, mereka harus terus melangkah. Pada akhir September, ketika kelemahan rencana akhir menjadi semakin kentara, dengan murka Sjam mencerca semua pembimbang sebagai pengecut. Ia sendiri tetap hati karena melihat kekuatan PKI dan Sukarnois terlalu perkasa untuk kalah. Bahkan jika aksi ini tersandung, PKI, dengan seluruh kekuatan massa dan pengaruh politiknya, akan mampu mengintervensi dan mencegah kekalahan total.

Sjam sudah melayani Aidit selama hampir lima belas tahun. Ia mengabdikan dirinya untuk Aidit, menunggu perintah-perintahnya, mengatur keamanan pribadinya, mencari informasi rahasia yang bisa berguna baginya. Aidit ibarat bintang pemandu bagi Sjam. Ia tidak banyak berhubungan dengan siapa pun di dalam PKI. Ia tidak mempelajari literatur dan perdebatan teori di dalam partai. Setelah berjanji kepada Aidit bahwa rencana mendahului aksi Dewan Jenderal pasti berhasil, ia bermaksud meneruskan rencananya lepas dari segala kelemahannya. Ia tidak ingin mengecewakan bosnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri dan Aidit bahwa para perwira progresif sanggup menghentikan jenderal-jenderal sayap kanan yang sudah merencanakan sebuah kup. Ia akan kehilangan kepercayaan Aidit jika tiba-tiba ia melaporkan aksi itu tidak bisa dilaksanakan. Aidit telah mendasarkan semua strategi politiknya

sepanjang September pada harapan akan terlaksananya aksi mereka. Jika ia tahu sebelumnya bahwa aksi mereka sangat berisiko atau tidak mudah dilaksanakan, Aidit tentu akan menyiapkan strategi lain untuk menghadapi jenderal-jenderal sayap kanan itu. Jika pada detik terakhir aksi harus dibatalkan, partai tidak akan siap menghadapi kudeta Dewan Jenderal yang disangkakan akan terjadi itu. Bisa saja Aidit mempunyai firasat tertentu tentang persiapan aksi yang kurang sempurna, tapi Sjam telah menenteramkan hatinya, seperti yang ia lakukan terhadap para perwira yang terlibat aksi, dengan mengatakan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Aidit berketetapan meneruskan rencana karena para perwira telah bersiap melaksanakannya. Para perwira siap melaksanakan rencana karena mereka mengira Aidit menghendaki rencana tersebut berlanjut.

Persiapan aksi kalang kabut. Akhirnya, aksi harus ditunda satu hari – penundaan yang mengakibatkan peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober menjadi dikenal sebagai Gerakan 30 September. Untung, sang komandan tituler, belum mempersiapkan diri. Sudah berhari-hari ia tidak tidur dengan baik karena ia harus tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai pengawal istana. Ia memulai aksi dalam keletihan. Penundaan satu hari menambah kebingungan pada rencana yang sudah membingungkan itu.

Begitu rencana dilaksanakan, semua kekurangannya menjadi kentara. Hanya sedikit aspek dari gerakan yang berlangsung sesuai dengan rencana. Ketika malam itu pasukan dari berbagai kesatuan sudah berkumpul di Lubang Buaya, tidak ada rantai komando yang jelas untuk mengorganisasi tim-tim penculikan. Dua tim terpenting, yaitu yang untuk Nasution dan Yani, akhirnya dipimpin oleh prajurit-prajurit berpangkat rendah yang tidak berpengalaman. Tidak ada satu tim pun yang pernah berlatih untuk melakukan penculikan. Penugasan baru diberikan kepada mereka dalam saat-saat terakhir dan kemudian tanpa persiapan mereka harus mereka-reka strategi dengan cepat untuk mendekati dan memasuki rumah-rumah para jenderal sasaran. Hasilnya malapetaka. Dari tujuh tim, hanya tiga yang berhasil menawan jenderal-jenderal itu dan membawa pergi mereka hidup-hidup. Nasution lolos. Yani dan dua jenderal lainnya ditembak atau ditusuk ketika mereka memberikan perlawanan. Tim-tim itu belum pernah dilatih sebelumnya untuk memastikan bahwa mereka mampu menangkap para jenderal dalam keadaan

hidup. Mereka sekadar diberi perintah, seperti dinyatakan seorang sersan pasukan kawal istana: "Tangkap. Jangan sampai ada yang lolos."[12]

Ketika pimpinan G-30-S mengetahui bahwa seorang jenderal lolos dan tiga dari enam orang yang ditangkap telah mati atau hampir mati, mereka memutuskan untuk membatalkan rencana menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Sukarno. Tidak mungkin mereka membawa tiga jenazah berdarah-darah itu ke istana presiden. Tindakan itu tidak sesuai dengan kebiasaan terhormat dalam sejarah untuk menculik atasan dan kemudian membebaskan mereka tanpa cidera. Maka, mereka terpaksa meninggalkan satu bagian rencana yang sangat penting. Pimpinan G-30-S memutuskan menembak mati semua tawanan mereka dan menyembunyikan jenazahnya.

Rencana menghadap presiden di istana juga batal. Rencana awal adalah mendapatkan pernyataan dukungan dari Sukarno dan segera menyiarkannya melalui radio di pagi hari. Sebelum para perwira Angkatan Darat yang di dalam dan di sekitar ibu kota sempat berpikir untuk membalas G-30-S, mereka sudah harus berhadapan dengan *fait accompli*. G-30-S berharap sekurang-kurangnya Sukarno akan membuat pernyataan netral untuk menyerukan ketenangan selagi ia menangani masalah. Tapi G-30-S tidak berhasil memperoleh pernyataan dari Sukarno. Dalam kebingungan dan keletihan Untung dan prajurit-prajuritnya dari pasukan kawal sampai tidak memperhatikan bahwa Sukarno bermalam di rumah salah seorang dari istri-istrinya. Karena itu G-30-S tetap meneruskan rencananya menempatkan pasukan di luar istana dan mengirim utusan ke istana untuk menghadap presiden pada pagi hari itu juga. Sukarno tidak mau kembali ke istana persis karena adanya pasukan-pasukan tidak dikenal di luar istana. Sementara para pengawal pribadinya membawa Sukarno kian ke mari ke berbagai tempat persembunyian, utusan G-30-S membuang-buang waktu yang berharga dengan duduk-duduk di sekeliling istana yang kosong menunggu Sukarno.

Salah seorang anggota utusan, Supardjo, akhirnya berhasil bertemu presiden pada sekitar pukul 10.00 pagi sebenarnya secara kebetulan saja. Supardjo tidak termasuk bagian dalam rencana semula. Demikian pula Heru Atmodjo, perwira AURI yang ditugasi Omar Dani untuk mengawasi Supardjo. Namun justru tiga perwira inilah (Supardjo, Heru Atmodjo, dan Omar Dani) yang berhasil menghubungkan G-30-S dengan Sukarno.

Ketika Supardjo sedang duduk di balik pagar istana, membuang-buang tiga jam yang sangat berharga pagi itu, Atmodjo menghubungi atasannya, Dani, yang sudah mengetahui di mana Sukarno berada. Secara kebetulan Sukarno sudah memutuskan untuk pindah ke pangkalan udara Halim demi pertimbangan keselamatan. Dani dan Atmodjo lalu menyiapkan helikopter untuk menjemput Supardjo dari istana dan membawanya ke Halim supaya bisa bertemu dengan presiden. Tak satu pun dari semua langkah-langkah ini tercantum dalam rencana semula. Adalah kebetulan bahwa Supardjo bisa bertemu Sukarno sedini itu. Jika tidak lantaran Dani dan Atmodjo, Supardjo mungkin tidak akan pernah terhubungkan dengan Sukarno pada hari itu.

Karena aksi pokok G-30-S, yaitu penculikan, telah gagal, semua langkah berikutnya pun segera gagal susul-menyusul. Sukarno tidak bisa mendukung sekelompok perwira muda yang telah membunuh para komandan Angkatan Daratnya. Ia memerintahkan Supardjo untuk menghentikan G-30-S dan memastikan agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah. Supardjo bersedia mematuhi perintah Sukarno, begitu juga para perwira militer yang menjadi pimpinan gerakan – Latief, Untung, dan Soejono. Mereka siap membatalkan operasi mereka yang babak belur itu.

Namun, Sjam dan Aidit tetap ingin meneruskan G-30-S. Mereka ingin membuat seruan melalui radio agar para perwira di seluruh tanah air membentuk dewan-dewan revolusi. Aidit sudah memerintahkan para pimpinan partai agar mengikuti terus siaran radio. Sjam sudah memerintahkan anggota-anggota Biro Chusus untuk menyebarkan informasi di kalangan jaringan dalam militer agar mereka menunggu instruksi-instruksi melalui radio. Baik Aidit maupun Sjam berpikir bahwa tahap selanjutnya dari gerakan ini – pembentukan dewan-dewan revolusi – akan bisa berhasil sekalipun tahap pertama sudah gagal. Mereka membayangkan bahwa massa revolusioner, baik dari kalangan militer maupun sipil, sedang duduk di dekat radio dan siap membentuk dewan-dewan itu sesegera mereka mendengar isyarat. Aksi dapat berlanjut tanpa persetujuan Sukarno.

Tertundanya pertemuan dengan Sukarno dan perbedaan pendapat antara Sjam dengan para perwira militer menyebabkan suara G-30-S tidak kunjung terdengar melalui gelombang radio. Stasiun radio telah

diduduki ketika masih pagi-pagi benar dan sebuah pernyataan terdengar dibacakan sejenak setelah pukul 7.00. Rencana semula tentunya adalah segera membacakan pengumuman-pengumuman lain yang menyusul, termasuk pernyataan dari presiden. Tapi pagi itu tidak ada satu pun pengumuman lebih lanjut yang dibacakan. G-30-S bungkam sepanjang saat-saat awal aksi yang menentukan. Untung dan para perwira militer lainnya sudah siap mundur: jenderal-jenderal sudah dibunuh dan Sukarno sudah berkata kepada mereka untuk menghentikannya. Sjam berusaha meyakinkan para perwira itu agar meneruskan G-30-S. Tapi ia gagal.

Saya menduga, karena menghadapi keengganan berlawan dari para perwira itu, Sjam lalu menuju ke tempat persembunyian Aidit di Halim dan merancang ulang pengumuman tentang dewan revolusi. Mereka membuat suatu rencana baru. Sukarno tidak bisa diharapkan untuk mendukung kelanjutan G-30-S, sehingga ia harus dilampaui. Dewan revolusi bukan lagi sekadar berperanan sebagai kelompok penekan terhadap Sukarno, melainkan sebagai inti dari pemerintah baru. Pengumuman tentang dewan revolusi yang disiarkan pada awal sore hari itu, Dekrit no. 1, tanpa ada uraian sama sekali karena pengumuman itu disusun dengan sangat tergesa-gesa. Aidit dan Sjam berimprovisasi. Mereka meminta Iskandar Subekti, sekretaris Politbiro, mengetik pengumuman baru di tempat persembunyian Aidit. Mereka masukkan sebagai "wakil-wakil komandan" dewan nama-nama empat perwira militer yang mereka harapkan bersedia memberikan dukungan kepada G-30-S. Penulisan nama komandan (Untung) dan wakil-wakilnya (Supardjo dan kawan-kawan) tidak ada hubungannya dengan hierarki yang sesungguhnya di dalam G-30-S; makna penting daftar nama ini semata-mata simbolik.

Karena Sukarno menolak memberikan persetujuannya kepada G-30-S, Aidit dan Sjam harus melampauinya. Dewan revolusi yang sebelumnya dimaksud untuk menunjang kekuasaan Sukarno diubah menjadi sarana untuk menggantikan kekuasaannya. Aidit dan Sjam menyisipkan kata-kata baru di dalam teks pengumuman tentang dewan-dewan itu (Dekrit no. 1): mereka "mendemisionerkan" kabinet Sukarno yang ada dan memberi "segenap kekuasaan Negara" kepada Dewan Revolusi Indonesia. Meskipun pernyataan serupa itu berlawanan dengan *raison d'être* G-30-S sendiri (melindungi Sukarno dan cita-cita pemerintahnya),

Aidit dan Sjam memerlukannya sebagai usaha terakhir untuk memberi arti baru bagi aksi yang nyaris roboh.

Untung yang kelelahan dengan enggan menerima revisi Aidit dan Sjam dan membubuhkan tanda tangannya setidak-tidaknya pada dua dari tiga dokumen yang telah mereka rancang (Keputusan no. 1 dan 2). Dokumen pertama menyebut nama-nama anggota Dewan Revolusi Indonesia dan yang belakangan menghapus pangkat-pangkat militer di atas letnan kolonel. Untung satu-satunya orang yang menandatangani kedua dokumen tersebut. Begitu dokumen-dokumen selesai diketik dan ditandatangani, seorang kurir membawanya ke RRI untuk disiarkan pada awal sore hari itu.

Setelah melihat aksi di Jakarta terhuyung-huyung, Aidit dan Sjam berharap bahwa para perwira progresif dan masyarakat sipil di luar ibu kota akan memprakarsai pembentukan dewan-dewan di daerah masing-masing dan menggagalkan setiap usaha serangan balik yang akan dilancarkan oleh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Boleh jadi itu merupakan harapan yang realistis, mengingat bahwa G-30-S memang meluas ke Jawa Tengah. Aidit dan Sjam bertaruh bahwa daerah-daerah akan meledak. Mereka bertumpu pada kekuatan radio. Tapi pengumuman-pengumuman radio tidak cukup untuk mendorong para pengikut partai turun berdemonstrasi di jalan-jalan dan membentuk dewan revolusi dengan para perwira militer. Bahkan bagi mereka yang setia kepada partai, yang mendengarkan siaran radio dan siap melakukan aksi pun, pengumuman-pengumuman tersebut tidak menjelaskan dengan terang apa yang harus mereka kerjakan dan mengapa. Banyak kader yang hanya menunggu instruksi lebih lanjut sebelum mereka bertindak. Aidit dan Sjam tidak bisa mengeluarkan lagi instruksi-instruksi tentang dewan revolusi sore hari itu karena mereka disibukkan dengan soal kehancuran G-30-S dan ancaman dari Suharto.

Pada pagi hari itu Sukarno telah melihat G-30-S sebagai suatu usaha keliru arahan tapi bertujuan baik dari pasukan yang setia kepadanya untuk memperkuat kekuasaannya dalam berhadapan dengan pimpinan tertinggi Angkatan Darat yang sukar dikendalikan. Walaupun ia tidak mengeluarkan pernyataan yang mendukung G-30-S, ia juga tidak mengeluarkan pernyataan yang mengecamnya. Sukarno melihat G-30-S sebagai suatu kekuatan politik baru yang harus diberi tempat di dalam

pemerintahannya, tapi bukan sebagai sesuatu yang harus ditempatkan lebih tinggi dari dirinya. Ia agaknya menduga G-30-S mewakili banyak perwira Angkatan Darat karena ia meminta gerakan ini untuk memberi rekomendasi nama-nama jenderal yang patut menjadi pengganti Yani. Seandainya ia memandang pimpinan G-30-S bermusuhan dengan pemerintahnya atau bertekad untuk melancarkan kup, ia pasti tidak akan meminta bantuan mereka memilih panglima Angkatan Darat yang baru. Ketika pengumuman radio tentang pendemisioneran kabinetnya mengudara pada awal sore hari itu, ia marah tapi ia tentunya melihat bahwa kata-kata G-30-S tidak sejalan dengan perbuatannya. Supardjo tetap menghormatinya dan tidak berusaha memaksa Sukarno agar menuruti keinginannya.

Menjelang petang semakin jelas bagi pimpinan G-30-S bahwa perencanaan yang buruk telah mengakibatkan para anggota partai sendiri tidak ikut ambil bagian. Para anggota Pemuda Rakjat yang telah disiapkan Njono dan Sukatno di Jakarta untuk melakukan tugas sebagai sukarelawan tidak tampak turun ke jalan-jalan. Dari enam sektor yang siap, hanya satu sektor yang turun. Lain-lainnya tetap dalam keadaan bersiap siaga saja. Perempuan-perempuan yang ditugasi membuka dapur-dapur umum tidak muncul. Ketiadaan ransum untuk pasukan yang ditempatkan di Lapangan Merdeka ikut menjadi penyebab kesediaan mereka menyerahkan diri ke markas Kostrad. Suharto melancarkan serangan balik pada petang hari itu ketika G-30-S, oleh kebodohannya sendiri, sudah mulai ambruk.

SERANGAN BALIK SUHARTO

Pada 1 Oktober Suharto mampu bertindak dengan "efisiensi yang luar biasa" (seperti dikemukakan Wertheim) karena ia sedikit banyak sudah mempunyai bayangan G-30-S akan terjadi dan ia tidak akan menjadi sasaran. Ia sejak awal sudah tahu inilah sebuah aksi yang bisa dipakai sebagai dalih untuk menyalahkan PKI. Masalah yang harus Suharto hadapi pagi hari itu adalah apakah ia bisa mengalahkan G-30-S dan melaksanakan rencana Angkatan Darat untuk menyerang PKI dan menggulingkan Sukarno. Suharto tidak segera tahu pasti berapa besar

pasukan dan perwira yang terlibat dalam aksi ini. Sepanjang pagi para perwira Kostrad menyelidiki kekuatan militer G-30-S dan memeriksa kesetiaan perwira-perwira kunci di ibu kota, terutama Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah. Jika G-30-S ternyata lebih kuat dan setidak-tidaknya menerima dukungan bersyarat dari presiden pagi hari itu, Suharto mungkin akan tetap pasif. Ia hanya mempunyai satu batalyon di Jakarta yang berada langsung di bawah komandonya (Batalyon 328 dari Jawa Barat), yang bisa ia gunakan untuk melancarkan serangan balik seketika. Melihat rentannya G-30-S, ia merasa mempunyai cukup waktu untuk mengerahkan pasukan-pasukan lain (seperti misalnya RPKAD, dari markas mereka di selatan kota) dan memperoleh dukungan cukup dari rekan-rekan perwira sesamanya untuk melakukan serangan.

Begitu Suharto pagi itu menyatakan tekadnya untuk menghancurkan G-30-S, ia memutuskan untuk tidak menghiraukan perintah-perintah Sukarno, apa pun bunyinya. Bentrokan dengan PKI yang sudah lama ditunggu-tunggu terjadilah. Suharto tidak akan membiarkan presiden memberikan perlindungan kepada para pengikut G-30-S atau para anggota partai. Penolakan Suharto untuk memberi izin Pranoto dan Wirahadikusumah pergi ke Halim dan desakan dia agar Sukarno meninggalkan Halim memperlihatkan bahwa Suharto sudah bertekad untuk mengabaikan kemauan Sukarno. Seorang jenderal tanpa rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya pasti akan tunduk terhadap Sukarno. Suharto menanggapi G-30-S atas pertimbangan sendiri, tanpa banyak berunding dengan panglima tertingginya. Sejak pagi 1 Oktober ia sudah tahu bahwa G-30-S sangat mungkin dipakai sebagai dalih yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk mengantar Angkatan Darat ke mahligai kekuasaan. Kecepatan Angkatan Darat mempersalahkan PKI, mengorganisasi kelompok-kelompok sipil antikomunis, dan merancang kampanye propaganda memberi kesan adanya persiapan. Jenderal-jenderal itu telah menyiapkan rencana untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi. Sepak terjang Angkatan Darat dalam masa pasca-G-30-S tidak bisa diterangkan sebagai serangkaian jawaban-jawaban improvisasi semata-mata.

Para perwira militer dalam G-30-S yang berkumpul di Halim (Untung, Latief, Soejono) sudah siap menghentikan operasi sebelum mereka mengetahui tentang rencana serangan balasan Suharto. Sukarno

sudah memerintahkan mereka untuk mundur saat hari menjelang siang. Berbeda dengan Aidit dan Sjam, mereka bersedia menaati perintah presiden. Beberapa saat menjelang siang Untung menandatangani dokumen-dokumen yang menyerukan dibentuknya Dewan Revolusi Indonesia, tapi ia sendiri memandang keikutsertaan dirinya di dalam G-30-S sudah selesai. Bahkan ketika ia, Latief, dan Soejono mengetahui Suharto sedang merencanakan serangan balik, mereka tidak mengorganisasi pasukan untuk membela diri. Supardjo bersikukuh bahwa mereka harus melawan Suharto dan Nasution. Ia berusaha menyusun kembali pasukan G-30-S yang ada di Lapangan Merdeka dan bekerja sama dengan pasukan udara Omar Dani. Tetapi Supardjo mendapati pimpinan inti aksi ini tidak tanggap, bingung, dan lelah. Para perwira sudah marah kepada Sjam karena mengkhianati tujuan semula mereka dengan pengumumannya melalui radio tentang pendemisioneran kabinet Sukarno. Mereka belum pernah berunding untuk mengadakan kup. Di tengah-tengah keadaan genting demikian Latief berbicara panjang lebar tentang tetek-bengek yang tidak perlu. Untung dan Latief mengharapkan teman lama mereka, Suharto, akan mengambil sikap netral atau tampil mendukung mereka. Ketika pada siang hari mereka mendengar tentang tindakan-tindakan Suharto, mereka menduga ia mempunyai tipu muslihat yang dirahasiakan, bahwa sebenarnya ia tidak akan menyerang G-30-S.

Begitu pasukan Suharto merebut kembali Lapangan Merdeka dan stasiun RRI pada sekitar pukul 18.00 dan sekitar satu jam kemudian ia membacakan pengumuman yang menyatakan G-30-S sebagai kontrarevolusioner, lima pimpinan inti G-30-S menyadari bahwa mereka telah dikalahkan di Jakarta. Dalam keadaan putus asa dan bingung oleh semua penyimpangan dari rencana semula, mereka tidak bisa mengambil keputusan tentang strategi untuk menghadapi Suharto. Mereka tidak mendesak perwira-perwira Angkatan Udara di Halim untuk membom Kostrad pada malam hari 1 Oktober. Mereka tidak menggunakan Batalyon 454 yang berdiri di sekitar jalan-jalan di selatan Halim untuk mempertahankan diri terhadap pasukan RPKAD yang sedang mendekat pada pagi 2 Oktober. Komandan batalyon, atas prakarsa sendiri, hampir terlibat dalam pertempuran dengan pasukan RPKAD, tapi mengundurkan diri memenuhi permintaan para perwira AURI yang tidak meng-

ingini adanya pertempuran di sekitar pangkalan udara. Begitu Batalyon 454 bubar pagi itu, G-30-S tidak lagi mempunyai sisa kelompok pasukan yang cukup besar.

Satu-satunya harapan tinggal terletak di daerah-daerah. Jawa Tengah merupakan basis PKI yang paling kuat dan tempat Biro Chusus menjalin jaringan paling luas di kalangan militer. Karena alasan inilah Jawa Tengah merupakan satu-satunya provinsi tempat G-30-S mewujudkan diri. Aidit dan Sjam, yang telah berketetapan untuk meneruskan G-30-S memutuskan bahwa Aidit harus terbang ke Jawa Tengah dan memimpin perlawanan dari sana. Malam hari itu mereka meminta Supardjo, yang berhubungan baik dengan Omar Dani, agar meminta bantuan Dani untuk menerbangkan Aidit keluar Jakarta. Dani menyiapkan sebuah pesawat untuk Aidit, dan satu pesawat lagi untuknya sendiri. Walaupun Dani tidak ikut bertanggung jawab atas G-30-S, tapi pernyataan dukungannya terhadap gerakan ini, yang dirancang sebelum pengumuman pembubaran kabinet Sukarno, telanjur disiarkan melalui radio. Ia lari untuk melindungi dirinya.

Begitu Aidit tiba di Yogyakarta, ia tidak tahu harus pergi ke mana dan menemui siapa. Tindakan ini tidak ada dalam rencana semula. Ia akhirnya tidak bisa mengorganisasikan gerakan perlawanan. Di Jawa Tengah sayap militer G-30-S juga hancur dengan cepat, dan akibatnya, sisi sipil gerakan ini menjadi ragu-ragu untuk secara terbuka menyatakan dukungannya. Provinsi ini secara umum tenang sejak 3 Oktober sampai kedatangan pasukan RPKAD di ibu kota provinsi, Semarang, pada 18 Oktober. Aidit tetap berada di bawah tanah, menunggu Sukarno mengupayakan agar Angkatan Darat mengikuti perintahnya dan menghentikan penindasannya terhadap PKI. Aidit tidak mengorganisasi atau memerintahkan perlawanan terhadap Angkatan Darat. Perang mati-matian antara PKI dan Angkatan Darat bukan hanya akan mengakibatkan kematian banyak pendukung partai, tapi juga akan mempersulit Sukarno menegaskan kembali wewenangnya terhadap Suharto. Kehancuran G-30-S memaksa Aidit memutar haluan. Pada sore hari 1 Oktober ia mengira G-30-S akan meluas dan menjadi cukup kuat untuk menata kembali seluruh negara. Ia menyetujui pengumuman radio yang mendemisionerkan kabinet Sukarno. Tapi begitu G-30-S hancur, ia kembali ke strategi lama partai, yaitu bergantung kepada Sukarno untuk melindungi

partai.

Menghilangnya Aidit dari Jakarta dan strategi yang mendadak berbalik, serta sikap Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto yang agresif sangat membingungkan pimpinan partai di Jakarta. Kekuatan partai selama ini terletak pada hierarkinya yang ketat, dengan perintah-perintah dan informasi dari atas ke bawah. Bahkan anggota-anggota inti Politbiro (misalnya Lukman, Njoto, dan Sudisman) kelabakan oleh suatu aksi yang – berlawanan dengan harapan mereka – mengumumkan pendemisioneran kabinet Sukarno, lalu tumbang dengan cepat. Dengan PKI yang tidak siap dan pasif, tentara Suharto tak mengalami kesulitan yang berarti untuk menyerangnya. Seandainya saja PKI memutuskan untuk melawan, partai ini bisa dengan serius menghalangi tentara Suharto. Buruh kereta api bisa menyabot kereta api yang mengangkut pasukan ke Jawa Tengah; montir-montir anggota serikat buruh di pangkalan kendaraan bermotor militer bisa menyabot jip, truk, dan tank; kaum tani bisa menggali lubang-lubang besar di jalan-jalan untuk menghadang gerak pasukan; para perwira dan prajurit simpatisan partai di kalangan militer bisa menyerang kelompok loyalis Suharto; pemuda-pemuda anggota Pemuda Rakjat bisa memerangi pemuda-pemuda antikomunis yang digalang militer. Namun partai tidak melawan ofensif Angkatan Darat. Banyak orang yang terkait dengan PKI atau organisasi-organisasi sayap kiri dengan sukarela melapor ke kantor-kantor atau pos-pos militer dan polisi ketika mereka dipanggil dalam Oktober-November 1965, dengan keyakinan akan dibebaskan kembali sesudah beberapa saat lamanya mereka diperiksa. Karena merasa tidak berbuat apa pun untuk membantu G-30-S, mereka tidak menduga akan ditahan selama waktu tak terbatas tanpa dakwaan dan dituduh memainkan peranan dalam rencana besar untuk melakukan pembunuhan massal.[13] Huru-hara itu diduga ibarat badai yang akan segera berlalu dan membiarkan kewenangan Sukarno tetap utuh.

PURNAKATA

Orang boleh memandang pembunuhan politik terhadap PKI yang diatur Angkatan Darat merupakan hasil dari pertikaian amoral untuk mem-

perebutkan kekuasaan negara: jika G-30-S berhasil dan PKI menang, Angkatan Darat dan orang-orang sipil nonkomunis yang memihak Angkatan Darat akan mengalami penderitaan yang sama. Kedua belah pihak bisa dilihat sebagai para petinju. Bahasa yang digunakan saat itu pun memperlihatkan analogi, misalnya: "memukul atau dipukul" dan "pukulan yang menentukan." Koran PKI menggambarkan G-30-S sebagai tinju yang menghantam wajah Dewan Jenderal. Karena orang tidak akan merasa kasihan kepada petinju yang terjungkal, maka ia seharusnya, demikian tampaknya, juga tidak akan merasa kasihan kepada anggota-anggota PKI yang ditahan dan yang dibantai oleh Angkatan Darat. Pandangan seperti ini di Indonesia sudah menjadi lumrah di kalangan orang-orang yang mendapat keuntungan dari rezim Suharto. Korban sebenarnya sama sekali bukan korban. Mereka orang-orang kalah yang akan berbuat kekerasan yang sama atau bahkan lebih kejam terhadap lawan mereka seandainya mereka memperoleh kesempatan.

Pandangan serupa ini keliru menafsirkan pembunuhan politik antikomunis. G-30-S diorganisasi sebagai pemberontakan terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Seandainya pasukan Suharto menanggapi G-30-S dengan setimpal, seharusnya mereka hanya menangkap dua belas orang anggota Politbiro PKI, begitu juga tokoh-tokoh militer dan sipil yang terlibat di dalam G-30-S. Tapi bahwa Angkatan Darat memburu setiap anggota PKI dan setiap anggota ormas yang terkait dengan PKI memperlihatkan bahwa tanggapan Angkatan Darat tidak ditetapkan oleh kebutuhan untuk menindas G-30-S saja. Maka, kita berhadapan dengan seorang petinju yang tidak sekadar memukul *knock-out* lawannya di atas gelanggang, tapi meneruskan serangannya kepada semua penggemar petinju yang kalah yang ada di stadion, kemudian mengejar-ngejar serta menyerang semua penggemar petinju lawannya di seluruh penjuru tanah air, bahkan terhadap mereka yang tinggal jauh dan tidak pernah mendengar tentang pertandingan itu sama sekali.

Bagi Suharto identitas para organisator G-30-S yang sebenarnya tidak penting. Dia dan para perwira Angkatan Darat kliknya mulai menyerang PKI dalam empat hari sesudah kejadian, bahkan sebelum mereka mendapat bukti bahwa PKI memimpin G-30-S. Bukan masalah bagi Suharto dan para opsirnya bila mereka tidak pernah menemukan bukti bahwa tidak semua orang, kecuali Aidit dan sejumlah kecil

kawan-kawan kepercayaannya (seperti diakui Sudisman dan Sjam pada 1967), sedikit banyak terlibat. Angkatan Darat mulai merekayasa bukti tentang PKI pada awal Oktober 1965. G-30-S merupakan dalih yang tepat sekali untuk melaksanakan rencana Angkatan Darat yang sudah ada sebelumnya untuk merebut kekuasaan. Jenderal-jenderal Angkatan Darat itu sudah berketetapan hati bahwa perampasan kekuasaan harus menyasar PKI sebagai musuh sambil tetap berpura-pura melindungi Presiden Sukarno.

Tragedi sejarah Indonesia modern tidak hanya terletak pada pembunuhan massal 1965-66 yang diorganisasi Angkatan Darat saja, tapi juga pada bertakhtanya para pembunuh, yang memandang pembunuhan massal dan operasi-operasi perang urat syaraf sebagai cara-cara sah dan wajar dalam mengelola tata pemerintahan. Sebuah rezim yang mengabsahkan dirinya dengan mengacu kepada sebuah kuburan massal di Lubang Buaya dan bersumpah "peristiwa sematjam ini tidak terulang lagi" (seperti tertera di Monumen Pancasila Sakti) mewariskan kuburan massal tak terbilang dari satu ujung tanah air ke ujung lainnya, dari Aceh di tepi barat sampai Papua di tepi timur. Pendudukan Timor Leste dari 1975 sampai 1999 telah meninggalkan puluhan ribu, jika bukan ratusan ribu, korban mati, kebanyakan terkubur tanpa nama. Setiap kuburan massal di Nusantara menandai pelaksanaan kekuasaan negara yang sewenang-wenang, tidak terbuka, dan rahasia, serta mencemooh budaya politik era-Suharto: hanya orang-orang sipil yang melakukan kekejaman dan hanya tentara yang menjaga kesatuan negeri ini. Pengeramatan peristiwa yang relatif kecil (G-30-S) dan penghapusan peristiwa bersejarah tingkat dunia (pembunuhan massal 1965-66) telah menghalangi empati terhadap korban, seperti keluarga para perempuan dan laki-laki yang hilang. Sementara berdiri sebuah monumen di dekat sumur, tempat tentara G-30-S membuang jasad tujuh perwira Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965, tidak ada satu monumen pun menandai kuburan-kuburan massal yang menyimpan ratusan ribu orang yang telah dibunuh atas nama penumpasan G-30-S. Begitu sedikit yang diketahui dengan rinci atau kepastian tentang jumlah orang yang mati, nama mereka, lokasi kuburan massal, cara bagaimana mereka dibantai, dan jati diri para pelaku. Di luar Lubang Buaya tersimpan misteri lebih banyak dan lebih ruwet lagi.

CATATAN

[1] Todorov, *Poetics of Prose*, 45.

[2] Zizek, "Detective and the Analyst," 28.

[3] Sheehan, "Simple Man in Pursuit of Power," 75.

[4] Lev, "Indonesia 1965," 105.

[5] Buku Lev tentang periode Demokrasi Terpimpin, *The Transition to Guided Democracy,* tetap merupakan bacaan pokok.

[6] Tentang politik Demokrasi Terpimpin sebagai segitiga, lihat Feith, "President Soekarno, the Army, and the Communists."

[7] Kisah paling rinci tentang kegagalan Angkatan Darat menuntut tindak kekerasan terhadap PKI pada 1960 terdapat dalam Van der Kroef, *Communist Party of Indonesia,* 227-240.

[8] Peace Corps, sebuah badan pemerintah yang didirikan Presiden Kennedy pada 1961, mengirim pemuda-pemudi Amerika, biasanya mahasiswa atau sarjana yang baru lulus, ke negeri-negeri Dunia Ketiga untuk membantu dalam proyek-proyek pengembangan ekonomi dan pendidikan. Pada 1965 Peace Corps memiliki sekitar 15.000 relawan yang bekerja di paling tidak 50 negara. Badan ini dirancang untuk menampilkan kepada dunia wajah Amerika yang lebih manusiawi dan bersahabat ketimbang militer Amerika Serikat, yang jangkauan global, jumlah personil, dan anggarannya jauh lebih besar. Untuk informasi tentang program Peace Corps di Indonesia lihat Friend, *Indonesian Destinies*, bab 3.

[9] Legge, *Sukarno*, 421-22. Untuk versi Subandrio tentang cerita mengenai telegram ini, lihat Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S*, 18-19. Untuk versi rezim Suharto, lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September*, 61-63.

[10] Tentang penculikan Sukarno dan Hatta, lihat Hering, *Soekarno*, 366-369.

[11] Cribb and Brown, *Modern Indonesia,* 98. Wibawa Sukarno dan Hatta tidak berkurang karena penculikan terhadap mereka pada 1945 itu. Contoh-contoh lain termasuk Sjahrir yang diculik pada 1946 di Solo; Residen dan Wakil Residen Solo diculik pada November 1946; dan Kepala Kepolisian Yogyakarta, Sudharsono, diculik pada 1947.

[12] Wawancara dengan Bungkus.

[13] Hasworo, "Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah."

LAMPIRAN 1

BEBERAPA PENDAPAT JANG MEMPENGARUHI GAGALNJA "G-30-S" DIPANDANG DARI SUDUT MILITER (1966)

Brigadir Jenderal Supardjo

Catatan Pengantar

Dokumen ini merupakan bagian dari berkas rekaman persidangan Mahmilub untuk Supardjo pada 1967. Petugas-petugas militer memperoleh salinan dari dokumen asli mungkin ketika mereka menangkap Supardjo pada Januari 1967 atau ketika mereka menyita dokumen-dokumen yang diselundupkan ke dalam penjara. Anggota staf Mahmilub menyalin dari aslinya dengan mengetik. Satu orang yang membaca dokumen asli pada akhir 1960-an saat berada di dalam penjara bersama Supardjo adalah Heru Atmodjo. Ia menegaskan bahwa salinan yang saya perlihatkan kepadanya sama dengan yang pernah ia baca. Ketika saya memperlihatkan salinan yang sama kepada salah satu putra Supardjo, Sugiarto, ia mengenali gaya penulisan ayahnya dan argumen-argumen yang dikemukakan ayahnya kepada keluarganya secara lisan.

Pengetik di Mahmilub kemungkinan sudah membuat kesalahan-kesalahan dalam proses penyalinan. Ia juga mungkin memberi terjemahan bahasa Indonesia dalam tanda kurung biasa untuk istilah-

istilah Belanda. Semua komentar dalam tanda kurung siku dari saya.

Motto: Dalam kalah terkandung unsur2 menang!
(Falsafah "Satu petjah djadi dua.")

Kawan pimpinan,

Kami berada di "Gerakan 30 September" selama satu hari sebelum peristiwa, "pada waktu peristiwa berlangsung" dan "satu hari setelah peristiwa berlangsung."[1] Dibanding dengan seluruh persiapan, waktu jang kami alami adalah sangat sedikit. Walaupun jang kami ketahui adalah hanja pengalaman selama tiga hari sadja, namun adalah pengalaman saat2 jang sangat menentukan. Saat2 dimana bedil mulai berbitjara dan persoalan2 militer dapat menentukan kalah menangnja aksi2 selandjutnja. Dengan ini kami sampaikan beberapa pendapat, dipandang dari sudut militer tentang kekeliruan2 jang telah dilakukan, guna melengkapi bahan2 analisa setjara menjeluruh oleh pimpinan dalam rangka menelaah peristiwa "G-30-S."[2]

Tjara menguraikannja mula2 kami utarakan fakta2 peristiwa jang kami lihat dan alami, kemudian kami sampaikan pendapat kami atas fakta2 tersebut.

<u>Fakta2 pada malam pertama sebelum aksi dimulai</u>:

1. Kami djumpai kawan2 kelompok pimpinan militer pada malam sebelum aksi dimulai, dalam keadaan sangat letih disebabkan kurang tidur. Misalnja: kawan Untung tiga hari ber-turut2 mengikuti rapat2 Bung Karno di Senajan dalam tugas pengamanan.[3]

2. Waktu laporan2 masuk, tentang pasukan sendiri dari daerah2, misalnja Bandung, ternjata mereka terpaksa melaporkan siap, sedangkan keadaan jang sebenarnja belum.

3. Karena tidak ada uraian jang jelas bagaimana aksi itu akan dilaksanakan maka terdapat kurang kemufakatan tentang gerakan itu sendiri dikalangan kawan2 perwira di dalam Angkatan Darat. Sampai ada seorang kawan perwira jang telah ditetapkan duduk dalam team pimpinan pada saat jang menentukan menjatakan terang2-an

mengundurkan diri.[4]

4. Waktu diteliti kembali ternjata kekuatan jang positip di fihak kita hanja satu kompi dari Tjakrabirawa. Pada waktu itu telah timbul keragu2-an, tetapi ditutup dengan sembojan “apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi.”

5. Dengan adanja kawan perwira jang mengundurkan diri, maka terasa adanja prasangka dari team pimpinan terhadap kawan lain di dalam kelompok itu. Saran2 dan pertanjaan2 dihubungkan dengan pengertian tidak kemantapan dari si penanja. Misalnja, bila ada jang menanjakan bagaimana imbangan kekuatan, maka didjawab dengan nada jang menekan: “ja, Bung, kalau mau revolusi banjak jang mundur, tetapi kalau sudah menang, banjak jang mau ikut.” Utjapan2 lain: “kita ber-revolusi pung-pung[5] kita masih muda, kalau sudah tua buat apa.”

6. Atjara persiapan di L.B. [Lubang Buaya] kelihatan sangat padat, sampai djauh malam masih belum selesai, mengenai penentuan code2 jang berhubungan dengan pelaksanaan aksi. Penentuan dari peleton2 jang harus menghadapi tiap2 sasaran, tidak dilakukan dengan teliti. Misalnja, terdjadi bahwa sasaran utama mula2 diserahkan pelaksanaannja kepada peleton dari pemuda2 jang baru sadja memegang bedil, kemudian diganti dengan peleton lain dari tentara, tetapi ini pun bukan pasukan jang setjara mental telah dipersiapkan untuk tugas-tugas chusus.[6]

<u>Fakta2 pada hari pelaksanaan</u>:
7. Berita pertama jang masuk bahwa Djenderal Nasution telah disergap, tetapi lari. Kemudian team pimpinan kelihatan agak bingung dan tidak memberikan perintah2 selandjutnja.

8. Menjusul berita bahwa Djenderal Nasution bergabung dengan Djenderal Suharto dan Djenderal Umar di Kostrad. Setelah menerima berita ini pun, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa2.

9. Masuk berita lagi bahwa pasukan sendiri dari Jon Djateng dan Jon Djatim tidak mendapat makanan, kemudian menjusul berita bahwa Jon Djatim minta makan ke Kostrad. Pendjagaan RRI ditinggalkan tanpa adanja instruksi.

10. Menurut rentjana, kota Djakarta dibagi dalam tiga sektor, Selatan, Tengah dan sektor Utara. Tetapi waktu sektor2 itu dihubungi, semua-semua tidak ada di tempat (bersembunji).

11. Suasana kota mendjadi sepi dan lawan selama 12 djam dalam keadaan panik.

12. Djam 19.00 (malam kedua). Djenderal Nasution-Harto dan Umar membentuk suatu komando. Mereka sudah memperlihatkan tanda2 untuk *tegenaanval* [serangan balik] pada esok harinja.

13. Mendengar berita ini Laksamana Omar Dani mengusulkan kepada Kw. Untung agar AURI dan pasukan "G-30-S" diintegrasikan untuk menghadapi *tegenaanval* Nato cs (Nasution-Harto).[7] Tetapi tidak didjawab setjara kongkrit. Dalam team pimpinan G-30-S, tidak memiliki *offensi-geest* [semangat menyerang] lagi.[8]

14. Kemudian timbul persoalan ketiga. Ja, ini dengan hadirnja Bung Karno di Lapangan Halim. Bung Karno kemudian melantjarkan kegiatan sbb:

a) Memberhentikan gerakan pada kedua belah pihak (dengan keterangan bila perang saudara berkobar, maka jang untung Nekolim).
b) Memanggil Kabinet dan Menteri2 Angkatan.[9] Nasution-Harto dan Umar menolak panggilan tersebut. Djenderal Pranoto dilarang oleh Nasution untuk memenuhi panggilan Bung Karno.[10]
c) Menetapkan caretaker bagi pimpinan A.D.

Hari kedua:
15. Kawan2 pimpinan dari "G-30-S" kumpul di L.B. Kesatuan RPKAD mulai masuk menjerang, keadaan mulai "*wanordelik*" [*wanordelijk*] (katjau). Pasukan2 pemuda belum biasa menghadapi praktek perang jang sesungguhnja. Pada moment jang gawat itu, sadja mengusulkan agar semua pimpinan sadja pegang nanti bila situasi telah bisa diatasi, sadja akan kembalikan lagi. Tidak ada djawaban jang kongkrit.

16. Kemudian diadakan rapat, diputuskan untuk memberhentikan perlawanan masing2 bubar, kembali ke rumahnja, sambil menunggu situasi. Bataljon Djateng dan sisa Bataljon Djatim jang masih ada akan diusahakan untuk kembali ke daerah asalnja.

17. Hari itu djuga keluar perintah dari Bung Karno agar pasukan berada di tempatnja masing2 dan akan diadakan perundingan. Tetapi fihak Nato tidak menghiraukan dan menggunakan kesempatan itu untuk terus mengobrak-abrik pasukan kita dan bahkan P.K.I.

Demikianlah fakta2 jang kami saksikan sendiri dan dari fakta2 ini tiap2 orang akan dapat menarik peladjaran atau kesimpulan jang berbeda-beda.

Adapun kesimpulan jang dapat kami tarik adalah sbb:

1. Keletihan dari kawan2 team pimpinan jang memimpin aksi di bidang militer sangat mempengaruhi semangat operasi, keletihan ini mempengaruhi kegiatan2 pengomandoan pada saat2 jang terpenting di mana dibutuhkan keputusan2 jang tjepat dan menentukan dari padanja.

2. Waktu info2 masuk dari daerah2, sebetulnja daerah belum dalam keadaan siap sedia. Hal ini terbukti kemudian bahwa masih banjak penghubung2 belum sampai di daerah2 jang ditudju dan peristiwa sudah meletus (kurir jang ke Palembang baru sampai di Tandjung Karang). Di Bandung siap sepenuhnja tapi untuk tidak repot2 menghadapi pertanjaan2 didjawab sadja "sudah beres."

3. Rentjana operasinja ternjata tidak djelas. Terlalu dangkal. Titik berat hanja pada pengambilan 7 Djenderal sadja. Bagaimana kemudian bila berhasil, tidak djelas, atau bagaimana kalau gagal djuga tidak djelas. Dan apa rentjananja bila ada *tegenaanval*, misalnja dari Bandung, bahkan tjukup dengan djawaban: "sudah, djangan pikir2 mundur!" Menurut lazimnja dalam operasi2 militer, maka kita sudah memikirkan pengunduran waktu kita madju dan menang, dan sudah memikirkan gerakan madju menjerang waktu kita dipukul mundur. Hal demikian, maksud kami persoalan mundur dalam peperangan bukanlah persoalan hina, tetapi adalah prosedur biasa pada setiap peperangan atau kampanje. Mundur bukan berarti kalah, adalah suatu bentuk dalam peperangan jang dapat berubah menjadi penjerangan dari kemenangan. Membubarkan pasukan adalah menjerah kalah.

Hal ini pula jang menjebabkan beberapa kawan militer mengundurkan diri, selain kawan tsb di hinggapi unsur ragu2, tetapi bisa ditutup bila ada rentjana jang djelas dan mejakinkan atas djalannja kemenangan.

4. Waktu dihitung2 kembali kekuatan jang bisa diandalkan hanja satu kompi dari Tjakrabirawa, satu bataljon diperkirakan dari Djateng dapat digunakan dan satu bataljon dari Djatim bisa digunakan sebagai figuran. Ditambah lagi dengan seribu lima ratus pemuda jang dipersendjatai. Waktu diajukan pendapat, apakah kekuatan jang ada dapat mengimbangi, maka djawaban dengan nada menekan, bahwa bila mau revolusi sedikit jang turut, tetapi kalau revolusi berhasil tjoba lihat nanti banjak jang turut. Ada pula pendjelasan jang sifatnja bukan tehnis, misalnja, "kita masih muda, kalau sudah tua, bakal apa revolusi." Kembali lagi mengenai masalah kekuatan kita, tjukup mempunjai kekuatan di Angkatan Darat jang tjukup tangguh. Dipandang dari segi tehnis militer, maka serangan pokok, dimana komandan operasi tertinggi sendiri memimpin, harus memusatkan kekuatannja pada sasaran jang menentukan. Saja berpendapat bahwa strategi kawan pimpinan adalah strategi "menjumet sumbu petasan" di Ibu kota, dan diharapkan mertjonnja akan meledak dengan sendirinja, jang berupa pemberontakan Rakjat dan perlawanan di daerah2 setelah mendengar isjarat tersebut. Disini terdapat sesuatu

kekeliruan: pertama: Tidak memusatkan induk kekuatan pada sasaran pokok. Kedua: Tidak bekerdja dengan perhitungan kekuatan jang sudah kongkrit.

5. Kami dan kawan2 di Staf melakukan kesalahan sebagai berikut: Menilai kemampuan kawan pimpinan operasi terlalu tinggi. Meskipun fakta2 njata tidak logis. Tetapi percaya bahwa pimpinan pasti mempunjai perhitungan jang ulung, jang akan dikeluarkan pada waktunja. Sesuatu keajaiban pasti akan diperlihatkan nanti, sebab pimpinan operasi selalu bersembojan "Sudah kita mulai sadja, dan selandjutnja nanti djalan sendiri." Kami sendiri mempunjai kejakinan akan hal ini, karena terbukti operasi2 jang dipimpin oleh partai sekawan, seperti kawan Mao Tzetung jang dimulai dengan satu regu, kemudian kita menumbangkan kekuatan Tjiang Kai Sek jang djumlahnja ratusan ribu. Setelah peristiwa jang pahit ini, maka kita sekalian perlu kritis dan bekerdja dengan perhitungan2 jang kongkrit. Apa jang kami lihat di Lobang Buaja, sebetulnja taraf mempersiapkan diri sadja belum selesai. Pada malam terachir bematjam2 hal jang penting belum terselesaikan, umpama: Pasukan jang seharusnja datang, belum djuga hadir (dari AURI). Ketentuan atau petundjuk2 masih dipersiapkan. Peluru2 di peti2 belum dibuka dan dibagikan. Dalam hal ini kelihatan tidak ada pembagian pekerdjaan, semua tergantung dari Pak Djojo.[11] Kalau Pak Djojo belum datang, semua belum berdjalan. Dan kalau Pak Djojo datang, waktu sudah mendesak.

Ketika masuk berita bahwa Nasution tidak kena dan melarikan diri, kelompok pimpinan mendjadi terperandjat, kehilangan akal dan tidak berbuat apa2. Meskipun ada advis untuk segera melakukan offensip lagi, hanja didjawab: "Ja", tetapi tidak ada pelaksanaannja. Selama 12 djam, djadi satu siang penuh, musuh dalam keadaan panik. Tentara2 dikota diliputi suasana tanda tanja, dan tidak sedikit jang kebingungan. (Waktu ini kami di istana, djadi melihat sendiri keadaan di kota.)

Disini kami mentjatat suatu kesalahan jang fundamentil jang pernah terdjadi dalam suatu operasi (kampanje), jani: "Tidak *uitbuiten* [memanfaatkan] sesuatu sukses" (prosedur biasa dalam melaksanakan

prinsip2 pertempuran jang harus dilakukan oleh tiap2 komandan pertempuran). Prinsip tersebut diatas, sebetulnja bersumber dari adjaran Marx jang mengatakan: "Bahwa setelah terdjadi suatu pemberontakan, tidak boleh ada sesaat pun dimana serangan terhenti. Ini berarti bahwa massa jang turut dalam pemberontakan dan mengalahkan musuh dengan mendadak, tidak boleh memberikan suatu kesempatan pun kepada kelas jang berkuasa untuk mengatur kembali kekuasaan politiknja. Mereka harus menggunakan saat jang itu sepenuhnja, untuk mengachiri kekuasaan rezim dalam negeri."[12]

Kami berpendapat, bahwa sebab dari semua kesalahan ini karena staf pimpinan dibagi 3 sjaf: a) Kelompok Ketua, b) Kelompok Sjam cs, c) Kelompok Untung cs. Seharusnja operasi berada di satu tangan. Karena jang menondjol pada ketika itu adalah gerakan militer, maka sebaiknja komando pertempuran diserahkan sadja kepada kawan Untung dan kawan Sjam bertindak sebagai Komisaris politik. Atau sebaliknja, kawan Sjam memegang komando tunggal sepenuhnja. Dengan sistim komando dibagi ber-syaf2, maka ternjata pula terlalu banjak diskusi2 jang memakan waktu sangat lama sedangkan pada moment tsb. dibutuhkan pengambilan keputusan jang tjepat, karena persoalan setiap menit ber-ganti2, susul-menjusul dan tiap2 taraf persoalan harus satu persatu setjepat mungkin ditanggulangi.

[tidak ada poin enam]

7. Setiap penjelenggaraan perang, seharusnja djauh sebelumnja mempunjai "*Picture of the Battle*" (Gambaran Perang). Apa jang mungkin terdjadi setelah peristiwa penjergapan, bagaimana situasi lawan pada setiap saat dan setiap taraf pertempuran, bagaimana situasi pasukan sendiri, bagaimana situasi pasukan di Djakarta, bagaimana situasi di Bandung (ingat pusat Siliwangi[13]), bagaimana situasi di Djateng dan Djatim, dan bagaimana situasi diseluruh pelosok tanah air (dapat diikuti via radio). Dengan berbuat demikian, maka kita bisa melihat posisi taktis di Djakarta dalam hubungannja dengan strategi jang luas. Dan sebaliknja, perhubungan strategi jang menguntungkan atau merugikan dapat tjepat2 kita mengubah taktik kita di medan pertempuran.

Pada waktu musuh panik seharusnja tidak usah diberi waktu. Kita harus masuk menjempurnakan kemenangan kita. Dalam keadaan demikian musuh dalam keadaan serba salah dan kita dalam keadaan serba benar. Satu bataljon jang panik akan dapat dikuasai oleh hanja kekuatan satu regu sadja. Tetapi hal jang menguntungkan ini tidak kita manfaatkan. Bahkan kita berlaku sebaliknja:

1) Komandan Sektor (Selatan/Tengah/Utara) dalam keadaan dimana kita sedang djaya, malah pada menghilang. Mereka bertugas di antaranja mengurus soal2 administrasi, terhadap pasukan jang beroperasi dan berada di masing2 sektornja. Tetapi semua sektor seperti jang telah ditetapkan, hanja tinggal di atas kertas sadja. Dari sini kita menarik peladjaran dengan tidak adanja kontak antara satu sama lain (faktor *verbinding*-komunikasi), maka masing2 mendjadi terdjerumus dalam kedudukan terasing, sehingga buta situasi dan menimbulkan ketakutan.

2) Siaran radio RRI jang telah kita kuasai tidak kita manfaatkan. Sepandjang hari hanja dipergunakan untuk membatjakan beberapa pengumuman sadja. Radio stasion adalah alat penghubung (mass media). Seharusnja digunakan semaksimal mungkin oleh barisan Agitasi Propaganda. Bila dilakukan, keampuhannja dapat disamakan dengan puluhan Divisi tentara. (Dalam hal ini lawan telah sukses dalam perang radio dan pers.)

3). Pada djam2 pertama Nato cs menjusun komando kembali. Posisi jang sedemikian ialah posisi jang sangat lemah. Saat itu seharusnja pimpinan operasi musuh disergap tanpa chawatir resiko apa2 bagi pasukan kita.

8. Semua kematjetan gerakan pasukan disebabkan diantaranja *tidak makan*. Mereka tidak makan semendjak pagi, siang dan malam, hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menjerbu kedalam kota. Pada waktu itu Bataljon Djateng berada di Halim. Bataljon dari Djatim sudah ditarik ke Kostrad

dengan alasan makanan. Sebetulnja ada 2 djalan jang bisa ditempuh, pertama: Komandan Bataljon diberi wewenang untuk merektuir makanan di tempat2 dimana ia berada. Hubungan dengan penduduk atau mengambil inisiatip membuka gudang2 makanan, separo bisa dimakan dan selebihnja diberikan kepada Rakjat jang membantu memasaknja. Dengan demikian ada timbal balik dan tjukup simpatik dan dapat dipertanggung djawabkan. Djalan kedua: Organisasi sektor seharusnja menjelenggarakan hal tsb.

9. Setelah menerima berita bahwa Djenderal Harto menjiapkan *tegenaanval* dan Laksamana Omar Dani menawarkan integrasi untuk melawan pada waktu itu, harus disambut baik. Dengan menerima itu maka seluruh kekuatan AURI di seluruh tanah air, akan turut serta. Tetapi karena tidak ada kepertjajaan, bahwa kemenangan harus ditempuh dengan darah, maka tawaran jang sedemikian pentingnja tidak mendapat djawaban jang positip. Pak Omar Dani telah bertindak begitu djauh sehingga telah memerintahkan untuk memasang roket2 pada pesawat.

10. Faktor2 lain jang menjebabkan kematjetan, terletak pada tiada pembagian kerdja. Bila kita ikuti sadja prosedur staf jang lazim digunakan pada tiap2 kesatuan militer, maka semua kesimpang siuran dapat diatasi. Seharusnja dilakukan tjara bekerdja sbb: Pertama, perlu ditentukan siapa komandan jang langsung memimpin aksi (kampanje). Kawan Sjam-kah atau kawan Untung. Kemudian pembantu2nja atau stafnja dibagi. Seorang ditunjuk bertanggung djawab terhadap pekerdjaan intel (penjelidikan/informasi). Jang kedua, ditundjuk dan bertanggung djawab terhadap persoalan situasi pasukan lawan maupun pasukan sendiri. Dimana, bagaimana bergeraknja pasukan lawan, bila demikian, apakah advisnja tentang pasukan sendiri kepada komandan. Kawan jang ketiga ditundjuk untuk bertanggung djawab terhadap segala sesuatu jang berhubungan dengan perorangan (personil). Apakah ada jang luka atau gugur, apakah ada pasukan jang absen, apakah ada anggauta jang morilnja merosot. Djuga personil lawan mendjadi persoalannja umpama: soal tawanan, pemeliharaanja, pengamannja dan dsb. Kemudian

kepada kawan jang keempat, ditugaskan untuk memikirkan hal2 jang ada sangkut pautnja dan logistik, pembagian sendjata dan munisi, pakaian, makanan, kendaraan dsb. Karena menang kalahnja pertempuran pada dewasa ini tergantung djuga pada peranan bantuan Rakjat, maka ditundjuk kawan jang kelima, untuk tugas seperti tersebut di atas. Djadi singkatnja, komandan dibantu oleh staf-1, staf-2, staf-3, staf-4, staf-5. Komandan, bila terlalu sibuk, ia bisa menundjuk seorang wakilnja. Selandjutnja tjara bekerdjanja staf, saja rasa tidak ada bedanja dengan prinsip2 pekerdjaan partai, berlaku djuga prinsip sentralisme demokrasi. Staf memberikan pandangan2-nja dan komandan mendengarkan, mengolahnja di dalam fikiran dan kemudian menentukan. Berdasarkan keputusan ini staf memberikan *directive* [perintah] untuk melaksana oleh echelon2 bawahan. Dengan tjara demikian maka seorang komandan terhindar dari pemikiran jang subjektif. Tetapi djuga terhindar dari suasana jang liberal. Apa jang terdjadi pada waktu itu adalah suatu debat, atau diskusi jang *langdradig* (tak berudjungpangkal), sehingga kita bingung melihatnja, siapa sebetulnja komandan: kawan Sjamkah, kawan Untungkah, kawan Latifkah atau Pak Djojo? Mengenai hal ini perlu ada penindjauan jang lebih mendalam karena letak kegagalan kampanje di ibu kota sebagian besar karena tidak ada pembagian komandan dan kerdja jang wajar.

11. Adalah hal jang remeh, tetapi hal ini perlu mendapat perhatian. Umpamanja, tjara2 diskusi terutama jang banjak dilakukan oleh kawan Latif. Tidak mendahulukan soal2 jang lebih pokok untuk dipetjahkan terlebih dahulu. Soal2 jang masih bisa ditunda dibitjarakan kemudian. Di waktu mulut meriam diarahkan kepada kita, maka jang urgen adalah bagaimana tindakan kita untuk membungkam meriam tsb, bukan membitjarakan soal2 lain jang sebetulnja bisa dibitjarakan kemudian.

12. Dengan kehadirannja Bung Karno di Halim, maka persoalan telah mendjadi lain. Pada waktu itu, kita harus tjepat dalam silat politik. Harus tjepat menentukan titik berat strategi kita. Apakah kita berdjalan sendiri, apakah kita berdjalan dengan Bung Karno. Kalau

kita merasa mampu, segera tentukan garis djalan sendiri. Kalau kita menurut perhitungan, tidak mampu untuk memenangkan revolusi sendirian, maka harus tjepat pula merangkul Bung Karno, untuk bersama2 menghantjurkan kekuatan lawan. Menurut pendapat saya pada saat2 itu situasi telah berubah dengan keterangan sbb:

1) Bung Karno: a. Memanggil kabinet dan para Menteri Angkatan.
b. Mengeluarkan surat perintah, kedua fihak agar tidak bertempur.
c. Memegang sementara pimpinan A.D. dan menundjuk seorang caretaker untuk pekerjaan intern A.D.

2) Omar Dani: Tidak mau kalau harus berhadapan dengan Bung Karno, dan sarannja supaya bersama-sama dengan Bung Karno melanjutkan revolusi.

3) Ibrahim Adji: Mengeluarkan pernjataan, bila terdjadi apa2 terhadap Bung Karno, maka Siliwangi akan bergerak ke Djakarta.

4) M. Sabur: Menilpun RPKAD untuk siap sewaktu2 Bung Karno dalam bahaya.

5) NATO cs: Menolak panggilan Bung Karno untuk hadir di Halim.

6) G-30-S: Kawan Sjam tetap revolusi harus djalan sendiri tanpa Bung Karno. Keadaan Jon Djateng sudah letih dan belum selesai memetjahkan soal bagaimana makan. Keadaan pimpinan dalam keadaan bimbang.

7) “Daerah”: Baru Nusatenggara jang memberikan reaksi, Bandung sepi, Djateng sepi, djuga Djatim sepi.
Massa di Djakarta sepi. Daerah2 di seluruh kepulauan Indonesia, pada waktu itu tidak terdengar tjetusan2 imbangan.

Pertimbangan:
- Bila kita teruskan berevolusi sendiri, maka kita akan berhadapan dengan Bung Karno + Nato cs dengan Angkatan Daratnja.
- Bila kita rangkul Bung Karno, maka kontradiksi pokok akan beralih di satu fihak golongan kiri + golongan Demokratis Revolusioner dan di lain fihak hanja golongan kanan sadja. Tetapi dari kita tidak ada ketentuan garis mana jang harus ditempuh. Dan sementara itu pun waktu berlalu terus, dan perkembangan semakin kongkrit. Nato menjusun kekuatannja, Bung Karno mengumpulkan anggota kabinetnja jang diperlukan.
Pada saat itu sebetulnja situasipun belum terlalu terlambat. Ada tjelah2 di mana segara harus kita masuki dalam persoalan menundjukan siapa jang mengganti Pangad. Bung Karno minta tjalon dari kita. Dari fihak Bung Karno mentjalonkan: 1) Ibrahim Adji dan 2) Mursid. Dari fihak kita mentjalonkan Rukman, Pranoto dan Basuki Rachmat. Achirnja disetudjui Pranoto. Seharusnja kita serahkan sadja kepada Bung Karno. Dengan demikian kita tidak meminta terlalu banjak. Dan Bung Karno ada kekuatan dalam menjelesaikan masalah intern A.D. dan dapat menghalang-halangi glundungnja aksi2 Nato cs.[14] Tetapi walaupun demikian, bila Pak Pranoto waktu itu tjekatan dan dapat menggunakan wewenang, maka situasi tidak seburuk ini. Seharusnja dengan surat keputusan itu, ia tjepat pidato di radio dan umumkan pengangkatannja. Tindakan kedua supaja kedua fihak menanti perintah2 tidak saling bertempur. Pak Pran harus djuga menjusun kekuatan brigade2 di sekitarnja dan langsung ia pimpin.[15] Dengan demikian maka langkah2 selandjutnja akan mempunjai kekuatan. Kemudian segera diisi dengan dalih2 sementara lowongan staf SUAD jang kosong. Sajang sekali kesempatan jang terachir ini tidak dipergunakan. Pak Pranoto achirnja setelah terlambat mulai berpidato di radio. Itu pun atas desakan saja melalui kawan Endang.[16] Tetapi isi pidatonja pun tidak karuan malah mengutuk G-30-S sebagai gerakan petualangan. Kata2 ini otomatis melumpuhkan perangsang2 revolusi di daerah2 terutama di Djateng. Idee seperti jang dilukiskan diatas, yaitu idee merangkul Bung Karno bukan semata-mata fikiran kompromi jang negatip, tetapi sesuatu "*om te redden wat er te redden*

valt," membela apa jang masih dapat dibela. Andaikata kalah, harus ada pertanggung djawab, maka hanja pelaksana2 G-30-S sadjalah jang tampil mempertanggung djawabkannja, sehingga keutuhan Partai tidak terganggu. Taktik tersebut diatas tidak lain bila kita mengetahui akan mendapatkan hanja kulitnja telur sadja, maka lebih baik mendapatkan isinja, walaupun hanja separuh sadja (*beter een halve ei dan een lege dop*).

13. Achirnja Nato cs memegang inisiatip dan tidak menghiraukan apa2 dan memulai dengan *tegen* offensifnja. Kekuatan militer G-30-S mereka kedjar dan kesempatan jang lama mereka tunggu2 tidak disia-siakan, yaitu: mengobrak-abrik PKI.

14. Sementara itu semua slagorde G-30-S berkumpul di LB. Disana-sini mulai terdengar tembakan dari RPKAD jang mulai mentjari kontak tembak. Kawan Sjam dan Kawan Untung cs, mulai rapat tentang menentukan sikap hadir di tempat tsb. komandan Jon Djateng dan seluruh anggota Bataljonnja. Komandan Bataljon Djatim djuga hadir tanpa pasukan. Kurang lebih seribu limaratus Sukwan jang dilatih di LB. Melihat situasi jang gawat ini tidak ada pilihan lain: a) Bertempur mati2-an atau, b) tjepat menghilang menjelamatkan diri. Diskusi berdjalan lama tanpa keputusan. Achirnja kami sarankan agar seluruh komando diserahkan kepada kami dan nanti bila situasi telah dapat diatasi wewenang akan diserahkan kembali kepada kawan Untung. Kawan Untung tidak setudju, karena bertempur terus pendapatnja sudah tidak ada dasar politiknja lagi. Apa jang di maksud dengan kata2nja itu, kami tidak begitu mengerti. Di lain fihak kawan Sjam tidak memberikan reaksi atas usul kami. Kemudian saja desak lagi supaja segera mengambil keputusan, bila terlambat nanti, maka kita terdjepit dalam suatu sudut di mana tidak ada pilihan lain, melawan pun hantjur dan lari pun hantjur. Karena posisi kita pada waktu sudah labil. Kemudian rapat memutuskan memberhentikan perlawanan dan setiap kawan diperintahkan kembali ketempat asal mereka masing2, dalam keadan jang serba lambat ini kemudian kami ambil inisiatip untuk menjelamatkan kawan pimpinan (Kawan Sjam) dan masuk ke kota Djakarta (Senen). Kawan Untung dalam tjara

membubarkan pasukannja pun melakukan kesalahan, seharusnja ia sebagai komandan langsung harus memberi petundjuk teknis bagaimana pelaksanaan menjebar dan menjusup kembali. Karena di LB banjak kawan2 Sukwan jang berasal dari luar kota Djakarta, bahkan ada jang dari Djateng. Mereka tentunja merasa asing dan tidak tahu djalan. Karena peraturannja: "*pur manuk*" sadja atau dilepaskan sekehendak masing2 maka banjak jang tertawan dan mendjadi mangsa penjiksaan pasukan2 Nato cs.

15. Pada hari ketiga dan keempat, kami menjarankan kepada pimpinan untuk tampil kemuka mendampingi Bung Karno untuk mentjoba menolong apa jang perlu ditolong. Pada saat itu, situasi belum sama sekali hantjur. Kabinet di mana terdapat orang2 revolusioner masih tetapi, usul kami di-tunda2 sehingga surat kami kepada Bung Karno baru diterima satu bulan kemudian. Bung Karno dalam kedudukan jang sudah terdjepit, mungkin djuga chawatir, bila sadja dekat2 padanja.

16. Demikianlah proses aksi "G-30-S" dari sukses berubah terdesak dan semakin terdesak sehingga achirnja tidak berdaja dan menjerahkan, segala inisiatip kepada fihak lawan.

17. Sebagai kesimpulan umum, maka kami berpendapat bahwa:
   a. Kita telah melakukan suatu *politiek strategisch verassing* (serangan tiba2) [strategi politik serangan mendadak] jang dapat dipergunakan oleh propaganda lawan sehingga memberikan kepada PKI suatu kedudukan jang terpentjil.
   b. Rentjana semula jang akan dilakukan: Revolusi bertingkat tiba2 dirobah dirubah mendjadi gerakan PKI seluruhnja. Bila gerakan dilakukan bertingkat, ja'ni taraf pertama hanja terbatas gerakan di dalam tubuh AD dengan tehnisnja sbb: setelah berhasil merebut pimpinan AD maka mulai mengganti para Panglima dan para Komandan jang mempunjai fungsi potensiil dengan unsur2, atau perwira2 demokratis revolusioner.[17] Kemudian dalam taraf kedua baru revolusi jang dipimpin oleh Partai. Dimulai dengan gerakan2 massa jang dibajangi oleh

militer2 jang progresip, persis seperti jang dilakukan oleh lawan terhadap Pemerintah sekarang. Bila rentjana revolusi bertingkat ini ditempuh, maka keuntungannja adalah sbb: Andaikata kita dipukul, maka Partai jang tetap mempunjai legalitet dan utuh dapat melindungi kawan2 militer. Bila aksi taraf pertama berhasil, maka suatu pidjakan jang baik untuk melontjat ke taraf revolusi berikutnja. Menurut hemat kami, kegagalan revolusi kita kali ini disebabkan di antaranja, dipindahkannja rentjana operasi jang semula bersifat intern AD, mendjadi operasi jang langsung dipimpin oleh Partai, sehingga menjebabkan terseretnja Partai dan diobrak-abriknja Partai.

c. Bidang persiapan: Gerakan 30 September dilakukan tanpa melalui proses persiapan jang teliti. Terlalu mempertjajai laporan2 dari kader2 bawahan. Seharusnja dalam keadan bagaimanapun pimpinan harus memeriksa dengan mata kepala sendiri tentang persiapannja, Komandan harus hadir menjaksikan 3 markas sektor, meskipun untuk beberapa menit sadja supaja ia bahwa semua pos2 telah terisi. Begitu pula persiapan2 lainnja. Sudah mendjadi kebiasaan di dalam ketentaraan dimanapun, melakukan pemeriksaan barisan sebelum ia bertugas. Misalnja ada satu regu hendak patroli, maka komandan peleton melihat regu itu, memeriksa alat2 perlengkapannja regu itu, persediaan pelurunja, menanjakan apakah perintah2-nja telah dimengerti dan baru regu itu bisa berangkat patroli. Apalagi/seharusnja G-30-S, suatu gerakan jang menentukan djutaan nasib rakjat. Gerakan jang bukan sadja bernilai nasional tetapi djuga mendjadi harapan kaum proletar seluruh dunia. Seharusnja kita djangan bertindak dengan gegabah.

d. Dalam saat2 jang kritis, pimpinan operasi harus terdjun di tengah pasukan, menjemangati anak buah supaja mereka bangkit melawan, meskipun dengan resiko hantjur semua. Bila sampai terdjadi, hantjur tidak apa2, kawan2 jang masih hidup akan melandjutkan usaha revolusi. Dan kalau kita bertindak demikian besar kemungkinan lawanlah jang akan angkat tangan, karena pada saat2 itu Nato belum mempunjai *grip*

[cengkeraman] terhadap TNI jang ada di kota. Suasana di mana2 belum mengutuk G-30-S. Dalam tiap2 perang revolusioner, seorang pemimpin harus sanggup membangkitkan di kalangan pengikutnja:

1. Djiwa kepahlawanan.
2. Kebulatan pikiran dan tekad.
3. Semangat berkorban.

e. Ada hal jang perlu dipelajari setjara mendalam. Kawan2 jang selama ini hidup di organisasi tentara bordjuis, sangat sulit dan mirip tidak sampai hati untuk mendahului teman2 seangkatannja. Hal ini terdjadi djuga pada bataljon jang berasal dari Djateng,[18] dan djuga pada peristiwa jang kami dengar kemudian, waktu menghadapi Pangdam Surjosumpeno.[19] Mungkin letaknja pada kelemahan pandangan ideologi, kelemahan dalam pandangan kelas. Adjaran Marxisme-Leninisme bahwa "Kalau tidak mereka jang kita basmi, maka merekalah jang akan membasmi kita."[20] Belum meresap, dan belum mendjadi keyakinan kawan2 di ABRI pada umumnja. Dari pengalaman ini maka pendidikan ideologi dan kesadaran pandangan kelas perlu mendjadi program Partai.
f. Strategi jang dianut dalam gerakan keseluruhan adalah sematjam strategi: "Bakar Petasan." Tjukup sumbunja dibakar di Djakarta dan selandjutnja mengharap dengan sendirinja bahwa meretjonnja akan meledak di daerah2. Ternjata tjara ini tidak berhasil. Ada dua sebab: mungkin sumbunja kurang lama membakar atau mesiu jang ada dalam tubuh meretjon itu sendiri dalam keadaan masih basah, kami hubungkan ini dengan pekerdjaan2 di waktu jang lampau, tjara2 menarik kesimpulan tentang kawan2 jang di ABRI dan massa adalah subjektif. Dari pengalaman ini kita harus bikin kebiasaan membesar2-kan situasi jang sebenarnja.[21] Biasanja kalau ada 10 orang sadja dalam satu peleton jang sudah dapat kita hubungi, dilaporkan bahwa seluruh peletonnja sudah kita (kawan). Kalau ada seorang Dan Jon jang kita hubungi, maka ada kemungkinan bahwa

seluruh Bataljon itu sudah kawan. Kekeliruan strategi G-30-S itu disebabkan djuga banjak kawan2 dari ABRI maupun dari daerah2 jang melaporkan bahwa massa sudah tidak dapat ditahan lagi. Bila pimpinan tidak mengambil sikap, maka rakjat akan [22] djalan sendiri (ber-revolusi). Mengikuti suara2 jang belum diperiksa kebenarannja berarti kita kena "agitasi" massa, sama halnja tidak mendjalankan "garis mangsa setjara tepat."

g. Melihat kemampuan dan kebesaran organisasi Partai di waktu2 jang lalu maka asalkan sadja kita taktis menggerakannja, kami rasa PKI tidak perlu kalah. Saja ibaratkan seorang pemasak jang mempunjai bumbu, sayur2 jang serba tjukup, tetapi kalau tidak pandai menilai temperatur dari panasnja minjak, besarnja api, bilamana bumbu2 itu ditjemplungkan dan mana jang didahulukan dimasak maka masakan itu pun tidak akan enak, satu tjontoh misalnja. Kami membawahi 18 Bataljon,[23] 3 di antaranja bisa dikerahkan untuk tugas2 revolusi, dan sudah dipersiapkan lengkap dengan pesawat angkutan Hercules berkat solidaritas dari kawan2 perwira di AD, jang mempunjai kedudukan komando, tetapi semua ini tidak dimanfaatkan, sehingga bukan kita jang menghantjurkan lawan "satu demi satu", tetapi sebaliknja kita jang di hantjurkan setjara "satu demi satu."

Sekian, dan kami tutup dengan sembojan :

> Sekali gagal, akan bertambah.
> Madju terus pada djalan pengrevolusioneran!

CATATAN

[1] Saya tidak tahu mengapa frasa ini diberi tanda petik ganda.

[2] Dari keseluruhan dokumen, cukup jelas bahwa yang dimaksud Supardjo adalah pimpinan PKI. Ada kemungkinan bahwa Supardjo menyerahkan analisis ini kepada Sudisman, pimpinan Politbiro yang tersisa, yang sedang mempersiapkan otokritik terhadap partai pada pertengahan 1966.

[3] Pada 30 September 1965 malam Presiden Sukarno menghadiri upacara penutupan

Konferensi Nasional Ahli Teknikdi stadion Senayan. Letnan Kolonel Untung menjadi bagian pengamanan untuk kehadiran Sukarno di dalam acara ini.

[4] Perwira ini boleh jadi Mayor Bambang Supeno, komandan Batalyon 530 Jawa Timur. Dalam laporan interogasinya (yang ditulis oleh tim intelijen Angkatan Darat), Supardjo *diduga mengatakan* (ini laporan interogasi yang harus dibaca dengan skeptisisme) Sjam memberitahu dia pada 1 Oktober pagi bahwa Mayor Supeno "masih diragukan." (Departemen Angkatan Darat Team Optis-Perpu-Intel, "Laporan Interogasi Supardjo di RTM," 19 Januari 1967, 4; dokumen ini termaktub dalam berkas rekaman persidangan Mahmilub untuk Supardjo.) Pasukan-pasukan Mayor Supeno merupakan yang pertama mundur; mereka menyerahkan diri ke Kostrad pada sore hari 1 Oktober meski Mayor Supeno sendiri tinggal di pangkalan Halim dengan anggota komplotan yang lain sampai dini hari 2 Oktober. Mayor Supeno menjemput wakil komandan batalyon, Letnan Ngadimo, di istana pada sekitar pukul 14.00 saat pasukan-pasukannya mulai menyerah, dan membawanya ke Halim, menurut kesaksian Letnan Ngadimo di persidangan Untung. Komandan Batalyon 454, sebaliknya, berusaha mempertahankan pasukan-pasukannya di Lapangan Merdeka; ketika ia akhirnya meninggalkan posisi tersebut, ia membawa sebagian besar anak buahnya ke Halim.

[5] Istilah *pung-pung* tampaknya salah ketik. Seharusnya *mumpung*.

[6] Sasaran utama kemungkinan adalah Jenderal Nasution. Pasukan-pasukan yang dikirim untuk menculiknya dipimpin oleh seorang prajurit.

[7] Nato adalah singkatan cerdas yang dibuat Supardjo untuk *Na*sution dan Suhar*to*.

[8] Istilah ini merupakan kombinasi kata Indonesia *offensi* yang berasal dari kata Belanda *offensief* dan kata Belanda *geest* yang berarti semangat.

[9] Para panglima keempat angkatan – Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Kepolisian – adalah menteri-menteri dalam kabinet Sukarno.

[10] Suharto, bukan Nasution, yang melarang Pranoto pergi ke Halim.

[11] Pak Djojo adalah nama samaran untuk Mayor Soejono dari AURI, komandan pasukan-pasukan yang menjaga pangkalan Halim. Supardjo mungkin menggunakan nama samaran dalam dokumen ini karena ia tidak tahu nama Soejono sebenarnja. Ini kemungkinan yang nyata karena Supardjo baru bergabung dengan komplotan ini sehari sebelumnya dan mungkin diperkenalkan kepada anggota-anggota lainnya saat mereka menggunakan nama-nama sandi. Nama Pak Djojo juga disebut oleh Njono, ketua CDB (Comite Daerah Besar) PKI Jakarta, pada pengadilannya di Mahmilub. Menurut Njono, Pak Djojo adalah nama samaran seorang perwira militer yang mencari sukarelawan PKI untuk dilatih di Lubang Buaya dari Juni sampai September 1965 (*G-30-S Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono*, 53-54, 64-65, 79-82). Heru Atmodjo menegaskan dalam pembicaraan dengan saya bahwa Pak Djojo adalah nama alias Mayor Soejono.

[12] Supardjo tampaknya menerjemahkan dan menulis ulang (memparafrasakan)

salah satu bagian dari *Revolution and Counter-revolution in Germany* (1896), kumpulan artikel-artikel koran yang aslinya diterbitkan pada 1852 dengan nama Marx tapi terutama ditulis oleh Engels: "[Posisi] defensif adalah kematian setiap pemberontakan bersenjata; pemberontakan itu kalah sebelum ia mengukur dirinya dengan musuh-musuhnya. Kejutkan musuh-musuhmu ketika kekuatan mereka masih tercerai-berai, siapkan sukses-sukses baru, betapapun kecilnya, tapi setiap hari; pertahankan peningkatan moral yang diberikan oleh keberhasilan pemberontakan pertama padamu; galang elemen-elemen yang ragu dan goyah itu ke sisimu yang selalu mengikuti letupan terkuat, dan yang selalu mencari sisi lebih aman; paksa musuh-musuhmu ke posisi mundur sebelum mereka mampu mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawanmu." (www.marxist.org/archive/marx/works/1852/germany/ch17.htm) Supardjo mungkin tidak membaca teks ini; dalam kumpulan karya Marx dan Engels teks ini kurang dikenal. Supardjo mungkin membaca esai Lenin "Advice of an Onlooker" (yang ditulis pada 21 Oktober 1917), yang mengomentari bagian teks di atas. Karya-karya Lenin lebih jamak dibaca pada masa sebelum 1965 di Indonesia. Tak bisa diragukan karena karya-karya Lenin lebih mudah dipahami dan lebih relevan bagi suatu partai komunis yang begitu disibukkan dengan berstrategi politik dari hari ke hari.

13 Kodam Siliwangi di Jawa Barat terkenal oleh anti-komunismenya; pasukan-pasukannya digunakan oleh kepemimpinan nasionalis untuk menjerang PKI di Jawa Timur pada 1948. Jenderal Nasution berasal dari Kodam Siliwangi.

14 Pernyataan ini tampaknya merupakan kritik terhadap pengumuman radio dari G-30-S yang mendemisionerkan kabinet Sukarno.

15 Saya tidak tahu Supardjo mengacu ke brigade yang mana. Pranoto adalah asisten Yani untuk personalia dan tidak membawahi pasukan langsung.

16 Identitas Kawan Endang tak diketahui.

17 Penggunaan kata *unsur-unsur* untuk mengacu pada "perwira-perwira demokrasi revolusioner" adalah suatu keanehan yang tidak bisa saya jelaskan.

18 Batalyon dari Jawa Tengah harus mengacu ke Batalyon 454, yang menduduki Lapangan Merdeka pada pagi hari dan kemudian meninggalkan posisi itu di sore hari setelah menerima perintah Suharto untuk menyerah. Namun aneh bahwa Supardjo tidak menyalahkan para perwira dari Batalyon 530 dari Jawa Timur juga yang menjerah ke Kostrad. Paling tidak ketika pasukan-pasukan Batalyon 454 meninggalkan Lapangan Merdeka, mereka menghindar untuk masuk Kostrad. Mereka melarikan diri ke Halim.

19 Surjosumpeno adalah Pangdam Diponegoro. Para perwira Gerakan 30 September mengambil alih markas kodam di Semarang pada 1 Oktober dan menahannya. Anderson dan McVey mencatat bahwa "Surjosumpeno berhasil mengecoh perwira-perwira muda yang mudah terkesan untuk meninggalkan dia sendiri cukup lama sehingga memungkinkan dia melarikan diri." (*Preliminary Analysis*, 46) Supardjo mengacu ke insiden ini ketika mengkritik ketidakmampuan perwira-perwira junior

untuk menentang atasan-atasan mereka.

[20] Saya belum berhasil menemukan sumber kutipan ini.

[21] Tampaknya ada kata "tidak" sebelum kata "membesar2-kan" yang tak tertulis entah oleh Supardjo sendiri atau oleh pengetik salinan dokumen ini.

[23] Terjemahan Fic atas dokumen ini menyebut jumlah batalyon adalah tigabelas. Dokumen versi saya jelas-jelas menunjukkan delapanbelas.

LAMPIRAN 2

KESAKSIAN SJAM (1967)

Catatan Pengantar

Sjam membuat pernyataan publik tentang Gerakan 30 September untuk pertamakalinya pada 7 Juli 1967. Militer, yang telah menangkap dia empat bulan sebelumnya, membawa dia ke Mahmilub untuk memberi pernyataan sebagai saksi dalam persidangan untuk salah satu pimpinan PKI, Sudisman. Pernyataan-pernyataan dia yang belakangan dalam persidangannya sendiri pada 1968 dan sebagai saksi di persidangan-persidangan lain tidak mengalihkan atau mengubah kesaksian awalnya secara substansial. Pengajuan pertanyaan terhadap Sjam berlangsung hampir sehari penuh. Saya hanya mengambil sejumlah kutipan dari kesaksian dia yang saya anggap cukup penting. Beberapa pertanyaan diajukan Hakim Ketua, sebagian lain diajukan oleh oditur. Saya menganggap tidak penting untuk mengidentifikasi masing-masing penanya.

Kesaksian

T: Apakah djabatan sdr dalam partai?
J: Pimpinan Biro Chusus PKI.
T: Pimpinan, apakah kepala?
J: Jah.

T: Kepala Biro Chusus Pusat?
J: Jah.
T: Dari PKI? PKI adalah singkatan dari?
J: Partai Komunis Indonesia.
T: Jah. Sdr masuk kedalam partai itu sedjak kapan?
J: Tahun '49.
T: Tahun '49, dimana itu?
J: Di Djakarta.
T: Waktu pertama kali masuk apakah djabatan sdr dalam partai?
J: Belum ada.
T: Belum ada, djadi sebagai apa?
J: Anggota biasa.
T: Anggota biasa. Sedjak kapan sdr mendjabat sebagai kepala Biro Chusus itu?
J: Achir tahun 1964.
T: Achir tahun 1964, kira-kira bulan berapa?
J: Nopember.
T: Sebelum itu apa djabatan sdr?
J: Anggota Departemen Organisasi.
T: Sedjak kapan sdr mendjadi anggota Departemen Organisasi?
J: Tahun '60.
T: Apakah pendidikan umum sdr?
J: Sekolah rakjat.
T: Dulu namanja apa?
J: H.I.S.
T: Sesudah itu?
J: Sekolah pertanian.
T: Sekolah pertanian, namanja asli?
J: Landbouw School.
T: Dimana?
J: Di Surabaja.
T: Tamat?
J: Hampir.
T: Hampir tamat. Itu Landbouw School djuga tamat?
J: Hampir.
T: Sampai klas berapa?

J: Sampai klas 3.
T: Mengapa tidak tamat?
J: Djepang datang.
T: Sesudah itu apakah sdr menempuh kursus-kursus?
J: Di djaman Djepang sekolah dagang. Di Jogja.
T: Sampai tamat?
J: Djuga tidak sampai tamat, sampai klas V.
T: Sebabnja?
J: Revolusi.
T: Klas berapa?
J: Klas 2 bavenbouw.
T: Biro Chusus itu dimana letaknja didalam struktur organisasi partai?
J: Tidak ada.
T: Djadi bagaimana?
J: Biro Chusus adalah aparat dari Ketua partai.
T: Djadi sdr selaku Kepala dari Biro Chusus, kepada siapa bertanggung djawab?
J: Kepada ketua partai.
T: Langsung?
J: Langsung.
T: Tidak ada orang lain?
J: Tidak ada.
T: Atau organ lain?
J: Tidak ada.
T: Djadi sdr djuga mendapat perintah langsung dari ketua partai?
J: Jah.
T: Dalam hal ini siapa?
J: Kawan D.N. Aidit.
T: Apakah tugas dari Biro Chusus itu?
J: Bekerdja di kalangan Angkatan Darat.
T: Bekerdja di kalangan Angkatan Darat, bagaimana itu pendjelasannja?
J: Mentjari anggota di kalangan anggota-anggota Angkatan Bersendjata.
T: Kalau sudah dapat lalu di…?
J: Lalu diorganisasi.

T: Kalau sudah diorganisasi?
J: Divididik.
T: Apakah pendidikan jang diberikan?
J: Soal theori dan ideologi.
T: Theori dan ideologi, theori apa?
J: Marxisme-Leninisme.
T: Ideologi apa?
J: Tjinta kepada partai.
T: Maksudnja partai apa ini?
J: Partai PKI.
T: Siapa jang membantu sdr?
J: Kawan Pono dan kawan Walujo [Bono].
T: Kawan Pono dan kawan Walujo, dan?
J: Itu sadja jang dekat.
T: Apa djabatan sdr Pono?
J: Kawan Pono wakil saja.
T: Sdr Walujo?
J: Wakil kedua.
T: Adanja Biro Chusus itu apakah diketahui djuga oleh lain-lain anggota partai?
J: Saja tidak tahu.
T: Sdr kenal dengan sdr Sudisman ini?
J: Ja.
T: Bagaimana sdr berkenalan dengan dia itu, artinja bagaimana sdr bisa mengenal dia, tjara perkenalan pertama dan sebagainja bagaimana?
J: Pertama saja kenal nama sadja. Lalu pernah ketemu dalam Departemen Organisasi. Disitu saja berkenalan.
T: Berkenalan dalam Departemen Organisasi itu sadja?
J: Jah.
T: Lain-lain tidak?
J: Tidak ada.
T: Apakah sdr Sudisman djuga mengenal sdr sebagai kepala Biro Chusus?
J: Saja tidak tahu.
T: Oh sdr tidak tahu. Tjoba disini sdr sudah banjak membuat Berita

Atjara? Tadi sudah sdr mulai bahwa tugas Biro Chusus adalah mentjari apa tadi itu?
J: Mentjari anggota di kalangan Angkatan Bersendjata.
T: Tjoba silahkan tjerita. Tjerita jang bebas sadja mengenai pekerdjaan Biro Chusus.
J: Djadi aktifiteit Biro Chusus adalah suatu aktifiteit sebagian daripada PKI didalam AB. Tiap-tiap anggauta pimpinan dari Biro Chusus mempunjai kewadjiban untuk melebarkan organisasi di kalangan Angkatan Bersendjata. Kalau sudah bisa meneliti dan mengetahui pedjabat-pedjabat jang ada, berusaha untuk mendekati dan mengenal. Sudah dapat mengenal, lalu berbitjara mengenai soal-soal politik umum. Sesudah mengetahui bagaimana seseorang pedjabat pada Angkatan Bersendjata ini apakah dia anti Komunis ataukah dia seseorang Demokrat, maka terus diadakan pertukaran pikiran mengenai soal-soal politik dalam negeri dan mengenai soal fikiran-fikiran jang madju. Sesudah diketahui bahwa pedjabat ini adalah orang jang mempunjai fikiran jang menurut pandangan dari sudut PKI orang ini adalah orang jang berpikiran madju, maka terus diadakan pembitjaraan-pembitjaraan soal-soal kepartaian. Kalau kelihatannja orang ini tidak menolak, tidak memberikan reaksi jang negatif, maka dilandjutkan pada soal-soal jang lebih mendalam, jaitu mengenai masalah teori Marxisme. Djuga setelah mengetahui orang ini mempunjai landasan jang baik untuk bisa mengerti dan memahami tentang Marxisme, terus ditingkatkan kesadarannja ke arah mentjintai partai. Itu proses, mula-mula bagaimana aktifiteit, dari pada seorang anggauta Biro Chusus dalam mentjari keanggautaannja dalam Angkatan Bersendjata. Sesudah mendapatkan seseorang, ditingkatkan dalam pengertian-pengertian teoritisnja. Terus diberikan beberapa kewadjiban untuk membantu partai, terutama dalam fikiran maupun dalam bidang-bidang materiil, umpamanja soal iuran sesudah itu, kalau ada beberapa orang jang sudah bisa ditarik, baru dibentuk satu group. Group ini melakukan pendiskusian tentang soal-soal politik praktis dan soal-soal teori. Artinja politik praktis ialah politik jang situasi politik jang terdjadi pada waktu itu, dan bagaimana garis daripada atau garis politik daripada Partai Komunis Indonesia pada waktu itu kalau menghadapi situasi jang kongkrit. Djadi demikian

tjara-tjara daripada Biro Chusus dalam mentjari keanggautaannja dalam Angkatan Bersendjata.
T: Ja, ini masih garis umumnja, lalu pelaksanaannja. Maksud saja pelaksanaan tehnis bagaimana? Apa jang dikerdjakan dalam bulan atau dalam permulaan tahun '65 dalam rangka uraian sdr tadi itu?
J: Saja belum begitu mengerti apa jang sdr Ketua maksudkan.
T: Dalam bulan Mei '65 sdr ingat, apakah ada sesuatu perintah dari Ketua partai? Apa itu isi perintahnja?
J: Berita tentang adanja Dewan Djenderal.
T: Bagaimana itu. Siapa jang memerintahkan?
J: Kawan D.N. Aidit.
T: Tjeritanja bagaimana itu?
J: Bahwa didalam meneliti mengenai soal-soal aktifiteit daripada Angkatan Darat terutama, jaitu dalam bidang politik dalam negeri dan masalah agraria, mengenai masalah Nasakom, mengenai masalah Kekaryawanan, mengenai masalah Front Nasional, mengenai masalah mempersendjatai buruh dan tani dan mengenai masalah pemerintahan daerah, ternjata bahwa aktifiteit-aktifiteit ini tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan satu aktifiteit jang bersifat lokal, tetapi bahwa semua aktifiteit ini adalah aktifieit jang dipimpin setjara sentral. Dan djuga tentang disebarkannja fikiran-fikiran tentang anti Komunisme, djuga diluaskannja tentang aktifiteit daripada PKI jang selalu merupakan aktifiteit untuk menundjukan kekuatannja.

Maka ini bisa diambil kesimpulan bahwa aktifiteit ini adalah terpimpin setjara sentral, dan pimpinan dalam sentral ini adalah merupakan satu pimpinan daripada para Djenderal-djenderal pimpinan Angkatan Darat. Dan Djenderal-djenderal pimpinan Angkatan Darat dalam memimpin aktifitet ini dinamakan, menamakan dirinja Dewan Djenderal. Maka dengan adanja aktifitet jang tersentralisir dan Dewan Djenderal ini, maka perlu kita waspada dan bersiap diri, itu jang didjelaskan kepada saja.
T: Lalu djadi sdr diperintahkan supaja waspada, dan bagaimana tadi?
J: Bersiap diri.
T: Kelandjutannja bagaimana? Waspada dan siap diri itu. Apa jang sdr ambil, langkah-langkah apa jang sdr tempuh sebagai Kepala Biro Chusus, setelah menerima perintah demikian dari Ketua Partai?

J: Setelah ada berita itu dari Ketua Partai saja terus mengadakan pemeriksaan Organisasi. Jaitu dilihat bagaimana kekuatan-kekuatan kita jang ada didalam ABRI, terutama dikalangan Angkatan Darat. Sesudah itu bisa dilaksanakan terus kita adakan penindjauan terhadap tenaga-tenaga didalam Angkatan Darat jang bisa pada waktunja nanti melaksanakan tugas selandjutnja daripada kawan D.N. Aidit. Dan pada waktu untuk menetapkan ini saja dengan Pono dan Walujo mengadakan satu perundingan untuk memilih tenaga-tenaga jang tjotjok dan memenuhi sarat-sarat untuk diberikan tugas menerima perintah daripada kawan D.N. Aidit. Sehingga dalam perundingan itu dapat disimpulkan untuk memilih tenaga-tenaga seperti Latief, Untung, Sujono, Sigit dan Wahjudi, ditambah dengan saja sendiri dan kawan Pono.

Sesudah mendapatkan kesimpulan tentang tenaga-tenaga ini, maka selandjutnja diadakan rapat-rapat persiapan sesudah bulan Agustus menerima keterangan daripada kawan D.N. Aidit tentang makin memuntjaknja situasi. Dan gedjala jang ada menundjukkan bahwa Dewan Djenderal sudah mulai melakukan persiapan-persiapan terachir untuk pada achirnja melakukan perebutan kekuasaan. Setelah ada soal-soal itu maka kami diberikan garis, apakah dalam menghadapi situasi jang sematjam ini, kami menunggu dipukul atau mesti memberikan pukulan terlebih dahulu. Karena kesimpulannja bahwa kami harus memberikan pukulan terlebih dahulu, kami melakukan persiapan-persiapan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara saja, Pono, Untung, Latief, Sujono, Sigit, dan Wahjudi. Sebagai pertemuan-pertemuan persiapan untuk melakukan gerakan jang pada achirnja dinamakan G 30 S. Dalam pertemuan-pertemuan itu jang memimpin adalah saja sendiri, dan dalam pertemuan pertama saja djelaskan tentang situasi jang memuntjak, dan tentang bahwa kita tidak boleh berlengah karena dalam situasi jang sematjam ini bagi kita adalah soalnja dipukul atau memukul. Dan pada saat-saat jang sematjam ini perlu siap siaga. Dan persiapan-persiapan jang perlu kita lakukan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Dewan Djenderal. Dan setelah pertemuan jang pertama ini diambillah satu kesimpulan, bahwa kita semua, artinja semua jang hadir disitu pada waktu itu, bisa menerima tentang gambaran

situasi dan tentang garis jang harus dilakukan. Dan dalam pertemuan-pertemuan selandjutnja dilakukan djuga mulai dilakukan pemeriksaan barisan. Pemeriksaan artinja pemeriksaan kekuatan dan pemeriksaan anggota-anggota kita jang ada dalam ABRI, terutama jang ada di Djakarta. Sesudah kita bisa melihat adanja kekuatan-kekuatan dalam pertemuan-pertemuan selandjutnja diperintji tentang kekuatan-kekuatan jang ada, dan apakah ada kekuatan-kekuatan bantuan jang bisa diharapkan jang datang dari luar, artinja dari luar daerah Djakarta Raya. Sehingga pada waktu itu bisa disimpulkan adanja tambahan dua Bataljon jaitu Jon 530 dan 454 dari Djawa Tengah. Sehingga dengan tambahan 2 Jon ini genaplah kurang lebih 6 Jon kekuatan jang bisa dihimpun pada waktu itu. Dengan kekuatan 6 Jon tempur ini bisa diperhitungkan untuk dapat melakukan satu gerakan. Sesudah tentang kekuatan bersendjata ini bisa disimpulkan dan bisa diambil satu keputusan, baru kira-kira pada antara pertengahan dan 20 September saja bertemu kepada kawan D.N. Aidit dan diminta untuk bisa menjusun satu konsep karena Dewan Djenderal telah menpunjai satu konsep jang konkrit dalam menghadapi situasi ini. Bagaimana kita? Waktu itu setelah saja pikirkan di rumah, saja membikin konsep tentang organisasi gerakan dan tentang organisasi politiknja. Organ gerakan pada waktu itu saja berpikiran untuk dinamakan Gerakan September dan mengenai organisasi politiknja adalah dua pikiran, jang ada pada saja pada waktu itu jaitu tentang namanja Dewan Militer ataukah Dewan Revolusi. Pada waktu itu saja tjondong pada nama Dewan Militer sebagaimana tjatatan jang ada dalam buku saja jang ada ditangan CPM.[1]

Tetapi setelah saja adjukan depada kawan D.N. Aidit tidak disetudjui tentang nama Dewan Militer, karena Dewan Militer mengandung arti jang terlalu sempit dan mengandung militerisme, dan terlalu sektoris maka itu dipilih nama Dewan Revolusi karena Dewan Revolusi lebih luas artinja dan lebih bisa mentjakup segala unsur-unsur nama badan politik didalam masjarakat jang ada. Achirnja diambillah keputusan nama badan politiknja adalah Dewan Revolusi. Djuga saja mengadjukan konsep tentang nama-nama dan achirnja djuga diadakan, saja adjukan kepada kawan D.N. Aidit terus diadakan perubahan-perubahan disana-sini dan achirnja

timbullah susunan Dewan Revolusi, jang ada seperti jang sudah disiarkan. Tentang gerakan sesudah itu diputuskan kira-kira pada tanggal 29, bahwa gerakan itu akan dilakukan mulai pada tanggal 30 maka gerakan dinamakan gerakan 30 September. Djadi sebelum itu dinamakan gerakan itu Gerakan 30 September.

Dalam gerakan ini saja pegang pimpinan politiknja dan sdr Untung pegang pimpinan Militernja tetapi pimpinan militer ini dibawah pimpinan politik. Djadi segala kedjadian jang terdjadi dalam gerakan adalah saja jang bertanggung djawab. Sesudah gerakan ini berdjalan gerakan ini dalam rentjananja, adalah melakukan pengamanan terhadap Djenderal-djenderal anggota dari Dewan Djenderal. Adapun pada waktu kedjadian itu terdjadi pembunuhan itu sebenarnja tidak ada rentjana sebelumnja oleh karena tudjuan daripada gerakan adalah pengamanan dan untuk mentjari fakta-fakta lebih djelas dan bukti-bukti adanja Dewan Djenderal. Adalah terdjadi penembakan-penembakan sampai mati Djenderal-djenderal ini adalah terdjadi pada waktu gerakan itu, djadi merupakan salah satu ekses dari suatu gerakan, memang itu satu konsekwensi; sekalipun demikian saja sebagai pimpinan bertanggung-djawab atas segala kedjadian jang ada.

Pada waktu gerakan itu berdjalan, maka gerakan ini tidak berdjalan menurut semestinja. Soal apa sebabnja, saja sendiri belum bisa mengetahui sampai sekarang. Sebab itu menghendaki suatu penelitian jang lebih mendalam dan lebih teliti, tetapi pada waktu gerakan itu berdjalan dan pada waktu Jon jang digerakkan didepan jaitu 454 dan 530, sudah menggabung kepada Kostrad dan artinja kekuatan sudah makin bertambah ketjil, maka saja ambil keputusan untuk mengundurkan gerakan ini jang tadinja bermarkas besar di Penas diundurkan masuk ke Halim.2 Dan sesudah dipertimbangkan setjara masak bagaimana djalannja gerakan ini kalau dilandjutkan djuga kekuatan sudah makin ketjil, sedangkan tidak ada tanda-tanda gerakan masa ini djuga mendukung dan mengikuti G 30 S maka achirnja saja ambil keputusan untuk melakukan pemunduran. Djuga setelah mendengar daripada Supardjo dari utjapan Presiden Sukarno bahwa djangan dilandjutkan tentang pertumpahan darah itu, maka achirnja diambil keputusan, jang saja ambil keputusan untuk mengundurkan gerakan. Biarpun sudah bisa dilihat lebih djauh

sebelumnja bahwa akan timbul soal-soal jang gekomplisir sesudah pemunduran daripada gerakan ini. Tetapi keputusan itu saja ambil djustru untuk menjelamatkan dari pada seluruh nation ini, artinja seluruh bangsa ini daripada satu keadaan jang chaos.

Tapi ternjata usaha ini karena ada tangan-tangan ketiga jang memasuki keadaan jang tidak normal dalam negeri kita ini, achirnja toch keadaan itu, biarpun tidak berdjalan lama, tetapi djuga menimbulkan hal-hal jang kurang diharapkan oleh semua orang jang mentjintai tanah airnja. Sekalipun kedjadian ini djuga saja sendiri bertanggung djawab atas terdjadinja hal-hal jang sematjam itu. Tudjuan daripada, kalau gerakan ini berhasil, sebetulnja untuk Dewan Revolusi itu adalah merupakan satu Dewan dimana nanti akan menjodorkan satu konsep kepada Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan politik nasakom, djadi membentuk suatu pemerintahan koalisi nasional berporoskan nasakom.

Djadi tidak ada maksud-maksud untuk mendirikan Negara Komunis itu tidak ada, tetapi untuk mendirikan Pemerintah Koalisi Nasional berporoskan nasakom. Djadi kalau bisa disetudjui oleh Bung Karno sebagai Presiden demikian, tetapi kalau ada tapi masih ada djuga hal-hal jang bisa diamandir kalau Bung Karno tidak setudju. Dus dasarnja Dewan Revolusi itu bersifat sementara artinja masih bisa dilakukan perubahan-perubahan.

Demikianlah apa jang saja masih ingat. Bagaimana hal-hal jang barangkali masih diperlukan.….

T: Apakah Biro Chusus mempunjai tjabang-tjabang di daerah?

J: Punja.

T: Apa bentuknja itu?

J: Biro Chusus Daerah.

T: Apakah Biro Chusus Daerah djuga berada dalam organisasi CDB?

J:Tidak.

T: Bagaimana?

J: Dia langsung berhubungan dengan Pusat.

T: Langsung berhubungan dengan Pusat?

J: Ja.

T: Djadi sekretaris CDB tidak tahu?
J: Ada jang tahu ada jang tidak.
T: Baik. Tadi sdr katakan bahwa Biro Chusus itu tidak terdapat dalam struktur organisasi Partai, betulkah demikian?
J: Betul.
T: Apakah dapat dikatakan bahwa Biro Chusus itu bersifat ilegaal?
J: Ilegaal setjara artinja setjara negatif tidak, oleh karena didjamin oleh dasar daripada PKI itu tentang dasarnja jaitu Centralisme Demokrasi, dimana Ketua mempunjai hak untuk melakukan tindakan-tindakan atau untuk melakukan sesuatu aktivitet jang bersifat organisatoris. Djadi itu djaminannja. Tapi kalau itu dinamakan setjara umum setjara hukum memang itu bisa dinamakan ilegal. Tapi tidak dalam arti jang negatif.
T: Tjoba harap diulangi mengenai djaminan jang chusus tadi.
J: Djaminannya adalah dasar daripada organisasi PKI jaitu Centralisme Demokrasi, atau kalau itunja "Democratie Centralisme". Didalam soal sentralisme Ketua mempunjai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan jang tidak ada didalam Konstitusi Partai. Dan djuga itu didjamin oleh salah satu pasal terachir daripada Konstitusi Partai jaitu bahwa didalam keadaan jang luar biasa Partai dapat diorganisir setjara Luar Biasa. Sedangkan pada tahun '64 itu sebetulnja mungkin oleh Pimpinan Partai terutama oleh Ketua bisa dianggap adanja gedjala-gedjala seperti Dewan Djenderal ini dianggap sebagai suatu keadaan jang luar biasa maka itu Ketua menggunakan wewenangnja didalam Demokrasi Sentralisme jang ada ditangannja itu untuk melakukan kebidjaksanaan organisasi.
T: Ja. Tadi sdr katakan bahwa mendekati anggota-anggota ABRI itu sedjak tahun 1957. Betulkah itu?
J: Ja. Betul.
T: Apakah itu berlaku djuga di daerah-daerah?
J: Tidak seluruhnja, terutama hanja di Djawa.
T: Di Djawa Timur siapa-siapa jang didekati?
J: Wah saja tidak tahu kalau didaerah-daerah.
T: Tidak tahu. Di Djawa Tengah?
J: Djuga tidak tahu.
T: Di Djakarta?

J: Kalau di Djakarta jang saja sendiri langsung mendekati itu adalah Pardjo, Major Suganda, Kolonel Sidik, sedang jang baru didekati waktu itu. Pada tahun-tahun sesudah enampuluhan Kolonel Mustofa, Brig. Djen. Djuhartono, Kolonel Machmud Pasha itu jang saja langsung.
T: Sdr sebut Pardjo maksudnja Brigdjen Supardjo?
J: Ja.
[Sjam menjelaskan bahwa pada pagi 26 Agustus, dia , Pono dan Walujo bertemu untuk mendiskusikan penyusunan Gerakan 30 September.]
T: Sore harinja [26 Agustus] sdr pergi kemana?
J: Sore harinja saja menghadap Ketua.
T: Ketua siapa?
J: Ketua D.N. Aidit.
T: Dimana?
J: Dirumahnja.
T: Kira-kira djam berapa?
J: Antara djam 9 dan 10.
T: Rumahnja didjalan mana?
J: Di Pegangsaan Barat.
T: Waktu sdr datang dengan siapa?
J: Sendiri.
T: Apa jang sdr bitjarakan dan sdr laporkan?
J: Melaporkan tentang hasil pertemuan pagi hari.
T: Lalu apa kata sdr Aidit?
J: Ja, baik, landjutkan tentang persiapannja.
T: Lalu? Apakah sdr. Aidit sudah puas dengan 3 tenaga ini?
J: Oh belum puas.
T: Lalu?
J: Supaja ditambah.
T: Siapa jang memerintahkan itu? Siapa jang mengatakan supaja ditambah?
J: Ketua D.N. Aidit.
T: Kepada siapa?
J: Kepada saja.

Tentang Keterlibatan Pimpinan Partai
T: Baik, didalam rangkaian ini apakah saudara mendengar dari sdr. Aidit, bahwa gerakan ini adalah sudah mendjadi keputusan partai?
J: Tidak.
T: Begini saudara Sjam didalam Berita Atjara menjebut bahwa waktu saudara mendapat instruksi dari D.N. Aidit dalam pentjetusan Dewan Revolusi?
J: Ja.
T: Sdr menanjakan kepada saudara Aidit betulkah itu?
J: Ja.
T: Apa pertanjaan saudara?
J: Apakah ini sudah mendjadi keputusan partai?
T: Lalu djawab dari Ketua?
J: Ketua djawab keputusan partai.
T: Keputusan partai itu saudara dengar itu kapan, tanggal 20 itukah atau hari lain?
J: Sebelumnja.
T: Djadi sebelumnja, jadi kapan?
J: Sebelumnja.
T: Persisnja?
J: Kira-kira tanggal 27.
T: 27, saudara pasti ataukah …?
J: Kira-kira.
T: Kalau itu saja katakan tanggal 28 atau 29 bagaimana?
J: Tidak keberatan.
T: Tidak keberatan, dus betul saudara mendengar dari sdr Aidit bahwa instruksi dari sdr Aidit kepada sdr dalam rangka pentjetusan Dwan Revoulsi dan alatnya G 30 S atau oleh sdr Aidit didjawab sudah merupakan keputusan partai, betul?
J: Ja.
T: Tidak keliru lagi?
J: Tidak.

Tentang Pasukan-pasukan yang Digunakan untuk G-30-S
T: Tadi sdr menjebut bahwa untuk melaksanakan gerakan itu, jang achirnja bernama G 30 S, telah tersedia 6 bataljon tempur, betulkah

itu?
J: Betul.
T: 6 Bataljon tempur itu Bataljon mana sadja?
J: Dari Tjakra dari Brigif 1 Bataljon.
T: Tjakra berapa Bataljon?
J: Satu kompi, Brigif satu bataljon kemudian dari P.3.
T: Apa itu P.3?
J:. Pasukan Pembela Pangkalan dari AURI. P-3 AURI, satu bataljon, terus tenaga-tenga tjampuran 2 kompi, terus dari 530-454 dan 1 bataljon dari sukwan [sukarelawan].
T: Tadi sdr mengatakan bataljon 530 itu berasal dari mana?
J: Dari Djawa Timur.
T: 454 dari mana?
J: Djawa Tengah.
T: Sdr berada di Djakarta, bagaimana bisa mengumpulkan bataljon-bataljon ini?
J: Tidak dikumpulkan setjara sengadja, bisa mengumpulkan. Djadi bataljon ini kebetulan ditugaskan untuk ke Djakarta dalam rangka hari ABRI. Dan karena ini merupakan, kami pandang, suatu kekuatan jang bisa dipergunakan, kami mengambil kesempatan ini.
T: Sdr mengatakan tidak sengadja. Saja belum begitu mengerti, mengapa itu suatu *vervalligheid*, satu kebetulan, lalu sdr dapat mengumpulkan 2 bataljon. Bagaimana, tjoba pendjelasannja, bagaimana ini?
J: Djadi sebetulnja, sebulan sebelumnja hari ABRI itu sudah ada berita bahwa 2 bataljon ini jaitu Raiders dari Djatim dan Djateng akan diperbantukan didalam hari Angkatan Bersendjata di Djakarta. Terus kita mengadakan penelitian terhadap 2 kesatuan ini, setelah ternjata 2 kesatuan ini kita pandang bisa, kita pergunakan kesempatan ini kita pergunakan untuk menambah kekuatan jang ada di Djakarta dalam gerakan ini, djadi tidak sengaja umpamanja bataljon ini di Djakarta, tidak sengadja begitu tapi kebetulan karena ditugaskan ke Djakarta dan kita tindjau bisa diadjak didalam gerakan kita pergunakan kesempatan itu.
T: Sdr mengatakan sebulan sebelumnja terhitung mulai kapan itu?
J: Djadi kira-kira antara 10-15 September itu, kita sudah menerima

berita bahwa 530 dan 454 akan ditugaskan ke Djakarta.
T: Kira-kira tanggal 10-15 September 65 sdr sudah mendengar berita bahwa 2 bataljon ini akan ditugaskan di Djakarta. Sdr mendengar berita ini darimana?
J: Dari Djatim dan Djateng.
T: Tegasnja dari Biro Chusus?
J: Dari Biro Chusus Djatim dan Biro Chusus Djateng.
T: Kira-kira bunji berita itu bagaimana?
J: Bahwa bataljon 530 ini dari Djawa Timur akan ditugaskan untuk melakukan upatjara tanggal 5 Oktober, dan akan berangkat ke Djakarta itu beritanja.
T: Hanja itu sadja?
J: Jah.
T: Apakah tidak disertai satu penilaian tentang Bataljon ini?
J: Saja terus menanjakan bagaimana keadaan bataljon ini, lalu dijawab bahwa ada tenaga-tenaga jang bisa digunakan untuk melakukan gerakan.
T: Jang mendjawab itu dari siapa?
J: Dari Biro Chusus daerah Djawa Timur.
T: Untuk Djatim siapa namanja?
J: Hasim.
T: Untuk Djawa Tengah siapa namanja?
J: Salim.
T: Apakah sdr pernah menerima laporan bahwa bataljon-bataljon ini sudah didekati oleh Biro Chusus daerah?
J: Jah.

Asal-usul Biro Chusus

T: Tadi dikatakan bahwa Biro Chusus itu terbentuk pada tahun 1964, betul?
J: Ja.
T: Dalam kalangan lain saudara mengatakan bahwa saudara bekerdja di Angkatan Bersendjata ini mulai kira-kira tahun 57?
J: Ja.
T: Aparaat mana atau aparaat partai mana jang melaksanakan pekerdjaan ini sebelum adanja Biro Chusus itu, djadi saudara bekerdja

itu didalam organ apa dari biro partai waktu itu?
J: Saja waktu itu sebagai pembantu Ketua.
T: Oh pembantu Ketua. Bukan di Departemen Organisasi tadi?
J: Belum.

Tentang Kehadiran Aidit di Pangkalan AURI Halim
T: Kemudian apakah benar D.N. Aidit dibawa ke Halim pada hari itu djuga, malam itu?
J: Ja, betul.
T: Siapa jang membawanja?
J: Sujono.
T: Atas perintah?
J: Saja.
T: Maksudnja, maksud beradanja D.N. Aidit di Halim untuk apa?
J: Untuk mendekati pimpinan gerakan.
T: Untuk mendekati. Didalam P.V. tertjantum untuk memudahkan hubungan Cenko [Central Komando] dengan Aidit dan pengontrolan terhadap rentjana gerakan?
J: Ja. …
T: Saudara Sjam, saudara tahu sdr Aidit pada tanggal 1 Oktober 65?
J: Ja.
T: Dimana waktu itu?
J: Di Halim.
T: Waktu saudara Aidit berangkat saudara tahu?
J: Tahu.
T: Berangkat kemana?
J: Ke Djogja.
T: Dengan mempergunakan apa?
J: Pesawat.
T: Kepergiannja itu menurut jang saudara ketahui maksudnja apa?
J: Untuk menghindari Djakarta.
T: Untuk?
J: Menghindari Djakarta. Untuk menjelamatkan diri.
T: Mengapa dihindari?
J: Karena gerakan gagal.
T: Dia pergi dengan kemauan sendiri ataukah ditodong untuk pergi?

Jang saudara lihat bagaimana?
J: Tidak ada jang nodong.
T: Tidak ada jang nodong. Djadi, pergi ke Djogja untuk menjelamatkan diri. Siapa temannja dalam satu pesawat itu?
J: Dengan saudara Walujo.
T: Saudara Walujo. Siapa lagi?
J: Sama kawan Kusno.
T: Saudara Kusno itu dari mana?
J: Dia Adjudan.
T: Adjudan. Siapa lagi?
J: Sudah.

Pengalaman Militer Sjam
T: Saja ingin menanjakan kepada saudara saksi. Apakah saudara saksi berpengalaman atau telah mengalami dalam gerakan-gerakan militer?
J: Sedikit pernah.
T: Dimana?
J: Waktu revolusi 45.
T: Sesudah itu tidak ada lagi?
J: Tidak ada lagi.

Daftar Dewan Revolusi
T: Kenapa tidak saudara saksi jang mengetuainja [Dewan Revolusi] sedangkan saudara saksi langsung mengepalai Biro Chusus?
J: Karena saja sebagai orang jang tidak dikenal, djadi kalau waktu itu disebut, menimbulkan pertanjaan …
T: Saja ingin menanjakan kepada saudara saksi mana kira-kira jang populer itu diantara anggota Dewan Revolusi jang terdapat, mana kira-kira ini jang penurut pendapat saudara saksi, mana kira-kira jang populer, Untung dan Pardjo? Menurut penapat saudara saksi. Menurut pengalaman saudara saksi selama bergaul atau mana orang ini kira-kira jang lebih jah katakanlah jang lebih pintar atau lebih segala matjam begitu.
J: Untung lebih populer.

[Sudisman diminta mengomentari kesaksian Sjam. Ia mengoreksi

pernyataan Sjam tentang anggota Dewan Harian Politbiro PKI. Sjam menyatakan bahwa ada lima anggota – Aidit, Sudisman, Lukman, Njoto, dan Anwar Sanusi. Sudisman mengatakan Sanusi bukan anggota. Komentarnya yang lain hanyalah tentang masalah pertanggungjawaban.]

Sudisman: Walaupun saja sendiri tidak mengetahui [tentang G-30-S] tapi itu dilakukan oleh kawan saksi Sjam atas instruksi kawan Aidit dan sajapun melakukan instruksi dari kawan Aidit, maka dari segi tanggung djawab saja ambil oper tanggung djawab itu semua.

CATATAN

[1] Sepengetahuan saja, catatan dalam buku Sjam tidak pernah diumumkan ke publik.

[2] G-30-S beralih dari Penas ke rumah Sersan Sujatno di dalam pangkalan Halim di pagi hari, beberapa saat sebelum Batalyon 530 menyerahkan diri ke Kostrad di sore hari.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Asvi Warman. "Dilema Megawati di Lubang Buaya." *Kompas*, 8 Oktober 2003. http://kompas.com/kompas-cetak/0310/08/opini/611175.htm.

Agamben, Giorgio. *State of Exception*. Penerjemah Kevin Attell. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Aidit, D.N. *Kaum Tani Mengganjang Setan2 Desa*. Djakarta: Pembaruan, 1964.

Anderson, Benedict. "How Did the Generals Die?" *Indonesia* 43 (April 1987): 109-134.

------. "Tentang Pembunuhan Massal '65." Wawancara dengan Ben Abel, didistribusikan dalam jaringan email Apakabar, 24 September 1996.

------. "Petrus Dadi Ratu." *New Left Review* 3 (Mei/Juni 2000): 5-15.

------. "The World of Sergeant-Major Bungkus: Two Interviews with Benedict Anderson and Arief Djati." *Indonesia* 78 (Oktober 2004): 1-60.

Anderson, Benedict, dan Ruth McVey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1971.

------. Letter to the editor [Surat kepada redaktur]. *New York Review of Books*, 1 Juni 1978, 40-42.

Anwar, H. Rosihan, et al, eds., *Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Arnaud, Georges, dan Jacques Vergès. *Pour Djamila Bouhired*. Paris: Minuit, 1957.

Badiou, Alain. *Ethics*. London: Verso, 2001.

Bartu, Peter. "The Militia, the Military, and the People of Bobonaro." Dalam *Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*, penyunting Richard Tanter, Mark Seldon, dan Stephen Shalom. Lanham Md.: Rowman dan Littlefield, 2001.

Batatu, Hanna. *The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq*. Princeton: Princeton University Press, 1978.

Benjamin, Walter. *Reflections*. New York: Schocken, 1978.

Bourchier, David. "Conservative Political Ideology in Indonesia: A Fourth Wave?" Dalam *Indonesia Today: Challenges of History*, penyunting Grayson Lloyd dan Shannon Smith. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001.

Bourchier, David dan Vedi Hadiz, eds. *Indonesian Politics and Society: A Reader*. New York: RoutledgeCurzon, 2003.

Brackman, Arnold. *The Communist Collapse in Indonesia*. New York: Norton, 1969.

------. *Indonesia: The Gestapu Affair*. New York: American-Asian Educational Exchange, 1969.

Brands, H.W. "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno." *The Journal of American History* 76, No. 3 (Desember 1989): 785-808.

Budiawan. "When Memory Challenges History: Public Contestation of the Past on Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Journal of Social Science* 28, No. 2 (2000): 35-57.

Bunnell, Frederick. "American 'Low Posture' Policy Toward Indonesia in the Months Leading up to the 1965 'Coup.'" *Indonesia* 50 (Oktober 1990): 29-60.

Central Intelligence Agency. *Indonesia – 1965: The Coup that Backfired*. Washington: CIA, 1968. http://www.foia.cia.gov/CPE/ESAU/esau-40.pdf

Chomsky, Noam. *Year 501: The Conquest Continues*. Boston: South End Press, 1993.

Chomsky, Noam, dan Edward Herman. *The Political Economy of Human Rights, Vol. 1: The Washington Connection and Third World Fascism*. Boston: South End Press, 1979.

Cohen, Stanley. *States of Denial: Knowing about Atrocities and Mass Suffering*. Cambridge: Polity Press, 2001.

Comite Central PKI. *Jawaban PKI Kepada Kopkamtib: Pernyataan Comite Central PKI*. Jakarta, 1979. Dalam kepustakaan pribadi penulis.

Coppel, Charles A. *Indonesian Chinese in Crisis*. New York: Oxford University Press, 1983.

Cribb, Robert, ed. *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1990.

------. "How Many Deaths? Problems in the Statistics of Massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980)." Dalam *Violence in Indonesia*, penyunting Ingrid Wessel dan Georgia Wimhofer. Hamburg: Abera, 2001.

------. "Genocide in Indonesia, 1965-1966." *Journal of Genocide Research* 3, No. 2 (2001): 219-239.

Cribb, Robert, dan Colin Brown. *Modern Indonesia: A History since 1945*. London dan New York: Longman, 1995.

Crouch, Harold. "Another Look at the Indonesian 'Coup.'" *Indonesia* 15 (April 1973): 1-20.

------. *The Army and Politics in Indonesia*. Edisi revisi. Ithaca: Cornell University Press, 1988.

Cumings, Bruce. *Korea's Place in the Sun: A Modern History*. New York: Norton, 1997.

Dake, A.C.A. *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communism between Moscow and Peking 1959-1965*. The Hague: Mouton, 1973.
Darnton, Robert. "It Happened One Night." *New York Review of Books* 51, No. 11 (24 Juni 2004): 60-64.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Hakekat Pembangunan Monumen Pancasila Sakti*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
Department of State. *Indonesia, Malaysia-Singapore, Philippines*. Vol. 26 dari *Foreign Relations of the United States 1964-1968.* Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2001.
Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat. *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*. Bandung: Mahjuma, 1972.
Dinuth, Alex. *Dokumen Terpilih Sekitar G-30-S/PKI* [Selected Documents on the September 30th Movement/PKI]. Jakarta: Intermasa, 1997.
------. *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*. Jakarta: Intermasa, 1997.
Easter, David. "'Keep the Indonesian Pot Boiling': Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965—March 1966." *Cold War History* 5, No. 1 (Februari 2005): 55-73.
Editors. "Selected Documents Relating to the 'September 30th Movement' and Its Epilogue." *Indonesia* 1 (April 1966): 131-205.
Elson, Robert. *Suharto: A Political Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Evans, Bryan III. "The Influence of the United States Army on the Development of the Indonesian Army (1954-1964)." *Indonesia* 47 (April 1989): 25-48.
Evans, Richard J. *The Coming of the Third Reich*. London: Penguin, 2004.
Farid, Hilmar. "The Class Question in Indonesian Social Sciences." *Social Science and Power in Indonesia*. Penyunting Vedi Hadiz dan Daniel Dhakidae. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
Fealy, Greg. *The Release of Indonesia's Political Prisoners: Domestic vs. Foreign Policy*. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1995.
Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
------. "President Soekarno, the Army, and the Communists: The Triangle Changes Shape." *Asian Survey* 4, No. 8 (Agustus 1964): 969-980.
Fejto, François. "A Maoist in France: Jacques Vergès and *Révolution*." *The China Quarterly* 19 (Juli-September 1964): 120-127.
Fic, Victor M. *Anatomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965: The Collusion with China which Destroyed the Army Command, President Sukarno and the Communist Party of Indonesia*. New Delhi: Abhinav Publications, 2004.
First, Ruth. *Power in Africa: Political Power in Africa and the Coup d'État*. Penguin Books, 1969.
Francos, Ania dan Jean-Pierre Sereni, *Un Algérien nommé Boumediene*. Paris: Stock, 1976.
Friend, Theodore. *Indonesian Destinies*. Cambridge, MA: Harvard University Press,

2003.
Gardner, Paul. *Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of U.S.-Indonesian Relations*. Boulder: Westview, 1997.
Geertz, Clifford. *Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
------. *After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist*. Cambridge, MA: Harvard Univesity Press, 1995.
"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman A.D., 1966.
"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.
"Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmillub, Perkara Subandrio. 2 vol. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.
Glassburner, Bruce. "Political Economy and the Suharto Regime." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 14, No. 3 (November 1978): 24-51.
Green, Marshall. *Indonesia: Crisis and Transformation 1965-1968*. Washington D.C.: Compass Press, 1990.
------. Wawancara untuk serial televisi CNN *The Cold War*, National Security Archives. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/interviews/episode-15/green6.html
Hallward, Peter. *Badiou: A Subject to Truth*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
Harsutejo. *G-30-S: Sejarah yang Digelapkan*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
Hasan (nama samaran). "Autobiografi." 61 hal. naskah ketikan, 1998. Dalam kepustakaan penulis.
Hasworo, Rinto Tri. "Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G-30-S." Dalam *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*, penyunting John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid. Jakarta: Elsam, 2004.
Hering, Bob. *Soekarno: Founding Father of Indonesia, A Biography 1901-1945*. Leiden: KITLV, 2002.
Heryanto, Ariel. "Where Communism Never Dies: Violence, Trauma and Narration in the Last Cold War Capitalist Authoritarian State." *International Journal of Cultural Studies* 2, No. 2 (1999): 147-177.
Hindley, Donald. "The Indonesian Communist Party and the Conflict in the International Communist Movement." *The China Quarterly* 19 (Juli-September 1964): 99-119.
------. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. Berkeley: University of California Press, 1966.
Holtzappel, Coen. "The 30 September Movement: A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence Operation." *Journal of Contemporary Asia* 9, No. 2 (1979): 216-240.
Hughes, John. *The End of Sukarno: A Coup that Misfired, A Purge that Ran Wild*. Singapore: Archipelago Press, 2002. Dipublikasi pertama kali pada 1967 oleh

D. McCay Co.
Humbaraci, Arslan. *Algeria: A Revolution that Failed*. London: Pall Mall Press, 1966.
Immerman, Richard. *The CIA in Guatamala: The Foreign Policy of Intervention*. Austin: University of Texas Press, 1982.
Ismail, Taufiq. *Katastrofi Mendunia: Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma* [sic], *Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum, 2004.
Jenkins, David. *Suharto and his Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project, 1984.
Jones, Howard. *Indonesia: The Possible Dream*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971.
Kadane, Kathy. Letter to the editor [Surat kepada redaktur]. *New York Review of Books*, 10 April 1997.
Kahin, Audrey. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity 1926-1998*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
Kahin, George McT. *Intervention: How the United States Became Involved in Vietnam*. New York: Alfred A. Knopf, 1986.
------. *Southeast Asia: A Testament*. London: RoutledgeCurzon, 2003.
Kahin, George, dan Audrey Kahin. *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York: New Press, 1995.
Karim D.P., A. "Tiga Faktor Penyebab G-30-S." Teks pidato dibacakan pada sebuah pertemuan di Jakarta, 25 Oktober 1999.
Karni, Rahadi S., ed. dan penerjemah. *The Devious Dalang: Sukarno and the so-called Untung Putsch; Eye-witness Report by Bambang S. Widjanarko*. The Hague: Interdoc, 1974.
Katoppo, Aristides, ed. *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
Kinzer, Stephen. *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*. Hoboken, NJ: John Wiley, 2003.
Kolko, Gabriel. *Confronting the Third World: United States Foreign Policy 1945-1980*. New York: Pantheon, 1988.
Kopkamtib. *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Perintah yang Berhubungan dengan Kopkamtib 1965-1969*. Jakarta, 1970.
Latief, Kolonel Abdul. *Pledoi Kol. A. Latief, Soeharto Terlibat G30S*. Jakarta: Insitut Studi Arus Informasi, 2000.
------. "Serangan Umum 1 Maret 1949." Manuskrip ditulis di Penjara Cipinang, Jakarta, akhir 1980an.
Leclerc, Jacques. "Aidit dan Partai Pada Tahun 1950." *Prisma* 11, No. 7 (Juli 1982), 61-78.
Legge, J.D. *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1988.
------. *Sukarno: A Political Biography*. 1972. Dicetak kembali, Singapore: Archipelago Press, 2003.

Lev, Daniel. “The Political Role of the Army in Indonesia.” *Pacific Affairs* 36, No. 4 (Winter 1963-64): 349-364.
------. “Indonesia 1965: The Year of the Coup.” *Asian Survey* 6, No. 2 (Februari 1966): 103-110.
------. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1966.
Lowry, Robert. *The Armed Forces of Indonesia*. St. Leonards: Allen dan Unwin, 1996.
Luttwak, Edward. *Coup d'État: A Practical Handbook*. New York: Fawcett, 1968.
McCormick, John P. “The Dilemmas of Dictatorship: Carl Schmitt and Constitutional Emergency Powers.” Dalam *Law as Politics: Carl Schmitt's Critique of Liberalism*, penyunting David Dyzenhaus. Durham, N.C.: Duke University Press, 1998.
McCormick, Thomas. *America's Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War and After*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.
McCoy, Alfred. *Closer than Brothers: Manhood at the Philippine Military Academy*. New Haven: Yale University Press, 1999.
McGregor, Katharine E. “Commemoration of 1 October, ‘Hari Kesaktian Pancasila’: A Post Mortem Analysis?” *Asian Studies Review* 26, No. 1 (Maret 2002): 39-72.
-----. “Representing the Indonesian Past: The National Monument History Museum from Guided Democracy to the New Order,” *Indonesia* 75 (April 2003): 91-122.
McGehee, Ralph. *Deadly Deceits: My 25 Years in the CIA*. New York: Sheridan Square Publications, 1983.
McNamara, Robert. *In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam*. Dengan Brian VanDeMark. New York: Times Books, 1995.
Mackie, J.A.C. “Indonesia's Government Estates and Their Masters.” *Pacific Affairs* 34, No. 4 (Winter 1961-1962): 337-360.
------. *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.
Mandan, A.M., ed. *Subchan Z.E.: Sang Maestro, Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001.
Marnham, Patrick. “One Man and his Monsters,” *Sydney Morning Herald*, 26 Januari 2004.
Martinkus, John. *A Dirty Little War*. Sydney: Random House Australia, 2001.
Martowidjojo, Mangil. *Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967*. Jakarta: Grasindo, 1999.
Maxwell, Neville. Letter to the editor [Surat kepada redaktur]. *Journal of Contemporary Asia* 9, No. 2 (1979): 251-252.
Moehamad, Djoeir. *Memoar Seorang Sosialis*. Jakarta: Obor, 1997.
Mortimer, Rex. “Indonesia: Emigré Post-mortems on the PKI.” *Australian Outlook* 28, No. 3 (Desember 1968): 347-359.
------. *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics 1950-1965*.

Ithaca: Cornell University Press, 1974.
Mrázek, Rudolf. *Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1994.
Mueller, John. "Reassessment of American Policy: 1965-1968." Dalam *Vietnam Reconsidered*, penyunting Harrison Salisbury. New York: Harper dan Row, 1984.
Munadi. "Yang Tak Terlupakan." Jakarta, 1999. http://www.geocities.com/cerita_kami/
g30s/munadi.pdf
Munir, Muhammad. "Membela Kemerdekaan, Demokrasi, dan Keadilan." Pidato Pembelaan, Jakarta, 2 Maret 1973. International Institute of Social History, Suparna Sastra Diredja Papers, Document 286.
Nasution, A.H. *Kekaryaan ABRI*. Jakarta: Seruling Masa, 1971.
------. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Vol. 6. Jakarta: Gunung Agung, 1987.
Newfield, Jack. *Robert Kennedy: A Memoir*. New York: E.P. Dutton, 1969.
Nixon, Richard M. "Asia After Vietnam." *Foreign Affairs* 46, No. 1 (Oktober 1967): 111-125.
Notosusanto, Nugroho, dan Ismail Saleh. *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1968); *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1993.
Nurdin A. S.M. *Supardjo Direnggut Kalong*. Jakarta: Varia, 1967.
Nursuhud. *Menjingkap Tabir 'Dewan Banteng.'* Jakarta: Pembaruan, 1958.
Partai Komunis Indonesia. *40 Tahun PKI*. Jakarta: Pembaruan, 1960.
Pascal, Blaise. *Pensées.* Penerjemah A.J. Krailsheimer. London: Penguin, 1995.
Pauker, Guy. "The Role of the Military in Indonesia." Dalam *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, penyunting John H. Johnson. Princeton: Princeton University Press, 1962.
------. *The Rise and Fall of the Communist Party of* Indonesia. Santa Monica: Rand Corporation, 1969.
Porter, Gareth. *Perils of Dominance: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam*. Berkeley: University of California Press, 2005.
Pour, Julius. *Benny Moerdani: Profile of a Soldier Statesman*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Sudirman, 1993.
Prunier, Gérard. *The Rwandan Crisis: History of a Genocide*. New York: Columbia University Press, 1995.
Pusat Penerangan Angkatan Darat. *Fakta-fakta Persoalan Sekitar 'Gerakan 30 September,' Penerbitan Chusus*. No. 1-3. Jakarta, Oktober sampai Desember, 1965.
Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*. 4 vol. Jakarta: Markas Besar ABRI, 1991.
------. *Buku Panduan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, n.d., sekitar 2000.
Pye, Lucien. "Armies in the Process of Political Modernization." Dalam *The Role*

of the Military in Underdeveloped Countries, penyunting John H. Johnson. Princeton: Princeton University Press, 1962.

Quandt, William. *Revolution and Political Leadership: Algeria, 1954-1968*. Cambridge: The MIT Press, 1969.

Ransom, David. "Ford Country: Building an Elite for Indonesia." Dalam *The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid*, penyunting Steve Weissman. Palo Alto: Ramparts Press, 1975.

Reeve, David. "The Corporatist State: The Case of Golkar." Dalam *State and Civil Society in Indonesia*, penyunting Arief Budiman. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1990.

Reksosamodra, Mayor Jenderal Raden Pranoto. *Memoar*. Yogyakarta: Syarikat, 2002.

Rey, Lucien. "Dossier of the Indonesian Drama." *New Left Review* 36 (Maret-April 1966): 26-40.

Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia c.1300 to the Present*. Bloomington: Indiana University Press, 1981.

Ritchie, Donald, ed. *Rashomon*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1987.

Robinson, Geoffrey. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Ithaca: Cornell University Press, 1995.

Roosa, John. "Violence and the Suharto Regime's Wonderland." Tinjauan atas *Suharto: A Political Biography*, oleh Robert Elson, dan *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, penyunting Benedict Anderson. *Critical Asian Studies* 35 (2003): 315-323.

Roosa, John; Ratih, Ayu; dan Farid, Hilmar, eds. *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Pengalaman Korban 1965: Esai-Esai Sejarah Lisan*. Jakarta: Elsam, 2004.

Sadli, Muhammad. "Recollections of my Career." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29, No. 1 (1993): 35-51.

Saelan, H. Maulwi. *Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66*. Jakarta: Yayasan Hak Bangsa, 2001.

Schmitt, Carl. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Penerjemah G. Schwab. Cambridge: MIT Press, 1985.

Schmitz, David. *Thank God They're On Our Side: The United States and Right Wing Dictatorships, 1921-1965*. Chapel Hill: North Carolina University Press, 1999.

Scott, Peter Dale. "Exporting Military-Economic Development: America and the Overthrow of Sukarno." Dalam *Ten Years' Military Terror in Indonesia*, penyunting Malcolm Caldwell. Nottingham: Bertrand Russell Peace Foundation for Spokesman Books, 1975.

------. "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-67." *Pacific Affairs* 58, No. 2 (Summer 1985): 239-264.

------. *Coming to Jakarta: A Poem About Terror*. New York: New Directions, 1989.

------. *Deep Politics and the Death of JFK*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta, 1994.

"Selected Documents Relating to the 'September 30th Movement' and Its Epilogue." *Indonesia* 1 (April 1966): 131-204.

Sembiring, Garda, dan Harsono Sutedjo, eds. *Gerakan 30 September: Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo*. Jakarta: PEC, 2004.

Setiawan, Hersri. *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Setiyono, Budi, dan Bonnie Triyana, eds. *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara*. 2 vol. Semarang: MESIASS, 2003.

Shaplen, Robert. *Time Out of Hand: Revolution and Reaction in Southeast Asia*. New York: Harper dan Row, 1969.

Sheehan, Neil. "A Simple Man in Pursuit of Power." *New York Times Magazine*, 15 Agustus 1965: 9, 72-76.

Shoup, Laurence H., dan William Minter. *Imperial Brain Trust: The Council on Foreign Relations and United States Policy*. New York: Monthly Review Press, 1977.

Siauw Giok Tjhan. "Berbagai Catatan dari Berbagai Macam Cerita yang Dikumpulkan dalam Percakapan2 dengan Berbagai Teman Tahanan di Salemba, Rumah Tahanan Chusus, dan Nirbaya." Jakarta, naskah ketikan, tidak bertanggal, sekitar akhir 1970an.

------. (Dengan nama samaran Sigit). "The Smiling General Harus Dituntut ke Mahkamah." Ditulis pada 1979. Dicetak dan didistribusikan secara mandiri pada 1996.

Siauw Tiong Djin. *Siauw Giok Tjhan*. Jakarta: Hasta Mitra, 1999.

Simpson, Brad. "Modernizing Indonesia: United States—Indonesian Relations, 1961-1967." Disertasi Ph.D., Northwestern University, Chicago, 2003.

Soebandrio, H. *Kesaksianku tentang G-30-S*. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001.

Soeharto. *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991.

Soe Hok Gie. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES, 1989.

------. *Zaman Peralihan*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.

Soekarno. *Nationalism, Islam and Marxism*. Penerjemah K. Warouw dan P.D. Weldon. Ithaca: Modern Indonesia Project, 1970.

Soerjono. "On Musso's Return." *Indonesia* 29 (April 1980): 59-90.

Soewito, Irna. *Chairul Saleh: Tokoh Kontroversial*. Jakarta: Mutiara Rachmat, 1993.

Sophiaan, Manai. *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994.

Southwood, Julie, dan Patrick Flanagan. *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*. London: Zed Press, 1983.

Stevenson, Charles. *The End of Nowhere: American Policy toward Laos since 1954*. Boston: Beacon Press, 1972.

Subekti, Iskandar. "Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia." Pledoi. 16 Desember

1972.
------. "G-30-S Bukan Buatan PKI." 1986. International Institute of Social History, Indonesian Exiles of the Left Collection.
------. "Kata Pendahuluan." 1986. International Institute of Social History, Indonesian Exiles of the Left Collection.
Subritzky, John. *Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961-1965*. New York: St. Martins Press, 2000.
Sudisman. *Analysis of Responsibility*. Penerjemah Benedict Anderson. Melbourne: The Works Cooperative, 1975.
------. *Pledoi Sudisman; Kritik-Oto-kritik Seorang Politbiro CC PKI*. Jakarta: Teplok Press, 2000.
Sugama, Yoga. *Memori Jenderal Yoga*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1990.
"Suharto's Role in the G30S," *Tapol Bulletin*, No. 90, Desember 1988.
Sujatmiko, Iwan Gardono. "Kehancuran PKI Tahun 1965-1966." *Sejarah* 9. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia, tak bertanggal, sekitar 2001.
Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan 1965-1966*. Jakarta: KPG, 2000.
Sundhaussen, Ulf. *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
Surodjo, B.A., dan J.M.V. Soeparno. *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2002.
Sutley, Stewart. "The Indonesian 'New Order' as New Sovereign Space: Its Creation and Narrative of Self-concealment." *Space and Polity* 4, No. 2 (2000): 131-152.
Suyitno, L.S. *Pemasyarakatan Bahaya Laten Komunis dalam Rangka Meningkatkan Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Ketahanan Nasional, 1997.
Taylor, Charles. *Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Todorov, Tzvetan. *The Poetics of Prose*. Ithaca: Cornell University Press, 1977.
Toer, Pramoedya Ananta, dan S.A. Prasetyo, eds. *Memoar Oei Tjoe Tat*. Jakarta: Hasta Mitra, 1995.
Tovar, B. Hugh. "The Indonesian Crisis of 1965-1966: A Retrospective." *The International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 7, No. 3 (Fall 1994): 313-338.
"The Trial of D.N. Aidit," *Tapol Bulletin*, No. 41-42, September-Oktober 1980.
Tripp, Charles. *A History of Iraq*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Trouillot, Michel-Ralph. *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Boston: Beacon Press, 1995.
Utrecht, Ernst. "An Attempt to Corrupt Indonesian History." Tinjauan atas *In the Spirit of the Red Banteng* oleh Antonie C.A. Dake, dan *Devious Dalang*, penyunting dan penerjemah Rahadi S. Karni. *Journal of Contemporary Asia* 5,

No. 1 (1975): 99-102.
Van der Kroef, Justus. *The Communist Party of Indonesia: Its History, Program and Tactics*. Vancouver: University of British Columbia, 1965.
------. "Gestapu in Indonesia." *Orbis* 10 (Summer 1966): 458-487.
------. "Indonesia: The Battle of the 'Old' and the 'New Order.'" *Australian Outlook* 21 (April 1967): 18-43.
------. "Sukarno's Fall." *Orbis* 11 (Summer 1967): 491-531.
------. "Indonesian Communism since the 1965 Coup." *Pacific Affairs* 43, No. 1 (Spring 1970): 34-60.
------. *Indonesia After Sukarno*. Vancouver: University of British Columbia Press, 1971.
------. "Interpretations of the 1965 Coup in Indonesia." *Pacific Affairs* 43, No. 4 (1971): 557-577.
------. "Origin of the 1965 Coup in Indonesia: Probabilities and Alternatives." *Journal of Southeast Asian Studies* 3, No. 2 (1972): 277-298.
van Dijk, C. *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam Movement in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
van Klinken, Gerry. "The Battle for History after Suharto." *Critical Asian Studies* 33, No. 3 (September 2001): 323-350.
Wertheim, W.F. "Indonesia Before and After the Untung Coup." *Pacific Affairs* 39, No. 1-2 (Spring-Summer 1966): 115-127.
------. "Suharto and the Untung Coup – The Missing Link." *Journal of Contemporary Asia* 1, No. 2 (Winter 1970): 50-57.
------. "Whose Plot? – New Light on the 1965 Events." *Journal of Contemporary Asia* 9, No. 2 (1979): 197-215.
------. "Indonesia's Hidden History." Dalam *Pramoedya Ananta Toer 70 Tahun: Essays to Honour Pramoedya Ananta Toer's 70th Year*, penyunting Bob Hering. Yayasan Kabar Seberang, 1995.
Wieringa, Saskia. *Sexual Politics in Indonesia*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002.
Winters, Jeffrey. *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State*. Ithaca: Cornell University Press, 1996.
Wirahadikusumah, Umar. *Dari Peristiwa ke Peristiwa*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Jayakarta, 1983.
Yani, Amelia. *Profil Seorang Prajurit TNI*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
Žižek, Slavoj. "The Detective and the Analyst." *Literature and Psychology* 36, No. 4 (1990): 27-46.
------. "What Rumsfeld Doesn't Know That He Knows About Abu Ghraib." *In These Times*, 21 Mei 2004. http://www.inthesetimes.com/site/main/article/747/

CATATAN MAHMILUB

Berkas Acara Pengadilan yang Tidak Dipublikasikan di Museum TNI Satria Mandala, Dinas Dokumentasi, Jakarta

Pengadilan Kol. Abdul Latief, 1978.
Pengadilan R. Soegeng Soetarto, 1973.
Pengadilan Sudisman, 1967.
Pengadilan Brig. Gen. M.A. Supardjo, 1967.
Pengadilan Supono [Pono], 1972.

ARSIP

Hoover Institution Archives, Stanford University, California
  Guy Pauker Papers
  Howard P. Jones Papers
International Institute of Social History, Amsterdam
  Indonesian Exiles of the Left Collection
  Suparna Sastra Diredja Papers

WAWANCARA LISAN

Kecuali yang diberi catatan, saya melakukan dan merekam sendiri wawancara, dan nama orang-orang yang diwawancarai adalah nama asli. Transkripsi maupun rekaman atas wawancara-wawancara yang direkam, disimpan dalam arsip lisan Institut Sejarah Sosial Indonesia di Jakarta. Wawancara-wawancara yang diberi tanda asterisk (*) tidak direkam.

Aleida, Martin. 8 Agustus 2004, Jakarta.
Atmodjo, Heru. 11 Juni 2000; 14 Desember 2002; 19 Desember 2004, Jakarta.
Bismar. 1 April 2001, Jakarta.*
Bungkus. 12 Mei 2001, Besuki.
Dana, I Wayan. 6 Januari 2001, Denpasar.
Djayadi (nama samaran). 1 April 2001, Tasikmalaya.
Haryatna (nama samaran). 4 April 2001, Tasikmalaya.
Isak, Joesoef. 20 Desember 2003, Jakarta.
Juwono (nama samaran). Wawancara oleh Rahadian Permadi. 19 Juni 2000, Jakarta.
Kardi, Muhammad Sidik. 29 Mei 2000, Jakarta.
Mujiyono (nama samaran). 16 Juni 2000, Jakarta.
Oemiyah. 24 Juli 2005, Yogyakarta.*
Oey Hay Djoen. 14 Juli 2001; 24 Januari 2002, Jakarta.
Poniti. 24 Agustus 2000, Kapal.
Pugeg. 3 September 2000, Denpasar.
Puger, Ibu. 11 Januari 2001, Denpasar.
Reti, I Ketut. 7 Januari 2001, Denpasar.
Rewang. 27 Juni 2001, Solo.
Rusyana (nama samaran). 11 Juli 2001, Jakarta.

Slamet. Wawancara oleh Razif. 28 Januari 2003, Jakarta.
Subowo (nama samaran), 26 Januari 2002, Jakarta.
Sucipto. 4 September 2003, Jakarta.
Sugiarto. 2001, Jakarta.*
Sukrisno (nama samaran). 14 Juli 2005, Jakarta.
Suwira, Kompiyang. 2 September 2000, Denpasar.
Syukur, Abdul. Wawancara oleh Razif. 22 Mei 2000, Bandung.
Tan Swie Ling. 16 Maret 2001, Jakarta.
Tiara, Ibu (nama samaran). 15 Agustus 2000, Denpasar.
Wayan (nama samaran). 5 Agustus 2004, Ubud.*

INDEKS

Buku ini terpilih sebagai salah satu dari tiga buku terbaik di bidang ilmu-ilmu sosial dalam International Convention of Asian Scholars, Kuala Lumpur, 2007

DITULIS DENGAN SANGAT BAIK DAN MENGASYIKKAN, inilah upaya ilmiah pertama dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa untuk mengkaji secara serius bukti-bukti yang berkenaan dengan teka-teki paling penting dalam sejarah Indonesia, kudeta 30 September 1965.

ROBERT CRIBB, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

Tiga pencapaian mengagumkan yang diraih John Roosa adalah menyoroti bukti baru empat puluh tahun setelah peristiwa, memutar balikkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah diterima umum, dan melakukan ini semua dalam gaya mencekam ala kisah detektif.

GERRY VAN KLINKEN, *BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE*

Buku John Roosa yang menggugah dan berdasar pada penelitian menyeluruh menyajikan bukti padu untuk mendukung interpretasi-interpretasi yang sebelumnya didasarkan hanya pada spekulasi. Buku ini merupakan sumbangan yang penting bagi kepustakaan tentang kudeta di Indonesia.

HAROLD CROUCH, *REVIEW OF POLITICS*

Ini merupakan bahan bacaan penting bagi pelajar sejarah modern Indonesia, dan bagi siapapun yang tertarik pada kekerasan politik, peran militer dalam politik, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

GEOFFREY ROBINSON, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES

Buku ini merupakan catatan paling detil dan dengan penelitian terbaik tentang kejadian-kejadian 1965 yang pernah ditulis. Siapa pun yang berniat memahami kejadian-kejadian yang masih menebar mendung di atas bumi Indonesia dan sedikit dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia akan memperoleh manfaat sangat besar dengan membaca buku kelas satu ini.

CARMEL BUDIARDJO, *TAPOL BULLETIN*

Sumbangan yang luar biasa berharga … ini merupakan masukan akademik pertama yang signifikan tentang masalah yang dibicarakan dalam jangka waktu tertentu, dan cukup memukau dibaca.

VEDI HADIZ, *PACIFIC AFFAIRS*

John Roosa adalah Assistant Professor di Departemen Sejarah, University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Ia salah satu penyunting buku kumpulan esai sejarah lisan *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir*.

ISBN (13) 978-979-17579-0-4
ISBN (10) 979-17579-0-9



Institut Sejarah Sosial Indonesia
Indonesian Institute of Social History



